BAGIAN ANGGARAN 010

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI *AUDITED*

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7 JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 3450038
WEBSITE: http://kemendagri.go.id

BAGIAN ANGGARAN 010

LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

AUDITED

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 9 Mei 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	xv
Pernyataan Telah Direviu	xvi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	29
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	86
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	133
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	168
F. Pengungkapan Penting Lainnya	181
G. Penutup	186
VI. Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel 1	:	Capaian Output Strategis Kemendagri s.d. 31 Desember 2021	11
Tabel 2	:	Pagu dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19 s.d. 31 Desember 2021	14
Tabel 3	:	Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I	17
Tabel 4	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	23
Tabel 5	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	26
Tabel 6	:	Kriteria Kualitas Piutang	28
Tabel 7	:	Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2021	29
Tabel 8	:	Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	30
Tabel 9	:	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Jumlah Rincian Output serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada masing-masing Prioritas Nasional	30
Tabel 10	:	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan 31 Desember 2021 per MAP	31
Tabel 11	:	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan 31 Desember 2021 per Eselon I	31
Tabel 12	:	Perbandingan Realisasi PNBP s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per Eselon I	32
Tabel 13	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2021	40
Tabel 14	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19 s.d. 31 Desember 2021	41
Tabel 15	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program s.d. 31 Desember 2021	42
Tabel 16	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto s.d. 31 Desember 2021 per Unit Eselon I	43

Tabel 17	:	Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	43
Tabel 18	:	Perbandingan Realisasi Belanja Netto s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	44
Tabel 19	:	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	44
Tabel 20	:	Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	45
Tabel 21	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang COVID-19 s.d. 31 Desember 2021	46
Tabel 22	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	46
Tabel 23	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	47
Tabel 24	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	47
Tabel 25	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	48
Tabel 26	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	48
Tabel 27	:	Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	49
Tabel 28	:	Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	49
Tabel 29	:	Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan per Eselon I s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	50
Tabel 30	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Ditjen Bina Bangda s.d. 31 Desember 2021	78
Tabel 31	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Mendukung Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Ditjen Dukcapil s.d. 31 Desember 2021	79

Tabel 32	:	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	86
Tabel 33	:	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	87
Tabel 34	:	Mutasi Tambah dan Kurang Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021	87
Tabel 35	:	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	88
Tabel 36	:	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	88
Tabel 37	:	Mutasi Kas Lainnya dan Setara Kas	89
Tabel 38	:	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	89
Tabel 39	:	Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap	90
Tabel 40	:	Mutasi Belanja Dibayar Dimuka	91
Tabel 41	:	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I	92
Tabel 42	:	Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima	92
Tabel 43	:	Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I	94
Tabel 44	:	Rincian Piutang Bukan Pajak per Transaksi	94
Tabel 45	:	Mutasi Tambah dan Kurang Piutang per 31 Desember 2021	95
Tabel 46	:	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP	99
Tabel 47	:	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I	100
Tabel 48	:	Mutasi Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2021	100
Tabel 49	:	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	101
Tabel 50	:	Rincian Persediaan	103
Tabel 51	:	Rincian Persediaan per Unit Eselon I	103
Tabel 52	:	Mutasi Persediaan	104
Tabel 53	:	Rincian Tanah per Unit Eselon I	105
Tabel 54	:	Rincian Mutasi Tanah per Unit Eselon I	105

Tabel 55	:	Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I	107
Tabel 56	:	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	108
Tabel 57	:	Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I	111
Tabel 58	:	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	112
Tabel 59	:	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I	114
Tabel 60	:	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	115
Tabel 61	:	Hubungan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan Mutasi Tambah Aset per Unit Eselon I	115
Tabel 62	:	Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I	116
Tabel 63	:	Mutasi Aset Tetap Lainnya	117
Tabel 64	:	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I	119
Tabel 65	:	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	119
Tabel 66	:	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	119
Tabel 67	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	121
Tabel 68	:	Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I	121
Tabel 69	:	Mutasi Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021	122
Tabel 70	:	Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I	124
Tabel 71	:	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021	124
Tabel 72	:	Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	125
Tabel 73	:	Mutasi Aset Tak Berwujud	125
Tabel 74	:	Rincian Aset Lain-lain Menurut Uraian Akun per 31 Desember 2021	127
Tabel 75	:	Rincian Aset Lain-lain per Eselon I	128
Tabel 76	:	Mutasi Aset Lain-lain	128
Tabel 77	:	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	130
Tabel 78	:	Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I	131
Tabel 79	:	Pendapatan Diterima Dimuka	131

Tabel 80	:	Perbandingan Rincian PNBP Tahun 2021 dengan Tahun 2020	133
Tabel 81	:	Selisih PNBP antara Basis Kas dan Basis Akrual	134
Tabel 82	:	Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2021 dengan Tahun 2020	137
Tabel 83	:	Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrual	138
Tabel 84	:	Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2021 dengan 2020	141
Tabel 85	:	Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2021	142
Tabel 86	:	Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan Dengan Beban Persediaan	143
Tabel 87	:	Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dengan Tahun 2020	144
Tabel 88	:	Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrual	145
Tabel 89	:	Selisih Beban Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 antara Basis Kas dan Basis Akrual	149
Tabel 90	:	Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dengan tahun 2020	150
Tabel 91	:	Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual	151
Tabel 92	:	Penyajian Beban Pemeliharaan	153
Tabel 93	:	Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan	154
Tabel 94	:	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dengan Tahun 2020	155
Tabel 95	:	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual	155
Tabel 96	:	Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dengan Tahun 2020	157
Tabel 97	:	Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	157
Tabel 98	:	Penjelasan Selisih Barang Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	158

Tabel 99	:	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2020	159
Tabel 100	:	Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	160
Tabel 101	:	Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan	161
Tabel 102	:	Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	162
Tabel 103	:	Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi	162
Tabel 104	:	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2021 dengan Tahun 2020	163
Tabel 105	:	Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2021 dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	164
Tabel 106	:	Penjelasan Selisih Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	164
Tabel 107	:	Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Opersional Tahun 2021 dengan Tahun 2020	164
Tabel 108	:	Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Akrual	165
Tabel 109	:	Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Akrual	167
Tabel 110		Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021	169
Tabel 111		Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2021	171
Tabel 112		Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2021	172
Tabel 113		Koreksi Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021	173
Tabel 114		Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2021	174

Tabel 115	Rekapitulasi Progres Penyelesaian Likuidasi Satker Inaktif pada Tahun 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020	182
Tabel 116	Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat	183

DAFTAR GRAFIK

			Hal
Grafik 1	:	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Netto T.A. 2021 dan T.A 2020	42

DAFTAR LAMPIRAN

A. DAFTAR LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK

Lampiran I	:	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Per Satker di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Sampai Dengan 31 Desember 2021
Lampiran II	:	Rincian Selisih Pagu Awal Per Satker Kementerian Dalam Negeri Sampai Dengan 31 Desember 2021
Lampiran III	:	Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Kegiatan yang Menjadi Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Sampai Dengan 31 Desember 2021
Lampiran IV	:	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kementerian Dalam Negeri Sampai Dengan 31 Desember 2021
Lampiran V	:	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Dalam Negeri Sampai Dengan 31 Desember 2021
Lampiran VI	:	Ikhtisar Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Lampiran VII	:	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas Di Bendahara Penerimaan, Serta Kas Lainnya Dan Setara Kas Per Satker Per 31 Desember 2021
Lampiran VIII	:	Rincian Penyetoran Kas
Lampiran IX	:	Desa Yang Belum Menyerahkan Laporan
Lampiran X	:	Progres Penyelesaian dan Umur Piutang Bukan Pajak
Lampiran XI	:	Progres Penyelesaian Pajak dan Umur Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Lampiran XII	:	Rincian Persediaan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Menurut Jenis Transaksi Selama Periode 1 Januari 2021 S.D. 31 Desember 2021 Kementerian Dalam Negeri
Lampiran XIII	:	Rekapitulasi Persediaan Per Satker Menurut Akun

Lampiran XIV	:	Rincian Mutasi Persediaan Per Eselon I
Lampiran XV	:	Rincian Mutasi Persediaan Per Akun
Lampiran XVI	:	Rincian Mutasi Tanah Per Unit Eselon I
Lampiran XVII	:	Rekapitulasi Saldo Aset Tetap Dan Akumulasi Penyusutan Per Satuan Kerja Per 31 Desember 2021
Lampiran XVIII	:	Rincian Aset Tetap/ Aset Lainnya Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Sampai Dengan 31 Desember 2021
Lampiran XIX	:	Rincian Mutasi Peralatan Dan Mesin Per Unit Eselon I
Lampiran XX	:	Rincian Pembelian (101) Peralatan Dan Mesin Per Satker
Lampiran XXI	:	Hubungan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Dengan Mutasi Tambah Aset Per Unit Eselon I
Lampiran XXII	:	Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin
Lampiran XXIII	:	Rincian Hibah Keluar (303) Peralatan dan Mesin
Lampiran XXIV	:	Rincian Mutasi Gedung Dan Bangunan Per Unit Eselon I
Lampiran XXV	:	Hubungan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Dengan Mutasi Tambah Aset Per Unit Eselon I
Lampiran XXVI	:	Rincian Mutasi Jalan Irigasi Dan Jaringan Per Unit Eselon I
Lampiran XXVII	:	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Lampiran XXVIII	:	Hubungan Realisasi Belanja Modal Lainnya Dengan Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya Dan Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I

Lampiran XXIX : Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I

Lampiran XXX : Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker

Lampiran XXXI : Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I

Lampiran XXXII : Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Serta Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Per Satuan Kerja Per 31 Desember 2021

Lampiran XXXIII : Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I

Lampiran XXXIV : Penghapusan (BMN Yang Dihentikan) (391) Aset Lain-Lain

Lampiran XXXV : Transfer Keluar (392) Aset Lain-Lain

Lampiran XXXVI : Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

Lampiran XXXVII : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Lampiran XXXVIII : Rincian Pendapatan Sewa Diterima Di Muka Per Satker

Lampiran XXXIX : Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Lampiran XL : Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Lampiran XLI : Rincian Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi

Lampiran XLII : Rincian Koreksi Lain-lain

Lampiran XLIII : Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Lampiran XLIV : Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Yang Diterima Kemendagri Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Untuk Posisi Sampai

Dengan 31 Desember 2021

Lampiran XLV : Rekapitulasi Satker Inaktif Bersaldo Yang Dilikuidasi Tahun 2021

Lampiran XLVI : Rekapitulasi Satker Inaktif Yang Saldonya Dialihkan ke Satker Pusat

Lampiran XLVII : Rekapitulasi Monitoring Rekonsiliasi Internal

Lampiran XLVIII : Rekapitulasi Jurnal Tidak Lazim

Lampiran XLIX Rekapitulasi Perbedaan Tanggal Buku

Lampiran L Data Rekening Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri

B. DAFTAR LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

Lampiran Neraca Percobaan Akrual Tingkat Kemendagri Per Desember 2021

Lampiran Neraca Percobaan Kas Tingkat Kemendagri Per Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka COVID-19 Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dan /Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Nomor Register/Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Nomor Register/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Lampiran Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat KL Periode TA 2021 *Unaudited*

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 *Audited* yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sepanjang sesuai dengan Surat Pertangungjawaban Mutlak dari Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan selaku Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 9 Mei 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2021 *(UNAUDITED)*

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun 2021 *(unaudited)* berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 18 Februari 2022
Inspektur Jenderal,

Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19621109 198902 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp128.414.847.075,00 atau mencapai 182,54% dari estimasi pendapatan sebesar Rp70.348.045.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.909.033.451.195,00 atau mencapai 99,13% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.934.557.569.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.437.485.279.700,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp291.217.196.268,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp15.084.508.537.841,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp595.943.541,00 dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya) sebesar Rp61.163.602.050,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp75.243.288.653,00 dan Rp15.362.241.991.047,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp97.916.234.721,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.093.598.775.810,00

sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp2.995.682.541.089,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp14.847.006.392,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp2.980.835.534.697,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp15.409.886.743.539,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp2.980.835.534.697,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar (Rp8.193.961.313,00) dan transaksi antar entitas sebesar Rp2.941.384.743.518,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.362.241.991.047,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode pelaporan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	s.d. 31 Desember 2021		% thd Angg	s.d. 31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	70.348.045.000	128.414.847.075	182,54	87.114.569.263
JUMLAH PENDAPATAN		**70.348.045.000**	**128.414.847.075**	**182,54**	**87.114.569.263**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	753.178.241.000	750.064.824.380	99,59	712.869.691.512
Belanja Barang	B.4	2.012.704.597.000	1.990.432.217.337	98,89	1.879.523.513.652
Belanja Modal	B.5	168.674.731.000	168.536.409.478	99,92	154.199.869.685
JUMLAH BELANJA		**2.934.557.569.000**	**2.909.033.451.195**	**99,13**	**2.746.593.074.849**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	70.348.045.000	128.414.847.075	(58.066.802.075)	182,54	39.750.436.000	87.114.569.263	(47.364.133.263)	219,15
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	70.348.045.000	128.414.847.075	(58.066.802.075)	182,54	39.750.436.000	87.114.569.263	(47.364.133.263)	219,15
B	BELANJA								
	BELANJA PEGAWAI	753.178.241.000	750.064.824.380	3.113.416.620	99,59	723.044.721.000	712.869.691.512	10.175.029.488	98,59
	BELANJA BARANG	2.012.704.597.000	1.990.432.217.337	22.272.379.663	98,89	1.898.634.314.000	1.879.523.513.652	19.110.800.348	98,99
	BELANJA MODAL	168.674.731.000	168.536.409.478	138.321.522	99,92	156.347.198.000	154.199.869.685	2.147.328.315	98,63
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.934.557.569.000	2.909.033.451.195	25.524.117.805	99,13	2.778.026.233.000	2.746.593.074.849	31.433.158.151	98,87
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 9 Mei 2022

Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian

NERACA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	266.061.283	48.500.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	2.086.080.000	4.383.550.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.475.797	182.578.532
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	599.541.500	899.400.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	37.277.412	37.201.493
Piutang Bukan Pajak	C.6	16.545.663.482	25.191.052.174
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(6.242.751.442)	(8.276.187.140)
Bagian Lancar TP/TGR	C.8	18.943.667.806	18.348.479.574
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.9	(18.345.983.015)	(18.343.007.074)
Persediaan	C.10	277.326.163.445	399.784.694.037
JUMLAH ASET LANCAR		**291.217.196.268**	**422.256.261.596**
ASET TETAP			
Tanah	C.11	11.995.626.099.493	11.983.889.739.493
Peralatan dan Mesin	C.12	3.319.292.929.878	3.160.929.282.184
Gedung dan Bangunan	C.13	2.789.720.379.051	2.757.603.421.959
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.14	277.089.315.888	270.623.013.752
Aset Tetap Lainnya	C.15	141.180.030.592	182.391.634.955
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.16	61.214.356.904	32.921.865.346
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	(3.499.614.573.965)	(3.321.310.249.433)
JUMLAH ASET TETAP		**15.084.508.537.841**	**15.067.048.708.256**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	598.938.232	4.124.998
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.19	(2.994.691)	(20.625)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**595.943.541**	**4.104.373**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	766.947.084.645	744.102.165.510
Aset Lain-Lain	C.22	117.988.302.849	195.507.375.570
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(823.771.785.444)	(883.638.460.993)
JUMLAH ASET LAINNYA		**61.163.602.050**	**55.971.080.087**
JUMLAH ASET		**15.437.485.279.700**	**15.545.280.154.312**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	65.458.224.733	132.435.037.840
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	9.519.002.637	2.909.872.933
Uang Muka dari KPPN	C.26	266.061.283	48.500.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**75.243.288.653**	**135.393.410.773**
JUMLAH KEWAJIBAN		**75.243.288.653**	**135.393.410.773**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	15.362.241.991.047	15.409.886.743.539
JUMLAH EKUITAS		**15.362.241.991.047**	**15.409.886.743.539**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**15.437.485.279.700**	**15.545.280.154.312**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2021	2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	266.061.283	48.500.000	217.561.283	448,58
Kas di Bendahara Penerimaan	2.086.080.000	4.383.550.000	(2.297.470.000)	(52,41)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.475.797	182.578.532	(181.102.735)	(99,19)
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	599.541.500	899.400.000	(299.858.500)	(33,34)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	37.277.412	37.201.493	75.919	0,20
Piutang Bukan Pajak	16.545.663.482	25.191.052.174	(8.645.388.692)	(34,32)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(6.242.751.442)	(8.276.187.140)	2.033.435.698	(24,57)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	10.302.912.040	16.914.865.034	(6.611.952.994)	(39,09)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	18.943.667.806	18.348.479.574	595.188.232	3,24
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(18.345.983.015)	(18.343.007.074)	(2.975.941)	0,00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	597.684.791	5.472.500	592.212.291	10.821,60
Persediaan	277.326.163.445	399.784.694.037	(122.458.530.592)	(30,63)
JUMLAH ASET LANCAR	**291.217.196.268**	**422.256.261.596**	**(131.039.065.328)**	**(31,03)**
ASET TETAP				
Tanah	11.995.626.099.493	11.983.889.739.493	11.736.360.000	0,10
Peralatan dan Mesin	3.319.292.929.878	3.160.929.282.184	158.363.647.694	5,01
Gedung dan Bangunan	2.789.720.379.051	2.757.603.421.959	32.116.957.092	1,16
Jalan Irigasi dan Jaringan	277.089.315.888	270.623.013.752	6.466.302.136	2,39
Aset Tetap Lainnya	141.180.030.592	182.391.634.955	(41.211.604.363)	(22,60)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.214.356.904	32.921.865.346	28.292.491.558	85,94
Akumulasi Penyusutan	(3.499.614.573.965)	(3.321.310.249.433)	(178.304.324.532)	5,37
JUMLAH ASET TETAP	**15.084.508.537.841**	**15.067.048.708.256**	**17.459.829.585**	**0,12**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	598.938.232	4.124.998	594.813.234	14.419,72
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	(2.994.691)	(20.625)	(2.974.066)	14.419,71
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	595.943.541	4.104.373	591.839.168	14.419,72
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**595.943.541**	**4.104.373**	**591.839.168**	**14.419,72**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2021	2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	766.947.084.645	744.102.165.510	22.844.919.135	3,07
Aset Lain-lain	117.988.302.849	195.507.375.570	(77.519.072.721)	(39,65)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(823.771.785.444)	(883.638.460.993)	59.866.675.549	(6,78)
JUMLAH ASET LAINNYA	**61.163.602.050**	**55.971.080.087**	**5.192.521.963**	**9,28**
JUMLAH ASET	**15.437.485.279.700**	**15.545.280.154.312**	**(107.794.874.612)**	**(0,69)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Kepada Pihak Ketiga	65.458.224.733	132.435.037.840	(66.976.813.107)	(50,57)
Pendapatan Diterima Dimuka	9.519.002.637	2.909.872.933	6.609.129.704	227,13
Uang Muka dari KPPN	266.061.283	48.500.000	217.561.283	448,58
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**75.243.288.653**	**135.393.410.773**	**(60.150.122.120)**	**(44,43)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**75.243.288.653**	**135.393.410.773**	**(60.150.122.120)**	**(44,43)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	15.362.241.911.047	15.409.886.743.539	(47.644.832.492)	(0,31)
JUMLAH EKUITAS	**15.362.241.911.047**	**15.409.886.743.539**	**(47.644.832.492)**	**(0,31)**
JUMLAH EKUITAS	**15.362.241.911.047**	**15.409.886.743.539**	**(47.644.832.492)**	**(0,31)**
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	**15.437.485.199.700**	**15.545.280.154.312**	**(107.794.954.612)**	**(0,69)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 9 Mei 2022
Menteri Dalam Negeri,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI ★ SEKRETARIAT JENDERAL ★ REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Tito Karnavian

LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	97.916.234.721	45.956.776.989
JUMLAH PENDAPATAN		**97.916.234.721**	**45.956.776.989**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	758.559.128.673	718.963.520.909
Beban Persediaan	D.3	33.545.694.902	31.159.408.769
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.307.141.093.169	1.192.122.521.963
Beban Pemeliharaan	D.5	115.279.789.119	117.311.713.676
Beban Perjalanan Dinas	D.6	325.360.093.568	184.569.638.436
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	293.134.958.271	414.935.627.622
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	258.026.149.601	237.994.911.632
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	2.551.868.507	10.969.992.920
JUMLAH BEBAN		**3.093.598.775.810**	**2.908.027.335.927**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(2.995.682.541.089)**	**(2.862.070.558.938)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.676.951.542	943.124.602
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.280.065.156	7.425.981.390
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		14.852.607.007	38.913.269.106
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		402.487.001	4.421.982.754
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**14.847.006.392**	**28.008.429.564**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(2.980.835.534.697)**	**(2.834.062.129.374)**
POS LUAR BIASA	D.11		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		**(2.980.835.534.697)**	**(2.834.062.129.374)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2021	2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0,00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0,00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0,00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0,00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0,00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0,00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0,00**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0,00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	97.916.234.721	45.956.776.989	51.959.457.732	113,06
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**97.916.234.721**	**45.956.776.989**	**51.959.457.732**	**113,06**
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**97.916.234.721**	**45.956.776.989**	**51.959.457.732**	**113,06**
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	758.559.128.673	718.963.520.909	39.595.607.764	5,51
Beban Persediaan	33.545.694.902	31.159.408.769	2.386.286.133	7,66
Beban Barang dan Jasa	1.307.141.093.169	1.192.122.521.963	115.018.571.206	9,65
Beban Pemeliharaan	115.279.789.119	117.311.713.676	(2.031.924.557)	(1,73)
Beban Perjalanan Dinas	325.360.093.568	184.569.638.436	140.790.455.132	76,28
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	293.134.958.271	414.935.627.622	(121.800.669.351)	(29,35)
Beban Bunga	0	0	0	0,00
Beban Subsidi	0	0	0	0,00
Beban Hibah	0	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	258.026.149.601	237.994.911.632	20.031.237.969	8,42
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.551.868.507	10.969.992.920	(8.418.124.413)	(76,74)
Beban Lain-lain	0	0	0	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**3.093.598.775.810**	**2.908.027.335.927**	**185.571.439.883**	**6,38**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(2.995.682.541.089)**	**(2.862.070.558.938)**	**(133.611.982.151)**	**4,67**
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	**396.886.386**	**(6.482.856.788)**	**6.879.743.174**	**(106,12)**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.676.951.542	943.124.602	733.826.940	77,81
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.280.065.156	7.425.981.390	(6.145.916.234)	(82,76)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2021	2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**14.450.120.006**	**34.491.286.352**	**(20.041.166.346)**	**(58,11)**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.852.607.007	38.913.269.106	(24.060.662.099)	(61,83)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	402.487.001	4.421.982.754	(4.019.495.753)	(90,90)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**14.847.006.392**	**28.008.429.564**	**(13.161.423.172)**	**(46,99)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	**(2.980.835.534.697)**	**(2.834.062.129.374)**	**(146.773.405.323)**	**5,179**
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0,00
POS LUAR BIASA	**0**	**0**	**0**	**0,00**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(2.980.835.534.697)**	**(2.834.062.129.374)**	**(146.773.405.323)**	**5,179**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 9 Mei 2022
Menteri Dalam Negeri,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Tito Karnavian

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	S.d. 31 Desember 2021	S.d. 31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1	15.409.886.743.539	15.300.741.211.932
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.980.835.534.697)	(2.834.062.129.374)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	3.426.500	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	(7.502.438.457)	(10.834.469.324)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	-	72.280.893.102
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	(2.651.553.307)	211.462.943.482
Koreksi Lain-lain	E.3.5	1.956.603.951	9.204.597
JUMLAH		**(8.193.961.313)**	**272.918.571.857**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.941.384.743.518	2.670.289.089.124
EKUITAS AKHIR	E.5	**15.362.241.991.047**	**15.409.886.743.539**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2021	2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	**15.409.886.743.539**	**15.300.741.211.932**	**109.145.531.607**	**0,71**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(2.980.835.534.697)**	**(2.834.062.129.374)**	**(146.773.405.323)**	**5,18**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /	**0**	**0**	**0**	**0,00**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**(8.193.961.313)**	**272.918.571.857**	**(281.112.533.170)**	**(103,00)**
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	3.426.500	0	0	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	(7.502.438.457)	(10.834.469.324)	3.332.030.867	(30,75)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	72.280.893.102	(72.280.893.102)	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(2.651.553.307)	211.462.943.482	(214.114.496.789)	(101,25)
Lain-lain	1.956.603.951	9.204.597	1.947.399.354	21.156,8
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**2.941.384.743.518**	**2.670.289.089.124**	**271.095.654.394**	**10,15**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**(47.644.752.492)**	**109.145.531.607**	**(156.790.284.099)**	**(143,65)**
EKUITAS AKHIR	**15.362.241.991.047**	**15.409.886.743.539**	**(47.644.752.492)**	**(0,31)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 9 Mei 2022

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Dalam Negeri

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri mengatur tugas Kementerian Dalam Negeri dalam hal menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta

kondisi objektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Visi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu *"**Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".***

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efsien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan

inovasi (T2).

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, yaitu:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Indeks Demokrasi Indonesia.
      2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
      3) Indeks Kinerja Ormas.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Eknomi.
      4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
      2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2 ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
      2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.

3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8) Jumlah kelembagaan penelititan dan pengembangan di derah dengan kategori "utama".
9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3 ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur

ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
   1) Indeks Pengawasan Internal.
   2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri memiliki sembilan capaian output strategis pada Tahun 2021 yang dilaksanakan pada satker Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tabel capaian output strategis sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1

Capaian Output Strategis Kemendagri s.d. 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Keg	KRO/ RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data SAS/Sakti)			
					Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	%	Satuan
1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	**6145**	**UBA**	**Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**							
		6145	UBA001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1.089.475.000	1.087.417.512	99,81	15	15	100,00	Daerah (Prov/Kab/ Kota)
2	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	**6145**	**QEI**	**Bantuan Lembaga**							
		6145	QEI001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	126.376.418.000	126.376.418.000	100,00	9	9	100,00	Lembaga
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	**1234**	**FBA**	**Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**							
		1234	FBA001	Fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial seluruh Indonesia	65.000.000	64.896.900	99,84	34	34	100,00	Daerah (Prov/Kab/ Kota)
4	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	**1234**	**ABC**	**Kebijakan Bidang Politik**							
		1234	ABC001	Kebijakan/regulasi/pedoman bidang kewaspadaan Nasional dan konflik sosial	215.000.000	214.950.950	99,98	2	2	100,00	Rekomendasi Kebijakan
5	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	**1234**	**UBA**	**Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**							
		1234	UBA001	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	495.994.000	495.948.185	99,99	21	61	290,48	PRESENTASE
6	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**1269**	**QAA**	**Pelayanan Publik kepada masyarakat**							
		1269	QAA004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	464.085.000	443.706.350	95,61	220.000	1.719.210	781,46	Orang
7	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**1269**	**BAA**	**Pelayanan Publik kepada masyarakat**							
		1269	BAA001	Blangko KTP-el untuk daerah	161.249.165.000	161.249.165.000	100,00	15.188.059	15.188.059	100,00	Orang
8	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**1268**	**FAB**	**Sistem Informasi Pemerintahan**							
		1268	FAB001	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	160.148.552.000	160.143.952.430	99,99	1	1	100,00	Sistem Informasi
9	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**1268**	**FBA**	**Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**							
		1268	FBA001	Fasilitasi Online Layanan Jaringan Komunikasi Data	256.789.986.000	256.784.152.255	99,99	548	548	100,00	Daerah (Prov/Kab/ Kota)

Sembilan capaian output strategis tersebut mendukung keberhasilan tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1) terdiri dari dua output strategis, yaitu:
   a. fasilitasi penguatan demokrasi di daerah dengan target capaian output sebanyak 15 daerah (Prov/Kab/Kota) dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 15 daerah (Prov/Kab/Kota) atau output tercapai sebanyak 100,00%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.087.417.512,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp1.089.475.000,00; dan
   b. bantuan keuangan ke partai politik dengan target capaian output sebanyak 9 lembaga dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak sebanyak 9 lembaga atau output tercapai sebanyak 100,00%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp126.376.418.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp126.376.418.000,00.
2. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3) terdiri dari tiga output strategis, yaitu:
   a. fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial seluruh Indonesia dengan target capaian output sebanyak 34 daerah (Prov/Kab/Kota) dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 34 daerah (Prov/Kab/Kota) atau output tercapai sebanyak 100,00%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp64.896.900,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp65.000.000,00;
   b. kebijakan/regulasi/pedoman bidang kewaspadaan nasional dan konflik sosial dengan target capaian output sebanyak 2 rekomendasi/kebijakan dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 2 rekomendasi/kebijakan atau capaian output sebanyak 100,00%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp214.950.950,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp215.000.000,00; dan
   c. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial daerah yang efektif dengan target capaian output sebanyak 21 persentase dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 61 persentase atau capaian output sebesar 290,48%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp495.948.185,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp495.994.000,00.

3. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8) terdiri dari empat output strategis, yaitu:
   a. akta Kelahiran yang diterbitkan dengan target capaian output sebanyak 220.000 orang dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 1.719.210 orang atau output tercapai sebanyak 781,46%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp443.706.350,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp464.085.000,00;
   b. blangko KTP-el untuk daerah dengan target capaian output sebanyak 15.188.059 orang dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 15.188.059 orang atau output tercapai sebanyak 100,00%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp161.249.165.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp161.249.165.000,00;
   c. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan target capaian output sebanyak 1 Sistem Informasi dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 1 Sistem Informasi atau output tercapai sebanyak 100,00%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp160.143.952.430,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp160.148.552.000,00; dan
   d. Fasilitasi *Online* Layanan Jaringan Komunikasi Data dengan target capaian output sebanyak 548 daerah (Prov/Kab/Kota) dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 548 daerah (Prov/Kab/Kota) atau output tercapai sebanyak 100,00%. Realisasi belanja untuk mencapai output tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp256.784.152.255,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp256.789.986.000,00.

   Pada Tahun Anggaran 2021, Kemendagri mengalokasikan anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang ditujukan untuk memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan kantor Kemendagri dan langkah antisipasi lainnya dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara Kemendagri. Anggaran penanganan pandemi COVID-19 tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan obat-obatan, suplemen daya tahan tubuh, vitamin C dan E, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, *face shield*, kebutuhan untuk cuci tangan, biaya untuk penyemprotan disinfektan, pembayaran paket data dan lisensi *zoom meeting*, *swab test*, laptop dan alat kesehatan lainnya.

Realisasi anggaran belanja penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp57.180.080.544,00 atau 97,41% dari anggaran belanja sebesar Rp58.698.520.000,00. Rincian pagu dan realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2021 menurut Unit Eselon I disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Pagu dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19
sampai dengan 31 Desember 2021

KODE ES1	NAMA ES1	ANGGARAN SETELAH DIREVISI			REALISASI BELANJA *NETTO*			%
		BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL PAGU	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL REALISASI	
01001	SEKRETARIAT JENDERAL	23.423.954.000	110.000.000	23.533.954.000	23.387.473.349	109.945.000	23.497.418.349	99,84
01002	INSPEKTORAT JENDERAL	1.409.816.000		1.409.816.000	1.405.647.519		1.405.647.519	99,70
01003	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	2.571.386.000		2.571.386.000	2.566.515.017		2.566.515.017	99,81
01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	4.026.275.000		4.026.275.000	3.654.372.103		3.654.372.103	90,76
01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	4.804.684.000		4.804.684.000	4.152.743.333		4.152.743.333	86,43
01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.301.105.000		2.301.105.000	1.997.344.006		1.997.344.006	86,80
01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.580.754.000	58.315.000	1.639.069.000	1.559.203.980	58.295.750	1.617.499.730	98,68
01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.283.848.000	175.260.000	10.459.108.000	10.222.874.794	175.175.000	10.398.049.794	99,42
01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	845.244.000		845.244.000	812.585.758		812.585.758	96,14
01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	817.867.000	17.050.000	834.917.000	817.784.790	17.050.000	834.834.790	99,99
01012	BADAN PNGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.244.862.000	28.100.000	6.272.962.000	6.214.970.145	28.100.000	6.243.070.145	99,52
JUMLAH		**58.309.795.000**	**388.725.000**	**58.698.520.000**	**56.791.514.794**	**388.565.750**	**57.180.080.544**	**97,41**

Rincian pagu dan realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 per satker sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 1.**

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2021 disusun untuk tujuan umum dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan diharapkan dapat meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan entitas Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kemendagri. Laporan keuangan

ini disusun dan disajikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kemendagri yang meliputi eselon I, dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Struktur organisasi Kemendagri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri terdiri dari 11 Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
   Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

   Pada Eselon I Setjen terdapat satuan kerja IPDN yang merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan dalam lingkungan Kemendagri. IPDN merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Keputusan Mendagri Nomor 892.22.701 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Program studi diselenggarakan di IPDN Kampus Jatinangor, Kampus Jakarta dan Kampus Daerah. Terdapat enam IPDN Kampus di Daerah yang berdiri sebagai satuan kerja yang mengelola Anggaran sendiri, yaitu IPDN Kampus Sulawesi Utara di Minahasa, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa, IPDN Kampus Sumatera Barat di Bukittinggi, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Mataram, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya, dan IPDN Kampus Papua di Jayapura.

   Pada Eselon I Setjen juga terdapat satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yaitu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara

Pemilu. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum.

3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan.

4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah.

5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah.

6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa.

7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah.

8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

9. Inspektorat Jenderal
   Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan
    Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Jumlah satuan kerja dengan status aktif di lingkungan Kemendagri Tahun 2021 sebanyak 142 satker. Rincian jumlah satker dengan

status aktif pada masing-masing Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I

NO	KODE ES1	UNIT ESELON I	KP	KD	DK	TP	JUMLAH
1	01	SEKRETARIAT JENDERAL	3	7	-	-	**10**
2	02	INSPEKTORAT JENDERAL	1	-	-	-	**1**
3	03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	-	-	-	**1**
4	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	-	111	2	**114**
5	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	1	3	-	-	**4**
6	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	-	-	-	**1**
7	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	1	-	-	-	**1**
8	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	-	-	-	**1**
9	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	1	-	-	-	**1**
10	11	BADAN PELITIAN DAN PENGEMBANGANGAN	1	-	-	-	**1**
11	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	6	-	-	**7**
JUMLAH			**13**	**16**	**111**	**2**	**142**

Selama Tahun 2021 terdapat penambahan dan pengurangan jumlah satker inaktif bersaldo. Perubahan jumlah satker inaktif bersaldo telah diungkapkan pada pengungkapan lainnya, khususnya terkait dengan jumlah dan rincian satker inaktif bersaldo yang telah dilikuidasi dan satker inaktif yang saldo asetnya dialihkan kepada satker pusat yang berada dibawah kewenangan Unit Eselon I selaku penanggung jawab proses likuidasi. Penambahan satker inaktif bersaldo berasal dari satker Dekonsentrasi Unit Eselon I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur (kode satker 484164) yang menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.000.000,00. Saldo kas tersebut berasal dari pengajuan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan, namun DIPA satker tersebut telah direvisi menjadi nihil. Uang persediaan tersebut belum disetor ke kas negara sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Dalam Negeri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan

penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Dalam hal terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka kas disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas yang dikelola Kemendagri terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dan Setara Kas.
- Piutang Bukan Pajak dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - Piutang berdasarkan pungutan diakui dengan memperhatikan terpenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
    - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
    - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.
- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12

(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan dalam neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu membentuk penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
    - biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    - harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

  Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
    - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu

perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisihnya tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berdasarkan keputusan pertimbangan entitas bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus disajikan pada pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan pada Aplikasi SIMAK BMN akan

mereklasifikasi saldo akun Aset Tetap ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas ke pengelola barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak

atas kekayaan intelektual. ATB meliputi *software*, hak paten dan hak cipta, *lisensi* dan waralaba (*franchise*), hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan ATB lainnya.

- ATB diakui jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasasi, atau dimiliki oleh entitas, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa di masa depan, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.
- Pengeluaran untuk memperoleh ATB melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas, harus dapat dibedakan antara tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap penelitian atau riset diakui sebagai beban pada saat terjadi. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap pengembangan, apabila telah memenuhi kriteria pengakuan, dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan. Dalam hal terdapat tahapan setelah implementasi/ operasionalisasi, umumnya dalam pengembangan *software* komputer, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Terhadap kondisi tersebut maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan pada Aplikasi SIMAK BMN akan mereklasifikasi saldo akun ATB ke akun Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak

dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap dan ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset lain-lain tersebut terdiri atas Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113).
- Aset Lain-lain diakui pada saat Aset Tetap dan ATB dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.
- Aset Tetap dan ATB yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap/ATB menjadi objek penyusutan dan amortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap dan amortisasi Aset Tak Berwujud.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 6
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan berdasarkan Aplikasi e-Rekon&LK. Kemendagri melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, salah satunya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja tersaji pada tabel 7.

Tabel 7

Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Perubahan (Rp)
Estimasi Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	55.062.218.000	70.348.045.000	15.285.827.000,00
Total Estimasi Pendapatan	**55.062.218.000**	**70.348.045.000**	15.285.827.000,00
Pagu Belanja			
Akun Non Covid-19			
Belanja Pegawai	814.935.844.000	753.178.241.000	(61.757.603.000,00)
Belanja Barang	2.171.015.702.000	1.954.394.802.000	(216.620.900.000,00)
Belanja Modal	209.735.696.000	168.286.006.000	(41.449.690.000,00)
Total Belanja Akun Non Covid-19	**3.195.687.242.000**	**2.875.859.049.000**	**(319.828.193.000,00)**
Akun Covid-19			
Belanja Barang	14.841.148.000	58.309.795.000	43.468.647.000,00
Belanja Modal	-	388.725.000	388.725.000,00
Total Belanja Akun Covid-19	**14.841.148.000**	**58.698.520.000**	**43.857.372.000,00**
Jumlah Pagu Belanja	**3.210.528.390.000**	**2.934.557.569.000**	**(275.970.821.000,00)**

Pagu awal Kemendagri ditetapkan sebesar Rp3.204.700.438.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S692/MK.02/2020 dan B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/ 08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyesuaian RKA-K/L TA 2021, sedangkan pada aplikasi e-Rekon&LK pagu awal sebesar Rp3.210.528.390.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.827.952.000,00. Perbedaan pagu awal tersebut terdapat pada empat satker Dekonsentrasi Ditjen Bina Adwil yaitu Sekda Prov. NTB (239236) sebesar (Rp1.572.571.000,00), Dinas PMPTSP Prov. NTT (249174) sebesar (Rp210.000.000,00) Bappeda Prov. Sumbar (484118) sebesar (Rp350.000.000,00), dan Dinas PMPTSP Prov. Kaltim (484176) sebesar (Rp500.000.000,00) serta satker Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (506138) sebesar Rp8.460.523.000,00. Rincian selisih pagu awal per satker terdapat pada **Lampiran II** (Rincian Selisih Pagu Awal Per Satker).

Perubahan pagu belanja berdasarkan program Kemendagri tersaji pada tabel 8.

Tabel 8

Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Kode	Program	Anggaran TA 2021	
		Awal	Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	1.861.837.507.000	1.710.742.714.000
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	519.358.782.000	450.597.849.000
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	681.650.683.000	628.153.706.000
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	147.681.418.000	145.063.300.000
	Total Pagu Belanja……	**3.210.528.390.000**	**2.934.557.569.000**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Tahun 2021, Kemendagri memperoleh alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional I, II, III, IV, V, dan VII. Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Jumlah Rincian Output serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada masing-masing Prioritas Nasional disajikan pada tabel 9.

Tabel 9

Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Jumlah Rincian Output serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada masing-masing Prioritas Nasional

No.	Prioritas Nasional	Pagu (Total)	Realisasi (Akhir)		Jumlah Rincian Output	Penanggung Jawab
			Rp.	%		
1	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2.726.244.000	2.626.418.688	96,34	9	Bangda, Litbang
2	PN 2: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	156.358.297.000	146.175.495.966	93,49	70	Adwil, Pemdes, Bangda, Otda, Keuda, Litbang, dan BPSDM
3	PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	11.499.669.000	11.361.234.699	98,80	15	Bangda dan Dukcapil
4	PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1.771.841.000	1.765.844.784	99,66	4	Polpum dan Bangda
5	PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6.624.293.000	3.987.305.002	60,19	8	Bangda
6	PN 7: Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	130.806.243.000	130.804.046.181	99,99	8	Polpum
Total Kemendagri		**309.786.587.000**	**296.720.345.320**	**95,78**	**114**	

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Kegiatan yang Menjadi Prioritas Nasional disajikan pada **Lampiran III** (Rincian Prioritas Nasional).

Realisasi Pendapatan Rp128.414.847.075,00

B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp128.414.847.075,00 atau 182,54% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp70.348.045.000,00. Keseluruhan pendapatan Kemendagri merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2021 per MAP

Kode Map	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	222.555.998	0,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	151.380.000	1.454.395.544	960,76
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	610.570.000	1.706.910.469	279,56
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	20.413.000	24.812.500	121,55
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	252.500.000	292.596.499	115,88
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	15.471.500.000	14.060.542.123	90,88
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	787.675.000	513.612.000	65,21
425421	Pengembalian Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	53.054.007.000	87.804.557.000	165,50
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	-	286.500.000	0,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	38.570	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	-	32.674.998	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.660.765.539	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	142.182.781	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	19.663.304.119	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	547.081.805	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	380.000	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1.937.130	0,00
Total Pendapatan		**70.348.045.000**	**128.414.847.075**	**182,54**

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 11.

Tabel 11
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2021 per Eselon I

No	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1	Setjen	17.277.538.000	21.693.800.401	125,56
2	Itjen	-	481.422.680	0,00
3	Ditjen Polpum	-	140.951.210	0,00
4	Ditjen BAK	-	602.204.724	0,00
5	Ditjen Bina Pemdes	16.500.000	1.719.085.571	10418,70
6	Ditjen Bina Bangda	-	6.528.989.268	0,00
7	Ditjen Otda	-	204.678.667	0,00
8	Ditjen Dukcapil	-	7.678.048.214	0,00
9	Ditjen Keuda	-	111.346.316	0,00
10	Badan Litbang	-	296.526.822	0,00
11	BPSDM	53.054.007.000	88.957.793.202	167,67
Jumlah		**70.348.045.000**	**128.414.847.075**	**182,54**

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per satker disajikan pada **Lampiran IV** (Rekap Laporan PNBP).

Rincian realisasi pendapatan per tanggal pelaporan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 12.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi PNBP
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per Eselon I

No	Eselon I	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik (Turun) %
1	Setjen	21.693.800.401	28.436.097.233	(23,71)
2	Itjen	481.422.680	171.773.364	180,27
3	Ditjen Polpum	140.951.210	282.760.498	(50,15)
4	Ditjen BAK	602.204.724	508.916.312	18,33
5	Ditjen Bina Pemdes	1.719.085.571	627.827.475	173,81
6	Ditjen Bina Bangda	6.528.989.268	981.884.630	564,94
7	Ditjen Otda	204.678.667	242.682.860	(15,66)
8	Ditjen Dukcapil	7.678.048.214	27.337.476.053	(71,91)
9	Ditjen Keuda	111.346.316	194.335.994	(42,70)
10	Badan Litbang	296.526.822	81.060.956	265,81
11	BPSDM	88.957.793.202	28.249.753.888	214,90
Jumlah		**128.414.847.075**	**87.114.569.263**	**47,41**

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp128.414.847.075,00 mengalami kenaikan sebesar 47,41% dibandingkan realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp87.114.569.263,00. Penyebab kenaikan pendapatan ini karena pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari PNBP fungsional telah dilakukan melalui media daring sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini berdampak terhadap kenaikan realisasi PNBP untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021.

PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung berupa kas, barang dan jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melakukan pengesahan atas pendapatan dan belanja sebagai dokumen sumber pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Satker di Kementerian Negara/Lembaga membukukan dokumen sumber berupa Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) yang diterbitkan KPPN atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dan membukukan dokumen sumber berupa Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga atas belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa Barang/Jasa.

Dalam Bab II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan penatausahaan pendapatan hibah berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Settlemen. Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Realisasi Anggaran Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LRA dan Laporan Operasional Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LO.

Atas pengeluaran yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang, Kemendagri mencatat belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sebesar nilai yang disahkan oleh KPPN, dan mencatat beban pada Laporan Operasional pada saat resume tagihan sebesar nilai yang tercantum dalam resume tagihan. Kemendagri mencatat kas atas penerimaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Neraca.

Atas hibah dalam bentuk barang, Kemendagri mencatat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari hibah pada saat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan diterima oleh Kemendagri sebesar nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Atas hibah dalam bentuk jasa, Kemendagri mencatat beban jasa dari hibah tersebut pada saat resume tagihan sebesar nilai jasa yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pada tahun 2021 Kemendagri menerima hibah langsung dalam bentuk

uang/barang/jasa sebesar Rp152.675.037.168,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Setjen menerima hibah langsung berupa barang dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebesar Rp702.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Tahir *Foundation* memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa paket sembako sebesar Rp260.000.000,00 dengan Nomor Register 2HPQB88A yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 001/TF/NPH/I/2021 dan 028/13/KPA tanggal 8 Januari 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 002/TF/BAST/I/2021 dan 028/14/KPA tanggal 8 Januari 2021.
    b. Yayasan BUMN Untuk Indonesia memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa masker *surgical 3 play* sebesar Rp442.500.000,00 dengan Nomor Register 2LCHFC2A yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor BA001/YBUMN/V/2021 dan 028/1256/BKA tanggal 21 Mei 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 002/YBUMN/V/2021 dan 028/1257/KPA tanggal 21 Mei 2021.
2. Setjen menerima hibah langsung berupa barang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp11.736.360.000,00 dengan Nomor Register 2RDP3XAA. Barang yang dihibahkan tersebut merupakan tanah yang selama ini digunakan untuk kegiatan operasional IPDN Kampus Sulawesi Selatan. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 978/7518/BKAD dan 028/4135/SJ tanggal 2 Agustus 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 978/7675/BKAD dan 028/4218/SJ tanggal 5 Agustus 2021.
3. Institut pemerintahan Dalam Negeri menerima Hibah langsung berupa Barang sebesar Rp296.613.726,00 dengan rincian sebagai berikut.
    a. CV Mitra memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa satu unit *ampli/power*, satu unit *mic wareless*, dua unit speaker aktif, satu unit *mixer ashly*, empat unit *speaker 10 in hardwell* beserta *briketnya*, satu unit mesin bor tanah, dua unit mesin pemotong rumput tanaka, satu unit televisi *smart* LG 43” dengan Nomor Register 24737D8A. Nilai seluruh barang yang dihibahkan sebesar Rp63.350.000,00. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 028/III/IPDN.6 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 028/111/IPDN.6 tanggal 15 Februari 2021.
    b. Pemerintah Kota Medan memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa satu unit smart tv sharp 50”, sepuluh unit tv sharp 40”, dua unit speaker asatron, dua unit radio rick, dua unit handycam sony dengan Nomor Register 2MTZ8Q3A. Nilai seluruh barang yang dihibahkan sebesar Rp71.200.000,00. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 800/5617 dan 028/164/IPDN.6 tanggal 19 April 2021 serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 800/5617-028/164/IPDN.6 tanggal 19 April 2021.
    c. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan hibah langsung dalam

bentuk barang berupa satu unit drum elektrik, satu unit keyboard/elektone, dua unit gitar melodi, satu unit gitar bass, satu set *sound system* dengan Nomor Register 2J939LDA. Nilai seluruh barang yang dihibahkan sebesar Rp42.063.726,00. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 028/8561/032/2021 dan 028/159/IPDN.06 tanggal 19 April 2021 serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 028/8561/032/2021 dan 028/159/IPDN.06 tanggal 19 April 2021.

d. Hibah Alumni IPDN Angkatan XXVIII memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa gedung dan bangunan sebesar Rp120.000.000,00 dengan Nomor Register 2ZCCNPA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 028/314/IPDN.6 tanggal 2 Agustus 2021 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 028/314/IPDN.6 tanggal 2 Agustus 2021.

4. IPDN Kampus Kalimantan Barat menerima hibah langsung berupa barang dari BPSDM Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp381.089.403,00 dengan Nomor Register 2ZCU2DWA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 900/247/BPSDM-A dan 028/937IPDN.28 tanggal 23 September 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 900/249/BPSDM-A dan 028/938/IPDN28 tanggal 23 September 2021. Hibah barang tersebut dicatat pada akun Persediaan sebesar Rp34.993.969,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp204.953.394,00, dan ekstrakomptabel sebesar Rp141.142.040,00.

5. Ditjen Bina Adwil menerima hibah langsung berupa barang sebesar Rp1.295.755.166,00 dengan rincian sebagai berikut.

   a. *Ehime Toyota Motor Corporation Japan* memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulance pemadam kebakaran sebesar Rp50.457.600,00 dengan Nomor Register 2CU1LFYA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 028/2767/BAK Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/076/BAK tanggal 5 Januari 2021.

   b. *Gyeonggi Provincial Fire and Disaster Headquarters Republic Of Korea* memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulance pemadam kebakaran sebesar Rp1.245.297.566,00 dengan Nomor Register 21A49DQA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 028/2816/BAK Tanggal 25 September 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor Nomor 028/939/BAK tanggal 17 Februari 2021.

6. Ditjen Bina Bangda menerima Hibah langsung berupa jasa dan uang sebesar Rp53.886.626.244,00 dengan rincian sebagai berikut:

   a. *Government Of The Unt. Kingdom Of Great Britian and North. Ir* memberikan hibah langsung berupa jasa dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Implementasi Penataan Ruang dan Pembangunan

Rendah Karbon sebesar Rp51.347.682.645,00 dengan Nomor Register 2BZ3FFRA. Penerimaan hibah untuk periode Januari s.d. Juni 2021 sebesar Rp31.850.288.677,00 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 010/UKCCU/032021 tanggal 26 Maret 2021. Penerimaan hibah untuk periode Juli s.d. Desember 2021 sebesar Rp19.497.393.968,00 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 048/UKCCU/122021 tanggal 1 Desember 2021.

b. *United Nations Population Fund (UNFPA)* memberikan hibah langsung berupa uang dalam rangka pelaksanaan *project Implementation Of UNFPA-Funded Workplans Relating To The 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic Indonesia* dengan Nomor Register 2TCK92FA. Pada tahun 2021 hibah langsung tersebut telah diterima sebesar Rp759.654.000,00.

c. *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* memberikan hibah langsung berupa uang dalam rangka Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF periode 2021 s.d. 2025 dengan Nomor Register 2C7EJQHA. Pengesahan hibah langsung dari UNICEF sebesar Rp1.866.030.000,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp86.740.401,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp1.779.289.599,00.

7. Ditjen Dukcapil menerima Hibah langsung berupa uang untuk penyediaan blanko KTP-el sebesar Rp4.344.681.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan memberikan hibah uang sebesar Rp528.550.000,00 dengan Nomor Register 2GDCKJEA. Hibah tersebut digunakan untuk pengadaan blanko KTP-el sebanyak 50.000 keping. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 028/2696/SES dan 471.13/175/Dukcapil/I/2021 tanggal 24 Februari 2021.

b. Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan hibah langsung berupa uang sebesar Rp1.162.810.000,00 dengan Nomor Register 2BNNH2EA. Hibah tersebut digunakan untuk pengadaan blanko KTP-el sebanyak 110.000 keping. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 903/223 dan 903/01 tanggal 5 Maret 2021.

c. Pemerintah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat memberikan hibah uang sebesar Rp993.674.000,00 dengan Nomor Register 24KFHH7A. Hibah tersebut digunakan untuk pengadaan blanko KTP-el sebanyak 94.000 keping. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 470/1030-SEKR dan 028/11511/SES tanggal 31 Agustus 2021.

d. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan hibah langsung berupa uang sebesar Rp105.710.000,00 dengan Nomor Register 2B7347TA. Hibah tersebut digunakan untuk pengadaan blanko KTP-el sebanyak 10.000 keping.

Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor KC.470/41/VIII/2021dan 028/10755/SES tanggal 10 Agustus 2021.

e. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau memberikan hibah langsung berupa uang sebesar Rp1.057.100.000,00 dengan Nomor Register 28JB8E4A. Hibah tersebut digunakan untuk pengadaan blanko KTP-el sebanyak 100.000 keping. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 474/Disdukcapil/2021 dan 028 /143474/SES tanggal 25 Oktober 2021.

f. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah langsung berupa uang sebesar Rp496.837.000,00 dengan Nomor Register 2NTPDXQA. Hibah tersebut digunakan untuk pengadaan blanko KTP-el sebanyak 47.000 keping. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor B/471.13/739/DUKCAPIL-Sekret/II/2021 dan 028/2710/SES tanggal 24 Februari 2021.

8. Ditjen Dukcapil menerima Hibah langsung berupa barang sebesar Rp80.031.411.629,00 dengan rincian sebagai berikut.

   a. PT Bank BCA Tbk. memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server dan *storage* sebesar Rp9.145.400.000,00 dengan Nomor Register 22L77NUA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 003/PKS/BCA/2021 dan 028/4431/SES Tanggal 29 Maret 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 028/4916/SES tanggal 6 April 2021.

   b. PT Bank BRI Tbk. memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server dan *storage* sebesar Rp11.480.000.000,00 dengan Nomor Register 2JQ5GNGA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor B.1223-DIR/INS/08/2021 dan 028/10717/SES tanggal 10 Agustus 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor B.150-INS/SSD/10/2021 dan 028/13939/SES tanggal 15 Oktober 2021.

   c. PT Bank CIMB Niaga Tbk. memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp4.290.000.000,00 dengan Nomor Register 29T7UUKA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 018/HO-DBBP/IV/2021 dan 028/6782/SES tanggal 7 Mei 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 022/HO-DBBP/VII/2021 dan 555/6251/SES.IV tanggal 29 Juni 2021.

   d. PT Bank DBS Indonesia memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp3.228.121.700,00 dengan Nomor Register 2LXG1ZUA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 13077/DBSI-CBG/V/2021 dan 119/7780/Ses tanggal 31 Mei 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 1307/DBSI-CBG/IX/21 dan 028/10830/Ses tanggal 12 Agustus 2021.

   e. PT KEB Bank Hana Indonesia memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp1.152.800.000,00 dengan Nomor

Register 2PWDQPUA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 33/171/PN/BSS dan 028/10167/SES tanggal 23 Juli 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 001/11/TPD/2021 dan 027/13407/SES tanggal 5 Oktober 2021.

f. PT Bank Mandiri Tbk. memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp930.000.000,00 dengan Nomor Register 23C6J4AA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor KES.EDM/DEV.1/2021 dan 119/7789/Ses tanggal 31 Mei 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor KES.EDM/DEV.2/2021 dan 028/8198/Ses tanggal 8 Juni 2021.

g. PT Bank Mandiri Tbk. memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server dan *storage* sebesar Rp9.242.695.000,00 dengan Nomor Register 2K6FA2EA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor KES.EDM/DEV.3/2021 dan 028/10903/Ses tanggal 13 Agustus 2021. Hibah langsung dalam bentuk *storage* senilai Rp4.358.695.000,00 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor KES.EDM/ DEV.4/2021 dan 028/11470/Ses tanggal 30 Agustus 2021 serta server senilai Rp4.884.000.000,00 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor TIF.EDA/DMT.5/2021 dan 028/13055/SES tanggal 28 September 2021.

h. PT Pegadaian Persero memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server dan *storage* sebesar Rp6.750.000.000,00 dengan Nomor Register 26AJ8UZA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 009/PKS-TI/00040.00/2021 dan 119/7252/Ses tanggal 20 Mei 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 05/96000.00/2021 dan 028/7385/SES tanggal 21 Mei 2021

i. PT Privy Identitas Digital memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp2.824.265.000,00 dengan Nomor Register 2RPHFBDA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 251/PID-BD/PKS/IV/2021 dan 119/6636/Ses tanggal 5 Mei 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 002/PID-COR/BAST /VII/2021 dan 028/9432/Ses tanggal 6 Juli 2021.

j. PT Bank UOB Indonesia memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp2.035.000.000,00 dengan Nomor Register 21ZM95BA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 21/DIR/0380A dan 028/9153/SES tanggal 25 Juni 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 21/DIR/0428 dan 028/10904/Ses tanggal 13 Agustus 2021.

k. PT Cakrawala Data Indonesia memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp916.300.000,00 dengan Nomor Register 2D1PTP2A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 088/SP/REG/CDI/VI/2021 dan 028/10015/Ses tanggal 16 Juli 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor

100.1/SP/REG/CDI/VII/2021 dan 027/10305/Ses tanggal 28 Juli 2021.

l. PT Espay Debit Indonesia KOE memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp2.816.000.000,00 dengan Nomor Register 2DWM749A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 396/EDIK/LC-PKS/VII/2021 dan 028/10469/Ses tanggal 2 Agustus 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 634/EDIK/LC-BAK/2021 dan 028/13617/Ses tanggal 8 Oktober 2021.

m. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp293.700.000,00 dengan Nomor Register 2226ZWBA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 002/LGL-CREDIT/2021 dan 119/8150/Ses tanggal 7 Juni 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 001/BASTK/CRD/VII/2021 dan 028/8654/Ses tanggal 16 Juni 2021.

n. PT Aksata Pratama Teknologi memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server dan *storage* sebesar Rp3.018.264.489,00 dengan Nomor Register 24K924ZA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 25/LGL-APT-DCP/XI/2021 dan 028/16021/Ses tanggal 24 November 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 27/LGL-APT-DCP/XII/2021 dan 028/17095/Ses 13 Desember 2021.

o. PT Solusi Andalan Kreatif Teknologi Indonesia memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp20.217.036.400,00 dengan Nomor Register 2BH3M4PA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 001/SAKTI/LGL/XII/2021 dan 028/16863/SES tanggal 9 Desember 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 007/SAKTI/LGL/XII/2021 dan 028/16927/Ses tanggal 10 Desember 2021.

p. PT Sea Bank Indonesia memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server sebesar Rp429.579.040,00 dengan Nomor Register 241MXZLA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 033/2021/PER dan 028/12588/Ses tanggal 20 September 2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 01/2021/BA-ST dan 028/14203/SES tanggal 21 Oktober 2021.

q. PT Solusi Net Internusa memberikan hibah langsung berupa barang dalam bentuk server dan *storage* sebesar Rp1.262.250.000,00 dengan Nomor Register 2V915GZA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 034/EM/SNI/IX/2021 dan 028/14380/SES tanggal 25 Oktober 2021, Berita Acara Serah Terima Nomor 059/EM/SNI/XII/2021 dan 028/17202/SES tanggal 15 Desember 2021.

Realisasi Belanja
Rp2.909.033.451.195,00

B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kemendagri sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.909.033.451.195,00 atau 99,13% dari anggaran belanja sebesar Rp2.934.557.569.000,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,91% dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.746.593.074.849,00. Rincian anggaran belanja dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 menurut jenis belanja disajikan pada tabel 13.

Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
s.d. 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bruto			
Belanja Pegawai	753.178.241.000,00	750.297.194.941	99,62
Belanja Barang	2.012.704.597.000,00	1.996.232.274.928	99,18
Belanja Modal	168.674.731.000,00	168.546.407.378	99,92
Total Belanja Bruto	**2.934.557.569.000**	**2.915.075.877.247**	**99,34**
Pengembalian Belanja			
Belanja Pegawai	-	232.370.561	-
Belanja Barang	-	5.800.057.591	-
Belanja Modal	-	9.997.900	-
Total Pengembalian Belanja	**-**	**6.042.426.052**	**-**
Belanja Netto	**2.934.557.569.000**	**2.909.033.451.195**	**99,13**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satker disajikan pada **Lampiran V** (Rekap Laporan Belanja).

Anggaran belanja Kemendagri sebesar Rp2.934.557.569.000,00 sudah termasuk alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp58.698.520.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19 disajikan pada tabel 14.

Tabel 14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan COVID-19
s.d. 31 Desember 2021

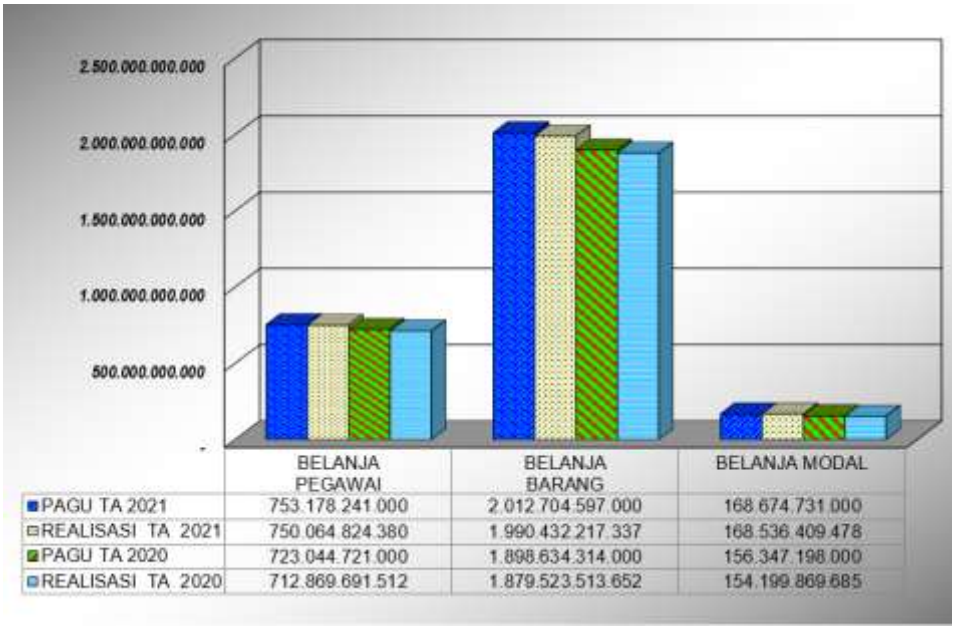
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.893.878.000	10.824.002.785	99,36
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.257.426.000	7.483.465.712	90,63
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	13.784.049.000	13.762.676.632	99,84
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	24.305.936.000	23.744.303.696	97,69
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.901.000	1.900.800	99,99
Belanja barang untuk bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	60.000.000	-	0,00
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	1.006.605.000	1.005.295.895	99,87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	388.725.000	388.565.750	99,96
Total Belanja Bruto	**58.698.520.000**	**57.210.211.270**	**97,46**
Pengembalian			
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	26.291.726	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.839.000	-
Belanja Netto	**58.698.520.000**	**57.180.080.544**	**97,41**

Realisasi belanja Penanganan Pandemi COVID-19 diperuntukkan antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (521131) untuk masker, *hand sanitizer*, *face shield*, vitamin, multivitamin penambah daya tahan tubuh bagi praja dan pegawai, biaya paket data, komunikasi, desinfektan.
2. Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) untuk Antigen, PCR, pendukung makan praja di wisma, biaya paket data dan komunikasi, sewa tempat cuci tangan dan sewa semprot desinfektan dalam rangka penerimaan CPNS 2021, pembayaran lisensi *zoom meeting*, masker, *hand sanitizer*, *face shield* dan vitamin.
3. Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19 (521841) untuk pembelian alat dan perlengkapan rapid test, pembelian masker, obat flu dan batuk, sarung tangan, *hand sanitizer*, vitamin C dan E, redoxon, hazmat, refil sabun cuci tangan cair, cairan disinfektan, disinfektan spray, hand sanitizer refil, *face shield*, *pribac handsanitizer*, *evo surgical face mask, aseptic hand rub, handsanitizer bracket, yuri hand soap, nice genuine 1, sensi gloves latex*, refil sabun cuci tangan, refil disenfektan, masker N95, lancet, alkohol swab, *safety box*, plastik sampah medis besar, plastik sampah medis kecil, dan masker medis.
4. Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) untuk penyemperotan desinfektan, vaksin influenza, *rapid test*, *swab test*, pembayaran jasa pemeriksaan konsultasi Dokter Spesialis THT dan *on site*.
5. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang- Penanganan Pandemi COVID-19 (526322) untuk bantuan dukungan penguatan Kelembagaan PKK.
6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi COVID-19 (532119) untuk pembelian laptop dan alat kesehatan lainnya.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Netto T.A 2021 dan T.A 2020



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel 15.

Tabel 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program s.d. 31 Desember 2021

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen	1.710.742.714.000	1.701.655.624.506	99,47
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	450.597.849.000	436.255.608.335	96,82
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	628.153.706.000	626.071.569.061	99,67
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	145.063.300.000	145.050.649.293	99,99
Jumlah		**2.934.557.569.000**	**2.909.033.451.195**	**99,13**

Rincian anggaran dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 31 Desember 2021 dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel 16.

Tabel 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto s.d. 31 Desember 2021
per Unit Eselon I

No	Eselon I	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp) 2021	%	Realisasi Belanja Bruto (Rp) 2020
1	Setjen	954.327.559.000	951.023.571.479	99,65	968.464.567.993
2	Itjen	68.193.264.000	68.131.698.504	99,91	54.489.628.987
3	Ditjen Polpum	212.623.343.000	212.553.949.893	99,97	193.198.048.985
4	Ditjen BAK	163.970.793.000	161.150.476.677	98,28	74.118.683.553
5	Ditjen Bina Pemdes	185.751.916.000	177.264.412.561	95,43	130.577.622.968
6	Ditjen Bina Bangda	236.967.581.000	235.379.005.562	99,33	200.718.358.312
7	Ditjen Otda	84.422.087.000	84.274.592.431	99,83	62.774.116.934
8	Ditjen Dukcapil	708.852.901.000	707.951.546.726	99,87	800.158.109.719
9	Ditjen Keuda	73.664.625.000	72.340.800.780	98,20	52.091.323.949
10	Badan Litbang	50.633.771.000	50.136.726.116	99,02	46.060.160.095
11	BPSDM	195.149.729.000	194.869.096.518	99,86	168.542.917.479
Jumlah Keseluruhan		**2.934.557.569.000**	**2.915.075.877.247**	**99,34**	**2.751.193.538.974**

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja transaksi kas yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Pengembalian belanja atas belanja yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.042.426.052,00.

Rincian realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per Eselon I disajikan pada tabel 17.

Tabel 17
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Eselon I	Pengembalian Belanja 31 Desember 2021 (Rp)	Pengembalian Belanja 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Setjen	1.230.428.275	1.994.938.265	(38,32)
2	Itjen	58.335.250	48.518.179	20,23
3	Ditjen Polpum	12.622.482	30.272.925	(58,30)
4	Ditjen BAK	933.796.844	160.592.624	481,47
5	Ditjen Bina Pemdes	698.009.271	856.445.248	(18,50)
6	Ditjen Bina Bangda	562.716.230	643.817.378	(12,60)
7	Ditjen Otda	112.478.788	74.231.277	51,52
8	Ditjen Dukcapil	1.936.491.988	396.694.698	388,16
9	Ditjen Keuda	85.509.231	25.157.876	239,89
10	Badan Litbang	5.609.502	46.738.820	(88,00)
11	BPSDM	406.428.191	323.056.835	25,81
Jumlah Pengembalian		**6.042.426.052**	**4.600.464.125**	**31,34**

Realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.441.961.927,00 atau sebesar 31,34% dibandingkan dengan pengembalian realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Netto sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada tabel 18.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Netto s.d.
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi Belanja Netto 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi Belanja Netto 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	750.064.824.380	712.869.691.512	5,22
Belanja Barang	1.990.432.217.337	1.879.523.513.652	5,90
Belanja Modal	168.536.409.478	154.199.869.685	9,30
Jumlah Belanja	**2.909.033.451.195**	**2.746.593.074.849**	**5,91**

Realisasi belanja netto Kemendagri sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.909.033.451.195,00 atau 99,13% dari anggaran belanja sebesar Rp2.934.557.569.000,00. Sebagai perbandingan realisasi belanja Kemendagri sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.746.593.074.849,00 atau 98,87% dari anggaran belanja sebesar Rp2.778.026.233.000,00. Dengan demikian realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp162.440.376.346,00 atau 5,91%. Kenaikan realisasi belanja ini didukung oleh upaya Kemendagri untuk melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah, termasuk pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya ditunda pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19.

Realisasi Belanja Pegawai Rp750.064.824.380,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp750.064.824.380,00 atau 99,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp753.178.241.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,22% dibandingkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp712.869.691.512,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai berasal dari penambahan pegawai baru atau CPNS Umum, Praja IPDN dan STAN serta inpasing pegawai struktural menjadi pegawai fungsional tertentu. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada tabel 19.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	405.310.589.027	387.503.601.437	4,60
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.557.557.200	1.456.151.600	6,96
Belanja Lembur	3.845.992.750	2.129.677.000	80,59
Belanja Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	339.583.055.964	321.950.870.129	5,48
Jumlah Belanja Bruto	750.297.194.941	713.040.300.166	**5,23**
Pengembalian Belanja Pegawai	232.370.561	170.608.654	36,20
Jumlah Belanja Netto	**750.064.824.380**	**712.869.691.512**	**5,22**

Belanja Barang
Rp1.990.432.217.337,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.990.432.217.337,00 atau 98,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.012.704.597.000,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 5,90% dibandingkan realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.879.523.513.652,00. Kenaikan realisasi belanja barang disebabkan adanya penambahan belanja jasa lainnya yang berasal dari utang Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) dan pekerjaan *Annual Technical Support* Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2020 yang dibayar dengan DIPA Tahun 2021 sebesar Rp110.444.708.313,00. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada tabel 20.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Bruto			
Belanja Barang Operasional	271.247.766.283	302.500.415.932	(10,33)
Belanja Barang Non Operasional	262.311.414.666	233.272.949.921	12,45
Belanja Barang Persediaan	30.235.716.008	31.608.998.501	(4,34)
Belanja Jasa	812.782.799.765	570.059.216.158	42,58
Belanja Pemeliharaan	117.973.859.374	119.342.870.721	(1,15)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	328.294.695.696	187.601.926.671	75,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri	533.808.055	933.125.099	(42,79)
Belanja Barang utk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	505.348.000	151.000.000	234,67
Belanja Barang DK/TP diserahkan kepada masyarakat/Pemda	2.547.714.000	138.745.000	1.736,26
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masy/pemda	169.799.153.081	438.333.536.000	(61,26)
Jumlah Belanja Bruto	**1.996.232.274.928**	**1.883.942.784.003**	**5,96**
Pengembalian Belanja			
Belanja Barang Operasional	144.361.612	164.957.000	(12,49)
Belanja Barang Non Operasional	105.400.538	43.499.440	142,30
Belanja Barang Persediaan	-	115.519.774	(100,00)
Belanja Jasa	2.101.590.947	302.227.216	595,37
Belanja Pemeliharaan	296.538.635	70.526.842	320,46
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.003.862.357	3.048.006.478	(1,45)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	148.303.502	674.533.601	(78,01)
Jumlah Pengembalian Belanja	**5.800.057.591**	**4.419.270.351**	**31,24**
Jumlah Belanja Netto	**1.990.432.217.337**	**1.879.523.513.652**	**5,90**

Kemendagri mengalokasikan Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp58.309.795.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp56.791.514.794,00 dengan rincian pada tabel 21.

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang COVID-19
s.d. 31 Desember 2021

Akun	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.893.878.000	10.824.002.785	99,36
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.257.426.000	7.483.465.712	90,63
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	13.784.049.000	13.762.676.632	99,84
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	24.305.936.000	23.744.303.696	97,69
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.901.000	1.900.800	99,99
526321	Belanja barang untuk bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	60.000.000	-	-
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	1.006.605.000	1.005.295.895	99,87
Jumlah Belanja Bruto		**58.309.795.000**	**56.821.645.520**	**97,45**
Pengembalian				
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	26.291.726	-
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.839.000	-
Jumlah Belanja Netto		**58.309.795.000**	**56.791.514.794**	**97,40**

Belanja Modal
Rp168.536.409.478,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp168.536.409.478,00 atau 99,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp168.674.731.000,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,30% dibandingkan realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp154.199.869.685,00. Kenaikan realisasi belanja modal berasal dari pembangunan perpustakaan IPDN Jatinangor, pembangunan asrama, gedung pertemuan, pos jaga, dan perpustakaan pada IPDN Kampus Kalimantan Barat, serta pengadaan *software* untuk mendukung layanan administrasi kependudukan. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per akun sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada tabel 22.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

MAK	Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) (%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.316.573.461	97.512.933.174	(4,30)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	388.565.750	38.448.963.742	(98,99)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.436.202.454	8.749.214.458	579,33
5341	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	-	777.590.500	(100,00)
5361	Belanja lainnya	15.405.065.713	8.721.752.931	76,63
Jumlah Belanja Bruto		**168.546.407.378**	**154.210.454.805**	**9,30**
Pengembalian Belanja Modal		**9.997.900**	**10.585.120**	**(5,55)**
Jumlah Belanja Netto		**168.536.409.478**	**154.199.869.685**	**9,30**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp93.695.141.311,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp93.695.141.311,00 dan Rp135.956.836.916,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 31,08% dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember2020. Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada Tabel 23.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.908.588.376	96.246.997.944	(5,55)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	388.565.750	38.448.963.742	(98,99)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2.407.985.085	1.265.935.230	90,21
Pengembalian			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.997.900	5.060.000	97,59
Jumlah Belanja Netto	**93.695.141.311**	**135.956.836.916**	**(31,08)**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp59.436.202.454,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp59.436.202.454,00 dan Rp8.743.689.338,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 579,76% dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.618.106.714	3.143.037.137	1.637,75
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	-	99.550.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.818.095.740	5.506.627.321	(12,50)
Jumlah Belanja Bruto	**59.436.202.454**	**8.749.214.458**	**579,33**
Pengembalian			
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bang	-	5.525.120	(100,00)
Jumlah Belanja	**59.436.202.454**	**8.743.689.338**	**579,76**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00

B.5.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp777.590.500,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2020. Perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdapat pada tabel 25.

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	155.996.500	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	621.594.000	(100,00)
Jumlah Belanja	**-**	**777.590.500**	**(100,00)**

Belanja Modal Lainnya Rp15.405.065.713,00

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15.405.065.713,00 dan Rp8.721.752.931,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 76,63% dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	15.108.965.041	8.298.041.939	82,08
Belanja Penambahan Nilai ATL	296.100.672	423.710.992	(30,12)
Jumlah Belanja	**15.405.065.713**	**8.721.752.931**	**76,63**

B.6 Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Pada TA 2021 Kemendagri menerima alokasi anggaran sebesar Rp2.934.557.569.000,00 dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.909.033.451.195,00 atau 99,13% dari anggarannya dengan rincian menurut jenis satker pada tabel 27.

Tabel 27
Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 December 2021		31 December 2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Kerja Pusat dan Daerah	2.902.016.104.000	2.884.539.527.009	2.774.112.566.000	2.747.358.713.500
Realisasi Pengembalian Belanja	-	6.000.611.429	-	4.578.529.325
Satker Pusat & Daerah Setelah Pengembalian	**2.902.016.104.000**	**2.878.538.915.580**	**2.774.112.566.000**	**2.742.780.184.175**
Dekonsentrasi	29.691.465.000	27.845.466.103	3.742.978.000	3.664.136.474
Realisasi Pengembalian Belanja	-	49.389.873	-	21.934.800
Dekonsentrasi Setelah Pengembalian	**29.691.465.000**	**27.796.076.230**	**3.742.978.000**	**3.642.201.674**
Tugas Pembantuan	2.850.000.000	2.698.459.385	170.689.000	170.689.000
Realisasi Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Tugas Pembantuan Setelah Pengembalian	**2.850.000.000**	**2.698.459.385**	**170.689.000**	**170.689.000**
Jumlah Belanja	**2.934.557.569.000**	**2.909.033.451.195**	**2.778.026.233.000**	**2.746.593.074.849**

Belanja Dana Dekonsentrasi Rp27.796.076.230,00

1) Dana Dekonsentrasi

Pada TA 2021 Kemendagri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah provinsi melalui program dan kegiatan yang terdapat pada Ditjen Bina Adwil sebesar Rp29.691.465.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp27.796.076.230,00 atau 93,62% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp49.389.873,00.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.742.978.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.642.201.674,00 atau 97,31% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp21.934.800,00. Rincian realisasi Dana Dekonsentrasi disajikan pada tabel 28.

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I
s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	Eselon I	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen BAK	27.845.466.103	3.664.136.474	659,95
Pengembalian		49.389.873	21.934.800	125,17
Belanja Netto		**27.796.076.230**	**3.642.201.674**	**663,17**

Belanja Dana Tugas Pembantuan Rp2.698.459.385,00

2) Dana Tugas Pembantuan

Pada TA 2021 Kemendagri mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah kabupaten/kota melalui program kegiatan sebesar Rp2.850.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.698.459.385,00 atau 94,68% setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00.

Sebagai perbandingan, sampai dengan 31 Desember 2020 mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp170.689.000,00, dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp170.689.000,00 atau 100% setelah dikurangi pengembalian sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Dana Tugas Pembantuan disajikan pada tabel 29.

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan
per Eselon I s.d. 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Eselon I	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen BAK	2.698.459.385	-	-
2	Ditjen Bangda	-	170.689.000	(100,00)
Jumlah		**2.698.459.385**	**170.689.000**	1.480,92

B.7 Pengungkapan Lainnya

Kemendagri Tahun 2021 mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri untuk kegiatan pada satker dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditjen Bina Pemdes mengelola anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp40.000.000.000,00 untuk program ***Proyek Improvement Village Service Delivery*** **atau Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).**

   a. Tujuan Program.

      Program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan atau institusi desa untuk memperbaiki kualitas belanja desa di lokasi proyek Program, melalui:

      1) Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan.
      2) Perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif.
      3) Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (*performance-based grant*, PBG) untuk menguji model dukungan melalui insentif untuk perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten.
      4) Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

      Dengan adanya Proyek P3PD ini pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi terhadap perbaikan layanan dan dukungan sosial-ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa.

   b. Lokasi Sasaran.

      Sesuai tujuan P3PD, maka kriteria pertama pemilihan kabupaten adalah kabupaten/kota yang mendapatkan Dana Desa. Selanjutnya, kabupaten/kota dinilai berdasarkan kapasitas pemerintah desa dan kabupaten yang diukur dari indikator sebagai berikut:

      1) Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang mempengaruhi status pembangunan di desa dan kabupaten. Indikator status pembangunan desa dan kapasitas pemerintah desa diproksi dari variabel berikut ini:
         a) Akses ke sarana prasarana dasar berdasarkan data PODES 2018.
         b) Kapasitas pemerintah desa (latar belakang Pendidikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dan kelengkapan komposisi aparat inti desa) – data PODES 2018.
         c) Kemampuan penganggaran pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas desa (dari alokasi desa untuk peningkatan kapasitas) – data SIPEDE 2018.

2) Kapasitas pemerintah desa dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemerintahan desa. Dalam hal ini proksi yang dapat dilakukan dengan mengacu pada alokasi ADD per desa – data Siskeudes.

c. Kelompok Sasaran.

Aparat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan maupun dukungan pembinaan teknis yang akan dilaksanakan antara lain melalui platform digital (*e-learning*), forum belajar desa di tingkat kecamatan, kegiatan pelatihan tatap-muka, serta fasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Masyarakat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan antara lain melalui pembukaan akses terhadap platform Akademi Desa 4.0, akses terhadap pendampingan dan Forum Belajar Desa. Masyarakat juga akan mendapatkan akses kepada sistem penanganan keluhan dan pengawasan pembangunan desa berbasis digital.

Selain aparat dan masyarakat desa, pemerintah pusat dan daerah juga akan mendapat dukungan melalui penguatan koordinasi pembangunan desa serta pembuatan sistem informasi desa terintegrasi yang akan menggabungkan data penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta belanja desa dari kementerian/lembaga terkait. Sistem informasi terintegrasi ini akan menjadi sumber data untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan dan belanja desa serta kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data dan analisis dari sistem informasi ini juga diharapkan akan menjadi masukan dalam pembahasan kebijakan terkait pemerintahan dan pembangunan desa ke depannya.

d. Pendanaan.

Selain dari dana pinjaman IBRD, pencapaian target sasaran P3PD memerlukan Dana Rupiah Murni (RM) yang bersumberkan dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) dan APBDesa serta kontribusi masyarakat. Bentuk dana RM ini adalah salah satu wujud operasional atau pelaksanaan dari platform nasional pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa, yang mana dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pencapaian tujuan P3PD.

Selain dana RM, Kementerian dan Lembaga mengalokasikan dana pararel dari Pemerintah Pusat (APBN RM), untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dialokasikan dari porsi pinjaman luar negeri, seperti biaya operasional dan gaji/tunjangan bagai pegawai negeri dalam pengelolaan P3PD atau porsi pembiayaan untuk kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia.

Dana Rupiah Murni lainnya dapat dicatat dalam bentuk program atau kegiatan (bukan dalam bentuk *in cash* yang langsung disalurkan melalui P3PD), namun memberikan kontribusi atau dukungan terhadap pelaksanaan P3PD baik di tingkat pusat maupun daerah dan desa.

Porsi Rupiah Murni yang dapat dihitung ke dalam kontribusi pendanaan P3PD adalah sebagai berikut:

1) APBN/APBD yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat dalam

P3PD untuk operasional PMU/PIU dan Sekretariat terkait PNS, misalnya biaya pertemuan, honorarium narasumber, perdiem, biaya pemantauan dan supervisi.

2) APBN/APBD yang digunakan untuk membiayai sebagian kegiatan P3PD, seperti rapat koordinasi, lokakarya, pelatihan, bantuan teknis dan fasilitator, dan lainnya.

3) APBDesa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.

e. Rincian Pinjaman.

Rincian pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut :

Nomor ID Pinjaman	:	IBRD 8941-ID
Pemberi Pinjaman	:	World Bank
Tanggal Perjanjian	:	30 Januari 2020
Nomor Register	:	1CZ6CF2A
Effective Date	:	30 Januari 2020
Jumlah Pinjaman	:	USD300.000.000,00
Nomor Reksus	:	601306411980
Closing date	:	31 Desember 2024
Executing Agency	:	Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 untuk program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sebesar Rp34.048.360.462,00 atau 85,12% dari anggarannya sebesar Rp40.000.000.000,00.

2. Ditjen Bina Bangda mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp104.322.650.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp103.833.957.920,00 atau 99,53% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

a. *Flood Management in Selected River Basis* (FMSRB).

1) Latar Belakang.

Banjir, yang terjadi setiap tahun di sebagian besar negara, telah meningkat frekuensinya, menyebabkan kerugian ekonomi setiap tahun. Indonesia salah satu negara yang sangat rentan terhadap banjir karena iklim dan topografinya. Banjir sungai Ciujung pada tahun 2013 berdampak pada 19.674 rumah tangga, menyebabkan 50.527 orang mengungsi dan mengganggu lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta-Merak yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Pada tahun 2013 juga di Ambon terjadi banjir bandang yang mengakibatkan 59 rumah rusak, 10 orang meninggal dunia, 5 orang hilang, dan 7.212 orang mengungsi. Melihat kondisi ini Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) menyusun sebuah program yang disebut dengan *Flood Management in Selected River Basins*

(FMSRB) yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 3440-INO pada tanggal 2 November 2016.

Program *Flood Management In Selected River Basin* (FSMRB) yang didanai oleh pinjaman dari *Asean Development Bank* (ADB) akan mendanai Pemerintah sebanyak USD 108,7 juta yang akan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian risiko banjir pada wilayah Daerah Aliran Sungai yang ditargetkan. Banjir yang melanda daerah-daerah rawan pada dasarnya disebabkan beberapa hal, yaitu kegiatan manusai yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam serta curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan air laut, badai, dan sebagainya.

2) Tujuan Progrsam.

Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam mengelola dan mengurangi risiko (mitigasi) banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai. Program FMSRB memiliki 4 komponen output yaitu;

a) Meningkatnya perencanaan pengelolaan risiko banjir.
b) Meningkatnya pengelolaan lahan dan infrastruktur banjir.
c) Meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat.
d) Meningkatnya kebijakan, koordinasi dan kapasitas pengelolaan risiko banjir di tingkat nasional.

3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB) adalah sebagai berikut :

Pemberi PHLN	:	*Asian Development Bank* (ADB)
Besaran PHLN	:	USD108.700.000,00
Nomor Pinjaman PHLN	:	3440-INO
Tanggal Efektif PHLN	:	9 Desember 2016
Nomor Register PHLN	:	1RUX78CA
Closing Date PHLN	:	30 September 2023

4) Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanan Kegiatan dari Program *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB) antara lain:

a) Bappenas selaku *National Steering Committee on Water Resource* (NSCWR).
b) Kementerian PUPR selaku *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Executing Agency* kegiatan ini adalah Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
c) Kemendagri selaku *Central Project Implementation Unit* (CPIU).

d) Kementerian Pertanian selaku *Central Project Implementation Unit* (CPIU).

Lingkup kegiatan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri selaku CPIU yaitu:

a) Sub-Komponen 1B berupa Penguatan kelembagaan, perencanaan dan koordinasi pelaksanaan rencana Pengelolaan Risiko Banjir Terpadu (PRBT) di WS Program (WS 3 Ci dan WS Ambon-Seram).
b) Sub-Komponen 2B berupa Peningkatan pengendalian air buangan (*run-off*) dan erosi di DAS Program.
c) Sub-Komponen 3A berupa Meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat (PRBBM) di lokasi program.

Metode pelaksanaan dalam rangka mencapai output Program Kegiatan FSMRB adalah dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. Asistensi dan Supervisi Program Pengelolaan Risiko Banjir pada kawasan pertanian dan pangan di daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir. Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir adalah agar terwujudnya koordinasi antar pengelola program terkait dengan penyelenggaraan program pada masing-masing tingkatan, sedangkan outputnya adalah berupa laporan rapat koordinasi pelaksana program pengelolaan risiko banjir. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap pelaporan. Peserta Rapat terdiri dari Kemendagri/CPIU Ditjen Bina Bangda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat CPIU PUPR, CPIU Pertanian serta Bappenas dan daerah yaitu Provinsi Banten dan Maluku serta kabupaten yang terlibat program, FSMRB.
b) Supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Pengelolaan Risiko Banjir. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir dan Outputnya yaitu terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program manajemen Banjir. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari rapat persiapan dan kemudian dilanjutkan kunjungan lapangan ke lokasi program FSMRB. Pelaksana supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Pengelolaan Risiko Bajir yaitu beberapa instansi dilingkungan CPIU Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
c) Pengadaan Jasa *Technical Assistant Institutional Development for Community-Based Flood Risk Management (ID-CBFRM)*. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan

pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda dan menghasilkan output berupa terfasilitasinya kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda.

d) Operasional dan Sarana Penunjang Program Operasional dan sarana penunjang program meliputi fasilitasi operasional kantor dalam rangka pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir, fasilitasi dan operasional staf pendukung, serta pengadaan sarana penunjang kantor pada Program *Flood Management ini Selected River basin* (FMSRB). Dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tahun 2020, terdapat penyesuaian kegiatan. Penyesuaian kegiatan berupa dilakukan perubahan kegiatan yang sebelumnya bersifat pertemuan secara langsung menjadi secara tidak langsung *(online)* serta perubahan penyesuaian anggaran dan kegiatan dari kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp15.032.812.556,00 atau 99,56% dari anggarannya sebesar Rp15.100.000.000,00.

b. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP).

1) Latar Belakang.

Program IPDMIP merupakan salah satu program yang dikembangakan untuk mendukung RPJMN Indonesia tahun 2015 – 2019 yang memprioritaskan peningkatan produktivitas tanaman pangan, melalui revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih, perbaikan irigasi melalui pembangunan 65 waduk dan 3 juta ha jaringan irigasi, perbaikan pengelolaan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif pada proses perencanaan provinsi dan kabupaten/kota. Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan *ASEAN Infrastruktur Fund Limited* (AIF) yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 3529-INO dan *Loan Agreement* Nomor 8327-INO (AIF) pada tanggal 31 Juli 2017.

Program Kegiatan IPDMIP Loan-INO dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari *Asean Development Bank* (ADB) sebanyak USD 600 juta. Program tersebut dilaksanakan untuk pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Dengan satu pengertian bahwa kenyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia: (i) Kelembagaan petani, air dan irigasi lemah; (ii) Sistem irigasi kurang dan buruk pemeliharaannya; (iii) Kurangnya tenaga dan penyuluh pertanian; (iv) Prasarana kurang dan buruk pemeliharaannya; (v) Akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa terbatas; (vi) Kepemilikan lahan tidak jelas; (vii) Kesenjangan teknologi; (viii) Potensi komoditas bernilai tinggi terabaikan.

Program kegiatan IPDMIP akan memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi yang airnya dipasok oleh waduk di daerah lumbung pangan yang belum ditangani oleh kegiatan lain. Berdasarkan penilaian cepat (*rapid assessment*) kondisi jarigan irigasi di seluruh Indonesia yang dilaksanakan baru-baru ini, kegiatan akan menargetkan provinsi dan kabupaten yang kebanyakan jaringan irigasinya rusak sedang hingga ridak berat yang sepenugnya tidak dapat ditanggulangi dengan dana alokasi DAK hingga saat ini.

2) Tujuan Program.

Tujuan dari program kegiatan IPDMIP agar berkontribusi dalam pencapaian prioritas RPJMN 2015-2019 diantaranya:

a) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Kerusakan sedang dan berat.
b) Pengelolaan infrastruktur irigasi yang efektif dan berkelanjutan.
c) Pengembangan tanaman bernilai tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di tingkat pedesaan.
d) Meningkatkan produksi beras dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan.

Dengan sasaran program "Terwujudnya Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pendapatan Masyarakat Pedesaan di Indonesia", program kegiatan IPDMIP mengelompokan output programnya kedalam 4 komponen sebagai berikut:

a) Komponen 1 : Penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan pertanian beririgasi.
b) Komponen 2 : Peningkatan pengelolaan sistem irigasi.
c) Komponen 3 : Peningkatan infrastruktur sistem irigasi.
d) Komponen 4 : Peningkatan pendapatan pertanian beririgasi.

3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) adalah sebagai berikut :

Pemberi PHLN	:	*Asian Development Bank* (ADB) dan dan *ASEAN Infrastruktur Fund Limited (*AIF).
Besaran PHLN	:	USD500.000.000,00 (ADB) dan USD100.000.000,00 (AIF)
Nomor Pinjaman PHLN	:	3529-INO dan 8327-INO (AIF)
Tanggal Efektif PHLN	:	8 September 2017
Nomor Register PHLN	:	1Z83YQPA (ADB) dan 11DDKS1A (AIF)
Closing Date PHLN	:	30 September 2023.

4) Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanan Kegiatan dari Program *Integrated Participatory*

Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) antara lain :

a) Bappenas selaku *National Steering Committee* (NSC).
b) Kementerian PUPR selaku *National Project Management Unit* (NPMU) dan *Executing Agency* kegiatan ini adalah Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
c) Kemendagri selaku *National Project Implementation Unit* (NPIU).
d) Kementerian Pertanian selaku *National Project Implementation Unit* (NPIU).

Lingkup kegiatan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri selaku NPIU yaitu:

a) Komponen I berupa penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem irigasi pertanian yang berkelanjutan serta reorganisasi dan penguatan Komisi Irigasi (KOMIR) dan pendampingan masyarakat (TPM).
b) Komponen 2 berupa peningkatan pengelolaan operasional dan pemeliharaan irigasi serta Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) dan Rencana Pengelolaan Pertanian Beririgasi (RP2I).

Metode pelaksanaan dalam rangka mencapai output Program Kegiatan IPDMIP adalah dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Beririgrasi secara Partisipatif dilaksanakan melalui:

a) Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR).

   Tujuan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR) untuk memastikan KOMIR berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pastisipatif. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan pemantauan di lapangan, penilaian dari hasil pemantauan dan pelaporan hasil kinerja KOMIR. Peserta terdiri dari unsur Pemerintah Pusat yaitu Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian serta Bappenas dan unsur daerah peserta program IPDMIP (14 Provinsi).

b) Dukungan Tenaga Sekretariat NPIU Bangda.

   Dukungan Tenaga Sekretarian NPIU Bangda bertujuan mendukung tugas kesekretariatan NPIU Ditjen Bina Bangda dalam mendukung pelaksanaan program IPDMIP. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan rapat persiapan dan

penentuan proses pengadaan. Pelaksana kegiatan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

c) Supervisi dan Monitoring.

Tujuan dari Supervisi dan Monitoring adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program IPDMIP dan terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan rapat persiapan dan kemudian dilanjutkan kunjungan lapangan ke lokasi program. Pelaksana kegiatan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

d) Fasilitasi Operasional NPIU Bangda.

Fasilitasi Operasional NPIU Bangda bertujuan meningkatkan kinerja, fungsi, dan kordinasi pelaksanaan kegiatan bagi para pengelola program dan menghasilkan output kegiatan berupa meningkatnya kinerja Program IPDMIP. Kegiatan dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pelaporan.

e) Pengadaan Jasa Konsultan Pusat dan Regional.

Pengadaan Jasa Konsultan Pusat dan Regional bertujuan memfasilitasi pengadaan konsutan (*Technical Assistant*) guna mendukung pelaksanaan program kegiatan di NPIU Ditjen Bina Bangda. Kegiatan dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pelaporan.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp28.036.722.742,00 atau 99,17% dari anggarannya sebesar Rp28.272.611.000,00.

c. *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP).

1) Latar Belakang.

Project Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan *project* yang diselenggarakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Sumber Daya Air. *Project* ini merupakan wujud dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan daya saing daerah. Realisasi dari RPJMN tahun 2020 – 2024 ini dilakukan dengan konsep Modernisasi Irigasi. Modernisasi irigasi yang akan diimplementasikan di Indonesia dalam *Project* SIMURP ini menggunakan konsep kerangka 5 (lima) pilar modernisasi irigasi yang terdiri dari :

a) *Irrigation Water Availability;*

b) *Irrigation Infrastructure;*

c) *Irrigation Management;*

d) *Organization and Institution; dan*

e) *Human Resources.*

Pelaksanaan lima pilar ini harus bergerak bersama-sama karena kegiatan Program SIMURP ini merupakan kegiatan yang sequence dan saling mendukung antara Kemendagri dengan kementerian lain yang terkait.

Project SIMURP dilaksanakan untuk meningkatkan layanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan skema irigasi di daerah-daerah terpilih, khususnya pada daerah irigasi kewenangan pusat yang berada di atas 3.000 ha dan sistem irigasi strategis nasional. Dalam pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia di tingkat daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi pada Program SIMURP akan diperkenalkan satu instrument yaitu *Irrigation Service* Agreement (ISA). *Irrigation Service Agreement* (ISA) merupakan kesepakatan bersama/perjanjian antara pengelola irigasi dengan petani pemakai air dan/atau pengguna air lainnya dalam pelayanan air irigasi.

2) Tujuan program.

Tujuan dari Project SIMURP dalam *Loan Agreement* telah disebutkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan irigasi di daerah yang dipilih. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi. penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen, operasi dan pemeliharaan. Namun dengan keterbatasan dana APBN, maka untuk mendukung tujuan dari Program SIMURP Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengupayakan pendanaan dengan menggunakan Pinjaman Luar Negeri. Pelaksanaan Kegiatan Project SIMURP pada NPIU Ditjen Bina Bangda terdiri dari 3 Komponen besar yaitu Komponen A merupakan kegiatan Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak, Komponen B merupakan kegiatan Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strtategis dan Komponen C merupakan kegiatan Pengelolaan Proyek.

Kegiatan Proyek *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) dilaksanakan di 8 Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, melibatkan 4 Kementerian/Lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kemendagri, Kementerian Pertanian. Selain berada di 8 provinsi tersebut, kegiatan ini juga dilaksanakan di 17 Kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Indramayu, Kabuapten Cirebon,

Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jember, Kabupaten Katingan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Pengkajene Kepulauan dan Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan *Project* SIMURP akan dilaksanakan di 12 Daerah Irigasi dan 2 Daerah Irigasi Rawa yang menjadi kewenangan pusat yaitu Daerah Irigasi Sei Ular, Daerah Irigasi Cipancuh, Daerah Irigasi Cikeusik, Daerah Irigasi Banjarcahyana, Daerah Irigasi Kedung Putri, Daerah Irigasi Talang, Daerah Irigasi Pondok Waluh, Daerah Irigasi Jurang Batu, Daerah Irigasi Jurang Sate, Daerah Irigasi Pamakkulu, Daerah Irigasi Tabo-tabo, Daerah Irigasi Sanrego, dan 2 Daerah Irigasi Rawa yaitu Daerah Irigasi Karang Agung Hilir dan Daerah Irigasi Katingan. Selain itu Project SIMURP juga dilaksanakan di Daerah Irigasi Jatiluhur. Tujuan dari Project SIMURP sebagaimana yang tercantum dalam *Loan Agreement* adalah untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan irigasi di daerah yang dipilih. Hal ini dicapai melalui rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi, penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen, operasi dan pemeliharaan. Namun karena keterbatasan dana APBN, maka untuk mendukung tujuan ini Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengupayakan pendanaan dengan menggunakan Pinjaman Luar Negeri. Dengan adanya modernisasi irigasi di Indonesia dalam *Project* SIMURP maka *outcome*/hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas produksi pangan dan mengurangi impor pangan.
b) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
c) Mengendalikan harga pangan yang selalu bergejolak pada musim tertentu.
d) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga meminimalisir kasus-kasus kekurangan gizi khususnya pada anak.

Project modernisasi irigasi harus dapat mendukung berbagai tujuan pembangunan tidak hanya produksi tanaman pangan dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program Kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) adalah sebagai berikut:

Pemberi PHLN	:	IBRD dan AIIB
Besaran PHLN	:	USD250.000.000,00 dan USD250.000.000,00
Tanggal	:	25 Juli 2018 (IBRD) dan 11 Juli

Penandatanganan		2018 (AIIB)
Nomor Pinjaman PHLN	:	IBRD No. 8891-ID dan AIIB No. L0060A
Tanggal Efektif PHLN	:	25 Oktober 2018 (IBRD) dan 11 Oktober 2018 (AIIB)
Nomor Register PHLN	:	1NF3PM6A dan 1HS4NF9A
Closing Date PHLN	:	30 September 2024

4) Pelaksana Kegiatan.

Lembaga pelaksana kegiatan pada Project SIMURP terdiri dari Kementerian dan Lembaga, yaitu:

a) Bappenas selaku *National Steering Committee for Water Resources* (NSCWR).

b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku *Executing Agency Project* SIMURP.

c) Kemendagri selaku *National Project Implementing Unit* (NPIU) yang pelaksanaan kegiatan project berada pada Subdirektorat Pekerjaan Umum (PU) dan Subdirektorat Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (KISP).

d) Kementerian Pertanian.

Realisasi belanja untuk Program Kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp35.613.132.668,00 atau 99,87% dari anggarannya sebesar Rp35.659.998.000,00.

d. ***National Urban Supply Water Project*** **(NUSWP)**.

1) Latar Belakang.

PJMN 2020-2024 sadar bahwa permasalahan di sektor akses air minum layak masih sangat besar, maka dalam periode perencanaan tersebut pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses air minum layak menjadi 75,34%, termasuk di antaranya 30,35% akses perpipaan. Untuk memenuhi target tersebut, RPJMN 2020-2024 menyusun salah satu proyek prioritas nasional berupa pembangunan 10 juta sambungan rumah. Sementara untuk mendukung pencapaiannya, ditargetkan 100% PDAM meningkat kinerjanya menjadi sehat di akhir periode perencanaan jangka menengah.

Pemenuhan target 10 juta sambungan rumah dalam rangka memperluas dan memenuhi layanan dasar di sektor air minum tentu menjadi tanggung jawab dan diharapkan dikontribusi oleh banyak pihak dan program. *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) yang didukung oleh dana pinjaman Bank Dunia diharpakan menjadi salah satu kontributor pencapaian target tersebut. Kemendagri, selaku pembina pemerintah daerah dan menjadi salah satu CPIU dari NUWSP, diharapkan mampu berkontribusi dalam rangka memastikan pemerintah daerah sebagai pelaksana SPM bersama PDAM-nya untuk menjangkau seluas

mungkin akses masyarakat terhadap air minum.

Permasalahannya, pekerjaan rumah untuk perluasan akses air minum masih sangat besar. Di luar persoalan teknis terkait pembangunan dan penyediaan prasarana fisik layanan air minum, permasalahan akses terhadap air minum juga terjadi mulai dari sisi kelembagaan dan penyusunan dokumen perencanaan. Poin krusial pada fase ini antara lain adalah masih minimnya kapasitas Pemda dan PDAM untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur dan tepat sasaran. Permasalahan kelembagaan dan kapasitas aparatur ini akhirnya juga merembet ke permasalahan kurangnya sinkronisasi kebijakan/program/ kegiatan antara target dan priroitas pembangunan nasional dan daerah. Di samping masih kerap terjadi masalah dalam sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di daerah, juga ketika mengintegrasikan program/kegiatan baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran.

2) Peranan Kemendagri.

Salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Cq. Ditjen Bina Bangda dalam rangka memastikan dukungan pemerintah dalam pencapaian target nasional peningkatan akses masyarakat terhadap air minum adalah bagaimana meningkatkan kapasitas Pemda dalam meningkatkan layanan penyediaan air minum. Fungsi ini semestinya perlu dilaksanakan terutama dalam rangka melakukan pembinaan umum penerapan SPM yang menjadi kewajiban Pemda, sekaligus dalam rangka menjalankan tugas CPIU dalam proyek NUWS.

Pekerjaan rumah di sektor penguatan kapasitas Pemda dalam program penyediaan air minum, melihat kondisi eksisting di atas, tentu bukan hal yang mudah dan oleh karenanya penting untuk terus dilakukan. Untuk itu, Kemendagri cq. Ditjen Bina Bangda selaku pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjadi salah satu CPIU NUWSP memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Program Penyediaan Air Minum Perkotaan di Kawasan Permukiman – NUWSP

3) Tujuan Program.

Tujuan NUWSP adalah untuk untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan (MBR dan non-MBR) dan meningkatkan kapasitas dankinerja Pemda dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

Melalui pelaksanaan NUWSP diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian target universal akses air minum perkotaan melalui penambahan 1,2 juta Sambungan Rumah (SR) baru di beberapa kota terpilih.

4) Lingkup Program.

Lingkup Program *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) merupakan program kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendagri, dan *World Bank* untuk penyediaan Air minum yang layak di daerah Perkotaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen sebagai berikut:

a) Komponen 1 : Dukungan Investasi untuk Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan.

b) Komponen 2 : Bantuan Teknis dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan PDAM.

c) Komponen 3 : Dukungan Penasihat dan Pengembangan Kebijakan untuk Pemerintah Pusat.

d) Komponen 4 : Implementasi Program dan Dukungan Manajemen.

5) Target Kegiatan/Program.

a) 200 pemda berpartisipasi aktif dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas.

b) Minimal 20 Kab/Kota yang mengintegrasikan kebijakan air minum nasional dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/Renstra PD/RKPD).

c) Minimal ada 20 Kab/Kota yang meningkatkan alokasi belanja daerah untuk sektor air minum.

6) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri program *National Urban Supply Water Project* (NUSWP).

Nomor Perjanjian	: IBRD 8872-ID
Nomor Register	: 1CPUK3GA
Tanggal Penandatanganan	: 2 Agustus 2018
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	: 8 Agustus 2018
Closing Date	: 31 Desember 2022
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	: USD100.000.000,00
Jumlah Intial Deposit	: USD1.000.000,00
Nomor Rekening Khusus	: 601333411980

7) Pelaksana Kegiatan.

a) *Executing Agency* : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) CPMU Dirjen Cipta Karya, Direktorat Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruahan Rakyat.

c) CPIU :

- Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
- Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda,

Kemendagri.

8) Pelaksanaan Kegiatan NUWSP DIPA TA 2020.

Realisasi selama TA 2021, penyesuaian anggaran, dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 antara lain :

a) *Konsultan Data Support System.*
b) Advisor Individual Konsultan.
c) *Workshop* Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Daerah.
d) *Workshop* Evaluasi Kegiatan Tahunan.
e) *Talk Show* Peningkatan Efektifitas Penyelenggaran Air Minum Di Daerah.
f) *Technical Assistance and Capacity Building Team For Local Governmrnt* (TACT-LG).
g) Dukungan Operasional Kesekretariatan.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.730.906.574,00 atau 99,74% dari anggarannya sebesar Rp12.763.588.000,00.

e. *National Urban Development Project* (NUDP).

1) Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan *National Urban Development Project* (NUDP) atau Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. NUDP dikembangkan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, diantaranya yaitu:

a) Pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan.
b) Upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan perkotaan secara efisien.
c) Penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
d) Pengembangan akses pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan.

2) Tujuan Program.

National Urban Development Project (NUDP) bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta perencanaan investasi (*capital investment*). *National Urban Development Project (*NUDP) akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2020-2024 dengan biaya sebesar IDR 32,4 milyar berasal dari Rupiah Murni (APBN) dan

USD 49,6 juta dari pinjaman Bank Dunia. Pembiayaan proyek seluruhnya digunakan untuk kegiatan bantuan teknis (*Technical Assistance*), tidak mencakup pembiayaan untuk investasi infrastruktur.

Kesenjangan pembiayaan infrastruktur seringkali diidentifikasi sebagai faktor penghambat pengembangan kota, namun ternyata bukan penyebab tunggal atas masalah tersebut. Meskipun upaya peningkatan pembiayaan infrastruktur sudah banyak dilakukan, namun investasi yang dilakukan tidak efisien yang disebabkan oleh:

a) Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota; dan
b) Tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah. NUDP melalui berbagai intervensi dan program peningkatan kapasitas yang diberikan, diharapkan dapat memfasilitasi terlaksananya berbagai inovasi dan pendekatan baru pada perencanaan pembangunan kota, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi kedua jenis perencanaan di tingkat kota.

NUDP terdiri dari empat komponen program, yaitu:

a) Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan;
b) Komponen 2: Keterpaduan perencanaan untuk pembangunan perkotaan;
c) Komponen 3: Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan; dan
d) Komponen 4: Dukungan pelaksanaan proyek.

3) Target NUDP.

Output Target dari NUDP ini adalah agar perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal (*capital investment*) dapat ditingkatkan. Pencapaian target NUDP diukur dengan tiga indikator utama, sebagai berikut:

a) Tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan.
b) Tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu.
c) Keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.

Indikator utama diatas digunakan untuk memantau pencapaian program secara regular (tahunan).

4) Rincian Pinjaman.

Rincian pinjaman dalam rangka *National Urban Development Project* (NUDP)

Nomor Pinjaman PHLN	: IBRD 8976-ID
Nomor Registrasi	: 1PF7SCLA
Tanggal Penandatanganan	: 14 November 2019
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	: 25 November 2019
Clossing Date	: 31 Desember 2024
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	: USD49.6000.000,00
Jumlah Intial Deposit	: USD2.562.500,00
Nomor Rekening Khusus	: 601.342411980

5) Pelaksanaan Kegiatan.

NUDP akan dilaksanakan maksimal di 15 (lima belas) kota pilot project di Indonesia. Kegiatan ini dikembangkan sebagai platform nasional pembangunan kota yang selanjutnya dapat menjadi contoh untuk diperluas di seluruh kota-kota di Indonesia. NUDP dilaksanakan secara bersama oleh:

a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebagai *Executing Agency* (EA) proyek NUDP dan Central Project Management Unit (CPMU) dibentuk di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta Project Implementation Unit (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu;

b) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk penguatan koordinasi dan kebijakan nasional, yang akan dikoordinasikan oleh Direktorat Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional;

c) Kemendagri (Kemendagri) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu, yang terdiri dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II (SUPD II) dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi dan Pembangunan Daerah (PEIPD) pada Ditjen Bina Bangda

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.991.965.575,00 atau 99,96% dari anggarannya sebesar Rp3.993.678.000,00.

f. *Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP).*

Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP*)* merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung gerakan Citarum Harum. Terdapat empat komponen kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan dalam pengelolaan sampah, dukungan dalam perencanaan yang terpadu dan

peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan dukungan dalam pelaksanaan program dan bantuan teknis.

Pengelolaan sampah yang kurang memadai akan berdampak pada berbagai aspek, seperti lingkungan, estetika, kesehatan manusia, serta dapat memberikan dampak lanjuran yang berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Umumnya, sampah yang tidak tertangani akan berakhir dengan cara dibakar secara terbuka, dikubur, ataupun dibuang bebas ke lingkungan tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal tersebut menjadikan sampah yang tidak tertangani berpotensi menhadi sumber pencemaran yang signifikan, menurunkan produktifitas, dan menggagnggu kesehatan serta memicu timbulnya penyakit, merusak estetika, hingga tingginya pengelaran untuk biaya kesehatan. Sampah yang tidak tertangani yang masuk ke badan sungai pun akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Di sisi lain, pencegahan banjir dengan pengerukan sampah pada saluran air pun menelan biaya yang cukup tinggi terutama bagi kota-kota yang berada di pesisir dimana sampah akan bermuara sehingga berpotensi dan mengahambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program Kegiatan *Improvement Of Solid Waste Management To Support Regional And Metropolitan Cities Project* (ISWMP), merupakan program yang di desain untuk dapat membantu pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang layak dengan peningkatan keseluruhan aspek terkait dalam sektor pengelolaan sampah untuk mendukung upaya pencapaian target akses universal persampahan, khususnya di wilayah perkotaan.

Tujuan utama dari pengembangan program ISWMP adalah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah bagi penduduk perkotaan pada 8 (delapan) kota terpilih di wilayah Indonesia diantaranya : Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung barat, Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, dan Kab. Karawang.

Dalam rangka mencapai tujuan utama di atas, maka program ini akan dilaksanakan melalui 4 komponen sebagai berikut:

1) Komponen 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sampah
2) Komponen 2. Perencanaan Terpadu dan Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3) Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah
4) Komponen 4. Dukungan Pelaksanaan Program, Bantuan Teknis, dan Monitoring dan Evaluasi.

Penerima manfaat Program Kegiatan *Improvement Of Solid Waste Management To Support Regional And Metropolitan Cities Project* (ISWMP) antara Lain:

1) Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab diberbagai aspek, baik teknis maupun administratif, dalam pengelolaan sampah.
2) Pemerintah Provinsi yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah regional.
3) Pemerintah Kabupaten/Kota prioritas.

Lembaga pelaksana kegiatan pada Program ISWMP terdiri dari Kementerian dan Lembaga, yaitu:

1) *Executing Agency* : Direktur Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2) *Steering Committee* : Bappenas, Kemenko Maritim, KemenPUPR, KemenKeu, Kemendagri.
3) CPMU : Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.
4) CPIU terdiri dari :
    a) Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum
    b) Direktorat SUPD I & II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
    c) Ditjen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 – Kementerian LHK.

Peran CPIU Ditjen Bina Bangda dalam ISWMP, adalah :

1) Membina Pemda dalam pengarusutamaan/prioritisasi pembangunan sektor persampahan;
2) Mendorong penyusunan kebijakan dan panduan tingkat daerah dalam rangka pencapaian target pengelolaan persampahan;
3) Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pengelolaan persampahan;
4) Menfasilitasi Pemda kab/kota pilot dalam menetapkan target Proyek SWM sesuai kinerja kab/kota masing-masing.

ISWMP merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari IBRD dengan Nomor 9021-ID dan Nomor Register 1HFQ7GNA. Penandatanganan pinjaman dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020, efektif pinjaman mulai tanggal 3 April 2020 dan berakhir tanggal 30 November 2025. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp8.428.417.805,00 atau 98,78% dari anggarannya sebesar Rp8.532.775.000,00.

3. Pada Tahun 2021 Ditjen Bina Pemdes mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dengan program ***Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low-Income Communities / Community Based Water Supply Project*** **atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).**

Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Perpres Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan, yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019. Target dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), yaitu jumlah masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target aman air minum dan sanitasi melalui pengarustamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi bagi masyarakat merupakan kebijakan utama pemerintah untuk mempercepat peningkatan dan pendistribusian kesejahteraan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Penyediaan Sanitasi adalah salah satu program dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, yang berorientasi kepada proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu secara mandiri menyediakan sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

a. Tujuan Program.

   Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan periurban. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka program ini akan dilaksanakan melalui 5 komponen sebagai berikut:

   1) Komponen 1 Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan daerah. Target yang ingin dicapai dari program ini adalah memampukan masyarakat untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan SPAMS Perdesaan. Membangun komitmen dan kapasitas pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah dan desa.
   2) Komponen 2 Peningkatan perilaku dan layanan hidup bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat. Membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih (seperti diare) melalui perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan peningkatan akses sanitasi dasar.
   3) Komponen 3 Penyediaan sarana air minum dan sanitasi. Menambah jumlah penerima manfaat akses layanan air minum layak dan pemanfaat sarana sanitasi sekolah untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.
   4) Komponen 4 Hibah Insentif. Menyediakan insentif bagi kabupaten

dan desa yang dapat mencapai target akses air minum dan sanitasi secara berkelanjutan, termasuk pengembangan dan perbaikan kinerja SPAM. Insentif ini diberikan sebagai salah satu upaya untuk pengarusutamaan pendekatan berbasis masyarakat dalam program air minum dan sanitasi.

5) Komponen 5 Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program. Menyediakan dukungan teknis pengelolaan pelaksanaan program Komponen 1, 2, 3 dan 4 secara terpadu dan terintegrasi serta memberikan dukungan teknis kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Central Project Implementation Unit* (CPIU) dalam tugasnya sebagai pengelola Program Pamsimas secara keseluruhan.

b. Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah sebagai berikut :

Nomor Perjanjian	:	IBRD 8578-ID
Pemberi Pinjaman	:	World Bank
Nomor Register	:	2B7K43PA
Tanggal Penandatanganan	:	30 September 2016
Tanggal Efektif Perjanjian	:	22 Agustus 2016
Clossing Date	:	31 Desember 2022
Jumlah Pinjaman	:	USD300.000.000,00
Junlah Initial Deposit	:	*variable* sesuai proyeksi pengeluaran 6 (enam) bulan kedepan pada IFR

c. Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanan Kegiatan dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) antara lain:

1) *Executing Agency* : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2) *Steering Committee* : Bappenas, KemenPUPR, Kemendes, Kemendagri, Kemenkes.
3) CPMU Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4) CPIU :
    a) Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.
    b) Direktorat SUPD I & II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
    c) Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri.
    d) Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes.

Pada Tahun 2021, program pengelolaan air minum dan sanitasi desa tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp8.518.781.000,00.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.668.369.791,00 atau 90,02%.

4. Pada Tahun 2021 Ditjen Bina Bangda mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebesar Rp25.436.640.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.375.231.312,00 atau 99,76 % dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut**:**

a. ***Second Additional Financing For Third Water Supply and Sanitation For Law-Income Comunities*** **atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).**

1) Latar Belakang.

Sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Daerah, dimana pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan urusan konkuren, dimana terdapat 6 urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana salah satunya adalah urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan dalam lampiran pula bahwa diantara sub urusan yang ditangani adalah Air Limbah, Persampahan, dan Drainase.

Sebagai sebuah urusan wajib pelayanan dasar yang termasuk dalam urusan konkuren dan termaktub pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai prioritas nasional dengan target *universal access* "Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar". Maka sanitasi (persampahan, air limbah, dan drainase) adalah sebuah urusan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara serius oleh Pemerintah pusat agar pencapaian target nasional dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2) Peran Kemendagri.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda, mempunyai fungsi dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 UU No 23 Tahun 2014 yang bersifat umum meliputi:

a) Pembagian Urusan Pemerintahan;
b) Kelembagaan Daerah;
c) Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d) Keuangan Daerah;
e) Pembangunan Daerah;
f) Pelayanan publik di Daerah;

g) Kerja sama Daerah;

h) Kebijakan Daerah;

i) Kepala Daerah dan DPRD; dan

j) Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Mengingat bahwa urusan air minum dan sanitasi secara riil adalah peningkatan akses masyarakat di seluruh Indonesia, maka penyediaan air minum dan pembangunan sanitasi yang terdapat di wilayah kabupaten/kota membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang sangat intens oleh pemerintah pusat, dan mandat yang diemban Kemendagri terutama terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyediaan air minum dan pembangunan sanitasi di daerah dirasakan semakin mendesak dilakukannya kegiatan-kegiatan riil yang mencerminkan pelaksanaan fungsi dari Kemendagri. Sebagaimana yang termaktub dalam Perpres No 11 Tahun 2015 tentang Kemendagri, yang spesifik dinyatakan pula dalam Pasal 18 bahwa Ditjen Bina Bangda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Tujuan Program.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan periurban. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka program ini akan dilaksanakan melalui 5 komponen sebagai berikut:

a) Komponen 1 Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan daerah. Target yang ingin dicapai dari program ini adalah memampukan masyarakat untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan SPAMS Perdesaan. Membangun komitmen dan kapasitas pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah dan desa.

b) Komponen 2 Peningkatan perilaku dan layanan hidup bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat. Membantu masyarakat dan institusi lokal dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih (seperti diare) melalui perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan peningkatan akses

sanitasi dasar.

c) Komponen 3 Penyediaan sarana air minum dan sanitasi. Menambah jumlah penerima manfaat akses layanan air minum layak dan pemanfaat sarana sanitasi sekolah untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.

d) Komponen 4 Hibah Insentif. Menyediakan insentif bagi kabupaten dan desa yang dapat mencapai target akses air minum dan sanitasi secara berkelanjutan, termasuk pengembangan dan perbaikan kinerja SPAM. Insentif ini diberikan sebagai salah satu upaya untuk pengarusutamaan pendekatan berbasis masyarakat dalam program air minum dan sanitasi.

e) Komponen 5 Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program. Menyediakan dukungan teknis pengelolaan pelaksanaan program Komponen 1, 2, 3 dan 4 secara terpadu dan terintegrasi serta memberikan dukungan teknis kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Central Project Implementation Unit* (CPIU) dalam tugasnya sebagai pengelola Program Pamsimas secara keseluruhan.

4) Rincian Hibah.

International Bank for Recostruction and Development (IBRD) atau *World Bank* memberikan hibah untuk mendukung Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor Grant TF0A6336, Nomor Register 2B7K43PA yang mulai efektif pada 29 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2021.

5) Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanan Kegiatan dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) antara lain :

a) *Executing Agency* : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) *Steering Committee* : Bappenas, KemenPUPR, Kemendes, Kemendagri, Kemenkes.

c) CPMU Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d) CPIU :

- Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.
- Direktorat SUPD I & II Ditjen Bina Pembangunan Daeraah, Kemendagri.
- Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri.
- Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.862.210.548,00 atau 99,91% dari anggarannya sebesar Rp3.865.753.000,00.

b. Investing in Nutrition and Early Years (INEY).

1) Latar Belakang.

Kegiatan *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) merupakan hibah terencana yang berasal dari Bank Dunia (*World Bank*).

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang diluncurkan Wakil Presiden pada tanggal 12 Juli 2017 ditujukan untuk mengkonsolidasikan dukungan politis dan kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah, memperkuat penyelenggaraan kerangka kerja kebijakan multi-sektor, serta mendorong konvergensi program-program nasional, daerah, dan masyarakat. Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terdiri dari lima pilar yaitu:

a) Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara.
b) Kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan, perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas.
c) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat.
d) Mendorong kebijakan gizi dan ketahanan pangan.
e) Pemantauan dan evaluasi.

Strategi nasional ini memprioritaskan sejumlah intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan kelompok sasaran prioritas adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan/atau anak berusia 0-24 bulan (selanjutnya disebut dengan Rumah Tangga 1000 HPK). Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* menetapkan 100 kabupaten lokasi prioritas penanganan pada tahun 2018, dan merencanakan perluasan penanganan secara bertahap sampai dengan seluruh kabupaten/kota dapat tertangani pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan instrumen P*for*R Bank Dunia agar berbagai program yang termasuk dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat dilaksanakan secara konvergen dan efektif mendukung strategi percepatan penurunan *stunting*. Program P*for*R *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) selama tahun 2018-2021 akan mendorong konvergensi program yang termasuk dalam intervensi nutrisi prioritas. Program P*for*R INEY bertujuan untuk meningkatkan penggunaan intervensi nutrisi spesifik dan sensitif secara simultan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) rumah tangga sasaran di Kabupaten/Kota prioritas.

Pelaksanaan Program P*for*R INEY didukung dengan komponen IPF. Komponen IPF dibiayai oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Komponen IPF digunakan untuk

mendukung investasi yang bersifat katalitik dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi jangka panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan.

2) Peranan Kemendagri.

Sejumlah program yang tergolong dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif telah ditetapkan sebagai bagian dari paket program prioritas untuk percepatan penurunan *stunting* dalam strategi nasional. Kemendagri berperan melakukan koordinasi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam implementasi pilar 3 yang melibatkan kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Pendekatan Pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu melakukan konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan strategi nasional dimaksud mengupayakan agar semua *stakeholder*s bersama-sama berkolaborasi untuk menurunkan prevalensi *stunting* yang diukur dengan *Key Performance Indikator* atau yang disebut dengan *Disbursement Link Indicator* (DLI). Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda melaksanakan DLI ke-7, yaitu *Increased Predictability and Result-Orientation of Fiscal Transfers that Support Convergence* atau Konsep Penilaian Kinerja Daerah dalam melaksanakan konvergensi program penurunan *stunting*.

3) Tujuan Program.

Tujuan pengembangan proyek dari komponen IPF adalah sama dengan program P*for*R, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan intervensi gizi secara bersamaan pada rumah tangga 1.000 HPK di kabupaten prioritas. Komponen IPF akan dibiayai oleh GFF yang memungkinkan adanya peningkatan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. lnvestasi tersebut akan meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui dukungan kepada mitra pemerintah utama dalam melaksanakan program pengurangan *stunting* konvergensi di tingkat nasional dan lokal.

Kegiatan Percepatan Pencegahan *Stunting* mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program melalui dukungan kepada mitra pemerintah utama dalam melaksanakan program pengurangan *stunting* konvergensi di tingkat nasional dan lokal, dan secara khusus mempunyai sasaran sebagai berikut:

a) Menyediakan dukungan pengembangan kapasitas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan Aksi Konvergensi.

b) Melalui Pemerintah Provinsi secara periodik melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan pencegahan *stunting.*

c) Pengembangan sistem daring dan pertemuan-pertemuan untuk mempercepat proses pembelajaran dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan Aksi Konvergensi.

Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, konsolidasi serta sinkronisasi program pusat dan daerah sesuai dengan tugas Kemendagri dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* (Pilar ke-3) diwujudkan dalam bentuk:

a) Penerbitan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi penurunan *stunting* dan mensosialisasikan petunjuk teknis dimaksud kepada 34 Provinsi, 260 Kabupaten/Kota lokus tahun 2020 dan 100 Kabupaten/Kota lokus tahun 2021.

b) Penyelenggaraan Workshop Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, *Benchmarking* dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi pada bulan November 2020 di 4 (empat) Regional, yaitu Yogyakarta, Denpasar, Ambon, dan Batam. Hasil workshop berupa praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam penanganan *stunting* dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan direplikasikan bagi pemerintah daerah lainnya. Workshop dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

c) Melakukan analisis terhadap instrumen monitoring dan evaluasi berupa kuesioner yang dikirimkan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi. Berdasarkan hasil analisis teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi.
- Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap perencanaan dan penganggaran daerah guna mendorong efektifitas percepatan penurunan prevalensi *stunting*.
- Masih terbatasnya kabupaten/kota dan desa yang ditetapkan menjadi lokus s*tunting*, sementara masih terdapat lokasi lain yang memiliki potensi angka *stunting* relatif tinggi.

4) Publikasi.

Hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021 dipublikasikan melalui website www.aksi.bangda.kemendagri.go.id pada tanggal 1 November 2021. Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lokus dalam upaya

meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota non lokus dapat menggunakan hasil penilaian kinerja tersebut sebagai bahan pembelajaran 8 (delapan) aksi konvergensi untuk direplikasi dalam upaya percepatan.

5) Rincian Hibah.

International Bank for Recostruction and Development (IBRD) atau *World Bank* memberikan hibah sebesar USD20.000.000,00 untuk mendukung Program Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* P*for*R *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor TF-A7565 dengan Nomor Register 278EATNA yang mulai efektif pada tanggal 1 Agustus 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ditjen Bina Bangda Kemendagri memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp21.570.887.000,00 untuk melaksanakan program *stunting* melalui mekanisme pembayaran rekening khusus nomor 602190411980.

Ditjen Bina Bangda telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan untuk periode Tahun Anggaran 2021 yang sudah diajukan oleh *Executing Agency* (Setwapres) dan sudah disetujui oleh Bank Dunia. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp21.513.020.764,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp21.570.887.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program/kegiatan/output untuk program percepatan penurunan *stunting* pada Ditjen Bina Bangda sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 30

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Ditjen Bina Bangda s.d. 31 Desember 2021

Program/Kegiatan/Ouput/Suboutput/Komponen/ Subkomponen/Detil					Anggaran Semula	Anggaran setelah revisi	Realisasi	%
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah					**11.000.000.000**	**21.570.887.000**	**21.513.020.764**	**99,73**
FB A.0 32	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)				11.000.000.000	21.570.887.000	21.513.020.764	99,73
	51	Asistensi dan Supervisi Kab/Kota Dalam Implementasi/Konvergensi Program Penurunan Pelayanan Stunting			11.000.000.000	21.570.887.000	21.513.020.764	99,73
		51	A	Assistensi dan Supervisi Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Implementasi/Konvergensi Program Penanganan Penurunan Stunting	3.030.494.000	3.081.819.000	3.081.819.000	100,00
			B	Dukungan Operasional Kesekretariatan	7.169.506.000	18.489.068.000	18.431.201.764	99,69
	52	A		Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja	800.000.000	-	-	0,00

Kemendagri memiliki Program Tata Kelola Kependudukan yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil. Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah Kegiatan Akta Kelahiran yang Diterbitkan. Serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung

kegiatan tersebut pada tahun 2021, yaitu:

1. Sosialisasi kebijakan pencatatan kelahiran yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi mengenai kebijakan dalam pelayanan pencatatan sipil baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya pencatatan kelahiran.
2. Asistensi, supervisi dan pendampingan pencatatan kelahiran secara online yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pencatatan kelahiran, serta asistensi, supervisi dan pendampingan pencatatan kelahiran yang belum mencapai target nasional di daerah dengan tujuan untuk mendorong tumbuhnya inisiatif dalam meningkatkan cakupan Akta Kelahiran dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran.

Sumber dana pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari rupiah murni dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp443.706.350,00 atau 95,61% dari anggaran belanja sebesar Rp464.085.000,00.

Kegiatan Akta Kelahiran yang diterbitkan ditagging sebagai program penurunan stunting. Dengan demikian anggaran belanja Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan program penurunan stunting, baik yang berasal dari hibah terencana maupun yang berasal dari rupiah murni sebesar Rp22.034.972.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp21.956.727.114,00 atau 99,64% dari anggarannya.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program/kegiatan/output untuk mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* pada Ditjen Dukcapil sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Mendukung Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Ditjen Dukcapil s.d. 31 Desember 2021

No	Program/Kegiatan/Output		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
A	Jenis Intervensi : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan Koordinasi dan Dukungan Teknis					
	Program Tata Kelola Kependudukan					
	1269.QAA.004	***Akta Kelahiran Yang Diterbitkan***	**800.000.000**	**464.085.000**	**443.706.350**	**95,61**
		200.000 Akta				
010.08.CP	051	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran	200.000.000	186.450.000	181.210.250	97,19
	052	Asistensi, Supervisi dan Pendampingan Pencatatan Kelahiran Secara On line	200.000.000	173.070.000	170.952.230	98,78
	053	Asistensi, Supervisi dan Pendampingan Pencatatan Kelahiran Yang Belum Mencapai Target Nasional	200.000.000	67.100.000	57.921.800	86,32
	054	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil di Perwakilan RI	200.000.000	37.465.000	33.622.070	89,74
TOTAL			**800.000.000**	**464.085.000**	**443.706.350**	**95,61**

5. Pada Tahun 2021 Ditjen Bina Keuda mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dengan program *Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project* dari Bank Dunia (*World Bank*)

sebesar Rp1.704.794.000,00.

a. Latar Belakang dan Tujuan Program

Dana Hibah Luar Negeri pada Ditjen Bina Keuda digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan, yaitu

1) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Modul Anggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, serta Pelaporan Barang Milik Daerah. Penyusunan modul anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta Barang Milik Daerah disusun berdasarkan proses bisnis yang dikembangkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dan terintegrasi dengan Sistem lnformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD).

Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini adalah modul anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelaporan Barang Milik Daerah akan digunakan untuk Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Kegiatan penyusunan modul anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp555.550.000,00 (US$38.051,37). Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp256.058.500,00 atau 46,09%.

2) Penyusunan Manual Modul, Penyusunan E-Learning Multimedia Penggunaan SIPD dan Desain Struktur SIPD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Manual Pengguna, Sistem *E-Learning* dan *Helpdesk* SIPD untuk membantu Ditjen Bina Keuda dalam rangka memudahkan para pengguna SIPD dalam memahami Langkah-langkah proses bisnis dan penggunaan SIPD. Penyusunan manual penggunaan SIPD dan modul *e-learning* multimedia terkait langkah-langkah penggunaan SIPD disusun berdasarkan bisnis proses yang dikembangkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dan terintergrasi dengan Sistem lnformasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menuju tata kelola pemerintahaan yang bersih, transparan dan akuntabel. Tujuan kegiatan ini adalah

a) Sebagai sebuah FMIS, SIPD harus menjadi sistem yang dikuasai oleh semua pengelola keuangan daerah di seluruh Pemerintah daerah di lndonesia,
a) Melalui SIPD, kebijakan pengelolaan keuangan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan juga struktur akun

dalam Bagan Akun Standar (BAS) dapat diimplementasikan secara luas dan terintegrasi.

Kegiatan Penyusunan Manual Modul, Penyusunan *E-Learning* Multimedia Penggunaan SIPD dan Desain Struktur SIPD dianggarkan sebesar Rp407.200.000,00 (US$ 27.890,41). Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp169.200.000,00 atau 41,55%.

3) **Pendampingan Teknis dalam Penyusunan Indikator Hasil Standar untuk Program dan Kegiatan Daerah Berdasarkan BAS Daerah**

Kegiatan pendampingan teknis dalam penyusunan indikator hasil standar untuk program dan kegiatan Daerah berdasarkan BAS Daerah akan dilakukan kegiatan antara lain, melaksanakan rapat internal dan dengan mengundang para tenaga ahli Kementerian/Lembaga terkait guna mendapatkan masukan-masukan dalam rangka penyusunan indikator. Tujuan kegiatan ini adalah tersusunnya indikator program dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang akan digunakan sebagai tolak ukur untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp134.600.000,00 setara dengan US$9.219,18 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp99.084.000,00 atau 73,61%.

4) **Uji Coba Laporan Keuangan tingkat Provinsi termasuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk mendukung konsolidasi Laporan Keuangan Pusat dan Daerah dengan menerapkan konsep GFS**

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 juga mengamanatkan laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*/GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studles*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan. Agar laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah maka diperlukan kegiatan

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan kinerja pemerintah daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp280.900.000,00 setara dengan US$19.239,73 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp84.497.244,00,00 atau 30,08%.

5) Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah maupun investasi yang ada di daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun sampai saat ini masih belum menunjukkan peranan yang signifikan, karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih relative sangat kecil.

Kegiatan peningkatan pendapatan daerah melalui inovasi pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya bertujuan meningkatkan kualitas aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Sasaran ini akan dapat dicapai melalui kegiatan penyusunan multimedia modul dan manual untuk *e-learning* tentang langkah-langkah peningkatan pendapatan daerah (RETF) untuk mewujudkan pengoptimalisasian PAD Berbasis Elektronik yang dapat digunakan di daerah maju maupun daerah tertinggal. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 326.544.000,00 setara dengan US$22.366,03 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp163.025.646,00,00 atau 49,92%.

b. Rincian Hibah

Rincian Hibah Luar Negeri Program Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project adalah sebagai berikut.

Nomor Perjanjian PHLN	: TF0B5420
Nomor Register	: 2FPJR4SA
Tanggal Penandatanganan	: 18 Mei 2021
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	: 18 Mei 2021
Closing Date	: 30 Juni 2025

Jumlah Hibah Luar Negeri	: USD3.259.000
Jumlah Initial Deposit	: Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan
Nomor Rekening Khusus	: 602199411980
Executing Agency	: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

c. Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi seluruh kegiatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp771.865.390,00 atau 45,28% dari anggarannya sebesar Rp1.704.794.000,00.

Rincian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri disajikan pada **Lampiran VI** (Ikhtisar PHLN).

Pada Laporan Keuangan Tahun 2021 terdapat kesalahan penganggaran dalam realisasi belanja barang maupun belanja modal sebagai berikut:

1. Kesalahan penganggaran antar belanja modal dengan rincian sebagai berikut.
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp203.114.600,00 dengan rincian sebagai berikut.
      1) Ditjen Dukcapil sebesar Rp199.469.600,00.
      2) Ditjen Bina Keuda sebesar Rp3.645.000,00.
   b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.242.109.900,00 dengan rincian sebagai berikut.
      1) Setjen sebesar Rp241.840.700,00.
      2) Ditjen Dukcapil sebesar Rp2.000.269.200,00.
   c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp9.332.135.368,00 pada Ditjen Dukcapil.
   d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap Lainnya Rp2.223.047.623,00 pada Ditjen Dukcapil.
   e. Belanja Modal Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp296.372.500,00 pada Setjen.
2. Belanja Barang yang menjadi Aset dengan rincian sebagai berikut.
   a. Belanja Barang Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.290.719.513,00 dengan rincian sebagai berikut.
      1) Setjen berupa Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp1.361.740.000,00.
      2) Itjen berupa Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp97.994.820,00.
      3) Ditjen Bina Bangda berupa Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp260.838.000,00 dan Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp132.572.140,00.
      4) Ditjen Dukcapil berupa belanja jasa sebesar Rp139.150.500,00.

5) Ditjen Bina Keuda berupa Belanja Jasa Profesi sebesar Rp80.306.650,00, Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp87.575.000,00, dan Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp130.542.403,00.

b. Belanja Barang Menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.824.068.657,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) IPDN Kampus Sumatera Barat berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.299.538.700,00.

2) Itjen berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp707.239.900,00.

3) PPSDM Regional Bukit Tinggi berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp817.290.057,00.

c. Belanja Barang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.148.255.945,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) IPDN Kampus Sumatera Barat berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp384.515.000,00.

2) Ditjen Bina Pemdes berupa Belanja Sewa sebesar Rp103.550.000,00.

3) Ditjen Bina Bangda berupa Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp31.515.000,00 dan Belanja Jasa Konsultan Rp504.900.000,00.

4) Ditjen Dukcapil berupa belanja jasa sebesar Rp10.999.400.500,00.

5) PPSDM Regional Bukit Tinggi berupa Belanja Bahan sebesar Rp25.920.000,00, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp32.477.445,00, dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.978.000,00.

d. Belanja Barang menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp719.072.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) IPDN Jatinangor berupa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp78.625.000,00.

2) IPDN Kampus Sumatera Barat berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp98.303.000,00.

3) PPSDM Regional Bukit Tinggi berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp542.144.105,00.

3. Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp1.689.839.707,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp331.880.500,00.

b. IPDN Jatinangor Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp995.000,00 dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp148.562.000,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp187.533.000,00 dan Beban

Pemeliharaan sebesar Rp304.374.000,00, realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang tidak menjadi aset karena kekurangan volume sebesar Rp1.460.000,00, serta realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp149.541.500,00 yang belum dapat diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diakui sebagai Belanja Modal Dibayar Dimuka (*prepaid*).

c. IPDN Kampus Jakarta Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp1.773.748,00.

d. IPDN Kampus Kalimantan Barat Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp7.392.000,00.

e. Inpektorat Jenderal Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp6.286.800,00.

f. Ditjen Polpum Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp8.506.800,00.

g. Ditjen Bina Adwil Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp61.496.050,00.

h. Ditjen Bina Bangda Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp6.745.000,00.

i. Ditjen Otda Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp10.857.000,00.

j. Ditjen Dukcapil Belanja Gedung dan Bangunan menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp7.454.708,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp13.795.000,00.

k. BPSDM Belanja Modal peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp24.985.601,00.

l. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp307.461.000,00.

m. PPSDM Regional Makassar Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp60.740.000,00.

PPSDM Regional Yogjakarta Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp48.000.000,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp266.061.283

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp266.061.283,00 dan Rp48.500.000,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang rupiah. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 32.

Tabel 32

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	221.306.922	-	221.306.922
2	Ditjen BAK	44.754.361	48.500.000	(3.745.639)
JUMLAH		**266.061.283**	**48.500.000**	**217.561.283**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp266.061.283,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran UP sebesar Rp231.287.503,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp34.773.780,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp266.061.283,00 terdapat pada satu satker Kantor Pusat (KP), satu satker Kantor Daerah (KD) dan empat satker Dekonsentrasi (DK). Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran selama Tahun 2021 terdapat pada **Lampiran VIII.**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp2.086.080.000

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.086.080.000,00 dan Rp4.383.550.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan ini merupakan Pendapatan Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana yang masih terdapat pada Rekening Bendahara per tanggal pelaporan. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I tersaji pada Tabel 33.

Tabel 33

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	2.086.080.000	4.383.550.000	(2.297.470.000)
Jumlah		**2.086.080.000**	**4.383.550.000**	**(2.297.470.000)**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker disajikan pada **Lampiran VII.**

Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan selama Tahun 2021 terdapat pada **Lampiran VIII.**

Tabel 34

Mutasi Tambah dan Kurang Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021

Saldo Per 31 Desember 2020	**4.383.550.000**
Mutasi Tambah:	**2.086.080.000**
Jurnal Penyesuaian akhir tahun atas penerimaan Negara yang belum disetor ke kas Negara per 31 Desember 2021 (IPDN Jatinangor)	2.086.080.000
Mutasi Kurang:	**(4.383.550.000)**
Penyetoran ke kas Negara (IPDN Jatinangor)	(4.383.550.000)
Saldo Per 31 Desember 2021	**2.086.080.000**

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

a) Penambahan sebesar Rp2.086.080.000,00 berasal dari pembentukan Jurnal Penyesuaian akhir tahun atas penerimaan Negara yang belum disetor ke kas Negara per 31 Desember 2021 pada IPDN Jatinangor yang terdiri dari Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan sebesar Rp54.525.000,00, Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp1.967.255.000,00, dan Pendapatan Pendidikan Lainnya Rp64.300.000,00.

b) Pengurangan berupa penyetoran ke kas negara selama Tahun 2021 pada IPDN Jatinangor sebesar Rp4.383.550.000,00 berupa Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan sebesar Rp57.250.000,00, Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp4.268.800.000,00 dan Pendapatan Pendidikan Lainnya sebesar Rp57.500.000,00 pada IPDN Jatinangor.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp1.475.797

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.475.797,00 dan Rp182.578.532,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas

selain yang berasal dari uang persediaan. Kas Lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka kementerian negara/lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I tersaji pada Tabel 35.

Tabel 35

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

No	Uraian Eselon I	Jenis Transaksi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Setjen (DKPP)	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	941.987	-
2	Ditjen BAK	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	-	5.100.000
		Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	-	53.255.266
3	Ditjen Pemdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Demak)	Pendapatan Jasa Giro	-	35.867
4	Ditjen Pemdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Yahukimo)	Pendapatan Jasa Giro	-	2.703
5	Ditjen Bina Bangda	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	484.616	-
		Utang Pihak Ketiga lainnya	49.194	
6	Ditjen Dukcapil	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	-	124.184.696
Total Kas Lainnya dan Setara kas			**1.475.797**	**182.578.532**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker disajikan pada **Lampiran VII**. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut jenis transaksinya tersaji pada Tabel 36.

Tabel 36

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	484.616	38.570
2	Pengembalian Belanja Barang belum disetor ke kas negara per tanggal neraca	941.987	182.539.962
3	Utang pihak ketiga lainnya (Biaya Administrasi penutupan rekening)	49.194	-
Jumlah		**1.475.797**	**182.578.532**

Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas selama Tahun 2021 terdapat pada **Lampiran VIII.**

Tabel 37

Mutasi Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Jumlah
Saldo Per 31 Desember 2020	**182.578.532**
Mutasi Tambah:	**1.475.797**
Pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran berupa Pendapatan Jasa lembaga keuangan (jasa Giro) atas sisa saldo giro bank per tanggal neraca yang ditutup pada tahun anggaran berikutnya pada Unit Eselon I Ditjen Bina Bangda	484.616
Pengakuan kas lainnya dibendahara pengeluaran berupa Utang pihak Ketiga lainnya atas biaya administrasi penutupan rekening pada Unit Eselon I Ditjen Bina Bangda	49.194
Pengembalian perjalanan dinas biasa yang per tanggal neraca masih berada di penguasaan Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke aks negara pada DKPP	941.987
Mutasi Kurang:	**(182.578.532)**
Penyetoran sisa honorarium yang belum disetor ke kas negara pada tahun 2020 pada Dit. MPBK ke Kas Negara (Ditjen BAK)	(5.100.000)
Penyetoran sisa perjalanan dinas dan pengembalian dana (refund) atas tiket yang batal digunakan yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai pada tahun 2020 (Ditjen BAK)	(53.255.266)
Penyetoran sisa perjalanan dinas biasa yang belum disetor ke kas negara pada tahun 2020 (Badan Litbang)	(124.184.696)
Penyetoran Pendapatan Jasa Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Demak melalui Simponi Kantor Pusat Ditjen Bina Pemdes selaku penanggungjawab proses Likuidasi Satker Inaktif DK/TP/UB pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes	(35.867)
Penyetoran Pendapatan Jasa Giro Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Yahukimo melalui Simponi Kantor Pusat Ditjen Bina Pemdes selaku penanggungjawab proses Likuidasi Satker Inaktif DK/TP/UB pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes	(2.703)
Saldo Per 31 Desember 2021	**1.475.797**

C.4 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp599.541.500

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp599.541.500,00 dan Rp899.400.000,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan, namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 38

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	149.541.500	-	149.541.500
2	Ditjen Bina Pemdes	450.000.000	750.000.000	(300.000.000)
3	Ditjen Dukcapil	-	149.400.000	(149.400.000)
JUMLAH		**599.541.500**	**899.400.000**	**(299.858.500)**

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp899.400.000,00 merupakan belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2020 yang bukti pertanggungjawabannya belum lengkap pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes dengan rincian nomor SK sebagai berikut:

a) SK PPK No. 140-257-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa

Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2019;

b) SK PPK No. 140-619-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019;

c) SK PPK No. 410-788-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019;

d) SK PPK No. 410-1001-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2019; dan

e) SK PPK No.140-1108-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap V; serta

Tes PCR dengan penyedia jasa RSM sesuai dengan SPK No.027/11979/SES senilai Rp175.500.000,00 untuk 195 Orang, dan berdasarkan invoice tes PCR untuk 166 orang baru dilakukan pada tahun 2021 pada Ditjen Dukcapil.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada 31 Desember 2021 sebesar Rp599.541.500,00 yang tediri dari pekerjaan pembangunan Gedung perpustakaan yang belum dapat diakui sebagai KDP karena belum memenuhi ketentuan pembayaran termin pada IPDN Jatinangor sebesar Rp149.541.500,00 dan Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada tahun 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2021 bukti pertanggungjawabannya belum lengkap sebesar Rp450.000.000,00 pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes. Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap terdapat pada Tabel 39.

Tabel 39

Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai Bantuan
1	Kepulauan Riau	Karimun	Moro	Sugie	50.000.000
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000
3	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000
4	Lampung	Pesawaran	Tegineneng	Margorejo	50.000.000
5	Maluku Utara	Kepulauan Morotai	Morotai Jaya	Toara	50.000.000
6	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrurwandi	50.000.000
7	Papua	Supiori	Supiori Utara	Yamnaisu	50.000.000
8	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Kuler	50.000.000
9	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Tomer	50.000.000
Jumlah					450.000.000

Rincian Desa yang Belum Menyerahkan Laporan terdapat pada **Lampiran IX**.

Tabel 40

Mutasi Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020	**899.400.000**
Mutasi Tambah:	**599.541.500**
Jurnal Penyesuaian atas belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang bukti pertanggungjawabannya belum lengkap pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes	450.000.000
Jurnal koreksi atas pembayaran tahap II konsultan perencana di 2021 pada pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan yang belum dapat diakui sebagai KDP di IPDN Jatinangor	149.541.500
Mutasi kurang:	**(899.400.000)**
Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2020 pada Ditjen Bina Pemdes	(750.000.000)
Jurnal Balik atas Jurnal Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2020 pada Ditjen Dukcapil	(149.400.000)
Saldo per 31 Desember 2021	**599.541.500**

Penjelasan Mutasi Belanja Dibayar Dimuka:

a) Transaksi penambahan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp450.000.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes merupakan jurnal penyesuaian akhir tahun atas Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada tahun 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2021 bukti pertanggungjawabannya belum lengkap pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes.

b) Transaksi penambahan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp149.541.500,00 berasal dari jurnal koreksi atas pembayaran tahap II konsultan perencana di 2021 pada pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan yang belum dapat diakui sebagai KDP karena belum memenuhi ketentuan pembayaran termin yang menyatakan bahwa pembayaran dapat dilakukan apabila pembangunan fisik tidak mencapai 50% sedangkan sampai 31 Desember 2021, pembanguna fisik baru mencapai 43,023% sehingga pembayaran tersebut diakui sebagai pembayaran belanja dibayar di muka pada IPDN Jatinangor

c) Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp750.000.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2020 atas Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang bukti pertanggungjawabannya belum lengkap; dan

d) Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar

Rp149.400.000,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2020 atas tes PCR dengan penyedia jasa RSM sesuai dengan SPK No 027/11979/SES senilai Rp175.500.000,00 untuk 195 orang, dan berdasarkan *invoice*, tes PCR untuk 166 orang baru dilakukan pada Tahun 2021.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp37.277.412

C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp37.277.412,00 dan Rp37.201.493,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan, namun belum diterima tagihannya.

Tabel 41

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	8.993.788	37.201.493	(28.207.705)
2	Itjen	23.169.017	-	23.169.017
3	BPSDM	5.114.607	-	5.114.607
	JUMLAH	**37.277.412**	**37.201.493**	**75.919**

Tabel 42

Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020	**37.201.493**
Mutasi Tambah:	**37.277.412**
Jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang masih harus diterima yang berasal dari kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2021 pada DKPP	3.852.232
Jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang masih harus diterima yang berasal dari sewa atas sebagian tanah pada IPDN Kampus Jakarta untuk menempatkan bangunan dan mesin ATM serta pengelolaan bangunan kantin	5.141.556
Jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang masih harus diterima yang berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas per 31 Desember 2021 masih berada di masing-masing pelaksana perjalanan pada Itjen	23.169.017
Jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang masih harus diterima yang berasal dari kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada PPSDM Reg. Makassar	1.328.774
Jurnal Penyesuaian atas kekurangan pembayaran sewa BMN pada Satker Pusat BPSDM oleh fotocopy AC pada BPSDM Pusat	3.785.833
Mutasi kurang:	**(37.201.493)**
Jurnal Balik atas atas pengakuan pemakaian ruang untuk sewa dari tanggal 1 September 2020 s.d 31 Desember 2020 atas pendapatan sewa penguat sinyal	(37.201.493)
Saldo per 31 Desember 2021	**37.277.412**

Penjelasan Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima:

a) Penambahan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal

dari Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2021 sebesar Rp3.852.232,00 pada DKPP. Pembayaran tunjangan kinerja dilakukan secara penuh untuk satu bulan dan belum memperhitungkan pemotongan berdasarkan aspek kedisiplinan dan produktivitas kerja.

b) Penambahan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari Jurnal Penyesuaian sewa atas sebagian tanah pada IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp5.141.556,00 yang terdiri dari penempatan bangunan dan mesin ATM dengan nilai kontrak sebesar Rp57.335.000,00 dan jangka waktu sewa selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 9 November 2021 sehingga dibentuk jurnal penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp3.185.278,00 serta pengelolaan bangunan kantin dengan nilai kontrak sebesar Rp35.213.000,00 dan jangka waktu sewa selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 9 November 2021 sehingga dibentuk penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp1.956.278,00.

c) Penambahan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari Jurnal Penyesuaian atas pengembalian belanja perjalanan dinas per 31 Desember 2021 masih berada di masing-masing pelaksana perjalanan sebesar Rp23.169.017,00 pada Itjen.

d) Penambahan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari Jurnal Penyesuaian kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas sembilan orang pegawai yang telah dibayarkan pada bulan Desember 2021 sebesar Rp1.328.774,00 pada PPSDM Reg. Makassar.

e) Penambahan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari Jurnal Penyesuaian akhir tahun 2021 atas kekurangan pembayaran sewa BMN pada Satker Pusat BPSDM oleh fotocopy AC dengan nilai kontrak Rp9.086.000,00 yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 terbayarkan sebesar Rp5.300.167,00 sehingga dibentuk jurnal penyesuaian sebesar Rp3.785.833,00.

f) Pengurangan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari jurnal balik atas pengakuan pemakaian ruang untuk sewa dari tanggal 1 September 2020 s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp37.201.493,00 atas pendapatan sewa penguat sinyal PT TBS dengan perjanjian sewa Nomor 593.1/2089/BU tanggal 24 Maret 2021 untuk sewa selama 5 Tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp558.022.400,00 berlaku mulai tanggal 1 September 2020 s.d 31 Agustus 2025, dan pembayaran sewa dilakukan pada 10 Februari 2021.

Piutang Bukan Pajak
Rp16.545.663.482

C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.545.663.482,00 dan Rp25.191.052.174,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayaran. Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada Tabel 43.

Tabel 43
Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I

No	Eselon I	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Setjen	16.545.663.482	19.099.633.960
2	Itjen	-	2.400.000
3	Ditjen BAK	-	47.996.543
4	Ditjen Pemdes	-	357.980.893
5	Ditjen Bina Bangda	-	115.903.482
6	Ditjen Otda	-	12.460.000
7	Ditjen Dukcapil	-	5.436.013.417
8	Ditjen Bina Keuda	-	667.850
9	Badan Litbang	-	28.707.150
10	BPSDM	-	89.288.879
Jumlah		**16.545.663.482**	**25.191.052.174**

Tabel 44
Rincian Piutang Bukan Pajak per Transaksi

No	Jenis Piutang	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan
PIUTANG PNBP				
1	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.981.708.946	3.481.708.946	(1.500.000.000)
2	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	4.166.667	(4.166.667)
3	Biaya Pendidikan	14.549.980.819	15.163.987.819	(614.007.000)
TOTAL PIUTANG PNBP		**16.531.689.765**	**18.649.863.432**	(2.118.173.667)
PIUTANG LAINNYA				
1	Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai	13.973.717	104.082.616	(90.108.899)
2	Pengembalian Kelebihan Belanja Barang	-	6.437.106.126	(6.437.106.126)
3	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
TOTAL PIUTANG LAINNYA		**13.973.717**	**6.541.188.742**	**(6.527.215.025)**
TOTAL PIUTANG		**16.545.663.482**	**25.191.052.174**	**(8.645.388.692)**

Piutang bukan pajak berupa Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah merupakan sisa denda keterlambatan yang belum dibayar pada pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung IPDN Kampus Papua dengan penyedia jasa PT NK yang terdapat pada Setjen Pusat. Piutang bukan pajak berupa Biaya Pendidikan terdiri dari Piutang Mahasiswa Pascasarjana dan pengembalian biaya pendidikan praja yang dihentikan pada IPDN Jatinangor. Piutang Lainnya berupa

pengembalian kelebihan belanja pegawai merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang pengembaliannya belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan tanggal neraca pada Setjen Pusat. Progres penyelesaian dan umur piutang bukan pajak disajikan pada **Lampiran X.**

Tabel 45
Mutasi Tambah dan Kurang Piutang per 31 Desember 2021

No	Jenis Piutang	31 Desember 2020	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	31 Desember 2021
	PIUTANG PNBP				
1	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.481.708.946	-	(1.500.000.000)	1.981.708.946
2	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.166.667	-	(4.166.667)	-
3	Biaya Pendidikan	15.163.987.819	2.153.020.300	(2.767.027.300)	14.549.980.819
	TOTAL PIUTANG PNBP	**18.649.863.432**	**2.153.020.300**	**(4.271.193.967)**	**16.531.689.765**
	PIUTANG LAINNYA				
1	Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai	104.082.616	-	(90.108.899)	13.973.717
2	Pengembalian Kelebihan Belanja Barang	6.437.106.126	-	(6.437.106.126)	-
3	Pengembalian Belanja Modal	-	29.665.000	(29.665.000)	-
	TOTAL PIUTANG LAINNYA	**6.541.188.742**	**29.665.000**	**(6.556.880.025)**	**13.973.717**
	TOTAL	**25.191.052.174**	**2.182.685.300**	**(10.828.073.992)**	**16.545.663.482**

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan piutang sebagai berikut:

a) Piutang PNBP atas Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah:

Pengurangan sebesar Rp1.500.000.000,00 terdapat pada Setjen Pusat yang merupakan pembayaran sisa denda keterlambatan yang belum dibayar pada pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung IPDN Kampus Papua dengan penyedia jasa PT NK;

b) Piutang PNBP atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan:

Pengurangan sebesar Rp4.166.667,00 terdapat pada PPSDM Bukit Tinggi yang merupakan Pelunasan Piutang atas pendapatan sewa berupa sebagian tanah dan bangunan pos jaga permanen bulan November 2020 s.d. Desember 2020 dengan kontrak terhitung mulai tanggal 13 November 2020 s.d. 12 November 2021;

c) Piutang PNBP atas Biaya Pendidikan:

i. Penambahan sebesar Rp2.153.020.300,00 terdapat pada IPDN Jatinangor terdiri dari tagihan Mahasiswa Pascasarjana sebesar Rp1.930.143.000,00 yang terdiri dari Program Magister sebesar Rp1.225.650.000,00 dan Program Doktor Rp704.493.000,00, serta koreksi kekurangan pencatatan kewajiban Pendidikan Pascasarjana sebesar

Rp222.877.300,00;

ii. Pengurangan sebesar Rp2.767.027.300,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan pembayaran dan pelunasan tagihan biaya pendidikan sebesar Rp1.983.627.300,00 yang terdiri dari Program Magister sebesar Rp445.500.000,00 dan Program Doktor sebesar Rp1.538.127.300,00, koreksi atas kekurangan pencatatan pembayaran piutang tahun-tahun yang lalu sebesar Rp340.000.000,00, koreksi atas kelebihan pencatatan tagihan tahun-tahun yang lalu sebesar Rp259.500.000,00, koreksi pencatatan pembayaran dari mahasiswa yang sudah lulus tetapi belum lunas sebesar Rp168.750.000,00 dan koreksi atas konfirmasi pembayaran dari mahasiswa yang tidak mencantumkan namanya/*noname* sebesar Rp15.150.000,00;

d) Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Pegawai terdapat mutasi kurang sebesar Rp90.108.899,00 yang tediri dari:

i. Pengurangan sebesar Rp58.333.899,00 terdapat pada Setjen Pusat yang merupakan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2020 yang pengembaliannya telah yang disetor ke kas negara pada Tahun 2021;

ii. Pengurangan sebesar Rp2.400.000,00 terdapat pada Itjen yang merupakan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Fungsional Tahun 2020 yang pengembaliannya telah disetor pada Tahun 2021;

iii. Pengurangan sebesar Rp667.850,00 terdapat pada Ditjen Keuda yang merupakan kelebihan Belanja Pegawai Tahun 2020 berupa Uang Makan PNS yang telah disetor pada Tahun 2021;

iv. Pengurangan sebesar Rp28.707.150,00 terdapat pada Badan Litbang yang merupakan kelebihan Belanja Pegawai Tahun 2020 berupa Uang Makan PNS sebesar Rp18.696.150,00 dan Uang Lembur sebesar Rp10.011.000,00 yang telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021;

e) Piutang Lainnya atas Belanja Barang terdapat mutasi kurang sebesar Rp6.437.106.126,00 yang tediri dari:

i. Pengurangan sebesar Rp218.118.589,00 terdapat pada IPDN Kalbar yang merupakan kelebihan Belanja Barang Tahun 2020 terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp117.804.156,00, Belanja Jasa Profesi sebesar Rp30.975.000,00, Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp9.765.000,00, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.969.433,00, dan Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp7.605.000,00 yang pengembaliannya telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021. Terdapat saldo

Piutang Lainnya atas Belanja Jasa Profesi sebesar Rp29.665.0000,00 yang seharusnya sesuai dengan SP2D nomor 200421304000288, 200421304001342, 200421304013129, dan 200421304022872 dicatat sebagai Belanja Modal. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada poin f);

ii. Pengurangan sebesar Rp163.510.990,00 terdapat pada Setjen Pusat yang merupakan kelebihan Pembayaran Sewa Layanan Video Conference Kemendagri TA. 2020 - PUSDATIN (ADK_SIMPONI) pada 15/01/2021 yang pengembaliannya telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021;

iii. Pengurangan sebesar Rp47.996.543,00 terdapat pada Ditjen BAK yang merupakan kelebihan Belanja Barang Tahun 2020 terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp31.928.000,00, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.388.543,00, dan Beban Jasa Profesi sebesar Rp680.000,00 yang pengembaliannya telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021;

iv. Pengurangan sebesar Rp357.980.893,00 terdapat pada Ditjen Pemdes merupakan kelebihan Belanja Barang Tahun 2020 terdiri dari Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp299.054,00, Belanja Bahan sebesar Rp205.804.546,00, Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp37.750.000,00, Belanja Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp31.750.000,00, dan Belanja Sewa sebesar Rp82.377.293,00 yang pengembaliannya telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021;

v. Pengurangan sebesar Rp115.903.482,00 terdapat pada Ditjen Bina Bangda merupakan kelebihan Belanja Barang Tahun 2020 terdiri dari Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp114.823.482,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.080.000,00 yang pengembaliannya telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021;

vi. Pengurangan sebesar Rp12.460.000,00 terdapat pada Ditjen Otda merupakan kelebihan Belanja Barang Tahun 2020 berupa Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang pengembaliannya telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021;

vii. Pengurangan sebesar Rp5.436.013.417,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil merupakan kelebihan Belanja Barang Tahun 2020 berupa Belanja Jasa Lainnya yang pengembaliannya telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021;

viii. Pengurangan sebesar Rp85.122.212,00 terdapat pada BPSDM Pusat yang merupakan koreksi atas Pengembalian Kelebihan Belanja Barang Tahun 2020 berupa Belanja

Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota sebesar Rp12.415.000,00, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp32.710.212,00, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.925.000,00, dan Beban Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp9.072.000,00 yang pengembaliannya telah disetor ke kas negara pada Tahun 2021; serta

f) Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Modal terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp29.665.000,00:

i. Penambahan sebesar Rp29.665.000,00 terdapat pada IPDN Kalbar yang merupakan kelebihan Belanja Jasa Profesi yang pengembaliannya telah disetor pada tahun 2021 yang seharusnya dicatat sebagai Pengembalian Belanja Modal sesuai dengan SP2D nomor 200421304000288, 200421304001342, 200421304013129, dan 200421304022872;

ii. Pengurangan sebesar Rp29.665.000,00 terdapat pada IPDN Kalbar yang merupakan pelunasan atas Belanja Jasa Profesi yang seharusnya dicatat sebagai Pengembalian Belanja Modal sesuai dengan SP2D nomor 200421304000288, 200421304001342, 200421304013129, dan 200421304022872 pada tahun 2020 yang telah disetor ke kas negara pada tahun 2021;

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak Rp6.242.751.442

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.242.751.442,00 dan Rp8.276.187.140,00,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih PNBP tersaji pada Tabel 46.

Tabel 46

Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	Masa Pendidikan	Jumlah Piutang per 31 Des 2021	Kategori Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih Per 31 Des 2021
				Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
A.	**Piutang Mahasiswa Pascasarjana (IPDN Jatinangor)**		**13.649.668.000**	**28.395.149**	**196.751.316**	**-**	**6.003.125.000**	**6.228.271.465**
	Angkatan	**Masa Pendidikan**						
1	Angkatan 17	April 2010-April 2012	242.650.000	-	-	-	242.650.000	242.650.000
2	Angkatan 18	Okt 2010-Okt 2012	386.850.000	-	-	-	386.850.000	386.850.000
3	Angkatan 19	April 2011-April 2013	168.150.000	-	-	-	168.150.000	168.150.000
4	Angkatan 20	Okt 2011-Okt 2013	276.950.000	-	-	-	276.950.000	276.950.000
5	Angkatan 21	April 2012-April 2016	887.225.000	-	-	-	887.225.000	887.225.000
6	Angkatan 22	Okt 2012-Okt 2014	448.275.000	-	-	-	448.275.000	448.275.000
7	Angkatan 23	April 2013-April 2015	862.650.000	-	-	-	862.650.000	862.650.000
8	Angkatan 24	Okt 2013-Okt 2017	277.375.000	-	-	-	277.375.000	277.375.000
9	Angkatan 25	April 2014-April 2018	436.250.000	-	-	-	436.250.000	436.250.000
10	Angkatan 26	Okt 2014-Okt 2018	687.000.000	-	-	-	687.000.000	687.000.000
11	Angkatan 27	April 2015-April 2019	320.750.000	-	-	-	320.750.000	320.750.000
12	Angkatan 28	Okt 2015-Okt 2019	469.500.000	-	-	-	469.500.000	469.500.000
13	Angkatan 29	April 2016-April 2020	267.000.000	1.335.000	-	-	-	1.335.000
14	Angkatan 30	Okt 2016-Okt 2020	639.250.000	486.250	54.200.000	-	-	54.686.250
15	Angkatan 31	April 2017-April 2021	583.500.000	1.559.934	27.151.316	-	-	28.711.250
16	Angkatan 32	Okt 2018-Okt 2022	272.000.000	1.360.000	-	-	-	1.360.000
17	Angkatan 33	April 2019-April 2023	638.750.000	3.193.750	-	-	-	3.193.750
18	Angkatan 34	Okt 2019-Okt 2023	331.250.000	1.656.250	-	-	-	1.656.250
19	Angkatan 35	Feb 2021-Jan 2025	471.750.000	2.358.750	-	-	-	2.358.750
20	Angkatan 36	Agustus 2021-Juli 2025	70.250.000	351.250	-	-	-	351.250
21	Angkatan I S-3	April 2013-April 2020	571.000.000	157.500	-	-	539.500.000	539.657.500
22	Angkatan II S-3	April 2014-April 2021	424.000.000	335.000	35.700.000	-	-	36.035.000
23	Angkatan III S-3	April 2015-April 2022	629.250.000	1.116.250	40.600.000	-	-	41.716.250
24	Angkatan IV S-3	April 2016-April 2023	1.138.800.000	3.739.000	39.100.000	-	-	42.839.000
25	Angkatan V S-3	Okt 2017-Okt 2024	522.243.000	2.611.215	-	-	-	2.611.215
26	Angkatan VI S-3	Okt 2018-Okt 2025	464.500.000	2.322.500	-	-	-	2.322.500
27	Angkatan VII S-3	Okt 2019-Okt 2026	414.000.000	2.070.000	-	-	-	2.070.000
28	Angkatan VIII S-3	Okt 2020-Okt 2027	748.500.000	3.742.500	-	-	-	3.742.500
B.	**Pengembalian biaya pendidikan Praja yang diberhentikan (IPDN Jatinangor)**		**900.312.819**	**4.501.564**	**-**	**-**	**-**	**4.501.564**
1	Tahun 2009	2009	120.512.322	602.562	-	-	-	602.562
2	Tahun 2011	2011	36.741.100	183.705	-	-	-	183.705
3	Tahun 2012	2012	82.049.813	410.249	-	-	-	410.249
4	Tahun 2013	2013	661.009.584	3.305.048	-	-	-	3.305.048
C	**Setjen Kantor Pusat**		**1.995.682.663**	**9.978.413**	**-**	**-**	-	**9.978.413**
TOTAL			**16.545.663.482**	**42.875.126**	**196.751.316**	**-**	**6.003.125.000**	**6.242.751.442**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp18.943.667.806

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp18.943.667.806,00 dan Rp18.348.479.574,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada Tabel 47.

Tabel 47

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

No	Uraian	Eselon I	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
A. Bagian Lancar TP				
1	Bagian Lancar TP	Itjen	492.890.339	492.890.339
Total Bagian Lancar TP			**492.890.339**	**492.890.339**
B. Bagian Lancar TGR				
1	Bagian Lancar TGR	Setjen	590.188.232	-
2	Bagian Lancar TGR	Ditjen Polpum	17.850.089.235	17.850.089.235
3	Bagian Lancar TGR	Ditjen Bina Keuda	10.500.000	5.500.000
Total Bagian Lancar TGR			**18.450.777.467**	**17.855.589.235**
Total Bagian Lancar TP/TGR			**18.943.667.806**	**18.348.479.574**

Progres penyelesaian dan umur Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disajikan pada **Lampiran XI.**

Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2021 tersaji pada Tabel 48.

Tabel 48

Mutasi Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	18.348.479.574
Mutasi Tambah:	**600.688.232**
Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR Ditjen Bina Keuda	10.500.000
Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR DKPP	590.188.232
Mutasi Kurang:	**(5.500.000)**
Jurnal Balik atas Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR Ditjen Bina Keuda	(5.500.000)
Saldo per 31 Desember 2021	**18.943.667.806**

Penjelasan Bagian Lancar TP/TGR sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan sebesar Rp10.500.000,00 berasal dari jurnal penyesuaian akhir tahun 2021 untuk mereklasifikasi Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan

dapat diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir pada Ditjen Bina Keuda;

b) Transaksi Penambahan sebesar Rp590.188.232,00 dari berasal dari jurnal penyesuaian akhir tahun 2021 untuk mereklasifikasi Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir pada DKPP;

c) Transaksi Pengurangan sebesar Rp5.500.000,00 berasal dari jurnal balik atas jurnal penyesuaian akhir Tahun 2020 berupa reklasifikasi masuk dari Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir pada Ditjen Bina Keuda.

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR Rp18.345.983.015

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp18.345.983.015,00 dan Rp18.343.007.074,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rangkuman Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada Tabel 49.

Tabel 49
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Komponen	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
A. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar TP						
1	Itjen	Macet	1	492.890.339	100,00%	492.890.339
Total				**492.890.339**		**492.890.339**
B. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar TGR						
1	Setjen	Lancar	2	590.188.232	0,50%	2.950.941
2	Ditjen Polpum	Macet	1	17.850.089.235	100,00%	17.850.089.235
3	Ditjen Bina Keuda	Lancar	1	10.500.000	0,50%	52.500
Total				**18.450.777.467**		**17.853.092.676**
Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar			**4**	**18.943.667.806**		**18.345.983.015**

Piutang berupa Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan April 2017 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan

Piutang Negara melalui Surat Sekretaris Jenderal yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan dan Aset Nomor 956/181/SJ tanggal 10 Januari 2019 hal penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-01/PUPNC.10.03/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III. Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-71/PUPNC.10.03/2021 tanggal 11 November 2021 hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, maka kepengurusan piutang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Kemendagri telah mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan piutang negara bersyarat melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 953/6675/SJ tanggal 30 November 2021 hal Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara Bersyarat yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Utama Binbangkum PKN BPK RI.

Piutang berupa Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan pada Ditjen Polpum sebesar Rp17.850.089.235,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan Januari 2012 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 16 Juni 2020 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-21/PUPNC.10.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.

Persediaan
Rp277.326.163.445

C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp277.326.163.445,00 dan Rp399.784.694.037,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp277.326.163.445,00 terdiri dari persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sebesar Rp275.700.937.221,00 dan persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.625.226.224,00. Persediaan dalam rangka penanganan COVID-19 merupakan persediaan yang berasal dari transaksi pembelian, transfer masuk dan hibah masuk. Daftar

persediaan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 disajikan pada **Lampiran XII**.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada Tabel 50.

Tabel 50

Rincian Persediaan

Kode Perkiraan	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
I. Persediaan yang akan menjadi Beban Persediaan pada saat digunakan			
117111	Barang Konsumsi	4.530.248.276	9.550.663.297
117131	Bahan Baku	256.571.423	130.838.493
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	17.641.000	29.004.250
117199	Persediaan Lainnya	4.072.779.747	7.044.189.351
Total		**8.877.240.446**	**16.754.695.391**
II. Persediaan yang akan menjadi Beban Pemeliharaan pada saat digunakan			
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	335.222.726	672.230.496
117114	Suku Cadang	54.539.938	131.541.564
Total		**389.762.664**	**803.772.060**
III. Persediaan yang akan menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	24.227.675.966	26.118.716.216
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.773.659.026	1.188.832.320
117125	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	11.595.186.678	16.139.868.038
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446.822.000	816.890.000
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	222.194.366.315	265.948.023.662
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	6.753.780.000	71.946.226.000
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	67.670.350	67.670.350
Total		**268.059.160.335**	**382.226.226.586**
TOTAL PERSEDIAAN		**277.326.163.445**	**399.784.694.037**

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 51.

Tabel 51

Rincian Persediaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	5.548.912.673	7.856.637.508	(2.307.724.835)
2	Itjen	209.164.441	427.659.431	(218.494.990)
3	Ditjen Polpum	55.382.600	54.244.800	1.137.800
4	Ditjen BAK	28.761.156.774	25.375.566.070	3.385.590.704
5	Ditjen Pemdes	14.770.807.643	15.552.368.670	(781.561.027)
6	Ditjen Bina Bangda	192.133.755.383	223.927.482.471	(31.793.727.088)
7	Ditjen Otda	11.190.213.506	16.650.053.547	(5.459.840.041)
8	Ditjen Dukcapil	24.219.976.030	108.717.306.663	(84.497.330.633)
9	Ditjen Keuda	35.532.384	34.212.411	1.319.973
10	Badan Litbang	59.531.787	258.063.531	(198.531.744)
11	Badan PSDM	341.730.224	931.098.935	(589.368.711)
Jumlah		**277.326.163.445**	**399.784.694.037**	**(122.458.530.592)**

Rincian Persediaan per Satker disajikan pada **Lampiran XIII**.

Tabel 52

Mutasi Persediaan

Akun Persediaan	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Barang Konsumsi	9.550.663.297	18.312.736.035	23.333.151.056	4.530.248.276
Bahan untuk Pemeliharaan	672.230.496	2.219.031.600	2.556.039.370	335.222.726
Suku Cadang	131.541.564	226.399.114	303.400.740	54.539.938
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	26.118.716.216	24.227.675.966	26.118.716.216	24.227.675.966
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.188.832.320	3.369.656.426	1.784.829.720	2.773.659.026
Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	16.139.868.038	11.595.186.678	16.139.868.038	11.595.186.678
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	816.890.000	446.822.000	816.890.000	446.822.000
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	265.948.023.662	207.313.541.345	251.067.198.692	222.194.366.315
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	71.946.226.000	167.694.433.213	232.886.879.213	6.753.780.000
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	67.670.350	2.615.384.350	2.615.384.350	67.670.350
Bahan Baku	130.838.493	2.608.816.703	2.483.083.773	256.571.423
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	29.004.250	29.499.900	40.863.150	17.641.000
Persediaan Lainnya	7.044.189.351	10.028.645.177	13.000.054.781	4.072.779.747
TOTAL	**399.784.694.037**	**450.687.828.507**	**573.146.359.099**	**277.326.163.445**

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Eselon I disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Akun disajikan pada **Lampiran XV**.

Mutasi kurang dari Penghapusan Lainnya sebesar Rp63.747.000,00 merupakan penghapusan barang milik negara dari daftar barang Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-426-Tahun 2021 yang didukung oleh Surat Keterangan Penjarahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Kabupaten Intan Jaya Nomor SKK/01/VIII/2019/Sek Sugapa Tanggal 30 Agustus 2019 tentang peristiwa yang terjadi pasca kerusuhan pada Kabupaten Intan Jaya 2017.

Persediaan usang sebesar Rp261.362.431,00 terdapat pada setjen pusat sebesar Rp6.514.431,00 yang tediri dari obat cair sebanyak 34 barang dan obat padat sebanyak 535 barang serta Ditjen Dukcapil sebesar Rp254.848.000,00 berupa barang cetakan sebanyak 75.846 barang. Persediaan using tersebut telah dikeluarkan dari neraca.

Persediaan rusak berupa barang konsumsi terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp20.837.270,00 yang tediri dari ordner dan map sebanyak 147 barang, pita mesin ketik sebanyak 8 barang dan tinta/toner

printer sebanyak 8 barang.

Tanah
Rp11.995.626.099.493

C.11 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.995.626.099.493,00 dan Rp11.983.889.739.493,00.

Rincian Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 53.

Tabel 53
Rincian Tanah per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	10.196.512.429.000	10.184.776.069.000	11.736.360.000
2	Itjen	142.267.725.000	142.267.725.000	-
3	Ditjen Pemdes	613.234.134.493	613.234.134.493	-
4	Badan Litbang	239.998.196.000	239.998.196.000	-
5	Badan PSDM	803.613.615.000	803.613.615.000	-
Jumlah		**11.995.626.099.493**	**11.983.889.739.493**	**11.736.360.000**

Rincian Mutasi Tanah per Eselon I terdapat pada **Lampiran XVI**

Rincian Tanah per Satker disajikan pada **Lampiran XVII**.

Tabel 54
Rincian Mutasi Tanah per Tahun 2021

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**11.983.889.739.493**
Mutasi tambah:	**210.122.774.000**
Transfer Masuk	198.386.414.000
Hibah (Masuk)	11.736.360.000
Mutasi kurang:	**(198.386.414.000)**
Transfer Keluar	(198.386.414.000)
Saldo per 31 Desember 2021	**11.995.626.099.493**

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Tanah sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp198.386.414.000,00 terdapat pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar yang diterima dari BPSDM Pusat;

b) Transaksi Penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp11.736.360.000,00 terdapat pada Setjen Pusat berupa Tanah seluas 130.404 m^2 yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk digunakan oleh IPDN Kampus Sulawesi Selatan; dan

c) Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp198.386.414.000,00 terdapat pada BPSDM Pusat kepada

Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar.

Kemendagri menyajikan Tanah pada neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.995.626.099.493,00, diantaranya terdapat permasalahan sengketa tanah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dan tanah pada IPDN Kampus Kalimantan Barat dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Terdapat batas tanah seluas 374 m2 pada Badan Litbang yang tercatat dalam dua sertifikat, dalam hal ini dikuasai oleh Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan pencatatan tanah tersebut akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Koreksi Tindak Lanjut Temuan Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah Kemendagri dan Kemenkumham. Dalam berita acara tersebut Kemendagri akan melakukan koreksi pencatatan atas tanah tersebut pada periode pelaporan berikutnya.

b) IPDN Kampus Kalbar menerima Hibah tanah seluas 956.733 m^2 dari Pemprov Kalbar berdasarkan Keputusan Gubernur Prov Kalbar Nomor 270/BPKAD/2013 tanggal 31 Mei 2013 dengan sertifikat Hak Pakai Tanah Milik Kementerian Dalam Negeri Cq IPDN Kampus Kalimantan Barat Nomor 1249. Tanah tersebut tercatat dalam neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.548.358.000,00. PT. BRUG mengklaim sebagian tanah IPDN Kampus Kalbar seluas 80.000 m^2 yang merupakan tanah milik PT. BRUG sejak tahun 1993 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2/Sungai Purun Besar GS No.358/1993, HGU Nomor 4/Sungai Purun Besar GS No.357/1993 dan HGU Nomor 3/Sungai Purun Besar GS No.356/1993. Atas sengketa tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktur IPDN Kampus Kalbar melalui Surat Direktur IPDN kepada Kepala BPN Kabupaten Mempawah Nomor 593/11/IPDN.26 tanggal 22 Mei 2017 hal Permohonan untuk dilakukan pengukuran ulang batas tanah milik IPDN Kampus Kalbar. Sengketa tanah tersebut sedang diproses di BPN Kabupaten Mempawah terkait dengan balik batas Sertifikat Hak Pakai Nomor 1249 Kelurahan Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 27 Oktober 2021, IPDN Kampus Kalbar melalui surat Direktur IPDN Kampus Kalbar Nomor 593/243/IPDN.26 hal balik batas tanah juga telah mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran batas ulang tanah. Selanjutnya BPN menindaklanjuti surat Direktur IPDN Kampus Kalbar tersebut melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Nomor IP.02.02/1246-61-02/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2/Sungai Purun Besar GS No.358/1993, HGU Nomor 4/Sungai Purun Besar GS No.357/1993 dan HGU Nomor 3/Sungai Purun Besar GS No.356/1993 telah berakhir haknya

Peralatan dan Mesin
Rp3.319.292.929.878

C.12 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.319.292.929.878,00 dan Rp3.160.929.282.184,00. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.319.292.929.878,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sebesar Rp3.280.419.939.579,00 dan peralatan dan mesin yang digunakan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp38.872.990.299,00. Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan COVID-19 merupakan Peralatan dan Mesin yang dibeli sendiri dan berasal dari hibah. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan saldo peralatan dan mesin dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp388.565.750,00. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 disajikan pada **Lampiran XVIII**.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 55.

Tabel 55
Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Setjen	713.756.036.144	692.332.903.390	21.423.132.754
2	Itjen	17.917.747.057	17.312.178.457	605.568.600
3	Ditjen Polpum	14.567.219.380	14.641.041.355	(73.821.975)
4	Ditjen BAK	124.782.660.771	120.344.297.655	4.438.363.116
5	Ditjen Bina Pemdes	96.204.868.949	95.751.068.009	453.800.940
6	Ditjen Bina Bangda	63.905.384.834	61.520.338.234	2.385.046.600
7	Ditjen Otda	51.689.114.532	48.406.572.422	3.282.542.110
8	Ditjen Dukcapil	2.050.166.872.631	1.929.786.242.927	120.380.629.704
9	Ditjen Keuda	22.299.561.999	20.513.882.319	1.785.679.680
10	Badan Litbang	23.771.021.665	22.628.791.885	1.142.229.780
11	Badan PSDM	140.232.441.916	137.691.965.531	2.540.476.385
Jumlah		**3.319.292.929.878**	**3.160.929.282.184**	**158.363.647.694**

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XIX**.

Rincian Peralatan dan Mesin per Satker disajikan pada **Lampiran XVII**.

Tabel 56

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**3.160.929.282.184**
Mutasi tambah:	**237.057.203.071**
Pembelian	82.794.127.004
Pengembangan Nilai Aset	2.817.017.085
Transfer masuk	42.111.941.169
Hibah (Masuk)	80.412.978.749
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	12.206.007.000
Reklasifikasi Masuk	11.930.818.484
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.477.261.660
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3.307.051.920
Mutasi kurang:	**(78.693.555.377)**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(32.786.649.370)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(194.262.027)
Transaksi Normalisasi BMN	(3.209.817.570)
Penghapusan	(1.438.385.705)
Transfer Keluar	(24.007.219.155)
Hibah (Keluar)	(4.442.087.550)
Reklasifikasi Keluar	(12.302.334.000)
Hibah Keluar (semester II dokumen semester I)	(312.800.000)
Saldo per 31 Desember 2021	**3.319.292.929.878**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(2.960.511.708.233)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**358.781.221.645**

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Pembelian sebesar Rp82.794.127.004,00 terdiri dari:

- Pembelian atas Belanja Modal yang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp70.746.421.059,00
- Pembelian atas Belanja Barang yang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.047.705.945,00

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per satker terdapat pada **Lampiran XX**;

b) Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp2.817.017.085,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp2.708.967.085,00, pada IPDN Jatinangor sebesar Rp7.500.000,00, dan pada IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp100.550.000,00. Transaksi Pengembangan Nilai Aset terdiri dari:

- Pengembangan Nilai atas Belanja Modal yang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.716.467.085,00
- Pengembangan Nilai atas Belanja Barang yang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp100.550.000,00;

Hubungan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin dengan Mutasi Tambah Aset Per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXI**.

c) Transaksi Penambahan dari Transer Masuk sebesar Rp42.111.941.169,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp167.150.000,00, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebesar Rp782.100.000,00, Ditjen BAK sebesar Rp4.235.004.449,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp2.793.319.365,00 Ditjen Bina Bangda sebesar Rp19.260.998.014,00, Ditjen Otda sebesar Rp863.904.696,00 dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp14.009.464.645,00;

d) Transaksi Penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp80.412.978.749,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp176.613.726,00 IPDN Kalbar sebesar Rp204.953.394,00, dan Ditjen Dukcapil sebesar Rp80.031.411.629,00;

e) Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp12.206.007.000,00 terdapat pada Setjen Pusat;

f) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp11.930.818.484,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp10.254.860.189,00, DKPP sebesar Rp96.327.000,00, IPDN NTB sebesar Rp558.573.180,00, IPDN Kalbar sebesar Rp554.937.768,00, dan IPDN Kampus Papua Rp466.120.347,00.

g) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp1.477.261.660,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp193.900.000,00, Balai Besar Pemdes Malang sebesar Rp51.061.800,00 dan Ditjen Otda sebesar Rp1.232.299.860,00,00;

h) Transaksi Penambahan dari Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp3.307.051.920,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulawesi Selatan sebesar Rp1.897.488.472,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp155.397.450,00, IPDN Kampus Jakarta sebesar Rp96.714.000,00, IPDN Kampus NTB sebesar Rp27.770.000,00, DKPP sebesar Rp26.134.500,00, IPDN Kampus Sulawesi Utara sebesar Rp8.417.472,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp191.414.726,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp17.507.500,00, Badan Litbang sebesar Rp21.096.650,00, BPSDM Pusat sebesar Rp116.530.500,00, PPSDM Makassar sebesar Rp57.221.850,00 dan PPSDM Regional Bandung sebesar Rp691.358.800,00;

i) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp32.786.649.370,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp2.063.332.460,00, Setjen Pusat sebesar Rp5.129.936.154,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar

Rp191.442.000,00, IPDN Kalbar sebesar Rp242.300.000,00, IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp37.350.000,00, IPDN NTB sebesar Rp218.267.752,00, Itjen sebesar Rp700.170.000,00, Ditjen Polpum sebesar Rp1.095.525.870,00, Balai Besar Pemdes Malang sebesar Rp492.829.020,00, Balai Pemdes Lampung sebesar Rp271.081.540,00, Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp212.650.000,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp17.897.560.414,00, Ditjen Otda sebesar Rp276.376.000,00, BPSDM Pusat sebesar Rp2.818.358.580,00, PPSDM Makassar sebesar Rp974.679.580,00, dan PPSDM Bandung sebesar Rp164.790.000,00;

j) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp194.262.027,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp147.100.000,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp25.250.000,00, IPDN Kalbar sebesar Rp9.997.900,00 dan Ditjen BAK sebesar Rp11.914.127,00;

k) Transaksi Pengurangan dari Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp3.209.817.570,00 terdapat pada IPDN Kalbar sebesar Rp191.414.726,00, IPDN Jakarta Rp96.714.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp153.647.450,00, IPDN Kampus Sulawesi Selatan sebesar Rp1.897.488.472,00, IPDN Kampus Sulawesi Utara sebesar Rp8.417.472,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp26.824.500,00, Badan Litbang sebesar Rp21.096.650,00, BPSDM Pusat sebesar Rp116.530.500,00, PPSDM Makassar sebesar Rp25.000,00 dan PPSDM Bandung sebesar Rp697.658.800,00;

l) Transaksi Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp1.438.385.705,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp511.836.000,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp30.779.000,00 dan PPSDM Bukit Tinggi sebesar Rp895.770.705,00;

m) Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp24.007.219.155,00 diantaranya sebesar Rp8.266.404.510,00 merupakan transfer keluar dari satker DK/TP/UB ke satker penanggungjawab proses likuidasi untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (rincian transfer keluar satker terdapat pada **Lampiran XXII**);

n) Transaksi Pengurangan dari Hibah Keluar sebesar Rp4.442.087.550,00 yang merupakan Hibah dari Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes dan Ditjen Dukcapil untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah (rincian satker terdapat pada **Lampiran XXIII**);

o) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp12.302.334.000,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar

Rp12.206.007.000,00 dan DKPP sebesar Rp96.327.000,00; dan

p) Transaksi Pengurangan dari Hibah Keluar (semester II dokumen semester I) sebesar Rp312.800.000,00 terdapat pada Ditjen Dukcapil.

Gedung dan Bangunan Rp2.789.720.379.051

C.13 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.789.720.379.051,00 dan Rp2.757.603.421.959,00. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 57.

Tabel 57

Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	1.974.681.407.766	1.946.875.593.819	27.805.813.947
2	Itjen	43.771.988.160	42.386.701.000	1.385.287.160
3	Ditjen BAK	1.576.390.000	1.576.390.000	-
4	Ditjen Bina Pemdes	183.973.193.385	183.700.093.595	273.099.790
5	Ditjen Bina bangda	102.260.423.904	101.531.546.766	728.877.138
6	Ditjen Dukcapil	35.854.700.333	35.854.700.333	-
7	Badan Litbang	31.717.799.301	31.400.838.301	316.961.000
8	BPSDM	415.884.476.202	414.277.558.145	1.606.918.057
Jumlah		**2.789.720.379.051**	**2.757.603.421.959**	**32.116.957.092**

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXIV**.

Rincian Gedung dan Bangunan per Satker disajikan pada **Lampiran XVII**.

Tabel 58

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**2.757.603.421.959**
Mutasi tambah:	**162.939.420.592**
Pembelian	1.194.275.222
Pengembangan Nilai Aset	9.895.588.697
Transfer masuk	14.492.996.584
Hibah Masuk	120.000.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	17.705.576.964
Reklasifikasi masuk	58.274.612.677
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	44.926.281.000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	16.330.089.448
Mutasi kurang:	**(130.822.463.500)**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(4.238.387.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(4.661.690.640)
Transaksi Normalisasi BMN	(44.926.281.000)
Transfer Keluar	(14.492.996.584)
Reklasifikasi keluar	(61.534.122.097)
Koreksi Pencatatan	(968.986.179)
Saldo per 31 Desember 2021	**2.789.720.379.051**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(330.630.295.794)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**2.459.090.083.257**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Pembelian sebesar Rp1.194.275.222,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp72.935.000,00, pada IPDN Jakarta sebesar Rp331.712.222,00 dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp789.628.000,00. Transaksi penambahan dari Pembelian berasal dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp72.935.000,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.121.340.222,00;

b) Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp9.895.588.697,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp3.309.336.642,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp2.111.233.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp1.226.603.700,00, Itjen sebesar Rp1.385.287.160,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp728.877.138,00, Badan Litbang sebesar Rp316.961.000,00, dan PPSDM Bukit Tinggi sebesar Rp817.290.057,00. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset berasal dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.751.133.657,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp7.144.455.040,00;

Hubungan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Mutasi Tambah Aset per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXV.**

c) Transaksi Pengurangan dari Transfer Masuk sebesar Rp14.492.996.584,00 terdapat pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar;

d) Transaksi Penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp120.000.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor;

e) Transaksi Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp17.705.576.964,00 terdapat pada IPDN Kampus Papua Rp1.117.306.104,00 dan IPDN Kalbar sebesar Rp16.588.270.860,00,

f) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp58.274.612.677,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp114.435.000,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp24.262.208.000,00, IPDN Kalbar sebesar Rp10.151.683.204,00, IPDN NTB sebesar Rp15.359.198.820,00, dan IPDN Papua sebesar Rp8.387.087.653,00;

g) Transaksi Penambahan dari Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp44.926.281.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp41.637.523.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp3.189.687.000,00 dan Ditjen Bina Bangda sebesar Rp99.071.000,00;

h) Transaksi Penambahan dari Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp16.330.089.448,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp1.082.262.829,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp14.974.726.829,00, dan Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp273.099.790,00;

i) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp4.238.387.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp948.906.000,00 dan Setjen Pusat sebesar Rp3.289.481.000,00;

j) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp4.661.690.640,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp232.277.150,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp246.632.205,00, dan IPDN Kalbar Rp4.182.781.285,00;

k) Transaksi Pengurangan dari Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp44.926.281.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp41.637.523.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp3.189.687.000,00 dan Ditjen Bina Bangda sebesar Rp99.071.000,00;

l) Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar

Rp14.492.996.584,00 terdapat pada BPSDM Pusat;

m) Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp61.534.122.097,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp114.435.000,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp24.322.208.000,00, IPDN Kalbar sebesar Rp12.326.499.097,00, dan IPDN NTB sebesar Rp15.917.772.000,00 dan IPDN Papua sebesar Rp8.853.208.000,00.

n) Transaksi Pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp968.986.179,00 terdapat pada IPDN Kampus Sulut.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp277.089.315.888

C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp277.089.315.888,00 dan Rp270.623.013.752,00.

Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 59.

Tabel 59
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	227.569.194.990	221.645.036.959	5.924.158.031
2	Ditjen BAK	11.245.442.670	11.245.442.670	-
3	Ditjen Pemdes	3.058.859.874	3.058.859.874	-
4	Ditjen Bina Bangda	3.707.596.890	3.707.596.890	-
5	Ditjen Otda	489.387.520	489.387.520	-
6	Ditjen Dukcapil	1.482.364.000	1.482.364.000	-
7	Badan Litbang	505.733.100	505.733.100	-
8	Badan PSDM	29.030.736.844	28.488.592.739	542.144.105
Jumlah		**277.089.315.888**	**270.623.013.752**	**6.466.302.136**

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXVI**.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satker disajikan pada **Lampiran XVII**.

Tabel 60
Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**270.623.013.752**
Mutasi tambah:	**15.192.172.054**
Pengembangan Nilai Aset	719.072.105
Transfer masuk	2.988.546.564
Reklasifikasi masuk	1.564.448.746
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	5.737.323.354
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	4.182.781.285
Mutasi kurang:	**(8.725.869.918)**
Transaksi Normalisasi BMN	(5.737.323.354)
Transfer Keluar	(2.988.546.564)
Saldo per 31 Desember 2021	**277.089.315.888**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(113.949.108.660)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**163.140.207.228**

Penjelasan transaksi mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp719.072.105,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp98.303.000,00, pada IPDN Jatinangor sebesar Rp78.625.000,00, dan pada BPSDM sebesar Rp542.144.105,00. Transaksi Pengembangan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari Realisasi Belanja Barang;

Tabel 61
Hubungan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan Mutasi Tambah Aset per Unit Eselon I

NO	UNIT ESELON I	REALISASI BELANJA MODAL JIJ	523111	523121	MENJADI JIJ
					PENGEMBANGAN NILAI
1	Setjen	-	98.303.000	78.625.000	176.928.000
2	BPSDM	-	542.144.105	-	542.144.105
JUMLAH		**-**	**640.447.105**	**78.625.000**	**719.072.105**

b) Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp2.988.546.564,00 terdapat pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar;

c) Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.564.448.746,00 terdapat pada IPDN Kalbar;

d) Transaksi Penambahan dari Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp5.737.323.354,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp4.578.971.661,00, sebesar Rp516.628.000,00 terdapat pada IPDN Jakarta, dan sebesar Rp641.723.693,00 terdapat IPDN Kampus Sulut.

e) Transaksi Penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp4.182.781.285,00 terdapat pada IPDN Kalbar;

f) Transaksi Pengurangan dari Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp5.737.323.354,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp4.578.971.661,00, sebesar Rp516.628.000,00 terdapat pada IPDN Jakarta, dan sebesar Rp641.723.693,00 terdapat IPDN Kampus Sulut; dan

g) Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp2.988.546.564,00 terdapat pada BPSDM Pusat.

Aset Tetap Lainnya Rp141.180.030.592

C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp141.180.030.592,00 dan Rp182.391.634.955,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 62.

Tabel 62
Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	25.689.891.677	25.459.985.586	229.906.091
2	Itjen	61.327.996	61.327.996	-
3	Ditjen Polpum	-	800.000	(800.000)
4	Ditjen BAK	17.686.224.808	17.686.224.808	-
5	Ditjen Pemdes	560.345.620	627.233.046	(66.887.426)
6	Ditjen Bina Bangda	4.951.568.889	4.951.568.889	-
7	Ditjen Otda	84.583.688.119	128.340.471.780	(43.756.783.661)
8	Ditjen Dukcapil	3.910.236.460	1.760.819.027	2.149.417.433
9	Ditjen Keuda	282.405.583	273.469.883	8.935.700
10	Badan Litbang	500.242.436	438.462.436	61.780.000
11	BPSDM	2.954.099.004	2.791.271.504	162.827.500
Jumlah		**141.180.030.592**	**182.391.634.955**	**(41.211.604.363)**

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXVII**.

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XVII**.

Tabel 63

Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**182.391.634.955**
Mutasi tambah:	**88.583.610.912**
Pembelian	3.892.829.343
Transfer masuk	84.567.861.119
Reklasifikasi Masuk	60.000.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	15.400.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	47.520.450
Mutasi kurang:	**(129.795.215.275)**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(67.687.876)
Transaksi Normalisasi BMN	(47.520.000)
Penghapusan	(43.756.783.661)
Transfer Keluar	(85.923.223.738)
Saldo per 31 Desember 2021	**141.180.030.592**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(94.523.461.278)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**46.656.569.314**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari Pembelian sebesar Rp3.892.829.343,00 terdapat pada IPDN Kalbar sebesar Rp47.500.000,00, IPDN Jakarta sebesar Rp30.147.000,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp92.259.091,00, Ditjen Polpum sebesar Rp668.768.897,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp2.422.517.223,00, Ditjen Otda sebesar Rp206.407.960,00 Ditjen Bina Keuda sebesar Rp216.021.672,00, Badan Litbang sebesar Rp61.780.000,00, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp147.427.500,00. Penambahan Aset Tetap Lainnya atas Pembelian berasal dari Realisasi Belanja Modal;

Hubungan Realisasi Belanja Modal Lainnya dengan Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXVIII**.

b. Transaksi Penambahan berasal dari Transfer Masuk sebesar Rp84.567.861.119,00 terdapat pada Ditjen Otda;

c. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp60.000.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor;

d. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp15.400.000,00 terdapat pada PPSDM Bukit Tinggi;

e. Transaksi Penambahan dari Perolehan Hasil Tindak Lanjut Rp47.520.450,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes sebesar

Rp450,00 dan PPSDM Regional Bandung sebesar Rp47.520.000,00;

f. Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp67.687.876,00 terdapat pada Ditjen Polpum sebesar Rp800.000,00 dan Rp66.887.876,00;

g. Transaksi Pengurangan dari Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp47.520.000,00 terdapat pada PPSDM Regional Bandung;

h. Transaksi Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp43.756.783.661,00 terdapat pada Setda Kab. Bolaang Mongondow sebesar Rp1.471.392.000,00, Dinas PU Kab. Boalemo sebesar Rp4.036.740.909,00, Dinas PU, Perumahan dan SDA Kab. Bolaang Mongondow sebesar Rp11.279.875.455,00, Setda Kab. Bulukumba sebesar Rp13.338.967.717,00 dan Dinas PU, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang sebesar Rp13.629.807.580,00.

i. Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp85.923.223.738,00 terdapat pada Ditjen Polpum sebesar Rp668.768.897,00; Ditjen Otda sebesar Rp206.407.960,00, Setda Kab. Gowa sebesar Rp1.480.000.000,00, Setda Kab. Solok sebesar Rp4.541.238.182,00, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Ngawi sebesar Rp5.608.632.498,00, Dinas PU Kab. Solok sebesar Rp9.980.125.000,00, Dinas PU Kab. Kebumen sebesar Rp10.372.552.691,00, Dinas Bina Marga Kab. Bandung sebesar Rp15.155.398.523,00, Dinas Bina Marga Kab. Lebak sebesar Rp16.742.666.277,00, Dinas PU Kab. Tanah Datar sebesar Rp20.687.247.948,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp273.099.790,00, dan Ditjen Bina Keuda sebesar Rp207.085.972,00. Dalam Transfer Keluar sebesar Rp85.923.223.738,00 terdapat Transfer Keluar dari satker DK/TP/UB ke satker pusat pada Unit Eselon I selaku penanggung jawab proses likuidasi sebesar Rp 84.567.861.119,00 untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp61.214.356.904

C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp61.214.356.904,00 dan Rp32.921.865.346,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 64.

Tabel 64

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Setjen	59.299.105.994	31.006.614.436	28.292.491.558
2	Badan PSDM	1.915.250.910	1.915.250.910	-
Jumlah		**61.214.356.904**	**32.921.865.346**	**28.292.491.558**

Rincian Mutasi KDP per Unit Eselon I terdapat pada Lampiran **XXIX**.

Rincian KDP per Satker disajikan pada **Lampiran XXX**.

Tabel 65

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI
Setjen	Setjen Pusat (403200)	Peralatan dan Mesin	3.374.341.895
	IPDN Kalbar (683070)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	25.326.371.979
	IPDN Jatinangor (448302)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	30.598.392.120
Jumlah Setjen			**59.299.105.994**
BPSDM	BPSDM (403231)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	318.987.650
	PPSDM Makasar (027177)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.596.263.260
Jumlah BPSDM			**1.915.250.910**
JUMLAH KESELURUHAN			**61.214.356.904**

Tabel 66

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**32.921.865.346**
Mutasi tambah:	**82.958.517.129**
Saldo Awal KDP	24.697.623.668
Perolehan Penambahan KDP	8.145.884.604
Pengembangan KDP	50.115.008.857
Mutasi kurang:	**(54.666.025.571)**
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(29.911.583.964)
Koreksi Nilai KDP	(56.817.939)
Tindak Lanjut Kertas Kerja Konfirmasi Aplikasi SIMAK-BMN	(24.697.623.668)
Saldo per 31 Desember 2021	**61.214.356.904**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan KDP adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari Koreksi Saldo Awal KDP sebesar Rp24.697.623.668,00 merupakan koreksi yang dibentuk atas tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi Aplikasi SIMAK-BMN pada IPDN Kampus Kalbar;

b. Transaksi Penambahan dari Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp8.145.884.604,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp7.064.678.500,00 yang merupakan KDP berupa Peralatan dan Mesin, IPDN Papua sebesar Rp1.081.206.104,00 yang merupakan KDP berupa Gedung dan Bangunan;

c. Transaksi Penambahan dari Pengembangan KDP sebesar Rp50.115.008.857,00 terdapat pada satker Setjen Pusat sebesar Rp5.141.328.500,00 yang merupakan KDP berupa Peralatan dan Mesin, IPDN Jatinangor sebesar Rp28.349.309.497,00 yang merupakan KDP berupa Gedung dan Bangunan, IPDN Kalbar sebesar Rp16.588.270.860,00 yang merupakan KDP berupa Gedung dan Bangunan dan IPDN Papua sebesar Rp36.100.000,00 yang merupakan KDP berupa Gedung dan Bangunan;

d. Transaksi Pengurangan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp29.911.583.964,00, terdapat pada Setjen sebesar Rp12.206.007.000,00, IPDN Papua sebesar Rp1.117.306.104,00, dan IPDN Kalbar sebesar Rp16.588.270.860,00;

e. Transaksi Pengurangan dari Koreksi Nilai KDP sebesar Rp56.817.939,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalimantan Barat; dan

f. Transaksi Pengurangan dari Tindak Lanjut Kertas Kerja Konfirmasi Aplikasi SIMAK-BMN sebesar Rp24.697.623.668,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp3.499.614.573.965

C.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.499.614.573.965,00 dan Rp3.321.310.249.433,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker disajikan pada **Lampiran XVII**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersaji pada Tabel 67.

Tabel 67

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.319.292.929.878	(2.960.511.708.233)	358.781.221.645
2	Gedung dan Bangunan	2.789.720.379.051	(330.630.295.794)	2.459.090.083.257
3	Jalan dan Jembatan	65.413.929.496	(37.019.376.292)	28.394.553.204
4	Irigasi	46.411.107.768	(18.955.029.858)	27.456.077.910
5	Jaringan	165.264.278.624	(57.974.702.510)	107.289.576.114
6	Aset Tetap Lainnya	141.180.030.592	(94.523.461.278)	46.656.569.314
Jumlah		**6.527.282.655.409**	**(3.499.614.573.965)**	**3.027.668.081.444**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp598.938.232

C.18 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp598.938.232,00 dan Rp4.124.998,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Rincian tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji pada Tabel 68.

Tabel 68

Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Setjen	590.188.232	-	590.188.232
2	Ditjen Bina Keuda	8.750.000	4.124.998	4.625.002
Jumlah		**598.938.232**	**4.124.998**	**594.813.234**

Mutasi tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 tersaji pada Tabel 69.

Tabel 69

Mutasi Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Desember 2020	**4.124.998**
Mutasi Tambah:	**1.228.176.464**
Jurnal Balik Reklasifikasi dari Bagian Lancar Piutang TGR (Ditjen Bina Keuda)	5.500.000
Pengakuan Piutang atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Ditjen Bina Bangda)	12.200.000
Pengakuan Piutang atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Ditjen Bina Keuda)	21.000.000
Pengakuan Piutang atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar)	9.100.000
Pengakuan Piutang atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara (DKPP)	1.180.376.464
Mutasi Kurang:	**(633.363.230)**
Pembayaran Tagihan Piutang TGR (Ditjen Bina Bangda)	(12.200.000)
Pembayaran Tagihan Piutang TGR (Ditjen Bina Keuda)	(11.374.998)
Pembayaran Tagihan Piutang TGR (Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar)	(9.100.000)
Reklasifikasi Keluar ke Bagian Lancar TGR (Ditjen Bina Keuda)	(10.500.000)
Reklasifikasi Keluar ke Bagian Lancar TGR (DKPP)	(590.188.232)
Saldo per 31 Desember 2021	**598.938.232**

Penjelasan Mutasi Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut:

a) Transaksi Penambahan Piutang Tagihan TP/TGR berasal dari Jurnal Balik Reklasifikasi dari Bagian Lancar Piutang TGR terdapat pada Ditjen Bina Keuda sebesar Rp5.500.000,00;

b) Transaksi Penambahan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp12.200.000,00 berasal dari tuntutan pembayaran ganti rugi atas kehilangan Barang Milik Negara berupa satu unit kendaraan dinas bermotor roda dua dengan nomor polisi B 3983 SQR yang merupakan kendaraan operasional pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

c) Transaksi Penambahan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp21.000.000,00 berasal dari tuntutan pembayaran ganti rugi atas kehilangan Barang Milik Negara berupa satu unit kendaraan dinas operasional roda dua dengan nomor polisi B 3489 PIQ pada Ditjen Bina Keuda;

d) Transaksi Penambahan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp9.100.000,00 berasal dari tuntutan pembayaran ganti rugi atas kehilangan Barang Miliik Negara berupa satu unit kendaraan dinas roda dua dengan nomor polisi BM 4102 P pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar;

e) Transaksi Penambahan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp1.180.376.464,00 berasal dari pengakuan tuntutan ganti rugi keuangan negara terhadap pegawai bukan bendahara yang terdiri dari dua debitur dengan nilai masing-masing sebesar

Rp740.929.484,00 dan 439.446.980,00 dengan masa pelunasan selama 24 bulan terhitung mulai Januari 2022 pada DKPP;

f) Transaksi Pengurangan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp12.200.000,00 merupakan pelunasan Piutang TGR berupa tuntutan pembayaran ganti rugi atas kehilangan Barang Milik Negara berupa satu unit kendaraan dinas bermotor roda dua dengan nomor polisi B 3983 SQR yang merupakan kendaraan operasional pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

g) Transaksi Pengurangan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp11.374.998,00 merupakan pembayaran tagihan TP/TGR pada Ditjen Bina Keuangan Daerah yang terdiri dari tuntutan pembayaran ganti rugi atas kehilangan Barang Milik Negara berupa rugi 1 unit kendaraan dinas operasional roda dua dengan nomor polisi B 6546 PXQ sebesar Rp9.624.998,00 dan satu unit kendaraan dinas operasional roda dua dengan nomor polisi B 3489 PIQ sebesar Rp1.750.000,00;

h) Transaksi Pengurangan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp9.100.000,00 merupakan pelunasan Piutang TGR berupa tuntutan pembayaran ganti rugi atas kehilangan Barang Milik Negara berupa satu unit kendaraan dinas roda dua dengan nomor polisi BM 4102 P pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar;

i) Transaksi Pengurangan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp10.500.000,00 berasal dari jurnal penyesuaian akhir tahun 2021 untuk mereklasifikasi Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir pada Ditjen Bina Keuda.

j) Transaksi Pengurangan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp590.188.232,00 berasal dari jurnal penyesuaian akhir tahun 2021 untuk mereklasifikasi Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir pada DKPP.

Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp2.994.691

C.19 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.994.691,00 dan Rp20.625,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 70

Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I

No	Komponen	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Setjen	Lancar	2	590.188.232	0,50%	2.950.941
2	Ditjen Bina Keuda	Lancar	1	8.750.000	0,50%	43.750
Total			**3**	**598.938.232**		**2.994.691**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp2.994.691,00 terdiri dari penyisihan piutang sebesar Rp43.750,00 pada Ditjen Bina Keuda dengan nilai piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp8.750.000,00 dan penyisihan piutang sebesar Rp2.950.941,00 pada DKPP dengan nilai piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TG) sebesar Rp590.188.232,00.

Aset Tak Berwujud Rp766.947.084.645

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp766.947.084.645,00 dan Rp744.102.165.510,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 71

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai
1	Software	756.313.203.584
2	Lisensi	2.472.651.811
3	Hasil Kajian/Penelitian	4.116.484.400
4	ATB Lainnya	4.044.744.850
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		**766.947.084.645**
Amortisasi ATB s.d 31 Desember 2021		(717.375.384.460)
Jumlah Nilai Buku per 31 Desember 2021		**49.571.700.185**

Rincian Aset Tak Berwujud menurut Eselon I per 31 Desember 2021 tersaji pada Tabel 72.

Tabel 72

Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

ESELON I	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	KENAIKAN (PENURUNAN)
Setjen	30.347.669.236	25.744.742.175	4.602.927.061
Itjen	689.880.820	1.009.789.200	(319.908.380)
Ditjen Polpum	432.535.500	432.535.500	-
Ditjen BAK	4.130.192.170	4.130.192.170	-
Ditjen Bina Pemdes	7.828.962.630	7.876.757.630	(47.795.000)
Ditjen Bina Bangda	20.656.632.232	20.263.222.092	393.410.140
Ditjen Otda	15.350.304.958	18.617.117.008	(3.266.812.050)
Ditjen Dukcapil	645.398.393.134	624.537.677.766	20.860.715.368
Ditjen Bina Keuda	35.339.470.435	35.041.046.382	298.424.053
Badan Litbang	5.835.610.381	5.556.536.881	279.073.500
Badan PSDM	937.433.149	892.548.706	44.884.443
Jumlah	**766.947.084.645**	**744.102.165.510**	**22.844.919.135**

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I terdapat pada Lampiran **XXXI**.

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker disajikan pada **Lampiran XXXII**.

Tabel 73

Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**744.102.165.510**
Mutasi tambah:	**46.983.071.462**
Saldo Awal (Koreksi)	98.500.600
Pembelian	15.368.706.604
Pengembangan Nilai Aset	9.641.703.870
Transfer masuk	16.315.478.977
Reklasifikasi Masuk	2.249.742.311
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3.054.619.100
Pengembangan Melalui KDP	254.320.000
Mutasi Kurang:	**(24.138.152.327,00)**
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(14.537.947.723)
Transaksi Normalisasi BMN	(3.152.766.600)
Penghapusan	(97.790.000)
Transfer Keluar	(6.051.052.504)
Reklasifikasi Keluar	(298.595.500)
Saldo per 31 Desember 2021	**766.947.084.645**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(717.375.384.460)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**49.571.700.185**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp98.500.600,00 terdapat pada Setjen Pusat atas Sistem/Aplikasi E-Database Pusdatin;

b. Transaksi Penambahan dari Pembelian sebesar Rp15.368.706.604,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp505.760.500,00, IPDN Jakarta sebesar Rp29.975.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp79.120.000,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp49.995.000,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp393.410.140,00, Ditjen Otda sebesar Rp148.500.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp13.677.237.468,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp298.424.053,00, Badan Litbang sebesar Rp141.400.000,00, dan BPSDM sebesar Rp44.884.443,00. Transaksi Pembelian ATB terdiri dari Pembelian yang berasal dari Belanja Barang sebesar Rp1.249.668.693,00 dan Belanja Modal sebesar Rp14.119.037.911,00;

c. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp9.641.703.870,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp2.192.557.650,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp30.000.000,00, Itjen sebesar Rp97.994.820,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp7.183.477.900,00 dan Badan Litbang sebesar Rp137.673.500,00. Transaksi Pengembangan Nilai ATB terdiri dari Pengembangan Nilai yang berasal dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.040.900.320,00, dan Pengembangan Nilai ATB yang berasal dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.600.803.550,00;

Hubungan Realisasi Belanja Modal Lainnya dengan Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXVIII**.

d. Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp16.315.478.977,00 terdapat pada Ditjen Otda;

e. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.249.742.311,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp1.951.146.811,00, dan Ditjen BAK sebesar Rp298.595.500,00;

f. Transaksi Penambahan dari Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp3.054.619.100,00 terdapat pada Setjen Pusat;

g. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp254.320.000,00 terdapat pada Setjen Pusat terdiri dari:

    1. Transaksi Penambahan dari Pengembangan KDP sebesar Rp178.024.000,00;

2. Transaksi Penambahan dari Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp76.296.000,00.

h. Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp14.537.947.723,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp440.306.000,00, Itjen sebesar Rp417.903.200,00, dan Ditjen Otda sebesar Rp13.679.738.523,00;

i. Transaksi Pengurangan dari Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp3.152.766.600,00 terdapat pada Setjen Pusat;

j. Transaksi Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp97.790.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes;

k. Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp6.051.052.504,00 terdapat pada Bappeda Kab. Ogan Komering Ilir (119267) sebesar Rp502.946.000,00, Bappeda Prop. Sumatera Selatan Rp624.800.000,00, Bappeda Kab. Ogan Komering Ilir (110805) sebesar Rp1.577.738.504,00; dan Bappeda Kab. Tasikmalaya sebesar Rp3.345.568.000,00; dan

l. Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp298.595.500,00 terdapat pada Ditjen BAK.

Aset Lain-Lain
Rp117.988.302.849

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp117.988.302.849,00 dan Rp195.507.375.570,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kemendagri serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 74
Rincian Aset Lain-lain Menurut Uraian Akun per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	81.856.928.810
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	36.131.374.039
Total		**117.988.302.849**

Rincian Aset Lain-lain menurut Eselon I per 31 Desember 2021 tersaji pada Tabel 75.

Tabel 75

Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I

ESELON I	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	KENAIKAN (PENURUNAN)
Setjen	22.845.705.775	17.225.739.897	5.619.965.878
Itjen	8.093.172.300	8.724.717.668	(631.545.368)
Ditjen Polpum	2.414.168.120	1.317.842.250	1.096.325.870
Ditjen BAK	7.616.956.408	7.616.956.408	-
Ditjen Pemdes	5.097.756.383	41.485.369.343	(36.387.612.960)
Ditjen Bina Bangda	32.376.222.624	35.797.582.224	(3.421.359.600)
Ditjen Otda	27.449.502.105	64.469.718.332	(37.020.216.227)
Ditjen Dukcapil	2.004.433.409	2.004.433.409	-
Ditjen Keuda	128.698.000	1.166.899.230	(1.038.201.230)
Badan Litbang	1.436.181.478	2.621.021.083	(1.184.839.605)
Badan PSDM	8.525.506.247	13.077.095.726	(4.551.589.479)
Jumlah	**117.988.302.849**	**195.507.375.570**	**(77.519.072.721)**

Rincian Mutasi Aset Lain-lain per Unit Eselon I terdapat pada Lampiran **XXXIII**.

Rincian Aset Lain-lain per Satker disajikan pada **Lampiran XXXII**.

Tabel 76

Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**195.507.375.570**
Mutasi tambah:	**51.630.671.969**
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	51.630.671.969
Mutasi kurang:	**(129.149.744.690)**
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(1.492.661.660)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(277.574.850)
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	(412.543.050)
Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	(299.700.000)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(95.566.142.643)
Transfer Keluar	(28.369.148.487)
Hibah Keluar	(2.731.974.000)
Saldo per 31 Desember 2021	**117.988.302.849**
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi s.d 31 Desember 2021	(106.396.400.984)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**11.591.901.865**

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp51.630.671.969,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp8.859.723.154,00, IPDN Jatinangor sebesar

Rp3.012.238.460,00, IPDN Kampus Sulsel Rp37.350.000,00, IPDN Kalbar sebesar Rp242.300.000,00, IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp191.442.000,00, IPDN NTB Rp218.267.752,00, Itjen sebesar Rp1.118.073.200,00, Ditjen Polpum sebesar Rp1.096.325.870,00, Balai Besar Pemdes Malang sebesar Rp559.716.896,00, Balai Pemdes Lampung sebesar Rp271.081.540,00, Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp212.650.000,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp17.897.560.414,00, Ditjen Otda sebesar Rp13.956.114.523,00, BPSDM sebesar Rp2.818.358.580,00, PPSDM Reg. Bandung sebesar Rp164.790.000,00 dan PPSDM Reg. Makassar sebesar Rp974.679.580,00;

b. Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp1.492.661.660,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp193.900.000,00, Balai Besar Pemdes Malang sebesar Rp51.061.800,00, Ditjen Otda sebesar Rp1.232.299.860,00, dan PPSDM Reg. Bukit Tinggi sebesar Rp15.400.000,00;

c. Transaksi Pengurangan dari Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp277.574.850,00 terdapat pada IPDN NTB sebesar Rp27.770.000,00, BPSDM sebesar Rp192.608.000,00 dan PPSDM Reg. Makassar sebesar Rp57.196.850,00;

d. Transaksi Pengurangan dari Penghapusan BMN yang dihentikan (semester II dokumen semester I) sebesar Rp412.543.050,00 terdapat pada Setjen Pusat;

e. Transaksi Pengurangan dari Hibah Keluar BMN yang dihentikan (semester II dokumen semester I) sebesar Rp299.700.000,00 terdapat pada satker TP Ditjen Bina Bangda, yaitu Setda Kab. Buol;

f. Transaksi Pengurangan dari Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp95.566.142.643,00 (rincian satker pada **Lampiran XXXIV**);

g. Transaksi Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp28.369.148.487,00 (rincian satker pada **Lampiran XXXV**); dan

h. Transaksi Pengurangan dari Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar Rp2.731.974.000,00 terdapat pada satker Setda Kab. Aceh Barat Daya sebesar Rp251.970.000,00, Setda Kab. Lubuk Linggau sebesar Rp247.037.000,00, Setda Kab. Lembata sebesar Rp317.200.000,00, Dinas PU Kab. Merauke sebesar Rp237.955.000,00, Setda Kab. Paniai sebesar Rp392.000.000,00, Dinas PU Kota Jayapura sebesar Rp296.250.000,00, Dinas PU Kab. Sorong sebesar

Rp194.500.000,00, Setda Kab. Lampung Timur sebesar Rp297.062.000,00 dan Setda Kab. Sorong Selatan sebesar Rp498.000.000,00.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp823.771.785.444,00

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp823.771.785.444,00 dan Rp883.638.460.993,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 77

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	*Software* Komputer	756.313.203.584	(716.998.320.312)	Rp 39.314.883.272
2	Lisensi	2.472.651.811	(377.064.148)	Rp 2.095.587.663
3	Hasil Kajian/Penelitian	4.116.484.400	-	Rp 4.116.484.400
4	ATB Lainnya	4.044.744.850	-	Rp 4.044.744.850
Jumlah		**Rp 766.947.084.645**	**Rp (717.375.384.460)**	**Rp 49.571.700.185**
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	81.856.928.810	(77.154.818.370)	Rp 4.702.110.440
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	36.131.374.039	(29.241.582.614)	Rp 6.889.791.425
Jumlah		**Rp 117.988.302.849**	**Rp (106.396.400.984)**	**Rp 11.591.901.865**
Total		**Rp 884.935.387.494**	**Rp (823.771.785.444)**	**Rp 61.163.602.050**

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XXXII**.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp65.458.224.733

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp65.458.224.733,00 dan Rp132.435.037.840,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Perbandingan rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 per Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 78

Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I

ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4 = (2-3)
Setjen	12.098.348.257	6.643.104.510	5.455.243.747
Itjen	1.681.274.730	1.722.706.495	(41.431.765)
Ditjen Polpum	1.436.745.482	1.478.588.043	(41.842.561)
Ditjen BAK	234.311.717	1.316.095.757	(1.081.784.040)
Ditjen Pemdes	2.754.225.821	2.075.029.394	679.196.427
Ditjen Bangda	2.064.881.564	2.232.598.620	(167.717.056)
Ditjen Otda	1.743.847.114	1.425.608.412	318.238.702
Ditjen Dukcapil	36.279.802.961	112.048.614.312	(75.768.811.351)
Ditjen Keuda	1.578.966.447	1.400.029.546	178.936.901
Badan Litbang	1.264.716.687	-	1.264.716.687
BPSDM	4.321.103.953	2.092.662.751	2.228.441.202
Jumlah	**65.458.224.733**	**132.435.037.840**	**(66.976.813.107)**

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada **Lampiran XXXVI**.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada **Lampiran XXXVII**.

Pendapatan Diterima di Muka Rp9.519.002.637

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.519.002.637,00 dan Rp2.909.872.933,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel 79

Pendapatan Diterima di Muka

ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
Setjen	9.072.616.716	2.338.664.183	6.733.952.533
Ditjen Bina Pemdes	81.214.000	104.418.000	(23.204.000)
Ditjen Bina Bangda	243.490.500	245.854.000	(2.363.500)
BPSDM	121.681.421	220.936.750	(99.255.329)
Jumlah	**9.519.002.637**	**2.909.872.933**	**6.609.129.704**

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Satker terdapat pada **Lampiran XXXVIII**.

Uang Muka dari KPPN Rp266.061.283

C.26 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp266.061.283,00 dan Rp48.500.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp15.362.241.991.047

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15.362.241.991.047,00 dan Rp15.409.886.743.539,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp97.916.234.721

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp97.916.234.721,00 dan Rp45.956.776.989,00. Pendapatan-LO terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari PNBP fungsional antara lain penyelenggaraan pendidikan pasca sarjana IPDN dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta PNBP umum yang berasal dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 80

Perbandingan Rincian PNBP Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.965.789.166	2.291.943.440	(14,23)
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	24.812.500	10.490.000	136,53
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	289.871.499	233.000.000	24,41
Pendapatan Biaya Pendidikan	6.860.686.701	15.334.615.200	(55,26)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	520.412.000	435.619.000	19,46
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	87.804.557.000	25.437.212.000	245,18
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	286.500.000	967.000.000	(70,37)
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	55.638	(100,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	523.186	128.016	308,69
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	160.765.539	1.244.270.543	(87,08)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	380.000	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.937.130	2.443.152	(20,71)
JUMLAH	**97.916.234.721**	**45.956.776.989**	**113,06**

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp97.916.234.721,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp128.414.847.075,00, diantaranya sebesar Rp106.352.651.830,00 berasal dari kegiatan operasional. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis kas) sebesar Rp8.436.417.109,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 81

Selisih PNBP antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.706.910.469	1.965.789.166	258.878.697
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	24.812.500	24.812.500	-
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	292.596.499	289.871.499	(2.725.000)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	14.060.542.123	6.860.686.701	(7.199.855.422)
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	513.612.000	520.412.000	6.800.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	87.804.557.000	87.804.557.000	-
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	286.500.000	286.500.000	-
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	38.570	523.186	484.616
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.660.765.539	160.765.539	(1.500.000.000)
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	380.000	380.000	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.937.130	1.937.130	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		**106.352.651.830**	**97.916.234.721**	**(8.436.417.109)**

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi PNBP menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan bertambah sebesar Rp258.878.697,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal balik di awal tahun 2021 atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp56.800.493,00.
    b. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal balik di awal tahun 2021 atas pengakuan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.166.667,00.
    c. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal balik di awal tahun 2021 atas pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp2.913.876.683,00.
    d. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian di akhir tahun 2021 atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp8.927.389,00.
    e. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian di akhir tahun 2021 atas pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp38.153.583,00.
    f. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian di akhir tahun 2021 atas pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp2.641.111.798,00.
2. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan berkurang sebesar Rp2.725.000,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal pada saat penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan ke kas negara atas penerimaan Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan sebesar Rp57.250.000,00.
    b. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan yang belum disetor bendahara penerimaan ke kas negara sebesar Rp54.525.000,00.
3. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Biaya Pendidikan berkurang sebesar Rp7.199.855.422,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal pada saat penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan ke kas negara atas penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp4.268.800.000,00.
    b. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp2.167.527.300,00.

c. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian di akhir tahun 2021 atas pengakuan Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp1.930.143.000,00.

d. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian Pendapatan Biaya Pendidikan yang belum disetor bendahara penerimaan ke kas negara sebesar Rp1.967.255.000,00.

e. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian di akhir tahun 2021 atas pengakuan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp4.667.426.122,00.

f. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian di akhir tahun 2021 atas pengakuan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp6.500.000,00.

4. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Pendidikan Lainnya bertambah sebesar Rp6.800.000,00 disebabkan karena:

   a. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal pada saat penyetoran kas di Bendahara Penerimaan ke kas negara atas penerimaan Pendapatan Pendidikan Lainnya sebesar Rp57.500.000,00.

   b. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian Pendapatan Pendidikan Lainnya yang belum disetor bendahara penerimaan ke kas negara sebesar Rp64.300.000,00.

5. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) bertambah sebesar Rp484.616,00 yang berasal dari jurnal penyesuaian atas penerimaan sisa saldo giro bank yang belum disetor ke kas negara.

6. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 yang berasal dari jurnal pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

Beban Pegawai
Rp758.559.128.673

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp758.559.128.673,00 dan Rp718.963.520.909,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 82

Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Gaji Pokok PNS	295.274.325.409	280.790.959.065	5,16
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.860.216	4.276.690	13,64
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	16.003.332.908	16.147.019.710	(0,89)
Beban Tunj. Anak PNS	4.287.752.024	4.337.375.680	(1,14)
Beban Tunj. Struktural PNS	15.696.145.000	15.989.954.900	(1,84)
Beban Tunj. Fungsional PNS	10.783.015.000	8.030.573.000	34,27
Beban Tunj. PPh PNS	1.380.120.429	1.375.589.846	0,33
Beban Tunj. Beras PNS	13.862.274.300	11.543.052.768	20,09
Beban Tunj. Kemahalan PNS	-	14.650.000	(100,00)
Beban Uang Makan PNS	27.021.082.350	28.349.420.128	(4,69)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	49.425.000	47.375.000	4,33
Beban Tunj. Khusus Papua PNS	180.135.000	158.250.000	13,83
Beban Tunj. Umum PNS	11.628.638.355	10.454.206.550	11,23
Beban Tunj. Profesi Dosen	8.496.241.565	7.875.029.080	7,89
Beban Tunj. Kehormatan Profesor	1.607.975.400	1.633.586.800	(1,57)
Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	104.000.000	92.400.000	12,55
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.557.557.200	1.456.151.600	6,96
Beban Uang Lembur	3.839.913.600	2.119.666.000	81,16
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	346.782.334.917	328.543.984.092	5,55
TOTAL	**758.559.128.673**	**718.963.520.909**	**5,51**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp758.559.128.673,00, sedangkan realisasi

Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp750.064.824.380,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pegawai (basis akrual) dengan Belanja Pegawai (basis kas) sebesar Rp8.494.304.293,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 83

Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
511111	Beban Gaji Pokok PNS	295.224.831.780	295.274.325.409	49.493.629
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.859.904	4.860.216	312
511121	Beban Tunj.Suami/Istri PNS	16.003.032.824	16.003.332.908	300.084
511122	Beban Tunj. Anak PNS	4.287.698.664	4.287.752.024	53.360
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	15.711.655.000	15.696.145.000	(15.510.000)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	10.777.515.000	10.783.015.000	5.500.000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	1.380.659.836	1.380.120.429	(539.407)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	13.862.201.880	13.862.274.300	72.420
511129	Beban Uang Makan PNS	25.966.534.200	27.021.082.350	1.054.548.150
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	49.425.000	49.425.000	-
511138	Beban Tunj. Khusus Papua PNS	180.135.000	180.135.000	-
511151	Beban Tunj. Umum PNS	11.440.258.232	11.628.638.355	188.380.123
511153	Beban Tunj. Profesi Dosen	8.496.241.565	8.496.241.565	-
511154	Beban Tunj. Kehormatan Profesor	1.607.975.400	1.607.975.400	-
511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	104.000.000	104.000.000	-
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1.557.557.200	1.557.557.200	-
512211	Beban Uang Lembur	3.839.913.600	3.839.913.600	-
512411	Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	339.570.329.295	346.782.334.917	7.212.005.622
BEBAN PEGAWAI		**750.064.824.380**	**758.559.128.673**	**8.494.304.293**

Perbedaan pencatatan beban pegawai menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PNS bertambah sebesar Rp49.493.629,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Gaji Pokok PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp22.515.900,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Gaji Pokok PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp72.009.529,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PNS bertambah sebesar Rp312,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Pembulatan Gaji PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp1.791,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Pembulatan Gaji PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp2.103,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PNS bertambah sebesar Rp300.084,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Tunj. Suami/Istri PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp1.053.010,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Tunj. Suami/Istri PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp1.353.094,00.
4. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Anak PNS bertambah sebesar Rp53.360,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Tunj. Anak PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp201.448,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Tunj. Anak PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp254.808,00.
5. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktual PNS berkurang sebesar Rp15.510.000,00 disebabkan karena jurnal balik pengakuan Beban Tunj. Struktural PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021.

6. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PNS bertambah sebesar Rp5.500.000,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Tunj. Fungsional PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp700.000,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Tunj. Fungsional PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp6.200.000,00.
7. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan PPh PNS berkurang sebesar Rp539.407,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Tunj. PPh PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp817.478,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Tunj. PPh PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp278.071,00.
8. Beban-LO untuk akun Beban Tunj. Beras PNS bertambah sebesar Rp72.420,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Tunj. Beras PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp289.680,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Tunj. Beras PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp362.100,00.
9. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PNS bertambah sebesar Rp1.054.548.150,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Uang Makan PNS TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp1.041.938.000,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Uang Makan PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp2.096.486.150,00.
10. Beban-LO untuk akun Beban Tunj. Umum PNS bertambah sebesar Rp188.380.123,00 disebabkan karena jurnal penyesuaian pengakuan Beban Tunj. Umum PNS TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022.

11. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan) bertambah sebesar Rp7.212.005.622,00 disebabkan karena:

    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan) TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp18.680.239.197,00.

    b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja TA 2021 sebesar Rp5.181.006,00.

    c. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Piutang Lainnya atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja TA 2020 yang dibayarkan pada TA 2021 sebesar Rp10.683.025,00.

    d. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan) TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp25.886.742.800,00.

Beban Persediaan Rp33.545.694.902

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp33.545.694.902,00 dan Rp31.159.408.769,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pemakaian/konsumsi atas persediaan dinilai menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini beban persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing persediaan yang terpakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 84

Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Persediaan Konsumsi	18.174.211.773	19.761.214.126	(8,03)
Beban Persediaan Bahan Baku	2.481.713.773	3.397.054.722	(26,95)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	40.863.150	45.005.950	(9,21)
Beban Persediaan Lainnya	12.848.906.206	7.956.133.971	61,50
TOTAL	**33.545.694.902**	**31.159.408.769**	**7,66**

Penjelasan hubungan mutasi kurang persediaan dengan beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 85

Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2021

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL	PEMBELIAN	SALDO AKHIR	PEMAKAIAN	BEBAN PERSEDIAAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	(8) = (6) - (7)
117111	Barang Konsumsi	9.550.663.297	-	4.530.248.276	5.020.415.021	18.174.211.773	(13.153.796.752)
117131	Bahan Baku	130.838.493	-	256.571.423	(125.732.930)	2.481.713.773	(2.607.446.703)
117191	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	29.004.250	-	17.641.000	11.363.250	40.863.150	(29.499.900)
117199	Persediaan Lainnya	7.044.189.351	-	4.072.779.747	2.971.409.604	12.848.906.206	(9.877.496.602)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		16.040.219.776		16.040.219.776		16.040.219.776
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		432.009.600		432.009.600		432.009.600
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		13.762.676.632		13.762.676.632		13.762.676.632
JUMLAH		**16.754.695.391**	**30.234.906.008**	**8.877.240.446**	**38.112.360.953**	**33.545.694.902**	**4.566.666.051**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 (saldo awal) sebesar Rp16.754.695.391,00 dan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 (saldo akhir) sebesar Rp8.877.240.446,00. Selama TA 2021 terdapat realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp30.234.906.008,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan sebesar Rp38.112.360.953,00. Perbedaan sebesar Rp4.566.666.051,00 antara pemakaian persediaan sebesar Rp38.112.360.953,00 dengan Beban Persedian sebesar Rp33.545.694.902,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 86

Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MENJADI PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN	1.683.800
2	MENJADI BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN	(120.287.300)
3	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG DISEBABKAN ADANYA PENGHAPUSAN LAINNYA	(63.747.000)
4	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG DISEBABKAN ADANYA PERSEDIAAN RUSAK/USANG	(282.199.701)
5	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI HIBAH MASUK (HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG)	736.704.833
6	REALISASI BELANJA BARANG SELAIN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (AKUN BELANJA 521113) YANG MENJADI PERSEDIAAN	345.972.145
7	REALISASI BELANJA BARANG SELAIN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (AKUN BELANJA 523121) YANG MENJADI PERSEDIAAN	48.702.500
8	REALISASI BELANJA BARANG SELAIN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (AKUN BELANJA 521131) YANG MENJADI PERSEDIAAN	160.758.000
9	REALISASI BELANJA BARANG SELAIN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (AKUN BELANJA 521111) YANG MENJADI PERSEDIAAN	37.875.500
10	REALISASI BELANJA BARANG SELAIN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (AKUN BELANJA 521211) YANG MENJADI PERSEDIAAN	11.226.500
11	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI TRANSFER KELUAR	(80.471.950)
12	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI TRANSFER MASUK	80.471.950
13	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI HIBAH KELUAR JENIS PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (117111) PADA SATKER TP DUKCAPIL YANG DICATAT SEBAGAI BEBAN BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA (526311)	(4.689.933.973)
14	JURNAL MANUAL YANG DIBENTUK PADA APLIKASI SAIBA UNTUK MENGELIMINASI PENGURANGAN BEBAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN MENAMBAH EKUITAS ATAS TRANSAKSI KOREKSI TAMBAH PERSEDIAAN KARENA KESALAHAN PENCATATAN TAYL	3.426.500
15	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN PERSEDIAAN NAMUN MENJADI BEBAN PEMELIHARAAN)	(2.013.062.538)
16	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN PERSEDIAAN NAMUN MENJADI BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)	(381.697.800)
17	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN PEMELIHARAAN NAMUN MENJADI BEBAN PERSEDIAAN)	1.102.042.483
18	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT NAMUN MENJADI BEBAN PERSEDIAAN)	535.870.000
JUMLAH		**(4.566.666.051)**

Beban Barang Dan Jasa Rp1.307.141.093.169

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.307.141.093.169,00 dan Rp1.192.122.521.963,00. Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.307.141.093.169,00 terdiri dari kegiatan operasional secara normal sebesar Rp1.265.130.809.702,00 dan kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp42.010.283.467,00. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 87

Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Keperluan Perkantoran	157.016.145.156	148.716.211.010	5,58
Beban Pengadaan Bahan Makanan	45.789.786.393	69.383.572.257	(34,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.741.107.746	2.917.139.272	(6,03)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	738.495.655	504.193.459	46,47
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.074.882.800	21.497.534.975	(11,27)
Beban Barang Operasional Lainnya	34.548.480.491	32.228.114.550	7,20
Beban Bahan	86.834.839.757	63.914.287.691	35,86
Beban Honor Output Kegiatan	24.003.882.598	16.424.687.542	46,15
Beban Barang Non Operasional Lainnya	143.535.925.287	143.636.977.062	(0,07)
Beban Langganan Listrik	28.734.250.897	31.644.283.354	(9,20)
Beban Langganan Telepon	497.269.443	772.459.265	(35,63)
Beban Langganan Air	4.253.356.632	5.505.281.869	(22,74)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.192.335.920	2.104.169.232	(43,33)
Beban Jasa Pos dan Giro	1.000.000	1.000.000	-
Beban Jasa Konsultan	136.767.160.931	97.764.736.212	39,89
Beban Sewa	65.639.795.098	56.762.774.141	15,64
Beban Jasa Profesi	53.922.541.227	23.213.076.760	132,29
Beban Jasa Lainnya	458.612.509.424	400.475.738.740	14,52
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.227.044.247	1.079.391.413	13,68
Subtotal Akun Normal	**1.265.130.809.702**	**1.118.545.628.804**	**13,10**
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.663.244.785	25.976.427.625	(58,95)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7.457.173.986	8.780.852.640	(15,07)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23.889.864.696	38.819.612.894	(38,46)
Subtotal Akun Khusus COVID	**42.010.283.467**	**73.576.893.159**	(42,90)
TOTAL	**1.307.141.093.169**	**1.192.122.521.963**	**9,65**

D.4.1 Beban Barang dan Jasa untuk Kegiatan Operasional Secara Normal

Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.265.130.809.702,00, sedangkan realisasi Belanja

Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.301.968.136.150,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja Barang dan Jasa (basis kas) sebesar Rp36.837.326.448,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 88

Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
521111	Beban Keperluan Perkantoran	157.024.037.656	157.016.145.156	(7.892.500)
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	45.789.786.393	45.789.786.393	-
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.103.718.891	2.741.107.746	(362.611.145)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	738.495.655	738.495.655	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.074.882.800	19.074.882.800	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	34.548.480.491	34.548.480.491	-
521211	Beban Bahan	86.855.347.257	86.834.839.757	(20.507.500)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	23.983.182.598	24.003.882.598	20.700.000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	143.909.460.287	143.535.925.287	(373.535.000)
522111	Beban Langganan Listrik	29.506.242.545	28.734.250.897	(771.991.648)
522112	Beban Langganan Telepon	516.079.376	497.269.443	(18.809.933)
522113	Beban Langganan Air	4.239.524.551	4.253.356.632	13.832.081
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.157.778.995	1.192.335.920	34.556.925
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	1.000.000	1.000.000	-
522131	Beban Jasa Konsultan	138.853.798.071	136.767.160.931	(2.086.637.140)
522141	Beban Sewa	65.743.345.098	65.639.795.098	(103.550.000)
522151	Beban Jasa Profesi	52.421.897.877	53.922.541.227	1.500.643.350
522191	Beban Jasa Lainnya	494.501.077.609	458.612.509.424	(35.888.568.185)
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	1.227.044.247	1.227.044.247
BEBAN BARANG DAN JASA		**1.301.968.136.150**	**1.265.130.809.702**	**(36.837.326.448)**

Perbedaan pencatatan beban barang dan jasa menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Keperluan Perkantoran berkurang sebesar Rp7.892.500,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Keperluan Perkantoran yang menjadi Persediaan sebesar Rp37.875.500,00.
    b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Keperluan Perkantoran TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp29.983.000,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Penambah Daya Tahan Tubuh berkurang sebesar Rp362.611.145,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh yang menjadi Persediaan sebesar Rp345.972.145,00.
    b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal reklasifikasi Beban Penambah Daya Tahan Tubuh menjadi Beban Bahan yang disebabkan karena kesalahan penganggaran sebesar Rp16.639.000,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Bahan berkurang sebesar Rp20.507.500,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Bahan yang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.920.000,00.
    b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Bahan yang menjadi Persediaan sebesar Rp11.226.500,00.
    c. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal reklasifikasi Beban Penambah Daya Tahan Tubuh menjadi Beban Bahan yang disebabkan karena kesalahan penganggaran sebesar Rp16.639.000,00.
4. Beban-LO untuk akun Beban Honor Output Kegiatan bertambah sebesar Rp20.700.000,00 disebabkan karena jurnal penyesuaian pengakuan Beban Honor Output Kegiatan TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022.
5. Beban-LO untuk akun Beban Barang Non Operasional Lainnya berkurang sebesar Rp373.535.000,00 disebabkan karena jurnal reklasifikasi Beban Barang Non Operasional Lainnya menjadi Beban Jasa Lainnya yang disebabkan karena kesalahan penganggaran.
6. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Listrik berkurang sebesar Rp771.991.648,00 disebabkan karena:

a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Langganan Listrik TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp1.849.040.464,00.

b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Langganan Listrik TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp1.077.048.816,00.

7. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Telepon berkurang sebesar Rp18.809.933,00 disebabkan karena:

   a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Langganan Telepon TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp28.985.954,00.

   b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Langganan Telepon TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp10.176.021,00.

8. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Air bertambah sebesar Rp13.832.081,00 disebabkan karena:

   a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Langganan Air TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp758.439,00.

   b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Langganan Air TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp14.590.520,00.

9. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya bertambah sebesar Rp34.556.925,00 disebabkan karena jurnal penyesuaian pengakuan Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022.

10. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Konsultan berkurang sebesar Rp2.086.637.140,00 disebabkan karena:

    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Jasa Konsultan yang menjadi Aset Lainnya sebesar Rp1.581.737.140,00.

    b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Jasa Konsultan yang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp504.900.000,00.

11. Beban-LO untuk akun Beban Sewa berkurang sebesar Rp103.550.000,00 disebabkan karena jurnal koreksi Belanja Sewa yang menjadi Peralatan dan Mesin.

12. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Profesi bertambah sebesar Rp1.500.643.350,00 disebabkan karena:
    a. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Jasa Profesi TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp1.580.950.000,00.
    b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Jasa Profesi yang menjadi Aset Lainnya sebesar Rp80.306.650,00.
13. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Lainnya berkurang sebesar Rp35.888.568.185,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Jasa Lainnya (Jarkomdat dan ATS) TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp110.444.708.313,00.
    b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Jasa Lainnya yang menjadi Aset Lainnya sebesar Rp497.982.820,00.
    c. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi Belanja Jasa Lainnya yang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.030.915.500,00.
    d. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal reklasifikasi Beban Jasa Lainnya menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena kesalahan penganggaran sebesar Rp67.750.000,00.
    e. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Jasa Lainnya TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022 sebesar Rp34.431.570.803,00.
    f. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian pengakuan Beban Jasa Lainnya (program dukungan implementasi penataan ruang dan pembangunan rendah kerbon di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang berasal dari hibah sebesar Rp51.347.682.645,00.
    g. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal reklasifikasi Beban Barang Non Operasional Lainnya menjadi Beban Jasa Lainnya yang disebabkan karena kesalahan penganggaran sebesar Rp373.535.000,00.
14. Beban-LO untuk akun Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp1.227.044.247,00 disebabkan karena:

a. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Ekstrakomtabel sebesar Rp890.914.499,00.

b. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp194.987.708,00.

c. Penambahan Beban-LO yang disebabkan dari jurnal penyesuaian atas hibah barang dan jasa berupa Peralatan dan Mesin yang menjadi Ekstrakomtabel sebesar Rp141.142.040,00.

D.4.2 Beban Barang dan Jasa untuk Kegiatan Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp42.010.283.467,00, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp42.021.641.467,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja Barang dan Jasa (basis kas) sebesar Rp11.358.000,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 89

Selisih Beban Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.824.002.785	10.663.244.785	(160.758.000)
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7.457.173.986	7.457.173.986	-
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23.740.464.696	23.889.864.696	149.400.000
BEBAN BARANG DAN JASA		**42.021.641.467**	**42.010.283.467**	**(11.358.000)**

Perbedaan pencatatan beban barang dan jasa menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 berkurang sebesar Rp160.758.000,00 disebabkan karena jurnal koreksi Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 yang menjadi Persediaan.

2. Beban-LO untuk akun Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 bertambah sebesar Rp149.400.000,00 disebabkan karena jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas tes PCR dengan penyedia jasa RS Mentari dengan SPK No 027/11979/SES senilai Rp175.500.000,00 untuk 195 orang. Berdasarkan invoice, tes PCR sebesar Rp149.400.000,00 untuk 166 orang baru dilakukan pada tahun 2021.

Beban Pemeliharaan Rp115.279.789.119

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp115.279.789.119,00 dan Rp117.311.713.676,00. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp115.279.789.119,00 terdiri dari kegiatan operasional secara normal sebesar Rp115.277.888.319,00 dan kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.900.800,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 90

Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.679.566.550	69.493.098.927	(9,80)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.307.395.880	3.409.811.405	(32,33)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.950.651.999	33.057.784.486	8,75
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	-	9.310.500	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.997.000	12.000.000	174,98
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.326.568.680	2.676.989.877	61,62
Beban Pemeliharaan Lainnya	7.121.371.600	6.754.969.614	5,42
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	2.555.935.870	1.131.639.290	125,86
Beban Persediaan Suku Cadang	303.400.740	289.502.427	4,80
Subtotal Akun Normal	**115.277.888.319**	**116.835.106.526**	(1,33)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.900.800	476.607.150	(99,60)
Subtotal Akun Khusus COVID	**1.900.800**	**476.607.150**	(99,60)
TOTAL	**115.279.789.119**	**117.311.713.676**	(1,73)

D.5.1 Beban Pemeliharaan untuk Kegiatan Operasional Secara Normal

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp115.277.888.319,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp117.675.419.939,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pemeliharaan (basis akrual) dengan Belanja Pemeliharaan (basis kas) sebesar Rp2.397.531.620,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 91

Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.442.573.257	62.679.566.550	(3.763.006.707)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	781.012.886	-	(781.012.886)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.307.395.880	2.307.395.880	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.927.645.499	35.950.651.999	23.006.500
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	735.855.137	-	(735.855.137)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.997.000	32.997.000	-
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4.326.568.680	4.326.568.680	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	7.121.371.600	7.121.371.600	-
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	2.555.935.870	2.555.935.870
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	-	303.400.740	303.400.740
BEBAN PEMELIHARAAN		**117.675.419.939**	**115.277.888.319**	**(2.397.531.620)**

Perbedaan pencatatan Beban Pemeliharaan menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp3.763.006.707,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp185.872.500,00.

b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp416.992.445,00.

c. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.824.068.657,00.

d. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi menjadi Jaringan sebesar Rp224.902.568,00.

e. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi menjadi Jalan dan Jembatan sebesar Rp317.241.537,00.

f. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi menjadi Irigasi sebesar Rp98.303.000,00.

g. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp304.374.000,00.

2. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp23.006.500,00 disebabkan karena:

a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.978.000,00.

b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang menjadi Persediaan sebesar Rp48.702.500,00.

c. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi menjadi Irigasi sebesar Rp78.625.000,00.

d. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp148.562.000,00.

e. Penambahan Beban-LO yang berasal dari jurnal reklasifikasi Beban Jasa Lainnya menjadi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena kesalahan penganggaran sebesar Rp67.750.000,00.

Penjelasan Perbedaan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp781.012.886,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp735.855.137,00, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp2.555.935.870,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp303.400.740,00 secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 92

Penyajian Beban Pemeliharaan

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL	PEMBELIAN	SALDO AKHIR	PEMAKAIAN	BEBAN PEMELIHARAAN	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	(8) = (6) - (7)
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	672.230.496	-	335.222.726	337.007.770	2.555.935.870	(2.218.928.100)
117114	Suku Cadang	131.541.564	-	54.539.938	77.001.626	303.400.740	(226.399.114)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		781.012.886		781.012.886		781.012.886
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		735.855.137		735.855.137		735.855.137
JUMLAH		**803.772.060**	**1.516.868.023**	**389.762.664**	**1.930.877.419**	**2.859.336.610**	**(928.459.191)**

Saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2020 (saldo awal) sebesar Rp803.772.060,00 dan saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2021 (saldo akhir) sebesar Rp389.762.664,00. Selama TA 2021 terdapat realisasi Belanja Barang Pemeliharaan sebesar Rp1.516.868.023,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp1.930.877.419,00. Perbedaan sebesar Rp928.459.191,00 antara pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp1.930.877.419,00 dengan Beban Pemeliharaan dari pemakaian persediaan sebesar Rp2.859.336.610,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 93

Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI HIBAH MASUK (HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG)	789.136
2	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN PERSEDIAAN NAMUN MENJADI BEBAN PEMELIHARAAN)	2.013.062.538
3	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT NAMUN MENJADI BEBAN PEMELIHARAAN)	16.650.000
4	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN PEMELIHARAAN NAMUN MENJADI BEBAN PERSEDIAAN)	(1.102.042.483)
JUMLAH		**928.459.191**

D.5.2 Beban Pemeliharaan untuk Kegiatan Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Jumlah Beban Pemeliharaan dalam kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 terdapat pada akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.900.800,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan dalam kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat pada akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.900.800,00. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja Barang dan Jasa (basis kas).

Beban Perjalanan Dinas Rp325.360.093.568

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp325.360.093.568,00 dan Rp184.569.638.436,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 94

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Perjalanan Biasa	210.185.596.696	122.746.696.144	71,24
Beban Perjalanan Tetap	2.319.540.996	3.449.448.322	(32,76)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.887.782.682	6.833.464.717	15,43
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.460.957.214	30.425.618.488	118,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38.120.711.427	16.096.005.240	136,83
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	385.504.553	258.591.498	49,08
Subtotal Akun Normal	**325.360.093.568**	**179.809.824.409**	80,95
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	4.759.814.027	(100,00)
Subtotal Akun Khusus COVID	**-**	**4.759.814.027**	(100,00)
TOTAL	**325.360.093.568**	**184.569.638.436**	**76,28**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp325.360.093.568,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp325.677.187.892,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Perjalanan Dinas (basis akrual) dengan Belanja Perjalanan Dinas (basis kas) sebesar Rp317.094.324,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 95

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
524111	Beban Perjalanan Biasa	210.384.081.020	210.185.596.696	(198.484.324)
524112	Beban Perjalanan Tetap	2.319.540.996	2.319.540.996	-
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.887.782.682	7.887.782.682	-
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.558.257.214	66.460.957.214	(97.300.000)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38.142.021.427	38.120.711.427	(21.310.000)
524211	Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	385.504.553	385.504.553	-
BEBAN PERJALANAN DINAS		**325.677.187.892**	**325.360.093.568**	**(317.094.324)**

Perbedaan pencatatan Beban Perjalanan Dinas menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Biasa berkurang sebesar Rp198.484.324,00 disebabkan karena:
    a. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal balik pengakuan Beban Perjalanan Biasa TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 sebesar Rp43.830.917,00.
    b. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian atas realisasi Belanja Perjalanan Biasa yang menjadi Aset Lainnya sebesar Rp130.542.403,00.
    c. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi atas kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TA 2021 yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp941.987,00.
    d. Pengurangan Beban-LO yang berasal dari jurnal koreksi pengakuan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atas kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TA 2021 sebesar Rp23.169.017,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota berkurang sebesar Rp97.300.000,00 disebabkan karena jurnal balik pengakuan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021.
3. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berkurang sebesar Rp21.310.000,00 disebabkan karena jurnal balik pengakuan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp293.134.958.271

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp293.134.958.271,00 dan Rp414.935.627.622,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan Barang Milik Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 96

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	300.000.000	600.000.000	(50,00)
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	5.094.790.515	(100,00)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	4.438.754.250	3.070.438.276	44,56
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	1.769.286.328	192.814.144	817,61
Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	4.544.681.360	-	100,00
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	370.068.000	185.034.000	100,00
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	44.135.355.147	17.005.056.390	159,54
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	237.576.813.186	388.787.494.297	(38,89)
TOTAL	**293.134.958.271**	**414.935.627.622**	**(29,35)**

Penjelasan hubungan mutasi kurang Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dengan beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 97

Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL	PEMBELIAN	SALDO AKHIR	PENYERAHAN	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN		SELISIH
						AKUN	SALDO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	(8)	(9) = (6) - (8)
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	26.118.716.216	-	24.227.675.966	1.891.040.250	593122	4.438.754.250	(2.547.714.000)
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.188.832.320	-	2.773.659.026	(1.584.826.706)	593124	1.769.286.328	(3.354.113.034)
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	16.139.868.038	-	11.595.186.678	4.544.681.360	593125	4.544.681.360	-
117126	Aset Tetap Lainnya Untuk di Serahkan Kepada Masyarakat	816.890.000	-	446.822.000	370.068.000	593126	370.068.000	-
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan Kepada Masyarakat	265.948.023.662	-	222.194.366.315	43.753.657.347	593127	44.135.355.147	(381.697.800)
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/ diserahkan Ke Masyarakat	71.946.226.000	-	6.753.780.000	65.192.446.000	593128	237.576.813.186	(172.384.367.186)
117129	Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat-dalam proses	67.670.350	-	67.670.350	-		-	-
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai. Meterai dan Leges	-	810.000	-	810.000		-	810.000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	505.348.000	-	505.348.000		-	505.348.000
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	-	-	-	-	526123	300.000.000	(300.000.000)
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	-	2.547.714.000	-	2.547.714.000		-	2.547.714.000
526311	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	168.793.857.186	-	168.793.857.186		-	168.793.857.186
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.005.295.895	-	1.005.295.895		-	1.005.295.895
JUMLAH		**382.226.226.586**	**172.853.025.081**	**268.059.160.335**	**287.020.091.332**		**293.134.958.271**	**(6.114.866.939)**

Saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2020 (saldo awal) sebesar Rp382.226.226.586,00 dan saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2021 (saldo akhir) sebesar Rp268.059.160.335,00. Selama TA 2021 terdapat realisasi Belanja Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp172.853.025.081,00 sehingga perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp287.020.091.332,00. Perbedaan sebesar Rp6.114.866.939,00 antara perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp287.020.091.332,00 dengan Beban Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp293.134.958.271,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 98

Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI HIBAH KELUAR JENIS PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI (117111) PADA SATKER TP DUKCAPIL YANG DICATAT SEBAGAI BEBAN BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA (526311)	4.689.933.973
2	BEBAN GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA DALAM BENTUK UANG (526123) MERUPAKAN PENGAKUAN BEBAN ATAS BELANJA BARANG YANG DIBAYAR DIMUKA UNTUK PEKERJAAN PADA TA 2019 UNIT ESELON I DITJEN BINA PEMDES YANG TELAH LENGKAP DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABANNYA. TRANSAKSI TERSEBUT TIDAK DICATAT SEBAGAI PERSEDIAAN KARENA PENYERAHAN DILAKUKAN DALAM BENTUK UANG	300.000.000
3	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLAS KELUAR	(1.832.190.000)
4	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI REKLAS MASUK	1.832.190.000
5	MUTASI KURANG PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI TRANSFER KELUAR	(240.737.027.931)
6	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI TRANSFER MASUK	240.737.027.931
7	MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN YANG BERASAL DARI HIBAH MASUK (HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG)	1.295.755.166
8	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN PERSEDIAAN NAMUN MENJADI BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)	381.697.800
9	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT NAMUN MENJADI BEBAN PERSEDIAAN)	(535.870.000)
10	KESALAHAN PENGANGGARAN DIANTARA AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN (REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN YANG SEHARUSNYA MENJADI BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT NAMUN MENJADI BEBAN PEMELIHARAAN)	(16.650.000)
JUMLAH		**6.114.866.939**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp258.026.149.601

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp258.026.149.601,00 dan Rp237.994.911.632,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 99

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	140.643.892.537	123.013.315.186	14,33
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.074.172.626	76.539.674.168	2,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	6.937.020.541	8.637.241.047	(19,68)
Beban Penyusutan Irigasi	4.756.139.984	4.765.453.622	(0,20)
Beban Penyusutan Jaringan	4.548.361.937	4.263.797.229	6,67
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	148.966.311	201.068.143	(25,91)
Beban Amortisasi Software	22.324.623.030	20.235.814.436	10,32
Beban Amortisasi Lisensi	246.527.398	108.083.868	128,09
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	96.525.923	32.197.844	199,79
Beban Penyusutan Aset Tetap yg Tidak Digunakan dlm Operasional Pemerintah	249.919.314	198.266.089	26,05
TOTAL	**258.026.149.601**	**237.994.911.632**	**8,42**

Penjelasan hubungan penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan sebagai berikut:

Tabel 100

Penjelasan hubungan penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2020	PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2021	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.960.511.708.233	2.837.946.953.472	122.564.754.761	140.643.892.537	(18.079.137.776)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	330.630.295.794	247.327.872.840	83.302.422.954	78.074.172.626	5.228.250.328
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	37.019.376.292	29.813.536.594	7.205.839.698	6.937.020.541	268.819.157
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	18.955.029.858	14.198.750.166	4.756.279.692	4.756.139.984	139.708
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	57.974.702.510	53.907.257.733	4.067.444.777	4.548.361.937	(480.917.160)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	94.523.461.278	138.115.878.628	(43.592.417.350)	148.966.311	(43.741.383.661)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	77.154.818.370	93.828.953.712	(16.674.135.342)	249.919.314	(16.924.054.656)
JUMLAH		**3.576.769.392.335**	**3.415.139.203.145**	**161.630.189.190**	**235.358.473.250**	**(73.728.284.060)**

Terdapat perbedaan sebesar Rp73.728.284.060,00 antara penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 101

Penjelasan selisih penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA PENGHAPUSAN	45.082.509.937
2	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN)	26.815.815.709
3	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA PENGHAPUSAN BMN YANG DIHENTIKAN (SEMESTER II DOKUMEN SEMESTER I)	412.543.050
4	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA HIBAH KELUAR	4.442.087.550
5	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA HIBAH KELUAR (SEMESTER II DOKUMEN SEMESTER I)	312.800.000
6	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA HIBAH KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN)	2.731.974.000
7	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA HIBAH KELUAR BMN YANG DIHENTIKAN (SEMESTER II DOKUMEN SEMESTER II)	299.700.000
8	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS	208.611.314
9	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS	(629.786.907)
10	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA KOREKSI PENYUSUTAN KARENA 225	443.598.796
11	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA KOREKSI PENYUSUTAN KARENA 225	(266.034.265)
12	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA REKLASIFIKASI KELUAR	4.516.972.042
13	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA REKLASIFIKASI MASUK	(11.962.521.120)
14	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSFER KELUAR	107.331.228.045
15	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSFER KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN)	18.104.722.014
16	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSFER MASUK	(125.435.950.059)
17	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSAKSI NORMALISASI BMN	13.488.962.974
18	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSAKSI NORMALISASI BMN (BMN YANG DIHENTIKAN)	182.016.531
19	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI	(12.496.313.477)
20	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN YANG DISEBABKAN ADANYA KOREKSI PENCATATAN	155.037.788
21	JURNAL MANUAL SAIBA YANG DIBENTUK SEBAGAI KOREKSI ATAS ELIMINASI PENYUSUTAN SEMESTER I TAHUN 2021 PADA SAAT DILAKUKAN KOREKSI PENCATATAN GEDUNG DAN BANGUNAN DIMANA JURNAL KIRIM APLIKASI SIMAK BMN MENAMBAH EKUITAS, SEHARUSNYA MENAMBAH BEBAN PENYUSUTAN	(9.689.862)
JUMLAH		**73.728.284.060**

Penjelasan hubungan amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi sebagai berikut:

Tabel 102

Penjelasan hubungan amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2020	AMORTISASI PERIODE BERJALAN	BEBAN AMORTISASI	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	716.998.320.312	693.646.941.121	23.351.379.191	22.324.623.030	1.026.756.161
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	377.064.148	3.440.210.620	(3.063.146.472)	246.527.398	(3.309.673.870)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	29.241.582.614	92.722.355.540	(63.480.772.926)	96.525.923	(63.577.298.849)
JUMLAH		**746.616.967.074**	**789.809.507.281**	**(43.192.540.207)**	**22.667.676.351**	**(65.860.216.558)**

Terdapat perbedaan sebesar Rp65.860.216.558,00 antara amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 103

Penjelasan selisih amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN ADANYA PENGHAPUSAN	97.790.000
2	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN ADANYA PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN)	67.646.668.207
3	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN ADANYA KOREKSI SALDO AWAL	(12.312.575)
4	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSAKSI NORMALISASI BMN	1.182.690.026
5	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN ADANYA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI	(3.054.619.100)
6	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSFER KELUAR	6.051.052.504
7	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSFER KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN)	10.264.426.473
8	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI YANG DISEBABKAN ADANYA TRANSFER MASUK	(16.315.478.977)
JUMLAH		**65.860.216.558**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp2.551.868.507

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.551.868.507,00 dan Rp10.969.992.920,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 104

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Beban Penyisihan Piutang PNBP	2.545.918.500	2.024.677.083	25,74
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	20.338.094	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR	2.975.941	8.924.957.118	(99,97)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-TP/TGR	2.974.066	20.625	14.319,71
TOTAL	**2.551.868.507**	**10.969.992.920**	**(76,74)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang timbul sebagai akibat pembentukan cadangan piutang agar piutang dapat disajikan sesuai dengan tingkat ketertagihannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.591.729.148,00, dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.619.214.839,00 atau terdapat perubahan sebesar Rp2.027.485.691,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.551.868.507, sehingga terdapat perbedaan antara perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp4.579.354.198,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105

Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2021 dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH					BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH			
AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 31 DESEMBER 2021)	SALDO AWAL (PER 31 DESEMBER 2020)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG TA 2021	AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (S.D 31 DES 2021)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG DENGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)-(8)
116211	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PNBP	6.242.681.574	8.243.481.197	(2.000.799.623)	594211	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PNBP	2.545.918.500	(4.546.718.123)
116212	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG LAINNYA	69.868	32.705.943	(32.636.075)	594212	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	-	(32.636.075)
1164	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	18.345.983.015	18.343.007.074	2.975.941	594411	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/GANTI RUGI	2.975.941	-
156311	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI	2.994.691	20.625	2.974.066	594931	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI	2.974.066	-
JUMLAH		**24.591.729.148**	**26.619.214.839**	**(2.027.485.691)**	**JUMLAH**		**2.551.868.507**	**(4.579.354.198)**

Terdapat perbedaan perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan beban peyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp4.579.354.198,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 106

Penjelasan selisih perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan beban peyisihan piutang tak tertagih

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	PEMBENTUKAN JURNAL PENYESUAIAN DENGAN MENDEBET AKUN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA DAN MENGKREDIT AKUN KOREKSI LAINNYA SEBAGAI TINDAK LANJUT S-27 UNTUK PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERSALDO MINUS	32.636.075
2	PEMBENTUKAN JURNAL PENYESUAIAN DENGAN MENDEBET AKUN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PNBP DAN MENGKREDIT AKUN KOREKSI LAINNYA SEBAGAI TINDAK LANJUT S-27 UNTUK PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERSALDO MINUS	7.520.833
3	PEMBENTUKAN JURNAL PENYESUAIAN DENGAN MENDEBET AKUN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PNBP DAN MENGKREDIT AKUN KOREKSI LAINNYA SEBAGAI KOREKSI ATAS KESALAHAN PENCATATAN YANG DICATAT LEBIH BESAR	4.539.197.290
JUMLAH		**4.579.354.198**

Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp14.847.006.392

D.10 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 107

Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK/TURUN (%)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	222.555.998	392.752.213	(43,33)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.454.395.544	550.372.389	164,26
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	1.222.676.464	11.000.000	11.015,24
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	62.756.907	242.537.442	(74,12)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	13.073.323.031	34.870.143.941	(62,51)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	492.166.805	1.880.280.982	(73,82)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.683.800	1.909.306.741	(99,91)
Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	**16.529.558.549**	**39.856.393.708**	(58,53)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	1.280.065.156	7.425.981.390	(82,76)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	120.287.300	4.421.982.754	(97,28)
Beban Persediaan Rusak/Usang	282.199.701	-	100,00
Total Beban dari Kegiatan Non Operasional	**1.682.552.157**	**11.847.964.144**	(85,80)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**14.847.006.392**	**28.008.429.564**	**(46,99)**

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp16.529.558.549,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp128.414.847.075,00, diantaranya sebesar Rp22.062.195.245,00 berasal dari kegiatan non operasional. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kegiatan non operasional (basis kas) sebesar Rp5.532.636.696,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 108
Selisih realisasi pendapatan dari kegiatan non operasional antara basis kas dan basis akrual

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	222.555.998	222.555.998	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.454.395.544	1.454.395.544	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	32.674.998	1.222.676.464	1.190.001.466
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	142.182.781	62.756.907	(79.425.874)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	19.663.304.119	13.073.323.031	(6.589.981.088)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	547.081.805	492.166.805	(54.915.000)
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	1.683.800	1.683.800
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**22.062.195.245**	**16.529.558.549**	**(5.532.636.696)**

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi pendapatan dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bertambah sebesar Rp1.190.001.446,00 disebabkan karena:

    a. Jurnal korolari atas penyetoran pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain adalah Diterima dari Entitas Lain (313121) pada Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (152111). Pengakuan pendapatan-LO atas akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilakukan pada saat timbulnya pengakuan piutang. Dengan demikian pada saat terjadi penyetoran pendapatan ke kas negara sebesar Rp32.674.998,00 hanya dicatat sebagai pendapatan LRA.

b. Penambahan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal pengakuan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp1.222.676.464,00.

2. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL berkurang sebesar Rp79.425.874,00 disebabkan karena jurnal pada saat penyetoran ke kas negara oleh Pihak Ketiga atas pengembalian belanja pegawai TAYL yang diakui sebagai Piutang Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2020.

3. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berkurang sebesar Rp6.589.981.088,00 disebabkan karena:

   a. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal pada saat penyetoran ke kas negara oleh Pihak Ketiga atas pengembalian belanja barang TAYL yang diakui sebagai Piutang Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.407.441.126,00.

   b. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal pada saat penyetoran kas ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran atas pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp182.539.962,00.

4. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Modal TA yang Lalu berkurang sebesar Rp54.915.000,00 disebabkan karena:

   a. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal pada saat penyetoran ke kas negara oleh Pihak Ketiga atas pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp29.665.000,00. Pengembalian belanja modal tersebut telah diakui sebagai Piutang Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2020 dan nilai aset telah dilakukan koreksi sebesar nilai pengembalian belanja modal pada tahun 2021.

   b. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari jurnal penyesuaian koreksi nilai aset tetap atas pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp25.250.000,00.

5. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan bertambah sebesar Rp1.683.800,00 disebabkan karena:

   a. Penambahan pendapatan LO yang berasal dari jurnal koreksi tambah persediaan pada akun Persediaan Lainnya sebesar Rp1.400.000,00.

b. Penambahan pendapatan LO yang berasal dari jurnal koreksi tambah persediaan pada akun Barang Konsumsi sebesar Rp283.800.

Jumlah Beban dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.682.552.157,00, sedangkan LRA tidak menyajikan kegiatan non operasional, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban dari kegiatan non operasional antara basis kas dan basis akrual dengan rincian akun sebagai berikut:

Tabel 109

Selisih realisasi beban dari kegiatan non operasional

KODE AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	1.280.065.156	1.280.065.156
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	120.287.300	120.287.300
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	282.199.701	282.199.701
TOTAL		**-**	**1.682.552.157**	**1.682.552.157**

Penjelasan perbedaan pencatatan beban dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp1.280.065.156,00 berasal dari nilai buku atas aset tetap dan aset lainnya yang dikeluarkan dari neraca karena dihapuskan atau hibah kepada Pemda.
2. Beban-LO untuk akun Beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp120.287.300,00 merupakan koreksi kurang atas kuantitas persediaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun lalu.
3. Kerugian persediaan rusak/usang sebesar Rp282.199.701,00 berasal dari nilai persediaan yang dikeluarkan dari neraca karena rusak/usang berdasarkan hasil opname fisik.

Terhadap transaksi tersebut tidak terjadi arus kas keluar atau masuk sehingga realisasi belanja tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.11 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 nihil.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp15.409.886.743.539

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp15.409.886.743.539,00 dan Rp15.300.741.211.932,00.

Defisit LO
Rp2.980.835.534.697

E.2 Surplus (Defisit) - LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp2.980.835.534.697,00 dan Rp2.834.062.129.374,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp3.426.500

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.426.500,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 masing sebesar Rp3.426.500,00 terdapat pada satker IPDN Kampus Jakarta (352593) yang berasal dari jurnal manual pada Aplikasi SAIBA yang dibentuk terhadap transaksi penambahan persediaan yang berasal dari penambahan input hasil opname fisik (PO2) yang merupakan koreksi terhadap kesalahan input persediaan pada TAYL.

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
(Rp7.502.438.457)

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp7.502.438.457,00) dan (Rp10.834.469.324,00). Penjelasan Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 110

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/AsetTetap/Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	REKLAS KELUAR PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp12.206.007.000,00 DALAM RANGKA KOREKSI JENIS ASET MENJADI PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp10.254.860.189,00 DAN LISENSI SEBESAR Rp1.951.146.811,00 PADA SATKER SEKRETARIAT JENDERAL (403200).	(12.206.007.000)
2	REKLAS MASUK PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp10.254.860.189,00 DAN LISENSI SEBESAR Rp1.951.146.811,00 DALAM RANGKA KOREKSI JENIS ASET PADA SATKER SEKRETARIAT JENDERAL (403200).	12.206.007.000
3	REKLAS KELUAR GEDUNG DAN BANGUNAN ASRAMA SEBESAR Rp8.120.896.000,00 KARENA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN ASRAMA SEBESAR Rp7.654.775.653,00 DAN PERALATAN DAN MESIN STATIONARY GENERATING SET SEBESAR Rp466.120.347,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS PAPUA (683091).	(8.120.896.000)
4	REKLAS MASUK GEDUNG DAN BANGUNAN ASRAMA SEBESAR Rp7.654.775.653,00 DAN PERALATAN DAN MESIN STATIONARY GENERATING SET SEBESAR Rp466.120.347,00 YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI GEDUNG DAN BANGUNAN ASRAMA SEBESAR Rp8.120.896.000,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS PAPUA (683091) AKIBAT ADANYA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP.	8.120.896.000
5	REKLAS KELUAR AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp523.928.772,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS PAPUA (683091) ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp8.120.896.000,00 KARENA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN ASRAMA SEBESAR Rp7.654.775.653,00 DAN PERALATAN DAN MESIN STATIONARY GENERATING SET SEBESAR Rp466.120.347,00.	523.928.772
6	REKLAS MASUK AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp995.120.835,00 DAN AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp466.120.347,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS PAPUA (683091) ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN ASRAMA SEBESAR Rp7.654.775.653,00 DAN PERALATAN DAN MESIN STATIONARY GENERATING SET SEBESAR Rp466.120.347,00 YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI GEDUNG DAN BANGUNAN ASRAMA SEBESAR Rp8.120.896.000,00 AKIBAT ADANYA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP.	(1.461.241.182)
7	REKLAS KELUAR GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HASIL PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP (105) PADA SATKER IPDN KAMPUS PAPUA (683091) YANG TERCATAT DALAM 1 NUP, NAMUN SEHARUSNYA TERPISAH MENJADI 2 NUP.	(732.312.000)
8	REKLAS MASUK GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HASIL PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP (105) PADA SATKER IPDN KAMPUS PAPUA (683091) YANG TELAH TERPISAH MENJADI 2 NUP.	732.312.000
9	REKLAS KELUAR PERALATAN DAN MESIN BERUPA CCTV SEBESAR Rp96.327.000,00 PADA SATKER DKPP (483005) KARENA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI PERALATAN DAN MESIN BERUPA HARDISK SEBESAR Rp6.600.000,00 DAN SWITCH SEBESAR Rp89.727.000,00.	(96.327.000)
10	REKLAS MASUK PERALATAN DAN MESIN BERUPA HARDISK SEBESAR Rp6.600.000,00 DAN SWITCH SEBESAR Rp89.727.000,00 PADA SATKER DKPP (483005) YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI PERALATAN DAN MESIN BERUPA CCTV SEBESAR Rp96.327.000,00 AKIBAT ADANYA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP.	96.327.000
11	REKLAS KELUAR AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp4.816.350,00 PADA SATKER DKPP (483005) ATAS PERALATAN DAN MESIN BERUPA CCTV SEBESAR (Rp96.327.000,00) YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI PERALATAN DAN MESIN BERUPA HARDISK SEBESAR Rp6.600.000,00 DAN SWITCH SEBESAR Rp89.727.000,00 AKIBAT ADANYA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP.	4.816.350
12	REKLAS MASUK AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR (Rp12.040.875,00) PADA SATKER DKPP (483005) ATAS PERALATAN DAN MESIN BERUPA HARDISK SEBESAR Rp6.600.000,00 DAN SWITCH SEBESAR Rp89.727.000,00 PADA SATKER DKPP (483005) YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI PERALATAN DAN MESIN BERUPA CCTV SEBESAR (Rp96.327.000,00) AKIBAT ADANYA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP.	(12.040.875)
13	REKLAS KELUAR GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HASIL PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP (105) SEBESAR Rp12.326.499.097,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR (683070) MENJADI PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp554.937.768,00, GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp10.151.683.204,00, IRIGASI SEBESAR Rp992.131.828,00, DAN JARINGAN SEBESAR Rp572.316.918,00.	(12.326.499.097)
14	REKLAS MASUK PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp554.937.768,00, GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp10.151.683.204,00, IRIGASI SEBESAR Rp992.131.828,00, DAN JARINGAN SEBESAR Rp572.316.918,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR (683070) YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HASIL PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP (105) SEBESAR Rp12.326.499.097,00	12.271.069.718
15	REKLAS KELUAR GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.917.772.000,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS NTB (683084) KARENA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.359.198.820,00 DAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp558.573.180,00.	(15.917.772.000)
16	REKLAS MASUK GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.359.198.820,00 DAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp558.573.180,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS NTB (683084) YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.917.772.000,00 YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.359.198.820,00 DAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp558.573.180,00.	15.917.772.000
17	REKLAS KELUAR AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp1.026.953.034,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS NTB (683084) KARENA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.917.772.000,00 YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.359.198.820,00 DAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp558.573.180,00.	1.026.953.034
18	REKLAS MASUK AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp1.996.695.847,00 DAN AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp517.647.240,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS NTB (683084) KARENA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.917.772.000,00 YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp15.359.198.820,00 DAN PERALATAN DAN MESIN SEBESAR Rp558.573.180,00.	(2.514.343.087)
19	REKLAS KELUAR GEDUNG PADA SATKER IPDN JATINANGOR (448302) SEBESAR Rp24.322.208.000,00 KARENA KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.262.208.000,00 DAN ASET LAINNYA SEBESAR RP60.000.000,00.	(24.322.208.000)
20	REKLAS MASUK GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR (448302) SEBESAR Rp24.262.208.000,00 YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.322.208.000,00 YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.262.208.000,00 DAN ASET LAINNYA SEBESAR Rp60.000.000,00.	24.262.208.000
21	REKLAS MASUK ASET LAINNYA PADA SATKER IPDN JATINANGOR (448302) SEBESAR Rp60.000.000,00 YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.322.208.000,00 YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.262.208.000,00 DAN ASET LAINNYA SEBESAR Rp60.000.000,00.	60.000.000
22	REKLAS KELUAR AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR (448302) ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN YANG MENGALAMI KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.262.208.000,00 DAN ASET LAINNYA SEBESAR Rp60.000.000,00.	2.952.373.386
23	REKLAS MASUK AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SATKER IPDN JATINANGOR (448302) ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.262.208.000,00 YANG SEBELUMNYA BERASAL DARI KESALAHAN KODEFIKASI ASET TETAP ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.322.208.000,00 YANG SEHARUSNYA TERBAGI MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp24.262.208.000,00 DAN ASET LAINNYA SEBESAR Rp60.000.000,00.	(7.955.442.026)
24	REKLAS KELUAR PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT - DALAM PROSES (117129) PADA SATKER TP DITJEN BINA ADWIL YAITU SATKER BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN (160552) DAN SATKER BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG (419079) SEBESAR Rp2.547.714,000,00 KARENA KESALAHAN PENGGUNAAN AKUN.	(2.547.714.000)
25	REKLAS MASUK TANAH BANGUNAN UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA (117122) PADA SATKER TP DITJEN BINA ADWIL YAITU SATKER BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN (160552) DAN SATKER BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG (419079) SEBESAR Rp2.547.714,000,00 AKIBAT DARI KESALAHAN PENGGUNAAN AKUN.	2.547.714.000
26	REKLAS KELUAR GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp141.435.000,00 DAN AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp8.900.500,00 PADA SATKER SETJEN (403200) AKIBAT DARI PERUBAHAN GOLONGAN RUMAH NEGARA DARI GOL I TIPE A PERMANEN (NUP135) MENJADI GOL II TIPE D PERMANEN (NUP 1) YANG BERADA DI SEMPLAK BOGOR.	(105.534.500)
27	REKLAS MASUK GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp141.435.000,00 DAN AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp19.453.950,00 PADA SATKER SETJEN (403200) AKIBAT DARI PERUBAHAN GOLONGAN RUMAH NEGARA DARI GOL I TIPE A PERMANEN (NUP135) MENJADI GOL II TIPE D PERMANEN (NUP 1) YANG BERADA DI SEMPLAK BOGOR.	94.981.050
28	REKLAS KELUAR GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp1.460.000,00 PADA SATKER IPDN KAMPUS JATINANGOR (448302) AKIBAT KOREKSI ATAS KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN	(1.460.000)
29	REKLAS KELUAR SOFTWARE SEBESAR Rp298.595.500,00 PADA SATKER DITJEN BINA ADWIL YANG TERCATAT DALAM 2 NUP YAITU NUP 3 SEBESAR Rp99.027.500,00 DAN NUP 9 SEBESAR Rp199.568.000,00, NAMUN SEHARUSNYA TERCATAT MENJADI 1 NUP SEBESAR Rp298.595.500,00	(298.595.500)
30	REKLAS KELUAR AKUMULASI AMORTASASI SOFTWARE SEBESAR Rp298.595.500,00 PADA SATKER DITJEN BINA ADWIL YANG TERCATAT DALAM 2 NUP YAITU NUP 3 DAN NUP 9, NAMUN SEHARUSNYA TERCATAT MENJADI 1 NUP	298.595.500
31	REKLAS MASUK SOFTWARE SEBESAR Rp298.595.500,00 PADA SATKER DITJEN BINA ADWIL YANG SEBELUMNYA TERCATAT DALAM 2 NUP YAITU NUP 3 SEBESAR Rp99.027.500,00 DAN NUP 9 SEBESAR Rp199.568.000,00, MENJADI 1 NUP YAITU PADA NUP 21 SESESAR Rp298.595.500,00	298.595.500
32	REKLAS MASUK AKUMULASI AMORTASASI SOFTWARE SEBESAR Rp298.595.500,00 PADA SATKER DITJEN BINA ADWIL YANG TERCATAT DALAM 2 NUP YAITU NUP 3 DAN NUP 9, MENJADI 1 NUP YAITU PADA NUP 21	(298.595.500)
	JUMLAH	**(7.502.438.457)**

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp7.502.438.457,00) terdiri dari:

1. Perbedaan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan serta Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.445.549.078,00 pada satker Setjen (403200), IPDN Kampus Papua (683091), IPDN Kampus NTB (683084), DKPP (483005), dan IPDN Kampus Jatinangor (448302).
2. Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan pada satker IPDN Kampus Kalbar (683070) diantaranya terdapat reklasifikasi masuk yang menjadi Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.440.629,00 dan Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.988.750,00.
3. Reklasifikasi keluar Gedung dan Bangunan pada satker IPDN Kampus Jatinangor (448302) akibat adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.460.000,00.

Rincian pada **Lampiran XXXIX** (Rincian Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya).

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp72.280.893.102,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
(Rp2.651.553.307)

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp2.651.553.307,00) dan Rp211.462.943.482,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp729.303.289,00) dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar (Rp1.922.250.018,00). Penjelasan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

E.3.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis barang milik negara, koreksi perhitungan akumulasi

penyusutan, dan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan adanya pengembalian realisasi belanja modal.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp729.303.289,00). Penjelasan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 111

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2021

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN KARENA KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS PADA SATKER SETJEN, DAN DITJEN BINA ADWIL	(159.014.127)
2	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN KARENA KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS PADA SATKER SETJEN DAN DITJEN BINA	27.056.363
3	MUTASI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS PADA SATKER SETJEN, IPDN JATINANGOR, DAN IPDN KALBAR (NUP 9)	(4.740.681.118)
4	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS PADA SATKER SETJEN, IPDN JATINANGOR, DAN IPDN KALBAR (NUP 9)	179.029.951
5	MUTASI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA ADANYA KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS PADA SATKER IPDN KALBAR (NUP 1)	78.990.478
6	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS PADA SATKER IPDN KALBAR (NUP 1)	(2.369.714)
7	MUTASI TAMBAH JALAN DAN JEMBATAN KARENA KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS PADA SATKER IPDN KALBAR	4.182.781.285
8	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN KARENA KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS PADA SATKER IPDN KALBAR	(627.417.193)
9	MUTASI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KOREKSI PENCATATAN PADA SATKER IPDN SULUT	(968.986.179)
10	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KOREKSI PENCATATAN PADA SATKER IPDN SULUT	155.037.788
11	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN KARENA ADANYA KOREKSI PENYUSUTAN KARENA 225 PADA SATKER IPDN KAMPUS PAPUA	443.598.796
12	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR Rp265.894.557 SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI SEBESAR Rp139.708 KARENA ADANYA KOREKSI PENYUSUTAN KARENA 225 PADA SATKER BPSDM	(266.034.265)
13	MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN ATAS TRANSAKSI NORMALISASI BMN ADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA, IPDN KAMPUS SULUT, IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN, IPDN KAMPUS SUMBAR, IPDN KAMPUS KALBAR, DITJEN DUKCAPIL, BPP, PPSDM REG BANDUNG, PPSDM REGIONAL MAKASSAR, DAN BPSDM.	(3.209.817.570)
14	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN KARENA TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA, IPDN KAMPUS SULUT, IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN, IPDN KAMPUS SUMBAR, IPDN KAMPUS KALBAR, DITJEN DUKCAPIL, BPP, PPSDM REG BANDUNG, PPSDM REGIONAL MAKASSAR DAN BPSDM.	2.921.764.005
15	MUTASI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN ATAS TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER IPDN JATINANGOR, IPDN KAMPUS SUMBAR, DAN DITJEN BINA BANGDA	(44.926.281.000)
16	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER IPDN JATINANGOR, IPDN KAMPUS SUMBAR, IPDN KAMPUS PAPUA, DAN DITJEN BINA BANGDA	5.484.997.599
17	MUTASI KURANG JALAN DAN JEMBATAN ATAS TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA	(516.628.000)
18	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN KARENA TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA	431.627.240
19	MUTASI KURANG JARINGAN ATAS TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER IPDN JATINANGOR DAN IPDN KAMPUS SULUT	(5.220.695.354)
20	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN KARENA TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER IPDN JATINANGOR DAN IPDN KAMPUS SULUT	4.650.599.130
21	MUTASI KURANG ASET TETAP LAINNYA ATAS TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER PPSDM REGIONAL BANDUNG DAN PPSDM REGIONAL MAKASSAR	(47.520.000)
22	MUTASI TAMBAH PERALATAN DAN MESIN KARENA ADANYA PEROLEHAN HASIL TIDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA, DKPP, IPDN KAMPUS SULUT, IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN, IPDN KAMPUS SUMBAR, IPDN KAMPUS KALBAR, IPDN KAMPUS NTB, DITJEN DUKCAPIL, BPP, PPSDM REG BANDUNG, PPSDM REGIONAL MAKASSAR, DAN BPSDM	3.307.051.920
23	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN KARENA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA, DKPP, IPDN KAMPUS SULUT, IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN, IPDN KAMPUS SUMBAR, IPDN KAMPUS KALBAR, IPDN KAMPUS NTB, DITJEN DUKCAPIL, BPP, PPSDM REG BANDUNG, PPSDM REGIONAL MAKASSAR, DAN BPSDM	(2.938.694.155)
24	MUTASI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA ADANYA PEROLEHAN HASIL TIDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER IPDN JATINANGOR, IPDN KAMPUS SUMBAR, DAN DITJEN BINA BANGDA	44.926.281.000
25	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER IPDN JATINANGOR, IPDN KAMPUS SUMBAR, DAN DITJEN BINA BANGDA	(4.928.531.202)
26	MUTASI TAMBAH JALAN DAN JEMBATAN KARENA ADANYA PEROLEHAN HASIL TIDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA	516.628.000
27	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN KARENA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER IPDN KAMPUS JAKARTA	(516.628.000)
28	MUTASI TAMBAH JARINGAN KARENA ADANYA PEROLEHAN HASIL TIDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER IPDN JATINANGOR DAN IPDN KAMPUS SULUT	5.220.695.354
29	MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN KARENA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER IPDN JATINANGOR DAN IPDN KAMPUS SULUT	(4.169.681.970)
30	MUTASI TAMBAH ASET TETAP LAINNYA KARENA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI DITJEN BINA PEMDES DAN PPSDM REGIONAL BANDUNG	47.520.450
31	KOREKSI NILAI KDP PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR	(56.817.939)
32	MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER IPDN JATINANGOR YANG BERASAL DARI KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS KARENA TERDAPAT PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAYL	(25.250.000)
33	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER IPDN JATINANGOR YANG BERASAL DARI KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS KARENA TERDAPAT PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAYL	2.525.000
34	JURNAL MANUAL SAIBA YANG DIBENTUK PADA SATKER IPDN JATINANGOR KARENA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAB, YAITU PENERIMAAN KEMBALI BELANJA MODAL TAYL (D) DAN KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI (K)	25.250.000
35	MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR YANG BERASAL DARI KOREKSI PENCATATAN NILAI /KUANTITAS KARENA TERDAPAT PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN BERJALAN	(9.997.900)
36	JURNAL MANUAL SAIBA YANG DIBENTUK PADA SATKER IPDN KAMPUS KALBAR KARENA PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAB, YAITU PERALATAN DAN MESIN YANG BELUM DIREGISTER (D) DAN KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI (K)	9.997.900
37	JURNAL MAUAL SAIBA YANG DIBENTUK PADA SATKER IPDN KAMPUS SULUT KARENA KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEMESTER I TAHUN 2021	(9.689.862)
	JUMLAH	**(729.303.289)**

Rincian pada **Lampiran XL** (Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi).

E.3.4.2 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis aset tak berwujud yang mempengaruhi perhitungan akumulasi amortisasi. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.922.250.018,00). Penjelasan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 112

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2021

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE KARENA KOREKSI SALDO AWAL PADA SATKER SETJEN	(12.312.575)
2	MUTASI TAMBAH SOFTWARE KARENA KOREKSI SALDO AWAL PADA SATKER SETJEN	98.500.600
3	MUTASI KURANG SOFTWARE KARENA TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER SETJEN	(3.152.766.600)
4	MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE KARENA TRANSAKSI NORMALISASI BMN PADA SATKER SETJEN	1.182.690.026
5	MUTASI KURANG ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN KARENA TRANSAKSI NORMALISASI BMN (BMN YANG DIHENTIKAN) PADA SATKER IPDN KAMPUS NTB, BPSDM, DAN PPSDM REGIONAL MAKASSAR	(277.574.850)
6	MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN KARENA TRANSAKSI NORMALISASI BMN (BMN YANG DIHENTIKAN) PADA SATKER IPDN KAMPUS NTB, BPSDM, DAN PPSDM REGIONAL MAKASSAR	239.213.381
7	MUTASI TAMBAH SOFTWARE KARENA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER SETJEN	3.054.619.100
8	MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE KARENA PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI PADA SATKER SETJEN	(3.054.619.100)
JUMLAH		**(1.922.250.018)**

Rincian pada **Lampiran XLI** (Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi).

Koreksi Lain-Lain Rp1.956.603.951

E.3.5 Koreksi Lain - Lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi atas akun tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.956.603.951,00 dan

Rp9.204.597,00. Penjelasan Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 113

Koreksi Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL
1	PENYELESAIAN SALDO KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN ATAS JASA GIRO YANG BELUM DISETOR KE KAS NEGARA PADA SATKER INAKTIF UB DITJEN BINA PEMDES YAITU SATKER BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB.YAHUKIMO (259363) SEBESAR (Rp2.703,00) DAN SATKER BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.DEMAK (039452) SEBESAR (Rp35.867,00) YANG DILAKUKAN DENGAN MENYETOR KE KAS NEGARA MELALUI SIMPONI SATKER PUSAT DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA (027752) SELAKU UNIT ESELON I YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PROSES LIKUIDASI SATKER INAKTIF DK/TP/UB SEHINGGA PENDAPATAN JASA GIRO DICATAT PADA SATKER PUSAT	(38.570)
2	KOREKSI ATAS PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PADA SATKER IPDN KAMPUS JATINANGOR ATAS KESALAHAN PERHITUNGAN SEWA GEDUNG YANG MASIH HARUS DITERIMA	19.599.000
3	KOREKSI ATAS KEKURANGAN PENCATATAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SATKER IPDN KAMPUS JATINANGOR YANG BERASAL DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN PASCASARJANA TAYL	(376.622.700)
4	JURNAL PENYESUAIAN ATAS BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR PADA SAKER SETJEN PUSAT BERUPA PEMBULATAN GAJI PNS, BELANJA TUNJANGAN SUAMI/ISTRI PNS, BELANJA TUNJANGAN ANAK PNS, DAN BELANJA TUNJANGAN PPh PNS TA 2019 SERTA TA 2020 YANG DIBAYARKAN TA 2022	(6.565.927)
5	KOREKSI ATAS PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA UNTUK SEWA WASERBA A.N. CV MITRA PADA IPDN KAMPUS JATINANGOR ATAS KESALAHAN PERHITUNGAN SEWA DITERIMA DIMUKA	(4.003.750)
6	KOREKSI ATAS PENDAPATAN BUKAN PAJAK LAINYA DITERIMA DIMUKA PADA SATKER IPDN KAMPUS JATINANGOR KARENA PERHITUNGAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI BIAYA PENDIDIKAN PASCASARJANA IPDN TAYL	(2.255.118.300)
7	KOREKSI ATAS BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SATKER SEKRETARIAT JENDERAL DAN PPSDM BUKIT TINGGI SEBAGAI TINDAK LANJUT S-27 TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BEBAN PENYISIHAN PIUTANG BERSALDO MINUS	7.520.833
8	KOREKSI ATAS BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA SEBAGAI TINDAK LANJUT S-27 TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BEBAN PENYISIHAN PIUTANG BERSALDO MINUS	32.636.075
9	KOREKSI ATAS KELEBIHAN CATAT PENYISIHAN PIUTANG PADA IPDN KAMPUS JATINANGOR	4.539.197.290
JUMLAH		**1.956.603.951**

Rincian pada **Lampiran XLII** (Rincian Koreksi Lain-Lain).

Transaksi Antar Entitas Rp2.941.384.743.518

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp2.941.384.743.518,00 dan Rp2.670.289.089.124,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat pada tabel 114.

Tabel 114
Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2021

Akun	Uraian Transaksi Antar Entitas	Koreksi
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.902.149.826.596
313121	Diterima dari Entitas Lain	(128.414.847.075)
313211	Transfer Keluar	(459.284.671.877)
313221	Transfer Masuk	474.259.398.706
391131	Pengesahan Hibah Langsung	152.761.777.569
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(86.740.401)
JUMLAH		**2.941.384.743.518**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar (Rp128.414.847.075,00) sedangkan DKEL sebesar Rp2.902.149.826.596,00.

E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp474.259.398.706,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200), IPDN Kampus Jatinangor (448302), DKPP (039729), Ditjen Bina Adwil (027486), Ditjen Bina Pemdes (027753), Ditjen Bina Bangda (039729), Ditjen Otda (621892), dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (506138).

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp459.284.671.877,00) terdapat satker Sekretariat Jenderal (403200), IPDN Kampus Jakarta (352593), Ditjen Polpum (027210), Ditjen Otda (621892), Ditjen Dukcapil (634082), Ditjen Bina Keuda (662766), Balai Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (352588), BPSDM (403231), dan satker inaktif dengan jenis kewenangan DK/TP/UB yang tersebar pada empat Unit Eselon I yaitu Ditjen Bina Adwil, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Bina Bangda, dan Ditjen Otda.

Penjelasan selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara neto dan absolut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

1. Perbedaan saldo pada Neraca Percobaan antara akun Transfer Keluar sebesar (Rp459.284.671.877,00) dengan Transfer Masuk sebesar Rp474.259.398.706,00 menyebabkan terdapat selisih secara neto sebesar Rp14.974.726.829,00. Selisih tersebut berasal dari penyerahan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan milik IPDN Jatinangor yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Renovasi (ATR) oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Direktorat Prasarana Strategis (033.05.631097) sebesar Rp14.974.726.829,00. Transaksi tersebut dicatat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai transfer keluar ATR dan IPDN Jatinangor mencatat sebagai transfer masuk Gedung dan Bangunan. Menu Transfer Keluar/Transfer Masuk pada Aplikasi E-Rekon&LK menyajikan transfer keluar yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun transfer keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
2. Nilai absolut selisih transfer keluar dan transfer masuk diperoleh dari menu Transfer Masuk/Transfer Keluar Aplikasi e-Rekon&LK. Selisih absolut dihasilkan melalui pengurangan kolom TK dengan kolom TM. Selanjutnya, hasil yang negatif diabsolutkan atau hasilnya dibuat positif. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh selisih transfer keluar dan transfer masuk secara absolut sebesar Rp95.725.066.250,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
    a. Selisih secara absolut sebesar Rp32.660.178.896,00 berasal dari transfer keluar Aset Tetap Renovasi dan transfer masuk Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:
        1) selisih sebesar Rp29.949.453.658,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik IPDN Jatinangor oleh Direktorat Prasarana Strategis (Kementerian PUPR) sebesar Rp14.974.726.829,00 sehingga pada saat diserahterimakan, Direktorat Prasarana Strategis (Kementerian PUPR) mencatat transfer keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp14.974.726.829,00 dan IPDN Jatinangor mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.974.726.829,00;
        2) selisih sebesar Rp546.199.580,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik Ditjen Bina Pemdes oleh Ditjen Dukcapil sebesar Rp273.099.790,00 sehingga pada saat diserahterimakan, Ditjen Dukcapil mencatat transfer

keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp273.099.790,00 dan Ditjen Bina Pemdes mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp273.099.790,00;

3) selisih sebesar Rp414.171.944,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik Setjen oleh Ditjen Bina Keuda sebesar Rp207.085.972,00 sehingga pada saat diserahterimakan, Ditjen Bina Keuda mencatat transfer keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp207.085.972,00 dan Setjen mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp207.085.972,00;

4) selisih sebesar Rp412.815.920,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik Setjen oleh Ditjen Otda sebesar Rp206.407.960,00 sehingga pada saat diserahterimakan, Ditjen Otda mencatat transfer keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp206.407.960,00 dan Setjen mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp206.407.960,00;

5) selisih sebesar Rp1.337.537.794,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik Setjen oleh Ditjen Polpum sebesar Rp668.768.897,00 sehingga pada saat diserahterimakan, Ditjen Polpum mencatat transfer keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp668.768.897,00 dan Setjen mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp668.768.897,00.

b. Kemendagri melakukan pengalihan aset dari Satker Inaktif Bersaldo (SIB) dengan jenis kewenangan DK, TP dan UB kepada satker pusat yang berada dibawah kewenangan Unit Eselon I selaku penanggung jawab proses likuidasi satker DK, TP dan UB. Pengalihan aset tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB). Pengalihan aset tersebut dilakukan terhadap 491 satker inaktif bersaldo, namun terdapat selisih secara absolut transfer keluar dan transfer masuk pada 65 satker inaktif bersaldo dengan nilai sebesar Rp63.064.887.354,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) selisih sebesar Rp5.228.870.780,00 disebabkan adanya kesalahan dalam proses olah data pada aplikasi e-Rekon&LK atas transaksi transfer keluar persediaan satker inaktif bersaldo kepada satker pusat Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Otda dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas PU Kab. Pohuwato (310321) mencatat transfer keluar sebesar Rp2.541.268.140,00, namun Ditjen Bina Bangda mencatat transfer masuk sebesar Rp4.368.815.640,00;

b) Setda Kab. Lingga (320423) mencatat transfer keluar sebesar Rp1.827.547.500,00, namun Ditjen Bina Bangda mencatat transfer masuk sebesar nihil;

c) Sekretariat Daerah Kab. Solok (080435) mencatat transfer keluar sebesar Rp274.817.795,00, namun Ditjen Otda mencatat transfer masuk sebesar Rp786.887.890,00;

d) Dinas Kesehatan Kab.Takalar (191555) mencatat transfer keluar sebesar Rp786.887.890,00, namun Ditjen Otda mencatat transfer masuk sebesar nihil; dan

e) Ditjen Otda mencatat transfer keluar sebesar nihil dan mencatat transfer masuk sebesar Rp274.817.795,00.

Dua satker inaktif bersaldo pada Unit Eselon I Ditjen Bina Bangda, yaitu Dinas PU Kab. Pohuwato dan Setda Kab. Lingga juga memiliki selisih absolut pada transaksi transfer keluar Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan;

2) selisih sebesar Rp20.976.004.946,00 disebabkan lima satker inaktif bersaldo mencatat transfer keluar aset yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah sebesar Rp10.488.002.473,00 dan Ditjen Otda mencatat transfer masuk berupa peralatan dan mesin serta software sebesar Rp10.488.002.473,00. Pencatatan transfer masuk tersebut diikuti dengan transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) sebesar Rp10.488.002.473,00;

3) selisih sebesar Rp34.421.698.428,00 disebabkan 53 satker inaktif bersaldo mencatat transfer keluar Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp17.210.849.214,00 dan Ditjen Bina Bangda mencatat transfer masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.210.849.214,00. Pencatatan transfer masuk Peralatan dan Mesin tersebut diikuti dengan transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) sebesar Rp17.210.849.214,00;

4) selisih sebesar Rp242.874.000,00 disebabkan dua satker inaktif bersaldo, yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kab. Tapanuli Tengah (090.01.070441) serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara (090.01.340325) mencatat transfer keluar Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp121.437.000,00, dan Ditjen Bina Bangda mencatat transfer masuk berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp121.437.000,00. Kode satker inaktif tersebut tercatat sebagai satker Kementerian Perdagangan pada referensi Aplikasi E-Rekon&LK sehingga menu Transfer Keluar/Transfer Masuk menyajikan kode satker tersebut bukan sebagai satker Kemendagri (BA 010). Pencatatan transfer masuk Peralatan dan Mesin tersebut diikuti dengan transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) sebesar Rp121.437.000,00; dan

5) selisih sebesar Rp2.195.439.200,00 disebabkan dua satker inaktif bersaldo, yaiu Dinas PU Kab. Muaro Jambi (100930) dan Setda Kab. Bener Meriah (061718) mencatat transfer keluar Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp548.859.800,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar (Rp548.859.800,00), namun terdapat kesalahan pencatatan kode satker penerima, yaitu 039719 dan 039279. Transfer keluar tersebut menyebabkan selisih absolut sebesar Rp1.097.719.600,00. Ditjen Bina Bangda mencatat transfer masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp548.859.800,00 serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (Rp548.859.800,00). Transfer masuk tersebut menyebabkan selisih absolut sebesar Rp1.097.719.600,00. Dinas PU Kab. Muaro Jambi tercatat pada menu Transfer Keluar/Transfer Masuk Aplikasi e-Rekon&LK sebagai satker inaktif yang berada dibawah kewenangan Unit Eselon I Setjen (010.01.100930). Hal ini disebabkan kode satker tersebut tercatat pada referensi Aplikasi e-Rekon&LK sebagai satker ianktif yang berada dibawah kewenangan Setjen. Pencatatan transfer masuk Peralatan dan Mesin dari kedua satker inaktif tersebut diikuti dengan transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap

ke Aset Lainnya (188) sebesar Rp548.859.800,00.

Pengalihan aset dari satker inaktif bersaldo dengan jenis kewenangan DK, TP dan UB kepada satker pusat menyebabkan adanya peralihan saldo dari akun-akun pada satker inaktif ke akun-akun yang sama pada satker pusat. Berdasarkan listing transaksi pada Aplikasi e-Rekon&LK, nilai absolut selisih transfer keluar dan transfer masuk tersebut tidak menyebabkan terjadinya perbedaan penyajian saldo akun-akun terkait pada Neraca satker pusat dibandingkan dengan saldo akun-akun yang ditransfer keluar satker inaktif bersaldo. Hal ini disebabkan satker pusat telah mencatat seluruh transfer masuk atas saldo yang dialihkan. Transfer keluar satker inaktif atas aset yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah, telah dicatat satker pusat pada akun Peralatan dan Mesin, serta Software yang diikuti dengan transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188).

Rincian transaksi transfer masuk dan transfer keluar pada **Lampiran XLIII** (Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp152.761.777.569,00 yang terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200) sebesar Rp12.438.860.000,00, IPDN Kampus Jatinangor (448302) sebesar Rp296.613.726,00, IPDN Kampus Kalbar (683070) sebesar Rp381.089.403,00, Ditjen Bina Adwil (027486) sebesar Rp1.295.755.166,00, Ditjen Bina Bangda (039729) sebesar Rp53.973.366.645,00, dan pada satker Ditjen Dukcapil (634082) sebesar Rp84.376.092.629,00. Hibah langsung tersebut sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Hibah langsung yang diterima Kemendagri sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp152.761.777.569,00, diantaranya sebesar Rp702.500.000,00 merupakan hibah langsung berupa barang yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Rincian hibah langsung berupa barang tersebut disajikan pada **Lampiran XLIV** (Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa yang Diterima Kemendagri Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Posisi Sampai Dengan 31 Desember 2021).

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi

atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp86.740.401,00) terdapat pada satker Ditjen Bina Bangda (039729). Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung tersebut sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Ekuitas Akhir Rp15.362.241.991.047

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15.362.241.991.047,00 dan Rp15.409.886.743.539,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Kemendagri.

F.2 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, Kemendagri mengalokasikan anggaran pada Tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan kantor Kemendagri. Dampak dan penanganan pandemi COVID-19 merupakan kejadian penting yang wajib diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai peristiwa luar biasa. Pengungkapan dan penyajian informasi pos-pos Laporan Keuangan secara memadai dalam CaLK atas dampak pandemi COVID-19 dan transaksi belanja penanganan pandemi COVID-19 selama periode pelaporan berpedoman pada Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 (khusus) Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap realisasi PNBP, pagu dan realisasi belanja penanganan COVID-19, serta perolehan aset dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada pos-pos terkait.

2. Dalam rangka persiapan migrasi ke Aplikasi SAKTI pada Tahun Anggaran 2022, seluruh Kementerian Negara/Lembaga diinstruksikan agar menyelesaikan hingga tuntas proses likuidasi Satker Inaktif Bersaldo (SIB) menjadi Satker Inaktif Tidak Bersaldo (SITB) melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB).

   Kementerian Dalam Negeri telah berupaya untuk menyelesaikan proses likuidasi satker inaktif bersaldo dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama selama Tahun Anggaran 2021. Namun penyelesaian likuidasi satker inaktif bersaldo menghadapi kendala, antara lain adanya pandemi COVID-19 yang menghambat mobilitas Aparatur Sipil Negara, dan keterbatasan anggaran perjalan dinas untuk menyelesaikan likuidasi di daerah. Kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan serangkaian rapat yang melibatkan Unit Eselon I selaku penanggung jawab proses likuidasi dan pihak Kementerian Keuangan untuk memahami pelaksanaan kebijakan pencatatan Barang Milik Negara pada satker inaktif bersaldo yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021 sesuai dengan surat S-286/PB/2021, yaitu dialihkan ke satker pusat pada Unit Eselon I yang menjadi penanggung jawab proses likuidasi. Pengalihan aset dilakukan melalui pencatatan transfer keluar pada satker inaktif bersaldo dan pencatatan transfer masuk pada satker pusat dengan membentuk anak satker untuk setiap satker inaktif bersaldo yang berada dibawah kewenangan masing-masing Unit Eselon I.

   Pada awal tahun 2021, terdapat SIB sebanyak 580 satker di Kemendagri. Progres penyelesaian atas barang milik negara pada satker inaktif bersaldo tersebut per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian secara tuntas telah dilakukan atas 89 satker. Rincian jumlah satker dan saldo aset berupa barang milik negara yang dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun 2021 per unit Eselon I diuraikan sebagai berikut.

Tabel 115
Rekapitulasi Progress Penyelesaian Likuidasi Satker Inaktif pada Tahun 2021 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020

UNIT ESELON I	SATKER INAKTIF BERSALDO PER 31/12/2020						PENYELESAIAN ASET TA 2021					
	JUMLAH SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN/ AMORTISASI	JUMLAH SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN/ AMORTISASI
BAK	26	24.053.064.082	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-	1	603.236.942	-	-	-	-
PEMDES	359	15.161.838.439	2.873.863.365	(2.873.863.365)	-	-	11	439.475.494	80.544.000	(80.544.000)	-	-
BANGDA	113	223.504.667.050	597.752.000	(597.752.000)	20.912.820.014	(20.912.820.014)	16	31.797.054.300	-	-	3.031.674.000	(3.031.674.000)
OTDA	50	16.374.167.407	128.964.973.476	(128.964.973.476)	47.127.275.455	(47.127.275.455)	29	5.436.470.361	43.756.783.661	(43.756.783.661)	30.588.220.478	(30.588.220.478)
DUKCAPIL	32	4.753.680.973	4.361.543.550	(4.361.543.550)	-	-	32	4.753.680.973	4.361.543.550	(4.361.543.550)	-	-
JUMLAH	**580**	**283.847.417.951**	**141.033.136.840**	**(141.033.136.840)**	**68.040.095.469**	**(68.040.095.469)**	**89**	**43.029.918.070**	**48.198.871.211**	**(48.198.871.211)**	**33.619.894.478**	**(33.619.894.478)**

Rincian satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang telah dilikuidasi disajikan pada **Lampiran XLV**.

b. Sisa SIB sebanyak 491 satker (580 satker – 89 satker) belum dapat diselesaikan secara tuntas proses likuidasinya. Atas 491 satker tersebut telah dialihkan saldonya ke satker Kantor Pusat yang berada dibawah kewenangan Unit Eselon I selaku penanggung jawab proses likuidasi, sehingga 491 satker tersebut telah menjadi satker inaktif tidak bersaldo (SITB).

Dengan demikian pada tahun 2021, Kemendagri telah melakukan upaya penyelesaian atas saldo barang milik negara pada 580 satker SIB, baik melalui likuidasi secara tuntas maupun melalui pengalihan saldo barang milik negara ke satker Kantor Pusat.

Namun demikian per 31 Desember 2021 masih terdapat satu SIB di Kemendagri, yaitu Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur (kode satker 484164) di bawah unit Eselon I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Satker tersebut tercatat sebagai SIB pada Aplikasi e-Rekon&LK karena mendapatkan alokasi anggaran pada awal tahun 2021, namun pertengahan tahun direvisi menjadi nihil. Sebelum dilakukan revisi DIPA, satker telah mengajukan uang persediaan sebesar Rp12.000.000,00 dan belum melakukan penyetoran pengembalian uang persediaan ke Kas Negara sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian Neraca satker tersebut per 31 Desember 2021 menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.000.000,00 dan status satker tersebut menjadi satker inaktif bersaldo. Selanjutnya pada bulan Februari 2022, satker tersebut telah menyetor uang persediaan sebesar Rp12.000.000,00 ke Kas Negara dengan NTPN B64996QR9C4FCH5R.

Rincian jumlah satker dan saldo aset berupa barang milik negara yang dialihkan ke satker pusat per Unit Eselon I diuraikan sebagai berikut.

Tabel 116
Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat

UNIT ESELON I	PENGALIHAN ASET					
	JUMLAH SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN/ AMORTISASI
BAK	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
PEMDES	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
BANGDA	97	191.707.612.750	597.752.000	(597.752.000)	17.881.146.014	(17.881.146.014)
OTDA	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
JUMLAH	**491**	**240.817.499.881**	**92.834.265.629**	**(92.834.265.629)**	**34.420.200.991**	**(34.420.200.991)**

Rincian satker inaktif yang saldo asetnya dialihkan ke satker pusat disajikan pada **Lampiran XLVI**.

3. Data tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (Sepatuh) terdiri dari:
   a. Tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*) dan Kemendagri berkedudukan bukan sebagai pihak yang tergugat, yaitu:
      1) Gugatan perbuatan melawan hukum dari penggugat PT. GP sesuai dengan Nomor Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 753/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL;
      2) Gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pengawasan atas reklamasi yang dilakukan oleh PT RBH dari penggugat Yayasan RM sesuai dengan Nomor Perkara Pengadilan Negeri Rengat 22/Pdt.G-LH/2016/PN.RGT; dan

      Dalam perkara tersebut, Kemendagri tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran karena kedudukan Kemendagri bukan sebagai pihak yang tergugat.
   b. Tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*) atas Gugatan sengketa tanah dari penggugat SR, dkk dengan Nomor Perkara Pengadilan Negeri Makassar 111/Pdt.G/2017/PN.Mks merupakan sengketa tanah yang dipergunakan oleh SMA Negeri 4 Makassar dan dan SMP Negeri 7 Makassar. Kedua sekolah tersebut menggunakan tanah seluas 14.072 m^2 masing-masing seluas kurang lebih 6.237 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20.001 Tahun 1999 dan seluas kurang lebih 7.835 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20.002 tahun 1999. Tanah tersebut terletak di Desa/Kelurahan Totaka, Kota Makassar dan merupakan bagian dari tanah milik penggugat-penggugat, yaitu SR, dkk seluas 26.784 m^2 berdasarkan *Eigendom Vervonding* Nomor 2149. Amar putusan pengadilan terhadap gugatan tersebut mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang saat ini ditaksir sekitar sebesar Rp5.836.000,00. Kedudukan tergugat

(Kemendagri) dalam perkara tersebut berkaitan dengan kewenangan pertanahan yang pada saat itu merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Agraria yang berada dibawah Kemendagri.

c. Status perkara terhadap tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dari penggugat NAM dengan Nomor Perkara 170/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst telah selesai, namun terdapat gugatan immaterial sebesar Rp50.000.000,00 yang belum dapat ditindaklanjuti oleh Kemendagri yang disebabkan belum ada aanmaning dari penggugat karena kuasa hukum penggugat berstatus terpidana dan sedang menjalani hukuman dalam perkara yang lain.

d. Status perkara terhadap tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dari penggugat PT ASK dengan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel telah selesai, namun terdapat gugatan immaterial sebesar Rp4.141.000.000,00 yang belum dapat ditindaklanjuti oleh Kemendagri yang disebabkan belum ada aanmaning dari penggugat dan keberadaan para penggugat saat ini tidak diketahui dan beberapa telah meninggal dunia.

4. Terdapat Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak yang sudah tidak berhak menghuni/pihak lain yaitu:

   a. Berdasarkan Nota Dinas Rektor IPDN kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Nomor 012/8/IPDN tanggal 15 Februari 2021 hal Laporan Hasil Rapat Persiapan Penertiban/Pengosongan Rumah Negara/Dinas di IPDN Kampus Jakarta bahwa dari 45 rumah dinas yang dihuni oleh pensiuman yang tidak berhak, terdapat 12 rumah yang telah dikembalikan ke IPDN. Dengan demikian, masih terdapat 33 rumah dinas di IPDN Kampus Jakarta yang dihuni oleh pensiunan/keluarganya/non pegawai. Progres penertiban rumah dinas di IPDN Kampus Jakarta sampai dengan akhir Tahun 2021 berdasarkan Surat Rektor IPDN kepada Menteri Dalam Negeri melalui Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 012/8021/IPDN tanggal 2 November 2021 hal Perkembangan Penertiban/Pengosongan Rumah Negara/Dinas di IPDN Kampus Jakarta, yaitu sebanyak 15 rumah dinas telah dikembalikan ke IPDN atau masih terdapat 30 rumah dinas yang dihuni oleh pensiunan/keluarganya/non pegawai.

   b. Tanah Balai PMD Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati Kab. Sleman Yogyakarta yang diatasnya berdiri satu unit rumah ditempati oleh masyarakat eks Timor-Timur tanpa didukung perjanjian pinjam pakai. Langkah awal penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pengamanan secara fisik berupa pemasangan papan kepemilikan Kemendagri di depan Asrama Eks Timor Timur.

   c. Tanah seluas 258 m^2 beserta bangunan seluas 45 m^2 senilai Rp66.273.500,00 yang terletak di lingkungan perkantoran Ditjen Bina Pemdes dan awalnya merupakan kantor Ditjen Bina Pemdes dikuasai oleh pensiunan pegawai Ditjen Bina Pemdes sejak tahun 1971. Ditjen Bina Pemdes telah mengupayakan penarikan kembali BMN tersebut.

   d. Rumah dinas sebanyak 3 unit milik Setjen yang terletak di SAC Nusantara Sunter Agung dihuni dan dimanfaatkan oleh pihak lain (keluarga pensiunan

PNS) tanpa izin. Kepala Biro Umum telah berupaya melakukan penertiban, antara lain dengan menyampaikan Surat Nomor 012.1/1643/BU tanggal 27 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan/Rumah Negara milik Kementerian Dalam Negeri.

e. Terdapat hunian warga (semi permanen) yang dibangun tanpa izin di atas sebidang tanah eks-rumah dinas milik Setjen yang terletak di Jalan Danau Indah XVI Blok B-6 Nomor 27 s.d. 30 Sunter Jaya. Kepala Biro Umum memberikan izin kepada petugas penjaga untuk menempati tanah tersebut sekaligus untuk mengawasi aset tanah Kemendagri berdasarkan Surat Izin Penghunian Nomor 012.7/4356/BU tanggal 2 Agustus 2019. Namun demikian, izin yang diberikan kepada petugas penjaga tidak termasuk pemberian izin dan/atau kewenangan kepada petugas penjaga untuk mengelola tanah maupun pembangunan hunian semi permanen untuk warga lainnya.

5. Berdasarkan data pada Aplikasi e-Rekon&LK terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

   a. Rekonsiliasi internal yang terdapat pada dua satker inaktif tidak bersaldo dimana saiba mencatat sebesar nihil untuk semua saldo akun pada satker tersebut dan simak mencatat sebesar (Rp4.004.565.909,00) untuk saldo akun Akumulasi Penyusutan dan Nilai Perolehan dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Lampiran XLVII.**

   b. Jurnal tidak lazim pada 10 LK Eselon I dengan penjelasan sebagaimana disajikan pada **Lampiran XLVIII**.

   c. Perbedaan tanggal buku dalam penginputan tanggal DIPA pada dua satker Dekonsentrasi Unit Eselon I Ditjen BAK dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Lampiran XLIX.**

6. Daftar Rekening Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 terdapat pada **Lampiran L.**

G. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. Penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan dan pengungkapan lainnya diperoleh berdasarkan dokumen sumber dan/atau laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) di lingkungan Kemendagri yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang diberikan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, semoga tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan dapat tercapai.

Jakarta, 9 Mei 2022

MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK :

LAMPIRAN I

REKAPITULASI PAGU DAN REALISASI BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PER SATKER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN I

REKAPITULASI PAGU DAN REALISASI BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PER SATKER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

NO	KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	JK	ANGGARAN SETELAH DIREVISI			REALISASI BELANJA *NETTO*			%
					BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL PAGU	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL REALISASI	
1	01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	4.558.727.000		4.558.727.000	4.552.159.524		4.552.159.524	99,86
2	01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	9.222.936.000		9.222.936.000	9.200.371.246		9.200.371.246	99,76
3	01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	KP	2.055.768.000	110.000.000	2.165.768.000	2.052.214.419	109.945.000	2.162.159.419	99,83
4	01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	KD	639.290.000		639.290.000	639.102.299		639.102.299	99,97
5	01001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	1.834.443.000		1.834.443.000	1.834.379.000		1.834.379.000	100,00
6	01001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	1.385.714.000		1.385.714.000	1.385.630.900		1.385.630.900	99,99
7	01001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	1.343.250.000		1.343.250.000	1.342.878.000		1.342.878.000	99,97
8	01001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	820.589.000		820.589.000	820.364.766		820.364.766	99,97
9	01001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	1.233.149.000		1.233.149.000	1.230.285.195		1.230.285.195	99,77
10	01001	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	KD	330.088.000		330.088.000	330.088.000		330.088.000	100,00
11	01002	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	KP	1.409.816.000		1.409.816.000	1.405.647.519		1.405.647.519	99,70
12	01003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	2.571.386.000		2.571.386.000	2.566.515.017		2.566.515.017	99,81
13	01004	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	KP	3.306.866.000		3.306.866.000	3.178.413.966		3.178.413.966	96,12
14	01004	019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	DK	11.500.000		11.500.000	8.443.322		8.443.322	73,42
15	01004	039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	DK	8.338.000		8.338.000	1.000.000		1.000.000	11,99
16	01004	049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	DK	8.848.000		8.848.000	8.485.718		8.485.718	95,91
17	01004	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	DK	24.017.000		24.017.000	-		-	-
18	01004	079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	DK	16.000.000		16.000.000	3.540.000		3.540.000	22,13
19	01004	109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	DK	13.330.000		13.330.000	7.245.000		7.245.000	54,35
20	01004	119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	DK	10.000.000		10.000.000	9.685.000		9.685.000	96,85
21	01004	139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DK	9.981.000		9.981.000	7.231.169		7.231.169	72,45
22	01004	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DK	17.074.000		17.074.000	11.547.000		11.547.000	67,63
23	01004	149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DK	5.865.000		5.865.000	5.650.000		5.650.000	96,33
24	01004	159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DK	17.200.000		17.200.000	-		-	-
25	01004	179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	DK	1.350.000		1.350.000	-		-	-
26	01004	179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	DK	21.870.000		21.870.000	16.772.450		16.772.450	76,69
27	01004	189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	DK	21.295.000		21.295.000	18.510.000		18.510.000	86,92
28	01004	209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DK	2.000.000		2.000.000	-		-	-
29	01004	209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DK	2.025.000		2.025.000	409.000		409.000	20,20
30	01004	219062	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	DK	19.100.000		19.100.000	8.866.212		8.866.212	46,42
31	01004	229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	DK	700.000		700.000	-		-	-
32	01004	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	DK	16.722.000		16.722.000	16.722.000		16.722.000	100,00
33	01004	249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	DK	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00
34	01004	249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	DK	6.675.000		6.675.000	6.675.000		6.675.000	100,00
35	01004	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	DK	1.350.000		1.350.000	-		-	-
36	01004	289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	DK	1.350.000		1.350.000	-		-	-
37	01004	289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	DK	17.200.000		17.200.000	17.200.000		17.200.000	100,00
38	01004	309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	DK	55.760.000		55.760.000	49.728.000		49.728.000	89,18
39	01004	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	DK	13.200.000		13.200.000	13.113.400		13.113.400	99,34
40	01004	329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DK	4.000.000		4.000.000	3.976.000		3.976.000	99,40
41	01004	340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	DK	4.000.000		4.000.000	2.468.237		2.468.237	61,71
42	01004	349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	DK	1.350.000		1.350.000	500.000		500.000	37,04
43	01004	359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	DK	1.350.000		1.350.000	225.000		225.000	16,67
44	01004	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	DK	18.626.000		18.626.000	18.043.033		18.043.033	96,87
45	01004	433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	DK	1.600.000		1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,00
46	01004	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DK	1.350.000		1.350.000	-		-	-
47	01004	433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	DK	4.850.000		4.850.000	4.125.000		4.125.000	85,05
48	01004	433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	DK	4.000.000		4.000.000	3.661.000		3.661.000	91,53
49	01004	433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	DK	1.350.000		1.350.000	1.350.000		1.350.000	100,00
50	01004	433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	DK	1.350.000		1.350.000	1.350.000		1.350.000	100,00
51	01004	433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DK	3.295.000		3.295.000	1.086.000		1.086.000	32,96
52	01004	433349	DINAS PENANAMAN MODAL ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	DK	1.350.000		1.350.000	1.350.000		1.350.000	100,00
53	01004	433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	DK	1.350.000		1.350.000	-		-	-
54	01004	433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	DK	1.350.000		1.350.000	710.000		710.000	52,59
55	01004	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	DK	2.614.000		2.614.000	2.614.000		2.614.000	100,00
56	01004	433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	DK	10.750.000		10.750.000	3.539.000		3.539.000	32,92
57	01004	484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	DK	12.600.000		12.600.000	9.892.940		9.892.940	78,52
58	01004	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	DK	8.800.000		8.800.000	-		-	-
59	01004	484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	DK	5.200.000		5.200.000	5.200.000		5.200.000	100,00
60	01004	484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	DK	3.020.000		3.020.000	-		-	-
61	01004	484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DK	3.817.000		3.817.000	238.000		238.000	6,24

NO	KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	JK	ANGGARAN SETELAH DIREVISI			REALISASI BELANJA *NETTO*			%
					BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL PAGU	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL REALISASI	
62	01004	484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DK	2.580.000		2.580.000	2.254.000		2.254.000	87,36
63	01004	484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	DK	6.900.000		6.900.000	4.459.740		4.459.740	64,63
64	01004	484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	DK	5.000.000		5.000.000	4.985.000		4.985.000	99,70
65	01004	484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	DK	1.850.000		1.850.000	1.752.000		1.752.000	94,70
66	01004	484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	DK	4.000.000		4.000.000	2.441.425		2.441.425	61,04
67	01004	484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	DK	8.800.000		8.800.000	675.000		675.000	7,67
68	01004	484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	DK	7.600.000		7.600.000	5.900.000		5.900.000	77,63
69	01004	484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	DK	7.350.000		7.350.000	5.325.000		5.325.000	72,45
70	01004	484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	DK	7.600.000		7.600.000	3.780.000		3.780.000	49,74
71	01004	484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	DK	8.800.000		8.800.000	6.400.000		6.400.000	72,73
72	01004	484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	DK	7.600.000		7.600.000	1.863.000		1.863.000	24,51
73	01004	484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	DK	6.600.000		6.600.000	6.600.000		6.600.000	100,00
74	01004	484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	DK	7.600.000		7.600.000	2.449.256		2.449.256	32,23
75	01004	484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	DK	340.000		340.000	-		-	-
76	01004	484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	DK	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00
77	01004	484149	DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY	DK	1.350.000		1.350.000	-		-	-
78	01004	484150	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	DK	1.500.000		1.500.000	1.022.000		1.022.000	68,13
79	01004	484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	DK	7.800.000		7.800.000	5.050.000		5.050.000	64,74
80	01004	484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	DK	960.000		960.000	220.000		220.000	22,92
81	01004	484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	DK	2.910.000		2.910.000	-		-	-
82	01004	484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	DK	8.800.000		8.800.000	8.800.000		8.800.000	100,00
83	01004	484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	DK	7.100.000		7.100.000	7.100.000		7.100.000	100,00
84	01004	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	DK	13.420.000		13.420.000	12.610.500		12.610.500	93,97
85	01004	484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	DK	11.800.000		11.800.000	11.800.000		11.800.000	100,00
86	01004	484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DK	10.800.000		10.800.000	9.225.000		9.225.000	85,42
87	01004	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DK	8.800.000		8.800.000	-		-	-
88	01004	484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DK	8.600.000		8.600.000	5.007.597		5.007.597	58,23
89	01004	484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DK	7.874.000		7.874.000	7.335.026		7.335.026	93,16
90	01004	484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DK	2.000.000		2.000.000	1.150.000		1.150.000	57,50
91	01004	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DK	4.850.000		4.850.000	4.849.026		4.849.026	99,98
92	01004	484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DK	4.200.000		4.200.000	4.200.000		4.200.000	100,00
93	01004	484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DK	8.800.000		8.800.000	7.884.000		7.884.000	89,59
94	01004	484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	DK	7.600.000		7.600.000	7.421.300		7.421.300	97,65
95	01004	484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	DK	8.800.000		8.800.000	6.700.000		6.700.000	76,14
96	01004	484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	DK	4.000.000		4.000.000	-		-	-
97	01004	484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	DK	8.800.000		8.800.000	8.800.000		8.800.000	100,00
98	01004	484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	DK	10.000.000		10.000.000	9.357.000		9.357.000	93,57
99	01004	484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	DK	10.200.000		10.200.000	6.621.000		6.621.000	64,91
100	01004	484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	DK	1.000.000		1.000.000	500.000		500.000	50,00
101	01004	484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	DK	8.800.000		8.800.000	100.000		100.000	1,14
102	01004	484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	DK	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00
103	01004	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	DK	3.000		3.000	-		-	-
104	01004	484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DK	7.600.000		7.600.000	4.650.000		4.650.000	61,18
105	01004	484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DK	8.800.000		8.800.000	6.260.300		6.260.300	71,14
106	01004	484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	DK	5.300.000		5.300.000	3.199.705		3.199.705	60,37
107	01004	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	DK	7.600.000		7.600.000	2.459.781		2.459.781	32,37
108	01004	484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	DK	4.000.000		4.000.000	-		-	-
109	01005	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	3.791.818.000		3.791.818.000	3.267.987.307		3.267.987.307	86,19
110	01005	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	KD	215.951.000		215.951.000	206.842.494		206.842.494	95,78
111	01005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	459.650.000		459.650.000	340.668.000		340.668.000	74,11
112	01005	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	KD	337.265.000		337.265.000	337.245.532		337.245.532	99,99
113	01006	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	2.301.105.000		2.301.105.000	1.997.344.006		1.997.344.006	86,80
114	01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	KP	1.580.754.000	58.315.000	1.639.069.000	1.559.203.980	58.295.750	1.617.499.730	98,68
115	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	10.283.848.000	175.260.000	10.459.108.000	10.222.874.794	175.175.000	10.398.049.794	99,42
116	01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	845.244.000		845.244.000	812.585.758		812.585.758	96,14
117	01011	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KP	817.867.000	17.050.000	834.917.000	817.784.790	17.050.000	834.834.790	99,99
118	01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KP	2.971.785.000		2.971.785.000	2.947.734.483		2.947.734.483	99,19
119	01012	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	859.505.000		859.505.000	856.979.134		856.979.134	99,71
120	01012	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	618.784.000	28.100.000	646.884.000	617.663.095	28.100.000	645.763.095	99,83
121	01012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	KD	330.886.000		330.886.000	329.508.373		329.508.373	99,58
122	01012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	662.574.000		662.574.000	661.764.060		661.764.060	99,88
123	01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	801.328.000		801.328.000	801.321.000		801.321.000	100,00
JUMLAH					**58.309.795.000**	**388.725.000**	**58.698.520.000**	**56.791.514.794**	**388.565.750**	**57.180.080.544**	**97,41**

LAMPIRAN II

RINCIAN SELISIH PAGU AWAL PER SATKER

LAMPIRAN II

RINCIAN SELISIH PAGU AWAL PER SATKER

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

NO	ES1	SATKER	KODE KEWENANGAN	SATKER	PAGU AWAL		SELISIH
					PAGU SEHARUSNYA	DATA EREKON	
1	04	239236	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.572.571.000	-	(1.572.571.000)
2	04	249174	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	520.000.000	310.000.000	(210.000.000)
3	04	484118	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	350.000.000	-	(350.000.000)
4	04	484176	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	500.000.000	-	(500.000.000)
5	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	8.460.523.000	8.460.523.000
JUMLAH					**2.942.571.000**	**8.770.523.000**	**5.827.952.000**

LAMPIRAN III

RINCIAN PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, OUTPUT DAN TARGET DARI MASING-MASING KEGIATAN YANG MENJADI PRIORITAS NASIONAL

LAMPIRAN III

RINCIAN PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, OUTPUT DAN TARGET DARI MASING-MASING KEGIATAN YANG MENJADI PRIORITAS NASIONAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	RINCIAN OUTPUT(RO)	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN TARGET	%
1	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	411.002.000	409.154.905	99,55	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	100,00
2	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	285.042.000	277.217.650	97,26	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6	6	100,00
3	Daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RDTR di lokasi OSS	640.169.000	633.337.895	98,93	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	20	100,00
4	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	87.086.000	87.085.700	100,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11	11	100,00
5	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	411.000.000	329.018.800	80,05	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	10	100,00
6	penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah	709.358.000	708.018.450	99,81	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	546	100,00
7	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)	108.990.000	108.989.588	100,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	20	100,00
8	Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Pelaksanaan Inovasi Daerah	40.307.000	40.306.400	100,00	Peratutan Menteri	1	1	100,00
9	Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN-RB, KemenRistek-Dikti, LAN dan Bappenas)	33.290.000	33.289.300	100,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	100,00
TOTAL		**2.726.244.000**	**2.626.418.688**	**96,34**				

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NO	RINCIAN OUTPUT(RO)	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN TARGET	%
1	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi.	3.795.654.000	3.780.422.280	99,60	Provinsi	34	34	100,00
2	Pengendalian kinerja pelaksanaaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	3.662.361.000	3.641.129.135	99,42	Daerah	34	34	100,00
3	Penerapan SPM sub bidang Trantibum	3.065.088.000	3.063.633.981	99,95	Daerah	133	133	100,00

4	Fasilitasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan otsus	2.347.804.000	2.331.380.550	99,30	Daerah	5	5	100,00
5	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	2.339.975.000	2.313.689.572	98,88	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13	13	100,00
6	Daerah otonom hasil pemekaran yang difasilitasi penyelesaian permasalahan	1.866.546.000	1.864.904.070	99,91	Daerah	86	86	100,00
7	Penerapan pengurangan risiko bencana	1.679.876.000	1.657.162.024	98,65	Provinsi	34	34	100,00
8	Database peraturan daerah	1.111.204.000	1.109.717.000	99,87	Data base	1	1	100,00
9	Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	977.060.000	963.357.389	98,60	Provinsi	34	34	100,00
10	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	942.846.000	929.249.072	98,56	Persentase	34	34	100,00
11	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	789.540.000	788.840.446	99,91	Daerah`	412	412	100,00
12	Revisi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua	616.960.000	615.612.300	99,78	peraturan	1	1	100,00
13	Sistem Aplikasi E-Monev PTSP	480.105.000	477.093.500	99,37	Sistem Informasi	1	1	100,00
14	Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaran Pemerintahan daerah provinsi	433.890.000	431.191.000	99,38	Provinsi	19	19	100,00
15	Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	427.550.000	413.071.275	96,61	Regulasi	1	1	100,00
16	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi (Target 514 kab/kota)	337.032.000	334.778.700	99,33	Kab/Kota	514	514	100,00
17	Kebijakan Penyelenggaraan PTSP	234.266.000	234.245.030	99,99	Kebijakan	1	1	100,00
18	Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaran Pemerintahan daerah kabupaten/kota	206.580.000	206.580.000	100,00	Kabupaten/kota	220	220	100,00
19	Sistem pelaporan kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	197.698.000	197.697.500	100,00	Daerah	1	1	100,00
20	Kebijakan tentang GWPP	184.450.000	182.621.500	99,01	Kebijakan	1	1	100,00
21	Rekomendasi Perdais dan Pergub Yogyakarta	152.640.000	151.755.900	99,42	peraturan	1	1	100,00
22	Rekomendasi Qanun Aceh	147.738.000	140.366.300	95,01	peraturan	1	1	100,00
23	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah	94.100.000	94.100.000	100,00	Rekomendasi	3	3	100,00
24	Rekomendasi Perdasi turunan UU No.21 Tahun 2001	51.520.000	51.399.200	99,77	peraturan	1	1	100,00
25	Rekomendasi Perdasus turunan UU No.21 Tahun 2001	42.740.000	42.242.000	98,83	peraturan	1	1	100,00
26	Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	305.200.000	300.814.367	98,56	Provinsi	34	34	100,00
27	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	3.738.506.000	3.712.951.743	99,32	Kesepakatan	5	5	100,00
28	Rekomendasi kebijakan DPOD dalam penyelenggaaran pemerintahan dan keuangan daerah	1.645.278.000	1.643.792.503	99,91	Rekomendasi	4	4	100,00
29	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	1.470.170.000	1.466.785.151	99,77	Desa	100	100	100,00

30	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	866.012.000	824.439.325	95,20	Daerah	412	412	100,00
31	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	2.899.280.000	2.882.196.852	99,41	Daerah	133	133	100,00
32	Penerapan SPM sub bidang Bencana	2.230.294.000	2.210.148.439	99,10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	133	133	100,00
33	Angkatan Pengembangan Kompetensi Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri	482.454.000	479.406.732	99,37	orang	180	180	100,00
34	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	817.051.000	816.688.551	99,96	Daerah	210	244	116,19
35	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	1.087.515.000	1.078.722.491	99,19	Daerah	412	412	100,00
36	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan	1.259.174.000	1.254.957.748	99,67	Kab/Kota	71	71	100,00
37	Daerah yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending	354.729.000	354.402.015	99,91	Daerah	350	362	103,43
38	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1.685.921.000	1.671.106.637	99,12	Daerah (Prov/Kab/Kota)	48	48	100,00
39	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	947.297.000	940.889.210	99,32	Daerah	412	412	100,00
40	Asistensi pengaktifan 1 SKPD tingkat provinsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah	749.141.000	741.076.260	98,92	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	100,00
41	Penyusunan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam peningkatan kepariwisataan	388.052.000	387.299.210	99,81	Kesepakatan	3	3	100,00
42	Daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RTR di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	1.132.153.000	1.118.000.974	98,75	Daerah	23	23	100,00
43	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	3.092.126.000	3.073.133.010	99,39	Daerah	80	80	100,00
44	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	1.230.790.000	1.194.769.879	97,07	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6	6	100,00
45	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	2.348.064.000	2.321.247.248	98,86	Daerah	34	34	100,00
46	Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	799.000.000	786.181.615	98,40	Daerah	55	70	127,27
47	Penerapan pilot project inovasi daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim inovasi di daerah 3T	102.284.000	102.283.292	100,00	Daerah	3	3	100,00
48	Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional	1.244.844.000	1.221.684.029	98,14	orang	480	480	100,00
49	Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Si-Keuda) Bidang Perencanaan Anggaran	802.425.000	801.650.209	99,90	Daerah	210	385	183,33
50	Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam hal Penerapan SPM di daerah Lingkup Pusat	1.252.992.000	1.252.916.030	99,99	orang	480	480	100,00
51	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	1.400.000.000	1.383.244.352	98,80	Desa	80	80	100,00

52	Angkatan Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat)	150.640.000	150.639.100	100,00	orang	90	90	100,00
53	Angkatan Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	405.030.000	405.022.000	100,00	orang	170	170	100,00
54	Angkatan Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	1.063.592.000	1.057.583.166	99,44	orang	280	280	100,00
55	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	1.559.779.000	935.007.903	59,94	Daerah1	412	412	100,00
56	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah	1.337.734.000	941.410.901	70,37	Daerah	412	412	100,00
57	Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	1.705.038.000	1.670.281.334	97,96	Daerah	145	145	100,00
58	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan	1.430.100.000	1.422.436.479	99,46	Sistem	1	1	100,00
59	Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar	1.731.227.000	1.675.482.691	96,78	Daerah	349	349	100,00
60	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	2.265.996.000	2.240.080.239	98,86	Daerah	359	359	100,00
61	Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	706.948.000	704.047.210	99,59	Daerah	210	210	100,00
62	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1.660.290.000	1.624.241.150	97,83	Persentase	23	23	100,00
63	Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	908.398.000	890.280.525	98,01	Provinsi	23	23	100,00
64	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	5.672.442.000	5.542.108.031	97,70	orang	2.232	2.232	100,00
65	Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi KDH/WKDH	1.209.014.000	1.190.566.157	98,47	orang	1.059	1.059	100,00
66	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	14.474.762.000	12.007.083.858	82,95	Desa	100	100	100,00
67	Dukungan Manajamen P3PD	14.017.115.000	12.940.055.306	92,32	layanan	1	1	100,00
68	Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang ditingkatkan Kualitasnya	9.628.123.000	7.732.988.925	80,32	Orang	670	670	100,00
69	Sistem dan Prosedur yang dikembangkan	1.880.000.000	1.589.474.912	84,55	NSPK	6	6	100,00
70	Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	34.036.094.000	31.419.678.483	92,31	Rekomendasi Kebijakan	119	131	110,08
TOTAL		**156.358.297.000**	**146.175.495.966**	**93,49**				

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	RINCIAN OUTPUT(RO)	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN TARGET	%
1	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	272.634.000	272.628.500	100,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	360	360	100,00
2	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	241.760.000	216.530.000	89,56	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7	7	100,00
3	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	208.758.000	195.034.000	93,43	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7	7	100,00
4	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	266.926.000	245.002.144	91,79	Daerah (Prov/Kab/Kota)	50	50	100,00
5	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	313.397.000	308.047.261	98,29	Daerah (Prov/Kab/Kota)	22	22	100,00
6	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	273.302.000	267.429.960	97,85	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	20	100,00
7	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	308.927.000	297.783.503	96,39	Daerah (Prov/Kab/Kota)	22	22	100,00
8	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	550.100.000	545.809.329	99,22	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18	18	100,00
9	Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	4.389.928.000	4.388.664.750	99,97	Lembaga	30	30	100,00
10	Akta Kematian yang diterbitkan	379.355.000	374.217.940	98,65	Orang	110.000	1.656.903	1506,28
11	Akta Perkawinan yang diterbitkan	412.220.000	400.952.471	97,27	Orang	30.000	221.383	737,94
12	Akta Perceraian yang diterbitkan	276.860.000	268.210.100	96,88	Orang	4.000	10.830	270,75
13	Akta Kelahiran yang diterbitkan	464.085.000	443.706.350	95,61	Orang	220.000	1.719.210	781,46
14	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)	2.096.721.000	2.094.211.291	99,88	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	10	100,00
15	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	1.044.696.000	1.043.007.100	99,84	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	5	100,00
TOTAL		**11.499.669.000**	**11.361.234.699**	**98,80**				

PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

NO	RINCIAN OUTPUT(RO)	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN TARGET	%
1	Kerukunan umat beragama di daerah	472.416.000	472.414.433	100,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	10	100,00
2	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	460.317.000	460.269.300	99,990	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16	16	100,00
3	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	289.000.000	283.060.000	97,94	Daerah (Prov/Kab/Kota)	55	55	100,00

4	Kinerja PPWK di daerah	550.108.000	550.101.051	99,999	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16	16	100,00
TOTAL		**1.771.841.000**	**1.765.844.784**	**99,66**				

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

NO	RINCIAN OUTPUT(RO)	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN TARGET	%
1	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	218.320.000	218.320.000	100,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	20	200,00
2	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	52.520.000	52.520.000	100,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3	3	100,00
3	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	54.700.000	54.700.000	100,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3	3	100,00
4	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	3.403.232.000	1.387.788.128	40,78	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17	17	100,00
5	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	652.650.000	382.050.000	58,54	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17	17	100,00
6	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	847.433.000	610.341.643	72,02	Daerah (Prov/Kab/Kota)	49	49	100,00
7	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	677.877.000	617.076.375	91,03	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	10	100,00
8	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	717.561.000	664.508.856	92,61	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	10	100,00
TOTAL		**6.624.293.000**	**3.987.305.002**	**60,19**				

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	RINCIAN OUTPUT(RO)	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN TARGET	%
1	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	495.994.000	495.948.185	99,991	Daerah (Prov/Kab/Kota)	21	61	290,48
2	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	1.073.955.000	1.073.932.127	99,998	Orang	100	100	100,00
3	Kapasitas pengurus ormas	690.401.000	690.346.807	99,992	Kelompok Masyarakat	200	200	100,00
4	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1.089.475.000	1.087.417.512	99,811	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	15	100,00
5	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	680.000.000	679.984.050	99,998	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100,00
6	Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah	250.000.000	249.999.500	100,00	Orang	1.000	1.000	100,00
7	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	150.000.000	150.000.000	100,00	Orang	50	50	100,00
8	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	126.376.418.000	126.376.418.000	100,00	Lembaga	9	9	100,00
TOTAL		**130.806.243.000**	**130.804.046.181**	**100,00**				

LAMPIRAN IV

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

LAMPIRAN IV

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

ES 1	SATKER	KDKW	NAMA SATKER	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	% REALISASI PENDAPATAN
01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	-	2.046.101	-	2.046.101	-
01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	-	258.538.438	-	258.538.438	-
01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	-	62.199.057	-	62.199.057	-
01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	209	-	209	-
01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	197.995.685	-	197.995.685	-
01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	90.370.007	-	90.370.007	-
01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	269.134.217	-	269.134.217	-
01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	729.950.000	4.401.700.635	-	4.401.700.635	603,01
01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	16.547.588.000	15.741.056.354	-	15.741.056.354	95,13
01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	-	670.759.698	-	670.759.698	-
		KD :		-	880.283.714	-	880.283.714	-
		KP :		17.277.538.000	20.813.516.687	-	20.813.516.687	120,47
		DK :						-
		TP :						-
		Total Setjen :		**17.277.538.000**	**21.693.800.401**	**-**	**21.693.800.401**	125,56
02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	-	481.422.680	-	481.422.680	-
		KD :		-	-	-	-	-
		KP :		-	481.422.680	-	481.422.680	-
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total Itjen :		**-**	**481.422.680**	**-**	**481.422.680**	-
03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	-	140.951.210	-	140.951.210	-
		KD :		-	-	-	-	-
		KP :		-	140.951.210	-	140.951.210	-
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total Polpum :		**-**	**140.951.210**	**-**	**140.951.210**	-
04	029134	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	3.970.500	-	3.970.500	-
04	339161	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	-	10.413.871	-	10.413.871	-
04	239236	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	-	2.000.000	-	2.000.000	-
04	484193	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	-	1.816.374	-	1.816.374	-
04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	584.003.979	-	584.003.979	-
		KD :		-	-	-	-	-
		KP :		-	584.003.979	-	584.003.979	-
		DK :		-	18.200.745	-	18.200.745	-

LAMPIRAN IV

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

ES 1	SATKER	KDKW	NAMA SATKER	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	% REALISASI PENDAPATAN
		TP :		-	-	-	-	-
		Total BAK :		**-**	**602.204.724**	**-**	**602.204.724**	-
05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	-	46.474.116	-	46.474.116	-
05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	-	110.478.000	-	110.478.000	-
05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	16.500.000	39.520.832	-	39.520.832	239,52
05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	-	1.522.612.623	-	1.522.612.623	-
		KD :		16.500.000	196.472.948	-	196.472.948	1.190,75
		KP :		-	1.522.612.623	-	1.522.612.623	-
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total Pemdes :		**16.500.000**	**1.719.085.571**	**-**	**1.719.085.571**	10.418,70
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	6.528.989.268	-	6.528.989.268	-
		KD :		-	-	-	-	-
		KP :		-	6.528.989.268	-	6.528.989.268	-
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total Bangda :		**-**	**6.528.989.268**	**-**	**6.528.989.268**	-
07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	204.678.667	-	204.678.667	-
		KD :		-	-	-	-	-
		KP :		-	204.678.667	-	204.678.667	-
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total Otda :		**-**	**204.678.667**	**-**	**204.678.667**	-
08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	7.678.048.214	-	7.678.048.214	-
		KD :		-	-	-	-	-
		KP :		-	7.678.048.214	-	7.678.048.214	-
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total Dukcapil :		**-**	**7.678.048.214**	**-**	**7.678.048.214**	-
09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	-	111.346.316	-	111.346.316	-
		KD :		-	-	-	-	-
		KP :		-	111.346.316	-	111.346.316	-
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total Keuda :		**-**	**111.346.316**	**-**	**111.346.316**	-
11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	296.526.822	-	296.526.822	-
		KD :		-	-	-	-	-
		KP :		-	296.526.822	-	296.526.822	-

LAMPIRAN IV

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

ES 1	SATKER	KDKW	NAMA SATKER	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	% REALISASI PENDAPATAN
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-		-
		Total BPP :		**-**	**296.526.822**	**-**	**296.526.822**	-
12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	11.446.573.000	15.623.492.426	-	15.623.492.426	136,49
12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	5.185.549.000	22.087.435.458	-	22.087.435.458	425,94
12	027114	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	19.921.836.000	33.044.298.874	209.158.000	32.835.140.874	165,87
12	027177	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	7.720.407.000	8.869.866.999	-	8.869.866.999	114,89
12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	9.248.500	-	9.248.500	-
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.779.642.000	9.577.608.945	45.000.000	9.532.608.945	109,09
		KD :		44.274.365.000	79.634.342.257	209.158.000	79.425.184.257	179,87
		KP :		8.779.642.000	9.577.608.945	45.000.000	9.532.608.945	109,09
		DK :		-	-	-	-	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total BPSDM :		**53.054.007.000**	**89.211.951.202**	**254.158.000**	**88.957.793.202**	**168,15**
		KD :		44.290.865.000	80.711.098.919	209.158.000	80.501.940.919	182,23
		KP :		26.057.180.000	47.939.705.411	45.000.000	47.894.705.411	183,98
		DK :		-	18.200.745	-	18.200.745	-
		TP :		-	-	-	-	-
		Total Kementerian :		**70.348.045.000**	**128.669.005.075**	**254.158.000**	**128.414.847.075**	**182,90**

LAMPIRAN V

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

LAMPIRAN V

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

ES	SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO	PERSENTASE	SISA	PERSENTASE REALISASI BELANJA DIBANDINGKAN TOTAL BELANJA
01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	49.207.653.000	44.734.519.000	44.697.270.326	412.924	44.696.857.402	99,92	37.661.598	1,53
01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29.911.815.000	29.547.217.000	29.680.053.702	273.666.105	29.406.387.597	100,45	140.829.403	1,02
01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	31.336.573.000	30.530.743.000	30.528.225.846	286	30.528.225.560	99,99	2.517.440	1,05
01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	30.802.008.000	29.698.877.000	29.668.877.149	32.440.620	29.636.436.529	99,90	62.440.471	1,02
01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	41.256.721.000	36.368.488.000	36.359.033.547	43.637.331	36.315.396.216	99,97	53.091.784	1,25
01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	29.276.260.000	28.462.980.000	28.276.911.996	50.711.477	28.226.200.519	99,35	236.779.481	0,97
01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	31.136.788.000	29.176.658.000	29.167.735.080	20.456.260	29.147.278.820	99,97	29.379.180	1,00
01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	433.868.112.000	367.132.385.000	365.114.003.093	661.006.606	364.452.996.487	99,45	2.679.388.513	12,53
01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	365.810.012.000	331.993.151.000	331.114.102.688	148.096.666	330.966.006.022	99,74	1.027.144.978	11,36
01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	17.303.307.000	26.682.541.000	26.417.358.052	-	26.417.358.052	99,01	265.182.948	0,91
			KD :	**242.927.818.000**	**228.519.482.000**	**228.378.107.646**	**421.325.003**	**227.956.782.643**	**99,94**	**562.699.357**	
			KP :	**816.981.431.000**	**725.808.077.000**	**722.645.463.833**	**809.103.272**	**721.836.360.561**	**99,56**	**3.971.716.439**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total Setjen :	**1.059.909.249.000**	**954.327.559.000**	**951.023.571.479**	**1.230.428.275**	**949.793.143.204**	**99,65**	**4.534.415.796**	
02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	76.256.361.000	68.193.264.000	68.131.698.504	58.335.250	68.073.363.254	99,91	119.900.746	2,34
			KD :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			KP :	**76.256.361.000**	**68.193.264.000**	**68.131.698.504**	**58.335.250**	**68.073.363.254**	**99,91**	**119.900.746**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total Itjen :	**76.256.361.000**	**68.193.264.000**	**68.131.698.504**	**58.335.250**	**68.073.363.254**	**99,91**	**119.900.746**	
03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	223.313.972.000	212.623.343.000	212.553.949.893	12.622.482	212.541.327.411	99,97	82.015.589	7,29
			KD :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			KP :	**223.313.972.000**	**212.623.343.000**	**212.553.949.893**	**12.622.482**	**212.541.327.411**	**99,97**	**82.015.589**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total Polpum :	**223.313.972.000**	**212.623.343.000**	**212.553.949.893**	**12.622.482**	**212.541.327.411**	**99,97**	**82.015.589**	
04	019080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	250.000.000	216.162.000	194.530.086	-	194.530.086	89,99	21.631.914	0,01
04	029134	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	1.815.345.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	039667	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.567.739.000	365.014.000	250.334.950	-	250.334.950	68,58	114.679.050	0,01
04	049061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	1.304.996.000	315.202.000	313.415.078	-	313.415.078	99,43	1.786.922	0,01
04	059663	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1.590.231.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	069084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	1.784.385.000	319.685.000	292.258.091	-	292.258.091	91,42	27.426.909	0,01
04	079078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	1.887.934.000	308.239.000	183.639.288	-	183.639.288	59,58	124.599.712	0,01
04	089106	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1.638.076.000	170.000.000	155.940.625	-	155.940.625	91,73	14.059.375	0,01
04	099438	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1.472.218.000	536.820.000	534.732.910	-	534.732.910	99,61	2.087.090	0,02
04	109074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1.458.289.000	459.141.000	443.788.000	-	443.788.000	96,66	15.353.000	0,02
04	119082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.635.508.000	363.311.000	362.489.870	-	362.489.870	99,77	821.130	0,01
04	129074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1.349.423.000	568.659.000	526.546.772	-	526.546.772	92,59	42.112.228	0,02
04	129098	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	500.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	139078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.517.498.000	650.414.000	588.428.279	-	588.428.279	90,47	61.985.721	0,02
04	149072	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.700.377.000	543.578.000	487.847.400	-	487.847.400	89,75	55.730.600	0,02
04	149130	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	520.000.000	165.089.000	164.226.667	-	164.226.667	99,48	862.333	0,01
04	159071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.558.744.000	531.230.000	435.129.458	-	435.129.458	81,91	96.100.542	0,01
04	169185	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.582.009.000	586.066.000	518.359.986	-	518.359.986	88,45	67.706.014	0,02
04	179088	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	500.000.000	140.000.000	136.291.701	-	136.291.701	97,35	3.708.299	0,00
04	179223	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.636.765.000	906.170.000	899.007.369	-	899.007.369	99,21	7.162.631	0,03
04	189087	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.780.589.000	721.740.000	714.608.000	-	714.608.000	99,01	7.132.000	0,02
04	199080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.003.989.000	484.598.000	462.890.067	-	462.890.067	95,52	21.707.933	0,02
04	209071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.580.571.000	279.310.000	249.059.400	-	249.059.400	89,17	30.250.600	0,01
04	209095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	520.000.000	199.800.000	198.184.000	-	198.184.000	99,19	1.616.000	0,01
04	219062	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1.911.502.000	621.052.000	602.880.581	2.434.548	600.446.033	97,07	20.605.967	0,02

LAMPIRAN V

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

ES	SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO	PERSENTASE	SISA	PERSENTASE REALISASI BELANJA DIBANDINGKAN TOTAL BELANJA
04	229068	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1.696.844.000	676.439.000	670.407.800	-	670.407.800	99,11	6.031.200	0,02
04	239236	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	-	762.235.000	761.943.108	-	761.943.108	99,96	291.892	0,03
04	249136	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.738.323.000	288.814.000	279.875.500	-	279.875.500	96,91	8.938.500	0,01
04	249174	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	310.000.000	241.475.000	241.427.300	-	241.427.300	99,98	47.700	0,01
04	250048	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	1.648.967.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	259084	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	570.000.000	176.000.000	128.458.000	-	128.458.000	72,99	47.542.000	0,00
04	269093	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	1.486.622.000	492.110.000	387.203.100	39.490.000	347.713.100	78,68	144.396.900	0,01
04	289095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	530.000.000	194.800.000	173.150.000	-	173.150.000	88,89	21.650.000	0,01
04	289174	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1.712.472.000	720.060.000	669.779.914	-	669.779.914	93,02	50.280.086	0,02
04	299348	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	1.351.013.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	309148	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	1.529.659.000	781.372.000	767.380.176	-	767.380.176	98,21	13.991.824	0,03
04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1.618.252.000	767.675.000	762.298.295	-	762.298.295	99,30	5.376.705	0,03
04	329116	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.531.287.000	551.875.000	541.845.546	-	541.845.546	98,18	10.029.454	0,02
04	339161	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	1.677.232.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	340166	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1.582.822.000	584.634.000	579.326.427	1.807.863	577.518.564	99,09	7.115.436	0,02
04	349011	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	500.000.000	241.632.000	235.332.000	-	235.332.000	97,39	6.300.000	0,01
04	359002	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	500.000.000	189.540.000	175.398.600	-	175.398.600	92,54	14.141.400	0,01
04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.497.748.000	527.192.000	524.647.475	1.605.000	523.042.475	99,52	4.149.525	0,02
04	433316	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	500.000.000	212.000.000	209.376.323	-	209.376.323	98,76	2.623.677	0,01
04	433317	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	520.000.000	238.273.000	238.011.600	-	238.011.600	99,89	261.400	0,01
04	433318	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	500.000.000	166.000.000	155.964.831	-	155.964.831	93,95	10.035.169	0,01
04	433341	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	500.000.000	172.138.000	171.294.075	-	171.294.075	99,51	843.925	0,01
04	433342	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	500.000.000	203.448.000	202.663.940	-	202.663.940	99,61	784.060	0,01
04	433343	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	500.000.000	43.300.000	43.300.000	-	43.300.000	100,00	-	0,00
04	433344	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	500.000.000	124.000.000	123.672.818	-	123.672.818	99,74	327.182	0,00
04	433345	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	500.000.000	194.664.000	193.481.000	-	193.481.000	99,39	1.183.000	0,01
04	433347	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	520.000.000	210.000.000	207.651.000	-	207.651.000	98,88	2.349.000	0,01
04	433348	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	520.000.000	200.204.000	194.066.800	-	194.066.800	96,93	6.137.200	0,01
04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	500.000.000	229.946.000	229.913.000	-	229.913.000	99,99	33.000	0,01
04	433350	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	500.000.000	113.307.000	111.398.700	-	111.398.700	98,32	1.908.300	0,00
04	433351	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	520.000.000	159.477.000	158.724.100	-	158.724.100	99,53	752.900	0,01
04	433352	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	500.000.000	136.000.000	135.425.574	-	135.425.574	99,58	574.426	0,00
04	433353	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	520.000.000	216.335.000	203.442.400	-	203.442.400	94,04	12.892.600	0,01
04	484101	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	500.000.000	69.000.000	65.978.220	-	65.978.220	95,62	3.021.780	0,00
04	484102	DK	BAPPEDA PROVINSI ACEH	399.000.000	230.356.000	224.094.873	-	224.094.873	97,28	6.261.127	0,01
04	484103	DK	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	700.000.000	168.173.000	122.757.000	-	122.757.000	72,99	45.416.000	0,00
04	484105	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	520.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484106	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA	410.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00

LAMPIRAN V

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

ES	SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO	PERSENTASE	SISA	PERSENTASE REALISASI BELANJA DIBANDINGKAN TOTAL BELANJA
04	484107	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	830.000.000	194.503.000	191.543.088	-	191.543.088	98,48	2.959.912	0,01
04	484109	DK	BAPPEDA PROVINSI RIAU	337.000.000	176.008.000	162.495.200	-	162.495.200	92,32	13.512.800	0,01
04	484110	DK	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	518.000.000	163.984.000	147.840.840	-	147.840.840	90,16	16.143.160	0,01
04	484112	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	338.000.000	244.490.000	235.388.534	-	235.388.534	96,28	9.101.466	0,01
04	484113	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	474.000.000	137.000.000	133.684.370	-	133.684.370	97,58	3.315.630	0,00
04	484115	DK	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	357.000.000	203.259.000	198.060.000	-	198.060.000	97,44	5.199.000	0,01
04	484116	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	500.000.000	166.332.000	165.815.041	-	165.815.041	99,69	516.959	0,01
04	484119	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	580.000.000	193.320.000	191.653.053	1.212.412	190.440.641	99,14	2.879.359	0,01
04	484121	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	362.000.000	178.833.000	164.692.400	-	164.692.400	92,09	14.140.600	0,01
04	484122	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	590.000.000	189.791.000	121.629.802	-	121.629.802	64,09	68.161.198	0,00
04	484124	DK	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	330.000.000	131.058.000	113.213.736	-	113.213.736	86,38	17.844.264	0,00
04	484125	DK	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	528.000.000	124.103.000	110.594.850	-	110.594.850	89,12	13.508.150	0,00
04	484127	DK	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	374.000.000	195.401.000	191.252.600	-	191.252.600	97,88	4.148.400	0,01
04	484128	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	482.000.000	129.389.000	116.363.700	-	116.363.700	89,93	13.025.300	0,00
04	484131	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	360.000.000	135.001.000	127.636.783	-	127.636.783	94,55	7.364.217	0,00
04	484132	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	430.000.000	162.532.000	162.458.900	-	162.458.900	99,96	73.100	0,01
04	484134	DK	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	328.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484135	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	410.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484137	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	530.000.000	56.274.000	55.491.755	-	55.491.755	98,61	782.245	0,00
04	484138	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	379.000.000	161.029.000	155.698.256	-	155.698.256	96,69	5.330.744	0,01
04	484139	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	740.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484145	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	550.000.000	128.303.000	127.104.469	-	127.104.469	99,07	1.198.531	0,00
04	484146	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	381.000.000	240.454.000	194.480.971	-	194.480.971	80,88	45.973.029	0,01
04	484147	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	790.000.000	182.222.000	182.220.800	-	182.220.800	100,00	1.200	0,01
04	484149	DK	DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY	500.000.000	164.345.000	159.201.600	-	159.201.600	96,87	5.143.400	0,01
04	484150	DK	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	357.000.000	126.894.000	120.616.000	-	120.616.000	95,05	6.278.000	0,00
04	484151	DK	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	350.000.000	182.101.000	141.786.639	-	141.786.639	77,86	40.314.361	0,00
04	484153	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	550.000.000	140.000.000	114.798.580	-	114.798.580	82,00	25.201.420	0,00
04	484154	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	448.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484155	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	446.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484157	DK	BAPPEDA PROVINSI BALI	423.000.000	196.781.000	143.884.000	-	143.884.000	73,12	52.897.000	0,00
04	484158	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	520.000.000	201.194.000	193.287.000	-	193.287.000	96,07	7.907.000	0,01
04	484160	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	370.000.000	193.208.000	192.779.800	-	192.779.800	99,78	428.200	0,01
04	484161	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	420.000.000	192.028.000	190.635.977	-	190.635.977	99,28	1.392.023	0,01
04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	425.000.000	237.766.000	237.765.400	-	237.765.400	100,00	600	0,01
04	484164	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	627.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484166	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	349.000.000	130.684.000	121.401.320	-	121.401.320	92,90	9.282.680	0,00
04	484167	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	480.000.000	138.096.000	109.728.800	1.090.676	108.638.124	79,46	29.457.876	0,00
04	484169	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	406.000.000	191.424.000	173.651.212	-	173.651.212	90,72	17.772.788	0,01
04	484170	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	576.000.000	213.670.000	203.197.287	-	203.197.287	95,10	10.472.713	0,01
04	484172	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	520.000.000	224.055.000	220.660.000	-	220.660.000	98,48	3.395.000	0,01
04	484173	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	369.000.000	196.923.000	194.721.511	-	194.721.511	98,88	2.201.489	0,01
04	484174	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	565.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484177	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	426.000.000	321.915.000	302.050.000	-	302.050.000	93,83	19.865.000	0,01
04	484178	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	500.000.000	188.935.000	158.401.020	1.749.374	156.651.646	83,84	32.283.354	0,01
04	484180	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	367.000.000	176.227.000	174.731.390	-	174.731.390	99,15	1.495.610	0,01
04	484181	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	330.000.000	129.281.000	121.578.663	-	121.578.663	94,04	7.702.337	0,00
04	484183	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	392.000.000	181.434.000	176.777.098	-	176.777.098	97,43	4.656.902	0,01
04	484184	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	600.000.000	220.265.000	215.639.873	-	215.639.873	97,90	4.625.127	0,01
04	484187	DK	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	447.000.000	238.488.000	237.332.506	-	237.332.506	99,52	1.155.494	0,01
04	484188	DK	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	420.000.000	265.517.000	261.695.871	-	261.695.871	98,56	3.821.129	0,01
04	484190	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	387.000.000	201.371.000	198.961.600	-	198.961.600	98,80	2.409.400	0,01
04	484191	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	450.000.000	139.180.000	97.280.000	-	97.280.000	69,90	41.900.000	0,00
04	484193	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	480.000.000	154.282.000	152.465.626	-	152.465.626	98,82	1.816.374	0,01
04	484194	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	615.000.000	184.054.000	184.054.000	-	184.054.000	100,00	-	0,01
04	484196	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	420.000.000	247.628.000	237.992.100	-	237.992.100	96,11	9.635.900	0,01
04	484197	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	612.000.000	182.329.000	179.884.361	-	179.884.361	98,66	2.444.639	0,01
04	484199	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	373.000.000	174.731.000	171.481.000	-	171.481.000	98,14	3.250.000	0,01
04	484200	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	536.000.000	146.996.000	129.877.700	-	129.877.700	88,35	17.118.300	0,00

LAMPIRAN V

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

ES	SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO	PERSENTASE	SISA	PERSENTASE REALISASI BELANJA DIBANDINGKAN TOTAL BELANJA
04	484202	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	420.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484203	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	628.000.000	163.755.000	154.038.867	-	154.038.867	94,07	9.716.133	0,01
04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	408.000.000	229.082.000	188.991.181	-	188.991.181	82,50	40.090.819	0,01
04	484206	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	510.000.000	154.503.000	101.558.000	-	101.558.000	65,73	52.945.000	0,00
04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	440.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484209	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	413.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484211	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	570.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484212	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	438.000.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00
04	484213	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	330.000.000	35.283.000	28.962.900	-	28.962.900	82,09	6.320.100	0,00
04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	134.702.903.000	131.429.328.000	130.606.551.189	884.406.971	129.722.144.218	99,37	1.707.183.782	4,48
04	160552	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	1.950.000.000	1.950.000.000	1.946.993.100	-	1.946.993.100	99,85	3.006.900	0,07
04	419079	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	900.000.000	900.000.000	751.466.285	-	751.466.285	83,50	148.533.715	0,03
			KD :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			KP :	**134.702.903.000**	**131.429.328.000**	**130.606.551.189**	**884.406.971**	**129.722.144.218**	**99,37**	**1.707.183.782**	
			DK :	**98.387.429.000**	**29.691.465.000**	**27.845.466.103**	**49.389.873**	**27.796.076.230**	**93,78**	**1.895.388.770**	
			TP :	**2.850.000.000**	**2.850.000.000**	**2.698.459.385**	**-**	**2.698.459.385**	**94,68**	**151.540.615**	
			Total BAK :	**235.940.332.000**	**163.970.793.000**	**161.150.476.677**	**933.796.844**	**160.216.679.833**	**98,28**	**3.754.113.167**	
05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	13.733.908.000	12.246.479.000	12.168.543.111	3.568.262	12.164.974.849	99,36	81.504.151	0,42
05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	11.879.951.000	10.243.020.000	10.001.894.900	6.655.918	9.995.238.982	97,65	247.781.018	0,34
05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	14.130.000.000	11.322.176.000	10.954.534.047	14.655.298	10.939.878.749	96,75	382.297.251	0,38
05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	171.937.410.000	151.940.241.000	144.139.440.503	673.129.793	143.466.310.710	94,87	8.473.930.290	4,94
			KD :	**39.743.859.000**	**33.811.675.000**	**33.124.972.058**	**24.879.478**	**33.100.092.580**	**97,97**	**711.582.420**	
			KP :	**171.937.410.000**	**151.940.241.000**	**144.139.440.503**	**673.129.793**	**143.466.310.710**	**94,87**	**8.473.930.290**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total Pemdes :	**211.681.269.000**	**185.751.916.000**	**177.264.412.561**	**698.009.271**	**176.566.403.290**	**95,43**	**9.185.512.710**	
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	218.363.235.000	236.967.581.000	235.379.005.562	562.716.230	234.816.289.332	99,33	2.151.291.668	8,07
			KD :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			KP :	**218.363.235.000**	**236.967.581.000**	**235.379.005.562**	**562.716.230**	**234.816.289.332**	**99,33**	**2.151.291.668**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total Bangda :	**218.363.235.000**	**236.967.581.000**	**235.379.005.562**	**562.716.230**	**234.816.289.332**	**99,33**	**2.151.291.668**	
07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	98.403.344.000	84.422.087.000	84.274.592.431	112.478.788	84.162.113.643	99,83	259.973.357	2,89
			KD :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			KP :	**98.403.344.000**	**84.422.087.000**	**84.274.592.431**	**112.478.788**	**84.162.113.643**	**99,83**	**259.973.357**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total Otda :	**98.403.344.000**	**84.422.087.000**	**84.274.592.431**	**112.478.788**	**84.162.113.643**	**99,83**	**259.973.357**	
08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	754.035.982.000	708.852.901.000	707.951.546.726	1.936.491.988	706.015.054.738	99,87	2.837.846.262	24,29
			KD :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			KP :	**754.035.982.000**	**708.852.901.000**	**707.951.546.726**	**1.936.491.988**	**706.015.054.738**	**99,87**	**2.837.846.262**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total Dukcapil :	**754.035.982.000**	**708.852.901.000**	**707.951.546.726**	**1.936.491.988**	**706.015.054.738**	**99,87**	**2.837.846.262**	
09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	80.700.076.000	73.664.625.000	72.340.800.780	85.509.231	72.255.291.549	98,20	1.409.333.451	2,48
			KD :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			KP :	**80.700.076.000**	**73.664.625.000**	**72.340.800.780**	**85.509.231**	**72.255.291.549**	**98,20**	**1.409.333.451**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total Keuda :	**80.700.076.000**	**73.664.625.000**	**72.340.800.780**	**85.509.231**	**72.255.291.549**	**98,20**	**1.409.333.451**	
11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	54.578.178.000	50.633.771.000	50.136.726.116	5.609.502	50.131.116.614	99,02	502.654.386	1,72
			KD :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			KP :	**54.578.178.000**	**50.633.771.000**	**50.136.726.116**	**5.609.502**	**50.131.116.614**	**99,02**	**502.654.386**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total BPP :	**54.578.178.000**	**50.633.771.000**	**50.136.726.116**	**5.609.502**	**50.131.116.614**	**99,02**	**502.654.386**	
12	027114	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	26.241.283.000	31.853.649.000	31.807.494.398	7.351.910	31.800.142.488	99,86	53.506.512	1,09
12	027177	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	18.106.994.000	21.587.551.000	21.567.401.908	11.226.341	21.556.175.567	99,91	31.375.433	0,74

LAMPIRAN V

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

ES	SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO	PERSENTASE	SISA	PERSENTASE REALISASI BELANJA DIBANDINGKAN TOTAL BELANJA
12	352588	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.106.605.000	2.507.045.000	2.506.932.225	3.240.000	2.503.692.225	100,00	3.352.775	0,09
12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	20.640.223.000	28.598.929.000	28.453.189.215	81.530.591	28.371.658.624	99,49	227.270.376	0,98
12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	18.701.516.000	20.090.314.000	20.065.355.062	1.340.471	20.064.014.591	99,88	26.299.409	0,69
12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.460.523.000	8.331.984.000	8.330.893.392	3.014.000	8.327.879.392	99,99	4.104.608	0,29
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	93.089.248.000	82.180.257.000	82.137.830.318	298.724.878	81.839.105.440	99,95	341.151.560	2,82
			KD :	**104.257.144.000**	**112.969.472.000**	**112.731.266.200**	**107.703.313**	**112.623.562.887**	**99,79**	**345.909.113**	
			KP :	**93.089.248.000**	**82.180.257.000**	**82.137.830.318**	**298.724.878**	**81.839.105.440**	**99,95**	**341.151.560**	
			DK :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			TP :	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
			Total BPSDM :	**197.346.392.000**	**195.149.729.000**	**194.869.096.518**	**406.428.191**	**194.462.668.327**	**99,86**	**687.060.673**	
			KD :	**386.928.821.000**	**375.300.629.000**	**374.234.345.904**	**553.907.794**	**373.680.438.110**	**99,72**	**1.620.190.890**	
			KP :	**2.722.362.140.000**	**2.526.715.475.000**	**2.510.297.605.855**	**5.439.128.385**	**2.504.858.477.470**	**99,35**	**21.856.997.530**	
			DK :	**98.387.429.000**	**29.691.465.000**	**27.845.466.103**	**49.389.873**	**27.796.076.230**	**93,78**	**1.895.388.770**	
			TP :	**2.850.000.000**	**2.850.000.000**	**2.698.459.385**	**-**	**2.698.459.385**	**94,68**	**151.540.615**	
			Total Kementerian :	**3.210.528.390.000**	**2.934.557.569.000**	**2.915.075.877.247**	**6.042.426.052**	**2.909.033.451.195**	**99,34**	**25.524.117.805**	

LAMPIRAN VI

IKHTISAR PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

LAMPIRAN VI

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

PER 31 DESEMBER 2021

No		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah
1	Nama PLN	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
2	Pemberi Pinjaman	The World Bank		
3	Nama Proyek	Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project		
4	*Loan ID*	8941-ID		
5	No. Register	1CZ6CF2A		
6	*Date Sign*	30 Januari 2020		
7	*Date Effective*	19 Februari 2020		
8	*Closing Date*	31 Desember 2024		
9	*Loan Amount*	40,000,000,000		40,000,000,000
10	*Disbursement* s.d. 2021	-		-
11	*Disbursement* pada tahun 2021	-		-
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)	34,048,360,462		34,048,360,462
	a. Belanja Pegawai	-		-
	b. Belanja Barang	34,048,360,462		34,048,360,462
	c. Belanja Modal	-		-
	d. Belanja Bansos	-		-
13	Neraca (Rupiah)	-		-
	a. Aset Lancar	-		-
	b. Aset Tetap	-		-
	c. Aset Lainnya	-		-
	d. Kewajiban	-		-
14	*Executing Agency*	Kementerian Dalam Negeri		
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)			

Kepala Bagian Keuangan,

Ratnawati, S.P., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19741113 200312 2 002

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI

PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

PER 31 DESEMBER 2021

No		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah
1	Nama PLN	Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Desa		
2	Pemberi Pinjaman	The World Bank		
3	Nama Proyek	Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low-Income Communities / Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)		
4	*Loan ID*	8578-ID		
5	No. Register	2B7K43PA		
6	*Date Sign*	30 Juni 2016		
7	*Date Effective*	22 Agustus 2016		
8	*Closing Date*	31 Desember 2021		
9	*Loan Amount*	8,518,781,000		8,518,781,000
10	*Disbursement* s.d. 2021	-		-
11	*Disbursement* pada tahun 2021	-		-
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)	7,668,369,791		7,668,369,791
	a. Belanja Pegawai	-		-
	b. Belanja Barang	7,668,369,791		7,668,369,791
	c. Belanja Modal	-		-
	d. Belanja Bansos	-		-
13	Neraca (Rupiah)	-		-
	a. Aset Lancar	-		-
	b. Aset Tetap	-		-
	c. Aset Lainnya	-		-
	d. Kewajiban	-		-
14	*Executing Agency*	Kementerian Dalam Negeri		
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)			

Kepala Bagian Keuangan,

Ratnawati, S.P., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19741113 200312 2 002

LAMPIRAN IV
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan : S-9861/PB/2018
Nomor : 28 Desember 2018
Tanggal

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

NO.		LK PLN 1	LK PLN 2	LK PLN 3	LK PLN 4	LK PLN 5	LK PLN 6	LK PLN 7	Jumlah
1	Nama PHLN	Asean Development Bank-Ordinary Fund	Asean Development Bank-Ordinary Fund	Startegic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)	National Affordable Housing Program	National Urban Supply Water Project	National Urban Development Project	
2	Pemberi Pinjaman	ADB	ADB	IBRD dan AIIB	IBRD	IBRD	IBRD	IBRD	
3	Nama Proyek	Flood Management In Selected River Basins (FMSRB)	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	SIMURP	ISWMP	NAHP	NUSWP	NUDP	
4	Loan ID	3440-INO	3529-INO dan 8327-INO (AIF)	IBRD No. 8891-ID dan AIIB No. L0060A	IBRD No. 9021-ID	IBRD LOAN No. 8717-ID	IBRD LOAN No. 8872-ID	IBRD LOAN No. 8967-ID	
5	No. Register	1RUX78CA	1Z83YQPA dan 11DDKS1A	1NF3PM6A dan 1HS4NF9A	1HFQ7GNA	1HG72SWA	1CPUK3GA	1PF7SCLA	
6	Data Sign	2 Nopember 2016	31 Juli 2017	IBRD 25 Juli 2018 dan AIIB 11 Juli 2018	6 Januari 2020	30 November 2017	20 Agustus 2018	15 November 2019	
7	Data Effective	9 Desember 2016	8 September 2017	25 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018	3 April 2020	24 Januari 2018	20 Agustus 2018	25 November 2019	
8	Closing Date	30 Juni 2023	30 Juni 2023	30 Juni 2024	30 November 2025	31 Maret 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2024	
9	Loan Amount	USD 108.700.000	USD 600.000.000	USD 250.000.000 dan USD 250.000.000	12.125.000.000	26.800.000.000	50.750.000.000	USD 49.600.000	
10	Disbursment s.d 2017	8.268.298.905	-			-	-		8.268.298.905
11	Disbursment s.d 2018	15.155.070.803	17.425.523.167			-	-		32.580.593.970
12	Disbursment s.d 2019	15.300.000.000	47.000.000.000	6.787.750.000		-	9.228.258.000		78.316.008.000
13	Disbursment s.d 2020	11.341.125.000	26.903.931.000	16.070.000.000		18.100.000.000	15.007.500.000	5.855.810.000	93.278.366.000
14	Disbursment s.d 2021	15.100.000.000	28.272.611.000	35.659.998.000	8.532.775.000	-	12.763.588.000	3.993.678.000	104.322.650.000
15	**Belanja Tahun 2021(Rupiah)**	**15.032.812.556**	**28.036.722.742**	**35.613.132.668**	**8.428.417.805**	**-**	**12.730.906.574**	**3.991.965.575**	**103.833.957.920**
	a. Belanja Pegawai					-	-		-
	b. Belanja Barang	15.032.812.556	28.036.722.742	35.613.132.668	8.428.417.805	-	12.730.906.574	3.991.965.575	103.833.957.920
	c. Belanja Modal	-							-
	d. Belanja Bansos								-
16	**Neraca (Rupiah)**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	a. Aset Lancar	-	-	-		-	-	-	-
	b. Aset Tetap	-	-	-		-	-	-	-
	c. Aset Lainnya	-	-	-		-	-	-	-
	d. Kewajiban								
16	Executing Agency	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditjen Cipta Karya Dit. Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR	
17	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAI	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	

Kepala Bagian Keuangan

Agianto Budiono, SE., M.AP
Pembina/IV/a
NIP. 19780713 200312 1 002

: S-9861/PB/2018
: 28 Desember 2018

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

NO.		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah
1	Nama PHLN	Investing in Nutrition and Early Years (INEY)	Second Additional Financing For Third Water Supply And Sanitation For Law-Income Comunities / Community Based Water Supply Project	
2	Pemberi Pinjaman	Bank Dunia (World Bank)	Bank Dunia (World Bank)	
3	Nama Proyek	INEY	PAMSIMAS III	
4	Loan ID	GFF Grant Number TF0A7565	Grant TF0A6336	
5	No. Register	278EATNA	2B7K43PA	
6	Data Sign	1 Agustus 2018	29 Januari 2019	
7	Data Effective	15 November 2018	29 Januari 2019	
8	Closing Date	31 Desember 2021	31 Desember 2021	
9	Loan Amount	54.000.000.000		
10	Disbursment s.d 2017			-
11	Disbursment s.d 2018			-
12	Disbursment s.d 2019	4.895.685.000		4.895.685.000
13	Disbursment s.d 2020	23.477.484.000	-	23.477.484.000
14	Disbursment s.d 2021	21.570.887.000	3.865.753.000	25.436.640.000
15	**Belanja Tahun 2021(Rupiah)**	**21.513.020.764**	**3.862.210.548**	**25.375.231.312**
	a. Belanja Pegawai			-
	b. Belanja Barang	21.513.020.764	3.862.210.548	25.375.231.312
	c. Belanja Modal			-
	d. Belanja Bansos			-
16	**Neraca (Rupiah)**	-	-	-
	a. Aset Lancar			-
	b. Aset Tetap			-
	c. Aset Lainnya			-
	d. Kewajiban			
15	Executing Agency	Sekretaris Wakil Presiden	Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	
16	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPKP	BPK	

Kepala Bagian Keuangan

Ananto Budiono, SE., M.AP
Pembina /IVa
NIP. 19780713 200312 1 002

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI

PADA DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

PER 31 DESEMBER 2021

No		LK HLN 1	Jumlah
1	Nama Hibah	*Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project*	
2	Pemberi Hibah	The World Bank	
3	Nama Proyek	*Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project*	
4	*Loan ID*	Grant No TF0B5420	
5	No. Register	2FPJR4SA	
6	*Date Sign*	18 Mei 2021	
7	*Date Effective*	18 Mei 2021	
8	*Closing Date*	30 Juni 2025	
9	*Loan Ammount*	Rp1.704.794.000	Rp 1.704.794.000
10	*Disbursement* s.d. 2020	Rp -	Rp -
11	*Disbursement* pada tahun 2021	Rp 771.865.390	Rp 771.865.390
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)	Rp 771.865.390	Rp 771.865.390
	a. Belanja Pegawai	Rp -	Rp -
	b. Belanja Barang	Rp 771.865.390	Rp 771.865.390
	c. Belanja Modal	Rp -	Rp -
	d. Belanja Bansos	Rp -	Rp -
13	Neraca (Rupiah)	Rp -	Rp -
	a. Aset Lancar		
	b. Aset Tetap		
	c. Aset Lainnya		
	d. Kewajiban		
14	*Executing Agency*	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)		

Kepala Bagian Keuangan

Andriyani, SE, M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780130 200212 2 001

LAMPIRAN VII

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN, SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER

Lampiran VII

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN, SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER

PER 31 DESEMBER 2021

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DES 2021	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DES 2021	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DES 2021	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DES 2021	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-	2.086.080.000	4.383.550.000	(2.297.470.000)	-	-	-
2	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	62.068.454	-	62.068.454	-	-	-	-	-	-	941.987	-	**941.987**
3	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	124.464.688	-	124.464.688	34.773.780	-	34.773.780	-	-	-	-	-	-
4	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.355.266	(58.355.266)
5	04	069084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	27.065.000	-	27.065.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	04	249136	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	18.500.000	(18.500.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	5.263.400	30.000.000	(24.736.600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	04	484164	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGGARA TIMUR	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	04	484170	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	425.961	-	425.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	05	039452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.867	(35.867)
11	05	259363	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.703	(2.703)
12	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.810	-	533.810
13	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.184.696	(124.184.696)
TOTAL					**231.287.503**	**48.500.000**	**182.787.503**	**34.773.780**	**-**	**34.773.780**	**2.086.080.000**	**4.383.550.000**	**(2.297.470.000)**	**1.475.797**	**182.578.532**	**(181.102.735)**

LAMPIRAN VIII

RINCIAN PENYETORAN KAS

LAMPIRAN VIII

RINCIAN PENYETORAN KAS

NO	KODE ES.I	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH	TANGGAL SETOR	NTPN	JUMLAH SETORAN	KETERANGAN
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN								
1	01	483005	DKPP	62.068.454	10-Jan-22	529250N9VHG4O08A	62.068.454	
2	01	677010	IPDN KAMPUS SULUT	159.238.468	07-Jan-22	CFE2A7QLU6360GO4	59.234.389	
					07-Jan-22	5EBE56U8EBGPGENR	34.770.000	
					09-Jan-22	4FD042G4V6KR1FSU	65.230.000	
					13-Jan-22	BE9CC8N3EOLNL3DP	4.079	
3	04	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	27.065.000	07-Jan-22	608A36UBEBGPG0E7	27.065.000	
4	04	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	5.263.400	06-Jan-22	716F42G4V6KQCGK0	5.263.400	
5	04	484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGGARA TIMUR	12.000.000	21-Feb-22	B64996QR9C4FCH5R	12.000.000	
6	04	484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	425.961	03-Jan-22	8FEB0N9VHFUDHDQ	425.961	
JUMLAH				**266.061.283**			**266.061.283**	
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN								
1	01	448302	IPDN JATINANGOR	2.086.080.000	07-Jan-22	AA86E55DEMBVN2P7	54.525.000	
							64.300.000	
							1.967.255.000	
JUMLAH				**2.086.080.000**			**2.086.080.000**	
KAS LAINNYA DAN SETARA KAS								
1	01	483005	DKPP	941.987	19-Jan-22	AFB9B55DEMCC7OJB	941.987	
2	06	039729	DITJEN BINA BANGDA	484.616	31-Mar-22	18A813CIF1DSBPLL	484.616	
				49.194				biaya administrasi penutupan rekening
JUMLAH				**1.475.797**			**1.426.603**	
TOTAL				**2.353.617.080**			**2.353.567.886**	

LAMPIRAN IX

RINCIAN DESA YANG BELUM MENYERAHKAN LAPORAN

LAMPIRAN IX

DESA YANG BELUM MENYERAHKAN LAPORAN PER 25 JANUARI 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN	LPJ	BAST	NOTA	BUKTI PAJAK	FOTO	KET DOKUMEN
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	v	v	v	v	-	Kurang bukti pajak
3	Lampung	Pesawaran	Tegineneng	Margorejo	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	-	v	v	v	v	Kurang LPJ
4	Kepulauan Riau	Karimun	Moro	Sugie	50.000.000	sudah dikirim tanggal 19 September 2020	v	v	v	-	v	Kurang bukti pajak
5	Maluku Utara	Kepulauan Morotai	Morotai Jaya	Toara	50.000.000	Berkas berupa softfile	v	v	v	-	v	Kurang bukti pajak
6	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrurwandi	50.000.000	Berkas sudah diterima berupa soft file, info dr bnpp bukti pajaknya tidak ada	v	v	v	-	v	Kurang bukti pajak
7	Papua	Supiori	Supiori Utara	Yamnaisu	50.000.000	Berkas berupa softfile	-	-	v	-	v	Kurang LPJ, BAST dan bukti pajak
8	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Kuler	50.000.000	Berkas berupa softfile	-	-	v	-	v	Kurang LPJ, BAST dan bukti pajak
9	Papua	Merauke	Naukkenjerai	Tomer	50.000.000	Berkas berupa softfile	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto

Mengetahui,
Kasubdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa,

Ratna Andriani, SH
NIP. 19650628 199103 2 001

LAMPIRAN X

PROGRES PENYELESAIAN DAN UMUR PIUTANG BUKAN PAJAK

LAMPIRAN X

PROGRES PENYELESAIAN DAN UMUR PIUTANG BUKAN PAJAK

Keterangan	Total Piutang	Nilai Pokok Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Status Penyelesaian (oleh Kemendagri/PUPN)	Tersedia Jaminan/Sita Jaminan (ya atau tidak)
		< 1 Tahun	1 tahun	2 Tahun	> 2 Tahun	Jumlah		
A. PIUTANG BUKAN PAJAK SETJEN PUSAT								
1.Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.981.708.946				1.981.708.946	1.981.708.946	Penyelesaian oleh Kemendagri. Dari saldo awal sebesar Rp3.481.708.946,00 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000.000,00 pada tahun 2021 sehingga tersisa saldo sebesar Rp1.981.708.946,00.	tidak
2.Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai	13.973.717		13.973.717			13.973.717	Telah dilakukan pelunasan atas piutang lainnya tersebut dengan penyetoran terakhir ke kas Negara per tanggal 28 Maret 2022	
TOTAL PIUTANG BUKAN PAJAK SETJEN PUSAT	**1.995.682.663**	**-**	**13.973.717**	**-**	**1.981.708.946**	**1.995.682.663**		
B. PIUTANG BUKAN PAJAK IPDN JATINANGOR								
1.PROGRAM MAGISTER								
Angkatan 17	242.650.000				242.650.000	242.650.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 18	386.850.000				386.850.000	386.850.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 19	168.150.000				168.150.000	168.150.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 20	276.950.000				276.950.000	276.950.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 21	887.225.000				887.225.000	887.225.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 22	448.275.000				448.275.000	448.275.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 23	862.650.000				862.650.000	862.650.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 24	277.375.000				277.375.000	277.375.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 25	436.250.000				436.250.000	436.250.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 26	687.000.000				687.000.000	687.000.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 27	320.750.000				320.750.000	320.750.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 28	469.500.000				469.500.000	469.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagrai (Dalam proses pelimpahan ke PUPN)	tidak
Angkatan 29	267.000.000		8.750.000	40.500.000	217.750.000	267.000.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 30	639.250.000	5.500.000			633.750.000	639.250.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 31 Gel 1	165.500.000	500.000		19.250.000	145.750.000	165.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 31 Gel 2	418.000.000	6.500.000	250.000	138.500.000	272.750.000	418.000.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 32	272.000.000	4.750.000		211.000.000	56.250.000	272.000.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 33 Gel 1	208.250.000	84.500.000	123.750.000			208.250.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 33 Gel 2	430.500.000	318.750.000	111.750.000			430.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 34	331.250.000	175.250.000	156.000.000			331.250.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 35	471.750.000	471.750.000				471.750.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 36	70.250.000	70.250.000				70.250.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Jumlah Program Magister	**8.737.375.000**	**1.137.750.000**	**400.500.000**	**409.250.000**	**6.789.875.000**	**8.737.375.000**		
2.PROGRAM DOKTOR								
Angkatan 1	571.000.000			122.500.000	448.500.000	571.000.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 2	424.000.000			101.000.000	323.000.000	424.000.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 3	629.250.000	117.500.000	185.500.000	25.250.000	301.000.000	629.250.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 4 Gel 1	1.086.050.000	15.500.000	148.750.000	334.550.000	587.250.000	1.086.050.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 4 Gel 2	52.750.000	14.750.000			38.000.000	52.750.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak

Keterangan	Total Piutang	Nilai Pokok Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Status Penyelesaian (oleh Kemendagri/PUPN)	Tersedia Jaminan/Sita Jaminan (ya atau tidak)
		< 1 Tahun	1 tahun	2 Tahun	> 2 Tahun	Jumlah		
Angkatan 5 Gel 1	418.743.000	43.750.000	50.750.000	131.000.000	193.243.000	418.743.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 5 Gel 2	103.500.000			34.750.000	68.750.000	103.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 6	464.500.000	8.250.000	193.250.000	263.000.000		464.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 7 gel 1	167.500.000		127.750.000		39.750.000	167.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 7 Gel 2	246.500.000		246.500.000			246.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 8	748.500.000	335.000.000	413.500.000			748.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagri (Surat Penagihan)	tidak
Angkatan 9	-					-		
Angkatan 10						-		
Jumlah Program Doktor	**4.912.293.000**	**534.750.000**	**1.366.000.000**	**1.012.050.000**	**1.999.493.000**	**4.912.293.000**		
3.Pengembalian biaya pendidikan Praja yang diberhentikan	**900.312.819**				**900.312.819**	**900.312.819**	Penelusuran Alamat dan Surat Penagihan	tidak
TOTAL PIUTANG BUKAN PAJAK JATINANGOR	**14.549.980.819**	**1.672.500.000**	**1.766.500.000**	**1.421.300.000**	**9.689.680.819**	**14.549.980.819**		
TOTAL PIUTANG BUKAN PAJAK	**16.545.663.482**	**1.672.500.000**	**1.780.473.717**	**1.421.300.000**	**11.671.389.765**	**16.545.663.482**		

LAMPIRAN XI

PROGRES PENYELESAIAN PAJAK DAN UMUR BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

LAMPIRAN XI

PROGRES PENYELESAIAN PAJAK DAN UMUR BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Nama Satker	Total Piutang	Nilai Pokok Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Status Penyelesaian (oleh Kemendagri/PUPN)	Tersedia Jaminan/Sita Jaminan (ya atau tidak)
		< 1 Tahun	1 tahun	2 Tahun	> 2 Tahun	Jumlah		
A. BAGIAN LANCAR TP								
1. ITJEN	492.890.339	-	-	-	492.890.339	492.890.339	Telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Kemendagri telah mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan piutang negara bersyarat melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 953/6675/SJ tanggal 30 November 2021 hal Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara Bersyarat yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Utama Binbangkum PKN BPK RI	tidak
TOTAL BAGIAN LANCAR TP	**492.890.339**	**-**	**-**	**-**	**492.890.339**	**492.890.339**		
A. BAGIAN LANCAR TGR								
1. DKPP	590.188.232	590.188.232	-	-	-	590.188.232	Penyelesaian oleh Kemendagri	tidak
2.DITJEN POLPUM	17.850.089.235	-	-	-	17.850.089.235	17.850.089.235	Telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN	ada (sebidang tanah sesuai SHM No.580/Sukabumi Utara seluas 684m2
3.DITJEN BINA KEUDA	10.500.000	10.500.000	-	-	-	10.500.000	Penyelesaian oleh Kemendagri	tidak
TOTAL BAGIAN LANCAR TGR	**18.450.777.467**	**600.688.232**	**-**	**-**	**17.850.089.235**	**18.450.777.467**		
TOTAL BAGIAN LANCAR TP/TGR	**18.943.667.806**	**600.688.232**	**-**	**-**	**18.342.979.574**	**18.943.667.806**		

LAMPIRAN XII

RINCIAN PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MENURUT JENIS TRANSAKSI

Lampiran XII

RINCIAN PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MENURUT JENIS TRANSAKSI

SELAMA PERIODE 1 JANUARI 2021 S.D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Barang Persediaan	Akun Persediaan		Saldo per 31 Desember 2021	
				Kode Akun	Uraian Akun	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
I	Pembelian Menggunakan Akun Belanja Barang Persediaaan - Penanganan Pandemi Covid-19						
1	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Rapid Test Antigen	117119	Persediaan lainnya	5250 Buah	622.125.000
2	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	Apron Medis @30 Pcs	117119	Persediaan lainnya	50 Box	15.400.000
			Vitamin C @ 30 Kapsul	117120	Persediaan lainnya	93 Tablet	5.626.500
			Vitamin E 100 Ui @30 Kapsul	117121	Persediaan lainnya	93 Box	4.092.000
			Hand Sanitizer	117122	Persediaan lainnya	69 Galon	25.274.700
			Baju Hazmat	117123	Persediaan lainnya	222 Pcs	33.333.300
3	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	Hand Sanitizer 60 ml Spray Lemon (Covid)	117199	Persediaan Lainnya	254 Botol	2.933.700
			Hand Sanitizer 7 L Lemon Imoq (Covid)	117199	Persediaan Lainnya	2 Jerigen	400.000
			Masker KF 94 4 PLY W IMOQ	117199	Persediaan Lainnya	33 Box	1.386.000
			Hensanitizer	117199	Persediaan Lainnya	3 Ken	450.000
4	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	Antis Liquid Spray 55 Ml	117199	Persediaan Lainnya	3 Botol	39.300
			Antis Liquid Refill 5 L	117199	Persediaan Lainnya	11 Botol	3.850.000
			Face Shield	117199	Persediaan Lainnya	16 Pcs	93.504
			APD Level 2 (gown)	117199	Persediaan Lainnya	1 Unit	175.000
			APD Level 3 (Hazmat)	117199	Persediaan Lainnya	5 Unit	2.300.000
			Baymed Masker Earloop Box@50	117199	Persediaan Lainnya	219 Box	9.855.000
			Serenity masker Hijab Box @50	117199	Persediaan Lainnya	49 Box	2.900.800
			Masker	117199	Persediaan Lainnya	41 Box	6.678.504
			Becefort	117199	Persediaan Lainnya	5 pcs	678.000
			Enervon - C	117199	Persediaan Lainnya	241 pcs	8.386.800
5	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	- ALLERIN SYRUP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	9 Botol	121.080
			- BIOLYSIN SIRUP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	13 Botol	169.000
			- BUFANTACID_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	21 Botol	449.000
			- CITOCETINE SYRUP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	3 Botol	33.000
			- COHISTAN_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	15 Botol	244.500
			- DEXMOLEX SYRUP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	50 Botol	515.000
			- OBH SURYA_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	166 Botol	1.826.000
			- OBP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	120 Botol	1.368.000
			- STIMUNO SIRUP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	27 Botol	664.200
			- TEMPRA SIRUP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	17 Botol	702.100
			- NACL_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	96 Botol	1.339.776
			- ALLERON_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	260 Tablet	39.000
			- AMBROXOL 30 MG_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	330 Tablet	66.000
			- AMLODIPINE 5 MG_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	140 Tablet	196.000
			- ANALSIK_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	140 Tablet	279.020
			- AZITHROMYCIN_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	3663 Tablet	7.025.000
			- DEXTAMINE_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	200 Kaplet	460.000
			- DOLONEUROBION_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	350 Tablet	630.000
			- FARSIFEN 200 MG_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	170 Tablet	85.000
			- GRAFACHLOR_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	1170 Kaplet	468.000
			- GRATAZONE_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	800 Kaplet	240.000
			- GUANISTREP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	14 Botol	232.400
			- MEFINAL_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	180 Tablet	324.000
			- METHYL PREDNISOLONE_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	60 Tablet	36.000
			- PARACETAMOL_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	4400 Tablet	880.000
			- POLYCROL_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	550 Tablet	302.500
			- SP TROCHES_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	462 Tablet	415.800
			- THERAGRAN M_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	220 Tablet	1.100.000
			- TREMENZA_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	130 Tablet	247.000
			- XEPAZYM_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	290 Tablet	870.000
			- C-MAX_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	229 Tablet	1.179.100
			- SANTA E_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	290 Tablet	1.000.500
			- SURBEX T_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	146 Tablet	400.000
			- ZINC_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	654 Tablet	1.063.000
			- HD 5000 VIT D_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	580 Tablet	2.655.240
			- HP PRO_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	360 Kapsul	2.412.000
			- IMBOOST_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	380 Kaplet	1.596.000
			- LANSOPRAZOLE_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	370 Kapsul	666.000
			- SANGOBION_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	130 Kapsul	162.500
			- SPUIT 10 CC_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	208 Buah	568.000
			- BACTODERM SALP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	10 Tube	800.000
			- BETADINE_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	11 Botol	154.000
			- BODREX MIGRAN_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	230 Tablet	115.000
			- CENDO TROBOSON_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	Minidose	3.612.000
			- CENDOLYTEERS_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	77 Minidose	3.303.300
			- CLINOVIR SALEP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	6 Tube	273.600
			- CONVEX MASK SENSI_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	9 Box	1.530.000
			- DIPROSALIC CREAM_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	9 Tube	815.400
			- FLUMUCIL_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	110 Tablet	869.000
			- KENACORD_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	190 Tablet	1.064.000
			- KENALOG IN ORABASE_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	14 Tube	952.000
			- MASKER DUCKBILL SENSI_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	5 Box	700.000
			- NEUROBION_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	550 Tablet	990.000
			- OTOPAIN_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	5 Botol	415.000
			- SAGESTAM_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	9 Tube	148.500
			- TROMBOPHOP_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	4 Tube	268.000
			- VOLTAREN EMULGEL_UMUM COVID	117199	Persediaan Lainnya	3 Tube	204.120
7	621892	Ditjen Otonomi Daerah	Alat Rapid Test	117199	Persediaan Lainnya	23	4.554.000

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Barang Persediaan	Akun Persediaan		Saldo per 31 Desember 2021	
				Kode Akun	Uraian Akun	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
6	662766	Ditjen Bina Keuda	Masker N95	117111	Barang Konsumsi	6 box	3.366.000
			Refil Sanitizer	117111	Barang Konsumsi	7 galon	2.800.000
			Masker KF94	117111	Barang Konsumsi	7 box	395.200
			Masker Duckbil	117111	Barang Konsumsi	14 box	2.662.000
			Masker Tomo	117111	Barang Konsumsi	4 pcs	792.000
			Filter Karbon Masler Tomo	117111	Barang Konsumsi	4 pack	682.000
			Handsanitizer Logo Kemendagri	117111	Barang Konsumsi	223 botol	2.600.180
			Plastik Uk. 5 Kg	117111	Barang Konsumsi	2 pack	133.100
8	506138	Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Masker	117111	Barang Konsumsi	210 kotak	37.422.000
			Hand Sanitizer	117111	Barang Konsumsi	560 Botol	6.776.000
			Vitamin E	117199	Persediaan Lainnya	70 Botol	3.234.000
			Vitamin C	117199	Persediaan Lainnya	140 Botol	9.471.000
			Susu Bearbrand	117111	Barang Konsumsi	70 krat	33.110.000
			Madu	117199	Persediaan Lainnya	70 botol	17.325.000
			Refill Hand Sanitizer	117111	Barang Konsumsi	4 drigen	1.452.000
			Sarung Tangan Latex	117111	Barang Konsumsi	5 doos	730.000
					Subtotal		**922.726.224**
II		**HIBAH MASUK**					
1	403200	Sekretariat Jenderal	Paket sembako (beras 5kg, minyak goreng 1 liter, mie gelas 20 bks)	117111	Barang konsumsi	2.000 paket sembako	260.000.000
			Masker Surgical 3 Ply	117111	Barang konsumsi	500.000 Pcs	442.500.000
					Subtotal		***702.500.000***
					Jumlah		**1.625.226.224**

LAMPIRAN XIII

REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN

Lampiran XIII

REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	AKUN PERSEDIAAN												SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2021
					117111	117113	117114	117122	117124	117125	117126	117127	117128	117129	117131	117191	117199	
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	52.440.960	46.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.853.000	-	192.434.770	298.027.730
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	546.490.693	59.741.880	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.014.044.993	2.634.277.566
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	286.565.700	102.009.600	7.326.400	-	-	-	-	-	-	-	236.201.309	17.641.000	948.394.002	1.598.138.011
4	01	483005	KD	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	109.454.669	29.430.500	2.910.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.795.669
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	9.020.000	-	3.028.000	-	-	-	-	-	-	-	5.495.500	-	135.441.310	152.984.810
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	21.364.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.869.374	23.234.274
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	41.640.137	220.800	19.004.990	-	-	-	-	-	-	-	6.648.600	-	296.820.337	364.334.864
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	15.422.904	6.073.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.127.603	82.624.103
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	4.308.194	982.750	-	-	-	-	-	-	-	-	351.000	-	86.436.163	92.078.107
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	81.998.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.000	-	79.320.285	161.417.539
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	206.861.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.302.630	209.164.441
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	55.382.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.382.600
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	5.500.000	-	-	18.867.673.278	2.748.274.540	3.177.105.294	-	1.395.007.844	-	-	-	-	-	26.193.560.956
14	04	160552	TP	BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	-	-	-	1.832.190.000	-			-	-	-	-	-	-	1.832.190.000
15	04	419079	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	-	-	-	715.524.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.524.000
16	04	433344	TP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	-	-	-	-	19.881.818	-	-	-	-	-	-	-	-	19.881.818
17	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	87.362.073	-	-	-	-	-	-	14.641.890.995	-	-	-	-	31.256.205	14.760.509.273
18	05	028449	KD	BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YOGYAKARTA	2.436.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684.200	4.120.250
19	05	613629	KD	BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LAMPUNG	5.996.720	181.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.178.120
20	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	331.604.407	3.750.000	6.398.700	2.812.288.688	-	-	446.822.000	188.380.831.712	-	67.670.350	428.000	-	83.961.526	192.133.755.383
21	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	243.816.460	4.146.000	-	-	5.502.668	8.418.081.384	-	2.514.112.994	-	-	-	-	4.554.000	11.190.213.506
22	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.128.478.260	75.195.000	-	-	-	-	-	15.262.522.770	6.753.780.000	-	-	-	-	24.219.976.030
23	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	30.867.384	4.665.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.532.384
24	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.041.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.000	-	48.205.462	59.531.787
25	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	272.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508.500	4.781.200
26	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	1.265.700	556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	172.000	-	-	1.993.700
27	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	122.064.375	1.971.200	1.871.348	-	-	-	-	-	-	-	38.014	-	50.388.387	176.333.324
28	12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	49.102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.102.000
29	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	79.490.000	-		-			-	-	-	-	-	-	30.030.000	109.520.000
JUMLAH					**4.530.248.276**	**335.222.726**	**54.539.938**	**24.227.675.966**	**2.773.659.026**	**11.595.186.678**	**446.822.000**	**222.194.366.315**	**6.753.780.000**	**67.670.350**	**256.571.423**	**17.641.000**	**4.072.779.747**	**277.326.163.445**

LAMPIRAN XIV

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

LAMPIRAN XIV

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Setjen	Itjen	Ditjen Polpum	Ditjen BAK	Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Bangda	Ditjen Otda	Ditjen Dukcapil	Ditjen Bina Keuda	Badan Litbang	BPSDM	TOTAL
Saldo 31 Desember 2020		**7.856.637.508**	**427.659.431**	**54.244.800**	**25.375.566.070**	**15.552.368.670**	**223.927.482.471**	**16.650.053.547**	**108.717.306.663**	**34.212.411**	**258.063.531**	**931.098.935**	**399.784.694.037**
Pembelian	M02	15.989.208.006	194.998.595	432.229.400	6.349.156.890	2.692.908.022	1.128.482.960	1.459.915.230	173.979.589.769	804.199.800	124.548.316	2.054.096.769	205.209.333.757
Transfer Masuk	M03	-	-	-	23.449.827.140	14.722.362.945	191.707.612.750	10.937.697.046	-	-	-	-	240.817.499.881
Hibah Masuk	M04	737.493.969	-	-	1.295.755.166	-	-	-	-	-	-	-	2.033.249.135
Reklas Masuk	M07	-	-	-	2.547.714.000	-	-	-	-	-	-	-	2.547.714.000
Koreksi Masuk (LO)	M92	1.400.000	-	-	-	283.800	-	-	-	-	-	-	1.683.800
Hasil Opname Fisik Kurang	P02	45.966.499	-	-	-	-	31.614.435	-	-	78.000	-	689.000	78.347.934
Mutasi Tambah		**16.774.068.474**	**194.998.595**	**432.229.400**	**33.642.453.196**	**17.415.554.767**	**192.867.710.145**	**12.397.612.276**	**173.979.589.769**	**804.277.800**	**124.548.316**	**2.054.785.769**	**450.687.828.507**
Pemakaian	K01	(14.723.729.026)	(413.493.585)	(431.091.600)	(2.001.998.082)	(1.587.064.197)	(1.136.750.028)	(802.954.430)	(6.813.682.651)	(802.957.827)	(323.080.060)	(2.644.154.480)	(31.680.955.966)
Transfer Keluar	K02	-	-	-	(23.449.827.140)	(14.722.362.945)	(191.707.612.750)	(10.937.697.046)	-	-	-	-	(240.817.499.881)
Hibah Keluar	K03	-	-	-	-	-	-	-	(4.689.933.973)	-	-	-	(4.689.933.973)
Barang Usang	K04	(6.514.431)	-	-	-	-	-	-	(254.848.000)	-	-	-	(261.362.431)
Barang Rusak	K05	(20.837.270)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.837.270)
Penghapusan Lainnya	K06	-	-	-	-	-	-	-	(63.747.000)	-	-	-	(63.747.000)
Penyerahan Kepada Masyarakat	K09	-	-	-	(2.257.323.270)	(1.884.267.589)	(31.797.054.300)	(5.551.670.361)	(199.000.640.778)	-	-	-	(240.490.956.298)
Reklas Keluar	K10	-	-	-	(2.547.714.000)	-	-	-	-	-	-	-	(2.547.714.000)
Koreksi Keluar (LO)	K92	(120.287.300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120.287.300)
Hasil Opname Fisik Lebih	P01	(4.210.425.282)	-	-	-	(3.421.063)	(20.020.155)	(565.130.480)	(47.654.068.000)	-	-	-	(52.453.064.980)
Mutasi Kurang		**(19.081.793.309)**	**(413.493.585)**	**(431.091.600)**	**(30.256.862.492)**	**(18.197.115.794)**	**(224.661.437.233)**	**(17.857.452.317)**	**(258.476.920.402)**	**(802.957.827)**	**(323.080.060)**	**(2.644.154.480)**	**(573.146.359.099)**
Saldo 31 Desember 2021		**5.548.912.673**	**209.164.441**	**55.382.600**	**28.761.156.774**	**14.770.807.643**	**192.133.755.383**	**11.190.213.506**	**24.219.976.030**	**35.532.384**	**59.531.787**	**341.730.224**	**277.326.163.445**

LAMPIRAN XV

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

LAMPIRAN XV

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Barang Konsumsi (117111)	Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	Suku Cadang (117114)	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117124)	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (117126)	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (117128)	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)	Bahan Baku (117131)	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (117191)	Persediaan Lainnya (117199)	TOTAL
Saldo 31 Desember 2020		9.550.663.297	672.230.496	131.541.564	26.118.716.216	1.188.832.320	16.139.868.038	816.890.000	265.948.023.662	71.946.226.000	67.670.350	130.838.493	29.004.250	7.044.189.351	**399.784.694.037**
Pembelian	M02	17.446.522.362	2.218.138.964	226.399.114	-	2.058.357.868	-	-	381.697.800	167.694.433.213	2.547.714.000	2.605.390.203	29.499.900	10.001.180.333	205.209.333.757
Transfer Masuk	M03	80.471.950	-	-	21.679.961.966	15.543.392	11.595.186.678	446.822.000	206.931.843.545	-	67.670.350	-	-	-	240.817.499.881
Hibah (Masuk)	M04	736.704.833	789.136	-	-	1.295.755.166	-	-	-	-	-	-	-	-	2.033.249.135
Reklas Masuk	M07	-	-	-	2.547.714.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.547.714.000
Koreksi Masuk (LO)	M92	283.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	1.683.800
Hasil Opname Fisik Kurang	P02	48.753.090	103.500	-	-	-	-	-	-	-	-	3.426.500	-	26.064.844	78.347.934
Mutasi Tambah		**18.312.736.035**	**2.219.031.600**	**226.399.114**	**24.227.675.966**	**3.369.656.426**	**11.595.186.678**	**446.822.000**	**207.313.541.345**	**167.694.433.213**	**2.615.384.350**	**2.608.816.703**	**29.499.900**	**10.028.645.177**	**450.687.828.507**
Pemakaian	K01	(17.442.631.540)	(2.555.157.520)	(302.983.290)	-	-	-	-	-	-	-	(794.543.263)	-	(10.585.640.353)	(31.680.955.966)
Transfer Keluar	K02	(80.471.950)	-	-	(21.679.961.966)	(15.543.392)	(11.595.186.678)	(446.822.000)	(206.931.843.545)	-	(67.670.350)	-	-	-	(240.817.499.881)
Hibah Keluar	K03	(4.689.933.973)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.689.933.973)
Barang Usang	K04	(254.848.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.514.431)	(261.362.431)
Barang Rusak	K05	(20.837.270)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.837.270)
Penghapusan Lainnya	K06	(63.747.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63.747.000)
Penyerahan Kepada Masyarakat	K09	-	-	-	(4.438.754.250)	(1.769.286.328)	(4.544.681.360)	(370.068.000)	(44.135.355.147)	(185.232.811.213)	-	-	-	-	(240.490.956.298)
Reklas Keluar	K10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.547.714.000)	-	-	-	(2.547.714.000)
Koreksi Keluar (LO)	K92	(348.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.370.000)	-	(118.569.300)	(120.287.300)
Hasil Opname Fisik Lebih	P01	(780.333.323)	(881.850)	(417.450)	-	-	-	-	-	(47.654.068.000)	-	(1.687.170.510)	(40.863.150)	(2.289.330.697)	(52.453.064.980)
Mutasi Kurang		**(23.333.151.056)**	**(2.556.039.370)**	**(303.400.740)**	**(26.118.716.216)**	**(1.784.829.720)**	**(16.139.868.038)**	**(816.890.000)**	**(251.067.198.692)**	**(232.886.879.213)**	**(2.615.384.350)**	**(2.483.083.773)**	**(40.863.150)**	**(13.000.054.781)**	**(573.146.359.099)**
Saldo 31 Desember 2021		**4.530.248.276**	**335.222.726**	**54.539.938**	**24.227.675.966**	**2.773.659.026**	**11.595.186.678**	**446.822.000**	**222.194.366.315**	**6.753.780.000**	**67.670.350**	**256.571.423**	**17.641.000**	**4.072.779.747**	**277.326.163.445**

LAMPIRAN XVI

RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XVI

RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	PEMDES	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7
Saldo per 31 Desember 2020	**Saldo per 31 Desember 2020**	**10.184.776.069.000**	**142.267.725.000**	**613.234.134.493**	**239.998.196.000**	**803.613.615.000**	**11.983.889.739.493**
Transfer masuk	102					198.386.414.000	198.386.414.000
Hibah Masuk	103	11.736.360.000					11.736.360.000
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**11.736.360.000**	**-**	**-**	**-**	**198.386.414.000**	**210.122.774.000**
Transfer Keluar	302					(198.386.414.000)	(198.386.414.000)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(198.386.414.000)**	**(198.386.414.000)**
Saldo per 31 Desember 2021	**Saldo per 31 Desember 2021**	**10.196.512.429.000**	**142.267.725.000**	**613.234.134.493**	**239.998.196.000**	**803.613.615.000**	**11.995.626.099.493**

LAMPIRAN XVII

REKAPITULASI SALDO ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN PER SATUAN KERJA

Lampiran XVII

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2021

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN DAN JEMBATAN	IRIGASI	JARINGAN	ASET TETAP RENOVASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	AKUMULASI PERLATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	2.577.683.998.000	17.593.892.529	86.548.228.222	2.611.678.000	2.160.986.040	118.693.752	-	1.387.328.946	-	(15.518.124.268)	(18.211.951.668)	(2.611.678.000)	(646.252.462)	(44.706.318)	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	2.455.341.431.000	379.715.285.145	539.957.772.086	1.509.921.950	-	23.203.007.515	660.386.984	1.278.587.938	3.374.341.895	(303.395.442.473)	(56.646.500.941)	(601.869.734)	-	(11.229.825.505)	(178.498.391)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	4.782.129.497.000	130.788.548.445	434.970.338.556	6.412.720.000	3.962.625.000	7.972.557.500	-	10.084.183.021	30.598.392.120	(111.608.491.850)	(62.703.450.207)	(3.275.453.528)	(1.123.439.055)	(6.901.494.958)	(3.067.537.013)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	-	4.208.277.060	-	-	-	-	-	-	-	(1.333.454.204)	-	-	-	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29.609.419.000	18.106.631.626	100.476.750.975	4.792.195.000	202.033.000	15.439.902.461	-	2.314.510.500	-	(17.837.526.369)	(9.878.960.096)	(2.396.097.502)	(25.254.126)	(4.445.127.487)	(1.384.260.125)
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	-	31.235.161.545	183.898.075.000	3.543.287.000	201.896.000	14.647.395.453	-	2.042.041.200	-	(30.982.915.990)	(18.513.319.832)	(1.594.479.150)	(26.721.531)	(4.615.980.591)	(1.001.261.000)
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	-	29.683.047.479	122.700.227.700	7.971.764.000	388.102.000	14.895.342.304	-	2.500.944.110	-	(28.730.384.058)	(13.418.458.586)	(5.124.705.428)	(118.262.055)	(5.151.614.575)	(1.186.642.240)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	120.548.358.000	15.219.950.828	178.628.725.475	11.922.873.120	2.303.062.616	7.449.699.636	55.581.858	2.049.129.090	25.326.371.979	(9.614.377.148)	(10.064.494.581)	(2.980.718.281)	(344.268.226)	(679.195.465)	(1.006.441.750)
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	231.199.726.000	37.302.695.928	134.862.787.820	8.086.188.000	29.756.933.000	28.159.224.989	-	2.155.321.815	-	(36.586.489.848)	(12.583.758.477)	(3.898.696.602)	(15.005.948.803)	(10.439.558.442)	(1.069.779.440)
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	49.902.545.559	192.638.501.932	4.101.699.325	49.942.712	25.705.464.617	-	1.161.876.215	-	(49.185.843.956)	(16.913.688.976)	(1.671.578.540)	(3.495.989)	(5.266.815.695)	(377.293.000)
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	142.267.725.000	17.917.747.057	43.771.988.160	-	-	-	-	61.327.996	-	(13.139.761.460)	(5.610.373.575)	-	-	-	-
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	-	14.567.219.380	-	-	-	-	-	-	-	(11.978.841.519)	-	-	-	-	-
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	124.782.660.771	1.576.390.000	-	-	11.245.442.670	-	17.686.224.808	-	(114.288.264.556)	(161.548.900)	-	-	(3.233.061.846)	-
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	483.090.835.000	77.075.524.152	112.053.012.385	637.667.000	17.967.000	1.369.558.074	-	403.768.620	-	(68.900.560.877)	(19.986.558.205)	(637.667.000)	(3.109.671)	(709.017.238)	(219.262.450)
15	05	028449	KD	BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YOGYAKARTA	34.042.849.000	9.623.717.076	39.749.669.000	-	-	526.026.800	-	13.320.000	-	(8.799.764.840)	(4.121.473.689)	-	-	(237.903.070)	(7.375.000)
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG	62.457.627.000	6.138.579.731	23.039.415.000	-	-	-	-	69.892.000	-	(5.703.379.308)	(3.471.892.489)	-	-	-	(14.800.000)
17	05	613629	KP	BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LAMPUNG	33.642.823.493	3.367.047.990	9.131.097.000	308.907.000	-	198.734.000	-	73.365.000	-	(2.879.613.408)	(998.977.108)	(231.680.251)	-	(59.620.200)	-
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	63.905.384.834	102.260.423.904	1.327.878.000	1.572.044.000	807.674.890	-	4.951.568.889	-	(53.795.265.527)	(12.115.333.962)	(1.327.878.000)	(186.163.104)	(364.918.099)	-
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	51.689.114.532	-	-	-	489.387.520	84.567.861.119	15.827.000	-	(47.361.082.360)	-	-	-	(305.866.496)	(84.567.861.119)
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2.050.166.872.631	35.854.700.333	-	2.084.000	1.480.280.000	3.864.041.960	46.194.500	-	(1.874.207.096.744)	(3.098.554.348)	-	(868.332)	(536.601.500)	(419.899.750)
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	-	22.299.561.999	-	-	-	-	5.290.700	277.114.883	-	(19.618.849.431)	-	-	-	-	-
22	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	239.998.196.000	23.771.021.665	31.717.799.301	121.615.000	336.689.400	47.428.700	-	500.242.436	-	(17.765.855.400)	(5.466.320.617)	(54.726.750)	(37.877.558)	(15.414.325)	-
23	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	347.284.531.000	15.396.416.762	28.436.134.000	789.524.000	123.391.000	623.374.000	-	206.819.000	-	(11.963.882.833)	(6.804.186.166)	(789.524.000)	(18.041.139)	(153.610.513)	-
24	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	40.121.093.000	7.978.382.479	33.745.891.000	2.155.411.000	573.132.000	862.362.170	-	348.650.229	1.596.263.260	(6.022.062.845)	(3.741.021.015)	(2.155.411.000)	(251.545.777)	(194.332.827)	-
25	12	352588	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	-	6.129.686.896	98.366.965.000	3.053.191.000	2.714.597.000	1.811.782.159	-	-	-	(5.967.151.684)	(9.199.850.886)	(2.168.640.141)	(228.637.605)	(497.386.829)	-
26	12	403216	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL BANDUNG	105.961.577.000	16.532.561.570	42.662.541.000	2.264.045.000	193.060.000	1.657.662.471	-	587.930.500	-	(14.220.887.997)	(5.426.499.357)	(1.825.591.501)	(33.138.873)	(571.307.264)	-
27	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	66.049.736.244	151.696.212.211	-	33.753.000	4.631.768.475	-	1.374.064.025	318.987.650	(58.054.351.659)	(21.808.144.044)	-	(7.007.301)	(1.915.651.181)	(7.150.000)
28	12	506137	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL BUKIT TINGGI	111.860.000.000	12.239.322.320	45.694.108.407	2.046.567.537	587.061.000	1.921.508.468	-	289.207.750	-	(9.805.467.914)	(5.073.915.440)	(2.046.567.537)	(587.061.000)	(405.692.086)	(15.400.000)
29	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	198.386.414.000	15.906.335.645	15.282.624.584	1.756.797.564	1.231.749.000	-	-	147.427.500	-	(11.246.517.707)	(4.611.062.629)	(1.626.413.347)	(307.937.251)	-	-
JUMLAH					**11.995.626.099.493**	**3.319.292.929.878**	**2.789.720.379.051**	**65.413.929.496**	**46.411.107.768**	**165.264.278.624**	**89.153.162.621**	**52.026.867.971**	**61.214.356.904**	**(2.960.511.708.233)**	**(330.630.295.794)**	**(37.019.376.292)**	**(18.955.029.858)**	**(57.974.702.510)**	**(94.523.461.278)**

LAMPIRAN XVIII

RINCIAN ASET TETAP/ ASET LAINNYA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

LAMPIRAN XVIII

RINCIAN PEROLEHAN ASET TETAP/ASET LAINNYA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	ES 1	Kode Satker	Uraian Satker	Nama Barang (berupa Aset Tetap/Aset Lainnya)	Pencatatan Aset Tetap/Aset Lainnya pada Neraca							Tambahan Informasi untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya yang Berasal dari Transaksi Pembelian		
					Akun Neraca	Uraian Akun Neraca	Kode Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah Unit	Nilai Rupiah	Tahun Perolehan	Akun Belanja	Uraian Akun Belanja	Realisasi Belanja Netto
1	01	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	Body Screen Temperatur	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1 Unit	29.997.000	2020			
2	01	483005	DKPP	Alat Rumah Tangga Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		44.770.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	44.770.000
				Alat Rumah Tangga Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		59.400.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	59.400.000
				UV Sterilizer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		5.775.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	5.775.000
3	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	Disinfectant Chamber	132111	Peralatan dan Mesin	103	Hibah Masuk	2	16.000.000	2020			
				Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	132111	Peralatan dan Mesin	103	Hibah Masuk	5	5.500.000	2020			
				LAP TOP	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		627.965.800	2020			
				LAP TOP	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		3.693.670.200	2020			
				MOBIL AMBULANCE	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		3.128.400.000	2020			
				CLINICAL THERMOMETER (ALAT KEDOKTERAN UMUM)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		472.094.112	2020			
				CLINICAL THERMOMETER (ALAT KEDOKTERAN UMUM)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		29.505.888	2020			
				MOBIL UNIT KESEHATAN MASYARAKAT	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		3.674.000.000	2020			
				GENE AMP PER SYSTEM	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		3.080.000.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		849.200.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		20.900.000	2020			
				AUTOCLAVE (ALAT LABORATORIUM UMUM)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		8.690.000	2020			
				LEMARI ES	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		8.690.000	2020			
				PRINTER (ALAT PERSONAL KOMPUTER)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		6.490.000	2020			
				LAP TOP	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		51.040.000	2020			
				CCTV-CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		197.102.400	2020			
				CAMERA DIGITAL	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		70.565.000	2020			
				CAMERA VIDEO	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		44.825.000	2020			
				HANDY TALKY (HT)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		28.050.000	2020			
				HEAD SET	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		4.400.000	2020			
				LAP TOP	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		20.845.000	2020			
				ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		7.474.500	2020			
				ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		166.617.000	2020			
				ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		88.660.000	2020			
				ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		136.400.000	2020			
				UV STERILIZER	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		35.640.000	2020			
				UV STERILIZER	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		12.870.000	2020			
				UV STERILIZER	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		9.350.000	2020			
				UV STERILIZER	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		18.876.000	2020			
				CLINICAL THERMOMETER (ALAT KEODKTERAN UMUM)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		20.470.000	2020			
				CLINICAL THERMOMETER (ALAT KEODKTERAN UMUM)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		18.040.000	2020			
				LAMPU	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		143.220.000	2020			
				GENE AMP PER SYSTEM	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		760.100.000	2020			
				UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		31.350.000	2020			
				LEMARI ES	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		5.618.400	2020			
				LEMARI ES	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		3.740.000	2020			
				AUTOCLAVE (ALAT LABORATRIUM UMUM)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		43.450.000	2020			
				P.C UNIT	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		4.950.000	2020			
				PRINTER (PERALATAN PERSONAL COMPUTER)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		5.225.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		410.300.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		20.900.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		15.400.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		95.700.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		5.280.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		192.500.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		96.371.000	2020			
				ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		54.450.000	2020			
				Disinfectant Chamber	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	3	60.000.000	2020			
4	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Thermometer Infrared	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	22.500.000	2020			
				Thermometer Infrared	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	8	36.000.000	2020			
				Thermogun	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	100	195.000.000	2020			
				Thermogun	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	67	130.650.000	2020			
				Air Purifier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	75	172.050.000	2020			
				Laptop/Macbook	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	13	390.000.000	2020			
				Lampu anti virus	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	75	255.000.000	2020			
				Thermometer Infrared	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	7.500.000	2020			
				Lampu uv	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.450.000	2020			
				Air Purifier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	2.300.000	2020			
				Mapesen Thermal Camera	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	59.400.000	2020			
				Isuzu FVR 34S	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	2.019.955.000	2020			
				Freezer 100 Kubik	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.950.000	2020			
				Hepafilter Portable	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	9.500.000	2020			
				AUTOCIAVE	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.950.000	2020			
				Laptop	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	23.200.000	2020			
				Wireless Printer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	2.950.000	2020			
				Portable PCR Thermai	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	1.400.000.000	2020			
				Bio Safety Cabinete	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	386.000.000	2020			
				Mapesen Thermal Camera	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	118.800.000	2020			
				Alat Cuci Tangan/Wash Bashin dan Instalasi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	75	115.875.000	2020			
5	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	Alat Cek Suhu Tubuh (Imaging Thermal)	132111	Peralatan & Mesin	101	Pembelian	1	30.000.000	2020			
				Alat Cek Suhu Tubuh (Imaging Thermal)	132111	Peralatan & Mesin	101	Pembelian	1	30.000.000	2020			
6	01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	Tempat cuci tangan	132111	Peralatan dan mesin	101	Pembelian	16 buah	29.384.000	2020			
				Lampu UV	132111	Peralatan dan mesin	101	Pembelian	1 buah	7.000.000	2020			
				Thermographic Termal Imaging	132111	Peralatan dan mesin	101	Pembelian	1 buah	29.500.000	2020			
				Air Purifier	132111	Peralatan dan mesin	101	Pembelian	1 buah	2.175.000	2020			
7	01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	Pengadaan Wastafel	132111	Peralatan Dan Mesin	101	Pembelian	11 Unit	61.600.000	2020			
				Intelligent Temperature Checking System	132111	Peralatan Dan Mesin	101	Pembelian	1 Unit	30.000.000	2020			
8	01	677024	IPDN KAMPUS SULSEL	Intelegent Checking Temperature System	532119	Belanja Modal Peralatar	101	Pembelian	1	29.500.000	2020			
9	01	677045	IPDN KAMPUS SUMBAR	Pembelian Intelegent temperature checking system	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	29.997.000	2020			
10	02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	Lampu UVC Riva Tower2	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	12	137.739.250	2020			
				Intelligent Temperature	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	44.000.000	2020			
				Wastafel Sensor Otomatis	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	26.000.000	2020			
				Thermometer Hansanitiser	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	18.425.000	2020			
				Thermogun	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	2.875.000	2020			
11	03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Unit Sterilisasi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	40.000.000	2020			
				Infrared Thermometer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	6	63.525.000	2020			
				Infrared Thermometer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	16.500.000	2020			
				Notebook	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	103.600.000	2020			
				Tablet PC	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	26.200.000	2020			
				Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	6.000.000	2020			
				Printer (Peralatan Personal Komputer)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	9.100.000	2020			
				LCD Monitor	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	2.400.000	2020			
				Camera Digital	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	1.920.000	2020			
12	04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Alat Pengukur Suhu Badan Digital	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	75.900.000	2020			
				Air Purifier/Mesin Pembersih Udara	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	149.050.000	2020			
				Alat penyemprot Elektrik	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	44.000.000	2020			
				Bilik Sterilisasi dan cairan obat disinfektan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	58.300.000	2020			
				Lampu UV antivirus bakteri	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	7	23.100.000	2020			
				Alat Video Conference	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	7	194.370.000	2020			
				Smart UV Purication	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	178.200.000	2020			
13	05	027753	DITJEN BINA PEMDES	Bilik Desinfektan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	37.500.100	2020			
				Thermal Imaging Camera	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	108.900.000	2020			
				Lampu UV	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	34	115.005.000	2020			
				Air Purifier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	34	85.159.800	2020			
				Temperatur Digital	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	17.820.000	2020			
				Thermo Fog	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	38.500.000	2020			
14	05	028449	BALAI PEMDES YOGYAKARTA	Air Purlier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	11.250.000	2020			
				Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultra Violet	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.400.000	2020			
				Air Purlier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	22.500.000	2020			
				Termometer Standar	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	11.000.000	2020			
				Temperatur Digital	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	57.600.000	2020			
15	05	028830	BALAI PEMDES BESAR MALANG	UV Sterilizer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	8.250.000	2020			
				Temperature Sensor Set	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	55.000.000	2020			
				Air Cleaner	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	30	66.000.000	2020			
16	05	613629	BALAI PEMDES LAMPUNG	Air Cleaner	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	12.650.000	2020			
				Televisi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	8.000.000	2020			
				Bracket Standing Peralatan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.000.000	2020			
				Tripod Kamera	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	2.000.000	2020			
				Infrared Thermometer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	4.800.000	2020			
				Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultravlolet	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.450.000	2020			
				Thermal Imaging Camera	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	46.200.000	2020			
				Standing Face Thermometer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	44.000.000	2020			
				Bilik Disinfektan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	20.000.000	2020			
				Dispenser Electric Hand Sanitizer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	45.000.000	2020			
				Fogger Sprayer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	8	20.000.000	2020			

No	ES 1	Kode Satker	Uraian Satker	Nama Barang (berupa Aset Tetap/Aset Lainnya)	Pencatatan Aset Tetap/Aset Lainnya pada Neraca						Tambahan Informasi untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya yang Berasal dari Transaksi Pembelian			
					Akun Neraca	Uraian Akun Neraca	Kode Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah Unit	Nilai Rupiah	Tahun Perolehan	Akun Belanja	Uraian Akun Belanja	Realisasi Belanja Netto
17	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	Infrared Thermomether	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	18	25.390.000	2020			
				Lampu UV 2 Lampu UVC	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	55	188.100.000	2020			
				Lemari Steril UV	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	36.000.000	2020			
				Pembersih Udara (SHARP)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	55	138.600.000	2020			
				UVC Ray 3 Lampu	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	195.000.000	2020			
				Virus Killer Purification	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	56.000.000	2020			
				Laptop	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	27	535.936.500	2020			
18	07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	Smart TV, Video Conference dan Bracket	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	7	701.100.000	2020			
				Scanner	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	39.908.000	2020			
				Lampu UV-C	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	32	110.240.000	2020			
				Air Purifiee	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	20	50.400.000	2020			
				Termometer Gun	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	18.400.000	2020			
				Laptop	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	13	369.850.000	2020			
				Vacum Cleaner	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.751.000	2020			
				Alat Semprot Disinfectan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	6.600.000	2020			
				Mesin spirei	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	4.180.000	2020			
				Termogun Digital	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	15.125.000	2020			
				Box Sterilizer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	35	38.095.750	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	38.095.750
				Big Box Sterilizer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	5.700.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	5.700.000
				Disinfektan Fog Machine	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	14.500.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	14.500.000
19	08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	LapTop Legion i7 10750	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	3	69.300.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	69.300.000
				LapTop i7 1165G7 Iris Xe	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	105.875.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	105.875.000
				Termometer Standar	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	17.500.000	2020			
				Bilik Sterilisasi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	73.800.000	2020			
				Lampu UVC 60 watt	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	80	200.000.000	2020			
				LapTop Asus Zenbox UX325EA	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	8	176.000.000	2020			
				Air Purifier UV	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	75	176.250.000	2020			
				Alat Sterilisator	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.500.000	2020			
				Fogging Machine	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	2.530.000	2020			
				Fogging Machine	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	2.530.000	2020			
				LapTop Lenovo Flex 5 14 2in1 Touch i7	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	3	60.000.000	2020			
				Inteligent Temperature Checking System	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	100.000.000	2020			
				Oxi Meter Beurer (covid)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	10.000.000	2020			
				Printer M 107 A laser	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	7.000.000	2020			
				Lenovo Ideapad Slim 5i 14	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	3	60.000.000	2020			
				Printer warna multi fungsi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	4.250.000	2020			
				Lap Top Macbook Air 13.3 inci	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	26.379.390	2020			
				Apple Magic Mouse	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	1.500.000	2020			
20	09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	Sprayer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	5.250.000	2020			
				Infrared Thermometer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	24.000.000	2020			
				Sterilisator	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	35.673.000	2020			
				Ultra Violet Viewing Box	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	3	4.095.000	2020			
				Lampu Ultraviolet	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.800.000	2020			
				Alat Pembersih Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	12.375.000	2020			
				Ultraviolet Box	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	7	9.555.000	2020			
				UV Sterilizer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	12.980.000	2020			
				UV Sterilizer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.800.000	2020			
				Infrared Thermometer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	16.500.000	2020			
				Alat Pembersih Lainnya	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	3	7.500.000	2020			
				Lampu	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	6.800.000	2020			
				Ultraviolet Box	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	5.400.000	2020			
21	11	403222	BADAN LITBANG	Pengadaan Bilik Desinfektan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	40.000.000	2020			
				Pengadaan Termo Gun 2 Unit	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	9.000.000	2020			
				Alat Rumah TanggaLainnya(Home Use)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1 Paket	244.750.000	2020			
				Note Book Bersepek Tinggi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	6	170.658.950	2020			
				Alat Rumah TanggaLainnya(Home Use), Alat Pembersih Lainnya dan Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	88.825.000	2020			
				Scanner	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	28.270.000	2020			
				Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1 Paket	52.250.000	2020			
				Note Book	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	50	920.975.000	2020			
				UV Sterilisasi box	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	3	7.309.500	2020			
				Lampu UV Sterilisasi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	41.937.500	2020			
				Tabung O2	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	3	14.850.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	14.850.000
				Kursi Roda	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	2.200.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	2.200.000
22	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Bilik Sterilisasi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	13.970.000	2020			
				Thermogun	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	7	31.900.000	2020			
				Westafel Portabel	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	24.981.000	2020			
				Televisi Interaktif	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	47.500.000	2020			
				Laptop dan PC	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	6	123.255.000	2020			
				Air Purifier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	60	132.000.000	2020			
				Lampu Ultra Violet	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	35	113.575.000	2020			
				Karoseri Ambulance	132111	Peralatan dan Mesin	202	Pengembangan N	1	199.500.000	2020			
				Alat Pendukung Kesehatan pada Ambulance	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	123.633.922	2020			
				Ambulance	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	461.000.000	2020			
				Thermal Camera Solution	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	169.500.000	2020			
				Thermogun	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	5	8.250.000	2020			
				Inteligent Temperatur Checking System	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	174.999.990	2020			
				Mesin Hand Sanitizier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	10	199.100.000	2020			
23	12	403216	PPSDM REG.BANDUNG	Mobil Ambulance	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	944.000.000	2020			
				Alarm Remote	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.500.000	2020			
				lampu Keadaan darurat	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	4.200.000	2020			
				Led Flash Light	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	25.000.000	2020			
				lampu Belakang	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.900.000	2020			
				Lampu Samping Mobil	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.900.000	2020			
				Multi Sound sirine	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	9.950.000	2020			
				Logo Mobil	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	17.500.000	2020			
				Kaca Film	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	9.800.000	2020			
				Lampu Sorot	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.500.000	2020			
				Modifikasi Partisi Kabiun Depan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	25.000.000	2020			
				Lemari Penyimpanan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	75.000.000	2020			
				Lantai Mobil PVC Sheet	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	21.000.000	2020			
				Jok Kapten Seat Racing	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	31.500.000	2020			
				Jok Standar	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	13.500.000	2020			
				Lemari Peralatan Medis Fiber	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	59.000.000	2020			
				Landasan Buat Tandu	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	14.500.000	2020			
				Alat Pemadam Kebaran	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.500.000	2020			
				Lampu Periksa Pasien	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	4.700.000	2020			
				Power Inverter DC to AC	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	17.500.000	2020			
				Router GSM Wifi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	4.300.000	2020			
				Radio Komunikasi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	12.300.000	2020			
				Handy Talki	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	2.900.000	2020			
				Westafel	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	5.700.000	2020			
				IP CCTV dalam Kabin	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	11.900.000	2020			
				Rak Multifungsi	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	46.000.000	2020			
				Dispenser Hansinitizer otomatis	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.950.000	2020			
				Tabung Oxygen	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.500.000	2020			
				Selang Oxygen	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	2.600.000	2020			
				Retrim Jok Bagian kabin Driver	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	9.500.000	2020			
				Interkom	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	5.950.000	2020			
				Patient Monitor	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	39.000.000	2020			
				Ventilator Portable	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	91.700.000	2020			
				Patient Strecher	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	65.000.000	2020			
				Folding Scoop Strecher	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	5.900.000	2020			
				Aneroid Wall	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	4.300.000	2020			
				Suction Pump Portable	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	6.500.000	2020			
				Ambubag	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.900.000	2020			
				Defibrilator	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	57.400.000	2020			
				Televisi (TV Smart)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	5.800.000	2020			
				Pembersih Udara	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	5.960.000	2020			
				Tas Responden	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	19.000.000	2020			
				Alat Pertolongan Kecelakaan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	4.500.000	2020			
				Extrication Device	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	4.100.000	2020			
				Aalat Tangan dan Kaki	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.300.000	2020			
				Sumber Listrik DC	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	3.500.000	2020			
				Long Spiral Board	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	4.700.000	2020			
				Air Purifier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	33	79.100.000	2020			
				Intelegent Temperatur	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	26.167.000	2020			
				Thermogun Standing	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	2	6.986.000	2020			
				Lampu Ultra Violet	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	6.690.000	2020			
				lampu Tindakan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	2.062.750	2020			
				Tensimeter	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	1.226.500	2020			
				Tabung Handsinitizer Otomatis	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	7	19.512.500	2020			
				ECG 3 Cahnel	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	24.570.000	2020			
24	12	506137	PPSDM REG.BUKIT TINGGI	Pengadaan Mobil Ambulance	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	508.000.000	2020			
				Pengadaan Temperature Intelligent Checking System	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	14	177.100.000	2020			
				Pengadaan Air Purifier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	186	304.854.000	2020			
				Pengadaan Alat Kesehataan	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	31	154.254.100	2020			
				Pengadaan Karoseri Ambulance	132111	Peralatan dan Mesin	202	Pengembangan N	1	198.000.000	2020			
				Lampu UV LEKA UV2022 (Alat Rumah Tangga Lainnya)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	3.575.000	2020			

No	ES 1	Kode Satker	Uraian Satker	Nama Barang (berupa Aset Tetap/Aset Lainnya)	Pencatatan Aset Tetap/Aset Lainnya pada Neraca							Tambahan Informasi untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya yang Berasal dari Transaksi Pembelian		
					Akun Neraca	Uraian Akun Neraca	Kode Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah Unit	Nilai Rupiah	Tahun Perolehan	Akun Belanja	Uraian Akun Belanja	Realisasi Belanja Netto
25	12	352588	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR	DAIKIN MC30VVM-H (Alat Rumah Tangga Lainnya)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	17	44.412.500	2020			
				INTELEGENT TCS (Alat Rumah Tangga Lainnya)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	32.505.000	2020			
				Hikvision DS-K1TA 70MI-T (Alat Rumah Tangga Lainnya)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	21.725.000	2020			
26	12	027114	PPSDM REG.YOGYAKARTA	Air Purifier di Ruang Kelas dan Kantor	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	45	111.600.000	2020			
				Intelligent Temperature Checking System (FR Terminal Solution)	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	6	115.200.000	2020			
				Pengadaan Ambulance	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	825.824.997	2020			
27	12	027177	PPSDM REG.MAKASSAR	Profesional Tensimeter Digital	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	76.000.000	2020			
				Lampu UV	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	4	12.600.000	2020			
				Laptop	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	17	356.796.000	2020			
				Thermal Camera	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	179.258.000	2020			
				Air Purifier	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	80	192.400.000	2020			
				Smart TV Conference	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	32.650.000	2020			
				Scrubber Dryer/Polisher	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian	1	20.799.000	2020			
28	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	Electril Thermometer	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		18.750.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	18.750.000
				Mesin Waste Water Purifaction	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		6.250.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	6.250.000
				Tabung O2	132111	Peralatan dan Mesin	101	Pembelian		3.100.000	2021	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Penanganan Pandemi COVID-19	3.100.000
Jumlah										**38.872.990.299**				**388.565.750**

LAMPIRAN XIX

RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XIX

RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2020	**Saldo per 31 Desember 2020**	**692.332.903.390**	**17.312.178.457**	**14.641.041.355**	**120.344.297.655**	**95.751.068.009**	**61.520.338.234**	**48.406.572.422**	**1.929.786.242.927**	**20.513.882.319**	**22.628.791.885**	**137.691.965.531**	**3.160.929.282.184**
Pembelian	101	14.987.578.831	1.305.738.600	1.021.703.895	4.450.277.243	1.971.679.700	1.619.361.000	2.103.042.250	45.032.878.625	1.816.458.680	1.142.229.780	7.343.178.400	82.794.127.004
Transfer masuk	102	949.250.000			4.235.004.449	2.793.319.365	19.260.998.014	863.904.696				14.009.464.645	42.111.941.169
Hibah (Masuk)	103	381.567.120							80.031.411.629				80.412.978.749
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	12.206.007.000											12.206.007.000
Reklasifikasi Masuk	107	11.930.818.484											11.930.818.484
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	177	193.900.000				51.061.800		1.232.299.860					1.477.261.660
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	190	2.403.336.620							17.507.500		21.096.650	865.111.150	3.307.051.920
Pengembangan Nilai Aset	202	2.817.017.085											2.817.017.085
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**45.869.475.140**	**1.305.738.600**	**1.021.703.895**	**8.685.281.692**	**4.816.060.865**	**20.880.359.014**	**4.199.246.806**	**125.081.797.754**	**1.816.458.680**	**1.163.326.430**	**22.217.754.195**	**237.057.203.071**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	188	(7.882.628.366)	(700.170.000)	(1.095.525.870)		(976.560.560)	(17.897.560.414)	(276.376.000)				(3.957.828.160)	(32.786.649.370)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	204	(182.347.900)			(11.914.127)								(194.262.027)
Transaksi Normalisasi BMN	209	(2.347.682.120)							(26.824.500)		(21.096.650)	(814.214.300)	(3.209.817.570)
Penghapusan	301					(511.836.000)				(30.779.000)		(895.770.705)	(1.438.385.705)
Transfer Keluar	302	(1.731.350.000)			(4.235.004.449)	(2.793.319.365)	(597.752.000)	(640.328.696)				(14.009.464.645)	(24.007.219.155)
Hibah (Keluar)	303					(80.544.000)			(4.361.543.550)				(4.442.087.550)
Reklasifikasi Keluar	304	(12.302.334.000)											(12.302.334.000)
Hibah Keluar (semester II dokumen semester I)	354								(312.800.000)				(312.800.000)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**(24.446.342.386)**	**(700.170.000)**	**(1.095.525.870)**	**(4.246.918.576)**	**(4.362.259.925)**	**(18.495.312.414)**	**(916.704.696)**	**(4.701.168.050)**	**(30.779.000)**	**(21.096.650)**	**(19.677.277.810)**	**(78.693.555.377)**
Saldo per 31 Desember 2021	**Saldo per 31 Desember 2021**	**713.756.036.144**	**17.917.747.057**	**14.567.219.380**	**124.782.660.771**	**96.204.868.949**	**63.905.384.834**	**51.689.114.532**	**2.050.166.872.631**	**22.299.561.999**	**23.771.021.665**	**140.232.441.916**	**3.319.292.929.878**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021	**Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021**	**(604.793.050.164)**	**(13.139.761.460)**	**(11.978.841.519)**	**(114.288.264.556)**	**(86.283.318.433)**	**(53.795.265.527)**	**(47.361.082.360)**	**(1.874.207.096.744)**	**(19.618.849.431)**	**(17.765.855.400)**	**(117.280.322.639)**	**(2.960.511.708.233)**
Nilai Buku per 31 Des 2021	**Nilai Buku per 31 Des 2021**	**108.962.985.980**	**4.777.985.597**	**2.588.377.861**	**10.494.396.215**	**9.921.550.516**	**10.110.119.307**	**4.328.032.172**	**175.959.775.887**	**2.680.712.568**	**6.005.166.265**	**22.952.119.277**	**358.781.221.645**

LAMPIRAN XX

PEMBELIAN (101)

PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

LAMPIRAN XX

RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

Es I	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	Nilai
01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	10.688.638.700
01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	2.093.916.909
01001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	1.118.159.970
01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	KD	673.076.252
01001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	303.842.000
01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	KP	109.945.000
01002	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	KP	1.305.738.600
01003	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	1.021.703.895
01004	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	KP	4.450.277.243
01005	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	1.923.679.700
01005	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	48.000.000
01006	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	1.619.361.000
01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	KP	2.103.042.250
01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	45.032.878.625
01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	1.816.458.680
01011	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KP	1.142.229.780
01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	1.896.871.000
01012	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	1.214.561.162
01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KP	1.730.681.483
01012	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	1.699.182.310
01012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	424.313.445
01012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	KD	377.569.000
TOTAL				**82.794.127.004**

LAMPIRAN XXI

HUBUNGAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN DENGAN MUTASI TAMBAH ASET PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXI

HUBUNGAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN MESIN DENGAN MUTASI TAMBAH ASET PER UNIT ESELON I

UNIT ESELON I	REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	PERALATAN DAN MESIN YANG BERASAL DARI BELANJA SELAIN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN								MENJADI PERALATAN DAN MESIN		MENJADI KDP	MENJADI ATB	MENJADI ATL	MENJADI BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	MENJADI EKSTRAKOMPTABEL	PENGEMBALIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
		521211	522131	522141	522191	523111	523121	BM GB	BM LAINNYA	PEMBELIAN	PENGEMBANGAN NILAI						
SETJEN	29.568.480.064	-	-	-	-	384.515.000	-	241.840.700	296.372.500	14.987.578.831	2.817.017.085	12.206.007.000	-	-	148.562.000	342.041.248	(9.997.900)
ITJEN	1.312.025.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305.738.600	-	-	-	-	-	6.286.800	-
POLPUM	1.030.210.695	-	-	-	-	-	-	-	-	1.021.703.895	-	-	-	-	-	8.506.800	-
BAK	4.511.773.293	-	-	-	-	-	-	-	-	4.450.277.243	-	-	-	-	-	61.496.050	-
PEMDES	1.868.129.700	-	-	103.550.000	-	-	-	-	-	1.971.679.700	-	-	-	-	-	-	-
BANGDA	1.089.691.000	-	504.900.000	-	31.515.000	-	-	-	-	1.619.361.000	-	-	-	-	-	6.745.000	-
OTDA	2.113.899.250	-	-	-	-	-	-	-	-	2.103.042.250	-	-	-	-	-	10.857.000	-
DUKCAPIL	41.578.608.893	-	-	-	10.999.400.500	-	-	2.000.269.200	-	45.032.878.625	-	-	9.332.135.368	199.469.600	-	13.795.000	-
KEUDA	1.820.103.680	-	-	-	-	-	-	-	-	1.816.458.680	-	-	-	3.645.000	-	-	-
LITBANG	1.142.229.780	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142.229.780	-	-	-	-	-	-	-
BPSDM	7.659.989.556	25.920.000	-	-	-	32.477.445	65.978.000	-	-	7.343.178.400	-	-	-	-	-	441.186.601	-
JUMLAH	**93.695.141.311**	**25.920.000**	**504.900.000**	**103.550.000**	**11.030.915.500**	**416.992.445**	**65.978.000**	**2.242.109.900**	**296.372.500**	**82.794.127.004**	**2.817.017.085**	**12.206.007.000**	**9.332.135.368**	**203.114.600**	**148.562.000**	**890.914.499**	**(9.997.900)**

LAMPIRAN XXII

RINCIAN TRANSFER KELUAR PERALATAN DAN MESIN

LAMPIRAN XXII

Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
1	01004	065129	DK	BAPPEDA PROPINSI NAD	17.500.000
2	01004	130017	TP	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	1.629.744.712
3	01004	160080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	14.500.000
4	01004	170090	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	15.000.000
5	01004	170420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	795.460.000
6	01004	170520	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	18.000.000
7	01004	240084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	15.000.000
8	01004	240149	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	248.875.000
9	01004	240260	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	174.900.000
10	01004	240342	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	175.000.000
11	01004	250026	TP	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	1.074.129.737
12	01004	250084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	15.000.000
13	01004	280067	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	15.000.000
14	01004	320052	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	26.895.000
15	01005	029367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	9.775.000
16	01005	029373	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KETAHANAN PANGAN KAB. CIANJUR	10.000.000
17	01005	029376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	9.800.000
18	01005	029418	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GARUT	9.500.000
19	01005	029436	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA	10.000.000
20	01005	029472	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	10.120.000
21	01005	029478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANDUNG BARAT	9.982.500
22	01005	039438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	9.900.000
23	01005	039443	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL	10.000.000
24	01005	039452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	10.000.000
25	01005	039465	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN	10.065.000
26	01005	039470	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG	9.900.000
27	01005	039480	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL	10.115.000
28	01005	039490	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	10.125.000
29	01005	039500	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS	10.165.000
30	01005	039504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG	10.145.000
31	01005	039514	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	10.147.500
32	01005	039519	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA	10.165.000
33	01005	039530	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	9.900.000
34	01005	039538	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	10.000.000
35	01005	039546	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	10.000.000

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
36	01005	039554	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA	10.000.000
37	01005	039562	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG	9.320.000
38	01005	039568	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG	9.665.000
39	01005	039579	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO	9.923.500
40	01005	039599	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN	10.115.000
41	01005	039605	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	9.850.000
42	01005	039612	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali	9.700.000
43	01005	039639	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	10.065.000
44	01005	049147	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	10.000.000
45	01005	049173	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO	10.140.000
46	01005	059456	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK	10.065.000
47	01005	059464	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	10.162.900
48	01005	059478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	10.105.000
49	01005	059498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP	9.750.000
50	01005	059527	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI	10.000.000
51	01005	059556	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PROBOLINGGO	10.165.000
52	01005	059560	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB.LUMAJANG	10.165.000
53	01005	059586	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK	10.000.000
54	01005	059620	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	9.915.000
55	01005	059623	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	10.065.000
56	01005	059652	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN	9.780.000
57	01005	059661	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN	10.000.000
58	01005	069280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	10.115.000
59	01005	069284	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE	10.165.000
60	01005	069290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA	9.950.000
61	01005	069303	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN	10.000.000
62	01005	069309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT	10.165.000
63	01005	069321	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA	10.100.000
64	01005	069328	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU	10.165.000
65	01005	069334	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL	10.000.000
66	01005	069345	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA	10.000.000
67	01005	069352	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES	10.000.000
68	01005	069356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMPONG KAB. ACEH JAYA	10.165.000
69	01005	069358	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA	10.165.000
70	01005	069362	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG	10.000.000

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
71	01005	069367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	10.000.000
72	01005	069371	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA	9.950.000
73	01005	079353	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO	10.165.000
74	01005	079359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	10.165.000
75	01005	079369	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	10.160.000
76	01005	079376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN	10.165.000
77	01005	079383	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU	9.900.000
78	01005	079390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI	10.165.000
79	01005	079393	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA	10.165.000
80	01005	079395	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	10.165.000
81	01005	079413	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS	10.165.000
82	01005	079425	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR	10.000.000
83	01005	079438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	10.165.000
84	01005	079444	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT	10.000.000
85	01005	079447	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	10.165.000
86	01005	079450	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR	10.165.000
87	01005	079457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI	10.165.000
88	01005	079459	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA	10.165.000
89	01005	079463	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS	10.165.000
90	01005	079471	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN	9.436.000
91	01005	079473	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	9.850.000
92	01005	089289	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA	9.949.995
93	01005	089298	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK	9.965.000
94	01005	089305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	10.065.000
95	01005	089313	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN	10.155.000
96	01005	089319	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR	10.165.000
97	01005	089338	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	9.850.000
98	01005	089345	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN	10.015.000
99	01005	089356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	10.015.000

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
100	01005	099452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	10.157.960
101	01005	099457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	10.000.000
102	01005	099476	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	9.845.000
103	01005	099484	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	10.000.000
104	01005	099498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU	10.163.000
105	01005	099504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	9.900.000
106	01005	099510	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	10.165.000
107	01005	109222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	9.900.000
108	01005	109234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	10.000.000
109	01005	109238	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO	10.000.000
110	01005	109247	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN	10.000.000
111	01005	109254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI	10.000.000
112	01005	109269	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	10.165.000
113	01005	109272	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	10.000.000
114	01005	109280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI	10.000.000
115	01005	119239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI BANYUASIN	9.994.000
116	01005	119245	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU	10.015.000
117	01005	119252	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	10.000.000
118	01005	119260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LAHAT	10.165.000
119	01005	119265	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	10.165.000
120	01005	119274	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMPEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR	9.950.000
121	01005	119281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANYUASIN	10.000.000
122	01005	119288	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR	9.900.000
123	01005	119294	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	10.165.000
124	01005	119299	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG	10.000.000
125	01005	129247	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	10.165.000
126	01005	129253	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN BINA PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. LAMPUNG TENGAH	9.976.000
127	01005	129266	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT	10.000.000
128	01005	129270	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	10.000.000
129	01005	129288	UB	KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR	10.165.000
130	01005	129292	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN	10.165.000
131	01005	129296	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	9.965.000
132	01005	139250	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR	59.975.000

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
133	01005	139267	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	10.165.000
134	01005	139274	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	10.165.000
135	01005	139285	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	10.000.000
136	01005	139295	UB	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	10.000.000
137	01005	139313	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	10.165.000
138	01005	139325	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI	10.165.000
139	01005	139328	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU	9.965.000
140	01005	139330	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	10.015.000
141	01005	139335	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	10.165.000
142	01005	149235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO UTARA	10.000.000
143	01005	149242	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO SELATAN	9.950.000
144	01005	149257	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	9.880.000
145	01005	149267	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.SERUYAN	9.900.000
146	01005	149270	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA	10.000.000
147	01005	149278	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS	10.000.000
148	01005	149285	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG PISAU	9.750.000
149	01005	149296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO TIMUR	9.950.000
150	01005	159202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	9.790.000
151	01005	159214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	10.165.000
152	01005	159219	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN	10.165.000
153	01005	159224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH	10.115.000
154	01005	159240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU	10.000.000
155	01005	159245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA	9.700.000
156	01005	159255	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN	9.900.000
157	01005	169192	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER	9.999.900
158	01005	169196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN	10.035.000
159	01005	169202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU	9.850.000
160	01005	169206	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	9.900.000
161	01005	169211	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT	9.125.000
162	01005	169218	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA	10.000.000
163	01005	169226	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG	10.165.000
164	01005	179275	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA	10.165.000

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
165	01005	179280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA	10.165.000
166	01005	179283	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	10.000.000
167	01005	179296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	10.000.000
168	01005	189223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	10.165.000
169	01005	189229	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	10.000.000
170	01005	189234	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI	10.165.000
171	01005	189240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI	10.000.000
172	01005	189243	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL	10.165.000
173	01005	189249	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	10.000.000
174	01005	189254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	10.000.000
175	01005	189260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	9.900.000
176	01005	199398	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	9.750.000
177	01005	199407	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA	10.115.000
178	01005	199415	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	10.000.000
179	01005	199421	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	10.165.000
180	01005	199430	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA	10.165.000
181	01005	199442	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	10.000.000
182	01005	199452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	10.165.000
183	01005	199488	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG	10.115.000
184	01005	199499	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	10.165.000
185	01005	199508	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR	10.165.000
186	01005	199515	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR	10.165.000
187	01005	199522	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU	10.115.000
188	01005	199530	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	10.000.000
189	01005	199542	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	10.165.000
190	01005	199560	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG	10.165.000
191	01005	199570	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	10.115.000
192	01005	199574	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	10.065.000
193	01005	199578	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA	10.000.000
194	01005	209209	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON	10.165.000
195	01005	209212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA	10.000.000
196	01005	209219	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA	10.165.000
197	01005	209227	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	9.950.000

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
198	01005	209234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBI	10.000.000
199	01005	209239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA UTARA	10.165.000
200	01005	209244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	10.000.000
201	01005	209245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE UTARA	10.000.000
202	01005	209250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. BUTON UTARA	10.000.000
203	01005	219188	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA	10.165.000
204	01005	219194	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	10.165.000
205	01005	219208	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU	10.165.000
206	01005	219214	UB	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT	10.000.000
207	01005	219217	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	10.000.000
208	01005	219222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN	10.000.000
209	01005	229177	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG	10.000.000
210	01005	229189	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG	9.900.000
211	01005	229193	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANYAR	7.160.000
212	01005	229223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	9.800.000
213	01005	239244	UB	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMRINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT	10.000.000
214	01005	239250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	10.000.000
215	01005	239273	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA	10.165.000
216	01005	239281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU	10.000.000
217	01005	239290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT	10.000.000
218	01005	239291	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK UTARA	9.900.000
219	01005	249309	UB	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	10.000.000
220	01005	249318	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU	10.165.000
221	01005	249325	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA	10.165.000
222	01005	249335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR	10.165.000
223	01005	249344	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA	10.165.000
224	01005	249350	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR	10.165.000
225	01005	249357	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE	10.165.000
226	01005	249361	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA	10.165.000
227	01005	249367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI	8.665.000
228	01005	249377	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA TIMUR	10.165.000

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
229	01005	249384	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT	10.165.000
230	01005	249390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LEMBATA	10.165.000
231	01005	249399	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT	10.165.000
232	01005	249401	UB	BPMD,BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK,KB & KESBANG KAB. NAGEKEO	10.165.000
233	01005	249405	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA TENGAH	10.165.000
234	01005	249409	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT DAYA	10.000.000
235	01005	249414	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR	10.165.000
236	01005	259277	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN	10.000.000
237	01005	259291	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	10.165.000
238	01005	259305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI	10.000.000
239	01005	259312	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA	10.000.000
240	01005	259331	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN KAB. ASMAT	10.165.000
241	01005	259335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEL	10.000.000
242	01005	259339	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI	10.000.000
243	01005	259354	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA	10.000.000
244	01005	259359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN	9.900.000
245	01005	259363	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	10.000.000
246	01005	259369	UB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	10.000.000
247	01005	269204	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	10.065.000
248	01005	269214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	9.970.000
249	01005	269224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG LEBONG	10.165.000
250	01005	269227	UB	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB. SELUMA	10.140.000
251	01005	269230	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR	10.165.000
252	01005	269235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO	10.010.000
253	01005	269240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG	10.165.000
254	01005	269245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG	10.165.000
255	01005	269248	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKULU TENGAH	10.000.000
256	01005	289190	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA	10.165.000
257	01005	289196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN	10.000.000
258	01005	289207	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	10.000.000
259	01005	289212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA BARAT	10.000.000
260	01005	290451	UB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANGERANG	10.165.000
261	01005	299452	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG	10.165.000

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Kode Kewenangan	Nama Satker	Nilai
262	01005	299468	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	10.000.000
263	01005	299477	UB	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	10.000.000
264	01005	299501	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN	9.090.910
265	01005	309247	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	10.000.000
266	01005	319176	UB	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO	10.000.000
267	01005	329122	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN	10.165.000
268	01005	329128	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KAB. KARIMUN	9.900.000
269	01005	329137	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	10.165.000
270	01005	329144	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA	10.000.000
271	01005	329146	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS	10.000.000
272	01005	339176	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI	10.000.000
273	01005	339185	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG	10.035.000
274	01005	339194	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN	10.035.000
275	01005	339200	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT	10.035.000
276	01005	339202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI	10.000.000
277	01005	339210	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA	10.165.000
278	01005	340170	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	78.930.200
279	01005	340244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU	10.165.000
280	01005	340448	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR	10.165.000
281	01005	340536	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	10.165.000
282	01006	192416	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR (06)	597.752.000
283	01007	021504	TP	BAPPEDA KAB. TASIKMALAYA	295.812.000
284	01007	060082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	10.000.000
285	01007	110805	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	334.516.696
TOTAL					**8.266.404.510**

LAMPIRAN XXIII

RINCIAN HIBAH KELUAR (303)
PERALATAN DAN MESIN

LAMPIRAN XXIII

Rincian Hibah Keluar (303) Peralatan dan Mesin

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Kewenangan	Nilai
1	01005	029361	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BOGOR	UB	10.115.000
2	01005	029382	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARAWANG	UB	9.999.000
3	01005	029387	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK KAB. PURWAKARTA	UB	9.985.000
4	01005	029462	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. INDRAMAYU	UB	10.000.000
5	01005	229181	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. JEMBRANA	UB	10.165.000
6	01005	229201	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARANGASEM	UB	9.950.000
7	01005	229208	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGLI	UB	10.165.000
8	01005	239258	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK TIMUR	UB	10.165.000
9	01008	021965	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU	TP	77.550.000
10	01008	050330	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO	TP	241.560.000
11	01008	051369	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG	TP	80.300.000
12	01008	051449	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN	TP	78.100.000
13	01008	051755	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI	TP	160.600.000
14	01008	052453	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN	TP	79.200.000
15	01008	052763	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO	TP	79.200.000
16	01008	055200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA	TP	719.400.000
17	01008	055234	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO	TP	77.000.000
18	01008	055738	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI	TP	136.125.000
19	01008	070750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI	TP	85.800.000
20	01008	070838	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI UTARA	TP	85.800.000
21	01008	071347	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANDAILING NATAL	TP	85.800.000
22	01008	071429	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NIAS SELATAN	TP	85.800.000
23	01008	072216	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS	TP	85.800.000
24	01008	072517	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUAN BATU UTARA	TP	85.800.000
25	01008	075541	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNG BALAI	TP	85.800.000
26	01008	141344	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO TIMUR	TP	92.015.000
27	01008	150531	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	TP	83.600.000
28	01008	150658	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO KUALA	TP	83.600.000
29	01008	151137	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN	TP	83.600.000
30	01008	191561	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALAR	TP	103.270.750

NO	Kode Es 1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Kewenangan	Nilai
31	01008	192136	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG	TP	103.270.750
32	01008	192435	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR	TP	103.270.750
33	01008	250160	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	TP	90.543.200
34	01008	253509	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INTAN JAYA	TP	90.543.200
35	01008	280902	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU TALIABU	TP	788.634.900
36	01008	290274	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG	TP	81.400.000
37	01008	295141	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG	TP	81.400.000
38	01008	295311	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG	TP	81.400.000
39	01008	330732	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TELUK WONDAMA	TP	82.680.000
40	01008	331010	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAYBRAT	TP	82.680.000
Total					**4.442.087.550**

LAMPIRAN XXIV

RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXIV

RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	BAK	PEMDES	BANGDA	DUKCAPIL	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6		8	9	10
Saldo per 31 Desember 2020	**Saldo per 31 Desember 2020**	**1.946.875.593.819**	**42.386.701.000**	**1.576.390.000**	**183.700.093.595**	**101.531.546.766**	**35.854.700.333**	**31.400.838.301**	**414.277.558.145**	**2.757.603.421.959**
Pembelian	101	404.647.222							789.628.000	1.194.275.222
Transfer masuk	102								14.492.996.584	14.492.996.584
Hibah Masuk	103	120.000.000								120.000.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	17.705.576.964								17.705.576.964
Reklasifikasi masuk	107	58.274.612.677								58.274.612.677
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	190	44.827.210.000				99.071.000				44.926.281.000
Pengembangan Nilai Aset	202	6.647.173.342	1.385.287.160			728.877.138		316.961.000	817.290.057	9.895.588.697
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	206	16.056.989.658			273.099.790					16.330.089.448
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**144.036.209.863**	**1.385.287.160**	**-**	**273.099.790**	**827.948.138**	**-**	**316.961.000**	**16.099.914.641**	**162.939.420.592**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	188	(4.238.387.000)								(4.238.387.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	204	(4.661.690.640)								(4.661.690.640)
Transaksi Normalisasi BMN	209	(44.827.210.000)				(99.071.000)				(44.926.281.000)
Transfer Keluar	302								(14.492.996.584)	(14.492.996.584)
Reklasifikasi keluar	304	(61.534.122.097)								(61.534.122.097)
Korensi pencacatan	305	(968.986.179)								(968.986.179)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**(116.230.395.916)**	**-**	**-**	**-**	**(99.071.000)**	**-**	**-**	**(14.492.996.584)**	**(130.822.463.500)**
Saldo per 31 Desember 2021	**Saldo per 31 Desember 2021**	**1.974.681.407.766**	**43.771.988.160**	**1.576.390.000**	**183.973.193.385**	**102.260.423.904**	**35.854.700.333**	**31.717.799.301**	**415.884.476.202**	**2.789.720.379.051**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021	**Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021**	**(218.934.583.364)**	**(5.610.373.575)**	**(161.548.900)**	**(28.578.901.491)**	**(12.115.333.962)**	**(3.098.554.348)**	**(5.466.320.617)**	**(56.664.679.537)**	**(330.630.295.794)**
Nilai Buku per 31 Des 2021	**Nilai Buku per 31 Des 2021**	**1.755.746.824.402**	**38.161.614.585**	**1.414.841.100**	**155.394.291.894**	**90.145.089.942**	**32.756.145.985**	**26.251.478.684**	**359.219.796.665**	**2.459.090.083.257**

LAMPIRAN XXV

HUBUNGAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN DENGAN MUTASI TAMBAH ASET PER UNIT ESELON I

Lampiran XXV

Hubungan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Mutasi Tambah Aset per Unit Eselon I

NO	UNIT ESELON I	REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI BELANJA SELAIN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	MENJADI GEDUNG DAN BANGUNAN		MENJADI PERALATAN DAN MESIN	MENJADI KDP	MENJADI ASET TETAP LAINNYA	MENJADI BELANJA MODAL DIBAYAR DI MUKA (PREPAID)	MENJADI BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	MENJADI EKSTRAKOMPTABEL	KOREKSI REKLASIFIKASI YANG MUNCUL ATAS KEKURANGAN VOLUME PADA SAAT MEREKLASIFIKASI GEDUNG DAN BANGUNAN KE PERALATAN DAN MESIN
			523111	PEMBELIAN	PENGEMBANGAN NILAI							
1	SETJEN	52.691.917.525	1.299.538.700	404.647.222	6.647.173.342	241.840.700	46.054.886.461	-	149.541.500	304.374.000	187.533.000	1.460.000
2	ITJEN	678.047.260	707.239.900	-	1.385.287.160	-	-	-	-	-	-	-
3	BANGDA	728.877.138	-	-	728.877.138	-	-	-	-	-	-	-
4	DUKCAPIL	4.230.771.531	-	-	-	2.000.269.200	-	2.223.047.623	-	-	7.454.708	-
5	LITBANG	316.961.000	-	-	316.961.000	-	-	-	-	-	-	-
6	BPSDM	789.628.000	817.290.057	789.628.000	817.290.057	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**59.436.202.454**	**2.824.068.657**	**1.194.275.222**	**9.895.588.697**	**2.242.109.900**	**46.054.886.461**	**2.223.047.623**	**149.541.500**	**304.374.000**	**194.987.708**	**1.460.000**

LAMPIRAN XXVI

RINCIAN MUTASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXVI

RINCIAN MUTASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6		8	9	10
Saldo per 31 Desember 2020	**Saldo per 31 Desember 2020**	**221.645.036.959**	**11.245.442.670**	**3.058.859.874**	**3.707.596.890**	**489.387.520**	**1.482.364.000**	**505.733.100**	**28.488.592.739**	**270.623.013.752**
Transfer masuk	102								2.988.546.564	2.988.546.564
Reklasifikasi masuk	107	1.564.448.746								1.564.448.746
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	190	5.737.323.354								5.737.323.354
Pengembangan Nilai Aset	202	176.928.000							542.144.105	719.072.105
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	204	4.182.781.285								4.182.781.285
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**11.661.481.385**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.530.690.669**	**15.192.172.054**
Transaksi Normalisasi BMN	209	(5.737.323.354)								(5.737.323.354)
Transfer Keluar	302								(2.988.546.564)	(2.988.546.564)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**(5.737.323.354)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.988.546.564)**	**(8.725.869.918)**
Saldo per 31 Desember 2021	**Saldo per 31 Desember 2021**	**227.569.194.990**	**11.245.442.670**	**3.058.859.874**	**3.707.596.890**	**489.387.520**	**1.482.364.000**	**505.733.100**	**29.030.736.844**	**277.089.315.888**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021	**Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021**	**(90.223.238.048)**	**(3.233.061.846)**	**(1.878.997.430)**	**(1.878.959.203)**	**(305.866.496)**	**(537.469.832)**	**(108.018.633)**	**(15.783.497.172)**	**(113.949.108.660)**
Nilai Buku per 31 Des 2021	**Nilai Buku per 31 Des 2021**	**137.345.956.942**	**8.012.380.824**	**1.179.862.444**	**1.828.637.687**	**183.521.024**	**944.894.168**	**397.714.467**	**13.247.239.672**	**163.140.207.228**

LAMPIRAN XXVII

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXVII

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2020	**Saldo per 31 Desember 2020**	**25.459.985.586**	**61.327.996**	**800.000**	**17.686.224.808**	**627.233.046**	**4.951.568.889**	**128.340.471.780**	**1.760.819.027**	**273.469.883**	**438.462.436**	**2.791.271.504**	**182.391.634.955**
Pembelian	101	169.906.091		668.768.897				206.407.960	2.422.517.223	216.021.672	61.780.000	147.427.500	3.892.829.343
Transfer masuk	102							84.567.861.119					84.567.861.119
Reklasifikasi Masuk	107	60.000.000											60.000.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	177											15.400.000	15.400.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	190					450						47.520.000	47.520.450
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**229.906.091**	**-**	**668.768.897**	**-**	**450**	**-**	**84.774.269.079**	**2.422.517.223**	**216.021.672**	**61.780.000**	**210.347.500**	**88.583.610.912**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	188			(800.000)		(66.887.876)							(67.687.876)
Transaksi Normalisasi BMN	209											(47.520.000)	(47.520.000)
Penghapusan	301							(43.756.783.661)					(43.756.783.661)
Transfer Keluar	302			(668.768.897)				(84.774.269.079)	(273.099.790)	(207.085.972)			(85.923.223.738)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**-**	**-**	**(669.568.897)**	**-**	**(66.887.876)**	**-**	**(128.531.052.740)**	**(273.099.790)**	**(207.085.972)**	**-**	**(47.520.000)**	**(129.795.215.275)**
Saldo per 31 Desember 2021	**Saldo per 31 Desember 2021**	**25.689.891.677**	**61.327.996**	**-**	**17.686.224.808**	**560.345.620**	**4.951.568.889**	**84.583.688.119**	**3.910.236.460**	**282.405.583**	**500.242.436**	**2.954.099.004**	**141.180.030.592**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021	**Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021**	**(9.271.712.959)**	**-**	**-**	**-**	**(241.437.450)**	**-**	**(84.567.861.119)**	**(419.899.750)**	**-**	**-**	**(22.550.000)**	**(94.523.461.278)**
Nilai Buku per 31 Des 2021	**Nilai Buku per 31 Des 2021**	**16.418.178.718**	**61.327.996**	**-**	**17.686.224.808**	**318.908.170**	**4.951.568.889**	**15.827.000**	**3.490.336.710**	**282.405.583**	**500.242.436**	**2.931.549.004**	**46.656.569.314**

LAMPIRAN XXVIII

HUBUNGAN REALISASI BELANJA MODAL LAINNYA DENGAN MUTASI TAMBAH ASET TETAP LAINNYA DAN ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXVIII

HUBUNGAN REALISASI BELANJA MODAL LAINNYA DENGAN MUTASI TAMBAH ASET TETAP LAINNYA DAN ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

UNIT ESELON I	REALISASI BELANJA MODAL LAINNYA	ATB/ATL YANG BERASAL DARI BELANJA SELAIN BELANJA MODAL LAINNYA						ATB		ATL	MENJADI PERALATAN DAN MESIN	MENJADI ATB DALAM PENGERJAAN
		522131	522151	522191	524111	BM PERALATAN DAN MESIN	BM GEDUNG DAN BANGUNAN	PEMBELIAN	PENGEMBANGAN NILAI	PEMBELIAN		
SETJEN	2.196.421.741	1.361.590.000	-	-	-	-	-	614.855.500	2.222.557.650	169.906.091	296.372.500	254.320.000
ITJEN	-	-	-	97.994.820	-	-	-	-	97.994.820	-	-	-
POLPUM	668.768.897	-	-	-	-	-	-	-	-	668.768.897	-	-
PEMDES	49.995.000	-	-	-	-	-	-	49.995.000	-	-	-	-
BANGDA	-	132.572.140	-	260.838.000	-	-	-	393.410.140	-	-	-	-
OTDA	354.907.960	-	-	-	-	-	-	148.500.000	-	206.407.960	-	-
DUKCAPIL	11.389.430.000	-	-	139.150.000	-	9.531.604.968	2.223.047.623	13.677.237.468	7.183.477.900	2.422.517.223	-	-
KEUDA	212.376.672	87.575.000	80.306.650	-	130.542.403	3.645.000	-	298.424.053	-	216.021.672	-	-
LITBANG	340.853.500	-	-	-	-	-	-	141.400.000	137.673.500	61.780.000	-	-
BPSDM	192.311.943	-	-	-	-	-	-	44.884.443	-	147.427.500	-	-
TOTAL	**15.405.065.713**	**1.581.737.140**	**80.306.650**	**497.982.820**	**130.542.403**	**9.535.249.968**	**2.223.047.623**	**15.368.706.604**	**9.641.703.870**	**3.892.829.343**	**296.372.500**	**254.320.000**

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN MUTASI KDP PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXIX

RINCIAN MUTASI KDP PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	BPSDM	JUMLAH
1		2	6	7
Saldo per 31 Desember 2020	**Nilai Buku per 31 Desember 2020**	**31.006.614.436**	**1.915.250.910**	**32.921.865.346**
Saldo Awal KDP	501	24.697.623.668		24.697.623.668
Perolehan Penambahan KDP	502	8.145.884.604		8.145.884.604
Pengembangan	503	50.115.008.857		50.115.008.857
Mutasi Tambah		**82.958.517.129**	**-**	**82.958.517.129**
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	(29.911.583.964)		(29.911.583.964)
Koreksi Nilai KDP	504	(56.817.939)		(56.817.939)
Tindak Lanjut Kertas Kerja Konfirmasi Aplikasi SIMAK BMN	598	(24.697.623.668)		(24.697.623.668)
Mutasi Kurang		**(54.666.025.571)**	**-**	**(54.666.025.571)**
Saldo per 31 Desember 2021	**Nilai Buku per 31 Des 2021**	**59.299.105.994**	**1.915.250.910**	**61.214.356.904**

LAMPIRAN XXX

RINCIAN KDP PER SATKER

LAMPIRAN XXX

RINCIAN KDP PER SATKER

No	Kode ES.I	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Kontrak	% Penyelesaian	Nilai KDP posisi 31 Desember 2021	Keterangan	Penjelasan Belum Selesai	Apakah akan dilanjutkan atau tidak?
1	01	403200	Setjen	Perbaikan M/E Gedung B Nomor Kontrak : 602/6326/BU	60 hari	3.374.341.895	87%	3.374.341.895		Pihak Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak/wanprestasi	Dilanjutkan
2	01	448302	IPDN Jatinangor	027/2214/SPJ/IX/2019	362 hari	2.990.831.000	80%	2.033.424.660	KDP 2019 Rp2.392.664.80000 berkurang karena Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi	pembangunan perpustakaan multiyears terkendala penanganan Covid-19	Dilanjutkan
3	01	448302	IPDN Jatinangor	027/2312/SPJ/IX/2019	578 hari	2.713.104.000	85%	1.804.582.750	KDP 2019 Rp710.723.22800 berkurang karena Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi		
4	01	448302	IPDN Jatinangor	094/01.414/k/ulp/lll/2021			100%	72.940.000	Honorarium Pokja Pengadaan barang dan jasa serta Pengendali Teknis Pekerjaan pembangunan		
5	01	448302	IPDN Jatinangor	027/904/SPJ.FSK/VI/2021	25 Juni 2021 s.d 20 April 2022	56.937.763.053	47%	26.689.576.157	Pembangunan Gedung Perpustakaan PT. BA		
6	01	448302	IPDN Jatinangor	090/474-491/PBG			100%	36.805.053	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan/Perjalanan Dinas.		
7	01	448302	IPDN Jatinangor	011-72 Tahun 2021 tgl. 2 Februari 2021			100%	83.875.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan IPDN Bulan Februari s.d Desember 2021. Sesuai SK Nomor : 011-72 Tahun 2021 tgl. 2 Februari 2021		
8	01	448302	IPDN Jatinangor	011-69 Tahun 2021 tgl. 2 Februari 2021			100%	26.730.000	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan IPDN Bulan Februari s.d Desember 2021. Sesuai SK Nomor : 011-69 Tahun 2021 tgl. 2 Februari 2021.		
9	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/020/SPK.MK/IPDN.28.2	10 Maret sd 3 April 2020	195.450.000	100%	195.450.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi		Tidak Dilanjutkan
10	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/023/SPK.KP/IPDN.28.2	10 Maret sd 30 April 2020	231.200.000	100%	231.200.000	Jasa Konsultasi Perencanaan		
11	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR				100%	202.098.311	Pengelola Kegiatan TA 2020		
12	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	011/2711/PAKPA TAanggal 9 September			20%	5.429.180.237	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Belum tersedia Anggaran	Pembangunan IPDN selesai di tahun 2024
13	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.488.726.913	Asrama Permanen		Akan dilanjut di TA 2022
14	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.400.755.659	Asrama Permanen		Pembangunan IPDN selesai di tahun 2024
15	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	4.437.335.092	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen		Akan dilanjut di TA 2022
16	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	1.941.625.767	Gedung Pos Jaga Permanen		Akan dilanjut di TA 2022
JUMLAH SETJEN						**66.442.689.948**		**59.448.647.494**			
1	12	403231	BPSDM	027/1273/KONT/IX/2015 dan 027/577/KONT/III/2017	6 Bulan	318.987.650	5%	318.987.650	Realisasi konsultan perencana Pembangunan Gedung Alat Bantu Damkar pada Satker Balai Pol PP dan Damkar Rokan Hilir	- Tidak mendapatkan alokasi anggaran di tahun berikutnya - Lokasi Satker Balai Pol PP dan Damkar yang semula bertempat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menjadi di Kemang Bogor Provinsi Jawa Barat	Tidak Dilanjutkan

No	Kode ES.I	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Kontrak	% Penyelesaian	Nilai KDP posisi 31 Desember 2021	Keterangan	Penjelasan Belum Selesai	Apakah akan dilanjutkan atau tidak?
2	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	027/829/PUSDIKLATREG/2014	6 Bulan	805.361.000	5%	805.361.000	Belanja Konsultan perencana Pembangunan Gedung Asrama TA 2014 yang terhenti akibat kebijakan moratorium pembangunan gedung	Tidak mendapatkan alokasi anggaran di tahun berikutnya	Tidak Dilanjutkan
3	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	027/263/KONTRAK/PPSDM/2019	90 Hari Kalender	636.075.260	100%	790.902.260	Belanja Renovasi Gedung Kantor Tahap I PPSDM Kemendagri Regional Makassar		Tidak Dilanjutkan
4	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	027/007/2019/PPSDM-MKS	16 Hari Kalender	55.000.000	100%		Realisasi pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 berupa Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (jasa konsultan)		Tidak Dilanjutkan
5	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	027/255/2019/PPSDM	90 Hari Kalender	38.800.000	100%		Belanja Biaya Pengawas Gedung dan Bangunan Kantor PPSDM Regional Makassar		Tidak Dilanjutkan
6	12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	-	-	61.027.000	-		Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan meliputi perjalanan dinas rapat biaya honorarium panitia dan sebagainya		Tidak Dilanjutkan
JUMLAH BPSDM						**1.915.250.910**		**1.915.250.910**			
TOTAL						**68.357.940.858**		**61.363.898.404**			

LAMPIRAN XXXI

RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXXI

RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2020	**Saldo per 31 Desember 2020**	**25.744.742.175**	**1.009.789.200**	**432.535.500**	**4.130.192.170**	**7.876.757.630**	**20.263.222.092**	**18.617.117.008**	**624.537.677.766**	**35.041.046.382**	**5.556.536.881**	**892.548.706**	**744.102.165.510**
Saldo Awal (Koreksi)	100	98.500.600											98.500.600
Pembelian	101	614.855.500				49.995.000	393.410.140	148.500.000	13.677.237.468	298.424.053	141.400.000	44.884.443	15.368.706.604
Transfer masuk	102							16.315.478.977					16.315.478.977
Reklasifikasi Masuk	107	1.951.146.811			298.595.500								2.249.742.311
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	190	3.054.619.100											3.054.619.100
Pengembangan Nilai Aset	202	2.222.557.650	97.994.820						7.183.477.900		137.673.500		9.641.703.870
Pengembangan Melalui KDP	208	254.320.000											254.320.000
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**8.195.999.661**	**97.994.820**	**-**	**298.595.500**	**49.995.000**	**393.410.140**	**16.463.978.977**	**20.860.715.368**	**298.424.053**	**279.073.500**	**44.884.443**	**46.983.071.462**
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	188	(440.306.000)	(417.903.200)					(13.679.738.523)					(14.537.947.723)
Transaksi Normalisasi BMN	209	(3.152.766.600)											(3.152.766.600)
Penghapusan	301					(97.790.000)							(97.790.000)
Transfer Keluar	302							(6.051.052.504)					(6.051.052.504)
Reklasifikasi Keluar	304				(298.595.500)								(298.595.500)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**(3.593.072.600)**	**(417.903.200)**	**-**	**(298.595.500)**	**(97.790.000)**	**-**	**(19.730.791.027)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(24.138.152.327)**
Saldo per 31 Desember 2021	**Saldo per 31 Desember 2021**	**30.347.669.236**	**689.880.820**	**432.535.500**	**4.130.192.170**	**7.828.962.630**	**20.656.632.232**	**15.350.304.958**	**645.398.393.134**	**35.339.470.435**	**5.835.610.381**	**937.433.149**	**766.947.084.645**
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Sept 2021	**Akumulasi Amortisasi s.d 30 Sept 2021**	**(20.154.347.382)**	**(508.391.467)**	**(139.050.000)**	**(4.130.192.170)**	**(7.088.402.005)**	**(20.304.767.110)**	**(14.994.125.302)**	**(611.941.673.886)**	**(35.078.349.388)**	**(2.244.245.864)**	**(791.839.886)**	**(717.375.384.460)**
Nilai Buku per 31 Des 2021	**Nilai Buku per 31 Des 2021**	**10.193.321.854**	**181.489.353**	**293.485.500**	**-**	**740.560.625**	**351.865.122**	**356.179.656**	**33.456.719.248**	**261.121.047**	**3.591.364.517**	**145.593.263**	**49.571.700.185**

LAMPIRAN XXXII

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA

Lampiran XXXII

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	SOFTWARE	LISENSI	HASIL KAJIAN/ PENELITIAN	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE	AKUMULASI AMORTISASI LISENSI	AKUMULUASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	18.898.000	-	-	29.975.000	5.121.337.728	-	(4.806.993.505)	(18.898.000)	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	21.692.724.025	2.315.776.811	841.493.500	-	8.045.884.269	33.468.750	(5.211.441.111)	(17.769.532.796)	(333.720.398)	(33.468.750)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2.402.814.500	-	2.584.295.400	-	6.093.944.831	-	(5.802.161.829)	(1.999.879.188)	-	-
4	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	-	7.065.000	-	(7.065.000)	-	-	-
5	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	37.350.000	-	(37.350.000)	-	-	-
6	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	93.120.000	-	-	-	2.707.367.160	-	(2.707.367.160)	(25.015.000)	-	-
7	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19.472.000	-	-	-	541.740.285	-	(416.430.029)	(7.302.000)	-	-
8	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	257.547.752	-	(239.513.933)	-	-	-
9	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	349.100.000	-	-	-	-	-	-
10	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	689.880.820	-	-	-	999.170.000	7.094.002.300	(999.170.000)	(508.391.467)	-	(361.515.000)
11	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	139.050.000	-	293.485.500	-	1.096.325.870	1.317.842.250	(1.080.358.075)	(139.050.000)	-	(1.317.842.250)
12	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	4.130.192.170	-	-	-	3.968.571.408	3.648.385.000	(3.968.571.408)	(4.130.192.170)	-	(3.620.578.375)
13	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	7.107.147.630	-	397.210.000	299.605.000	3.763.420.747	200.343.000	(3.761.312.168)	(7.063.402.005)	-	(200.343.000)
14	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	25.000.000	-	-	-	212.650.000	-	(212.650.000)	(25.000.000)	-	-
15	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG	-	-	-	-	650.261.096	-	(576.935.120)	-	-	-
16	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	-				271.081.540	-	(269.078.903)	-		-
17	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	20.656.632.232	-	-	-	32.367.422.624	8.800.000	(31.670.153.331)	(20.304.767.110)	-	(8.800.000)
18	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	15.350.304.958	-	-	-	3.730.699.366	23.718.802.739	(3.730.699.366)	(14.994.125.302)	-	(23.589.305.239)
19	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	645.077.629.134	150.000.000	-	170.764.000	2.004.433.409	-	(1.960.153.409)	(611.904.173.886)	(37.500.000)	-
20	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	35.339.470.435	-	-	-	18.968.000	109.730.000	(18.968.000)	(35.078.349.388)	-	(109.730.000)
21	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.704.069.531	6.875.000	-	3.124.665.850	1.436.181.478	-	(1.436.181.478)	(2.238.402.114)	(5.843.750)	-
22	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	301.823.750	-	-	-	39.698.000	-	(39.148.000)	(301.823.750)	-	-
23	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	54.500.000	-	-	20.750.000	1.265.809.308	-	(1.130.824.580)	(54.500.000)	-	-
24	12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	-	-	-	49.885.000	164.790.000	-	(164.790.000)	-		-
25	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	510.474.399	-	-	-	7.055.208.939	-	(6.907.501.965)	(435.516.136)	-	-
TOTAL					**756.313.203.584**	**2.472.651.811**	**4.116.484.400**	**4.044.744.850**	**81.856.928.810**	**36.131.374.039**	**(77.154.818.370)**	**(716.998.320.312)**	**(377.064.148)**	**(29.241.582.614)**

LAMPIRAN XXXIII

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXXIII

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2020	**Saldo per 31 Desember 2020**	**17.225.739.897**	**8.724.717.668**	**1.317.842.250**	**7.616.956.408**	**41.485.369.343**	**35.797.582.224**	**64.469.718.332**	**2.004.433.409**	**1.166.899.230**	**2.621.021.083**	**13.077.095.726**	**195.507.375.570**
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	188	12.561.321.366	1.118.073.200	1.096.325.870		1.043.448.436	17.897.560.414	13.956.114.523				3.957.828.160	51.630.671.969
Mutasi Tambah	**Mutasi Tambah**	**12.561.321.366**	**1.118.073.200**	**1.096.325.870**	**-**	**1.043.448.436**	**17.897.560.414**	**13.956.114.523**	**-**	**-**	**-**	**3.957.828.160**	**51.630.671.969**
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	177	(193.900.000)				(51.061.800)		(1.232.299.860)				(15.400.000)	(1.492.661.660)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	299	(27.770.000)										(249.804.850)	(277.574.850)
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	370	(412.543.050)											(412.543.050)
Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	373						(299.700.000)						(299.700.000)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	391	(6.307.142.438)	(1.749.618.568)			(37.379.999.596)	(406.100.000)	(39.256.028.417)		(1.038.201.230)	(1.184.839.605)	(8.244.212.789)	(95.566.142.643)
Transfer Keluar	392						(17.881.146.014)	(10.488.002.473)					(28.369.148.487)
Hibah Keluar	393						(2.731.974.000)						(2.731.974.000)
Mutasi Kurang	**Mutasi Kurang**	**(6.941.355.488)**	**(1.749.618.568)**	**-**	**-**	**(37.431.061.396)**	**(21.318.920.014)**	**(50.976.330.750)**	**-**	**(1.038.201.230)**	**(1.184.839.605)**	**(8.509.417.639)**	**(129.149.744.690)**
Saldo per 31 Desember 2021	**Saldo per 31 Desember 2021**	**22.845.705.775**	**8.093.172.300**	**2.414.168.120**	**7.616.956.408**	**5.097.756.383**	**32.376.222.624**	**27.449.502.105**	**2.004.433.409**	**128.698.000**	**1.436.181.478**	**8.525.506.247**	**117.988.302.849**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021	**Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021**	**(19.261.791.317)**	**(1.360.685.000)**	**(2.398.200.325)**	**(7.589.149.783)**	**(5.020.319.191)**	**(31.678.953.331)**	**(27.320.004.605)**	**(1.960.153.409)**	**(128.698.000)**	**(1.436.181.478)**	**(8.242.264.545)**	**(106.396.400.984)**
Nilai Buku per 31 Des 2021	**Nilai Buku per 31 Des 2021**	**3.583.914.458**	**6.732.487.300**	**15.967.795**	**27.806.625**	**77.437.192**	**697.269.293**	**129.497.500**	**44.280.000**	**-**	**-**	**283.241.702**	**11.591.901.865**

LAMPIRAN XXXIV

PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN) (391) ASET LAIN-LAIN

LAMPIRAN XXXIV

PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN) (391) ASET LAIN-LAIN

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Kewenangan	Nilai
01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	5.155.591.723
01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	742.947.000
01001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	100.800.000
01001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	104.100.000
01001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	203.703.715
01002	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	KP	1.749.618.568
01005	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	KD	124.813.200
01005	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	37.255.186.396
01006	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	406.100.000
01007	115128	BAPPEDA KOTA PALEMBANG	TP	958.200.000
01007	120098	BAPPEDA PROP. LAMPUNG	DK	574.546.000
01007	200231	BAPPEDA KAB. BUTON	TP	2.050.909.091
01007	230113	BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT	TP	1.856.000.000
01007	230206	BAPPEDA KAB. LOMBOK TENGAH	TP	1.495.563.636
01007	290093	BAPPEDA PROP.BANTEN	DK	451.970.909
01007	290350	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LEBAK	TP	708.000.000
01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	KP	8.667.807.939
01007	020541	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOGOR	TP	1.482.653.520
01007	021425	BAPPEDA KAB. GARUT	TP	1.210.536.000
01007	021717	BAPPEDA KABUPATEN CIREBON	TP	560.000.000
01007	021830	BAPPEDA KAB. KUNINGAN	TP	1.306.079.855
01007	031123	BAPPEDA KAB. PEMALANG	TP	1.550.676.012
01007	031804	BAPPEDA KAB. BANJARNEGARA	TP	1.570.909.091
01007	032423	BAPPEDA KAB. KLATEN	TP	1.556.163.636
01007	032904	BAPPEDA KAB. WONOGIRI	TP	2.447.054.546
01007	040217	BAPPEDA KAB. SLEMAN	TP	1.821.600.000
01007	050525	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG	TP	1.398.760.000
01007	051946	BAPPEDA KAB. NGANJUK	TP	1.563.636.364
01007	052730	BAPPEDA KAB. BOJONEGORO	TP	1.726.836.364
01007	054011	BAPPEDA PROP. JAWA TIMUR	DK	692.520.000
01007	055333	BAPPEDA KOTA MALANG	TP	2.184.325.454
01007	059687	SEKDA KOTA KEDIRI	TP	400.000.000
01007	070420	BAPPEDA KAB. TAPANULI TENGAH	TP	988.000.000
01007	070527	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SIMALUNGUN	TP	33.280.000
01009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	1.038.201.230
01011	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KP	1.184.839.605
01012	352588	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	8.224.654.789
01012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	19.558.000
TOTAL				**95.566.142.643**

LAMPIRAN XXXV

TRANSFER KELUAR (392) ASET LAIN-LAIN

LAMPIRAN XXXV

TRANSFER KELUAR (392) ASET LAIN-LAIN

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Kewenangan	Nilai
01006	061623	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ACEH TAMIANG (06)	TP	19.850.000
01006	265156	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	TP	49.925.000
01006	180734	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	TP	53.642.150
01006	191429	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	TP	75.000.000
01006	141124	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PULANG PISAU	TP	96.286.200
01006	320423	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LINGGA	TP	149.000.000
01006	090728	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. ROKAN HULU	TP	149.215.000
01006	191426	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	TP	149.850.000
01006	151126	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	TP	153.659.600
01006	180925	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	TP	172.341.800
01006	081021	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	TP	193.634.400
01006	330531	SEKRETARIAT DAERAH KAB. RAJA AMPAT	TP	195.000.000
01006	071243	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KAB. SAMOSIR	TP	199.243.000
01006	061718	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENER MERIAH	TP	199.400.000
01006	300326	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGKA BARAT	TP	219.597.500
01006	251812	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	TP	224.100.000
01006	250936	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	TP	234.500.000
01006	200715	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	TP	239.551.500
01006	100729	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	TP	239.766.400
01006	100825	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEBO (06)	TP	246.908.750
01006	251128	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	TP	249.306.000
01006	071519	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	TP	249.500.000
01006	081116	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK SELATAN	TP	264.391.785
01006	140727	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	TP	267.560.000
01006	140824	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SUKAMARA (06)	TP	296.900.000
01006	140920	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	TP	298.000.000
01006	071623	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	TP	298.816.000
01006	160927	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	TP	322.278.000
01006	200816	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	TP	324.751.850
01006	141019	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	TP	329.095.000
01006	330721	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	TP	329.500.000
01006	140645	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN	TP	335.790.000
01006	340529	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMASA (06)	TP	342.000.000
01006	330620	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	TP	348.786.000
01006	100930	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	TP	349.459.800
01006	131013	DINAS KIMPRASWIL, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KAB. SEKADAU	TP	366929700
01006	081219	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	TP	370.670.000
01006	251129	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	TP	378.641.000
01006	310224	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	TP	396.261.000
01006	260830	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG	TP	398.350.000
01006	310321	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	TP	399.585.000
01006	251717	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	TP	405.882.950
01006	241520	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MANGGARAI BARAT	TP	419.917.000
01006	111123	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU SELATAN	TP	427.680.000
01006	192274	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	TP	429.232.000
01006	141338	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	TP	448.853.000
01006	251607	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	TP	469.761.000
01006	160626	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	TP	496.630.000
01006	280514	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPULAUAN SULA	TP	521.740.000

Kode Es1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Kewenangan	Nilai
01006	251516	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	TP	538600000
01006	241420	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO (06)	TP	557.777.000
01006	170820	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MINAHASA UTARA	TP	604.870.200
01006	280417	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	TP	698.997.544
01006	251918	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	TP	703.999.885
01006	330524	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. RAJA AMPAT	TP	858.726.000
01006	070441	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KAB. TAPANULI TENGAH	TP	27.500.000
01006	340325	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA	TP	93.937.000
01007	075133	BAPPEDA KOTA MEDAN	TP	2.825.836.000
01007	120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	TP	1.438.332.000
01007	234007	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	DK	1.652.400.000
01007	070244	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	TP	2.076.889.018
01007	205205	SEKDA KOTA BAU-BAU	TP	2.494.545.455
TOTAL				**28.369.148.487**

LAMPIRAN XXXVI

REKAPITULASI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

LAMPIRAN XXXVI

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 Desember 2021				31 Desember 2020		
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111) LAWAN AKUN BEBAN PEGAWAI	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112) LAWAN AKUN BEBAN BARANG	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191) LAWAN AKUN KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN LAINNYA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111) LAWAN AKUN BEBAN PEGAWAI	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112) LAWAN AKUN BEBAN BARANG	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
01	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	1.021.995.929	79.818.374	-	1.101.814.303	1.050.574.239	82.566.569	1.133.140.808
01	403200	SETJEN	4.444.968.269	-	-	4.444.968.269	1.690.440.268	964.917.432	2.655.357.700
01	448302	IPDN JATINANGOR	4.548.635.289	-	-	4.548.635.289	1.483.969.006		1.483.969.006
01	677010	IPDN KAMPUS SULUT	319.750.435	-	-	319.750.435	-	-	-
01	677024	IPDN KAMPUS SULSEL	429.923.272	73.079.000	-	503.002.272	382.165.714	10.347.040	392.512.754
01	677045	IPDN KAMPUS SUMBAR	295.439.054	-	-	295.439.054	300.831.999		300.831.999
01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	165.164.623	61.573.284	-	226.737.907	238.208.676	-	238.208.676
01	683084	IPDN KAMPUS NTB	349.276.431	65.779.985	-	415.056.416	393.357.357	45.726.210	439.083.567
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	242.944.312			242.944.312	-	-	-
02	027203	ITJEN	1.608.366.506	72.908.224	-	1.681.274.730	1.664.037.052	58.669.443	1.722.706.495
03	027210	DITJEN POLPUM	1.436.745.482	-	-	1.436.745.482	1.478.588.043	-	1.478.588.043
04	027486	DITJEN BAK	234.311.717	-	-	234.311.717	1.316.095.757	-	1.316.095.757
05	027753	DITJEN BINA PEMDES	1.854.862.896	243.690.594	-	2.098.553.490	1.618.274.418	227.828.686	1.846.103.104
05	028449	BALAI PEMDES YOGYA	205.222.233		-	205.222.233			-
05	028830	BALAI BESAR PEMDES MALANG	230.693.664	10.674.068	-	241.367.732	219.004.268	9.922.022	228.926.290
05	613629	BALAI PEMDES LAMPUNG	187.455.123	21.627.243	-	209.082.366			-
06	039729	DITJEN BINA BANGDA	1.897.766.191	167.066.179	49.194	2.064.881.564	1.723.245.968	509.352.652	2.232.598.620
07	621892	DITJEN OTDA	1.743.847.114	-	-	1.743.847.114	1.425.608.412	-	1.425.608.412
08	634082	DITJEN DUKCAPIL	1.657.793.073	34.622.009.888	-	36.279.802.961	1.441.675.652	110.606.938.660	112.048.614.312
09	662766	DITJEN BINA KEUDA	1.578.966.447	-	-	1.578.966.447	1.400.029.546	-	1.400.029.546
11	403222	BADAN LITBANG	1.264.716.687	-	-	1.264.716.687	-	-	-
12	027114	PPSDM REG. DIY	501.869.514	1.619.676.061	-	2.121.545.575	-	-	-
12	027177	PPSDM REG. MAKASSAR	261.434.729		-	261.434.729	-	-	-
12	403216	PPSDM REG. BANDUNG	338.884.883	35.020.759	-	373.905.642	347.512.254	34.384.145	381.896.399
12	403231	BPSDM	1.437.600.832	126.617.175	-	1.564.218.007	1.589.647.875	121.118.477	1.710.766.352
JUMLAH			**28.258.634.705**	**37.199.540.834**	**49.194**	**65.458.224.733**	**19.763.266.504**	**112.671.771.336**	**132.435.037.840**

LAMPIRAN XXXVII

RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

LAMPIRAN XXXVII

RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI
Setjen	Kantor Pusat	Gaji Pokok PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	675.900
		Pembulatan Gaji PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	168
		Tunj. Suami/Istri PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	67.590
		Tunj. Anak PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	13.518
		Tunj. PPh PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	42.115
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	422.945.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	4.014.658.051
		Koreksi atas belanja pegawai TA 2019 dan 2020 yang dibayarkan TA 2022	6.565.927
	IPDN Kampus Jakarta	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.021.995.929
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 202	79.818.374
	IPDN Jatinangor	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	4.381.526.289
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	167.109.000
	IPDN Kampus Sulut	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	319.750.435
	IPDN Kampus Sulsel	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	389.638.272
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	40.285.000
		Beban Keperluan Perkantoran Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	29.983.000
		Beban Honor Output Kegiatan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	20.700.000
		Langganan Air Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	2.100.000
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	20.296.000
	IPDN Kampus Sumbar	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	295.439.054
	IPDN Kampus Kalbar	Gaji Pokok PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	9.078.289
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	24.631.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	131.455.334
		Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	34.556.925
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	27.016.359
	IPDN Kampus NTB	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	349.276.431
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	53.543.725
		Langganan Air Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	12.236.260
	IPDN Kampus Papua	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	229.284.312

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI
	[illegible]	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	13.660.000
Jumlah Setjen			**12.098.348.257**
Itjen	Kantor Pusat	Gaji Pokok PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	194.800
		Pembulatan Gaji PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	100
		Tunj. Suami/Istri PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	19.480
		Tunj. Anak PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	3.896
		Tunj. Fungsional PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	300.000
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	62.427.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.545.421.230
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	72.908.224
Jumlah Itjen			**1.681.274.730**
Ditjen Polpum	Kantor Pusat	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	110.168.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.325.851.342
		Gaji Pokok PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	726.140
Jumlah Ditjen Polpum			**1.436.745.482**

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI
Ditjen BAK	Kantor Pusat	Gaji Pokok PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	29.103.080
		Pembulatan Gaji PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	444
		Tunj. Suami/Istri PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	537.260
		Tunj. Anak PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	107.456
		Tunj. PPh PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	9.456
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	190.096.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	14.458.021
Jumlah Ditjen BAK			**234.311.717**
Ditjen Bina Pemdes	Kantor Pusat	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	130.826.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.724.036.896
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	243.690.594
	Balai Pemdes Yogya	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	205.222.233
	Balai Pemdes Lampung	Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	21.627.243
		Tunjangan Umum PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	187.455.123
	Balai Besar Pemdes Malang	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	206.213.664
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	24.480.000
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	8.036.172
		Langganan Telepon Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	2.449.046
		Langganan Air Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	188.850
Jumlah Ditjen Bina Pemdes			**2.754.225.821**
Ditjen Bina Bangda	Kantor Pusat	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	167.322.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.730.444.191
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	163.928.648
		Langganan Telepon Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	3.117.621
		Langganan Air Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	19.910
		Biaya Administrasi penutupan rekening	49.194
Jumlah Ditjen Bina Bangda			**2.064.881.564**

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI
Ditjen Otda	Kantor Pusat	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	217.634.150
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.526.212.964
Jumlah Ditjen Otda			**1.743.847.114**
Ditjen Dukcapil	Kantor Pusat	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	152.057.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.505.736.073
		Belanja Jasa Jarkomat 2021 dan ATS Biometrik 2021 yang dibayarkan TA 2022	34.431.570.803
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	190.439.085
Jumlah Ditjen Dukcapil			**36.279.802.961**
Ditjen Bina Keuda	Kantor Pusat	Gaji Pokok PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	32.231.320
		Pembulatan Gaji PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.091
		Tunj. Suami/Istri PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	728.764
		Tunj. Anak PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	129.938
		Tunj. Beras PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	362.100
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	94.304.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.450.284.234
		Tunjangan Umum PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	925.000
Jumlah Ditjen Bina Keuda			**1.578.966.447**
Badan Litbang	Kantor Pusat	Pembulatan Gaji PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	300
		Tunj. Fungsional PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	5.900.000
		Tunj. PPh PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	226.500
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	97.990.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.160.599.887
Jumlah Badan Litbang			**1.264.716.687**
BPSDM	Kantor Pusat	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	140.892.000
		Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.296.708.832
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	126.617.175
	PPSDM Reg. DIY	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	501.869.514
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	38.450.874
		Langganan Telepon Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	275.187
		Jasa Profesi Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	1.580.950.000
	PPSDM Reg. Makassar	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	250.192.729
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	11.242.000
		Uang Makan PNS Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	28.418.000

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI
	PPSDM Reg. Bandung	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	310.466.883
		Langganan Listrik Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	30.641.092
		Langganan Telepon Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	4.334.167
		Langganan Air Bulan Desember 2021 yang dibayarkan Januari 2022	45.500
Jumlah BPSDM			**4.321.103.953**
JUMLAH KESELURUHAN			**65.458.224.733**

LAMPIRAN XXXVIII

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

LAMPIRAN XXXVIII

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

ESELON I	SATKER	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	SALDO PER 31 DESEMBER 2020
Setjen	Kantor Pusat (403200)	Penempatan Antena Pemancar (XL)	-	47.877.000
		Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank Mandiri	18.420.000,00	36.840.000
		Penempatan Kantor Kas Bank BRI	239.476.000,00	359.214.000
		Penempatan 2 (dua) unit mesin ATM Bank BRI	-	
		BNI ATM	7.172.500,00	15.779.500
		Sewa Gedung F Koperasi BP	66.492.500,00	119.686.500
		BNI Gedung B Lantai I (Bank)	91.265.000,00	200.783.000
		Koperasi P (Kantin Gedung C)	49.931.500,00	99.863.000
		Yayasan APA	5.649.700,00	8.878.100
		Sewa Tanah dan Bangunan Dharma Wanita Persatuan Setjen Kemendagri- Kedai Kopi	26.168.000,00	39.252.000
		PT. TBS	409.216.427,00	-
	IPDN Kampus Jakarta (352593)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	54.149.723,00	-
		PT. BNI (PERSERO) Tbk.	54.149.722,00	
		PT. BRI (PERSERO) Tbk.	54.149.722,00	-
	IPDN Jatinangor (448302)	PT. STU	-	6.093.750
		Gedung Fitnes Tim Raga Praja Gym	7.333.334,00	18.333.333
		ATM BNI PT. Bank BNI	-	4.259.584
		PT. BI	410.939.583,00	701.014.583
		PT. STU	4.250.000,00	12.750.000
		BRI Cab Sumedang	13.630.750,00	13.630.750
		ATM BJB Jatinangor	18.833.333,00	41.433.333
		Bank BJB Jatinangor	25.721.667,00	56.587.667
		PT. AK	-	2.513.500
		CV. M	136.127.500,00	180.168.750
		PT. STU	72.575.833,00	123.805.833
		PT. STU	64.593.750,00	-
		BNI (samping Pengasuhan)	24.705.583,00	-
		BNI (samping Pos Pamdal)	8.466.667,00	-
		Koperasi AP	20.869.500,00	-
		PT. SS	68.866.000,00	-
		Dharma Wanita	39.198.000,00	-
		CV. KMR	164.220.000,00	249.900.000
		KAMPUS PASCASARJANA	6.916.044.422,00	-
Total Setjen			**9.072.616.716,00**	**2.338.664.183**
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	PT Bank Negara Indonesia	81.214.000,00	104.418.000
Total Ditjen Bina Pemdes			**81.214.000,00**	**104.418.000**
Ditjen Bina Bangda	Ditjen Bina Bangda (039729)	PT Bank Negara Indonesia	71.052.000,00	94.736.000
		PT.Bank Mandiri	25.000.000,00	40.000.000
		Sewa Gedung Serbaguna	64.100.000,00	-
		Sewa Koperasi PM	83.338.500,00	111.118.000
Total Ditjen Bina Bangda			**243.490.500,00**	**245.854.000**
BPSDM	Kantor Pusat (403231)	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kalibata	-	105.096.000
		Koperasi Primer PMi I Kemendagri	26.904.000,00	53.808.000
		Sewa Lahan Gedung F	3.103.000,00	6.206.000
		Fotocopy AC	3.785.833,00	-
		PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	791.917,00	10.294.917
	PPSDM regional Yogyakarta (027114)	BPD Yogyakarta (Cabang Utama)	11.839.083,00	20.196.083
		KPN Melati	7.999.250,00	12.570.250
	PPSDM regional Bukittingi (506137)	Koperasi AI	5.802.500,00	12.765.500
		BNI	30.626.419,00	-
		BPD SUMBAR	30.829.419,00	-
Total BPSDM			**121.681.421,00**	**220.936.750**
Total Keseluruhan			**9.519.002.637,00**	**2.909.872.933**

LAMPIRAN XXXIX

RINCIAN KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN/ASET TETAP/ASET LAINNYA

Lampiran XXXIX

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

No	KODE ES I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOKUMEN	JURNAL BMN	URAIAN	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
1	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	9.616.750.000
2	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-11-30	304	Reklasifikasi Keluar	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(9.616.750.000)
3	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-06-30	107	Reklasifikasi Masuk	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	638.110.189
4	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-06-30	304	Reklasifikasi Keluar	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(2.589.257.000)
5	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	114.435.000
6	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-12-31	304	Reklasifikasi Keluar	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(114.435.000)
7	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(19.453.950)
8	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-12-31	304	Reklasifikasi Keluar	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	8.900.500
9	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-06-30	107	Reklasifikasi Masuk	162161	Lisensi	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	1.951.146.811
10	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-03-31	107	Reklasifikasi Masuk	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	24.262.208.000
11	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-03-31	304	Reklasifikasi Keluar	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(24.322.208.000)
12	01001	448302	KP	JRNUMUM	2021-12-31	-	-	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(600.000)
13	01001	448302	KP	JRNUMUM	2021-12-31	-	-	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(860.000)
14	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-03-31	107	Reklasifikasi Masuk	135121	Aset Tetap Lainnya	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	60.000.000
15	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-03-31	107	Reklasifikasi Masuk	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(7.955.442.026)
16	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-03-31	304	Reklasifikasi Keluar	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	2.952.373.386
17	01001	483005	KP	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	96.327.000
18	01001	483005	KP	JRNBMN	2021-12-31	304	Reklasifikasi Keluar	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(96.327.000)
19	01001	483005	KP	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(12.040.875)
20	01001	483005	KP	JRNBMN	2021-12-31	304	Reklasifikasi Keluar	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	4.816.350
21	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	554.937.768
22	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	10.151.683.204
23	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	304	Reklasifikasi Keluar	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(12.326.499.097)
24	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	134112	Irigasi	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	992.131.828
25	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	134113	Jaringan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	572.316.918

No	KODE ES I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOKUMEN	JURNAL BMN	URAIAN	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
26	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	558.573.180
27	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	15.359.198.820
28	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-11-30	304	Reklasifikasi Keluar	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(15.917.772.000)
29	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(517.647.240)
30	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(1.996.695.847)
31	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-11-30	304	Reklasifikasi Keluar	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	1.026.953.034
32	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	132111	Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	466.120.347
33	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	7.654.775.653
34	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-11-30	304	Reklasifikasi Keluar	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(8.120.896.000)
35	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-03-31	107	Reklasifikasi Masuk	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	732.312.000
36	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-03-31	304	Reklasifikasi Keluar	133111	Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(732.312.000)
37	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(466.120.347)
38	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-11-30	107	Reklasifikasi Masuk	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(995.120.835)
39	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-11-30	304	Reklasifikasi Keluar	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	523.928.772
40	01004	160552	TP	JRNBMN	2021-11-30	M07	Reklas Masuk	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	1.832.190.000
41	01004	160552	TP	JRNBMN	2021-11-30	K10	Reklas Keluar	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(1.832.190.000)
42	01004	419079	TP	JRNBMN	2021-12-31	M07	Reklas Masuk	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	715.524.000
43	01004	419079	TP	JRNBMN	2021-12-31	K10	Reklas Keluar	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(715.524.000)
44	01004	027486	KP	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	162151	Software	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	298.595.500
45	01004	027486	KP	JRNBMN	2021-12-31	304	Reklasifikasi Keluar	162151	Software	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(298.595.500)
46	01004	027486	KP	JRNBMN	2021-12-31	107	Reklasifikasi Masuk	169315	Akumulasi Amortisasi Software	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(298.595.500)
47	01004	027486	KP	JRNBMN	2021-12-31	304	Reklasifikasi Keluar	169315	Akumulasi Amortisasi Software	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	298.595.500
TOTAL												**(7.502.438.457)**

LAMPIRAN XL

RINCIAN KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI

Lampiran XL

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

NO	KODE ESELON I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOK	JURNAL BMN	URAIAN	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
1	01001	352593	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(89.303.286)
2	01001	352593	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(516.628.000)
3	01001	352593	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	87.487.378
4	01001	352593	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	431.627.240
5	01001	352593	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	96.714.000
6	01001	352593	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(96.714.000)
7	01001	352593	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	516.628.000
8	01001	352593	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(516.628.000)
9	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-10-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	16.077.496
10	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-09-30	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	25.864.950
11	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-09-30	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	98.211.501
12	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-10-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(59.546.282)
13	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-09-30	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(147.100.000)
14	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-09-30	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(172.730.868)
15	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.731.536.705)
16	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.009.251.047)
17	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.288.016.936
18	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.482.278.161
19	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-08-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	64.740.954
20	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-09-30	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.525.000
21	01001	448302	KP	JRNUMUM	2021-09-30	-	-	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	25.250.000
22	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	41.637.523.000
23	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(41.637.523.000)
24	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	134113	Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.578.971.661
25	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	134113	Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.578.971.661)

NO	KODE ESELON I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOK	JURNAL BMN	URAIAN	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
26	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-08-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(246.632.205)
27	01001	448302	KP	JRNBMN	2021-09-30	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(25.250.000)
28	01001	483005	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(2.508.264)
29	01001	483005	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	26.134.500
30	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(8.417.472)
31	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(160.430.923)
32	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.417.472
33	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	168.320.969
34	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	305	Koreksi Pencatatan	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	155.037.788
35	01001	677010	KD	JRNUMUM	2021-06-30	-	-	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(9.689.862)
36	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.417.472
37	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(8.417.472)
38	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	305	Koreksi Pencatatan	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(968.986.179)
39	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	134113	Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	641.723.693
40	01001	677010	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	134113	Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(641.723.693)
41	01001	677024	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.897.488.472)
42	01001	677024	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.897.488.472
43	01001	677024	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.897.488.472
44	01001	677024	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.897.488.472)
45	01001	677045	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	180.513.808
46	01001	677045	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(73.108.980)
47	01001	677045	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(173.352.554)
48	01001	677045	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	95.850.480
49	01001	677045	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	155.397.450
50	01001	677045	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(153.647.450)
51	01001	677045	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.189.687.000

NO	KODE ESELON I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOK	JURNAL BMN	URAIAN	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
52	01001	677045	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(3.189.687.000)
53	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.405.776)
54	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(2.369.714)
55	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(627.417.193)
56	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.664.570
57	01001	683070	KD	JRNUMUM	2021-12-31	-	-	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9.997.900
58	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	191.414.726
59	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(9.997.900)
60	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(191.414.726)
61	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.182.781.285)
62	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.182.781.285
63	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	501	Saldo Awal KDP	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	24.697.623.668
64	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-12-31	598	-	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(24.697.623.668)
65	01001	683070	KD	JRNBMN	2021-07-31	504	Koreksi Nilai KDP	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(56.817.939)
66	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(13.885.000)
67	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	27.770.000
68	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	387.237
69	01001	683091	KD	JRNBMN	2021-06-30	228	Koreksi Penyusutan Karena 225	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	443.598.796
70	01004	027486	KP	JRNBMN	2021-04-30	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.191.413
71	01004	027486	KP	JRNBMN	2021-04-30	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(11.914.127)
72	01005	027753	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	135121	Aset Tetap Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	450
73	01006	039729	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(23.641.943)
74	01006	039729	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	16.079.618
75	01006	039729	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	99.071.000
76	01006	039729	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(99.071.000)
77	01008	634082	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.252.250)

NO	KODE ESELON I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOK	JURNAL BMN	URAIAN	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
78	01008	634082	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12.252.250
79	01008	634082	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	17.507.500
80	01008	634082	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(26.824.500)
81	01011	403222	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(14.767.655)
82	01011	403222	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	13.411.447
83	01011	403222	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	21.096.650
84	01011	403222	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(21.096.650)
85	01012	403216	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(691.358.800)
86	01012	403216	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	697.658.800
87	01012	403216	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	691.358.800
88	01012	403216	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(697.658.800)
89	01012	403216	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	135121	Aset Tetap Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	47.520.000
90	01012	403216	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	135121	Aset Tetap Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(47.520.000)
91	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(81.976.350)
92	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	99.397.330
93	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-06-30	228	Koreksi Penyusutan Karena 225	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(265.894.557)
94	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-06-30	228	Koreksi Penyusutan Karena 225	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(139.708)
95	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-10-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.110.806
96	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	116.530.500
97	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(116.530.500)
98	01012	027177	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(57.221.850)
99	01012	027177	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	25.000
100	01012	027177	KD	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	57.221.850
101	01012	027177	KD	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(25.000)
TOTAL												**(729.303.289)**

LAMPIRAN XLI

RINCIAN KOREKSI ASET LAINNYA NON REVALUASI

Lampiran XLI

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

NO	KODE ESELON I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOK	JURNAL BMN	URAIAN	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
1	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	169315	Akumulasi Amortisasi Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(3.054.619.100)
2	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	169315	Akumulasi Amortisasi Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1.182.690.026
3	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-07-31	100	Saldo Awal	169315	Akumulasi Amortisasi Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(12.312.575)
4	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-12-31	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	162151	Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	3.054.619.100
5	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-12-31	209	Transaksi Normalisasi BMN	162151	Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(3.152.766.600)
6	01001	403200	KP	JRNBMN	2021-07-31	100	Saldo Awal	162151	Software	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	98.500.600
7	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-12-31	299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	13.885.000
8	01001	683084	KD	JRNBMN	2021-12-31	299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(27.770.000)
9	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-12-31	299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	107.096.863
10	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-10-31	299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	61.034.668
11	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-12-31	299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(120.473.000)
12	01012	403231	KP	JRNBMN	2021-10-31	299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(72.135.000)
13	01012	027177	KD	JRNBMN	2021-12-31	299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	57.196.850
14	01012	027177	KD	JRNBMN	2021-12-31	299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(57.196.850)
TOTAL												**(1.922.250.018)**

LAMPIRAN XLII

RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN

Lampiran XLII

Rincian Koreksi Lain-lain

NO	KODE ESELON I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOK	NOMOR DOK	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
1	01001	403200	KP	JRNADJ	2021-12-31	20211240320015	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	391119	Koreksi Lainnya	(6.565.927)
2	01001	403200	KP	JRNADJ	2021-12-31	20211240320013	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	7.500.000
3	01001	403200	KP	JRNADJ	2021-12-31	20211240320014	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	1.109.225
4	01001	448302	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112448302016	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	391119	Koreksi Lainnya	(2.255.118.300)
5	01001	448302	KP	JRNADJ	2021-01-01	202101448302008	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	391119	Koreksi Lainnya	(4.003.750)
6	01001	448302	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112448302024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	4.539.197.290
7	01001	448302	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112448302005	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	391119	Koreksi Lainnya	222.877.300
8	01001	448302	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112448302006	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	391119	Koreksi Lainnya	(259.500.000)
9	01001	448302	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112448302007	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	391119	Koreksi Lainnya	(340.000.000)
10	01001	448302	KP	JRNADJ	2021-01-01	202101448302006	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	391119	Koreksi Lainnya	19.599.000
11	01001	683070	KD	JRNADJ	2021-12-31	2,02113E+13	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	1.090.593
12	01002	027203	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112027203024	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	12.000
13	01004	027486	KP	JRNUMUM	2021-12-31	202112027486030	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	239.983
14	01005	259363	UB	JRNUMUM	2021-01-01	202101259363001	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	391119	Koreksi Lainnya	(2.703)

NO	KODE ESELON I	KODE SATKER	KODE DEKON	JENIS DOK	TANGGAL DOK	NOMOR DOK	PERKKOR	URAIAN AKUN	PERKKOR1	URAIAN AKUN	RHPREAL
15	01005	027753	KP	JRNUMUM	2021-12-31	202112027753014	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	1.789.904
16	01005	039452	UB	JRNUMUM	2021-01-01	202101039452001	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	391119	Koreksi Lainnya	(35.867)
17	01006	039729	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112039729010	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	574.117
18	01006	039729	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112039729011	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	5.400
19	01007	621892	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112621892005	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	62.300
20	01008	634082	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112634082002	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	27.180.067
21	01009	662766	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112662766025	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	3.339
22	01011	403222	KP	JRNADJ	2021-12-31	202112403222001	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	143.536
23	01012	403231	KP	JRNADJ	2021-12-31	20211240323116	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	425.611
24	01012	506137	KD	JRNADJ	2021-12-31	202112506137036	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	391119	Koreksi Lainnya	20.833
Total											**1.956.603.951**

LAMPIRAN XLIII

RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

Lampiran XLIII

Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
1	-.-.436096	SATKER TIDAK ADA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.519.500.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.519.500.000	-	-	-
2	-.-.436122	SATKER TIDAK ADA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.380.000.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.380.000.000	-	-	-
3	-.-.998299	SATKER TIDAK ADA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.380.000.007	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.380.000.007	-	-	-
4	010.01.060082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(10.000.000)	-	-	-
5	010.01.060082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	10.000.000	-	-	-
6	010.01.060082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.088.228.700	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.088.228.700	-	-	-
7	010.01.061623	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ACEH TAMIANG (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	19.850.000	(19.850.000)	19.850.000	-
8	010.01.061623	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ACEH TAMIANG (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(19.850.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(19.850.000)	-	-	-
9	010.01.061623	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ACEH TAMIANG (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.237.019.310	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.237.019.310	-	-	-
10	010.01.061623	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ACEH TAMIANG (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	19.850.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	19.850.000	19.850.000	-
11	010.01.071243	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KAB. SAMOSIR	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	199.243.000	(199.243.000)	199.243.000	-
12	010.01.071243	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KAB. SAMOSIR	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(199.243.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(199.243.000)	-	-	-
13	010.01.071243	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KAB. SAMOSIR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.785.604.026	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.785.604.026	-	-	-
14	010.01.071243	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KAB. SAMOSIR	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	199.243.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	199.243.000	199.243.000	-
15	010.01.071519	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	249.500.000	(249.500.000)	249.500.000	-
16	010.01.071519	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(249.500.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(249.500.000)	-	-	-
17	010.01.071519	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.595.071.168	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.595.071.168	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
18	010.01.071519	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	249.500.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	249.500.000	249.500.000	-
19	010.01.071623	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	298.816.000	(298.816.000)	298.816.000	-
20	010.01.071623	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(298.816.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(298.816.000)	-	-	-
21	010.01.071623	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.924.780.798	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.924.780.798	-	-	-
22	010.01.071623	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	298.816.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	298.816.000	298.816.000	-
23	010.01.081021	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	193.634.400	(193.634.400)	193.634.400	-
24	010.01.081021	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.229.483.605	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.229.483.605	-	-	-
25	010.01.081021	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(193.634.400)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(193.634.400)	-	-	-
26	010.01.081021	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	193.634.400	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	193.634.400	193.634.400	-
27	010.01.081116	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	264.391.785	(264.391.785)	264.391.785	-
28	010.01.081116	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.804.229.690	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.804.229.690	-	-	-
29	010.01.081116	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK SELATAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(264.391.785)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(264.391.785)	-	-	-
30	010.01.081116	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK SELATAN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	264.391.785	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	264.391.785	264.391.785	-
31	010.01.090728	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. ROKAN HULU	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	149.215.000	(149.215.000)	149.215.000	-
32	010.01.090728	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. ROKAN HULU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	897.448.130	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	897.448.130	-	-	-
33	010.01.090728	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. ROKAN HULU	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(149.215.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(149.215.000)	-	-	-
34	010.01.090728	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. ROKAN HULU	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	149.215.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	149.215.000	149.215.000	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
35	010.01.091221	DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. KUANTAN SINGINGI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.007.347.441	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.007.347.441	-	-	-
36	010.01.100729	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	239.766.400	(239.766.400)	239.766.400	-
37	010.01.100729	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.222.663.310	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.222.663.310	-	-	-
38	010.01.100729	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(239.766.400)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(239.766.400)	-	-	-
39	010.01.100729	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	239.766.400	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	239.766.400	239.766.400	-
40	010.01.100825	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEBO (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	246.908.750	(246.908.750)	246.908.750	-
41	010.01.100825	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEBO (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.599.089.127	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.599.089.127	-	-	-
42	010.01.100825	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEBO (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(246.908.750)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(246.908.750)	-	-	-
43	010.01.100825	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEBO (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	246.908.750	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	246.908.750	246.908.750	-
44	010.01.100930	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	349.459.800	(349.459.800)	349.459.800	-
45	010.01.100930	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(349.459.800)	010.06.039719	SATKER TIDAK ADA	-	(349.459.800)	349.459.800	-
46	010.01.100930	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.213.241.257	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.213.241.257	-	-	-
47	010.01.100930	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(349.459.800)	349.459.800	349.459.800	-
48	010.01.100930	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	349.459.800	010.06.039719	SATKER TIDAK ADA	-	349.459.800	349.459.800	-
49	010.01.110097	BAPPEDA PROP. SUMATERA SELATAN	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(624.800.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(624.800.000)	-	-	-
50	010.01.110097	BAPPEDA PROP. SUMATERA SELATAN	162151	Software	624.800.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	624.800.000	-	-	-
51	010.01.111023	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU TIMUR (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	6.155.198.868	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	6.155.198.868	-	-	-
52	010.01.111123	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	427.680.000	(427.680.000)	427.680.000	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
53	010.01.111123	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU SELATAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(427.680.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(427.680.000)	-	-	-
54	010.01.111123	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.866.994.200	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.866.994.200	-	-	-
55	010.01.111123	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU SELATAN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	427.680.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	427.680.000	427.680.000	-
56	010.01.131013	DINAS KIMPRASWIL, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KAB. SEKADAU	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	366.929.700	(366.929.700)	366.929.700	-
57	010.01.131013	DINAS KIMPRASWIL, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KAB. SEKADAU	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(366.929.700)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(366.929.700)	-	-	-
58	010.01.131013	DINAS KIMPRASWIL, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KAB. SEKADAU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.520.867.077	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.520.867.077	-	-	-
59	010.01.131013	DINAS KIMPRASWIL, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KAB. SEKADAU	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	366.929.700	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	366.929.700	366.929.700	-
60	010.01.140645	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	335.790.000	(335.790.000)	335.790.000	-
61	010.01.140645	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.171.799.345	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3.171.799.345	-	-	-
62	010.01.140645	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(335.790.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(335.790.000)	-	-	-
63	010.01.140645	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	335.790.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	335.790.000	335.790.000	-
64	010.01.140824	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SUKAMARA (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	296.900.000	(296.900.000)	296.900.000	-
65	010.01.140824	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SUKAMARA (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.773.454.541	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.773.454.541	-	-	-
66	010.01.140824	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SUKAMARA (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(296.900.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(296.900.000)	-	-	-
67	010.01.140824	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SUKAMARA (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	296.900.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	296.900.000	296.900.000	-
68	010.01.140920	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	298.000.000	(298.000.000)	298.000.000	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
69	010.01.140920	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(298.000.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(298.000.000)	-	-	-
70	010.01.140920	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.869.300.944	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.869.300.944	-	-	-
71	010.01.140920	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	298.000.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	298.000.000	298.000.000	-
72	010.01.141019	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	329.095.000	(329.095.000)	329.095.000	-
73	010.01.141019	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.990.853.839	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	4.990.853.839	-	-	-
74	010.01.141019	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(329.095.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(329.095.000)	-	-	-
75	010.01.141019	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	329.095.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	329.095.000	329.095.000	-
76	010.01.141124	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PULANG PISAU	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	96.286.200	(96.286.200)	96.286.200	-
77	010.01.141124	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PULANG PISAU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.600.506.009	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.600.506.009	-	-	-
78	010.01.141124	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PULANG PISAU	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(96.286.200)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(96.286.200)	-	-	-
79	010.01.141124	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PULANG PISAU	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	96.286.200	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	96.286.200	96.286.200	-
80	010.01.141338	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	448.853.000	(448.853.000)	448.853.000	-
81	010.01.141338	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(448.853.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(448.853.000)	-	-	-
82	010.01.141338	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.851.322.966	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.851.322.966	-	-	-
83	010.01.141338	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	448.853.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	448.853.000	448.853.000	-
84	010.01.151126	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	153.659.600	(153.659.600)	153.659.600	-
85	010.01.151126	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(153.659.600)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(153.659.600)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
86	010.01.151126	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.246.208.645	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.246.208.645	-	-	-
87	010.01.151126	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	153.659.600	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	153.659.600	153.659.600	-
88	010.01.160080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	14.500.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	14.500.000	-	-	-
89	010.01.160080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.500.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(14.500.000)	-	-	-
90	010.01.160927	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	322.278.000	(322.278.000)	322.278.000	-
91	010.01.160927	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	428.239.499	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	428.239.499	-	-	-
92	010.01.160927	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(322.278.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(322.278.000)	-	-	-
93	010.01.160927	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	322.278.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	322.278.000	322.278.000	-
94	010.01.170090	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	15.000.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	15.000.000	-	-	-
95	010.01.170090	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15.000.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(15.000.000)	-	-	-
96	010.01.180734	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	53.642.150	(53.642.150)	53.642.150	-
97	010.01.180734	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(53.642.150)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(53.642.150)	-	-	-
98	010.01.180734	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.849.065.910	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.849.065.910	-	-	-
99	010.01.180734	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	53.642.150	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	53.642.150	53.642.150	-
100	010.01.180925	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	172.341.800	(172.341.800)	172.341.800	-
101	010.01.180925	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.419.376.840	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.419.376.840	-	-	-
102	010.01.180925	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(172.341.800)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(172.341.800)	-	-	-
103	010.01.180925	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	172.341.800	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	172.341.800	172.341.800	-
104	010.01.190223	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA	135111	Aset Tetap Renovasi	1.480.000.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.480.000.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
105	010.01.190223	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.480.000.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(1.480.000.000)	-	-	-
106	010.01.191426	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	149.850.000	(149.850.000)	149.850.000	-
107	010.01.191426	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	947.211.500	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	947.211.500	-	-	-
108	010.01.191426	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(149.850.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(149.850.000)	-	-	-
109	010.01.191426	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	149.850.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	149.850.000	149.850.000	-
110	010.01.192416	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR (06)	132111	Peralatan dan Mesin	597.752.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	597.752.000	-	-	-
111	010.01.192416	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR (06)	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(597.752.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(597.752.000)	-	-	-
112	010.01.200623	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOMBANA (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.814.142.510	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.814.142.510	-	-	-
113	010.01.200715	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	239.551.500	(239.551.500)	239.551.500	-
114	010.01.200715	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(239.551.500)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(239.551.500)	-	-	-
115	010.01.200715	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.888.382.030	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.888.382.030	-	-	-
116	010.01.200715	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	239.551.500	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	239.551.500	239.551.500	-
117	010.01.210156	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALUKU TENGAH (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	907.769.600	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	907.769.600	-	-	-
118	010.01.210428	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PULAU BURU (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.425.853.520	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.425.853.520	-	-	-
119	010.01.210727	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.404.555.405	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.404.555.405	-	-	-
120	010.01.215128	SEKRETARIAT DAERAH KOTA AMBON	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446.822.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	446.822.000	-	-	-
121	010.01.234007	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	162151	Software	-	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.652.400.000	(1.652.400.000)	1.652.400.000	-
122	010.01.234007	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(1.652.400.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(1.652.400.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
123	010.01.234007	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.652.400.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	1.652.400.000	1.652.400.000	-
124	010.01.240084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	132111	Peralatan dan Mesin	15.000.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	15.000.000	-	-	-
125	010.01.240084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15.000.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(15.000.000)	-	-	-
126	010.01.241420	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	557.777.000	(557.777.000)	557.777.000	-
127	010.01.241420	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(557.777.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(557.777.000)	-	-	-
128	010.01.241420	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.498.550.603	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3.498.550.603	-	-	-
129	010.01.241420	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	557.777.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	557.777.000	557.777.000	-
130	010.01.250084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15.000.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(15.000.000)	-	-	-
131	010.01.250084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	132111	Peralatan dan Mesin	15.000.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	15.000.000	-	-	-
132	010.01.251129	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	378.641.000	(378.641.000)	378.641.000	-
133	010.01.251129	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(378.641.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(378.641.000)	-	-	-
134	010.01.251129	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.474.045.920	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.474.045.920	-	-	-
135	010.01.251129	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	378.641.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	378.641.000	378.641.000	-
136	010.01.251418	BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. ASMAT	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5.436.558.750	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	5.436.558.750	-	-	-
137	010.01.251607	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	469.761.000	(469.761.000)	469.761.000	-
138	010.01.251607	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.573.969.688	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3.573.969.688	-	-	-
139	010.01.251607	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(469.761.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(469.761.000)	-	-	-
140	010.01.251607	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	469.761.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	469.761.000	469.761.000	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
141	010.01.251812	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	224.100.000	(224.100.000)	224.100.000	-
142	010.01.251812	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(224.100.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(224.100.000)	-	-	-
143	010.01.251812	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.280.065.006	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.280.065.006	-	-	-
144	010.01.251812	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	224.100.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	224.100.000	224.100.000	-
145	010.01.251907	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3.917.569.440	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3.917.569.440	-	-	-
146	010.01.251918	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	703.999.885	(703.999.885)	703.999.885	-
147	010.01.251918	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(703.999.885)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(703.999.885)	-	-	-
148	010.01.251918	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.357.304.290	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	5.357.304.290	-	-	-
149	010.01.251918	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	703.999.885	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	703.999.885	703.999.885	-
150	010.01.260830	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	398.350.000	(398.350.000)	398.350.000	-
151	010.01.260830	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(398.350.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(398.350.000)	-	-	-
152	010.01.260830	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.530.783.703	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.530.783.703	-	-	-
153	010.01.260830	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	398.350.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	398.350.000	398.350.000	-
154	010.01.280067	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15.000.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(15.000.000)	-	-	-
155	010.01.280067	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	15.000.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	15.000.000	-	-	-
156	010.01.280076	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.774.912.835	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	5.774.912.835	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
157	010.01.290451	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANGERANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
158	010.01.290451	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANGERANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
159	010.01.300326	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGKA BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	219.597.500	(219.597.500)	219.597.500	-
160	010.01.300326	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGKA BARAT	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(219.597.500)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(219.597.500)	-	-	-
161	010.01.300326	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGKA BARAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.392.875.763	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.392.875.763	-	-	-
162	010.01.300326	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGKA BARAT	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	219.597.500	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	219.597.500	219.597.500	-
163	010.01.320052	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	132111	Peralatan dan Mesin	26.895.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	26.895.000	-	-	-
164	010.01.320052	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(26.895.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(26.895.000)	-	-	-
165	010.01.330620	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	348.786.000	(348.786.000)	348.786.000	-
166	010.01.330620	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(348.786.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(348.786.000)	-	-	-
167	010.01.330620	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.170.532.366	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.170.532.366	-	-	-
168	010.01.330620	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	348.786.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	348.786.000	348.786.000	-
169	010.01.340320	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU UTARA (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.855.730.767	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.855.730.767	-	-	-
170	010.01.340529	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMASA (06)	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	342.000.000	(342.000.000)	342.000.000	-
171	010.01.340529	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMASA (06)	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(342.000.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(342.000.000)	-	-	-
172	010.01.340529	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMASA (06)	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	342.000.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	342.000.000	342.000.000	-
173	010.01.352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	132111	Peralatan dan Mesin	167.150.000	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	167.150.000	-	-	-
174	010.01.352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(167.150.000)	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(167.150.000)	-	-	-
175	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(55.864.286)	010.01.483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	(55.864.286)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
176	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	782.100.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	782.100.000	-	-	-
177	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(55.864.286)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(55.864.286)	-	-	-
178	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	132111	Peralatan dan Mesin	782.100.000	010.01.483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	782.100.000	-	-	-
179	010.03.027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	-	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	668.768.897	(668.768.897)	668.768.897	-
180	010.03.027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	135111	Aset Tetap Renovasi	668.768.897	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	-	668.768.897	668.768.897	-
181	010.04.050037	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	69.820.000	026.05.451270	DITJEN. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	69.820.000	-	-	-
182	010.04.050037	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(69.820.000)	026.05.451270	DITJEN. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	(69.820.000)	-	-	-
183	010.04.065129	BAPPEDA PROPINSI NAD	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.500.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(17.500.000)	-	-	-
184	010.04.065129	BAPPEDA PROPINSI NAD	132111	Peralatan dan Mesin	17.500.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	17.500.000	-	-	-
185	010.04.080054	DINAS PRASJAL DAN TARUKIM PROPINSI SUMATERA BARAT	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.809.502.117	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.809.502.117	-	-	-
186	010.04.130017	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.575.601.236	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.575.601.236	-	-	-
187	010.04.130017	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	132111	Peralatan dan Mesin	1.629.744.712	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.629.744.712	-	-	-
188	010.04.130017	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.629.744.712)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(1.629.744.712)	-	-	-
189	010.04.170010	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA (TP)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.395.007.844	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.395.007.844	-	-	-
190	010.04.170420	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(795.460.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(795.460.000)	-	-	-
191	010.04.170420	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	132111	Peralatan dan Mesin	795.460.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	795.460.000	-	-	-
192	010.04.170520	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	132111	Peralatan dan Mesin	18.000.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	18.000.000	-	-	-
193	010.04.170520	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.000.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(18.000.000)	-	-	-
194	010.04.179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.132.438.140	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.132.438.140	-	-	-
195	010.04.240149	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.044.537.333	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.044.537.333	-	-	-
196	010.04.240149	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	132111	Peralatan dan Mesin	248.875.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	248.875.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
197	010.04.240149	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(248.875.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(248.875.000)	-	-	-
198	010.04.240149	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.792.732.210	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.792.732.210	-	-	-
199	010.04.240260	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	132111	Peralatan dan Mesin	174.900.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	174.900.000	-	-	-
200	010.04.240260	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	291.825.605	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	291.825.605	-	-	-
201	010.04.240260	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(174.900.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(174.900.000)	-	-	-
202	010.04.240342	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	762.374.061	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	762.374.061	-	-	-
203	010.04.240342	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	175.000.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	175.000.000	-	-	-
204	010.04.240342	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(175.000.000)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(175.000.000)	-	-	-
205	010.04.240351	BAPPEDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	367.994.675	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	367.994.675	-	-	-
206	010.04.250026	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.074.129.737)	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	(1.074.129.737)	-	-	-
207	010.04.250026	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	132111	Peralatan dan Mesin	1.074.129.737	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.074.129.737	-	-	-
208	010.04.250026	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10.040.724	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	10.040.724	-	-	-
209	010.04.250026	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	556.966.725	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	556.966.725	-	-	-
210	010.04.250300	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV. PAPUA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	345.658.565	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	345.658.565	-	-	-
211	010.04.251525	KANTOR PERBATASAN DAN KERJASAMA DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.551.519.000	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.551.519.000	-	-	-
212	010.04.255161	BADAN PENGELOLA PERBATASAN KOTA JAYAPURA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	797.747.050	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	797.747.050	-	-	-
213	010.04.259396	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV. PAPUA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	463.816.260	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	463.816.260	-	-	-
214	010.05.029367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	166.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	166.000.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
215	010.05.029367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.775.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.775.000)	-	-	-
216	010.05.029367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	132111	Peralatan dan Mesin	9.775.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.775.000	-	-	-
217	010.05.029373	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KETAHANAN PANGAN KAB. CIANJUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
218	010.05.029373	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KETAHANAN PANGAN KAB. CIANJUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
219	010.05.029373	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KETAHANAN PANGAN KAB. CIANJUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	81.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	81.000.000	-	-	-
220	010.05.029376	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	117111	Barang Konsumsi	499.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	499.000	-	-	-
221	010.05.029376	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	132111	Peralatan dan Mesin	9.800.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.800.000	-	-	-
222	010.05.029376	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.800.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.800.000)	-	-	-
223	010.05.029418	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GARUT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	80.717.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	80.717.500	-	-	-
224	010.05.029418	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GARUT	132111	Peralatan dan Mesin	9.500.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.500.000	-	-	-
225	010.05.029418	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GARUT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.500.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.500.000)	-	-	-
226	010.05.029436	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
227	010.05.029436	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
228	010.05.029472	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	132111	Peralatan dan Mesin	10.120.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.120.000	-	-	-
229	010.05.029472	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.120.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.120.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
230	010.05.029472	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	80.925.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	80.925.000	-	-	-
231	010.05.029478	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANDUNG BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.982.500)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.982.500)	-	-	-
232	010.05.029478	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANDUNG BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	9.982.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.982.500	-	-	-
233	010.05.039438	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
234	010.05.039438	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	170.461.250	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	170.461.250	-	-	-
235	010.05.039438	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
236	010.05.039443	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
237	010.05.039443	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
238	010.05.039452	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
239	010.05.039452	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
240	010.05.039465	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.065.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.065.000	-	-	-
241	010.05.039465	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.065.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.065.000)	-	-	-
242	010.05.039470	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
243	010.05.039470	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
244	010.05.039480	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL	132111	Peralatan dan Mesin	10.115.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.115.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
245	010.05.039480	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.115.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.115.000)	-	-	-
246	010.05.039490	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.125.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.125.000)	-	-	-
247	010.05.039490	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	161.028.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	161.028.000	-	-	-
248	010.05.039490	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	132111	Peralatan dan Mesin	10.125.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.125.000	-	-	-
249	010.05.039500	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
250	010.05.039500	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
251	010.05.039504	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.145.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.145.000	-	-	-
252	010.05.039504	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.145.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.145.000)	-	-	-
253	010.05.039514	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.147.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.147.500	-	-	-
254	010.05.039514	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	164.716.820	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	164.716.820	-	-	-
255	010.05.039514	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.147.500)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.147.500)	-	-	-
256	010.05.039519	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
257	010.05.039519	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
258	010.05.039530	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
259	010.05.039530	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
260	010.05.039530	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	117111	Barang Konsumsi	37.850	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	37.850	-	-	-
261	010.05.039538	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
262	010.05.039538	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	79.444.800	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	79.444.800	-	-	-
263	010.05.039538	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
264	010.05.039546	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
265	010.05.039546	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.910.360	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.910.360	-	-	-
266	010.05.039546	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
267	010.05.039554	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
268	010.05.039554	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
269	010.05.039562	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.320.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.320.000)	-	-	-
270	010.05.039562	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG	132111	Peralatan dan Mesin	9.320.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.320.000	-	-	-
271	010.05.039568	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.665.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.665.000)	-	-	-
272	010.05.039568	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG	132111	Peralatan dan Mesin	9.665.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.665.000	-	-	-
273	010.05.039579	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO	132111	Peralatan dan Mesin	9.923.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.923.500	-	-	-
274	010.05.039579	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.923.500)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.923.500)	-	-	-
275	010.05.039599	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.115.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.115.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
276	010.05.039599	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN	132111	Peralatan dan Mesin	10.115.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.115.000	-	-	-
277	010.05.039605	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	132111	Peralatan dan Mesin	9.850.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.850.000	-	-	-
278	010.05.039605	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	74.629.350	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	74.629.350	-	-	-
279	010.05.039605	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.850.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.850.000)	-	-	-
280	010.05.039612	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali	132111	Peralatan dan Mesin	9.700.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.700.000	-	-	-
281	010.05.039612	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.700.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.700.000)	-	-	-
282	010.05.039621	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SRAGEN	117111	Barang Konsumsi	302.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	302.500	-	-	-
283	010.05.039626	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUKOHARJO	117111	Barang Konsumsi	135.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	135.000	-	-	-
284	010.05.039639	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	132111	Peralatan dan Mesin	10.065.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.065.000	-	-	-
285	010.05.039639	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	117111	Barang Konsumsi	134.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	134.000	-	-	-
286	010.05.039639	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.065.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.065.000)	-	-	-
287	010.05.049147	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	417.809.252	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	417.809.252	-	-	-
288	010.05.049147	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
289	010.05.049147	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
290	010.05.049173	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.140.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.140.000)	-	-	-
291	010.05.049173	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO	132111	Peralatan dan Mesin	10.140.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.140.000	-	-	-
292	010.05.059456	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK	132111	Peralatan dan Mesin	10.065.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.065.000	-	-	-
293	010.05.059456	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.065.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.065.000)	-	-	-
294	010.05.059464	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	132111	Peralatan dan Mesin	10.162.900	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.162.900	-	-	-
295	010.05.059464	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.162.900)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.162.900)	-	-	-
296	010.05.059464	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.641.440	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.641.440	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
297	010.05.059478	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.105.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.105.000	-	-	-
298	010.05.059478	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.105.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.105.000)	-	-	-
299	010.05.059491	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN KAB. PAMEKASAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	160.704.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	160.704.000	-	-	-
300	010.05.059498	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP	132111	Peralatan dan Mesin	9.750.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.750.000	-	-	-
301	010.05.059498	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.750.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.750.000)	-	-	-
302	010.05.059527	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
303	010.05.059527	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
304	010.05.059556	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PROBOLINGGO	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
305	010.05.059556	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PROBOLINGGO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
306	010.05.059560	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB.LUMAJANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
307	010.05.059560	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB.LUMAJANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
308	010.05.059586	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
309	010.05.059586	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
310	010.05.059613	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MADIUN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	165.438.090	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	165.438.090	-	-	-
311	010.05.059620	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	132111	Peralatan dan Mesin	9.915.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.915.000	-	-	-
312	010.05.059620	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	81.331.700	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	81.331.700	-	-	-
313	010.05.059620	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.915.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.915.000)	-	-	-
314	010.05.059623	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.065.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.065.000)	-	-	-
315	010.05.059623	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.065.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.065.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
316	010.05.059623	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	829.360.823	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	829.360.823	-	-	-
317	010.05.059630	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. PONOROGO	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	172.474.830	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	172.474.830	-	-	-
318	010.05.059652	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.780.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.780.000)	-	-	-
319	010.05.059652	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.780.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.780.000	-	-	-
320	010.05.059661	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
321	010.05.059661	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
322	010.05.069280	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.115.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.115.000)	-	-	-
323	010.05.069280	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	132111	Peralatan dan Mesin	10.115.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.115.000	-	-	-
324	010.05.069280	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	80.776.430	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	80.776.430	-	-	-
325	010.05.069284	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
326	010.05.069284	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
327	010.05.069290	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.950.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.950.000)	-	-	-
328	010.05.069290	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	9.950.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.950.000	-	-	-
329	010.05.069303	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
330	010.05.069303	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
331	010.05.069309	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
332	010.05.069309	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
333	010.05.069321	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.100.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.100.000	-	-	-
334	010.05.069321	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.100.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.100.000)	-	-	-
335	010.05.069328	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
336	010.05.069328	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
337	010.05.069334	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
338	010.05.069334	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
339	010.05.069345	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
340	010.05.069345	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
341	010.05.069352	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
342	010.05.069352	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
343	010.05.069356	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMPONG KAB. ACEH JAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
344	010.05.069356	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMPONG KAB. ACEH JAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
345	010.05.069358	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
346	010.05.069358	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
347	010.05.069362	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
348	010.05.069362	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
349	010.05.069367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
350	010.05.069367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	117111	Barang Konsumsi	75.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	75.000	-	-	-
351	010.05.069367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
352	010.05.069371	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.950.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.950.000)	-	-	-
353	010.05.069371	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA	132111	Peralatan dan Mesin	9.950.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.950.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
354	010.05.079353	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
355	010.05.079353	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
356	010.05.079359	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.165.850	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.165.850	-	-	-
357	010.05.079359	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
358	010.05.079359	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
359	010.05.079369	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	132111	Peralatan dan Mesin	10.160.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.160.000	-	-	-
360	010.05.079369	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.160.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.160.000)	-	-	-
361	010.05.079369	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	83.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	83.000.000	-	-	-
362	010.05.079376	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
363	010.05.079376	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
364	010.05.079383	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
365	010.05.079383	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
366	010.05.079390	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
367	010.05.079390	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
368	010.05.079393	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
369	010.05.079393	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
370	010.05.079395	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
371	010.05.079395	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
372	010.05.079413	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
373	010.05.079413	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
374	010.05.079425	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
375	010.05.079425	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
376	010.05.079438	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	165.751.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	165.751.000	-	-	-
377	010.05.079438	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
378	010.05.079438	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
379	010.05.079444	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
380	010.05.079444	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
381	010.05.079447	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
382	010.05.079447	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
383	010.05.079450	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
384	010.05.079450	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
385	010.05.079457	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
386	010.05.079457	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
387	010.05.079459	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
388	010.05.079459	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
389	010.05.079463	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
390	010.05.079463	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
391	010.05.079471	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.436.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.436.000	-	-	-
392	010.05.079471	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.436.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.436.000)	-	-	-
393	010.05.079473	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	9.850.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.850.000	-	-	-
394	010.05.079473	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.850.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.850.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
395	010.05.079473	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	494.680.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	494.680.000	-	-	-
396	010.05.089289	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA	132111	Peralatan dan Mesin	9.949.995	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.949.995	-	-	-
397	010.05.089289	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.949.995)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.949.995)	-	-	-
398	010.05.089298	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK	132111	Peralatan dan Mesin	9.965.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.965.000	-	-	-
399	010.05.089298	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.965.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.965.000)	-	-	-
400	010.05.089305	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.065.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.065.000)	-	-	-
401	010.05.089305	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.065.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.065.000	-	-	-
402	010.05.089305	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	162.530.600	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	162.530.600	-	-	-
403	010.05.089313	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.155.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.155.000)	-	-	-
404	010.05.089313	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.155.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.155.000	-	-	-
405	010.05.089319	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
406	010.05.089319	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
407	010.05.089338	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.116.050	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.116.050	-	-	-
408	010.05.089338	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	132111	Peralatan dan Mesin	9.850.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.850.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
409	010.05.089338	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.850.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.850.000)	-	-	-
410	010.05.089345	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.015.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.015.000	-	-	-
411	010.05.089345	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.015.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.015.000)	-	-	-
412	010.05.089356	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	132111	Peralatan dan Mesin	10.015.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.015.000	-	-	-
413	010.05.089356	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.015.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.015.000)	-	-	-
414	010.05.099452	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	161.747.080	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	161.747.080	-	-	-
415	010.05.099452	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	132111	Peralatan dan Mesin	10.157.960	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.157.960	-	-	-
416	010.05.099452	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.157.960)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.157.960)	-	-	-
417	010.05.099457	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
418	010.05.099457	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
419	010.05.099476	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.845.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.845.000)	-	-	-
420	010.05.099476	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	132111	Peralatan dan Mesin	9.845.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.845.000	-	-	-
421	010.05.099476	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	157.805.820	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	157.805.820	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
422	010.05.099484	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
423	010.05.099484	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
424	010.05.099484	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	164.489.400	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	164.489.400	-	-	-
425	010.05.099498	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU	132111	Peralatan dan Mesin	10.163.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.163.000	-	-	-
426	010.05.099498	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.163.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.163.000)	-	-	-
427	010.05.099504	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
428	010.05.099504	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
429	010.05.099504	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	159.489.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	159.489.000	-	-	-
430	010.05.099510	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
431	010.05.099510	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
432	010.05.099510	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	78.282.280	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	78.282.280	-	-	-
433	010.05.109222	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
434	010.05.109222	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
435	010.05.109222	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	152.031.100	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	152.031.100	-	-	-
436	010.05.109234	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
437	010.05.109234	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
438	010.05.109238	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
439	010.05.109238	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
440	010.05.109247	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
441	010.05.109247	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
442	010.05.109254	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
443	010.05.109254	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
444	010.05.109269	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
445	010.05.109269	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
446	010.05.109272	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
447	010.05.109272	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
448	010.05.109272	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	173.071.600	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	173.071.600	-	-	-
449	010.05.109280	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
450	010.05.109280	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
451	010.05.119239	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI BANYUASIN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.994.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.994.000)	-	-	-
452	010.05.119239	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI BANYUASIN	132111	Peralatan dan Mesin	9.994.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.994.000	-	-	-
453	010.05.119245	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.015.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.015.000)	-	-	-
454	010.05.119245	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU	132111	Peralatan dan Mesin	10.015.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.015.000	-	-	-
455	010.05.119252	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	72.658.200	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	72.658.200	-	-	-
456	010.05.119252	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
457	010.05.119252	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
458	010.05.119260	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LAHAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
459	010.05.119260	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LAHAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
460	010.05.119265	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
461	010.05.119265	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	117111	Barang Konsumsi	170.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	170.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
462	010.05.119265	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
463	010.05.119274	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMPEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR	132111	Peralatan dan Mesin	9.950.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.950.000	-	-	-
464	010.05.119274	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMPEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.950.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.950.000)	-	-	-
465	010.05.119281	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANYUASIN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
466	010.05.119281	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANYUASIN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	419.258.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	419.258.500	-	-	-
467	010.05.119281	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANYUASIN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
468	010.05.119288	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
469	010.05.119288	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
470	010.05.119294	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
471	010.05.119294	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
472	010.05.119294	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	171.565.320	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	171.565.320	-	-	-
473	010.05.119299	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
474	010.05.119299	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
475	010.05.129235	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG	117111	Barang Konsumsi	71.678.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	71.678.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
476	010.05.129247	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
477	010.05.129247	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
478	010.05.129247	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	245.032.600	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	245.032.600	-	-	-
479	010.05.129253	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN BINA PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. LAMPUNG TENGAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.976.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.976.000)	-	-	-
480	010.05.129253	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN BINA PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. LAMPUNG TENGAH	132111	Peralatan dan Mesin	9.976.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.976.000	-	-	-
481	010.05.129266	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
482	010.05.129266	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
483	010.05.129270	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
484	010.05.129270	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.087.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.087.000	-	-	-
485	010.05.129270	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
486	010.05.129288	KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
487	010.05.129288	KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
488	010.05.129292	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
489	010.05.129292	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
490	010.05.129296	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	233.945.280	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	233.945.280	-	-	-
491	010.05.129296	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.965.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.965.000)	-	-	-
492	010.05.129296	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.965.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.965.000	-	-	-
493	010.05.139250	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR	132111	Peralatan dan Mesin	59.975.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	59.975.000	-	-	-
494	010.05.139250	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(59.975.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(59.975.000)	-	-	-
495	010.05.139267	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	117111	Barang Konsumsi	754.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	754.500	-	-	-
496	010.05.139267	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
497	010.05.139267	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
498	010.05.139267	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.917.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.917.000	-	-	-
499	010.05.139274	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
500	010.05.139274	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
501	010.05.139274	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	159.870.510	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	159.870.510	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
502	010.05.139285	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
503	010.05.139285	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
504	010.05.139285	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	75.558.620	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	75.558.620	-	-	-
505	010.05.139295	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
506	010.05.139295	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
507	010.05.139313	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
508	010.05.139313	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	163.443.600	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	163.443.600	-	-	-
509	010.05.139313	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
510	010.05.139325	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
511	010.05.139325	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
512	010.05.139328	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU	132111	Peralatan dan Mesin	9.965.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.965.000	-	-	-
513	010.05.139328	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.965.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.965.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
514	010.05.139330	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.015.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.015.000	-	-	-
515	010.05.139330	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.015.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.015.000)	-	-	-
516	010.05.139335	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
517	010.05.139335	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	602.913.780	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	602.913.780	-	-	-
518	010.05.139335	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
519	010.05.149235	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
520	010.05.149235	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
521	010.05.149242	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.950.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.950.000)	-	-	-
522	010.05.149242	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.950.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.950.000	-	-	-
523	010.05.149257	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	9.880.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.880.000	-	-	-
524	010.05.149257	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.880.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.880.000)	-	-	-
525	010.05.149257	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	80.750.451	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	80.750.451	-	-	-
526	010.05.149267	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.SERUYAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
527	010.05.149267	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.SERUYAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
528	010.05.149270	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
529	010.05.149270	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
530	010.05.149278	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
531	010.05.149278	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
532	010.05.149285	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG PISAU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.750.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.750.000)	-	-	-
533	010.05.149285	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG PISAU	132111	Peralatan dan Mesin	9.750.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.750.000	-	-	-
534	010.05.149296	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	9.950.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.950.000	-	-	-
535	010.05.149296	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO TIMUR	117111	Barang Konsumsi	2.901.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	2.901.500	-	-	-
536	010.05.149296	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.950.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.950.000)	-	-	-
537	010.05.159202	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	132111	Peralatan dan Mesin	9.790.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.790.000	-	-	-
538	010.05.159202	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.790.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.790.000)	-	-	-
539	010.05.159202	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	117111	Barang Konsumsi	225.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	225.500	-	-	-
540	010.05.159214	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	117111	Barang Konsumsi	1.470.850	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1.470.850	-	-	-
541	010.05.159214	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
542	010.05.159214	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
543	010.05.159219	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
544	010.05.159219	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
545	010.05.159224	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH	132111	Peralatan dan Mesin	10.115.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.115.000	-	-	-
546	010.05.159224	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.115.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.115.000)	-	-	-
547	010.05.159240	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
548	010.05.159240	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
549	010.05.159245	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.700.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.700.000)	-	-	-
550	010.05.159245	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	9.700.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.700.000	-	-	-
551	010.05.159250	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANAH BUMBU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.709.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.709.500	-	-	-
552	010.05.159255	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
553	010.05.159255	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
554	010.05.169192	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER	132111	Peralatan dan Mesin	9.999.900	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.999.900	-	-	-
555	010.05.169192	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.999.900)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.999.900)	-	-	-
556	010.05.169196	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.035.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.035.000	-	-	-
557	010.05.169196	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.035.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.035.000)	-	-	-
558	010.05.169202	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.850.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.850.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
559	010.05.169202	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU	132111	Peralatan dan Mesin	9.850.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.850.000	-	-	-
560	010.05.169206	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	140.722.920	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	140.722.920	-	-	-
561	010.05.169206	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
562	010.05.169206	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
563	010.05.169211	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	9.125.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.125.000	-	-	-
564	010.05.169211	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.125.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.125.000)	-	-	-
565	010.05.169218	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
566	010.05.169218	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
567	010.05.169223	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	87.547.620	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	87.547.620	-	-	-
568	010.05.169226	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
569	010.05.169226	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
570	010.05.179275	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
571	010.05.179275	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
572	010.05.179280	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
573	010.05.179280	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
574	010.05.179283	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
575	010.05.179283	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
576	010.05.179296	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
577	010.05.179296	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	468.985.950	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	468.985.950	-	-	-
578	010.05.179296	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
579	010.05.189223	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	80.925.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	80.925.000	-	-	-
580	010.05.189223	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
581	010.05.189223	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
582	010.05.189229	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	242.270.570	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	242.270.570	-	-	-
583	010.05.189229	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
584	010.05.189229	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
585	010.05.189234	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
586	010.05.189234	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
587	010.05.189240	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
588	010.05.189240	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
589	010.05.189243	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
590	010.05.189243	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
591	010.05.189249	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
592	010.05.189249	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
593	010.05.189249	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	162.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	162.000.000	-	-	-
594	010.05.189254	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
595	010.05.189254	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
596	010.05.189260	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	995.592.470	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	995.592.470	-	-	-
597	010.05.189260	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
598	010.05.189260	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
599	010.05.189271	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIGI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.680.450	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.680.450	-	-	-
600	010.05.199398	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	117111	Barang Konsumsi	178.750	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	178.750	-	-	-
601	010.05.199398	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	132111	Peralatan dan Mesin	9.750.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.750.000	-	-	-
602	010.05.199398	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.750.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.750.000)	-	-	-
603	010.05.199407	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.115.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.115.000)	-	-	-
604	010.05.199407	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA	132111	Peralatan dan Mesin	10.115.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.115.000	-	-	-
605	010.05.199415	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	162.893.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	162.893.000	-	-	-
606	010.05.199415	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
607	010.05.199415	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
608	010.05.199421	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	83.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	83.000.000	-	-	-
609	010.05.199421	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
610	010.05.199421	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
611	010.05.199430	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
612	010.05.199430	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
613	010.05.199442	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
614	010.05.199442	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
615	010.05.199442	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	149.400.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	149.400.000	-	-	-
616	010.05.199452	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	117111	Barang Konsumsi	55.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	55.000	-	-	-
617	010.05.199452	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
618	010.05.199452	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
619	010.05.199488	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.115.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.115.000)	-	-	-
620	010.05.199488	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG	132111	Peralatan dan Mesin	10.115.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.115.000	-	-	-
621	010.05.199499	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
622	010.05.199499	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
623	010.05.199499	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	117111	Barang Konsumsi	265.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	265.000	-	-	-
624	010.05.199508	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
625	010.05.199508	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
626	010.05.199515	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
627	010.05.199515	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
628	010.05.199522	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.115.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.115.000)	-	-	-
629	010.05.199522	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU	132111	Peralatan dan Mesin	10.115.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.115.000	-	-	-
630	010.05.199530	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
631	010.05.199530	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.253.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.253.000	-	-	-
632	010.05.199530	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
633	010.05.199542	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
634	010.05.199542	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
635	010.05.199560	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
636	010.05.199560	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
637	010.05.199570	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	117111	Barang Konsumsi	840.500	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	840.500	-	-	-
638	010.05.199570	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	132111	Peralatan dan Mesin	10.115.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.115.000	-	-	-
639	010.05.199570	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.115.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.115.000)	-	-	-
640	010.05.199574	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.065.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.065.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
641	010.05.199574	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.065.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.065.000	-	-	-
642	010.05.199578	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
643	010.05.199578	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
644	010.05.209209	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
645	010.05.209209	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
646	010.05.209212	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
647	010.05.209212	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
648	010.05.209219	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
649	010.05.209219	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	157.950.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	157.950.000	-	-	-
650	010.05.209219	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
651	010.05.209227	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.950.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.950.000	-	-	-
652	010.05.209227	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.975.930	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.975.930	-	-	-
653	010.05.209227	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.950.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.950.000)	-	-	-
654	010.05.209234	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
655	010.05.209234	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
656	010.05.209239	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
657	010.05.209239	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
658	010.05.209244	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	327.489.230	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	327.489.230	-	-	-
659	010.05.209244	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
660	010.05.209244	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
661	010.05.209245	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
662	010.05.209245	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
663	010.05.209250	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. BUTON UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
664	010.05.209250	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. BUTON UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
665	010.05.219188	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
666	010.05.219188	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
667	010.05.219194	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
668	010.05.219194	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
669	010.05.219208	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
670	010.05.219208	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
671	010.05.219214	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
672	010.05.219214	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
673	010.05.219217	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	173.238.430	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	173.238.430	-	-	-
674	010.05.219217	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
675	010.05.219217	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
676	010.05.219222	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
677	010.05.219222	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
678	010.05.229177	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
679	010.05.229177	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
680	010.05.229189	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
681	010.05.229189	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
682	010.05.229193	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANYAR	132111	Peralatan dan Mesin	7.160.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	7.160.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
683	010.05.229193	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANYAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.160.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(7.160.000)	-	-	-
684	010.05.229223	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	418.821.685	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	418.821.685	-	-	-
685	010.05.229223	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.800.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.800.000)	-	-	-
686	010.05.229223	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.800.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.800.000	-	-	-
687	010.05.239244	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMRINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
688	010.05.239244	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMRINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
689	010.05.239250	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
690	010.05.239250	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
691	010.05.239250	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	144.164.028	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	144.164.028	-	-	-
692	010.05.239273	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
693	010.05.239273	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	684.538.904	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	684.538.904	-	-	-
694	010.05.239273	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
695	010.05.239281	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
696	010.05.239281	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
697	010.05.239290	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
698	010.05.239290	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
699	010.05.239291	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
700	010.05.239291	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
701	010.05.249309	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	86.670.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	86.670.000	-	-	-
702	010.05.249309	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
703	010.05.249309	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
704	010.05.249318	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
705	010.05.249318	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
706	010.05.249325	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
707	010.05.249325	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
708	010.05.249335	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
709	010.05.249335	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
710	010.05.249344	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
711	010.05.249344	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
712	010.05.249350	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
713	010.05.249350	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
714	010.05.249357	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
715	010.05.249357	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
716	010.05.249361	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
717	010.05.249361	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
718	010.05.249367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI	132111	Peralatan dan Mesin	8.665.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8.665.000	-	-	-
719	010.05.249367	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.665.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(8.665.000)	-	-	-
720	010.05.249377	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
721	010.05.249377	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
722	010.05.249384	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
723	010.05.249384	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
724	010.05.249390	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LEMBATA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
725	010.05.249390	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LEMBATA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
726	010.05.249395	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	165.422.652	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	165.422.652	-	-	-
727	010.05.249399	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
728	010.05.249399	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
729	010.05.249401	BPMD,BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK,KB & KESBANG KAB. NAGEKEO	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
730	010.05.249401	BPMD,BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK,KB & KESBANG KAB. NAGEKEO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
731	010.05.249405	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA TENGAH	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
732	010.05.249405	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA TENGAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
733	010.05.249409	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT DAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
734	010.05.249409	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT DAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
735	010.05.249414	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
736	010.05.249414	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
737	010.05.259277	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
738	010.05.259277	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
739	010.05.259291	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
740	010.05.259291	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
741	010.05.259305	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
742	010.05.259305	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
743	010.05.259312	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
744	010.05.259312	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
745	010.05.259331	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN KAB. ASMAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
746	010.05.259331	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN KAB. ASMAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
747	010.05.259335	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEL	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
748	010.05.259335	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEL	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
749	010.05.259339	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
750	010.05.259339	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
751	010.05.259345	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. KEEROM	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	82.834.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	82.834.000	-	-	-
752	010.05.259354	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
753	010.05.259354	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
754	010.05.259359	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
755	010.05.259359	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
756	010.05.259363	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
757	010.05.259363	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
758	010.05.259369	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
759	010.05.259369	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
760	010.05.269204	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.065.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.065.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
761	010.05.269204	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.065.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.065.000	-	-	-
762	010.05.269204	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	80.925.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	80.925.000	-	-	-
763	010.05.269214	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.970.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.970.000)	-	-	-
764	010.05.269214	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	78.112.130	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	78.112.130	-	-	-
765	010.05.269214	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.970.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.970.000	-	-	-
766	010.05.269224	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG LEBONG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
767	010.05.269224	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG LEBONG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	169.009.580	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	169.009.580	-	-	-
768	010.05.269224	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG LEBONG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
769	010.05.269227	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB. SELUMA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.140.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.140.000)	-	-	-
770	010.05.269227	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB. SELUMA	132111	Peralatan dan Mesin	10.140.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.140.000	-	-	-
771	010.05.269230	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
772	010.05.269230	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
773	010.05.269235	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.010.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.010.000)	-	-	-
774	010.05.269235	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO	132111	Peralatan dan Mesin	10.010.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.010.000	-	-	-
775	010.05.269240	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
776	010.05.269240	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
777	010.05.269245	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
778	010.05.269245	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
779	010.05.269245	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	165.677.960	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	165.677.960	-	-	-
780	010.05.269248	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKULU TENGAH	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
781	010.05.269248	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKULU TENGAH	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
782	010.05.289187	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	80.925.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	80.925.000	-	-	-
783	010.05.289187	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	117111	Barang Konsumsi	749.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	749.000	-	-	-
784	010.05.289190	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
785	010.05.289190	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
786	010.05.289196	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
787	010.05.289196	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
788	010.05.289207	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
789	010.05.289207	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
790	010.05.289212	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
791	010.05.289212	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
792	010.05.299452	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
793	010.05.299452	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
794	010.05.299468	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
795	010.05.299468	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	638.050.190	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	638.050.190	-	-	-
796	010.05.299468	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
797	010.05.299477	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
798	010.05.299477	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	79.792.050	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	79.792.050	-	-	-
799	010.05.299477	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
800	010.05.299483	BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TANGERANG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	74.700.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	74.700.000	-	-	-
801	010.05.299501	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.090.910)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.090.910)	-	-	-
802	010.05.299501	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	9.090.910	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.090.910	-	-	-
803	010.05.309247	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
804	010.05.309247	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
805	010.05.309247	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	162.597.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	162.597.000	-	-	-
806	010.05.319176	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
807	010.05.319176	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
808	010.05.329122	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
809	010.05.329122	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
810	010.05.329128	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KAB. KARIMUN	132111	Peralatan dan Mesin	9.900.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9.900.000	-	-	-
811	010.05.329128	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KAB. KARIMUN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.900.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(9.900.000)	-	-	-
812	010.05.329137	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
813	010.05.329137	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	161.616.770	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	161.616.770	-	-	-
814	010.05.329137	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
815	010.05.329144	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
816	010.05.329144	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
817	010.05.329146	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
818	010.05.329146	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
819	010.05.339176	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
820	010.05.339176	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
821	010.05.339185	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.035.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.035.000)	-	-	-
822	010.05.339185	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG	132111	Peralatan dan Mesin	10.035.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.035.000	-	-	-
823	010.05.339194	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.035.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.035.000)	-	-	-
824	010.05.339194	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	10.035.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.035.000	-	-	-
825	010.05.339200	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT	132111	Peralatan dan Mesin	10.035.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.035.000	-	-	-
826	010.05.339200	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.035.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.035.000)	-	-	-
827	010.05.339202	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI	132111	Peralatan dan Mesin	10.000.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.000.000	-	-	-
828	010.05.339202	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.000.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.000.000)	-	-	-
829	010.05.339210	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
830	010.05.339210	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
831	010.05.340170	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(78.930.200)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(78.930.200)	-	-	-
832	010.05.340170	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	78.930.200	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	78.930.200	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
833	010.05.340244	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
834	010.05.340244	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
835	010.05.340448	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
836	010.05.340448	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
837	010.05.340536	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.165.000)	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	(10.165.000)	-	-	-
838	010.05.340536	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	165.869.690	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	165.869.690	-	-	-
839	010.05.340536	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	132111	Peralatan dan Mesin	10.165.000	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	10.165.000	-	-	-
840	010.06.052151	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. BLITAR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.877.956.850	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.877.956.850	-	-	-
841	010.06.061718	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENER MERIAH	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	199.400.000	(199.400.000)	199.400.000	-
842	010.06.061718	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENER MERIAH	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(199.400.000)	010.06.039279	SATKER TIDAK ADA	-	(199.400.000)	199.400.000	-
843	010.06.061718	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENER MERIAH	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	911.832.973	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	911.832.973	-	-	-
844	010.06.061718	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENER MERIAH	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	199.400.000	010.06.039279	SATKER TIDAK ADA	-	199.400.000	199.400.000	-
845	010.06.061718	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENER MERIAH	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(199.400.000)	199.400.000	199.400.000	-
846	010.06.070950	DINAS PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.585.459.931	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.585.459.931	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
847	010.06.071342	DINAS CIPTA KARYA KAB. MANDAILING NATAL	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.050.343.694	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.050.343.694	-	-	-
848	010.06.080928	DINAS KIMPRASWIL KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.488.917.069	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.488.917.069	-	-	-
849	010.06.081219	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	370.670.000	(370.670.000)	370.670.000	-
850	010.06.081219	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.473.039.371	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.473.039.371	-	-	-
851	010.06.081219	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(370.670.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(370.670.000)	-	-	-
852	010.06.081219	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	370.670.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	370.670.000	370.670.000	-
853	010.06.090256	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB BENGKALIS	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	67.670.350	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	67.670.350	-	-	-
854	010.06.111015	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. OKU TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.147.522.760	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.147.522.760	-	-	-
855	010.06.140727	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	267.560.000	(267.560.000)	267.560.000	-
856	010.06.140727	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(267.560.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(267.560.000)	-	-	-
857	010.06.140727	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.260.972.450	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.260.972.450	-	-	-
858	010.06.140727	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	267.560.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	267.560.000	267.560.000	-
859	010.06.160626	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	496.630.000	(496.630.000)	496.630.000	-
860	010.06.160626	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.192.334.944	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3.192.334.944	-	-	-
861	010.06.160626	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(496.630.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(496.630.000)	-	-	-
862	010.06.160626	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	496.630.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	496.630.000	496.630.000	-
863	010.06.170820	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MINAHASA UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	604.870.200	(604.870.200)	604.870.200	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
864	010.06.170820	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MINAHASA UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.959.511.659	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	4.959.511.659	-	-	-
865	010.06.170820	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MINAHASA UTARA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(604.870.200)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(604.870.200)	-	-	-
866	010.06.170820	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MINAHASA UTARA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	604.870.200	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	604.870.200	604.870.200	-
867	010.06.171010	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN SUMBER DAYA AIR KAB. MINAHASA TENGGARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	572.649.928	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	572.649.928	-	-	-
868	010.06.180330	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLI TOLI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.455.783.007	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.455.783.007	-	-	-
869	010.06.180924	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.095.340.500	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.095.340.500	-	-	-
870	010.06.191429	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	75.000.000	(75.000.000)	75.000.000	-
871	010.06.191429	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(75.000.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(75.000.000)	-	-	-
872	010.06.191429	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.538.006.797	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.538.006.797	-	-	-
873	010.06.191429	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	75.000.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	75.000.000	75.000.000	-
874	010.06.191939	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOPPENG	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	538.648.860	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	538.648.860	-	-	-
875	010.06.192274	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	429.232.000	(429.232.000)	429.232.000	-
876	010.06.192274	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.981.170.039	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.981.170.039	-	-	-
877	010.06.192274	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(429.232.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(429.232.000)	-	-	-
878	010.06.192274	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	429.232.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	429.232.000	429.232.000	-
879	010.06.200816	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	324.751.850	(324.751.850)	324.751.850	-
880	010.06.200816	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.241.171.436	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.241.171.436	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
881	010.06.200816	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(324.751.850)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(324.751.850)	-	-	-
882	010.06.200816	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	324.751.850	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	324.751.850	324.751.850	-
883	010.06.210726	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	403.454.789	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	403.454.789	-	-	-
884	010.06.240348	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	846.973.507	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	846.973.507	-	-	-
885	010.06.240553	SEKRETARIAT DAERAH KAB. A L O R	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	233.085.375	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	233.085.375	-	-	-
886	010.06.241520	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MANGGARAI BARAT	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	419.917.000	(419.917.000)	419.917.000	-
887	010.06.241520	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MANGGARAI BARAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.812.055.484	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.812.055.484	-	-	-
888	010.06.241520	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MANGGARAI BARAT	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(419.917.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(419.917.000)	-	-	-
889	010.06.241520	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MANGGARAI BARAT	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	419.917.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	419.917.000	419.917.000	-
890	010.06.250936	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	234.500.000	(234.500.000)	234.500.000	-
891	010.06.250936	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.638.600.005	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.638.600.005	-	-	-
892	010.06.250936	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(234.500.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(234.500.000)	-	-	-
893	010.06.250936	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	234.500.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	234.500.000	234.500.000	-
894	010.06.251128	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	249.306.000	(249.306.000)	249.306.000	-
895	010.06.251128	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(249.306.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(249.306.000)	-	-	-
896	010.06.251128	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.609.527.750	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.609.527.750	-	-	-
897	010.06.251128	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	249.306.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	249.306.000	249.306.000	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
898	010.06.251413	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ASMAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.781.455.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.781.455.000	-	-	-
899	010.06.251514	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	213.186.750	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	213.186.750	-	-	-
900	010.06.251514	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	197.937.405	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	197.937.405	-	-	-
901	010.06.251516	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	538.600.000	(538.600.000)	538.600.000	-
902	010.06.251516	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.791.009.500	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3.791.009.500	-	-	-
903	010.06.251516	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(538.600.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(538.600.000)	-	-	-
904	010.06.251516	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	538.600.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	538.600.000	538.600.000	-
905	010.06.251717	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	405.882.950	(405.882.950)	405.882.950	-
906	010.06.251717	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(405.882.950)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(405.882.950)	-	-	-
907	010.06.251717	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.636.985.383	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.636.985.383	-	-	-
908	010.06.251717	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	405.882.950	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	405.882.950	405.882.950	-
909	010.06.251721	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEEROM	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	264.262.500	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	264.262.500	-	-	-
910	010.06.252318	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAROPEN	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.700.989.900	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.700.989.900	-	-	-
911	010.06.265156	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	49.925.000	(49.925.000)	49.925.000	-
912	010.06.265156	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	533.109.500	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	533.109.500	-	-	-
913	010.06.265156	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(49.925.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(49.925.000)	-	-	-
914	010.06.265156	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	49.925.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	49.925.000	49.925.000	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
915	010.06.280253	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.039.440.340	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.039.440.340	-	-	-
916	010.06.280322	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.051.489.810	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.051.489.810	-	-	-
917	010.06.280417	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	698.997.544	(698.997.544)	698.997.544	-
918	010.06.280417	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(698.997.544)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(698.997.544)	-	-	-
919	010.06.280417	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.241.547.215	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3.241.547.215	-	-	-
920	010.06.280417	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	698.997.544	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	698.997.544	698.997.544	-
921	010.06.280424	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.061.420.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.061.420.000	-	-	-
922	010.06.280514	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPULAUAN SULA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	521.740.000	(521.740.000)	521.740.000	-
923	010.06.280514	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPULAUAN SULA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.696.444.600	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3.696.444.600	-	-	-
924	010.06.280514	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPULAUAN SULA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(521.740.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(521.740.000)	-	-	-
925	010.06.280514	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPULAUAN SULA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	521.740.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	521.740.000	521.740.000	-
926	010.06.280525	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.062.666.110	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.062.666.110	-	-	-
927	010.06.280621	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.626.293.274	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.626.293.274	-	-	-
928	010.06.280723	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.398.942.800	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.398.942.800	-	-	-
929	010.06.285125	SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	331.568.877	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	331.568.877	-	-	-
930	010.06.310224	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	396.261.000	(396.261.000)	396.261.000	-
931	010.06.310224	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.523.955.206	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.523.955.206	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
932	010.06.310224	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(396.261.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(396.261.000)	-	-	-
933	010.06.310224	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	396.261.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	396.261.000	396.261.000	-
934	010.06.310321	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.541.268.140	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	4.368.815.640	(1.827.547.500)	1.827.547.500	-
935	010.06.310321	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	399.585.000	(399.585.000)	399.585.000	-
936	010.06.310321	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(399.585.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(399.585.000)	-	-	-
937	010.06.310321	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	399.585.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	399.585.000	399.585.000	-
938	010.06.320423	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LINGGA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	149.000.000	(149.000.000)	149.000.000	-
939	010.06.320423	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LINGGA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(149.000.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(149.000.000)	-	-	-
940	010.06.320423	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LINGGA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	149.000.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	149.000.000	149.000.000	-
941	010.06.320423	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LINGGA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.827.547.500	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	1.827.547.500	1.827.547.500	-
942	010.06.330415	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SORONG SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.954.269.243	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	4.954.269.243	-	-	-
943	010.06.330524	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. RAJA AMPAT	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	858.726.000	(858.726.000)	858.726.000	-
944	010.06.330524	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. RAJA AMPAT	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(858.726.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(858.726.000)	-	-	-
945	010.06.330524	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. RAJA AMPAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.483.131.144	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	5.483.131.144	-	-	-
946	010.06.330524	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. RAJA AMPAT	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	858.726.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	858.726.000	858.726.000	-
947	010.06.330531	SEKRETARIAT DAERAH KAB. RAJA AMPAT	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	195.000.000	(195.000.000)	195.000.000	-
948	010.06.330531	SEKRETARIAT DAERAH KAB. RAJA AMPAT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.671.000.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.671.000.000	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
949	010.06.330531	SEKRETARIAT DAERAH KAB. RAJA AMPAT	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(195.000.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(195.000.000)	-	-	-
950	010.06.330531	SEKRETARIAT DAERAH KAB. RAJA AMPAT	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	195.000.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	195.000.000	195.000.000	-
951	010.06.330721	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	329.500.000	(329.500.000)	329.500.000	-
952	010.06.330721	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(329.500.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(329.500.000)	-	-	-
953	010.06.330721	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.256.803.760	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.256.803.760	-	-	-
954	010.06.330721	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	329.500.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	329.500.000	329.500.000	-
955	010.07.021256	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANDUNG	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.696.790.672	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.696.790.672	-	-	-
956	010.07.021266	DINAS BINA MARGA KAB. BANDUNG	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(15.155.398.523)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(15.155.398.523)	-	-	-
957	010.07.021266	DINAS BINA MARGA KAB. BANDUNG	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.418.156.294	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.418.156.294	-	-	-
958	010.07.021266	DINAS BINA MARGA KAB. BANDUNG	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.848.377.052	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	3.848.377.052	-	-	-
959	010.07.021266	DINAS BINA MARGA KAB. BANDUNG	135111	Aset Tetap Renovasi	15.155.398.523	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	15.155.398.523	-	-	-
960	010.07.021504	BAPPEDA KAB. TASIKMALAYA	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(3.345.568.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(3.345.568.000)	-	-	-
961	010.07.021504	BAPPEDA KAB. TASIKMALAYA	162151	Software	3.345.568.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	3.345.568.000	-	-	-
962	010.07.021504	BAPPEDA KAB. TASIKMALAYA	132111	Peralatan dan Mesin	295.812.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	295.812.000	-	-	-
963	010.07.021504	BAPPEDA KAB. TASIKMALAYA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(295.812.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(295.812.000)	-	-	-
964	010.07.032302	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(10.372.552.691)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(10.372.552.691)	-	-	-
965	010.07.032302	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN	135111	Aset Tetap Renovasi	10.372.552.691	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	10.372.552.691	-	-	-
966	010.07.052354	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KAB. NGAWI	135111	Aset Tetap Renovasi	5.608.632.498	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	5.608.632.498	-	-	-
967	010.07.052354	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KAB. NGAWI	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5.608.632.498)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(5.608.632.498)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
968	010.07.052354	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KAB. NGAWI	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	954.038.804	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	954.038.804	-	-	-
969	010.07.052950	DINAS BINA MARGA KAB. LAMONGAN	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	857.169.171	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	857.169.171	-	-	-
970	010.07.070244	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	162151	Software	-	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	2.076.889.018	(2.076.889.018)	2.076.889.018	-
971	010.07.070244	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(2.076.889.018)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(2.076.889.018)	-	-	-
972	010.07.070244	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.076.889.018	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	2.076.889.018	2.076.889.018	-
973	010.07.075133	BAPPEDA KOTA MEDAN	162151	Software	-	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	2.733.280.000	(2.733.280.000)	2.733.280.000	-
974	010.07.075133	BAPPEDA KOTA MEDAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	92.556.000	(92.556.000)	92.556.000	-
975	010.07.075133	BAPPEDA KOTA MEDAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(92.556.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(92.556.000)	-	-	-
976	010.07.075133	BAPPEDA KOTA MEDAN	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(2.733.280.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(2.733.280.000)	-	-	-
977	010.07.075133	BAPPEDA KOTA MEDAN	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	92.556.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	92.556.000	92.556.000	-
978	010.07.075133	BAPPEDA KOTA MEDAN	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.733.280.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	2.733.280.000	2.733.280.000	-
979	010.07.080435	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SOLOK	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	274.817.795	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	786.887.890	(512.070.095)	512.070.095	-
980	010.07.080435	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SOLOK	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.541.238.182)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(4.541.238.182)	-	-	-
981	010.07.080435	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SOLOK	135111	Aset Tetap Renovasi	4.541.238.182	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	4.541.238.182	-	-	-
982	010.07.080444	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK	135111	Aset Tetap Renovasi	9.980.125.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	9.980.125.000	-	-	-
983	010.07.080444	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(9.980.125.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(9.980.125.000)	-	-	-
984	010.07.080735	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH DATAR	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20.687.247.948)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(20.687.247.948)	-	-	-
985	010.07.080735	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH DATAR	135111	Aset Tetap Renovasi	20.687.247.948	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	20.687.247.948	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
986	010.07.110805	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	132111	Peralatan dan Mesin	334.516.696	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	334.516.696	-	-	-
987	010.07.110805	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(334.516.696)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(334.516.696)	-	-	-
988	010.07.110805	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	162151	Software	1.577.738.504	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.577.738.504	-	-	-
989	010.07.110805	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1.577.738.504)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(1.577.738.504)	-	-	-
990	010.07.110805	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5.502.668	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	5.502.668	-	-	-
991	010.07.119267	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(502.946.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(502.946.000)	-	-	-
992	010.07.119267	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	162151	Software	502.946.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	502.946.000	-	-	-
993	010.07.120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	162151	Software	-	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.307.312.000	(1.307.312.000)	1.307.312.000	-
994	010.07.120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	131.020.000	(131.020.000)	131.020.000	-
995	010.07.120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	7.728.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	7.728.000	-	-	-
996	010.07.120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(1.307.312.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(1.307.312.000)	-	-	-
997	010.07.120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(131.020.000)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(131.020.000)	-	-	-
998	010.07.120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	131.020.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	131.020.000	131.020.000	-
999	010.07.120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.307.312.000	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	1.307.312.000	1.307.312.000	-
1000	010.07.191555	DINAS KESEHATAN KAB. TAKALAR	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	786.887.890	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	786.887.890	786.887.890	-
1001	010.07.205205	SEKDA KOTA BAU-BAU	162151	Software	-	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	2.494.545.455	(2.494.545.455)	2.494.545.455	-
1002	010.07.205205	SEKDA KOTA BAU-BAU	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(2.494.545.455)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(2.494.545.455)	-	-	-
1003	010.07.205205	SEKDA KOTA BAU-BAU	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.494.545.455	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	2.494.545.455	2.494.545.455	-
1004	010.07.290355	DINAS BINA MARGA KAB. LEBAK	135111	Aset Tetap Renovasi	16.742.666.277	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	16.742.666.277	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
1005	010.07.290355	DINAS BINA MARGA KAB. LEBAK	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(16.742.666.277)	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	(16.742.666.277)	-	-	-
1006	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	274.817.795	(274.817.795)	274.817.795	-
1007	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	133111	Gedung dan Bangunan	-	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	206.407.960	(206.407.960)	206.407.960	-
1008	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	135111	Aset Tetap Renovasi	206.407.960	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	-	206.407.960	206.407.960	-
1009	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	133111	Gedung dan Bangunan	-	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	273.099.790	(273.099.790)	273.099.790	-
1010	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	135111	Aset Tetap Renovasi	273.099.790	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	-	273.099.790	273.099.790	-
1011	010.09.662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	133111	Gedung dan Bangunan	-	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	207.085.972	(207.085.972)	207.085.972	-
1012	010.09.662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	135111	Aset Tetap Renovasi	207.085.972	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	-	207.085.972	207.085.972	-
1013	010.12.352588	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.826.747.034)	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	(9.826.747.034)	-	-	-
1014	010.12.352588	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	132111	Peralatan dan Mesin	13.600.049.758	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.600.049.758	-	-	-
1015	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	14.492.996.584	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14.492.996.584	-	-	-
1016	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	132111	Peralatan dan Mesin	409.414.887	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	409.414.887	-	-	-
1017	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	131111	Tanah	198.386.414.000	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	198.386.414.000	-	-	-
1018	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.613.649.613)	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	(1.613.649.613)	-	-	-
1019	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(159.491.955)	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	(159.491.955)	-	-	-
1020	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.378.688.491)	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	(2.378.688.491)	-	-	-
1021	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(239.506.751)	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	(239.506.751)	-	-	-

No	Kode Satker Keluar	Uraian Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Satker Masuk	Uraian Satker	Transfer Masuk	Selisih Per Transaksi TK/TM	Selisih Absolut	Selisih Neto
1022	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	134112	Irigasi	1.231.749.000	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.231.749.000	-	-	-
1023	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	134111	Jalan dan Jembatan	1.756.797.564	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.756.797.564	-	-	-
1024	033.05.631097	DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS	133111	Gedung dan Bangunan	-	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	14.974.726.829	(14.974.726.829)	14.974.726.829	14.974.726.829
1025	033.05.631097	DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS	135111	Aset Tetap Renovasi	14.974.726.829	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	-	14.974.726.829	14.974.726.829	-
1026	067.01.240254	BAPPEDA KAB. BELU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	259.716.750	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	259.716.750	-	-	-
1027	090.01.070441	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KAB. TAPANULI TENGAH	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	27.500.000	(27.500.000)	27.500.000	-
1028	090.01.070441	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KAB. TAPANULI TENGAH	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	477.160.120	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	477.160.120	-	-	-
1029	090.01.070441	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KAB. TAPANULI TENGAH	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(27.500.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(27.500.000)	-	-	-
1030	090.01.070441	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KAB. TAPANULI TENGAH	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	27.500.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	27.500.000	27.500.000	-
1031	090.01.340325	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA	132111	Peralatan dan Mesin	-	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	93.937.000	(93.937.000)	93.937.000	-
1032	090.01.340325	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(93.937.000)	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(93.937.000)	-	-	-
1033	090.01.340325	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.260.705.842	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	5.260.705.842	-	-	-
1034	090.01.340325	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	93.937.000	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	93.937.000	93.937.000	-
1035	999.06.436044	KPU KABUPATEN TANAH LAUT	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.757.039.900	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	2.757.039.900	-	-	-
TOTAL					**474.259.398.706**			**474.259.398.706**	**-**	**95.725.066.250**	**14.974.726.829**

LAMPIRAN XLIV

HIIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA YANG DITERIMA KEMENDAGRI DALAM RANGKAPENANGANAN PANDEMI COVID-19

Lampiran XLIV

Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Yang Diterima Kemendagri Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Untuk Posisi Sampai Dengan 31 Desember 2021

NO	PEMBERI HIBAH/DONOR	PENERIMA HIBAH/DONOR	JENIS HIBAH (UANG/BARANG/JASA)	HIBAH DALAM BENTUK BARANG		NILAI HIBAH (Rp)	NOMOR REGISTRASI HIBAH	NILAI PENGESAHAN HIBAH (Rp)	KETERANGAN
				RINCIAN BARANG	JUMLAH UNIT				
1	Tahir Foundation	Sekretariat Jenderal (403200)	Barang	Paket sembako (beras 5kg, minyak goreng 1 liter, mie gelas 20 bks)	2.000 paket sembako	260.000.000	2HPQB88A	260.000.000	Penanganan Pandemi COVID-19
2	Yayasan BUMN Untuk Indonesia	Sekretariat Jenderal (403200)	Barang	Masker *Surgical 3 play*	500.000 buah	442.500.000	2LCHFC2A	442.500.000	Penanganan Pandemi COVID-19
Jumlah						**702.500.000**		**702.500.000**	

LAMPIRAN XLV

REKAPITULASI SATKER INAKTIF BERSALDO YANG DILIKUIDASI PADA TAHUN 2021

LAMPIRAN XLV

REKAPITULASI SATKER INAKTIF BERSALDO YANG DILIKUIDASI PADA TAHUN 2021

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117125	117127	132111	135111	137111	137411	166112	166113	169122	169318	Grand Total
1	01004	090044	TP	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI RIAU (TP)				603.236.942									603.236.942
2	01005	029361	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BOGOR					10.115.000		(10.115.000)						-
3	01005	029382	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARAWANG				83.000.000									83.000.000
4	01005	029382	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARAWANG					9.999.000		(9.999.000)						-
5	01005	029387	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK KAB. PURWAKARTA					9.985.000		(9.985.000)						-
6	01005	029462	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. INDRAMAYU					10.000.000		(10.000.000)						-
7	01005	229181	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. JEMBRANA					10.165.000		(10.165.000)						-
8	01005	229201	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARANGASEM					9.950.000		(9.950.000)						-
9	01005	229208	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGLI					10.165.000		(10.165.000)						-
10	01005	239244	TP	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMRINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT				80.797.500									80.797.500
	01005	239250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH				255.842.022									255.842.022
				TRANFER KELUAR				(144.164.028)									(144.164.028)
11	01005	239258	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK TIMUR				164.000.000									164.000.000
12	01005	239258	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK TIMUR					10.165.000		(10.165.000)						-
13	01006	061217	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ACEH BARAT DAYA				1.899.606.547					251.970.000		(251.970.000)		1.899.606.547
14	01006	061326	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. GAYO LUES				906.101.266									906.101.266
15	01006	115519	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU				1.923.707.691					247.037.000		(247.037.000)		1.923.707.691
16	01006	120747	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMPUNG TIMUR				2.851.688.449					297.062.000		(297.062.000)		2.851.688.449
17	01006	180536	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B U O L				1.913.521.278					299.700.000		(299.700.000)		1.913.521.278
18	01006	190230	TP	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KAB GOWA		4.438.754.250											4.438.754.250
19	01006	192127	TP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ENREKANG				1.069.325.170									1.069.325.170
20	01006	200529	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KONAWE SELATAN				474.712.627									474.712.627
21	01006	241353	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LEMBATA (06)				1.889.623.749					317.200.000		(317.200.000)		1.889.623.749
22	01006	250763	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MERAUKE				2.078.316.768					237.955.000		(237.955.000)		2.078.316.768
23	01006	250937	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI (06)				2.576.900.000					392.000.000		(392.000.000)		2.576.900.000
24	01006	255151	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA JAYAPURA				2.010.368.300					296.250.000		(296.250.000)		2.010.368.300
25	01006	330252	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SORONG				1.997.466.750					194.500.000		(194.500.000)		1.997.466.750
26	01006	330420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SORONG SELATAN				4.023.575.750					498.000.000		(498.000.000)		4.023.575.750
27	01006	436050	TP	KABUPATEN KONAWE SELATAN				1.375.860.000									1.375.860.000
28	01006	436157	TP	KABUPATEN KATINGAN				367.525.705									367.525.705
29	01007	020541	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOGOR									23.760.000	1.458.893.520	(23.760.000)	(1.458.893.520)	-
30	01007	021425	TP	BAPPEDA KAB. GARUT									187.016.000	1.023.520.000	(187.016.000)	(1.023.520.000)	-
31	01007	021717	TP	BAPPEDA KABUPATEN CIREBON										560.000.000		(560.000.000)	-
32	01007	021830	TP	BAPPEDA KAB. KUNINGAN										1.306.079.855		(1.306.079.855)	-
33	01007	031123	TP	BAPPEDA KAB. PEMALANG				3.426.080					339.156.680	1.211.519.332	(339.156.680)	(1.211.519.332)	3.426.080
34	01007	031804	TP	BAPPEDA KAB. BANJARNEGARA										1.570.909.091		(1.570.909.091)	-
35	01007	031902	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN MAGELANG			725.443.072			13.629.807.580		(13.629.807.580)					725.443.072
36	01007	032423	TP	BAPPEDA KAB. KLATEN										1.556.163.636		(1.556.163.636)	-
37	01007	032904	TP	BAPPEDA KAB. WONOGIRI										2.447.054.546		(2.447.054.546)	-
38	01007	040217	TP	BAPPEDA KAB. SLEMAN									73.760.000	1.747.840.000	(73.760.000)	(1.747.840.000)	-
39	01007	050525	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG										1.398.760.000		(1.398.760.000)	-
40	01007	051946	TP	BAPPEDA KAB. NGANJUK										1.563.636.364		(1.563.636.364)	-
41	01007	052730	TP	BAPPEDA KAB. BOJONEGORO										1.726.836.364		(1.726.836.364)	-
42	01007	054011	DK	BAPPEDA PROP. JAWA TIMUR										692.520.000		(692.520.000)	-
43	01007	055333	TP	BAPPEDA KOTA MALANG										2.184.325.454		(2.184.325.454)	-
44	01007	059687	TP	SEKDA KOTA KEDIRI										400.000.000		(400.000.000)	-
45	01007	070420	TP	BAPPEDA KAB. TAPANULI TENGAH										988.000.000		(988.000.000)	-
46	01007	070527	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SIMALUNGUN									31.480.000	1.800.000	(31.480.000)	(1.800.000)	-
47	01007	115128	TP	BAPPEDA KOTA PALEMBANG									26.040.000	932.160.000	(26.040.000)	(932.160.000)	-
48	01007	120098	DK	BAPPEDA PROP. LAMPUNG										574.546.000		(574.546.000)	-
49	01007	170351	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW				236.678.410		1.471.392.000		(1.471.392.000)					236.678.410
50	01007	170357	TP	DINAS PU, PERUMAHAN DAN SDA KAB. BOLAANG MONGONDOW						11.279.875.455		(11.279.875.455)					-
51	01007	191125	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BULUKUMBA			3.819.238.288			13.338.967.717		(13.338.967.717)					3.819.238.288
52	01007	200231	TP	BAPPEDA KAB. BUTON										2.050.909.091		(2.050.909.091)	-
53	01007	230113	TP	BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT										1.856.000.000		(1.856.000.000)	-
54	01007	230206	TP	BAPPEDA KAB. LOMBOK TENGAH										1.495.563.636		(1.495.563.636)	-
55	01007	290093	DK	BAPPEDA PROP.BANTEN										451.970.909		(451.970.909)	-
56	01007	290350	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LEBAK									40.800.000	667.200.000	(40.800.000)	(667.200.000)	-

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117125	117127	132111	135111	137111	137411	166112	166113	169122	169318	Grand Total
57	01007	310224	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO				651.684.511		4.036.740.909		(4.036.740.909)					651.684.511
58	01008	021965	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU					77.550.000		(77.550.000)						-
59	01008	050330	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO	853.916.334				241.560.000		(241.560.000)						853.916.334
60	01008	051369	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG					80.300.000		(80.300.000)						-
61	01008	051449	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN	513.569.890				78.100.000		(78.100.000)						513.569.890
62	01008	051755	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI	241.179.000				160.600.000		(160.600.000)						241.179.000
63	01008	052453	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN	619.556.028				79.200.000		(79.200.000)						619.556.028
64	01008	052763	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO	349.886.812				79.200.000		(79.200.000)						349.886.812
65	01008	055200	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA	1.185.529.000				719.400.000		(719.400.000)						1.185.529.000
66	01008	055234	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO					77.000.000		(77.000.000)						-
67	01008	055738	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI	7.050.000				136.125.000		(136.125.000)						7.050.000
68	01008	070750	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI	47.820.923				85.800.000		(85.800.000)						47.820.923
69	01008	070838	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI UTARA					85.800.000		(85.800.000)						-
70	01008	071347	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANDAILING NATAL					85.800.000		(85.800.000)						-
71	01008	071429	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NIAS SELATAN					85.800.000		(85.800.000)						-
72	01008	072216	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS	79.595.030				85.800.000		(85.800.000)						79.595.030
73	01008	072517	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUAN BATU UTARA	106.421.765				85.800.000		(85.800.000)						106.421.765
74	01008	075541	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNG BALAI	69.873.500				85.800.000		(85.800.000)						69.873.500
75	01008	141344	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO TIMUR					92.015.000		(92.015.000)						-
76	01008	150531	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH					83.600.000		(83.600.000)						-
77	01008	150658	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO KUALA	121.670.100				83.600.000		(83.600.000)						121.670.100
78	01008	151137	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN	85.158.000				83.600.000		(83.600.000)						85.158.000
79	01008	191561	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALAR					103.270.750		(103.270.750)						-
80	01008	192136	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG	53.680.550				103.270.750		(103.270.750)						53.680.550
81	01008	192435	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR					103.270.750		(103.270.750)						-
82	01008	250160	TP	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA					90.543.200		(90.543.200)						-
83	01008	253509	TP	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INTAN JAYA	98.232.000				90.543.200		(90.543.200)						98.232.000
84	01008	280902	TP	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU TALIABU					788.634.900		(788.634.900)						-
85	01008	290274	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG	171.666.141				81.400.000		(81.400.000)						171.666.141
86	01008	295141	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG					81.400.000		(81.400.000)						-
87	01008	295311	TP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG	141.825.900				81.400.000		(81.400.000)						141.825.900
88	01008	330732	TP	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TELUK WONDAMA	7.050.000				82.680.000		(82.680.000)						7.050.000
89	01008	331010	TP	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAYBRAT					82.680.000		(82.680.000)						-
TOTAL					**4.753.680.973**	**4.438.754.250**	**4.544.681.360**	**29.292.801.487**	**4.442.087.550**	**43.756.783.661**	**(4.442.087.550)**	**(43.756.783.661)**	**3.753.686.680**	**29.866.207.798**	**(3.753.686.680)**	**(29.866.207.798)**	**43.029.918.070**

LAMPIRAN XLVI

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

LAMPIRAN XLVI

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117124	117125	117126	117127	117129	132111	135111	137111	137411	162151	166112	166113	169122	169315	169318	Grand Total
1	01004	065129	DK	BAPPEDA PROPINSI NAD								17.500.000		(17.500.000)								-
2	01004	080054	TP	DINAS PRASJAL DAN TARUKIM PROPINSI SUMATERA BARAT		1.809.502.117																1.809.502.117
3	01004	130017	TP	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)				1.575.601.236				1.629.744.712		(1.629.744.712)								1.575.601.236
4	01004	160080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								14.500.000		(14.500.000)								-
5	01004	170010	TP	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA (TP)						1.395.007.844												1.395.007.844
6	01004	170090	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA								15.000.000		(15.000.000)								-
7	01004	170420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE								795.460.000		(795.460.000)								-
8	01004	170520	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD								18.000.000		(18.000.000)								-
9	01004	179317	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA		1.132.438.140																1.132.438.140
10	01004	240084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT								15.000.000		(15.000.000)								-
11	01004	240149	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG		1.792.732.210		1.044.537.333				248.875.000		(248.875.000)								2.837.269.543
12	01004	240260	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U		291.825.605						174.900.000		(174.900.000)								291.825.605
13	01004	240342	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA		762.374.061						175.000.000		(175.000.000)								762.374.061
14	01004	240351	TP	BAPPEDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA		367.994.675																367.994.675
15	01004	250026	TP	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)			10.040.724	556.966.725				1.074.129.737		(1.074.129.737)								567.007.449
16	01004	250084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA								15.000.000		(15.000.000)								-
17	01004	250300	TP	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV. PAPUA		345.658.565																345.658.565
18	01004	251418	TP	BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. ASMAT		5.436.558.750																5.436.558.750
19	01004	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL		197.937.405																197.937.405
20	01004	251525	TP	KANTOR PERBATASAN DAN KERJASAMA DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL		1.551.519.000																1.551.519.000
21	01004	251907	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG		3.917.569.440																3.917.569.440
22	01004	255161	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN KOTA JAYAPURA		797.747.050																797.747.050
23	01004	259396	TP	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV PAPUA		463.816.260																463.816.260
24	01004	280067	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA								15.000.000		(15.000.000)								-
25	01004	320052	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU								26.895.000		(26.895.000)								-
26	01005	239250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH						144.164.028												144.164.028
27	01005	029367	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI						166.000.000												166.000.000
28	01005	029367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI								9.775.000		(9.775.000)								-
29	01005	029373	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KETAHANAN PANGAN KAB. CIANJUR						81.000.000												81.000.000
30	01005	029373	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KETAHANAN PANGAN KAB. CIANJUR								10.000.000		(10.000.000)								-
31	01005	029376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	499.000							9.800.000		(9.800.000)								499.000
32	01005	029418	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GARUT						80.717.500												80.717.500
33	01005	029418	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GARUT								9.500.000		(9.500.000)								-
34	01005	029436	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA								10.000.000		(10.000.000)								-
35	01005	029472	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA						80.925.000												80.925.000
36	01005	029472	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA								10.120.000		(10.120.000)								-
37	01005	029478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANDUNG BARAT								9.982.500		(9.982.500)								-
38	01005	039438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG						170.461.250												170.461.250
39	01005	039438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG								9.900.000		(9.900.000)								-
40	01005	039443	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL								10.000.000		(10.000.000)								-
41	01005	039452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK								10.000.000		(10.000.000)								-
42	01005	039465	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN								10.065.000		(10.065.000)								-
43	01005	039470	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG								9.900.000		(9.900.000)								-
44	01005	039480	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL								10.115.000		(10.115.000)								-
45	01005	039490	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI						161.028.000												161.028.000
46	01005	039490	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI								10.125.000		(10.125.000)								-
47	01005	039500	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS								10.165.000		(10.165.000)								-
48	01005	039504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG								10.145.000		(10.145.000)								-
49	01005	039514	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG						164.716.820												164.716.820
50	01005	039514	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG								10.147.500		(10.147.500)								-
51	01005	039519	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA								10.165.000		(10.165.000)								-
52	01005	039530	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	37.850							9.900.000		(9.900.000)								37.850
53	01005	039538	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP						79.444.800												79.444.800
54	01005	039538	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP								10.000.000		(10.000.000)								-
55	01005	039546	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA						82.910.360												82.910.360
56	01005	039546	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA								10.000.000		(10.000.000)								-
57	01005	039554	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA								10.000.000		(10.000.000)								-
58	01005	039562	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG								9.320.000		(9.320.000)								-
59	01005	039568	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG								9.665.000		(9.665.000)								-
60	01005	039579	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO								9.923.500		(9.923.500)								-
61	01005	039599	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN								10.115.000		(10.115.000)								-
62	01005	039605	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN						74.629.350												74.629.350
63	01005	039605	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN								9.850.000		(9.850.000)								-
64	01005	039612	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali								9.700.000		(9.700.000)								-
65	01005	039621	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SRAGEN	302.500																	302.500
66	01005	039626	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUKOHARJO	135.000																	135.000
67	01005	039639	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	134.000							10.065.000		(10.065.000)								134.000
68	01005	049147	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL						417.809.252												417.809.252
69	01005	049147	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL								10.000.000		(10.000.000)								-
70	01005	049173	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO								10.140.000		(10.140.000)								-

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117124	117125	117126	117127	117129	132111	135111	137111	137411	162151	166112	166113	169122	169315	169318	Grand Total
71	01005	059456	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK								10.065.000		(10.065.000)								-
72	01005	059464	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO						82.641.440												82.641.440
73	01005	059464	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO								10.162.900		(10.162.900)								-
74	01005	059478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG								10.105.000		(10.105.000)								-
75	01005	059491	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG						160.704.000												160.704.000
76	01005	059498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP								9.750.000		(9.750.000)								-
77	01005	059527	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI								10.000.000		(10.000.000)								-
78	01005	059556	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PROBOLINGGO								10.165.000		(10.165.000)								-
79	01005	059560	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB.LUMAJANG								10.165.000		(10.165.000)								-
80	01005	059586	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK								10.000.000		(10.000.000)								-
81	01005	059613	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MADIUN						165.438.090												165.438.090
82	01005	059620	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI						81.331.700												81.331.700
83	01005	059620	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI								9.915.000		(9.915.000)								-
84	01005	059623	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN						829.360.823												829.360.823
85	01005	059623	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN								10.065.000		(10.065.000)								-
86	01005	059630	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. PONOROGO						172.474.830												172.474.830
87	01005	059652	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN								9.780.000		(9.780.000)								-
88	01005	059661	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN								10.000.000		(10.000.000)								-
89	01005	069280	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR						80.776.430												80.776.430
90	01005	069280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR								10.115.000		(10.115.000)								-
91	01005	069284	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE								10.165.000		(10.165.000)								-
92	01005	069290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA								9.950.000		(9.950.000)								-
93	01005	069303	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN								10.000.000		(10.000.000)								-
94	01005	069309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT								10.165.000		(10.165.000)								-
95	01005	069321	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA								10.100.000		(10.100.000)								-
96	01005	069328	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU								10.165.000		(10.165.000)								-
97	01005	069334	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL								10.000.000		(10.000.000)								-
98	01005	069345	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA								10.000.000		(10.000.000)								-
99	01005	069352	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES								10.000.000		(10.000.000)								-
100	01005	069356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMPONG KAB. ACEH JAYA								10.165.000		(10.165.000)								-
101	01005	069358	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA								10.165.000		(10.165.000)								-
102	01005	069362	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG								10.000.000		(10.000.000)								-
103	01005	069367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	75.000							10.000.000		(10.000.000)								75.000
104	01005	069371	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA								9.950.000		(9.950.000)								-
105	01005	079353	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO								10.165.000		(10.165.000)								-
106	01005	079359	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT						82.165.850												82.165.850
107	01005	079359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT								10.165.000		(10.165.000)								-
108	01005	079369	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH						83.000.000												83.000.000
109	01005	079369	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH								10.160.000		(10.160.000)								-
110	01005	079376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN								10.165.000		(10.165.000)								-
111	01005	079383	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU								9.900.000		(9.900.000)								-
112	01005	079390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI								10.165.000		(10.165.000)								-
113	01005	079393	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA								10.165.000		(10.165.000)								-
114	01005	079395	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN								10.165.000		(10.165.000)								-
115	01005	079413	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS								10.165.000		(10.165.000)								-
116	01005	079425	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR								10.000.000		(10.000.000)								-
117	01005	079438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL						165.751.000												165.751.000
118	01005	079438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL								10.165.000		(10.165.000)								-
119	01005	079444	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT								10.000.000		(10.000.000)								-
120	01005	079447	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN								10.165.000		(10.165.000)								-
121	01005	079450	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR								10.165.000		(10.165.000)								-
122	01005	079457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI								10.165.000		(10.165.000)								-
123	01005	079459	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA								10.165.000		(10.165.000)								-
124	01005	079463	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS								10.165.000		(10.165.000)								-
125	01005	079471	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN								9.436.000		(9.436.000)								-
126	01005	079473	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA						494.680.000												494.680.000
127	01005	079473	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA								9.850.000		(9.850.000)								-
128	01005	089289	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA								9.949.995		(9.949.995)								-
129	01005	089298	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK								9.965.000		(9.965.000)								-
130	01005	089305	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN						162.530.600												162.530.600
131	01005	089305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN								10.065.000		(10.065.000)								-
132	01005	089313	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN								10.155.000		(10.155.000)								-
133	01005	089319	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR								10.165.000		(10.165.000)								-

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117124	117125	117126	117127	117129	132111	135111	137111	137411	162151	166112	166113	169122	169315	169318	Grand Total
134	01005	089338	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA						82.116.050												82.116.050
135	01005	089338	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA								9.850.000		(9.850.000)								-
136	01005	089345	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN								10.015.000		(10.015.000)								-
137	01005	089356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG								10.015.000		(10.015.000)								-
138	01005	099452	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR						161.747.080												161.747.080
139	01005	099452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR								10.157.960		(10.157.960)								-
140	01005	099457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS								10.000.000		(10.000.000)								-
141	01005	099476	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR						157.805.820												157.805.820
142	01005	099476	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR								9.845.000		(9.845.000)								-
143	01005	099484	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN						164.489.400												164.489.400
144	01005	099484	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN								10.000.000		(10.000.000)								-
145	01005	099498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU								10.163.000		(10.163.000)								-
146	01005	099504	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK						159.489.000												159.489.000
147	01005	099504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK								9.900.000		(9.900.000)								-
148	01005	099510	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI						78.282.280												78.282.280
149	01005	099510	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI								10.165.000		(10.165.000)								-
150	01005	109222	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI						152.031.100												152.031.100
151	01005	109222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI								9.900.000		(9.900.000)								-
152	01005	109234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT								10.000.000		(10.000.000)								-
153	01005	109238	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO								10.000.000		(10.000.000)								-
154	01005	109247	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN								10.000.000		(10.000.000)								-
155	01005	109254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI								10.000.000		(10.000.000)								-
156	01005	109269	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR								10.165.000		(10.165.000)								-
157	01005	109272	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO						173.071.600												173.071.600
158	01005	109272	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO								10.000.000		(10.000.000)								-
159	01005	109280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI								10.000.000		(10.000.000)								-
160	01005	119239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI BANYUASIN								9.994.000		(9.994.000)								-
161	01005	119245	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU								10.015.000		(10.015.000)								-
162	01005	119252	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM						72.658.200												72.658.200
163	01005	119252	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM								10.000.000		(10.000.000)								-
164	01005	119260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LAHAT								10.165.000		(10.165.000)								-
165	01005	119265	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	170.000							10.165.000		(10.165.000)								170.000
166	01005	119274	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMPEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR								9.950.000		(9.950.000)								-
167	01005	119281	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANYUASIN						419.258.500												419.258.500
168	01005	119281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANYUASIN								10.000.000		(10.000.000)								-
169	01005	119288	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR								9.900.000		(9.900.000)								-
170	01005	119294	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN						171.565.320												171.565.320
171	01005	119294	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN								10.165.000		(10.165.000)								-
172	01005	119299	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG								10.000.000		(10.000.000)								-
173	01005	129235	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG	71.678.000																	71.678.000
174	01005	129247	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN						245.032.600												245.032.600
175	01005	129247	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN								10.165.000		(10.165.000)								-
176	01005	129253	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN BINA PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. LAMPUNG TENGAH								9.976.000		(9.976.000)								-
177	01005	129266	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT								10.000.000		(10.000.000)								-
178	01005	129270	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG						82.087.000												82.087.000
179	01005	129270	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG								10.000.000		(10.000.000)								-
180	01005	129288	UB	KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR								10.165.000		(10.165.000)								-
181	01005	129292	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN								10.165.000		(10.165.000)								-
182	01005	129296	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN						233.945.280												233.945.280
183	01005	129296	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN								9.965.000		(9.965.000)								-

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117124	117125	117126	117127	117129	132111	135111	137111	137411	162151	166112	166113	169122	169315	169318	Grand Total
184	01005	139250	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR								59.975.000		(59.975.000)								-
185	01005	139267	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU						82.917.000												82.917.000
186	01005	139267	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	754.500							10.165.000		(10.165.000)								754.500
187	01005	139274	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG						159.870.510												159.870.510
188	01005	139274	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG								10.165.000		(10.165.000)								-
189	01005	139285	TP	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK						75.558.620												75.558.620
190	01005	139285	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK								10.000.000		(10.000.000)								-
191	01005	139295	UB	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU								10.000.000		(10.000.000)								-
192	01005	139313	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG						163.443.600												163.443.600
193	01005	139313	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG								10.165.000		(10.165.000)								-
194	01005	139325	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI								10.165.000		(10.165.000)								-
195	01005	139328	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU								9.965.000		(9.965.000)								-
196	01005	139330	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA								10.015.000		(10.015.000)								-
197	01005	139335	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA						602.913.780												602.913.780
198	01005	139335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA								10.165.000		(10.165.000)								-
199	01005	149235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO UTARA								10.000.000		(10.000.000)								-
200	01005	149242	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.BARITO SELATAN								9.950.000		(9.950.000)								-
201	01005	149257	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT						80.750.451												80.750.451
202	01005	149257	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.KOTAWARINGIN BARAT								9.880.000		(9.880.000)								-
203	01005	149267	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.SERUYAN								9.900.000		(9.900.000)								-
204	01005	149270	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA								10.000.000		(10.000.000)								-
205	01005	149278	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS								10.000.000		(10.000.000)								-
206	01005	149285	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG PISAU								9.750.000		(9.750.000)								-
207	01005	149296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO TIMUR	2.901.500							9.950.000		(9.950.000)								2.901.500
208	01005	159202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	225.500							9.790.000		(9.790.000)								225.500
209	01005	159214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	1.470.850							10.165.000		(10.165.000)								1.470.850
210	01005	159219	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN								10.165.000		(10.165.000)								-
211	01005	159224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH								10.115.000		(10.115.000)								-
212	01005	159240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU								10.000.000		(10.000.000)								-
213	01005	159245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA								9.700.000		(9.700.000)								-
214	01005	159250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANAH BUMBU						82.709.500												82.709.500
215	01005	159255	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN								9.900.000		(9.900.000)								-
216	01005	169192	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER								9.999.900		(9.999.900)								-
217	01005	169196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN								10.035.000		(10.035.000)								-
218	01005	169202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU								9.850.000		(9.850.000)								-
219	01005	169206	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN						140.722.920												140.722.920
220	01005	169206	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN								9.900.000		(9.900.000)								-
221	01005	169211	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT								9.125.000		(9.125.000)								-
222	01005	169218	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA								10.000.000		(10.000.000)								-
223	01005	169223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA						87.547.620												87.547.620
224	01005	169226	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG								10.165.000		(10.165.000)								-
225	01005	179275	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA								10.165.000		(10.165.000)								-
226	01005	179280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA								10.165.000		(10.165.000)								-
227	01005	179283	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA								10.000.000		(10.000.000)								-
228	01005	179296	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR						468.985.950												468.985.950
229	01005	179296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR								10.000.000		(10.000.000)								-
230	01005	189223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO						80.925.000												80.925.000
231	01005	189223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO								10.165.000		(10.165.000)								-
232	01005	189229	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA						242.270.570												242.270.570

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117124	117125	117126	117127	117129	132111	135111	137111	137411	162151	166112	166113	169122	169315	169318	Grand Total
233	01005	189229	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA								10.000.000		(10.000.000)								-
234	01005	189234	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI								10.165.000		(10.165.000)								-
235	01005	189240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI								10.000.000		(10.000.000)								-
236	01005	189243	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL								10.165.000		(10.165.000)								-
237	01005	189249	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI						162.000.000												162.000.000
238	01005	189249	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI								10.000.000		(10.000.000)								-
239	01005	189254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN								10.000.000		(10.000.000)								-
240	01005	189260	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG						995.592.470												995.592.470
241	01005	189260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG								9.900.000		(9.900.000)								-
242	01005	189271	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIGI						82.680.450												82.680.450
243	01005	199398	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	178.750							9.750.000		(9.750.000)								178.750
244	01005	199407	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA								10.115.000		(10.115.000)								-
245	01005	199415	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO						162.893.000												162.893.000
246	01005	199415	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO								10.000.000		(10.000.000)								-
247	01005	199421	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE						83.000.000												83.000.000
248	01005	199421	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE								10.165.000		(10.165.000)								-
249	01005	199430	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA								10.165.000		(10.165.000)								-
250	01005	199442	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS						149.400.000												149.400.000
251	01005	199442	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS								10.000.000		(10.000.000)								-
252	01005	199452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	55.000							10.165.000		(10.165.000)								55.000
253	01005	199488	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG								10.115.000		(10.115.000)								-
254	01005	199499	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	265.000							10.165.000		(10.165.000)								265.000
255	01005	199508	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR								10.165.000		(10.165.000)								-
256	01005	199515	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR								10.165.000		(10.165.000)								-
257	01005	199522	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU								10.115.000		(10.115.000)								-
258	01005	199530	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG						82.253.000												82.253.000
259	01005	199530	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG								10.000.000		(10.000.000)								-
260	01005	199542	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN								10.165.000		(10.165.000)								-
261	01005	199560	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG								10.165.000		(10.165.000)								-
262	01005	199570	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	840.500							10.115.000		(10.115.000)								840.500
263	01005	199574	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR								10.065.000		(10.065.000)								-
264	01005	199578	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA								10.000.000		(10.000.000)								-
265	01005	209209	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON								10.165.000		(10.165.000)								-
266	01005	209212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA								10.000.000		(10.000.000)								-
267	01005	209219	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA						157.950.000												157.950.000
268	01005	209219	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA								10.165.000		(10.165.000)								-
269	01005	209227	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN						82.975.930												82.975.930
270	01005	209227	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN								9.950.000		(9.950.000)								-
271	01005	209234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBI								10.000.000		(10.000.000)								-
272	01005	209239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. KOLAKA UTARA								10.165.000		(10.165.000)								-
273	01005	209244	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE						327.489.230												327.489.230
274	01005	209244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE								10.000.000		(10.000.000)								-
275	01005	209245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE UTARA								10.000.000		(10.000.000)								-
276	01005	209250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHA DESA KAB. BUTON UTARA								10.000.000		(10.000.000)								-
277	01005	219188	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA								10.165.000		(10.165.000)								-
278	01005	219194	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT								10.165.000		(10.165.000)								-
279	01005	219208	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU								10.165.000		(10.165.000)								-
280	01005	219214	UB	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT								10.000.000		(10.000.000)								-
281	01005	219217	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR						173.238.430												173.238.430
282	01005	219217	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR								10.000.000		(10.000.000)								-

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117124	117125	117126	117127	117129	132111	135111	137111	137411	162151	166112	166113	169122	169315	169318	Grand Total
283	01005	219222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN								10.000.000		(10.000.000)								-
284	01005	229177	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG								10.000.000		(10.000.000)								-
285	01005	229189	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG								9.900.000		(9.900.000)								-
286	01005	229193	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANYAR								7.160.000		(7.160.000)								-
287	01005	229223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN						418.821.685												418.821.685
288	01005	229223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN								9.800.000		(9.800.000)								-
289	01005	239244	UB	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT								10.000.000		(10.000.000)								-
290	01005	239250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH								10.000.000		(10.000.000)								-
291	01005	239273	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA						684.538.904												684.538.904
292	01005	239273	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA								10.165.000		(10.165.000)								-
293	01005	239281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU								10.000.000		(10.000.000)								-
294	01005	239290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT								10.000.000		(10.000.000)								-
295	01005	239291	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK UTARA								9.900.000		(9.900.000)								-
296	01005	249309	TP	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG						86.670.000												86.670.000
297	01005	249309	UB	BADAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG								10.000.000		(10.000.000)								-
298	01005	249318	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU								10.165.000		(10.165.000)								-
299	01005	249325	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA								10.165.000		(10.165.000)								-
300	01005	249335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR								10.165.000		(10.165.000)								-
301	01005	249344	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA								10.165.000		(10.165.000)								-
302	01005	249350	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR								10.165.000		(10.165.000)								-
303	01005	249357	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE								10.165.000		(10.165.000)								-
304	01005	249361	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA								10.165.000		(10.165.000)								-
305	01005	249367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI								8.665.000		(8.665.000)								-
306	01005	249377	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA TIMUR								10.165.000		(10.165.000)								-
307	01005	249384	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT								10.165.000		(10.165.000)								-
308	01005	249390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LEMBATA								10.165.000		(10.165.000)								-
309	01005	249395	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO						165.422.652												165.422.652
310	01005	249399	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT								10.165.000		(10.165.000)								-
311	01005	249401	UB	BPMD,BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK,KB & KESBANG KAB. NAGEKEO								10.165.000		(10.165.000)								-
312	01005	249405	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA TENGAH								10.165.000		(10.165.000)								-
313	01005	249409	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA BARAT DAYA								10.000.000		(10.000.000)								-
314	01005	249414	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR								10.165.000		(10.165.000)								-
315	01005	259277	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN								10.000.000		(10.000.000)								-
316	01005	259291	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE								10.165.000		(10.165.000)								-
317	01005	259305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI								10.000.000		(10.000.000)								-
318	01005	259312	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA								10.000.000		(10.000.000)								-
319	01005	259331	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN KAB. ASMAT								10.165.000		(10.165.000)								-
320	01005	259335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEL								10.000.000		(10.000.000)								-
321	01005	259339	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI								10.000.000		(10.000.000)								-
322	01005	259345	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. KEEROM						82.834.000												82.834.000
323	01005	259354	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA								10.000.000		(10.000.000)								-
324	01005	259359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN								9.900.000		(9.900.000)								-
325	01005	259363	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO								10.000.000		(10.000.000)								-
326	01005	259369	UB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH								10.000.000		(10.000.000)								-
327	01005	269204	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA						80.925.000												80.925.000
328	01005	269204	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASAYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA								10.065.000		(10.065.000)								-
329	01005	269214	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN						78.112.130												78.112.130
330	01005	269214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN								9.970.000		(9.970.000)								-
331	01005	269224	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG LEBONG						169.009.580												169.009.580
332	01005	269224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG LEBONG								10.165.000		(10.165.000)								-
333	01005	269227	UB	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB. SELUMA								10.140.000		(10.140.000)								-
334	01005	269230	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR								10.165.000		(10.165.000)								-
335	01005	269235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO								10.010.000		(10.010.000)								-
336	01005	269240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG								10.165.000		(10.165.000)								-
337	01005	269245	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG						165.677.960												165.677.960
338	01005	269245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHIANG								10.165.000		(10.165.000)								-
339	01005	269248	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKULU TENGAH								10.000.000		(10.000.000)								-
340	01005	289187	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH						80.925.000												80.925.000
341	01005	289187	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	749.000																	749.000
342	01005	289190	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA								10.165.000		(10.165.000)								-

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117124	117125	117126	117127	117129	132111	135111	137111	137411	162151	166112	166113	169122	169315	169318	Grand Total
343	01005	289196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN								10.000.000		(10.000.000)								-
344	01005	289207	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR								10.000.000		(10.000.000)								-
345	01005	289212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA BARAT								10.000.000		(10.000.000)								-
346	01005	290451	UB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANGERANG								10.165.000		(10.165.000)								-
347	01005	299452	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG								10.165.000		(10.165.000)								-
348	01005	299468	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG						638.050.190												638.050.190
349	01005	299468	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG								10.000.000		(10.000.000)								-
350	01005	299477	TP	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK						79.792.050												79.792.050
351	01005	299477	UB	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK								10.000.000		(10.000.000)								-
352	01005	299483	TP	BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TANGERANG						74.700.000												74.700.000
353	01005	299501	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN								9.090.910		(9.090.910)								-
354	01005	309247	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR						162.597.000												162.597.000
355	01005	309247	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR								10.000.000		(10.000.000)								-
356	01005	319176	UB	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO								10.000.000		(10.000.000)								-
357	01005	329122	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN								10.165.000		(10.165.000)								-
358	01005	329128	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KAB. KARIMUN								9.900.000		(9.900.000)								-
359	01005	329137	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA						161.616.770												161.616.770
360	01005	329137	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA								10.165.000		(10.165.000)								-
361	01005	329144	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA								10.000.000		(10.000.000)								-
362	01005	329146	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS								10.000.000		(10.000.000)								-
363	01005	339176	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI								10.000.000		(10.000.000)								-
364	01005	339185	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG								10.035.000		(10.035.000)								-
365	01005	339194	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN								10.035.000		(10.035.000)								-
366	01005	339200	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT								10.035.000		(10.035.000)								-
367	01005	339202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI								10.000.000		(10.000.000)								-
368	01005	339210	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA								10.165.000		(10.165.000)								-
369	01005	340170	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT								78.930.200		(78.930.200)								-
370	01005	340244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU								10.165.000		(10.165.000)								-
371	01005	340448	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR								10.165.000		(10.165.000)								-
372	01005	340536	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA						165.869.690												165.869.690
373	01005	340536	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA								10.165.000		(10.165.000)								-
374	01006	052151	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. BLITAR						1.877.956.850												1.877.956.850
375	01006	061623	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ACEH TAMIANG (06)						1.237.019.310							19.850.000		(19.850.000)			1.237.019.310
376	01006	061718	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENER MERIAH						911.832.973							199.400.000		(199.400.000)			911.832.973
377	01006	070441	TP	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KAB. TAPANULI TENGAH						477.160.120							27.500.000		(27.500.000)			477.160.120
378	01006	070950	TP	DINAS PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN						1.585.459.931												1.585.459.931
379	01006	071243	TP	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KAB. SAMOSIR						1.785.604.026							199.243.000		(199.243.000)			1.785.604.026
380	01006	071342	TP	DINAS CIPTA KARYA KAB. MANDAILING NATAL						1.050.343.694												1.050.343.694
381	01006	071519	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT						1.595.071.168							249.500.000		(249.500.000)			1.595.071.168
382	01006	071623	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN						1.924.780.798							298.816.000		(298.816.000)			1.924.780.798
383	01006	080928	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. KEPULAUAN MENTAWAI						1.488.917.069												1.488.917.069
384	01006	081021	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)						1.229.483.605							193.634.400		(193.634.400)			1.229.483.605
385	01006	081116	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK SELATAN						1.804.229.690							264.391.785		(264.391.785)			1.804.229.690
386	01006	081219	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT						2.473.039.371							370.670.000		(370.670.000)			2.473.039.371
387	01006	090256	TP	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB BENGKALIS							67.670.350											67.670.350
388	01006	090728	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. ROKAN HULU						897.448.130							149.215.000		(149.215.000)			897.448.130
389	01006	091221	TP	DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. KUANTAN SINGINGI						1.007.347.441												1.007.347.441
390	01006	100729	TP	DINAS KIMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR						1.222.663.310							239.766.400		(239.766.400)			1.222.663.310
391	01006	100825	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEBO (06)						1.599.089.127							246.908.750		(246.908.750)			1.599.089.127
392	01006	100930	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI						2.213.241.257							349.459.800		(349.459.800)			2.213.241.257
393	01006	111015	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. OKU TIMUR						2.147.522.760												2.147.522.760
394	01006	111023	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU TIMUR (06)						6.155.198.868												6.155.198.868
395	01006	111123	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU SELATAN						2.866.994.200							427.680.000		(427.680.000)			2.866.994.200
396	01006	131013	TP	DINAS KIMPRASWIL, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KAB. SEKADAU						2.520.867.077							366.929.700		(366.929.700)			2.520.867.077
397	01006	140645	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN (06)						3.171.799.345							335.790.000		(335.790.000)			3.171.799.345
398	01006	140727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN						2.260.972.450							267.560.000		(267.560.000)			2.260.972.450
399	01006	140824	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SUKAMARA (06)						1.773.454.541							296.900.000		(296.900.000)			1.773.454.541
400	01006	140920	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU						1.869.300.944							298.000.000		(298.000.000)			1.869.300.944
401	01006	141019	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)						4.990.853.839							329.095.000		(329.095.000)			4.990.853.839
402	01006	141124	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PULANG PISAU						1.600.506.009							96.286.200		(96.286.200)			1.600.506.009
403	01006	141338	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR						2.851.322.966							448.853.000		(448.853.000)			2.851.322.966
404	01006	151126	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN						1.246.208.645							153.659.600		(153.659.600)			1.246.208.645
405	01006	160626	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU						3.192.334.944							496.630.000		(496.630.000)			3.192.334.944
406	01006	160927	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA						428.239.499							322.278.000		(322.278.000)			428.239.499

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	117111	117122	117124	117125	117126	117127	117129	132111	135111	137111	137411	162151	166112	166113	169122	169315	169318	Grand Total
407	01006	170820	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MINAHASA UTARA						4.959.511.659							604.870.200		(604.870.200)			4.959.511.659
408	01006	171010	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN SUMBER DAYA AIR KAB. MINAHASA TENGGARA		572.649.928																572.649.928
409	01006	180330	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLI TOLI						1.455.783.007												1.455.783.007
410	01006	180734	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)						1.849.065.910							53.642.150		(53.642.150)			1.849.065.910
411	01006	180924	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA						1.095.340.500												1.095.340.500
412	01006	180925	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)						1.419.376.840							172.341.800		(172.341.800)			1.419.376.840
413	01006	191426	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)						947.211.500							149.850.000		(149.850.000)			947.211.500
414	01006	191429	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR						2.538.006.797							75.000.000		(75.000.000)			2.538.006.797
415	01006	191939	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOPPENG		538.648.860																538.648.860
416	01006	192274	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA						2.981.170.039							429.232.000		(429.232.000)			2.981.170.039
417	01006	192416	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR (06)								597.752.000		(597.752.000)								-
418	01006	200623	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOMBANA (06)						2.814.142.510												2.814.142.510
419	01006	200715	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)						1.888.382.030							239.551.500		(239.551.500)			1.888.382.030
420	01006	200816	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA						2.241.171.436							324.751.850		(324.751.850)			2.241.171.436
421	01006	210156	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALUKU TENGAH (06)						907.769.600												907.769.600
422	01006	210428	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PULAU BURU (06)						1.425.853.520												1.425.853.520
423	01006	210726	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR						403.454.789												403.454.789
424	01006	210727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (06)						1.404.555.405												1.404.555.405
425	01006	215128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA AMBON					446.822.000													446.822.000
426	01006	240254	TP	BAPPEDA KAB. BELU						259.716.750												259.716.750
427	01006	240348	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA						846.973.507												846.973.507
428	01006	240553	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. A L O R						233.085.375												233.085.375
429	01006	241420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO (06)						3.498.550.603							557.777.000		(557.777.000)			3.498.550.603
430	01006	241520	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MANGGARAI BARAT						2.812.055.484							419.917.000		(419.917.000)			2.812.055.484
431	01006	250936	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI						1.638.600.005							234.500.000		(234.500.000)			1.638.600.005
432	01006	251128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA						1.609.527.750							249.306.000		(249.306.000)			1.609.527.750
433	01006	251129	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)						2.474.045.920							378.641.000		(378.641.000)			2.474.045.920
434	01006	251413	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ASMAT						1.781.455.000												1.781.455.000
435	01006	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL						213.186.750												213.186.750
436	01006	251516	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL						3.791.009.500							538.600.000		(538.600.000)			3.791.009.500
437	01006	251607	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)						3.573.969.688							469.761.000		(469.761.000)			3.573.969.688
438	01006	251717	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM						2.636.985.383							405.882.950		(405.882.950)			2.636.985.383
439	01006	251721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEEROM						264.262.500												264.262.500
440	01006	251812	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA						2.280.065.006							224.100.000		(224.100.000)			2.280.065.006
441	01006	251918	TP	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG						5.357.304.290							703.999.885		(703.999.885)			5.357.304.290
442	01006	252318	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAROPEN		1.700.989.900																1.700.989.900
443	01006	260830	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHIANG						2.530.783.703							398.350.000		(398.350.000)			2.530.783.703
444	01006	265156	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU						533.109.500							49.925.000		(49.925.000)			533.109.500
445	01006	280076	TP	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (06)						5.774.912.835												5.774.912.835
446	01006	280253	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH						1.039.440.340												1.039.440.340
447	01006	280322	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA						1.051.489.810												1.051.489.810
448	01006	280417	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN						3.241.547.215							698.997.544		(698.997.544)			3.241.547.215
449	01006	280424	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN						1.061.420.000												1.061.420.000
450	01006	280514	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPULAUAN SULA						3.696.444.600							521.740.000		(521.740.000)			3.696.444.600
451	01006	280525	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA						1.062.666.110												1.062.666.110
452	01006	280621	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR						1.626.293.274												1.626.293.274
453	01006	280723	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT						1.398.942.800												1.398.942.800
454	01006	285125	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE						331.568.877												331.568.877
455	01006	300326	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGKA BARAT						1.392.875.763							219.597.500		(219.597.500)			1.392.875.763
456	01006	310224	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO						2.523.955.206							396.261.000		(396.261.000)			2.523.955.206
457	01006	310321	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO						2.541.268.140							399.585.000		(399.585.000)			2.541.268.140
458	01006	320423	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LINGGA						1.827.547.500							149.000.000		(149.000.000)			1.827.547.500
459	01006	330415	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SORONG SELATAN						4.954.269.243												4.954.269.243
460	01006	330524	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. RAJA AMPAT						5.483.131.144							858.726.000		(858.726.000)			5.483.131.144
461	01006	330531	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. RAJA AMPAT						1.671.000.000							195.000.000		(195.000.000)			1.671.000.000
462	01006	330620	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)						2.170.532.366							348.786.000		(348.786.000)			2.170.532.366
463	01006	330721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA						2.256.803.760							329.500.000		(329.500.000)			2.256.803.760
464	01006	340320	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU UTARA (06)						2.855.730.767												2.855.730.767
465	01006	340325	TP	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA						5.260.705.842							93.937.000		(93.937.000)			5.260.705.842
466	01006	340529	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMASA (06)													342.000.000		(342.000.000)			-
467	01006	436044	TP	KPU KABUPATEN TANAH LAUT / POLEWALI MANDAR						2.757.039.900												2.757.039.900
468	01006	436096	TP	KAB SERAM BAGIAN TIMUR						1.519.500.000												1.519.500.000
469	01006	436122	TP	KAB HALMAHERA TENGAH						1.380.000.000												1.380.000.000
470	01006	998299	TP	SETDA KAB. MAMUJU UTARA						1.380.000.007												1.380.000.007
471	01007	021256	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANDUNG				1.696.790.672														1.696.790.672
472	01007	021266	TP	DINAS BINA MARGA KAB. BANDUNG				3.848.377.052		1.418.156.294			15.155.398.523		(15.155.398.523)							5.266.533.346
473	01007	021504	TP	BAPPEDA KAB. TASIKMALAYA								295.812.000		(295.812.000)		3.345.568.000				(3.345.568.000)		-
474	01007	032302	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN									10.372.552.691		(10.372.552.691)							-
475	01007	052354	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KAB. NGAWI				954.038.804					5.608.632.498		(5.608.632.498)							954.038.804
476	01007	052950	TP	DINAS BINA MARGA KAB. LAMONGAN				857.169.171					20.687.247.948		(20.687.247.948)							857.169.171
477	01007	060082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM						1.088.228.700		10.000.000		(10.000.000)								1.088.228.700
478	01007	070244	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO														2.076.889.018			(2.076.889.018)	-
479	01007	075133	TP	BAPPEDA KOTA MEDAN													92.556.000	2.733.280.000	(92.556.000)		(2.733.280.000)	-
480	01007	080435	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SOLOK				274.817.795					4.541.238.182		(4.541.238.182)							274.817.795
481	01007	080444	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK									9.980.125.000		(9.980.125.000)							-
482	01007	080735	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH DATAR									20.687.247.948		(20.687.247.948)							-
483	01007	110097	DK	BAPPEDA PROP. SUMATERA SELATAN												624.800.000				(624.800.000)		-
484	01007	110805	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR			5.502.668					334.516.696		(334.516.696)		1.577.738.504				(1.577.738.504)		5.502.668
485	01007	119267	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR												502.946.000				(502.946.000)		-
486	01007	120730	TP	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR						7.728.000							131.020.000	1.307.312.000	(131.020.000)		(1.307.312.000)	7.728.000
487	01007	190223	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA									1.480.000.000		(1.480.000.000)							-
488	01007	191555	TP	DINAS KESEHATAN KAB. TAKALAR				786.887.890														786.887.890
489	01007	205205	TP	SEKDA KOTA BAU-BAU														2.494.545.455			(2.494.545.455)	-
490	01007	234007	DK	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT														1.652.400.000			(1.652.400.000)	-
491	01007	290355	TP	DINAS BINA MARGA KAB. LEBAK									16.742.666.277		(16.742.666.277)							-
				TOTAL	**80.471.950**	**21.679.961.966**	**15.543.392**	**11.595.186.678**	**446.822.000**	**206.931.843.545**	**67.670.350**	**8.266.404.510**	**84.567.861.119**	**(8.266.404.510)**	**(84.567.861.119)**	**6.051.052.504**	**18.104.722.014**	**10.264.426.473**	**(18.104.722.014)**	**(6.051.052.504)**	**(10.264.426.473)**	**240.817.499.881**

LAMPIRAN XLVII

REKAPITULASI MONITORING REKONSILIASI INTERNAL

LAMPIRAN XLVII

Rekapitulasi Monitoring Rekonsiliasi Internal

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Saiba	Rph Simak	Rph Selisih	Penjelasan
1	010.07.310224	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	135111	Aset Tetap Renovasi	-	(4.036.740.909)	4.036.740.909	Saldo akun pada satker tersebut seharusnnya sudah nihil. Aset satker tersebut telah dihibahkan kepada Pemda pada Tahun 2021 untuk kode satker 310224 dan pada Tahun 2020 untuk kode satker 070638. Proses koreksi data aplikasi e-Rekon&LK telah dilakukan beberapa kali upload, namun data pada aplikasi e-Rekon&LK belum dapat dikoreksi. Namun demikian, selisih rekonsiliasi internal tersebut tidak mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan.
2	010.08.070638	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUAN BATU	132111	Peralatan dan Mesin	-	85.800.000	(85.800.000)	
3	010.08.070638	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUAN BATU	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	(53.625.000)	53.625.000	
Jumlah					**-**	**(4.004.565.909)**	**4.004.565.909**	

LAMPIRAN XLVIII

REKAPITULASI JURNAL TIDAK LAZIM

LAMPIRAN XLVIII

Rekapitulasi Jurnal Tidak Lazim

No	Kode	Satuan Kerja	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
1	010.01.352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	407	30/08/2021	20210835259305	132211	-	1.773.748	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
2	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	408	31/12/2021	2021124032002	132211	101.834.700	-	Peralatan dan mesin yang berasal dari belanja gedung dan bangunan
3	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	408	31/12/2021	2021124032001	132211	296.372.500	-	Peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal lainnya
4	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	21/05/2021	2021054032001	117911	442.500.000	-	Persediaan yang berasal dari hibah langsung
5	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	30/11/2021	2021114032001	132211	-	48.400.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
6	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	31/12/2021	20211240320010	117911	198.036.223	-	Koreksi belanja penambah daya tahan tubuh yang menjadi persediaan (obat)
7	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	31/12/2021	2021124032009	117911	48.497.654	-	Koreksi belanja penambah daya tahan tubuh yang menjadi persediaan (obat)
8	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	31/12/2021	2021124032008	117911	49.847.089	-	Koreksi belanja penambah daya tahan tubuh yang menjadi persediaan (obat)
9	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	31/12/2021	2021124032007	117911	48.702.500	-	Koreksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang menjadi persediaan (lampu pijar)
10	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	31/12/2021	2021124032006	117911	49.591.179	-	Koreksi belanja penambah daya tahan tubuh yang menjadi persediaan (obat)
11	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	31/12/2021	2021124032005	132211	-	50.248.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
12	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	05/08/2021	2021084032003	131211	11.736.360.000	-	Tanah yang berasal dari hibah langsung
13	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	31/10/2021	2021104032001	132211	-	229.850.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
14	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	31/08/2021	2021084032002	132211	-	3.382.500	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
15	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	407	08/01/2021	2021014032007	117911	260.000.000	-	Persediaan yang berasal dari hibah langsung
16	010.01.403200	SEKRETARIAT JENDERAL	408	31/12/2021	2021124032002	133211	-	101.834.700	Koreksi peralatan dan mesin yang berasal dari belanja gedung dan bangunan
17	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302014	133211	-	600.000	Koreksi atas pengadaan Logo Provinsi kabupaten kota karena terdapat kekurangan Volume (kelebihan pembayaran)
18	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302010	133211	-	199.173.000	Koreksi atas Pengecatan Plafond pada Gedung Menza yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan dicatat sebagai beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
19	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302001	133211	-	149.541.500	Koreksi atas Pembayaran Tahap II konsultan Perencana pembangunan Gedung Perpustakaan yang belum dapat diakui sebagai KDP karena belum memenuhi ketentuan pembayaran Termin II (pembayaran dilakukan ketika pembangunan fisik 50%) sehingga dicatat sebagai Belanja Modal dibayar dimuka (prepaid)
20	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302011	133211	-	105.201.000	Koreksi atas Pengecatan dinding pada Gedung Menza yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan dicatat sebagai beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
21	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302012	133211	-	860.000	Koreksi atas pengadaan tiang bendera karena terdapat kekurangan Volume (kelebihan pembayaran)
22	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302017	134212	78.625.000	-	Kapitalisasi Penggantian Pompa sumur artesi dari Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin
23	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302016	132211	-	148.562.000	Perbaikan meja dari belanja Modal peralatan dan mesin yang tidak bisa dikapitalisasi karena nilai per unit dibawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai beban Peralatan dan Mesin
24	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302015	132211	140.006.000	-	Pengadaan tiang bendera yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan dicatat sebagai Aset peralatan dan Mesin
25	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302013	133211	-	187.533.000	Pengadaan logo provinsi dari belanja Modal Gedung dan bangunan sebesar Rp. 188.133.000 namun terdapat kekurangan Volume pekerjaan (kelebihan pembayaran) sebesar Rp. 600.000 dan dicatat sebagai Aset Peralatan Dan Mesin
26	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	408	31/12/2021	202112448302015	133211	-	140.006.000	Pengadaan tiang bendera yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 140.866.000 namun terdapat kekurangan Volume pekerjaan (kelebihan pembayaran)Rp.860.000 dan dicatat sebagai Aset peralatan dan Mesin
27	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	407	21/05/2021	202105448302001	132211	113.263.726	-	Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah langsung
28	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	407	31/03/2021	202103448302001	132211	63.350.000	-	Peralatan dan mesin yang berasa dari hibah langsung
29	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	407	31/08/2021	202108448302001	133211	120.000.000	-	Gedung dan bangunan yang berasal dari hibah langsung
30	010.01.448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	407	30/11/2021	202111448302001	132211	-	995.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
31	010.01.677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	408	30/06/2021	202106677045001	132211	19.877.000	-	Peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal lainnya
32	010.01.677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	408	31/12/2021	202112677045014	132211	384.515.000	-	Koreksi tambah pada akun Peralatan dan Mesin yang terdiri atas realisasi pembelian 5 (lima) unit laptop, 1 (satu) unit karpet dan pengembangan langsung 1 (satu) unit pompa air yang berasal dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan

33	010.01.677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	408	31/12/2021	202112677045015	133211	1.299.538.700	-	Koreksi tambah kapitalisasi (pengembangan langsung) pada akun Gedung dan Bangunan yang berasal dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
34	010.01.677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	408	31/12/2021	202112677045016	134212	98.303.000	-	Koreksi tambah kapitalisasi (pengembangan langsung) pada akun Irigasi yang berasal dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
35	010.01.677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	408	30/06/2021	202106677045010	132211	-	19.877.000	pencatatan koreksi tambah obat dan vitamin (persediaan lainnya) yang berasal dari belanja operasional penanganan pandemi *Covid-19* tahun anggaran 2021
36	010.01.677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	408	31/12/2021	202112677045013	117911	160.758.000	-	Koreksi tambah obat dan vitamin (persediaan lainnya) yang berasal dari belanja operasional penanganan pandemi *Covid-19* tahun anggaran 2021
37	010.01.683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	407	30/09/2021	20210968307011	117911	34.993.969	-	Persediaan yang berasal dari hibah langsung
38	010.01.683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	407	30/09/2021	20210968307010	132211	204.953.394	-	Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah langsung
39	010.01.683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	408	31/12/2021	20211268307002	132211	9.997.900	-	Pengembalian belanja peralatan dan mesin tahun berjalan berupa gorden
40	010.01.683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	408	30/11/2021	2021116830701	132211	-	7.392.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
41	010.02.027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	407	31/12/2021	202112027203013	133211	199.508.540	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
42	010.02.027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	407	30/06/2021	202106027203011	132211	-	6.286.800	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
43	010.02.027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	407	31/12/2021	202112027203012	133211	192.100.000	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
44	010.02.027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	407	31/12/2021	202112027203014	133211	199.660.340	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
45	010.02.027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	407	31/12/2021	202112027203015	133211	115.971.020	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
46	010.03.027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	407	31/12/2021	202112027210008	132211	-	1.411.800	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
47	010.03.027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	407	31/12/2021	202112027210007	132211	-	7.095.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
48	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	408	31/08/2021	202108027486014	132211	-	5.176.050	Persediaan yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
49	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	408	31/12/2021	202112027486025	132211	-	4.070.000	Persediaan yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
50	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	408	31/12/2021	202112027486024	132211	-	1.320.000	Persediaan yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
51	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	408	31/12/2021	202112027486023	132211	-	990.000	Persediaan yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
52	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	408	31/12/2021	202112027486022	132211	-	4.950.000	Persediaan yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
53	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	408	27/08/2021	202108027486013	117911	50.457.600	-	Persediaan yang berasal dari hibah langsung
54	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	408	31/07/2021	202107027486013	132211	-	44.990.000	Persediaan yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
55	010.04.027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	408	27/08/2021	202108027486015	117911	1.245.297.566	-	Persediaan yang berasal dari hibah langsung
56	010.05.027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	408	31/12/2021	202112027753002	132211	103.550.000	-	Koreksi tambah pada akun Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Sewa PHLN Kemendagri Pekerjaan Pengadaan Office Make Ready Sekretariat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
57	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	408	31/10/2021	202110039729018	132211	-	6.600.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
58	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	408	30/09/2021	202109039729024	132211	31.515.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban jasa lainnya
59	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	408	30/11/2021	202111039729024	132211	504.900.000	-	Koreksi tambah pada akun Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Jasa Konsultan untuk pengadaan server
60	010.06.039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	408	31/12/2021	202112039729023	132211	-	145.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
61	010.07.621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	407	31/08/2021	202108621892004	132211	-	10.857.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
62	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	31/12/2021	202112634082006	133211	-	2.000.269.200	Peralatan dan mesin yang menjadi gedung dan bangunan belum diregister
63	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	407	31/12/2021	202112634082011	132211	10.999.400.500	-	Koreksi tambah pada akun Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Jasa Lainnya - Pekerjaan Jasa Jarkomdat
64	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	30/11/2021	202111634082001	132211	28.377.786.700	-	Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah langsung
65	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	31/12/2021	202112634082001	132211	51.653.624.929	-	Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah langsung
66	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	31/12/2021	202112634082006	132211	2.000.269.200	-	Koreksi peralatan dan mesin yang menjadi gedung dan bangunan belum diregister
67	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	31/12/2021	202112634082002	132211	-	13.795.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
68	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	31/12/2021	202112634082007	132211	-	199.469.600	Aset lainnya yang berasal dari belanja peralatan dan mesin
69	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	31/12/2021	202112634082004	132211	-	9.332.135.368	Aset lainnya yang berasal dari belanja peralatan dan mesin
70	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	31/12/2021	202112634082005	133211	-	2.223.047.623	Aset lainnya yang berasal dari belanja peralatan dan mesin
71	010.08.634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408	31/12/2021	202112634082008	133211	-	7.454.708	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
72	010.09.662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	408	31/12/2021	202112662766003	132211	-	3.645.000	Aset lainnya yang berasal dari belanja peralatan dan mesin
73	010.12.027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	407	31/12/2021	20211202711407	132211	-	48.000.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
74	010.12.027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	407	30/11/2021	202111027177001	132211	-	60.500.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
75	010.12.027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	407	30/11/2021	202111027177002	132211	-	240.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
76	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	408	30/06/2021	20210640323101	132211	-	18.000.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
77	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	408	31/07/2021	20210740323102	132211	-	570.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel

78	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	408	31/12/2021	20211240323104	132211	-	5.100.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
79	010.12.403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	408	30/11/2021	20211140323103	132211	-	1.315.601	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
80	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/03/2021	202103506137011	132211	2.550.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
81	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/03/2021	202103506137010	133211	29.767.100	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
82	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/03/2021	202103506137009	132211	1.680.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
83	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	28/02/2021	202102506137004	132211	3.010.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
84	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/12/2021	202112506137037	117911	37.875.500	-	Koreksi untuk mencatat sisa ATK dari belanja keperluan perkantoran tahun 2021
85	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	28/02/2021	202102506137005	132211	1.320.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
86	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	28/02/2021	202102506137006	132211	19.150.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
87	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	28/02/2021	202102506137007	132211	1.350.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
88	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	28/02/2021	202102506137008	132211	7.458.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
89	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/03/2021	202103506137013	134213	148.169.868	-	Belanja jaringan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
90	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/03/2021	202103506137012	132211	3.900.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
91	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/05/2021	202105506137019	134211	198.028.537	-	Belanja jalan dan jembatan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
92	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	30/04/2021	202104506137014	132211	3.750.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
93	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/07/2021	202107506137024	133211	-	69.168.000	Koreksi belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban keperluan kantor
94	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	30/11/2021	202111506137031	132211	25.920.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban bahan
95	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/10/2021	202110506137030	134213	76.732.700	-	Belanja jaringan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
96	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/10/2021	202110506137029	134211	119.213.000	-	Belanja jalan dan jembatan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
97	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/08/2021	202108506137028	132211	1.680.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
98	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/08/2021	202108506137027	132211	32.477.445	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
99	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/07/2021	202107506137026	133211	93.064.000	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
100	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	30/04/2021	202104506137015	132211	8.820.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
101	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/07/2021	202107506137025	133211	69.168.000	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
102	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	30/06/2021	202106506137023	133211	69.168.000	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban keperluan kantor
103	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	30/06/2021	202106506137022	133211	49.614.400	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
104	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	30/06/2021	202106506137021	132211	11.310.000	-	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban pemeliharaan peralatan dan mesin
105	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/12/2021	202112506137038	117911	11.226.500	-	Koreksi untuk mencatat sisa ATK dari belanja keperluan perkantoran tahun 2021
106	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/12/2021	202112506137032	133211	43.928.500	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
107	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/05/2021	202105506137018	133211	198.000.000	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
108	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/05/2021	202105506137017	133211	49.735.911	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
109	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	30/04/2021	202104506137016	133211	113.000.000	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
110	010.12.506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	407	31/05/2021	202105506137020	133211	171.012.146	-	Belanja gedung dan bangunan yang menjadi beban pemeliharaan gedung dan bangunan
111	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	408	31/08/2021	202108506138001	132211	-	77.220.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
112	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	408	31/10/2021	202110506138002	132211	-	32.241.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
113	010.12.506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	408	30/11/2021	202111506138004	132211	-	198.000.000	Belanja peralatan dan mesin yang menjadi beban aset ekstrakomtabel
JUMLAH							**113.236.044.536**	**15.779.292.198**	

LAMPIRAN XLIX

REKAPITULASI PERBEDAAN TANGGAL BUKU

LAMPIRAN XLIX

Rekapitulasi Perbedaan Tanggal Buku

No	Kode	Uraian	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Posting	Periode GL	Tahun Anggaran GL	Penjelasan
1	010.04.484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	13-08-2021	SP DIPA- 010.04.3.484160/2021	13-08-2021	01	2021	Terdapat kesalahan pencatatan tanggal DIPA pada Aplikasi, namun tidak mempengaruhi penyajian LRA
2	010.04.484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	16-02-2021	SP DIPA- 010.04.3.484160/2021	16-02-2021	01	2021	
3	010.04.484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	16-04-2021	SP DIPA- 010.04.3.484160/2021	16-04-2021	01	2021	
4	010.04.484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	23-11-2021	SP DIPA- 010.04.3.484196/2021	01-04-2021	01	2021	
5	010.04.484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	23-11-2021	SP DIPA- 010.04.3.484196/2021	01-04-2021	01	2021	

LAMPIRAN L

DATA REKENING TAHUN 2021

LAMPIRAN L

Data Rekening Tahun 2021 *Audited*
Kementerian Dalam Negeri

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
1	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	9891483525931000	9891483525931000	BPG 133 IPDN KAMPUS JAKARTA	BNI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-581/WPB.12/KP.04/2020	11/02/2020
2	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001000	650364032001000	BPG-133 SetjenKemendagri	BRI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
3	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001001	650364032001001	BPP-133 Biro Hukum	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
4	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001002	650364032001002	BPP-133 Biro Kepegawaian	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
5	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001003	650364032001003	BPP-133 Biro Ortala	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
6	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001005	650364032001005	BPP-133 Biro Umum	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
7	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001006	650364032001006	BPP-133 PusatFaskerjasama	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
8	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001007	650364032001007	BPP-133 Biro Keuangan	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
9	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001008	650364032001008	BPP-133 Pusdatin	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
10	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001009	650364032001009	BPP-133 Biro Administrasi	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
11	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001010	650364032001010	BPP-133 PusatPenerangan	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001403	18/03/2020
12	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364830051000	650364830051000	BPG 133 SETJEN KEMENDAGRI	BRI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	003337	31/08/2021
13	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001004	650714032001004	BPP 133 BIRO PERENCANAAN	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	004800	19/11/2021
14	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	9891484483021000	9891484483021000	BPG 087 IPDN	BNI	50	200	Virtual	Sumedang	JAWA BARAT	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
15	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2200088665	2200088665	BPN 087 IPDN Jatinangor Sumedang	BNI	10	100	Giro	Sumedang	JAWA BARAT	000294	12/03/2021
16	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	23701001033306	23701001033306	BPG 049 IPDN KAMPUS SULUT	BRI	20	200	Giro	Manado	SULAWESI UTARA	S-187/WPB.30/KP.0104/2020	22/01/2020
17	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	9891486770241000	9891486770241000	BPG 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	50	200	Virtual	Makassar I	SULAWESI SELATAN	002040	29/03/2021
18	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	1067702427	1067702427	BPN 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	10	100	Giro	Makassar I	SULAWESI SELATAN	001980	13/01/2021
19	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	9891486770451000	9891486770451000	BPG 011 IPDN KAMPUS BUKITTINGGI	BNI	50	200	Virtual	Bukittinggi	SUMATERA BARAT	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
20	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	9891486830701000	9891486830701000	BPG 042 IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BNI	50	200	Virtual	Pontianak	KALIMANTAN BARAT	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
21	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	9891486830841000	9891486830841000	BPG 038 IPDN KAMPUS NTB	BNI	50	200	Virtual	Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
22	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	9891486830911000	9891486830911000	BPG 063 IPDN KAMPUS PAPUA	BNI	50	200	Virtual	Jayapura	PAPUA	583/485/SJ	28/01/2021
23	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031001	650410272031001	INSPEKTORAT I	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
24	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031002	650410272031002	BPP 133 Inspektorat II	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
25	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031003	650410272031003	BPP 133 Inspektorat III	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
26	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031004	650410272031004	BPP 133 Inspektorat IV	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
27	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031006	650410272031006	SETITJEN KEMENDAGRI	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
28	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031000	650700272031000	BPG 133 ITJEN KEMENDAGRI	BRI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
29	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031005	650700272031005	BPP 133 INSPEKTORAT KHUSUS	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
30	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101000	650720272101000	BPG 133 DITJEN POLPUM KEMENDAGRI	BRI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
31	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101001	650720272101001	BPP 133 SEKRETARIAT	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
32	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101002	650720272101002	BPP 133 DIREKTORAT WASBANG	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
33	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101003	650720272101003	BPP 133 DIREKTORAT POLDAGRI	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
34	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101004	650720272101004	BPP 133 DIREKTORAT EKOSOSBUD	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
35	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101005	650720272101005	BPP 133 DIREKTORAT ORMAS	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
36	01003	DITJEN POLPUM	027210	DITJEN POLPUM	650720272101006	650720272101006	BPP 133 DIREKTORAT WASNAS	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
37	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861000		BPG: 133 DITJEN BINA ADM.KEWILAYAHAN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		20	Virtual			S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
38	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861001		BPP: 133 SEKRETARIAT DITJEN ADWIL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
39	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861004		BPP: 133 DIR. POLPP DAN LINMAS	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
40	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861002		BPP: 133 DIR. DEKONSENTRASI TP	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
41	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861005		BPP: 133 DIREKTORAT TOPOBAD	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
42	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861003		BPP: 133 DIREKTORAT WASKOBAN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
43	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861006		BPP: 133 DIREKTORAT MPBK	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
44	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	9890240994381000		BPG 008 SETDA PROV RIAU 04 DK	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
45	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890243291161000		BPG 009 SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAUES04	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
46	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	9890243091481000		BPG 015 SETDA PROV. BABEL-04	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
47	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	9890240396671000		BPG 026 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
48	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890240490611000		BPG 030 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY 04	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
49	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	9890242290681000		BPG 037 SEKDA PROVINSI BALI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
50	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491741000		BPG 039 DPMPTSP PROV NTT 249174	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
51	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890241390781000		BPG 042 SETDA PROV. KALBAR 139078	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
52	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241490721000		BPG 043 SETDA PROV KALTENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
53	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241491301000		BPG 043 DPMPTSP PROV KALTENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
54	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890241590711000		BPG 045 SEKDA PROV KAL SEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
55	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241790881000		BPG 049 DINAS PENANAMAN MODAL PTSPD PROV SULUT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
56	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244333501000		BPG 051 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV SULTENG 433350	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
57	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090711000		BPG 060 SETDA PROV. SULTRA DK 04	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
58	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090951000		BPG 060 DPMPTSP PROV SULTRA 04	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
59	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	9890242590841000		BPG 063 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. PAPUA	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
60	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419079	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	9890244190791000		BPG 079 BPPD SINTANG 419079	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
61	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243401661000		BPG 178 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
62	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243490111000		BPG 178 DINAS PMPTSP SULAWESI BARAT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
63	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890243590021000		BPG 185 DPMDPTSP PROV KALTARA 359002	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
64	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244176971000		BPG 185 SEKDA KALTARA 04 417697	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
65	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	9890244333411000		BPG 012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI JAMBI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
66	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	9890244841271000		BPG 016 BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
67	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841701000		BPG 043 INSPEKTORAT PROV KALTENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
68	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	160552	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NUNUKAN	9890241605521000		BPG 152 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NUNUKAN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
69	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841731000		BPG 045 BAPPEDA PROV KALSEL 484173	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
70	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	9890244841151000		BPG 012 BAPPEDA PROVINSI JAMBI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
71	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484200	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244842001000		BPG 060 Inspektorat Daerah Prov Sultra	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
72	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484187	BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO	9890244841871000		BPG 050 BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
73	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842051000		BPG 062 BAPPEDA PROV MALUT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
74	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841771000		BPG 046 BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
75	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841321000		BPG 015 INSPEKTORAT PROV. BABEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
76	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484149	DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY	9890244841491000		BPG 030 DPPM PROVINSI D.I YOGYAKARTA	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
77	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841691000		BPG 043 BAPPEDA PROV KALTENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
78	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842111000		BPG 065 DPMPTSP PABAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
79	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	9890244841091000		BPG 008 BAPPEDA RIAU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
80	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244333521000		BPG 038 DPMPT SATU PINTU PROV NTB	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
81	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244333421000		BPG 014 DINAS PMPTSP SUMSEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
82	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL,ESDM DAN TRANSMIGRASI PROV GORONTALO	9890244333491000		BPG 050 DPM-ESDM-TRANS GORONTALO	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
83	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890241190821000		BPG 014 SEKRETARIAT DAERAH PROV SUMSEL 2	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
84	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890242392361000		BPG 038 SETDA PROV NTB	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
85	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890241890871000		BPG 051 SETDA PROV. SULTENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
86	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241792231000		BPG 049 SEKDA PROV SULUT BIRO PEMERINTAHAN HUMAS	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
87	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	9890243190611000		BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
88	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841071000		BPG 123 INSPEKTORAT PROVINSI SUMUT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
89	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841471000		BPG 026 INSPEKTORAT PROVINSI JATENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
90	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	9890244333471000		BPG 037 DINAS PMPTSP PROV BALI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
91	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484160	BAPPEDA PROVINSI NTB	9890244841601000		BPG 038 BAPPEDA PROV NTB	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
92	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484172	DINAS PMPTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841721000		BPG 045 PMPTSP PROV KALSEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
93	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	9890244841571000		BPG 037 BAPPEDA PROV BALI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
94	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	9890244333441000		BPG 016 DINAS PMPTSP PROV BENGKULU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
95	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841451000		BPG 026 DINAS PMPTSP PROV JATENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
96	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	9890244333451000		BPG 020 DINAS PMPTSP PROV BANTEN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
97	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI. YOGYAKARTA	9890244841511000		BPG 030 INSPEKTORAT PROV DIY	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
98	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841801000		BPG 185 BAPPEDA PROV KALUT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
99	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841461000		BPG 026 BAPPEDA PROV JATENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
100	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	9890244841611000		BPG 038 INSPEKTORAT PROV NTB	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
101	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841191000		BPG 010 INSPEKTORAT PROV SUMBAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
102	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433348	DPMPTSP PROV. KALBAR	9890244333481000		BPG 042 DINAS PMPTSP PROV KALBAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
103	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841131000		BPG 009 INSPEKTORAT PROV KEPRI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
104	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	9890244841241000		BPG 017 BAPPEDA PROV LAMPUNG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
105	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	9,89024E+15		BPG 049 BAPPEDA PROV SULUT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
106	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841911000		BPG 178 INSPEKTORAT PROV SULBAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
107	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	9890240190801000		BPG 133 SETDA PROV DKI JAKARTA	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
108	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	9890241290741000		BPG 017 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
109	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890241990801000		BPG 054 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
110	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	269093	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	9890242690931000		BPG 016 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
111	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	9890240790781000		BPG 123 SETDAPROVSU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
112	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	9890241090741000		BPG 012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
113	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890241691851000		BPG 046 SETDA PROV KALTIM	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
114	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841901000		BPG 178 BAPPEDA PROV SULBAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
115	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841841000		BPG 049 INSPEKTORAT PROV SULUT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
116	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	9890242891741000		BPG 062 SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUKU UTARA 04 DK	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
117	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. MALUKU UTARA	9890242890951000		BPG 062 DINAS PMPTSP PROV MALUT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
118	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	9890244841161000		BPG 012 INSPEKTORAT PROV JAMBI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
119	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484197	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841971000		BPG 051 ITDA PROV SULTENG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
120	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841311000		BPG 015 BAPPEDABABEL 484131	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
121	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842061000		BPG 062 INSPEKTORAT PROV MALUT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
122	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841811000		BPG 185 INSPEKTORAT PROV KALIMANTAN UTARA	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
123	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	9890244841881000		BPG 050 INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
124	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841661000		BPG 042 BAPPEDA PROVINSI KALBAR 484166	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
125	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841961000		BPG 051 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
126	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484150	BAPPEDA PROVINSI DI. YOGYAKARTA	9890244841501000		BPG 030 BAPPEDA PROVINSI DI. YOGYAKARTA	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
127	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	9890240891061000		BPG 010 SETDA PROV SUMBAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
128	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	9890244841281000		BPG 016 INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
129	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	9890244841581000		BPG 037 INSPEKTORAT BALI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
130	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841931000		BPG 054 BAPPEDA SULSEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
131	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244333511000		BPG 054 DPMPTSP SULSEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
132	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841741000		BPG 015 INSPEKTORAT KALSEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
133	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244333161000		BPG 010 DPMPTSP PROV SUMBAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
134	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841221000		BPG 014 INSPEKTORAT SUMSEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
135	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	219062	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU	9890242190621000		BPG 061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU 219062	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
136	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244333181000		BPG 009 DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
137	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	9890244842021000		BPG 061 BAPPEDA PROVINSI MALUKU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
138	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841121000		BPG 009 BAPPEDA PROV KEPRI	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
139	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	9890244333531000		BPG 061 DINAS PMPTSP PROV MALUKU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
140	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484164	INSPEKTORAT DAERAH PROV.NTT	9890244841641000		BPG 039 INSPEKTORAT PROV NTT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
141	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841761000		BPG 046 DINAS PMPTSP PROV KALTIM	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
142	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841211000		BPG 014 BAPPEDA PROV SUMSEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
143	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841941000		BPG 054 INSPEKTORAT PROV SULSEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
144	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	9890244842031000		BPG 061 INSPEKTORAT PROV MALUKU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
145	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	9890244333171000		BPG 008 DINAS PMPTSP PROV RIAU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
146	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484110	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	9890244841101000		BPG 008 INSPEKTORAT PROV RIAU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
147	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	9890244841371000		BPG 022 DINAS PMPTSP JABAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
148	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841531000		BPG 135 DINAS PMPTSP JATIM	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
149	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841181000		BPG 010 BAPPEDA PROV SUMBAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
150	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	9890244841351000		BPG 001 INSPEKTORAT BANTEN	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
151	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841671000		BPG 042 INSPEKTORAT KALBAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
152	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841781000		BPG 046 INSPEKTORAT KALTIM	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
153	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	9890243391611000		BPG 065 SETDA PROV PAPUA BARAT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
154	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244841991000		BPG 060 BAPPEDA PROV SULTRA	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
155	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	9890244841381000		BPG 022 BAPPEDA PROV JABAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
156	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	9890240291341000		BPG 022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
157	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	9890244841391000		BPG 022 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
158	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491361000		BPG 039 SEKDA PROV NTT	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
159	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	8100710690841000		BPG 001 SEKDA PROVINSI ACEH 04	Bank BSI		21	Virtual			S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
160	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	8100714841011000		BPG 001 DPM DAN PTSP PROV	Bank BSI		21	Virtual			S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
161	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	8100714841031000		BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	Bank BSI		21	Virtual			S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
162	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	8100714841021000		BPG 001 BAPPEDA PROV ACEH	Bank BSI		21	Virtual			S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
163	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433343	DPMPTSP BABEL	9890244333431000		BPG 015 DPMPTSP BABEL	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
164	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	9890244841251000		BPG 017 INSPEKTORAT LAMPUNG	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
165	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842131000		BPG 065 INSPEKTORAT PABAR	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
166	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484163	BAPPEDA NTT	9890244841631000		BPG 039 DEKON BAPPELITBAGDA	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)		21	Virtual			S-3391/WPB.12/KP.04/2021	24 Agustus 2021
167	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9890280277531000	9890280277531000	BPG 133 DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI	BNI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
168	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9890280277531001	9890280277531000	BPP:133 Direktorat PAPD	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
169	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9890280277531002	9890280277531000	BPP:133 Direktorat FPKAD	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
170	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9890280277531003	9890280277531000	BPP:133 Direktorat FKAD	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
171	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9890280277531004	9890280277531000	BPP:133 Direktorat KKD	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
172	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9890280277531005	9890280277531000	BPP:133 Direktorat EPD	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
173	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	9890280277531006	9890280277531000	BPP:133 Sekretariat	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
174	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	9890280284491000	9890280284491000	BPG 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	50	200	Virtual	Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S-1345/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
175	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	651560288301000	651560288301000	BPG 032 BBPMD MALANG	BRI	50	200	Virtual	Malang	JAWA TIMUR	S-831/PB.3/2020	11/12/2020
176	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	249395	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	1401050001542	1401050001542	BPG 039 BPMPD KAB ROTE NDAO	BPD NTT	20	200	Giro	Kupang	NUSA TENGGARA TIMUR	S-1408/WPB.23/KP.0130/2015	17/06/2015
177	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	259291	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	4000106002128	4000106002128	BPG 068 BPMK KAB MERAUKE	BPD PAPUA	20	200	Giro	Merauke	PAPUA	S-729/WPB.33/KP.0430/2015	03/08/2015
178	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	651566136291000	651566136291000	BPG 017 BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	BRI	50	200	Virtual	Bandar Lampung	LAMPUNG	S-452/WPB.08/KP.01/2021	05/02/2021
179	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291000	9890260397291000	BPG: 133 DITJEN BINA BANGDA	BNI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	003899	29/09/2021
180	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291001		BPP: 133 SEKRETARIAT	BNI			Virtual			S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
181	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291002		BPP: 133 DIREKTORAT PEIPD	BNI			Virtual			S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
182	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291003		BPP: 133 Direktorat SUPD I	BNI			Virtual			S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
183	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291004		BPP: 133 Direktorat SUPD II	BNI			Virtual			S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
184	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291005		BPP 133: Direktorat SUPD III	BNI			Virtual			S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
185	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291006		BPP: 133 Direktorat SUPD IV	BNI			Virtual			S-1558/WPB.12/KP.04/2020	3 April 2020
186	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240006203674		RPL 140 DITJEN BANGDA- UNICEF	mandiri							
187	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1810000463647		RPL 140 PDH Bappeda Prov NTT-2YFW984A	mandiri							
188	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921000	650356218921000	BPG : 133 DITJEN OTDA KEMENDAGRI	BRI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
189	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921001	650356218921001	BPP : 133 SEKRETARIAT	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
190	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921002	650356218921002	BPP : 133 DIR.PENATAAN DAERAH	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
191	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921003	650356218921003	BPP : 133 DIR.KEPALA DAERAH	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
192	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921004	650356218921004	BPP : 133 DIR.KELEMBAGAAN	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
193	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921005	650356218921005	BPP : 133 DIR.PRODUK HUKUM	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
194	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921006	650356218921006	BPP : 133 DIR.EVALUASI KINERJA	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
195	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	120853	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN	219101000196305	219101000196305	BPG 116 DINAS DUKCAPIL KAB WK	BRI	20	200	Giro	Kotabumi	LAMPUNG	S-628/WPB.08/KP.0330/2015	19/06/2015
196	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	121215	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	219201000165308	219201000165308	BPG 116 DINAS DUKCAPIL KAB TUBA BARAT	BRI	20	200	Giro	Kotabumi	LAMPUNG	S-724/WPB.08/KP.0330/2015	07/07/2015

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
197	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	175160	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO	5401002213305	5401002213305	BPG 049 DISDUKCAPIL KOTA MANADO	BRI	20	200	Giro	Manado	SULAWESI UTARA	S-1623/WPB.29/KP.0130/2015	24/07/2015
198	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	209029	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	20501050000069	20501050000069	BPG 060 SETDA PROV. SULTRA 08 DK	BPD SULTRA	20	200	Giro	Kendari	SULAWESI TENGGARA	S-0983/WPB.27/KP.060/2015	18/06/2015
199	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	215140	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON	101001108306	101001108306	BPG (061) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON	BRI	20	200	Giro	Ambon	MALUKU	S-1517/WPB.31/KP.061.3/2015	08/07/2015
200	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	240858	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE	2401001021308	2401001021308	BPG 040 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB ENDE	BRI	20	200	Giro	Ende	NUSA TENGGARA TIMUR	S-705/WPB.23/KP.0430/2015	29/06/2015
201	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	241437	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROTENDAO	1401050001361	1401050001361	BPG 039 DUKCAPIL KAB ROTE NDAO	BPD NTT	20	200	Giro	Kupang	NUSA TENGGARA TIMUR	S.1650/WPB.23/KP.0130/2015	07/07/2015
202	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251323	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAPPI	4000106000413	4000106000413	BPG 068 DUKCAPIL NAKERKIM KAB MAPPI	BPD PAPUA	20	200	Giro	Merauke	PAPUA	S-865/WPB.33/KP.0430/2015	15/09/2015
203	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251626	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SARMI	30701002206309	30701002206309	BPG 063 DUKCAPIL KAB SARMI	BRI	20	200	Giro	Jayapura	PAPUA	S-2459/WPB.33/KP.063/2015	25/08/2015
204	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1186382692	1186382692	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UNTUK 2NTPDXQA	BNI	30	320	Giro	Jakarta IV	DKI JAKARTA	001359	05/04/2021
205	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	9891006340821000	BPG: 133 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	BNI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
206	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	9891006340821000	BPP: 133 SEKRETARIAT PEMERINTAH	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
207	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	9891006340821000	BPP: 133 PENDAFTARAN PEMERINTAH	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
208	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	9891006340821000	BPP: 133 CATATAN SIPIL PEMERINTAH	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
209	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	9891006340821000	BPP: 133 INFORMASI	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
210	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	9891006340821000	BPP: 133 FASILITAS DATA PEMERINTAH	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
211	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	9891006340821000	BPP: 133 BINA APARATUR PEMERINTAH	BNI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
212	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661000	650336627661000	BPG 133 DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI	BRI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
213	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661001	650336627661001	BPP 133 SEKRETARIAT KEUDA	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
214	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661002	650336627661002	BPP 133 DIREKTORAT PAD	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
215	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661003	650336627661003	BPP 133 DIREKTORAT PPKD	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
216	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661004	650336627661004	BPP 133 DIREKTORAT PD	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
217	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661005	650336627661005	BPP 133 DIREKTORAT FDPPD	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
218	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661006	650336627661006	BPP 133 DIT BUMD BLUD BMD	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
219	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221000	650374032221000	BPG 133 BALITBANG KEMENDAGRI	BRI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
220	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221001	650374032221001	BPP 133 PUSLITBANG OTDAPOLPUM	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1306/WPB.12/KP.04/2020	13/03/2020
221	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221002	650374032221002	BPP 133 PUSLITBANG ADWIL	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1306/WPB.12/KP.04/2020	13/03/2020
222	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221003	650374032221003	BPP 133 PUSLITBANG KEUDA	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1306/WPB.12/KP.04/2020	13/03/2020

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
223	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221004	650374032221004	BPP 133 PUSLITBANG INOVASI	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1306/WPB.12/KP.04/2020	13/03/2020
224	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	650060271141000	650060271141000	BPG 030 PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA	BRI	50	200	Virtual	Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
225	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	1370007202589	1370007202589	BPN 030 PUSDIKLAT REGIONAL YOGYAKARTA	MANDIRI	10	100	Giro	Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S-1156/WPB.15/KP/01/2015	26/02/2015
226	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	7145711667	7145711667	BPN 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BANK SYARIAH INDONESIA	10	100	Giro	Makassar I	SULAWESI SELATAN	001960	20/10/2020
227	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	9890070271771000	9890070271771000	BPG 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BNI	50	200	Virtual	Makassar I	SULAWESI SELATAN	001117	04/03/2020
228	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	1320010408616	1320010408616	BPN 022 PUSDIKLAT REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	10	100	Giro	Bandung I	JAWA BARAT	S-414/WPB.13/KP.022/2015	02/03/2015
229	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161000	8100124032161000	BPG 022 PPSDM REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	50	200	Virtual	Bandung I	JAWA BARAT	S-1119/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
230	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311000	650064032311000	BPG 133 BADAN PENGEMB. SDM KEMENDAGRI	BRI	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
231	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311001	650064032311001	BPP 133 Sekretariat	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
232	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311002	650064032311002	BPP 133 Pusat I	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
233	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311003	650064032311003	BPP 133 Pusat II	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
234	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311004	650064032311004	BPP 133 Pusat III	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
235	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311005	650064032311005	BPP 133 Pusat IV	BRI	51	210	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
236	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1240009999484	1240009999484	BPN 133 BPSDM	MANDIRI	10	100	Giro	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-7197/WPB.12/KP.0404/2018	18/12/2018
237	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	146001000007306	146001000007306	BPN 011 PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI	BRI	10	100	Giro	Bukittinggi	SUMATERA BARAT	S-038/WPB.03/KP.0330/2016	12/01/2016
238	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	650065061371000	650065061371000	BPG 011 PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI	BRI	50	200	Virtual	Bukittinggi	SUMATERA BARAT	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
239	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	650065061381000	650065061381000	BPG023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	50	200	Virtual	Bogor	JAWA BARAT	S-2782/WPB.12/KP.04/2021	13/07/2021
240	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	005101003361303	5101003361303	BPN 032 BBPD MALANG	BRI	10	100	Giro	Malang	JAWA TIMUR	S-251/WPB.16/KP.04/2021	08/02/2021
241	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	0188380452	188380452	BPG 022 SEKDA PROV JABAR	BNI	20	200	Giro	Bandung I	JAWA BARAT	S-1711/WPB.13/KP.022/2015	14/07/2015
242	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	050037	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR	0011220797	11220797	BPG 031 SATPOL PP DANA DEKON	BPD JAWA TIMUR	20	200	Giro	Surabaya I	JAWA TIMUR	S-758/WPB.16/KP.031/2015	15/04/2015
243	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	0011204619	11204619	BPG 135 SETDA JATIM 04	BPD JAWA TIMUR	20	200	Giro	Surabaya II	JAWA TIMUR	S-4628/WPB.16/KP.135/2015	12/06/2015
244	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	0810101009	810101009	BPG 001 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH (04)	BNI	20	200	Giro	Banda Aceh	ACEH	S-1019/WPB.01/KP.0130/2015	15/05/2015
245	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	090058	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RIAU	0337089501	337089501	BPG 008 SATPOL PP PROV RIAU	BNI	20	200	Giro	Pekanbaru	RIAU	S-1793/WPB.04/KP.008/2015	09/06/2015
246	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	099403	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. RIAU	0298221791	298221791	BPG 008 BPBD PROVINSI RIAU	BNI	20	200	Giro	Pekanbaru	RIAU	S-1601/WPB.04/KP.008/2015	20/05/2015

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
247	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	871154006	871154006	BPG 049 BPPD PROV SULUT	BNI	20	200	Giro	Manado	SULAWESI UTARA	S-2913/WPB.30/KP.0104/2019	04/11/2019
248	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	180278	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. DONGGALA	0432886188	432886188	BPG 051 BPBD KABUPATEN DONGGALA	BNI	20	200	Giro	Palu	SULAWESI TENGAH	S-387/WPB.26/KP.0140/2016	0000-00-00
249	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199389	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	2013072013	2013072013	BPG 054 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SULSEL	BNI	20	200	Giro	Makassar	SULAWESI SELATAN	S-0846/WPB.24/KP.0130/2015	06/05/2015
250	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209093	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	00101055001318	101055001318	BPG 060 SAT.POL.PP PROV. SULTRA	BPD SULTRA	20	200	Giro	Kendari	SULAWESI TENGGARA	S-0832/WPB.27/KP.060/2015	01/06/2015
251	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	240168	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. KUPANG	00101050077473	101050077473	BPG 039 BPPD KAB. KUPANG	BPD NTT	20	200	Giro	Kupang	NUSA TENGGARA TIMUR	S-891/WPB.23/KP.0130/2015	21/04/2015
252	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	0001701300004816	1701300004816	BPG 063 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	BTN	20	200	Giro	Jayapura	PAPUA	S-1993/WPB.34/KP.01/2019	25/10/2019
253	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	0290873641	290873641	BPG 020 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	BNI	20	200	Giro	Serang	BANTEN	S-910/WPB.11/KP.020/2015	12/05/2015
254	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	0551328910	551328910	BPG 065 SEKDA PB 339161	BNI	20	200	Giro	Manokwari	PAPUA BARAT	S-1416/WPB.33/KP.065/2017	15/05/2017
255	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	417939	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMPANG	0241286967	241286967	BPG 036 BPBD SAMPANG	BPD JAWA TIMUR	20	200	Giro	Pamekasan	JAWA TIMUR	s-1040	28/08/2017
256	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	418159	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO	25201001095304	25201001095304	BPG 056 BPBD KABUPATEN JENEPONTO	BRI	20	200	Giro	Bantaeng	SULAWESI SELATAN	S-361/WPB.24/KP.0530/2017	02/06/2017
257	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	418161	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	1500012477004	1500012477004	BPG 158 BPBD KOTA KOTAMOBAGU	MANDIRI	20	200	Giro	Kotamobagu	SULAWESI UTARA	S-508/WPB.29/KP.158/2017	0000-00-00
258	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419057	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SARMI	225501000044306	225501000044306	BPG 063 BPBD KAB SARMI	BRI	20	200	Giro	Jayapura	PAPUA	S-984/WPB.33/KP.063/2016	06/06/2016
259	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419064	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	522301001363309	522301001363309	BPG 112 BP PERBATASAN MOROTAI	BRI	20	200	Giro	Tobelo	MALUKU UTARA	S-276/WPB.30/KP.0230/2017	10/04/2017
260	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419075	BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU	105901000487303	105901000487303	BPG 084 BAG PENGELOLA PERBATASAN SETDA KAB KEP ARU	BRI	20	200	Giro	Tual	MALUKU	S-659/WPB.31/KP.0330/2017	0000-00-00
261	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419638	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE	8888676762	8888676762	BPG 060 BPBD KAB KONAWE	BNI	20	200	Giro	Kendari	SULAWESI TENGGARA	S-300/WPB.27/KP.060/2017	29/03/2017
262	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARIMUN	1110305096	1110305096	BPG137 DINAS PU DAN PR KAB. KARIMUN	BPD RIAU	20	200	Giro	Batam	KEPULAUAN RIAU	S-227/WPB.05/KP.0204/2018	02/03/2018
263	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433308	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU	82687469-6	826874696	BPG 172 SEKDA 04 KAB BELU	BNI	20	200	Giro	Atambua	NUSA TENGGARA TIMUR	S-280/WPB.24/KP.04/2019	22/05/2019
264	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433310	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR	15701001965307	15701001965307	BPG 169 BPBD KAB. LOTIM	BRI	20	200	Giro	Selong	NUSA TENGGARA BARAT	S-387/WPB.23/KP.03/2018	04/06/2018
265	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	000101001932307	101001932307	BPG 061 DPMPTSP PROVINSI MALUKU	BRI	20	200	Giro	Ambon	MALUKU	S-566/WPB.32/KP.01/2020	30/03/2020
266	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	259083	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	1540012950121	1540012950121	BPG 063 BAPPEDA PROVINSI PAPUA	MANDIRI	20	200	Giro	Jayapura	PAPUA	S-3393/WPB.33/KP.063/2015	20/11/2015
267	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	280089	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI MALUKU UTARA	160501000007304	160501000007304	RPL 175 BPBD PROVINSI MALUT	BRI	30	350	Giro	Jakarta VI	DKI JAKARTA	BAR-59/PB.35/2016	22/01/2016
268	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	8887988875	8887988875	RPL 133 SETJEN KEMENDAGRI UTK PENAMPUNGAN	BNI	30	350	Giro	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-1714/MK.5/2015	04/03/2015

No	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nor	Nama Rekening	Bank	Jenis	Kelompok	Tipe rek	KPPN	Kanwil	No izin	Tgl Izin
269	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240002324250	1240002324250	RPL 140 PDHL DITJEN BANGDA untuk 2TCK92FA	MANDIRI	30	320	Giro	Khusus Pinjaman & Hibah	DKI JAKARTA	000105	16/03/2021
270	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	8100546143081000	8100546143081000	BPG 089 MTSN NIBONG ACUT	BANK SYARIAH INDONESIA	50	200	Virtual	Jakarta IV	DKI JAKARTA	S-2885/WPB.12/KP.04/2021	22/07/2021
271	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	98902403996671000	98902403996671000	BPG 026 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	BNI	50	200	Virtual	Semarang I	JAWA TENGAH	000450	15/06/2021
272	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	652736813821000	652736813821000	BPG 102 MAN BULIK KAB LAMANDAU	BRI	50	200	Virtual	Pangkalan Bun	KALIMANTAN TENGAH	S-896/WPB.12/KP.04/2021	05/03/2021
273	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841831000	9890244841831000	BPG 049 BAPPEDA PROV SULUT	BNI	50	200	Virtual	Manado	SULAWESI UTARA	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
274	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	652594173941000	652594173941000	BPG 029 KEMENAG KAB. PURBALINGGA	BRI	50	200	Virtual	Palu	SULAWESI TENGAH	S-6415/WPB.12/KP.04/2020	03/12/2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

NERACA PERCOBAAN
AKRUAL

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:08 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	231,287,503	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	34,773,780	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2,086,080,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,475,797	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	450,000,000	0
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	149,541,500	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	37,277,412	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	16,531,689,765	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	13,973,717	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	492,890,339	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	18,450,777,467	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	6,242,681,574
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	69,868
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	492,890,339
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	17,853,092,676
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,530,248,276	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	335,222,726	0
0.0	117114	Suku Cadang	54,539,938	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	24,227,675,966	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	2,773,659,026	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	11,595,186,678	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446,822,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	222,194,366,315	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	6,753,780,000	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	67,670,350	0
0.0	117131	Bahan Baku	256,571,423	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	17,641,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	4,072,779,747	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	11,995,626,099,493	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,319,292,929,878	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,789,720,379,051	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	65,413,929,496	0
0.0	134112	Irigasi	46,411,107,768	0
0.0	134113	Jaringan	165,264,278,624	0
0.0	134212	Irigasi Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	89,153,162,621	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	52,026,867,971	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:08 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	61,214,356,904	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,960,511,708,233
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	330,630,295,794
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	37,019,376,292
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	18,955,029,858
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	57,974,702,510
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	94,523,461,278
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	598,938,232	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan	0	2,994,691
0.0	162151	Software	756,313,203,584	0
0.0	162161	Lisensi	2,472,651,811	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	4,116,484,400	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4,044,744,850	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	166111	Aset Lain-lain	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	81,856,928,810	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	36,131,374,039	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	77,154,818,370
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	716,998,320,312
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	377,064,148
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	29,241,582,614
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	28,258,634,705
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	37,199,540,834
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	49,194
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,602,958,215
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	6,916,044,422
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	266,061,283
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,902,149,826,596
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	128,414,847,075	0
0.0	313211	Transfer Keluar	459,284,671,877	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	474,259,398,706
0.0	391111	Ekuitas	0	15,409,886,743,539
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	3,426,500
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	729,303,289	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1,922,250,018	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1,956,603,951
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	152,761,777,569
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	86,740,401	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	7,502,438,457	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222,555,998

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:08 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,454,395,544
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,965,789,166
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	24,812,500
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	289,871,499
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	6,860,686,701
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	520,412,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	88,058,715,000
3.1	425421	Pengembalian Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	254,158,000	0
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	286,500,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	523,186
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	1,222,676,464
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	160,765,539
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	62,756,907
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	13,073,323,031
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	492,166,805
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	380,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,937,130
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,683,800
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	295,330,368,169	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	56,042,760
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	4,906,451	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	46,235
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	16,004,807,948	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,475,040
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	4,288,012,578	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	260,554
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	15,784,775,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	88,630,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	10,787,970,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	4,955,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,380,298,874	0
3.1	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	178,445
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	13,863,505,440	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	1,231,140
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	27,021,361,150	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	278,800
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	49,425,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	180,135,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,689,105,123	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	60,466,768
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	8,496,241,565	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1,607,975,400	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:08 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	104,000,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,557,557,200	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	3,845,992,750	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	6,079,150
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	346,795,061,586	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	12,726,669
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	157,029,038,834	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	12,893,678
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	45,789,786,393	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,741,107,746	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	738,495,655	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19,168,610,700	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	93,727,900
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	34,586,220,525	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	37,740,034
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	10,663,244,785	0
3.0	521211	Beban Bahan	86,864,386,669	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	29,546,912
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	24,041,137,098	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	37,254,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	143,549,082,687	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	13,157,400
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	7,483,465,712	0
3.1	521241	Pengembalian Beban Barang Non Operasional -	0	26,291,726
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	28,734,250,897	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	501,477,663	0
3.1	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	4,208,220
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,253,356,632	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,192,335,920	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	1,000,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	136,767,160,931	0
3.0	522141	Beban Sewa	65,639,795,098	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	54,023,688,227	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	101,147,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	460,604,906,151	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	1,992,396,727
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23,893,703,696	0
3.1	522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,839,000
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62,964,443,585	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	284,877,035
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	1,900,800	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:08 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,307,395,880	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,962,313,599	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	11,661,600
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,997,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4,326,568,680	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	7,121,371,600	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	212,734,083,742	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	2,548,487,046
3.0	524112	Beban Perjalanan Tetap	2,320,270,996	0
3.1	524112	Pengembalian Beban Perjalanan Tetap	0	730,000
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,889,268,682	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,486,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,492,307,549	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	31,350,335
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38,541,670,403	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	420,958,976
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	533,808,055	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	148,303,502
3.0	526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	300,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	140,643,892,537	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78,074,172,626	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	6,937,020,541	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	4,756,139,984	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,548,361,937	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	148,966,311	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	22,324,623,030	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	246,527,398	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	96,525,923	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	249,919,314	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,174,211,773	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,555,935,870	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	303,400,740	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	4,438,754,250	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	1,769,286,328	0
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk	4,544,681,360	0
3.0	593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan	370,068,000	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	44,135,355,147	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	237,576,813,186	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	2,481,713,773	0
3.0	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	40,863,150	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	12,848,906,206	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	120,287,300	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:08 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	**KODE PERKIRAAN**	**NAMA PERKIRAAN**	**DEBET**	**KREDIT**
1	2	3	4	5
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	2,545,918,500	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	2,975,941	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	2,974,066	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,227,044,247	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	1,280,065,156	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	282,199,701	0
JUMLAH			**23,484,971,533,493**	**23,484,971,533,493**

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:07 AM

lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	25,524,117,805	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	58,066,802,075	0
2.0	425129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	151,380,000	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	610,570,000	0
2.0	425313	Estimasi Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan Yang	20,413,000	0
2.0	425411	Estimasi Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan Yang	252,500,000	0
2.0	425412	Estimasi Pendapatan Biaya Pendidikan Yang Dialokasikan	15,471,500,000	0
2.0	425419	Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya Yang Dialokasikan	787,675,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	53,054,007,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	295,565,813,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	7,587,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	16,069,966,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	4,317,469,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	15,843,072,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	10,870,394,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	1,405,859,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	13,949,302,000
2.0	511127	Allotment Belanja Tunj. Kemahalan PNS	0	0
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	26,410,122,000
2.0	511135	Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil	0	50,300,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	180,135,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	11,537,391,000
2.0	511153	Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	8,503,356,000
2.0	511154	Allotment Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	1,608,084,000
2.0	511194	Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang	0	105,000,000
2.0	511332	Allotment Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	1,557,558,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	4,056,625,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	341,140,208,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	157,343,911,000
2.0	521112	Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	46,079,087,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	3,135,653,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	827,592,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	19,455,782,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	34,709,928,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	10,893,878,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	88,011,327,800
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	24,331,277,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	144,068,834,000
2.0	521231	Allotment Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	0
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	8,257,426,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	16,051,636,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai	0	850,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:07 AM

lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	432,150,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	13,784,049,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	29,823,502,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	537,795,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	4,265,002,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,164,971,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	1,000,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	139,864,143,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	65,961,903,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	53,923,096,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	498,301,619,500
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	24,305,936,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	66,524,197,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	0	782,225,000
2.0	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	0	1,901,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	2,315,820,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	36,048,947,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	742,230,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	32,997,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	4,327,422,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	7,123,027,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	214,887,569,200
2.0	524112	Allotment Belanja Perjalanan Tetap	0	2,320,959,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	8,146,257,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	67,994,548,500
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	0
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	42,257,250,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	533,977,000
2.0	526112	Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	0	515,200,000
2.0	526123	Allotment Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan	0	0
2.0	526212	Allotment Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan	0	0
2.0	526223	Allotment Belanja Gedung dan Bangunan Tugas	0	2,695,002,000
2.0	526311	Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan	0	168,856,115,000
2.0	526312	Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang	0	0
2.0	526321	Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk	0	60,000,000
2.0	526322	Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk	0	1,006,605,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	90,993,097,000
2.0	532112	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	388,725,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	2,410,778,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	54,634,479,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	4,827,169,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:07 AM

lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	534141	Allotment Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	15,124,359,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	296,124,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222,555,998
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,454,395,544
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,706,910,469
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	24,812,500
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	292,596,499
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	14,060,542,123
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	513,612,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	88,058,715,000
3.1	425421	Pengembalian Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	254,158,000	0
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	286,500,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	38,570
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	32,674,998
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,660,765,539
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	142,182,781
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	19,663,304,119
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	547,081,805
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	380,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,937,130
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	295,280,874,540	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	56,042,760
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,906,139	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	46,235
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	16,004,507,864	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,475,040
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,287,959,218	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	260,554
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,800,285,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	88,630,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,782,470,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	4,955,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,380,838,281	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	178,445
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	13,863,433,020	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,231,140
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	25,966,813,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	278,800
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	49,425,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	180,135,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,500,725,000	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:07 AM

lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	60,466,768
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,496,241,565	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1,607,975,400	0
3.0	511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	104,000,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,557,557,200	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	3,845,992,750	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	6,079,150
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	339,583,055,964	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	12,726,669
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	157,036,931,334	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	12,893,678
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	45,789,786,393	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,103,718,891	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	738,495,655	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	19,168,610,700	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	93,727,900
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	34,586,220,525	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	37,740,034
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	10,824,002,785	0
3.0	521211	Belanja Bahan	86,884,894,169	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	29,546,912
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	24,020,437,098	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	37,254,500
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	143,922,617,687	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	13,157,400
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	7,483,465,712	0
3.1	521241	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional -	0	26,291,726
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,040,219,776	0
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	810,000	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	432,009,600	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	13,762,676,632	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	29,506,242,545	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	520,287,596	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	4,208,220
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,239,524,551	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,157,778,995	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	138,853,798,071	0
3.0	522141	Belanja Sewa	65,743,345,098	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	52,523,044,877	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	101,147,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 23/04/2022 1:07 AM

lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	496,493,474,336	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	1,992,396,727
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23,744,303,696	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-	0	3,839,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66,727,450,292	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	284,877,035
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	781,012,886	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	1,900,800	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,307,395,880	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,939,307,099	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	11,661,600
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	735,855,137	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,997,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,326,568,680	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	7,121,371,600	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	212,932,568,066	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	2,548,487,046
3.0	524112	Belanja Perjalanan Tetap	2,320,270,996	0
3.1	524112	Pengembalian Belanja Perjalanan Tetap	0	730,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,889,268,682	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,486,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,589,607,549	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	31,350,335
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38,562,980,403	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	420,958,976
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	533,808,055	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	148,303,502
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	505,348,000	0
3.0	526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk	2,547,714,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	168,793,857,186	0
3.0	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan	1,005,295,895	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,908,588,376	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9,997,900
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	388,565,750	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,407,985,085	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54,618,106,714	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,818,095,740	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	15,108,965,041	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	296,100,672	0
JUMLAH			**3,069,269,000,127**	**3,069,269,000,127**

LAPORAN REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/22 1:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	287,559,437,000	295,565,813,000	295,280,874,540	56,042,760	295,224,831,780	99.9	340,981,220
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,663,000	7,587,000	4,906,139	46,235	4,859,904	64.67	2,727,096
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	16,956,910,000	16,069,966,000	16,004,507,864	1,475,040	16,003,032,824	99.59	66,933,176
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,429,631,000	4,317,469,000	4,287,959,218	260,554	4,287,698,664	99.32	29,770,336
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,974,441,000	15,843,072,000	15,800,285,000	88,630,000	15,711,655,000	99.73	131,417,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,324,948,000	10,870,394,000	10,782,470,000	4,955,000	10,777,515,000	99.19	92,879,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,153,425,000	1,405,859,000	1,380,838,281	178,445	1,380,659,836	98.22	25,199,164
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	12,816,607,000	13,949,302,000	13,863,433,020	1,231,140	13,862,201,880	99.38	87,100,120
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	193,089,000	0	0	0	0		0
511129	Belanja Uang Makan PNS	40,090,712,000	26,410,122,000	25,966,813,000	278,800	25,966,534,200	98.32	443,587,800
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	55,575,000	50,300,000	49,425,000	0	49,425,000	98.26	875,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	189,600,000	180,135,000	180,135,000	0	180,135,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,030,446,000	11,537,391,000	11,500,725,000	60,466,768	11,440,258,232	99.68	97,132,768
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	6,409,752,000	8,503,356,000	8,496,241,565	0	8,496,241,565	99.92	7,114,435
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,698,080,000	1,608,084,000	1,607,975,400	0	1,607,975,400	99.99	108,600
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	99,400,000	105,000,000	104,000,000	0	104,000,000	99.05	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	408,000,716,000	406,423,850,000	405,310,589,027	213,564,742	405,097,024,285	99.73	1,326,825,715
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,583,790,000	1,557,558,000	1,557,557,200	0	1,557,557,200	100	800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,583,790,000	1,557,558,000	1,557,557,200	0	1,557,557,200	100	800
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	5,407,408,000	4,056,625,000	3,845,992,750	6,079,150	3,839,913,600	94.81	216,711,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	5,407,408,000	4,056,625,000	3,845,992,750	6,079,150	3,839,913,600	94.81	216,711,400
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	399,943,930,000	341,140,208,000	339,583,055,964	12,726,669	339,570,329,295	99.54	1,569,878,705
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	399,943,930,000	341,140,208,000	339,583,055,964	12,726,669	339,570,329,295	99.54	1,569,878,705
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	814,935,844,000	753,178,241,000	750,297,194,941	232,370,561	750,064,824,380	99.62	3,113,416,620
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	152,013,447,000	157,343,911,000	157,036,931,334	12,893,678	157,024,037,656	99.8	319,873,344
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	62,241,232,000	46,079,087,000	45,789,786,393	0	45,789,786,393	99.37	289,300,607
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,215,390,000	3,135,653,000	3,103,718,891	0	3,103,718,891	98.98	31,934,109
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	976,120,000	827,592,000	738,495,655	0	738,495,655	89.23	89,096,345

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/22 1:12 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	28,435,763,000	19,455,782,000	19,168,610,700	93,727,900	19,074,882,800	98.52	380,899,200
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	43,427,932,000	34,709,928,000	34,586,220,525	37,740,034	34,548,480,491	99.64	161,447,509
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,961,073,000	10,893,878,000	10,824,002,785	0	10,824,002,785	99.36	69,875,215
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	294,270,957,000	272,445,831,000	271,247,766,283	144,361,612	271,103,404,671	99.56	1,342,426,329
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	118,398,130,000	88,011,327,800	86,884,894,169	29,546,912	86,855,347,257	98.72	1,155,980,543
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	31,073,606,000	24,331,277,000	24,020,437,098	37,254,500	23,983,182,598	98.72	348,094,402
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	155,334,328,000	144,068,834,000	143,922,617,687	13,157,400	143,909,460,287	99.9	159,373,713
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	196,000,000	0	0	0	0		0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	5,855,961,000	8,257,426,000	7,483,465,712	26,291,726	7,457,173,986	90.63	800,252,014
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	310,858,025,000	264,668,864,800	262,311,414,666	106,250,538	262,205,164,128	99.11	2,463,700,672
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,541,991,000	16,051,636,000	16,040,219,776	0	16,040,219,776	99.93	11,416,224
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	2,160,000	850,000	810,000	0	810,000	95.29	40,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	206,000,000	432,150,000	432,009,600	0	432,009,600	99.97	140,400
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,693,132,000	13,784,049,000	13,762,676,632	0	13,762,676,632	99.84	21,372,368
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	24,443,283,000	30,268,685,000	30,235,716,008	0	30,235,716,008	99.89	32,968,992
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	35,853,933,000	29,823,502,000	29,506,242,545	0	29,506,242,545	98.94	317,259,455
522112	Belanja Langganan Telepon	1,939,334,000	537,795,000	520,287,596	4,208,220	516,079,376	96.74	21,715,624
522113	Belanja Langganan Air	5,495,248,000	4,265,002,000	4,239,524,551	0	4,239,524,551	99.4	25,477,449
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,155,050,000	1,164,971,000	1,157,778,995	0	1,157,778,995	99.38	7,192,005
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	92,763,993,000	139,864,143,000	138,853,798,071	0	138,853,798,071	99.28	1,010,344,929
522141	Belanja Sewa	54,035,566,000	65,961,903,000	65,743,345,098	0	65,743,345,098	99.67	218,557,902
522151	Belanja Jasa Profesi	69,181,017,000	53,923,096,000	52,523,044,877	101,147,000	52,421,897,877	97.4	1,501,198,123
522191	Belanja Jasa Lainnya	617,544,414,000	498,301,619,500	496,493,474,336	1,992,396,727	494,501,077,609	99.64	3,800,541,891
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,864,182,000	24,305,936,000	23,744,303,696	3,839,000	23,740,464,696	97.69	565,471,304
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	881,837,737,000	818,148,967,500	812,782,799,765	2,101,590,947	810,681,208,818	99.34	7,467,758,682
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55,726,177,000	66,524,197,000	66,727,450,292	284,877,035	66,442,573,257	100.31	81,623,743
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	541,625,000	782,225,000	781,012,886	0	781,012,886	99.85	1,212,114
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	1,901,000	1,900,800	0	1,900,800	99.99	200
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,605,756,000	2,315,820,000	2,307,395,880	0	2,307,395,880	99.64	8,424,120
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,959,259,000	36,048,947,000	35,939,307,099	11,661,600	35,927,645,499	99.7	121,301,501

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/22 1:12 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	467,950,000	742,230,000	735,855,137	0	735,855,137	99.14	6,374,863
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,000,000	32,997,000	32,997,000	0	32,997,000	100	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2,416,974,000	4,327,422,000	4,326,568,680	0	4,326,568,680	99.98	853,320
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	8,763,630,000	7,123,027,000	7,121,371,600	0	7,121,371,600	99.98	1,655,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	107,490,371,000	117,898,766,000	117,973,859,374	296,538,635	117,677,320,739	100.06	221,445,261
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	243,279,750,000	214,887,569,200	212,932,568,066	2,548,487,046	210,384,081,020	99.09	4,503,488,180
524112	Belanja Perjalanan Tetap	4,240,403,000	2,320,959,000	2,320,270,996	730,000	2,319,540,996	99.97	1,418,004
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,229,482,000	8,146,257,000	7,889,268,682	1,486,000	7,887,782,682	96.85	258,474,318
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	129,170,128,000	67,994,548,500	66,589,607,549	31,350,335	66,558,257,214	97.93	1,436,291,286
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	406,800,000	0	0	0	0		0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54,059,295,000	42,257,250,000	38,562,980,403	420,958,976	38,142,021,427	91.26	4,115,228,573
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	444,385,858,000	335,606,583,700	328,294,695,696	3,003,012,357	325,291,683,339	97.82	10,314,900,361
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,636,617,000	533,977,000	533,808,055	148,303,502	385,504,553	99.97	148,472,447
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,636,617,000	533,977,000	533,808,055	148,303,502	385,504,553	99.97	148,472,447
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	0	515,200,000	505,348,000	0	505,348,000	98.09	9,852,000
526123	Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	5,000,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	5,000,000,000	515,200,000	505,348,000	0	505,348,000	98.09	9,852,000
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan							
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk	1,600,000,000	0	0	0	0		0
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk	2,695,002,000	2,695,002,000	2,547,714,000	0	2,547,714,000	94.53	147,288,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	4,295,002,000	2,695,002,000	2,547,714,000	0	2,547,714,000	94.53	147,288,000
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	110,745,700,000	168,856,115,000	168,793,857,186	0	168,793,857,186	99.96	62,257,814
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	880,000,000	0	0	0	0		0
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan	0	1,006,605,000	1,005,295,895	0	1,005,295,895	99.87	1,309,105
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	111,685,700,000	169,922,720,000	169,799,153,081	0	169,799,153,081	99.93	123,566,919
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,185,903,550,000	2,012,704,597,000	1,996,232,274,928	5,800,057,591	1,990,432,217,337	99.18	22,272,379,663
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97,506,220,000	90,993,097,000	90,908,588,376	9,997,900	90,898,590,476	99.91	94,506,524

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/22 1:12 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	200,000,000	0	0	0	0		0
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	0	388,725,000	388,565,750	0	388,565,750	99.96	159,250
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	4,828,890,000	2,410,778,000	2,407,985,085	0	2,407,985,085	99.88	2,792,915
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	102,535,110,000	93,792,600,000	93,705,139,211	9,997,900	93,695,141,311	99.91	97,458,689
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,376,636,000	54,634,479,000	54,618,106,714	0	54,618,106,714	99.97	16,372,286
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,481,512,000	4,827,169,000	4,818,095,740	0	4,818,095,740	99.81	9,073,260
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	76,858,148,000	59,461,648,000	59,436,202,454	0	59,436,202,454	99.96	25,445,546
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	198,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	198,000,000	0	0	0	0		0
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	30,144,438,000	15,124,359,000	15,108,965,041	0	15,108,965,041	99.9	15,393,959
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	296,124,000	296,100,672	0	296,100,672	99.99	23,328
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	30,144,438,000	15,420,483,000	15,405,065,713	0	15,405,065,713	99.9	15,417,287
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	209,735,696,000	168,674,731,000	168,546,407,378	9,997,900	168,536,409,478	99.92	138,321,522
	JUMLAH BELANJA	3,210,575,090,000	2,934,557,569,000	2,915,075,877,247	6,042,426,052	2,909,033,451,195	99.34	25,524,117,805

LAPORAN REALISASI BELANJA MENURUT SATUAN KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA							
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	433,868,112,000	367,132,385,000	365,114,003,093	661,006,606	364,452,996,487	99.27	2,679,388,513
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	433,868,112,000	367,132,385,000	365,114,003,093	661,006,606	364,452,996,487	99.45	2,679,388,513
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT							
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	365,810,012,000	331,993,151,000	331,114,102,688	148,096,666	330,966,006,022	99.69	1,027,144,978
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	365,810,012,000	331,993,151,000	331,114,102,688	148,096,666	330,966,006,022	99.74	1,027,144,978
010010800K	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT							
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	30,802,008,000	29,698,877,000	29,668,877,149	32,440,620	29,636,436,529	99.79	62,440,471
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	30,802,008,000	29,698,877,000	29,668,877,149	32,440,620	29,636,436,529	99.9	62,440,471
010011300K	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT							
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	41,256,721,000	36,368,488,000	36,359,033,547	43,637,331	36,315,396,216	99.85	53,091,784
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	41,256,721,000	36,368,488,000	36,359,033,547	43,637,331	36,315,396,216	99.97	53,091,784
010011700K	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA							
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	29,911,815,000	29,547,217,000	29,680,053,702	273,666,105	29,406,387,597	99.52	140,829,403
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	29,911,815,000	29,547,217,000	29,680,053,702	273,666,105	29,406,387,597	100.45	140,829,403
010011900K	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	31,336,573,000	30,530,743,000	30,528,225,846	286	30,528,225,560	99.99	2,517,440
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	31,336,573,000	30,530,743,000	30,528,225,846	286	30,528,225,560	99.99	2,517,440
010012300K	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT							
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	29,276,260,000	28,462,980,000	28,276,911,996	50,711,477	28,226,200,519	99.17	236,779,481
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	29,276,260,000	28,462,980,000	28,276,911,996	50,711,477	28,226,200,519	99.35	236,779,481
010012500K	BA(010) ES1(01) PAPUA							
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	31,136,788,000	29,176,658,000	29,167,735,080	20,456,260	29,147,278,820	99.9	29,379,180
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) PAPUA	31,136,788,000	29,176,658,000	29,167,735,080	20,456,260	29,147,278,820	99.97	29,379,180
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	49,207,653,000	44,734,519,000	44,697,270,326	412,924	44,696,857,402	99.92	37,661,598
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	17,303,307,000	26,682,541,000	26,417,358,052	0	26,417,358,052	99.01	265,182,948
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	66,510,960,000	71,417,060,000	71,114,628,378	412,924	71,114,215,454	99.58	302,844,546
	JUMLAH BELANJA 01	1,059,909,249,000	954,327,559,000	951,023,571,479	1,230,428,275	949,793,143,204	99.65	4534415796
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
010020100KP	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA							
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	76,256,361,000	68,193,264,000	68,131,698,504	58,335,250	68,073,363,254	99.82	119,900,746
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	76,256,361,000	68,193,264,000	68,131,698,504	58,335,250	68,073,363,254	99.91	119,900,746

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA 02	76,256,361,000	68,193,264,000	68,131,698,504	58,335,250	68,073,363,254	99.91	119900746
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA							
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	223,313,972,000	212,623,343,000	212,553,949,893	12,622,482	212,541,327,411	99.96	82,015,589
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	223,313,972,000	212,623,343,000	212,553,949,893	12,622,482	212,541,327,411	99.97	82,015,589
	JUMLAH BELANJA 03	223,313,972,000	212,623,343,000	212,553,949,893	12,622,482	212,541,327,411	99.97	82015589
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1,618,252,000	767,675,000	762,298,295	0	762,298,295	99.3	5,376,705
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	1,618,252,000	767,675,000	762,298,295	0	762,298,295	99.3	5,376,705
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA							
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	134,702,903,000	131,429,328,000	130,606,551,189	884,406,971	129,722,144,218	98.7	1,707,183,782
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	134,702,903,000	131,429,328,000	130,606,551,189	884,406,971	129,722,144,218	99.37	1,707,183,782
010040400	BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA							
049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	1,304,996,000	315,202,000	313,415,078	0	313,415,078	99.43	1,786,922
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA	1,304,996,000	315,202,000	313,415,078	0	313,415,078	99.43	1,786,922
010040700	BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA							
079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	1,887,934,000	308,239,000	183,639,288	0	183,639,288	59.58	124,599,712
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA	1,887,934,000	308,239,000	183,639,288	0	183,639,288	59.58	124,599,712
010040800	BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT							
089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1,638,076,000	170,000,000	155,940,625	0	155,940,625	91.73	14,059,375
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT	1,638,076,000	170,000,000	155,940,625	0	155,940,625	91.73	14,059,375
010040900D	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU							
099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1,472,218,000	536,820,000	534,732,910	0	534,732,910	99.61	2,087,090
433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	520,000,000	238,273,000	238,011,600	0	238,011,600	99.89	261,400
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1,992,218,000	775,093,000	772,744,510	0	772,744,510	99.7	2,348,490
010041400D	BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi							
149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1,700,377,000	543,578,000	487,847,400	0	487,847,400	89.75	55,730,600
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi	1,700,377,000	543,578,000	487,847,400	0	487,847,400	89.75	55,730,600
010041900	BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN							
199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	2,003,989,000	484,598,000	462,890,067	0	462,890,067	95.52	21,707,933
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN	2,003,989,000	484,598,000	462,890,067	0	462,890,067	95.52	21,707,933
010042000	BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:13 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1,580,571,000	279,310,000	249,059,400	0	249,059,400	89.17	30,250,600
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	1,580,571,000	279,310,000	249,059,400	0	249,059,400	89.17	30,250,600
010042100	BA(010) ES1(04) MALUKU							
219062	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1,911,502,000	621,052,000	602,880,581	2,434,548	600,446,033	96.68	20,605,967
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) MALUKU	1,911,502,000	621,052,000	602,880,581	2,434,548	600,446,033	97.07	20,605,967
010042600	BA(010) ES1(04) BENGKULU							
269093	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	1,486,622,000	492,110,000	387,203,100	39,490,000	347,713,100	70.66	144,396,900
433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	500,000,000	124,000,000	123,672,818	0	123,672,818	99.74	327,182
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BENGKULU	1,986,622,000	616,110,000	510,875,918	39,490,000	471,385,918	82.92	144,724,082
010042900	BA(010) ES1(04) BANTEN							
299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	1,351,013,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANTEN	1,351,013,000	0	0	0	0		0
010043000	BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG							
309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	1,529,659,000	781,372,000	767,380,176	0	767,380,176	98.21	13,991,824
433343	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	500,000,000	43,300,000	43,300,000	0	43,300,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG	2,029,659,000	824,672,000	810,680,176	0	810,680,176	98.3	13,991,824
010043400D	BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT							
340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1,582,822,000	584,634,000	579,326,427	1,807,863	577,518,564	98.78	7,115,436
	JUMLAH BELANJA BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT	1,582,822,000	584,634,000	579,326,427	1,807,863	577,518,564	99.09	7,115,436
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	250,000,000	216,162,000	194,530,086	0	194,530,086	89.99	21,631,914
029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	1,815,345,000	0	0	0	0	0	0
039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1,567,739,000	365,014,000	250,334,950	0	250,334,950	68.58	114,679,050
059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1,590,231,000	0	0	0	0	0	0
069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	1,784,385,000	319,685,000	292,258,091	0	292,258,091	91.42	27,426,909
109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1,458,289,000	459,141,000	443,788,000	0	443,788,000	96.66	15,353,000
119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,635,508,000	363,311,000	362,489,870	0	362,489,870	99.77	821,130
129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1,349,423,000	568,659,000	526,546,772	0	526,546,772	92.59	42,112,228
129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	500,000,000	0	0	0	0	0	0
139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1,517,498,000	650,414,000	588,428,279	0	588,428,279	90.47	61,985,721
149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	520,000,000	165,089,000	164,226,667	0	164,226,667	99.48	862,333
159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1,558,744,000	531,230,000	435,129,458	0	435,129,458	81.91	96,100,542

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
160552	BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	1,950,000,000	1,950,000,000	1,946,993,100	0	1,946,993,100	99.85	3,006,900
169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1,582,009,000	586,066,000	518,359,986	0	518,359,986	88.45	67,706,014
179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	500,000,000	140,000,000	136,291,701	0	136,291,701	97.35	3,708,299
179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1,636,765,000	906,170,000	899,007,369	0	899,007,369	99.21	7,162,631
189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,780,589,000	721,740,000	714,608,000	0	714,608,000	99.01	7,132,000
209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	520,000,000	199,800,000	198,184,000	0	198,184,000	99.19	1,616,000
229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1,696,844,000	676,439,000	670,407,800	0	670,407,800	99.11	6,031,200
239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	762,235,000	761,943,108	0	761,943,108	99.96	291,892
249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1,738,323,000	288,814,000	279,875,500	0	279,875,500	96.91	8,938,500
249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	310,000,000	241,475,000	241,427,300	0	241,427,300	99.98	47,700
250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	1,648,967,000	0	0	0	0	0	0
259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	570,000,000	176,000,000	128,458,000	0	128,458,000	72.99	47,542,000
289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	530,000,000	194,800,000	173,150,000	0	173,150,000	88.89	21,650,000
289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1,712,472,000	720,060,000	669,779,914	0	669,779,914	93.02	50,280,086
329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,531,287,000	551,875,000	541,845,546	0	541,845,546	98.18	10,029,454
339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	1,677,232,000	0	0	0	0	0	0
349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	500,000,000	241,632,000	235,332,000	0	235,332,000	97.39	6,300,000
359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	500,000,000	189,540,000	175,398,600	0	175,398,600	92.54	14,141,400
417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,497,748,000	527,192,000	524,647,475	1,605,000	523,042,475	99.21	4,149,525
419079	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	900,000,000	900,000,000	751,466,285	0	751,466,285	83.5	148,533,715
433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	500,000,000	212,000,000	209,376,323	0	209,376,323	98.76	2,623,677
433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	500,000,000	166,000,000	155,964,831	0	155,964,831	93.95	10,035,169
433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	500,000,000	172,138,000	171,294,075	0	171,294,075	99.51	843,925
433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	500,000,000	203,448,000	202,663,940	0	202,663,940	99.61	784,060
433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	500,000,000	194,664,000	193,481,000	0	193,481,000	99.39	1,183,000
433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	520,000,000	210,000,000	207,651,000	0	207,651,000	98.88	2,349,000
433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	520,000,000	200,204,000	194,066,800	0	194,066,800	96.93	6,137,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:13 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
433349	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	500,000,000	229,946,000	229,913,000	0	229,913,000	99.99	33,000
433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	500,000,000	113,307,000	111,398,700	0	111,398,700	98.32	1,908,300
433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	520,000,000	159,477,000	158,724,100	0	158,724,100	99.53	752,900
433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	500,000,000	136,000,000	135,425,574	0	135,425,574	99.58	574,426
433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	520,000,000	216,335,000	203,442,400	0	203,442,400	94.04	12,892,600
484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	500,000,000	69,000,000	65,978,220	0	65,978,220	95.62	3,021,780
484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	399,000,000	230,356,000	224,094,873	0	224,094,873	97.28	6,261,127
484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	700,000,000	168,173,000	122,757,000	0	122,757,000	72.99	45,416,000
484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	520,000,000	0	0	0	0	0	0
484106	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA	410,000,000	0	0	0	0	0	0
484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	830,000,000	194,503,000	191,543,088	0	191,543,088	98.48	2,959,912
484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	337,000,000	176,008,000	162,495,200	0	162,495,200	92.32	13,512,800
484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	518,000,000	163,984,000	147,840,840	0	147,840,840	90.16	16,143,160
484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	338,000,000	244,490,000	235,388,534	0	235,388,534	96.28	9,101,466
484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	474,000,000	137,000,000	133,684,370	0	133,684,370	97.58	3,315,630
484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	357,000,000	203,259,000	198,060,000	0	198,060,000	97.44	5,199,000
484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	500,000,000	166,332,000	165,815,041	0	165,815,041	99.69	516,959
484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	580,000,000	193,320,000	191,653,053	1,212,412	190,440,641	98.51	2,879,359
484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	362,000,000	178,833,000	164,692,400	0	164,692,400	92.09	14,140,600
484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	590,000,000	189,791,000	121,629,802	0	121,629,802	64.09	68,161,198
484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	330,000,000	131,058,000	113,213,736	0	113,213,736	86.38	17,844,264
484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	528,000,000	124,103,000	110,594,850	0	110,594,850	89.12	13,508,150
484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	374,000,000	195,401,000	191,252,600	0	191,252,600	97.88	4,148,400
484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	482,000,000	129,389,000	116,363,700	0	116,363,700	89.93	13,025,300
484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	360,000,000	135,001,000	127,636,783	0	127,636,783	94.55	7,364,217
484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	430,000,000	162,532,000	162,458,900	0	162,458,900	99.96	73,100
484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	328,000,000	0	0	0	0	0	0
484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	410,000,000	0	0	0	0	0	0
484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	530,000,000	56,274,000	55,491,755	0	55,491,755	98.61	782,245
484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	379,000,000	161,029,000	155,698,256	0	155,698,256	96.69	5,330,744

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:13 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	740,000,000	0	0	0	0	0	0
484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	550,000,000	128,303,000	127,104,469	0	127,104,469	99.07	1,198,531
484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	381,000,000	240,454,000	194,480,971	0	194,480,971	80.88	45,973,029
484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	790,000,000	182,222,000	182,220,800	0	182,220,800	100	1,200
484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DI YOGYAKARTA	500,000,000	164,345,000	159,201,600	0	159,201,600	96.87	5,143,400
484150	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	357,000,000	126,894,000	120,616,000	0	120,616,000	95.05	6,278,000
484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	350,000,000	182,101,000	141,786,639	0	141,786,639	77.86	40,314,361
484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	550,000,000	140,000,000	114,798,580	0	114,798,580	82	25,201,420
484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	448,000,000	0	0	0	0	0	0
484155	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	446,000,000	0	0	0	0	0	0
484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	423,000,000	196,781,000	143,884,000	0	143,884,000	73.12	52,897,000
484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	520,000,000	201,194,000	193,287,000	0	193,287,000	96.07	7,907,000
484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	370,000,000	193,208,000	192,779,800	0	192,779,800	99.78	428,200
484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	420,000,000	192,028,000	190,635,977	0	190,635,977	99.28	1,392,023
484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	425,000,000	237,766,000	237,765,400	0	237,765,400	100	600
484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	627,000,000	0	0	0	0	0	0
484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	349,000,000	130,684,000	121,401,320	0	121,401,320	92.9	9,282,680
484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	480,000,000	138,096,000	109,728,800	1,090,676	108,638,124	78.67	29,457,876
484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	406,000,000	191,424,000	173,651,212	0	173,651,212	90.72	17,772,788
484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	576,000,000	213,670,000	203,197,287	0	203,197,287	95.1	10,472,713
484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	520,000,000	224,055,000	220,660,000	0	220,660,000	98.48	3,395,000
484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	369,000,000	196,923,000	194,721,511	0	194,721,511	98.88	2,201,489
484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	565,000,000	0	0	0	0	0	0
484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	426,000,000	321,915,000	302,050,000	0	302,050,000	93.83	19,865,000
484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	500,000,000	188,935,000	158,401,020	1,749,374	156,651,646	82.91	32,283,354
484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	367,000,000	176,227,000	174,731,390	0	174,731,390	99.15	1,495,610
484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	330,000,000	129,281,000	121,578,663	0	121,578,663	94.04	7,702,337
484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	392,000,000	181,434,000	176,777,098	0	176,777,098	97.43	4,656,902
484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	600,000,000	220,265,000	215,639,873	0	215,639,873	97.9	4,625,127
484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	447,000,000	238,488,000	237,332,506	0	237,332,506	99.52	1,155,494
484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	420,000,000	265,517,000	261,695,871	0	261,695,871	98.56	3,821,129
484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	387,000,000	201,371,000	198,961,600	0	198,961,600	98.8	2,409,400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:13 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	450,000,000	139,180,000	97,280,000	0	97,280,000	69.9	41,900,000
484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	480,000,000	154,282,000	152,465,626	0	152,465,626	98.82	1,816,374
484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	615,000,000	184,054,000	184,054,000	0	184,054,000	100	0
484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	420,000,000	247,628,000	237,992,100	0	237,992,100	96.11	9,635,900
484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	612,000,000	182,329,000	179,884,361	0	179,884,361	98.66	2,444,639
484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	419,700,000	174,731,000	171,481,000	0	171,481,000	98.14	3,250,000
484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	536,000,000	146,996,000	129,877,700	0	129,877,700	88.35	17,118,300
484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	420,000,000	0	0	0	0	0	0
484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	628,000,000	163,755,000	154,038,867	0	154,038,867	94.07	9,716,133
484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	408,000,000	229,082,000	188,991,181	0	188,991,181	82.5	40,090,819
484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	510,000,000	154,503,000	101,558,000	0	101,558,000	65.73	52,945,000
484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	440,000,000	0	0	0	0	0	0
484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	413,000,000	0	0	0	0	0	0
484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	570,000,000	0	0	0	0	0	0
484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	438,000,000	0	0	0	0	0	0
484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	330,000,000	35,283,000	28,962,900	0	28,962,900	82.09	6,320,100
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	78,696,098,000	26,251,302,000	24,652,327,723	5,657,462	24,646,670,261	93.91	1,604,631,739
	JUMLAH BELANJA 04	235,987,032,000	163,970,793,000	161,150,476,677	933,796,844	160,216,679,833	98.28	3754113167
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA							
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	171,937,410,000	151,940,241,000	144,139,440,503	673,129,793	143,466,310,710	94.42	8,473,930,290
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	171,937,410,000	151,940,241,000	144,139,440,503	673,129,793	143,466,310,710	94.87	8,473,930,290
010050400K	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA							
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	13,733,908,000	12,246,479,000	12,168,543,111	3,568,262	12,164,974,849	99.33	81,504,151
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	13,733,908,000	12,246,479,000	12,168,543,111	3,568,262	12,164,974,849	99.36	81,504,151
010050500K	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR							
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	11,879,951,000	10,243,020,000	10,001,894,900	6,655,918	9,995,238,982	97.58	247,781,018
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	11,879,951,000	10,243,020,000	10,001,894,900	6,655,918	9,995,238,982	97.65	247,781,018
010051200K	BA(010) ES1(05) LAMPUNG							
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	14,130,000,000	11,322,176,000	10,954,534,047	14,655,298	10,939,878,749	96.62	382,297,251
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) LAMPUNG	14,130,000,000	11,322,176,000	10,954,534,047	14,655,298	10,939,878,749	96.75	382,297,251
	JUMLAH BELANJA 05	211,681,269,000	185,751,916,000	177,264,412,561	698,009,271	176,566,403,290	95.43	9185512710
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:13 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	218,363,235,000	236,967,581,000	235,379,005,562	562,716,230	234,816,289,332	99.09	2,151,291,668
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	218,363,235,000	236,967,581,000	235,379,005,562	562,716,230	234,816,289,332	99.33	2,151,291,668
	JUMLAH BELANJA 06	218,363,235,000	236,967,581,000	235,379,005,562	562,716,230	234,816,289,332	99.33	2151291668
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
010070100KP	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA							
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	98,403,344,000	84,422,087,000	84,274,592,431	112,478,788	84,162,113,643	99.69	259,973,357
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	98,403,344,000	84,422,087,000	84,274,592,431	112,478,788	84,162,113,643	99.83	259,973,357
	JUMLAH BELANJA 07	98,403,344,000	84,422,087,000	84,274,592,431	112,478,788	84,162,113,643	99.83	259973357
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
010080100KP	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA							
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	754,035,982,000	708,852,901,000	707,951,546,726	1,936,491,988	706,015,054,738	99.6	2,837,846,262
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	754,035,982,000	708,852,901,000	707,951,546,726	1,936,491,988	706,015,054,738	99.87	2,837,846,262
	JUMLAH BELANJA 08	754,035,982,000	708,852,901,000	707,951,546,726	1,936,491,988	706,015,054,738	99.87	2837846262
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
010090100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	80,700,076,000	73,664,625,000	72,340,800,780	85,509,231	72,255,291,549	98.09	1,409,333,451
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	80,700,076,000	73,664,625,000	72,340,800,780	85,509,231	72,255,291,549	98.2	1,409,333,451
	JUMLAH BELANJA 09	80,700,076,000	73,664,625,000	72,340,800,780	85,509,231	72,255,291,549	98.2	1409333451
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
010110100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	54,578,178,000	50,633,771,000	50,136,726,116	5,609,502	50,131,116,614	99.01	502,654,386
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	54,578,178,000	50,633,771,000	50,136,726,116	5,609,502	50,131,116,614	99.02	502,654,386
	JUMLAH BELANJA 11	54,578,178,000	50,633,771,000	50,136,726,116	5,609,502	50,131,116,614	99.02	502654386
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	93,089,248,000	82,180,257,000	82,137,830,318	298,724,878	81,839,105,440	99.58	341,151,560
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	93,089,248,000	82,180,257,000	82,137,830,318	298,724,878	81,839,105,440	99.95	341,151,560
010120200K	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT							
403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	20,640,223,000	28,598,929,000	28,453,189,215	81,530,591	28,371,658,624	99.21	227,270,376
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	20,640,223,000	28,598,929,000	28,453,189,215	81,530,591	28,371,658,624	99.49	227,270,376
010120400K	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA							
027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	26,241,283,000	31,853,649,000	31,807,494,398	7,351,910	31,800,142,488	99.83	53,506,512
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	26,241,283,000	31,853,649,000	31,807,494,398	7,351,910	31,800,142,488	99.86	53,506,512

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:13 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
010120800K 506137	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	18,701,516,000	20,090,314,000	20,065,355,062	1,340,471	20,064,014,591	99.87	26,299,409
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	18,701,516,000	20,090,314,000	20,065,355,062	1,340,471	20,064,014,591	99.88	26,299,409
010120900 352588	BA(010) ES1(12) RIAU BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12,106,605,000	2,507,045,000	2,506,932,225	3,240,000	2,503,692,225	99.87	3,352,775
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) RIAU	12,106,605,000	2,507,045,000	2,506,932,225	3,240,000	2,503,692,225	100	3,352,775
010121900K 027177	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	18,106,994,000	21,587,551,000	21,567,401,908	11,226,341	21,556,175,567	99.85	31,375,433
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	18,106,994,000	21,587,551,000	21,567,401,908	11,226,341	21,556,175,567	99.91	31,375,433
null 506138	Kode UAPPAW Tidak Ada BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8,460,523,000	8,331,984,000	8,330,893,392	3,014,000	8,327,879,392	99.95	4,104,608
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	8,460,523,000	8,331,984,000	8,330,893,392	3,014,000	8,327,879,392	99.99	4,104,608
	JUMLAH BELANJA 12	197,346,392,000	195,149,729,000	194,869,096,518	406,428,191	194,462,668,327	99.86	687060673
	JUMLAH BELANJA	3,210,575,090,000	2,934,557,569,000	2,915,075,877,247	6,042,426,052	2,909,033,451,195	99.34	25,524,117,805

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:17 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	370,235,166,000	338,297,016,000	337,219,984,876	54,937,248	337,165,047,628	99.67	1,131,968,372
52	BELANJA BARANG	575,330,897,000	531,516,284,000	529,336,769,373	1,165,493,127	528,171,276,246	99.37	3,345,007,754
53	BELANJA MODAL	114,343,186,000	84,514,259,000	84,466,817,230	9,997,900	84,456,819,330	99.93	57,439,670
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	1,059,909,249,000	954,327,559,000	951,023,571,479	1,230,428,275	949,793,143,204	99.65	4,534,415,796
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	36,373,998,000	35,339,834,000	35,324,725,195	14,365,557	35,310,359,638	99.92	29,474,362
52	BELANJA BARANG	38,882,363,000	30,861,754,000	30,816,900,649	43,969,693	30,772,930,956	99.71	88,823,044
53	BELANJA MODAL	1,000,000,000	1,991,676,000	1,990,072,660	0	1,990,072,660	99.92	1,603,340
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	76,256,361,000	68,193,264,000	68,131,698,504	58,335,250	68,073,363,254	99.91	119,900,746
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	37,700,973,000	32,765,864,000	32,714,600,640	2,940,279	32,711,660,361	99.83	54,203,639
52	BELANJA BARANG	184,822,999,000	178,157,229,000	178,140,369,661	9,682,203	178,130,687,458	99.99	26,541,542
53	BELANJA MODAL	790,000,000	1,700,250,000	1,698,979,592	0	1,698,979,592	99.93	1,270,408
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN	223,313,972,000	212,623,343,000	212,553,949,893	12,622,482	212,541,327,411	99.97	82,015,589
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
51	BELANJA PEGAWAI	39,462,303,000	38,067,344,000	37,966,663,200	11,010,426	37,955,652,774	99.71	111,691,226
52	BELANJA BARANG	192,120,229,000	121,387,197,000	118,672,040,184	922,786,418	117,749,253,766	97	3,637,943,234
53	BELANJA MODAL	4,404,500,000	4,516,252,000	4,511,773,293	0	4,511,773,293	99.9	4,478,707
	JUMLAH BELANJA (04) DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	235,987,032,000	163,970,793,000	161,150,476,677	933,796,844	160,216,679,833	98.28	3,754,113,167
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
51	BELANJA PEGAWAI	59,531,933,000	56,928,123,000	56,323,325,711	58,270,875	56,265,054,836	98.84	663,068,164
52	BELANJA BARANG	146,027,080,000	126,903,537,000	119,022,962,150	639,738,396	118,383,223,754	93.29	8,520,313,246
53	BELANJA MODAL	6,122,256,000	1,920,256,000	1,918,124,700	0	1,918,124,700	99.89	2,131,300
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	211,681,269,000	185,751,916,000	177,264,412,561	698,009,271	176,566,403,290	95.43	9,185,512,710
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	41,961,040,000	40,455,642,000	40,166,080,151	9,166,922	40,156,913,229	99.26	298,728,771
52	BELANJA BARANG	174,000,245,000	194,682,154,000	193,394,357,273	553,549,308	192,840,807,965	99.05	1,841,346,035
53	BELANJA MODAL	2,401,950,000	1,829,785,000	1,818,568,138	0	1,818,568,138	99.39	11,216,862
	JUMLAH BELANJA (06) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	218,363,235,000	236,967,581,000	235,379,005,562	562,716,230	234,816,289,332	99.33	2,151,291,668
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	41,603,662,000	38,558,998,000	38,533,037,494	66,371	38,532,971,123	99.93	26,026,877
52	BELANJA BARANG	51,399,682,000	43,392,484,000	43,272,747,727	112,412,417	43,160,335,310	99.47	232,148,690
53	BELANJA MODAL	5,400,000,000	2,470,605,000	2,468,807,210	0	2,468,807,210	99.93	1,797,790

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:17 AM

Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN OTONOMI DAERAH	98,403,344,000	84,422,087,000	84,274,592,431	112,478,788	84,162,113,643	99.83	259,973,357
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
51	BELANJA PEGAWAI	45,705,299,000	37,769,126,000	37,222,621,436	15,791,908	37,206,829,528	98.51	562,296,472
52	BELANJA BARANG	642,448,627,000	613,857,117,000	613,530,114,866	1,920,700,080	611,609,414,786	99.63	2,247,702,214
53	BELANJA MODAL	65,882,056,000	57,226,658,000	57,198,810,424	0	57,198,810,424	99.95	27,847,576
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN	754,035,982,000	708,852,901,000	707,951,546,726	1,936,491,988	706,015,054,738	99.87	2,837,846,262
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	35,010,076,000	35,555,573,000	35,552,538,013	30,389,916	35,522,148,097	99.91	33,424,903
52	BELANJA BARANG	43,990,000,000	36,074,052,000	34,755,782,415	55,119,315	34,700,663,100	96.19	1,373,388,900
53	BELANJA MODAL	1,700,000,000	2,035,000,000	2,032,480,352	0	2,032,480,352	99.88	2,519,648
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	80,700,076,000	73,664,625,000	72,340,800,780	85,509,231	72,255,291,549	98.2	1,409,333,451
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
51	BELANJA PEGAWAI	27,488,973,000	27,015,190,000	26,907,624,641	1,111,384	26,906,513,257	99.6	108,676,743
52	BELANJA BARANG	25,073,957,000	21,805,783,000	21,429,057,195	4,498,118	21,424,559,077	98.25	381,223,923
53	BELANJA MODAL	2,015,248,000	1,812,798,000	1,800,044,280	0	1,800,044,280	99.3	12,753,720
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	54,578,178,000	50,633,771,000	50,136,726,116	5,609,502	50,131,116,614	99.02	502,654,386
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
51	BELANJA PEGAWAI	79,862,421,000	72,425,531,000	72,365,993,584	34,319,675	72,331,673,909	99.87	93,857,091
52	BELANJA BARANG	111,807,471,000	114,067,006,000	113,861,173,435	372,108,516	113,489,064,919	99.49	577,941,081
53	BELANJA MODAL	5,676,500,000	8,657,192,000	8,641,929,499	0	8,641,929,499	99.82	15,262,501
	JUMLAH BELANJA (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	197,346,392,000	195,149,729,000	194,869,096,518	406,428,191	194,462,668,327	99.86	687,060,673
	JUMLAH BELANJA	3,210,575,090,000	2,934,557,569,000	2,915,075,877,247	6,042,426,052	2,909,033,451,195	99.34	25,524,117,805

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:18 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	120,434,529,000	48,143,024,000	46,161,684,691	225,262,372	45,936,422,319	10434	2,206,601,681
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	21,627,690,000	25,783,674,000	25,306,618,644	515,242,781	24,791,375,863	279.68	992,298,137
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	30,036,407,000	17,461,661,000	17,211,488,098	203,964,581	17,007,523,517	97.4	454,137,483
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	12,304,274,000	9,090,126,000	8,939,499,781	47,267,838	8,892,231,943	388.74	197,894,057
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12,050,000,000	7,057,639,000	6,997,647,386	6,669,848	6,990,977,538	99.06	66,661,462
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,200,000,000	6,871,226,000	6,841,452,823	72,498,975	6,768,953,848	98.51	102,272,152
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8,338,800,000	6,079,756,000	6,055,816,280	8,466,500	6,047,349,780	99.47	32,406,220
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	4,900,000,000	3,590,000,000	3,550,140,601	0	3,550,140,601	98.89	39,859,399
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,350,000,000	994,229,000	992,887,030	0	992,887,030	99.87	1,341,970
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,279,250,000	1,801,162,000	1,801,644,914	25,031,816	1,776,613,098	98.64	24,548,902
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,561,200,000	4,392,378,000	4,386,590,575	0	4,386,590,575	99.87	5,787,425
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,750,400,000	21,538,258,000	21,414,470,248	161,319,842	21,253,150,406	98.68	285,107,594
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2,900,000,000	2,207,174,000	2,173,471,027	4,866,517	2,168,604,510	98.25	38,569,490
6138	Penataan kelembagaan Desa	12,445,832,000	5,056,426,000	4,824,407,908	13,290,000	4,811,117,908	95.15	245,308,092
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,953,000,000	24,834,779,000	24,564,497,369	378,623,064	24,185,874,305	97.39	648,904,695
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	11,200,000,000	8,805,089,000	8,781,203,437	0	8,781,203,437	99.73	23,885,563
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	22,800,000,000	16,390,000,000	16,103,403,734	18,828,814	16,084,574,920	98.14	305,425,080
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,450,000,000	1,691,005,000	1,689,137,923	3,548,118	1,685,589,805	99.68	5,415,195

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:18 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah	1,000,000,000	95,897,000	95,534,283	0	95,534,283	99.62	362,717
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	17,460,505,000	11,610,675,000	11,568,015,677	50,398,139	11,517,617,538	496.26	93,057,462
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	374,041,887,000	223,494,178,000	219,459,612,429	1,735,279,205	217,724,333,224	98.195	**5,769,844,776**
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	551,351,859,000	450,609,547,000	450,564,311,943	1,862,162,012	448,702,149,931	99.58	1,907,397,069
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	108,508,400,000	158,437,004,000	158,391,531,979	926,790	158,390,605,189	99.97	46,398,811
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	21,790,424,000	14,762,474,000	14,673,193,577	39,060,636	14,634,132,941	99.13	128,341,059
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	681,650,683,000	623,809,025,000	623,629,037,499	1,902,149,438	621,726,888,061	99.971	**2,082,136,939**
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	6,280,000,000	3,515,000,000	3,514,685,045	1,282,966	3,513,402,079	99.95	1,597,921
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	4,525,000,000	2,191,882,000	2,191,130,810	0	2,191,130,810	99.97	751,190
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	136,876,418,000	139,356,418,000	139,354,115,704	7,999,300	139,346,116,404	99.99	10,301,596
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CR	147,681,418,000	145,063,300,000	145,059,931,559	9,282,266	145,050,649,293	99.998	**12,650,707**
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:18 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	798.09	1,202,929,457
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	798.31	5,274,940
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	790.68	45,927,465
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	791.55	237,089,079
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:18 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	393.21	1,018,245,263
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	192.32	55,540,531
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	281.41	274,440,464
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:18 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	698.8	243,393,588
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	691.52	13,568,918
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	1,854,068,693,000	1,699,675,153,000	1,692,661,637,048	1,953,859,773	1,690,707,777,275	99.587	**8,967,375,725**
01	Nama Program Tidak Ada							
4255	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	-42,543,216	-42,543,216	0	0	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	0	0	-42,543,216	-42,543,216	0	-	**0**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	3,057,442,681,000	2,692,041,656,000	2,680,767,675,319	5,558,027,466	2,675,209,647,853	99.581	**16,832,008,147**
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	68,531,606,000	104,322,650,000	103,867,889,273	33,931,353	103,833,957,920	99.53	488,692,080
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	236,242,539	34,048,360,462	85.12	5,951,639,538
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	108,531,606,000	144,322,650,000	138,152,492,274	270,173,892	137,882,318,382	95.725	**6,440,331,618**
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	108,531,606,000	144,322,650,000	138,152,492,274	270,173,892	137,882,318,382	95.725	**6,440,331,618**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:18 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
04	PNBP							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	155,784,000	258,784,000	258,586,250	500,000	258,086,250	99.73	697,750
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,676,205,000	44,323,078,000	44,108,392,057	71,931,670	44,036,460,387	497.04	286,617,613
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	24,831,989,000	44,581,862,000	44,366,978,307	72,431,670	44,294,546,637	99.518	**287,315,363**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	298.13	12,277,033
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	7,768,814,000	11,067,561,000	10,955,204,182	7,356,951	10,947,847,231	98.985	**119,713,769**
	JUMLAH BELANJA PNBP	32,600,803,000	55,649,423,000	55,322,182,489	79,788,621	55,242,393,868	99.412	**407,029,132**
09	HIBAH LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	117,500,000	7,668,369,791	90.02	850,411,209
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,500,000,000	25,436,640,000	25,392,167,385	16,936,073	25,375,231,312	99.76	61,408,688
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	12,000,000,000	35,660,215,000	33,949,902,566	134,436,073	33,815,466,493	95.204	**1,844,748,507**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:18 AM

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	12,000,000,000	35,660,215,000	33,949,902,566	134,436,073	33,815,466,493	95.204	**1,844,748,507**
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	**0**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	**0**
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	**401**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	**401**
	JUMLAH	**3,210,575,090,000**	**2,934,557,569,000**	**2,915,075,877,247**	**6,042,426,052**	**2,909,033,451,195**	**99.34**	**25,524,117,805**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,961,073,000	10,893,878,000	10,824,002,785	0	10,824,002,785	99.36	69,875,215
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,961,073,000	10,893,878,000	10,824,002,785	0	10,824,002,785	99.36	69,875,215
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,855,961,000	8,257,426,000	7,483,465,712	26,291,726	7,457,173,986	90.63	800,252,014
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,855,961,000	8,257,426,000	7,483,465,712	26,291,726	7,457,173,986	90.63	800,252,014
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,693,132,000	13,784,049,000	13,762,676,632	0	13,762,676,632	99.84	21,372,368
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,693,132,000	13,784,049,000	13,762,676,632	0	13,762,676,632	99.84	21,372,368
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,864,182,000	24,305,936,000	23,744,303,696	3,839,000	23,740,464,696	97.69	565,471,304
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,864,182,000	24,305,936,000	23,744,303,696	3,839,000	23,740,464,696	97.69	565,471,304
5231	Belanja Pemeliharaan							
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,901,000	1,900,800	0	1,900,800	99.99	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	1,901,000	1,900,800	0	1,900,800	99.99	200
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	406,800,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	406,800,000	0	0	0	0		0
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,006,605,000	1,005,295,895	0	1,005,295,895	99.87	1,309,105
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	60,000,000	1,066,605,000	1,005,295,895	0	1,005,295,895	94.25	61,309,105
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	14,841,148,000	58,309,795,000	56,821,645,520	30,130,726	56,791,514,794	97.45	1,518,280,206
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	388,725,000	388,565,750	0	388,565,750	99.96	159,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	388,725,000	388,565,750	0	388,565,750	99.96	159,250

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	388,725,000	388,565,750	0	388,565,750	99.96	159,250
	JUMLAH BELANJA	14,841,148,000	58,698,520,000	57,210,211,270	30,130,726	57,180,080,544	97.46	1,518,439,456

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Nama Program Tidak Ada							
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	0	0	-42,543,216	-42,543,216	0	0	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	0	0	-42,543,216	-42,543,216	0	-	**0**
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	120,434,529,000	48,143,024,000	46,161,684,691	225,262,372	45,936,422,319	95.42	2,206,601,681
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	120,434,529,000	48,143,024,000	46,161,684,691	225,262,372	45,936,422,319	95.42	2,206,601,681
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	120,434,529,000	48,143,024,000	46,161,684,691	225,262,372	45,936,422,319	95.42	2,206,601,681
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	120,434,529,000	48,143,024,000	46,161,684,691	225,262,372	45,936,422,319	95.42	2,206,601,681
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	120,434,529,000	48,143,024,000	46,161,684,691	225,262,372	45,936,422,319	95.42	2,206,601,681
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	120,434,529,000	48,143,024,000	46,161,684,691	225,262,372	45,936,422,319	95.42	2,206,601,681
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	120,434,529,000	48,143,024,000	46,161,684,691	225,262,372	45,936,422,319	95.42	2,206,601,681
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	21,627,690,000	25,783,674,000	25,306,618,644	515,242,781	24,791,375,863	96.15	992,298,137
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	21,627,690,000	25,783,674,000	25,306,618,644	515,242,781	24,791,375,863	96.15	992,298,137
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	21,627,690,000	25,783,674,000	25,306,618,644	515,242,781	24,791,375,863	96.15	992,298,137
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	21,627,690,000	25,783,674,000	25,306,618,644	515,242,781	24,791,375,863	96.15	992,298,137
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	21,627,690,000	25,783,674,000	25,306,618,644	515,242,781	24,791,375,863	96.15	992,298,137
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	21,627,690,000	25,783,674,000	25,306,618,644	515,242,781	24,791,375,863	96.15	992,298,137
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	21,627,690,000	25,783,674,000	25,306,618,644	515,242,781	24,791,375,863	96.15	992,298,137
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	30,036,407,000	17,461,661,000	17,211,488,098	203,964,581	17,007,523,517	97.4	454,137,483

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	30,036,407,000	17,461,661,000	17,211,488,098	203,964,581	17,007,523,517	97.4	454,137,483
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	30,036,407,000	17,461,661,000	17,211,488,098	203,964,581	17,007,523,517	97.4	454,137,483
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	30,036,407,000	17,461,661,000	17,211,488,098	203,964,581	17,007,523,517	97.4	454,137,483
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	30,036,407,000	17,461,661,000	17,211,488,098	203,964,581	17,007,523,517	97.4	454,137,483
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	30,036,407,000	17,461,661,000	17,211,488,098	203,964,581	17,007,523,517	97.4	454,137,483
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	30,036,407,000	17,461,661,000	17,211,488,098	203,964,581	17,007,523,517	97.4	454,137,483
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	12,304,274,000	9,090,126,000	8,939,499,781	47,267,838	8,892,231,943	97.82	197,894,057
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	12,304,274,000	9,090,126,000	8,939,499,781	47,267,838	8,892,231,943	97.82	197,894,057
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	12,304,274,000	9,090,126,000	8,939,499,781	47,267,838	8,892,231,943	97.82	197,894,057
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	12,304,274,000	9,090,126,000	8,939,499,781	47,267,838	8,892,231,943	97.82	197,894,057
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	12,304,274,000	9,090,126,000	8,939,499,781	47,267,838	8,892,231,943	97.82	197,894,057
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	12,304,274,000	9,090,126,000	8,939,499,781	47,267,838	8,892,231,943	97.82	197,894,057
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	12,304,274,000	9,090,126,000	8,939,499,781	47,267,838	8,892,231,943	97.82	197,894,057
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12,050,000,000	7,057,639,000	6,997,647,386	6,669,848	6,990,977,538	99.06	66,661,462
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12,050,000,000	7,057,639,000	6,997,647,386	6,669,848	6,990,977,538	99.06	66,661,462
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12,050,000,000	7,057,639,000	6,997,647,386	6,669,848	6,990,977,538	99.06	66,661,462
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12,050,000,000	7,057,639,000	6,997,647,386	6,669,848	6,990,977,538	99.06	66,661,462
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12,050,000,000	7,057,639,000	6,997,647,386	6,669,848	6,990,977,538	99.06	66,661,462
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12,050,000,000	7,057,639,000	6,997,647,386	6,669,848	6,990,977,538	99.06	66,661,462
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12,050,000,000	7,057,639,000	6,997,647,386	6,669,848	6,990,977,538	99.06	66,661,462

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,200,000,000	6,871,226,000	6,841,452,823	72,498,975	6,768,953,848	98.51	102,272,152
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,200,000,000	6,871,226,000	6,841,452,823	72,498,975	6,768,953,848	98.51	102,272,152
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,200,000,000	6,871,226,000	6,841,452,823	72,498,975	6,768,953,848	98.51	102,272,152
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,200,000,000	6,871,226,000	6,841,452,823	72,498,975	6,768,953,848	98.51	102,272,152
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,200,000,000	6,871,226,000	6,841,452,823	72,498,975	6,768,953,848	98.51	102,272,152
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,200,000,000	6,871,226,000	6,841,452,823	72,498,975	6,768,953,848	98.51	102,272,152
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	9,200,000,000	6,871,226,000	6,841,452,823	72,498,975	6,768,953,848	98.51	102,272,152
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8,338,800,000	6,079,756,000	6,055,816,280	8,466,500	6,047,349,780	99.47	32,406,220
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8,338,800,000	6,079,756,000	6,055,816,280	8,466,500	6,047,349,780	99.47	32,406,220
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8,338,800,000	6,079,756,000	6,055,816,280	8,466,500	6,047,349,780	99.47	32,406,220
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8,338,800,000	6,079,756,000	6,055,816,280	8,466,500	6,047,349,780	99.47	32,406,220
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8,338,800,000	6,079,756,000	6,055,816,280	8,466,500	6,047,349,780	99.47	32,406,220
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8,338,800,000	6,079,756,000	6,055,816,280	8,466,500	6,047,349,780	99.47	32,406,220
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8,338,800,000	6,079,756,000	6,055,816,280	8,466,500	6,047,349,780	99.47	32,406,220
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	4,900,000,000	3,590,000,000	3,550,140,601	0	3,550,140,601	98.89	39,859,399
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	4,900,000,000	3,590,000,000	3,550,140,601	0	3,550,140,601	98.89	39,859,399
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	4,900,000,000	3,590,000,000	3,550,140,601	0	3,550,140,601	98.89	39,859,399
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	4,900,000,000	3,590,000,000	3,550,140,601	0	3,550,140,601	98.89	39,859,399
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	4,900,000,000	3,590,000,000	3,550,140,601	0	3,550,140,601	98.89	39,859,399
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	4,900,000,000	3,590,000,000	3,550,140,601	0	3,550,140,601	98.89	39,859,399

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah	4,900,000,000	3,590,000,000	3,550,140,601	0	3,550,140,601	98.89	39,859,399
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,350,000,000	994,229,000	992,887,030	0	992,887,030	99.87	1,341,970
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,350,000,000	994,229,000	992,887,030	0	992,887,030	99.87	1,341,970
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,350,000,000	994,229,000	992,887,030	0	992,887,030	99.87	1,341,970
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,350,000,000	994,229,000	992,887,030	0	992,887,030	99.87	1,341,970
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,350,000,000	994,229,000	992,887,030	0	992,887,030	99.87	1,341,970
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,350,000,000	994,229,000	992,887,030	0	992,887,030	99.87	1,341,970
1283	Pembinaan inovasi daerah	3,350,000,000	994,229,000	992,887,030	0	992,887,030	99.87	1,341,970
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,279,250,000	1,801,162,000	1,801,644,914	25,031,816	1,776,613,098	98.64	24,548,902
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,279,250,000	1,801,162,000	1,801,644,914	25,031,816	1,776,613,098	98.64	24,548,902
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,279,250,000	1,801,162,000	1,801,644,914	25,031,816	1,776,613,098	98.64	24,548,902
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,279,250,000	1,801,162,000	1,801,644,914	25,031,816	1,776,613,098	98.64	24,548,902
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,279,250,000	1,801,162,000	1,801,644,914	25,031,816	1,776,613,098	98.64	24,548,902
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,279,250,000	1,801,162,000	1,801,644,914	25,031,816	1,776,613,098	98.64	24,548,902
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	2,279,250,000	1,801,162,000	1,801,644,914	25,031,816	1,776,613,098	98.64	24,548,902
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,561,200,000	4,392,378,000	4,386,590,575	0	4,386,590,575	99.87	5,787,425
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,561,200,000	4,392,378,000	4,386,590,575	0	4,386,590,575	99.87	5,787,425
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,561,200,000	4,392,378,000	4,386,590,575	0	4,386,590,575	99.87	5,787,425
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,561,200,000	4,392,378,000	4,386,590,575	0	4,386,590,575	99.87	5,787,425
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,561,200,000	4,392,378,000	4,386,590,575	0	4,386,590,575	99.87	5,787,425

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,561,200,000	4,392,378,000	4,386,590,575	0	4,386,590,575	99.87	5,787,425
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	5,561,200,000	4,392,378,000	4,386,590,575	0	4,386,590,575	99.87	5,787,425
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,750,400,000	21,538,258,000	21,414,470,248	161,319,842	21,253,150,406	98.68	285,107,594
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,750,400,000	21,538,258,000	21,414,470,248	161,319,842	21,253,150,406	98.68	285,107,594
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,750,400,000	21,538,258,000	21,414,470,248	161,319,842	21,253,150,406	98.68	285,107,594
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,750,400,000	21,538,258,000	21,414,470,248	161,319,842	21,253,150,406	98.68	285,107,594
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,750,400,000	21,538,258,000	21,414,470,248	161,319,842	21,253,150,406	98.68	285,107,594
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,750,400,000	21,538,258,000	21,414,470,248	161,319,842	21,253,150,406	98.68	285,107,594
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,750,400,000	21,538,258,000	21,414,470,248	161,319,842	21,253,150,406	98.68	285,107,594
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2,900,000,000	2,207,174,000	2,173,471,027	4,866,517	2,168,604,510	98.25	38,569,490
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2,900,000,000	2,207,174,000	2,173,471,027	4,866,517	2,168,604,510	98.25	38,569,490
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2,900,000,000	2,207,174,000	2,173,471,027	4,866,517	2,168,604,510	98.25	38,569,490
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2,900,000,000	2,207,174,000	2,173,471,027	4,866,517	2,168,604,510	98.25	38,569,490
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2,900,000,000	2,207,174,000	2,173,471,027	4,866,517	2,168,604,510	98.25	38,569,490
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2,900,000,000	2,207,174,000	2,173,471,027	4,866,517	2,168,604,510	98.25	38,569,490
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	2,900,000,000	2,207,174,000	2,173,471,027	4,866,517	2,168,604,510	98.25	38,569,490
6138	Penataan kelembagaan Desa	12,445,832,000	5,056,426,000	4,824,407,908	13,290,000	4,811,117,908	95.15	245,308,092
6138	Penataan kelembagaan Desa	12,445,832,000	5,056,426,000	4,824,407,908	13,290,000	4,811,117,908	95.15	245,308,092
6138	Penataan kelembagaan Desa	12,445,832,000	5,056,426,000	4,824,407,908	13,290,000	4,811,117,908	95.15	245,308,092
6138	Penataan kelembagaan Desa	12,445,832,000	5,056,426,000	4,824,407,908	13,290,000	4,811,117,908	95.15	245,308,092

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6138	Penataan kelembagaan Desa	12,445,832,000	5,056,426,000	4,824,407,908	13,290,000	4,811,117,908	95.15	245,308,092
6138	Penataan kelembagaan Desa	12,445,832,000	5,056,426,000	4,824,407,908	13,290,000	4,811,117,908	95.15	245,308,092
6138	Penataan kelembagaan Desa	12,445,832,000	5,056,426,000	4,824,407,908	13,290,000	4,811,117,908	95.15	245,308,092
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,953,000,000	24,834,779,000	24,564,497,369	378,623,064	24,185,874,305	97.39	648,904,695
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,953,000,000	24,834,779,000	24,564,497,369	378,623,064	24,185,874,305	97.39	648,904,695
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,953,000,000	24,834,779,000	24,564,497,369	378,623,064	24,185,874,305	97.39	648,904,695
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,953,000,000	24,834,779,000	24,564,497,369	378,623,064	24,185,874,305	97.39	648,904,695
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,953,000,000	24,834,779,000	24,564,497,369	378,623,064	24,185,874,305	97.39	648,904,695
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,953,000,000	24,834,779,000	24,564,497,369	378,623,064	24,185,874,305	97.39	648,904,695
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45,953,000,000	24,834,779,000	24,564,497,369	378,623,064	24,185,874,305	97.39	648,904,695
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	11,200,000,000	8,805,089,000	8,781,203,437	0	8,781,203,437	99.73	23,885,563
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	11,200,000,000	8,805,089,000	8,781,203,437	0	8,781,203,437	99.73	23,885,563
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	11,200,000,000	8,805,089,000	8,781,203,437	0	8,781,203,437	99.73	23,885,563
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	11,200,000,000	8,805,089,000	8,781,203,437	0	8,781,203,437	99.73	23,885,563
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	11,200,000,000	8,805,089,000	8,781,203,437	0	8,781,203,437	99.73	23,885,563
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	11,200,000,000	8,805,089,000	8,781,203,437	0	8,781,203,437	99.73	23,885,563
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	11,200,000,000	8,805,089,000	8,781,203,437	0	8,781,203,437	99.73	23,885,563
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	22,800,000,000	16,390,000,000	16,103,403,734	18,828,814	16,084,574,920	98.14	305,425,080
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	22,800,000,000	16,390,000,000	16,103,403,734	18,828,814	16,084,574,920	98.14	305,425,080
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	22,800,000,000	16,390,000,000	16,103,403,734	18,828,814	16,084,574,920	98.14	305,425,080

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	22,800,000,000	16,390,000,000	16,103,403,734	18,828,814	16,084,574,920	98.14	305,425,080
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	22,800,000,000	16,390,000,000	16,103,403,734	18,828,814	16,084,574,920	98.14	305,425,080
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	22,800,000,000	16,390,000,000	16,103,403,734	18,828,814	16,084,574,920	98.14	305,425,080
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	22,800,000,000	16,390,000,000	16,103,403,734	18,828,814	16,084,574,920	98.14	305,425,080
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,450,000,000	1,691,005,000	1,689,137,923	3,548,118	1,685,589,805	99.68	5,415,195
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,450,000,000	1,691,005,000	1,689,137,923	3,548,118	1,685,589,805	99.68	5,415,195
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,450,000,000	1,691,005,000	1,689,137,923	3,548,118	1,685,589,805	99.68	5,415,195
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,450,000,000	1,691,005,000	1,689,137,923	3,548,118	1,685,589,805	99.68	5,415,195
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,450,000,000	1,691,005,000	1,689,137,923	3,548,118	1,685,589,805	99.68	5,415,195
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,450,000,000	1,691,005,000	1,689,137,923	3,548,118	1,685,589,805	99.68	5,415,195
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,450,000,000	1,691,005,000	1,689,137,923	3,548,118	1,685,589,805	99.68	5,415,195
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah	1,000,000,000	95,897,000	95,534,283	0	95,534,283	99.62	362,717
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah	1,000,000,000	95,897,000	95,534,283	0	95,534,283	99.62	362,717
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah	1,000,000,000	95,897,000	95,534,283	0	95,534,283	99.62	362,717
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah	1,000,000,000	95,897,000	95,534,283	0	95,534,283	99.62	362,717
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah	1,000,000,000	95,897,000	95,534,283	0	95,534,283	99.62	362,717
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah	1,000,000,000	95,897,000	95,534,283	0	95,534,283	99.62	362,717
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah	1,000,000,000	95,897,000	95,534,283	0	95,534,283	99.62	362,717
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	17,460,505,000	11,610,675,000	11,568,015,677	50,398,139	11,517,617,538	99.2	93,057,462
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	17,460,505,000	11,610,675,000	11,568,015,677	50,398,139	11,517,617,538	99.2	93,057,462

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	17,460,505,000	11,610,675,000	11,568,015,677	50,398,139	11,517,617,538	99.2	93,057,462
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	17,460,505,000	11,610,675,000	11,568,015,677	50,398,139	11,517,617,538	99.2	93,057,462
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	17,460,505,000	11,610,675,000	11,568,015,677	50,398,139	11,517,617,538	99.2	93,057,462
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	17,460,505,000	11,610,675,000	11,568,015,677	50,398,139	11,517,617,538	99.2	93,057,462
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	17,460,505,000	11,610,675,000	11,568,015,677	50,398,139	11,517,617,538	99.2	93,057,462
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	2,618,293,209,000	1,564,459,246,000	1,536,217,287,003	12,146,954,435	1,524,070,332,568	98.195	**40,388,913,432**
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	551,351,859,000	450,609,547,000	450,564,311,943	1,862,162,012	448,702,149,931	99.58	1,907,397,069
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	108,508,400,000	158,437,004,000	158,391,531,979	926,790	158,390,605,189	99.97	46,398,811
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	21,790,424,000	14,762,474,000	14,673,193,577	39,060,636	14,634,132,941	99.13	128,341,059
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	681,650,683,000	623,809,025,000	623,629,037,499	1,902,149,438	621,726,888,061	99.971	**2,082,136,939**
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	6,280,000,000	3,515,000,000	3,514,685,045	1,282,966	3,513,402,079	99.95	1,597,921
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	4,525,000,000	2,191,882,000	2,191,130,810	0	2,191,130,810	99.97	751,190
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	136,876,418,000	139,356,418,000	139,354,115,704	7,999,300	139,346,116,404	99.99	10,301,596
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CR	147,681,418,000	145,063,300,000	145,059,931,559	9,282,266	145,050,649,293	99.998	**12,650,707**
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 9
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	17,303,307,000	26,682,541,000	26,459,901,268	42,543,216	26,417,358,052	99.01	265,182,948
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri	12,675,003,000	7,254,645,000	7,231,413,782	13,224,547	7,218,189,235	99.5	36,455,765
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 10
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	353,697,733,000	311,629,959,000	309,897,449,998	524,405,179	309,373,044,819	99.28	2,256,914,181
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 11
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri	31,496,459,000	26,510,963,000	26,363,468,407	19,112,824	26,344,355,583	99.37	166,607,417
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri	22,713,874,000	15,175,214,000	15,126,416,789	62,141,690	15,064,275,099	99.27	110,938,901
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 12
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus	13,285,043,000	6,561,604,000	6,495,254,117	42,122,366	6,453,131,751	98.35	108,472,249
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	667,398,000	303,773,000	303,480,392	0	303,480,392	99.9	292,608
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 13
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	529,329,339,000	507,564,150,000	506,804,349,105	443,128,562	506,361,220,543	99.76	1,202,929,457
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,656,120,000	1,014,041,000	1,010,370,560	1,604,500	1,008,766,060	99.48	5,274,940
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 14
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	11,033,004,000	6,183,073,000	6,153,205,191	16,059,656	6,137,145,535	99.26	45,927,465
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	58,392,307,000	37,787,934,000	37,652,116,921	101,272,000	37,550,844,921	99.37	237,089,079
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 15
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,000,000,000	917,343,000	917,184,023	0	917,184,023	99.98	158,977
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	49,548,378,000	49,228,936,000	49,197,741,030	15,595,212	49,182,145,818	99.9	46,790,182

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	162,881,000	176,679,000	174,667,371	0	174,667,371	98.86	2,011,629
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	2,920,532,000	2,438,480,000	2,425,173,974	277,269	2,424,896,705	99.44	13,583,295
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	2,365,975,000	53,070,000	51,599,000	0	51,599,000	97.23	1,471,000
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 18
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	20,258,595,000	15,378,756,000	15,365,333,106	42,462,769	15,322,870,337	99.64	55,885,663
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,000,000,000	1,323,655,000	1,323,249,648	0	1,323,249,648	99.97	405,352
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	64,720,609,000	59,184,304,000	59,122,762,178	3,340,216	59,119,421,962	99.89	64,882,038
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7,170,324,000	5,715,869,000	5,713,049,176	0	5,713,049,176	99.95	2,819,824
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 20
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,741,621,000	1,336,215,000	1,334,957,332	0	1,334,957,332	99.91	1,257,668
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,635,700,000	1,635,700,000	1,623,052,111	2,387,000	1,620,665,111	99.08	15,034,889
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 21
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	59,938,713,000	60,180,358,000	59,999,758,120	23,270,532	59,976,487,588	99.66	203,870,412
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	2,300,000,000	2,298,230,000	2,292,618,460	1,192,800	2,291,425,660	99.7	6,804,340
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	2,400,000,000	2,184,375,000	2,178,803,376	255,000	2,178,548,376	99.73	5,826,624
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 23
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	3,500,000,000	2,372,000,000	2,236,990,185	2,843,808	2,234,146,377	94.19	137,853,623
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	108,914,482,000	100,263,307,000	99,317,215,682	72,153,945	99,245,061,737	98.98	1,018,245,263
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1,454,107,000	1,358,915,000	1,303,374,469	0	1,303,374,469	95.91	55,540,531
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	2,517,015,000	1,621,548,000	1,351,854,096	4,746,560	1,347,107,536	83.08	274,440,464
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 25
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4,800,000,000	4,102,260,000	4,067,194,832	0	4,067,194,832	99.15	35,065,168
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,500,000,000	975,000,000	947,525,162	8,662,425	938,862,737	96.29	36,137,263
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 26
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70,382,229,000	64,753,309,000	64,076,875,846	117,893,467	63,958,982,379	98.77	794,326,621
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,322,000,000	2,290,800,000	2,271,527,710	0	2,271,527,710	99.16	19,272,290

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 27
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1,324,400,000	655,560,000	654,737,000	0	654,737,000	99.87	823,000
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 28
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	2,000,000,000	1,810,000,000	1,808,556,381	9,794,126	1,798,762,255	99.38	11,237,745
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	59,903,344,000	54,875,153,000	54,813,875,885	16,604,562	54,797,271,323	99.86	77,881,677
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 29
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	900,000,000	808,940,000	808,196,700	5,114,625	803,082,075	99.28	5,857,925
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	1,300,000,000	779,545,000	778,900,350	0	778,900,350	99.92	644,650
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 30
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	1,364,920,000	1,341,596,694	3,058,700	1,338,537,994	98.07	26,382,006
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,785,299,000	74,342,115,000	73,672,904,693	19,305,702	73,653,598,991	99.07	688,516,009
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 31
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,950,000,000	3,616,259,000	3,605,418,067	3,681,958	3,601,736,109	99.6	14,522,891
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,650,000,000	1,375,901,000	1,357,908,773	8,296,190	1,349,612,583	98.09	26,288,417
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 32
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	850,000,000	650,000,000	619,490,387	0	619,490,387	95.31	30,509,613
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 33
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	50,000,076,000	49,579,831,000	49,555,444,455	54,454,922	49,500,989,533	99.84	78,841,467
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	650,000,000	575,000,000	573,642,473	10,206,270	563,436,203	97.99	11,563,797
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 34
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	1,500,000,000	1,175,000,000	1,166,813,740	2,019,225	1,164,794,515	99.13	10,205,485
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	110,000,000	4,471,795,000	4,165,164,277	0	4,165,164,277	93.14	306,630,723
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 35
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	43,803,178,000	43,122,220,000	42,938,827,699	2,061,384	42,936,766,315	99.57	185,453,685
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan	15,000,000	13,890,000	13,140,000	0	13,140,000	94.6	750,000
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 36
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan	850,000,000	244,735,000	242,034,904	0	242,034,904	98.9	2,700,096
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,000,000	150,000,000	149,857,495	0	149,857,495	99.9	142,505
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 37
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	148,762,029,000	130,762,209,000	130,773,880,011	255,064,599	130,518,815,412	99.81	243,393,588
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,100,000,000	1,639,690,000	1,638,696,065	2,699,467	1,635,996,598	99.77	3,693,402

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 38
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,662,619,000	1,205,384,000	1,192,617,582	802,500	1,191,815,082	98.87	13,568,918
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	20,394,755,623,000	18,696,426,683,000	18,619,278,007,528	21,492,457,503	18,597,785,550,025	99.587	**98,641,132,975**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	23,842,380,933,000	21,029,758,254,000	20,924,141,720,373	35,508,300,426	20,888,633,419,947	99.498	**141,124,834,053**
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	68,531,606,000	104,322,650,000	103,867,889,273	33,931,353	103,833,957,920	99.53	488,692,080
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	68,531,606,000	104,322,650,000	103,867,889,273	33,931,353	103,833,957,920	99.53	488,692,080
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	68,531,606,000	104,322,650,000	103,867,889,273	33,931,353	103,833,957,920	99.53	488,692,080
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	68,531,606,000	104,322,650,000	103,867,889,273	33,931,353	103,833,957,920	99.53	488,692,080
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	68,531,606,000	104,322,650,000	103,867,889,273	33,931,353	103,833,957,920	99.53	488,692,080
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	68,531,606,000	104,322,650,000	103,867,889,273	33,931,353	103,833,957,920	99.53	488,692,080
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	68,531,606,000	104,322,650,000	103,867,889,273	33,931,353	103,833,957,920	99.53	488,692,080
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	236,242,539	34,048,360,462	85.12	5,951,639,538
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	236,242,539	34,048,360,462	85.12	5,951,639,538
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	236,242,539	34,048,360,462	85.12	5,951,639,538
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	236,242,539	34,048,360,462	85.12	5,951,639,538
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	236,242,539	34,048,360,462	85.12	5,951,639,538
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	236,242,539	34,048,360,462	85.12	5,951,639,538
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	236,242,539	34,048,360,462	85.12	5,951,639,538
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	759,721,242,000	1,010,258,550,000	967,067,445,918	1,891,217,244	965,176,228,674	95.725	**45,082,321,326**
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	759,721,242,000	1,010,258,550,000	967,067,445,918	1,891,217,244	965,176,228,674	95.725	**45,082,321,326**
04	PNBP							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 40
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	155,784,000	258,784,000	258,586,250	500,000	258,086,250	99.73	697,750
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	155,784,000	258,784,000	258,586,250	500,000	258,086,250	99.73	697,750
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	155,784,000	258,784,000	258,586,250	500,000	258,086,250	99.73	697,750
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	155,784,000	258,784,000	258,586,250	500,000	258,086,250	99.73	697,750
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	155,784,000	258,784,000	258,586,250	500,000	258,086,250	99.73	697,750
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	155,784,000	258,784,000	258,586,250	500,000	258,086,250	99.73	697,750
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	155,784,000	258,784,000	258,586,250	500,000	258,086,250	99.73	697,750
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,676,205,000	44,323,078,000	44,108,392,057	71,931,670	44,036,460,387	99.35	286,617,613
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,676,205,000	44,323,078,000	44,108,392,057	71,931,670	44,036,460,387	99.35	286,617,613
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,676,205,000	44,323,078,000	44,108,392,057	71,931,670	44,036,460,387	99.35	286,617,613
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,676,205,000	44,323,078,000	44,108,392,057	71,931,670	44,036,460,387	99.35	286,617,613
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,676,205,000	44,323,078,000	44,108,392,057	71,931,670	44,036,460,387	99.35	286,617,613
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,676,205,000	44,323,078,000	44,108,392,057	71,931,670	44,036,460,387	99.35	286,617,613
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	24,676,205,000	44,323,078,000	44,108,392,057	71,931,670	44,036,460,387	99.35	286,617,613
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	173,823,923,000	312,073,034,000	310,568,848,149	507,021,690	310,061,826,459	99.518	**2,011,207,541**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 41
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9,981,000	381,278,000	370,227,000	0	370,227,000	97.1	11,051,000
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	131,721,000	184,712,000	183,106,660	0	183,106,660	99.13	1,605,340
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	7,517,960,000	7,093,672,000	7,015,354,505	7,356,951	7,007,997,554	98.79	85,674,446
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	9,152,000	9,152,000	9,109,550	0	9,109,550	99.54	42,450

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 43
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,000,000	3,141,758,000	3,129,480,967	0	3,129,480,967	99.61	12,277,033
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 44
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	256,989,000	247,925,500	0	247,925,500	96.47	9,063,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	85,456,954,000	121,743,171,000	120,507,246,002	80,926,461	120,426,319,541	98.985	**1,316,851,459**
	JUMLAH BELANJA PNBP	259,280,877,000	433,816,205,000	431,076,094,151	587,948,151	430,488,146,000	99.368	**3,328,059,000**
09	HIBAH LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	117,500,000	7,668,369,791	90.02	850,411,209
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	117,500,000	7,668,369,791	90.02	850,411,209
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	117,500,000	7,668,369,791	90.02	850,411,209
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	117,500,000	7,668,369,791	90.02	850,411,209
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	117,500,000	7,668,369,791	90.02	850,411,209
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	117,500,000	7,668,369,791	90.02	850,411,209
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	117,500,000	7,668,369,791	90.02	850,411,209
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,500,000,000	25,436,640,000	25,392,167,385	16,936,073	25,375,231,312	99.76	61,408,688
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,500,000,000	25,436,640,000	25,392,167,385	16,936,073	25,375,231,312	99.76	61,408,688
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,500,000,000	25,436,640,000	25,392,167,385	16,936,073	25,375,231,312	99.76	61,408,688
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,500,000,000	25,436,640,000	25,392,167,385	16,936,073	25,375,231,312	99.76	61,408,688
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,500,000,000	25,436,640,000	25,392,167,385	16,936,073	25,375,231,312	99.76	61,408,688
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,500,000,000	25,436,640,000	25,392,167,385	16,936,073	25,375,231,312	99.76	61,408,688
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,500,000,000	25,436,640,000	25,392,167,385	16,936,073	25,375,231,312	99.76	61,408,688

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM
Halaman : 45
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	84,000,000,000	249,621,505,000	237,649,317,962	941,052,511	236,708,265,451	95.204	**12,913,239,549**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	84,000,000,000	249,621,505,000	237,649,317,962	941,052,511	236,708,265,451	95.204	**12,913,239,549**
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CP	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	**0**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	**0**
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:19 AM

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	0	17,772,608,000	17,772,605,193	0	17,772,605,193	100	**2,807**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	17,772,608,000	17,772,605,193	0	17,772,605,193	100	**2,807**
	JUMLAH	**24,945,383,052,000**	**22,745,571,803,000**	**22,582,051,864,597**	**38,928,518,332**	**22,543,123,346,265**	**99.28**	**202,448,456,735**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA DAN AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	287,559,437,000	295,565,813,000	295,280,874,540	56,042,760	295,224,831,780	99.9	340,981,220
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,663,000	7,587,000	4,906,139	46,235	4,859,904	64.67	2,727,096
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	16,956,910,000	16,069,966,000	16,004,507,864	1,475,040	16,003,032,824	99.59	66,933,176
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,429,631,000	4,317,469,000	4,287,959,218	260,554	4,287,698,664	99.32	29,770,336
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,974,441,000	15,843,072,000	15,800,285,000	88,630,000	15,711,655,000	99.73	131,417,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,324,948,000	10,870,394,000	10,782,470,000	4,955,000	10,777,515,000	99.19	92,879,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,153,425,000	1,405,859,000	1,380,838,281	178,445	1,380,659,836	98.22	25,199,164
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	12,816,607,000	13,949,302,000	13,863,433,020	1,231,140	13,862,201,880	99.38	87,100,120
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	193,089,000	0	0	0	0	0	0
511129	Belanja Uang Makan PNS	40,090,712,000	26,410,122,000	25,966,813,000	278,800	25,966,534,200	98.32	443,587,800
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	55,575,000	50,300,000	49,425,000	0	49,425,000	98.26	875,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	189,600,000	180,135,000	180,135,000	0	180,135,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,030,446,000	11,537,391,000	11,500,725,000	60,466,768	11,440,258,232	99.68	97,132,768
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	6,409,752,000	8,503,356,000	8,496,241,565	0	8,496,241,565	99.92	7,114,435
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,698,080,000	1,608,084,000	1,607,975,400	0	1,607,975,400	99.99	108,600
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	99,400,000	105,000,000	104,000,000	0	104,000,000	99.05	1,000,000
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,583,790,000	1,557,558,000	1,557,557,200	0	1,557,557,200	100	800
512211	Belanja Uang Lembur	5,407,408,000	4,056,625,000	3,845,992,750	6,079,150	3,839,913,600	94.81	216,711,400
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	399,943,930,000	341,140,208,000	339,583,055,964	12,726,669	339,570,329,295	99.54	1,569,878,705
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	814,935,844,000	753,178,241,000	750,297,194,941	232,370,561	750,064,824,380	99.62	2,648,675,498
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	151,948,646,000	157,340,310,000	157,036,931,334	12,893,678	157,024,037,656	99.81	316,272,344
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	62,241,232,000	46,079,087,000	45,789,786,393	0	45,789,786,393	99.37	289,300,607
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,215,390,000	3,135,653,000	3,103,718,891	0	3,103,718,891	98.98	31,934,109
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	973,120,000	816,696,000	727,602,795	0	727,602,795	89.09	89,093,205
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	28,154,663,000	19,455,782,000	19,168,610,700	93,727,900	19,074,882,800	98.52	380,899,200
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	43,427,932,000	34,709,928,000	34,586,220,525	37,740,034	34,548,480,491	99.64	161,447,509
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,854,373,000	10,087,809,000	10,028,194,198	0	10,028,194,198	99.41	59,614,802
521211	Belanja Bahan	105,705,922,000	70,560,603,000	69,691,321,722	12,030,612	69,679,291,110	98.77	881,311,890
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	28,162,586,000	21,664,531,000	21,389,248,300	37,254,500	21,351,993,800	98.73	312,537,200
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	153,938,146,000	141,842,533,000	141,728,629,767	12,107,400	141,716,522,367	99.92	126,010,633
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	196,000,000	0	0	0	0	0	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,261,263,000	6,166,943,000	5,622,244,253	26,094,068	5,596,150,185	91.17	570,792,815
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,537,491,000	16,041,886,000	16,030,519,176	0	16,030,519,176	99.93	11,366,824
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	2,160,000	850,000	810,000	0	810,000	95.29	40,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	206,000,000	432,150,000	432,009,600	0	432,009,600	99.97	140,400
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,693,132,000	13,537,464,000	13,516,292,232	0	13,516,292,232	99.84	21,171,768

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	35,853,933,000	29,823,502,000	29,506,242,545	0	29,506,242,545	98.94	317,259,455
522112	Belanja Langganan Telepon	1,939,334,000	537,795,000	520,287,596	4,208,220	516,079,376	96.74	21,715,624
522113	Belanja Langganan Air	5,495,248,000	4,265,002,000	4,239,524,551	0	4,239,524,551	99.4	25,477,449
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,155,050,000	1,164,971,000	1,157,778,995	0	1,157,778,995	99.38	7,192,005
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	36,585,787,000	37,951,976,000	37,821,601,840	0	37,821,601,840	99.66	130,374,160
522141	Belanja Sewa	52,737,168,000	63,013,039,000	62,889,369,553	0	62,889,369,553	99.8	123,669,447
522151	Belanja Jasa Profesi	61,356,126,000	29,399,003,000	28,446,760,125	65,687,000	28,381,073,125	96.76	1,017,929,875
522191	Belanja Jasa Lainnya	559,588,663,000	461,959,630,000	461,447,798,010	1,874,896,727	459,572,901,283	99.89	2,386,728,717
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,803,182,000	23,680,587,000	23,203,354,394	3,839,000	23,199,515,394	97.98	481,071,606
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55,726,177,000	66,524,197,000	66,727,450,292	284,877,035	66,442,573,257	100.31	81,623,743
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	541,625,000	782,225,000	781,012,886	0	781,012,886	99.85	1,212,114
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,901,000	1,900,800	0	1,900,800	99.99	200
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,605,756,000	2,315,820,000	2,307,395,880	0	2,307,395,880	99.64	8,424,120
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,959,259,000	36,048,947,000	35,939,307,099	11,661,600	35,927,645,499	99.7	121,301,501
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	467,950,000	742,230,000	735,855,137	0	735,855,137	99.14	6,374,863
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,000,000	32,997,000	32,997,000	0	32,997,000	100	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2,416,974,000	4,327,422,000	4,326,568,680	0	4,326,568,680	99.98	853,320
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	8,763,630,000	7,123,027,000	7,121,371,600	0	7,121,371,600	99.98	1,655,400
524111	Belanja Perjalanan Biasa	236,157,753,000	201,800,961,000	200,384,970,025	2,427,156,528	197,957,813,497	99.3	3,843,147,503
524112	Belanja Perjalanan Tetap	4,240,403,000	2,320,959,000	2,320,270,996	730,000	2,319,540,996	99.97	1,418,004
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,010,962,000	7,885,427,000	7,630,068,682	1,486,000	7,628,582,682	96.76	256,844,318
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	127,817,761,000	57,216,764,000	56,551,917,885	31,350,335	56,520,567,550	98.84	696,196,450
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	406,800,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51,377,371,000	23,502,049,000	23,345,370,248	229,614,866	23,115,755,382	99.33	386,293,618
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,613,121,000	533,977,000	533,808,055	148,303,502	385,504,553	99.97	148,472,447
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	515,200,000	505,348,000	0	505,348,000	98.09	9,852,000
526123	Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	1,600,000,000	0	0	0	0	0	0
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	2,695,002,000	2,695,002,000	2,547,714,000	0	2,547,714,000	94.53	147,288,000
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	110,745,700,000	164,511,434,000	164,449,176,186	0	164,449,176,186	99.96	62,257,814
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	880,000,000	0	0	0	0	0	0
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	Pandemi COVID-19							
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,006,605,000	1,005,295,895	0	1,005,295,895	99.87	1,309,105
	JUMLAH BELANJA BARANG	2,033,132,791,000	1,773,615,874,000	1,765,333,656,841	5,315,659,005	1,760,017,997,836	99.53	2,966,558,154
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97,506,220,000	87,624,007,000	87,557,104,535	9,997,900	87,547,106,635	99.92	76,900,365
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	200,000,000	0	0	0	0	0	0
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	360,625,000	360,465,750	0	360,465,750	99.96	159,250
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	4,828,890,000	2,410,778,000	2,407,985,085	0	2,407,985,085	99.88	2,792,915
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,376,636,000	54,634,479,000	54,618,106,714	0	54,618,106,714	99.97	16,372,286
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,481,512,000	4,827,169,000	4,818,095,740	0	4,818,095,740	99.81	9,073,260
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	198,000,000	0	0	0	0	0	0
536111	Belanja Modal Lainnya	29,782,788,000	15,094,359,000	15,078,965,041	0	15,078,965,041	99.9	15,393,959
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	296,124,000	296,100,672	0	296,100,672	99.99	23,328
	JUMLAH BELANJA MODAL	209,374,046,000	165,247,541,000	165,136,823,537	9,997,900	165,126,825,637	99.93	100,719,563
	JUMLAH RUPIAH MURNI	3,057,442,681,000	2,692,041,656,000	2,680,767,675,319	5,558,027,466	2,675,209,647,853	99.58	5,715,953,215
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	44,801,000	3,601,000	0	0	0	0	3,601,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,200,000	469,172,000	469,070,930	0	469,070,930	99.98	101,070
521211	Belanja Bahan	195,433,000	3,045,256,000	2,947,517,329	0	2,947,517,329	96.79	97,738,671
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,400,000	0	0	0	0	0	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,500,000	1,043,699,000	815,925,650	0	815,925,650	78.18	227,773,350
522131	Belanja Jasa Konsultan	49,958,206,000	83,652,741,000	83,400,083,231	0	83,400,083,231	99.7	252,657,769
522141	Belanja Sewa	961,158,000	2,257,176,000	2,162,748,545	0	2,162,748,545	95.82	94,427,455
522151	Belanja Jasa Profesi	96,101,000	1,660,401,000	1,313,130,000	0	1,313,130,000	79.09	347,271,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	54,289,251,000	21,894,196,000	21,264,362,802	0	21,264,362,802	97.12	629,833,198
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	61,000,000	221,096,000	161,337,390	0	161,337,390	72.97	59,758,610
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,497,233,000	4,520,792,000	4,148,992,078	78,829,782	4,070,162,296	91.78	450,629,704
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,500,000	0	0	0	0	0	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	800,517,000	8,037,911,000	7,489,766,164	0	7,489,766,164	93.18	548,144,836
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	588,306,000	17,516,609,000	13,979,558,155	191,344,110	13,788,214,045	79.81	3,728,394,955
	JUMLAH BELANJA BARANG	108,531,606,000	144,322,650,000	138,152,492,274	270,173,892	137,882,318,382	95.72	5,899,983,834
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	108,531,606,000	144,322,650,000	138,152,492,274	270,173,892	137,882,318,382	95.72	5,899,983,834
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	20,000,000	0	0	0	0	0	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,000,000	10,896,000	10,892,860	0	10,892,860	99.97	3,140
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	281,100,000	0	0	0	0	0	0
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	103,500,000	306,897,000	296,737,657	0	296,737,657	96.69	10,159,343
521211	Belanja Bahan	12,201,238,000	13,549,650,000	13,441,282,366	17,516,300	13,423,766,066	99.2	125,883,934
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,900,620,000	2,584,948,000	2,549,391,000	0	2,549,391,000	98.62	35,557,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,396,182,000	2,226,301,000	2,193,987,920	1,050,000	2,192,937,920	98.55	33,363,080
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	588,198,000	1,046,784,000	1,045,295,809	197,658	1,045,098,151	99.86	1,685,849
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,500,000	9,750,000	9,700,600	0	9,700,600	99.49	49,400
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	246,585,000	246,384,400	0	246,384,400	99.92	200,600
522141	Belanja Sewa	320,984,000	416,688,000	416,227,000	0	416,227,000	99.89	461,000
522151	Belanja Jasa Profesi	7,705,190,000	22,581,292,000	22,530,654,752	35,460,000	22,495,194,752	99.78	86,097,248
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	325,198,000	315,258,912	0	315,258,912	96.94	9,939,088
524111	Belanja Perjalanan Biasa	4,644,270,000	7,094,529,000	7,053,150,372	25,564,663	7,027,585,709	99.42	66,943,291
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	199,020,000	260,830,000	259,200,000	0	259,200,000	99.38	1,630,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	542,850,000	892,830,000	875,920,000	0	875,920,000	98.11	16,910,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,636,655,000	683,190,000	682,650,000	0	682,650,000	99.92	540,000
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	23,496,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	32,570,803,000	52,236,368,000	51,926,733,648	79,788,621	51,846,945,027	99.41	229,845,731
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3,354,955,000	3,337,348,841	0	3,337,348,841	99.48	17,606,159
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	28,100,000	28,100,000	0	28,100,000	100	0
536111	Belanja Modal Lainnya	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	30,000,000	3,413,055,000	3,395,448,841	0	3,395,448,841	99.48	17,606,159
	JUMLAH PNBP	32,600,803,000	55,649,423,000	55,322,182,489	79,788,621	55,242,393,868	99.41	247,451,890
09	HIBAH LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	0
521211	Belanja Bahan	295,537,000	792,676,000	741,630,050	0	741,630,050	93.56	51,045,950
522131	Belanja Jasa Konsultan	6,220,000,000	18,259,426,000	17,632,113,000	0	17,632,113,000	96.56	627,313,000
522141	Belanja Sewa	16,256,000	275,000,000	275,000,000	0	275,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	23,600,000	117,300,000	67,400,000	0	67,400,000	57.46	49,900,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,666,500,000	13,928,994,000	13,262,514,024	117,500,000	13,145,014,024	95.22	783,979,976
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	79,055,000	64,353,000	0	64,353,000	81.4	14,702,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	980,494,000	1,282,424,000	1,156,592,492	16,936,073	1,139,656,419	90.19	142,767,581
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,000,000	895,340,000	720,300,000	0	720,300,000	80.45	175,040,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	456,963,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	11,668,350,000	35,660,215,000	33,949,902,566	134,436,073	33,815,466,493	95.2	1,575,876,361

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
536111	Belanja Modal Lainnya	331,650,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	331,650,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI	12,000,000,000	35,660,215,000	33,949,902,566	134,436,073	33,815,466,493	95.2	1,575,876,361
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	0
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	4,344,681,000	4,344,681,000	0	4,344,681,000	100	0
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	0	63,142,800	63,142,702	0	63,142,702	100	98
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	81,798,000	81,797,798	0	81,797,798	100	202
522151	Belanja Jasa Profesi	0	165,100,000	165,100,000	0	165,100,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	518,799,500	518,799,500	0	518,799,500	100	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	188,863,200	188,863,099	0	188,863,099	100	101
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	951,703,500	951,703,500	0	951,703,500	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	555,402,000	555,402,000	0	555,402,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	2,524,809,000	2,524,808,599	0	2,524,808,599	100	401
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	14,135,000	14,135,000	0	14,135,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	14,135,000	14,135,000	0	14,135,000	100	0
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	2,538,944,000	2,538,943,599	0	2,538,943,599	100	401
	TOTAL	3,210,575,090,000	2,934,557,569,000	2,915,075,877,247	6,042,426,052	2,909,033,451,195	99.34	13,439,265,701

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PHLN MENURUT NOMOR REGISTER JENIS BELANJA DAN AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT NOMOR REGISTER / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_phln_akun_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
11DDKS1A								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,814,000	602,000	0	0	0	0	602,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000	100	0
521211	Belanja Bahan	4,327,000	4,487,000	1,714,422	0	1,714,422	38.21	2,772,578
522131	Belanja Jasa Konsultan	3,674,000,000	4,532,179,000	4,498,158,158	0	4,498,158,158	99.25	34,020,842
522141	Belanja Sewa	16,032,000	16,032,000	12,822,594	0	12,822,594	79.98	3,209,406
522151	Belanja Jasa Profesi	1,804,000	1,453,000	1,235,800	0	1,235,800	85.05	217,200
522191	Belanja Jasa Lainnya	289,448,000	106,766,000	106,103,450	0	106,103,450	99.38	662,550
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,338,000	1,515,024	0	1,515,024	64.8	822,976
524111	Belanja Perjalanan Biasa	93,891,000	55,273,000	54,432,353	0	54,432,353	98.48	840,647
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,505,000	0	0	0	0	0	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,815,000	14,293,000	14,228,400	0	14,228,400	99.55	64,600
52	JUMLAH BELANJA BARANG	4,112,636,000	4,735,093,000	4,691,880,201	0	4,691,880,201	99.09	43,212,799
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 11DDKS1A	4,112,636,000	4,735,093,000	4,691,880,201	0	4,691,880,201	99.09	43,212,799
1CPUK3GA								
521211	Belanja Bahan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	0	19,200,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,143,700,000	8,740,000,000	8,740,000,000	0	8,740,000,000	100	0
522141	Belanja Sewa	223,750,000	311,500,000	305,350,000	0	305,350,000	98.03	6,150,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,426,000,000	3,418,428,000	3,398,701,018	0	3,398,701,018	99.42	19,726,982
524111	Belanja Perjalanan Biasa	257,350,000	274,460,000	274,459,938	0	274,459,938	100	62
52	JUMLAH BELANJA BARANG	9,070,000,000	12,763,588,000	12,737,710,956	0	12,737,710,956	99.8	25,877,044
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1CPUK3GA	9,070,000,000	12,763,588,000	12,737,710,956	0	12,737,710,956	99.8	25,877,044
1CZ6CF2A								
521211	Belanja Bahan	0	2,529,621,000	2,440,821,629	0	2,440,821,629	96.49	88,799,371
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	0	1,043,699,000	815,925,650	0	815,925,650	78.18	227,773,350
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	2,473,022,000	2,398,750,000	0	2,398,750,000	97	74,272,000
522141	Belanja Sewa	0	1,012,068,000	970,122,000	0	970,122,000	95.86	41,946,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	1,476,600,000	1,149,230,000	0	1,149,230,000	77.83	327,370,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	40,000,000,000	6,349,050,000	5,773,910,817	0	5,773,910,817	90.94	575,139,183
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	3,004,420,000	2,645,741,970	0	2,645,741,970	88.06	358,678,030
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	4,890,235,000	4,382,555,624	0	4,382,555,624	89.62	507,679,376
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	17,221,285,000	13,707,545,311	0	13,707,545,311	79.6	3,513,739,689
52	JUMLAH BELANJA BARANG	40,000,000,000	40,000,000,000	34,284,603,001	0	34,284,603,001	85.71	5,715,396,999
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1CZ6CF2A	40,000,000,000	40,000,000,000	34,284,603,001	0	34,284,603,001	85.71	5,715,396,999
1HFQ7GNA								
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3,200,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	16,710,000	164,081,000	163,973,800	0	163,973,800	99.93	107,200
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	3,750,000,000	3,750,000,000	0	3,750,000,000	100	0
522141	Belanja Sewa	164,000,000	278,700,000	278,600,000	0	278,600,000	99.96	100,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,400,000	77,300,000	62,800,000	0	62,800,000	81.24	14,500,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT NOMOR REGISTER / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:24 AM

Prg ID : lap_lra_bel_phln_akun_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522191	Belanja Jasa Lainnya	702,000,000	2,907,000,000	2,896,990,000	0	2,896,990,000	99.66	10,010,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	44,400,000	15,593,890	0	15,593,890	35.12	28,806,110
524111	Belanja Perjalanan Biasa	75,040,000	279,080,000	278,407,271	0	278,407,271	99.76	672,729
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28,650,000	736,890,000	710,040,000	0	710,040,000	96.36	26,850,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	295,324,000	272,012,844	0	272,012,844	92.11	23,311,156
52	JUMLAH BELANJA BARANG	1,000,000,000	8,532,775,000	8,428,417,805	0	8,428,417,805	98.78	104,357,195
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1HFQ7GNA	1,000,000,000	8,532,775,000	8,428,417,805	0	8,428,417,805	98.78	104,357,195
1HG72SWA								
522131	Belanja Jasa Konsultan	500,000,000	0	0	0	0	0	0
52	JUMLAH BELANJA BARANG	500,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1HG72SWA	500,000,000	0	0	0	0		0
1HS4NF9A								
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	228,220,000	228,169,500	0	228,169,500	99.98	50,500
521211	Belanja Bahan	56,454,000	147,030,000	147,007,325	0	147,007,325	99.98	22,675
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,200,000	0	0	0	0	0	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	6,096,955,000	14,219,995,000	14,219,994,983	0	14,219,994,983	100	17
522141	Belanja Sewa	141,204,000	147,204,000	144,720,000	0	144,720,000	98.31	2,484,000
522151	Belanja Jasa Profesi	34,750,000	44,850,000	44,700,000	0	44,700,000	99.67	150,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,029,738,000	1,702,013,000	1,701,896,650	0	1,701,896,650	99.99	116,350
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	30,500,000	69,976,000	61,699,750	0	61,699,750	88.17	8,276,250
524111	Belanja Perjalanan Biasa	185,000,000	140,187,000	140,174,235	0	140,174,235	99.99	12,765
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	293,243,000	1,130,524,000	1,124,185,270	0	1,124,185,270	99.44	6,338,730
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	294,153,000	0	0	0	0	0	0
52	JUMLAH BELANJA BARANG	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1HS4NF9A	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
1NF3PM6A								
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	228,220,000	228,169,500	0	228,169,500	99.98	50,500
521211	Belanja Bahan	56,454,000	147,030,000	147,007,325	0	147,007,325	99.98	22,675
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,200,000	0	0	0	0	0	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	6,096,955,000	14,219,995,000	14,219,994,983	0	14,219,994,983	100	17
522141	Belanja Sewa	141,204,000	147,204,000	144,720,000	0	144,720,000	98.31	2,484,000
522151	Belanja Jasa Profesi	34,750,000	44,850,000	44,700,000	0	44,700,000	99.67	150,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,029,738,000	1,702,013,000	1,701,896,650	0	1,701,896,650	99.99	116,350
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	30,500,000	69,976,000	61,699,750	0	61,699,750	88.17	8,276,250
524111	Belanja Perjalanan Biasa	185,000,000	140,187,000	140,174,235	0	140,174,235	99.99	12,765
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	293,243,000	1,130,524,000	1,124,185,270	0	1,124,185,270	99.44	6,338,730
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	294,153,000	0	0	0	0	0	0
52	JUMLAH BELANJA BARANG	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1NF3PM6A	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
1PF7SCLA								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT NOMOR REGISTER / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:24 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_phln_akun_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,732,000	2,731,930	0	2,731,930	100	70
521211	Belanja Bahan	10,710,000	9,800,000	9,791,250	0	9,791,250	99.91	8,750
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	6,500,000	0	0	0	0	0	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	100,000	0	0	0	0	100,000
522141	Belanja Sewa	36,000,000	132,000,000	132,000,000	0	132,000,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	860,238,000	3,716,678,000	3,716,248,500	0	3,716,248,500	99.99	429,500
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5,144,000	5,063,000	0	5,063,000	98.43	81,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	36,552,000	127,224,000	126,130,895	0	126,130,895	99.14	1,093,105
52	JUMLAH BELANJA BARANG	1,000,000,000	3,993,678,000	3,991,965,575	0	3,991,965,575	99.96	1,712,425
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1PF7SCLA	1,000,000,000	3,993,678,000	3,991,965,575	0	3,991,965,575	99.96	1,712,425
1RUX78CA								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,000,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	10,000,000	11,614,000	9,450,000	0	9,450,000	81.37	2,164,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	10,070,596,000	13,182,038,000	13,182,037,087	0	13,182,037,087	100	913
522141	Belanja Sewa	159,000,000	132,500,000	110,454,545	0	110,454,545	83.36	22,045,455
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	8,100,000	4,300,000	0	4,300,000	53.09	3,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,508,332,000	1,459,710,000	1,439,369,167	0	1,439,369,167	98.61	20,340,833
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	17,600,000	8,209,000	0	8,209,000	46.64	9,391,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	195,392,000	224,268,000	217,961,302	0	217,961,302	97.19	6,306,698
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	0	0	0	0	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42,780,000	64,170,000	63,600,000	0	63,600,000	99.11	570,000
52	JUMLAH BELANJA BARANG	12,000,000,000	15,100,000,000	15,035,381,101	0	15,035,381,101	99.57	64,618,899
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1RUX78CA	12,000,000,000	15,100,000,000	15,035,381,101	0	15,035,381,101	99.57	64,618,899
1Z83YQPA								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	33,987,000	2,999,000	0	0	0	0	2,999,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	8,330,000	8,330,000	0	8,330,000	100	0
521211	Belanja Bahan	21,578,000	12,393,000	8,551,578	0	8,551,578	69	3,841,422
522131	Belanja Jasa Konsultan	18,326,000,000	22,535,412,000	22,391,148,020	0	22,391,148,020	99.36	144,263,980
522141	Belanja Sewa	79,968,000	79,968,000	63,959,406	0	63,959,406	79.98	16,008,594
522151	Belanja Jasa Profesi	8,997,000	7,248,000	6,164,200	0	6,164,200	85.05	1,083,800
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,443,757,000	532,538,000	529,246,550	0	529,246,550	99.38	3,291,450
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	11,662,000	7,556,976	0	7,556,976	64.8	4,105,024
524111	Belanja Perjalanan Biasa	469,008,000	275,693,000	271,509,879	0	271,509,879	98.48	4,183,121
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,495,000	0	0	0	0	0	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	118,786,000	71,275,000	70,971,600	0	70,971,600	99.57	303,400
52	JUMLAH BELANJA BARANG	20,514,576,000	23,537,518,000	23,357,438,209	0	23,357,438,209	99.23	180,079,791
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1Z83YQPA	20,514,576,000	23,537,518,000	23,357,438,209	0	23,357,438,209	99.23	180,079,791
278EATNA								
536111	Belanja Modal Lainnya	331,650,000	0	0	0	0	0	0
53	JUMLAH BELANJA MODAL	331,650,000	0	0	0	0		0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT NOMOR REGISTER / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:24 AM

Prg ID : lap_lra_bel_phln_akun_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	0
521211	Belanja Bahan	295,537,000	711,076,000	711,022,550	0	711,022,550	99.99	53,450
522131	Belanja Jasa Konsultan	5,720,000,000	16,557,688,000	16,557,688,000	0	16,557,688,000	100	0
522141	Belanja Sewa	16,256,000	275,000,000	275,000,000	0	275,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	23,600,000	38,900,000	38,900,000	0	38,900,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,166,500,000	2,382,860,000	2,380,633,685	0	2,380,633,685	99.91	2,226,315
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	79,055,000	64,353,000	0	64,353,000	81.4	14,702,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	980,494,000	1,056,168,000	1,052,859,602	0	1,052,859,602	99.69	3,308,398
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,000,000	440,140,000	419,500,000	0	419,500,000	95.31	20,640,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	456,963,000	0	0	0	0	0	0
52	JUMLAH BELANJA BARANG	10,668,350,000	21,570,887,000	21,529,956,837	0	21,529,956,837	99.81	40,930,163
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 278EATNA	11,000,000,000	21,570,887,000	21,529,956,837	0	21,529,956,837	99.81	40,930,163
2B7K43PA								
521211	Belanja Bahan	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	500,000,000	795,200,000	724,800,000	0	724,800,000	185.71	70,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	500,000,000	11,546,134,000	10,881,880,339	0	10,881,880,339	191.69	664,253,661
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	36,000,000	34,200,000	0	34,200,000	95	1,800,000
52	JUMLAH BELANJA BARANG	1,000,000,000	12,384,534,000	11,648,080,339	0	11,648,080,339	94.05	736,453,661
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 2B7K43PA	1,000,000,000	12,384,534,000	11,648,080,339	0	11,648,080,339	94.05	736,453,661
2FPJR4SA								
521211	Belanja Bahan	0	74,400,000	23,407,500	0	23,407,500	31.46	50,992,500
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	906,538,000	349,625,000	0	349,625,000	38.57	556,913,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	78,400,000	28,500,000	0	28,500,000	36.35	49,900,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	226,256,000	103,732,890	0	103,732,890	45.85	122,523,110
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	419,200,000	266,600,000	0	266,600,000	63.6	152,600,000
52	JUMLAH BELANJA BARANG	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 2FPJR4SA	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
Register								
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	0	0	117,500,000	-117,500,000	0	117,500,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	95,765,855	-95,765,855	0	95,765,855
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	191,344,110	-191,344,110	0	191,344,110
52	JUMLAH BELANJA BARANG	0	0	0	404,609,965	-404,609,965		404,609,965
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER Register Tidak Ada	0	0	0	404,609,965	-404,609,965		404,609,965
	JUMLAH PHLN	120,531,606,000	179,982,865,000	172,102,394,840	404,609,965	171,697,784,875	95.62	8,285,080,125

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PHLN MENURUT NOMOR REGISTER PROGRAM KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT NOMOR REGISTER / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_phln_pkeg_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
-								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	0	0	0	117,500,000	-117,500,000		117,500,000
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	50,867,426	-50,867,426		50,867,426
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	0	0	236,242,539	-236,242,539		236,242,539
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	0	0	0	404,609,965	-404,609,965		404,609,965
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER -	0	0	0	404,609,965	-404,609,965		404,609,965
11DDKS1A								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	4,112,636,000	4,735,093,000	4,691,880,201	0	4,691,880,201	99.09	43,212,799
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	4,112,636,000	4,735,093,000	4,691,880,201	0	4,691,880,201	99.09	43,212,799
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 11DDKS1A	4,112,636,000	4,735,093,000	4,691,880,201	0	4,691,880,201	99.09	43,212,799
1CPUK3GA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	9,070,000,000	12,763,588,000	12,737,710,956	0	12,737,710,956	99.8	25,877,044
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	9,070,000,000	12,763,588,000	12,737,710,956	0	12,737,710,956	99.8	25,877,044
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1CPUK3GA	9,070,000,000	12,763,588,000	12,737,710,956	0	12,737,710,956	99.8	25,877,044
1CZ6CF2A								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6138	Penataan kelembagaan Desa	40,000,000,000	0	0	0	0		0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT NOMOR REGISTER / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:24 AM

Prg ID : lap_lra_bel_phln_pkeg_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
6484	Nama Kegiatan Tidak Ada	0	40,000,000,000	34,284,603,001	0	34,284,603,001	85.71	5,715,396,999
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	40,000,000,000	40,000,000,000	34,284,603,001	0	34,284,603,001	85.71	5,715,396,999
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1CZ6CF2A	40,000,000,000	40,000,000,000	34,284,603,001	0	34,284,603,001	85.71	5,715,396,999
1HFQ7GNA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	1,000,000,000	8,532,775,000	8,428,417,805	0	8,428,417,805	98.78	104,357,195
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	1,000,000,000	8,532,775,000	8,428,417,805	0	8,428,417,805	98.78	104,357,195
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1HFQ7GNA	1,000,000,000	8,532,775,000	8,428,417,805	0	8,428,417,805	98.78	104,357,195
1HG72SWA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	500,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	500,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1HG72SWA	500,000,000	0	0	0	0		0
1HS4NF9A								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1HS4NF9A	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
1NF3PM6A								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT NOMOR REGISTER / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:24 AM

Prg ID : lap_lra_bel_phln_pkeg_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1NF3PM6A	10,167,197,000	17,829,999,000	17,812,547,713	0	17,812,547,713	99.9	17,451,287
1PF7SCLA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	1,000,000,000	3,993,678,000	3,991,965,575	0	3,991,965,575	99.96	1,712,425
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	1,000,000,000	3,993,678,000	3,991,965,575	0	3,991,965,575	99.96	1,712,425
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1PF7SCLA	1,000,000,000	3,993,678,000	3,991,965,575	0	3,991,965,575	99.96	1,712,425
1RUX78CA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	12,000,000,000	15,100,000,000	15,035,381,101	0	15,035,381,101	99.57	64,618,899
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	12,000,000,000	15,100,000,000	15,035,381,101	0	15,035,381,101	99.57	64,618,899
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1RUX78CA	12,000,000,000	15,100,000,000	15,035,381,101	0	15,035,381,101	99.57	64,618,899
1Z83YQPA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	20,514,576,000	23,537,518,000	23,357,438,209	0	23,357,438,209	99.23	180,079,791
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	20,514,576,000	23,537,518,000	23,357,438,209	0	23,357,438,209	99.23	180,079,791
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 1Z83YQPA	20,514,576,000	23,537,518,000	23,357,438,209	0	23,357,438,209	99.23	180,079,791
278EATNA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT NOMOR REGISTER / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/04/22 1:24 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_phln_pkeg_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	11,000,000,000	21,570,887,000	21,529,956,837	0	21,529,956,837	99.81	40,930,163
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	11,000,000,000	21,570,887,000	21,529,956,837	0	21,529,956,837	99.81	40,930,163
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 278EATNA	11,000,000,000	21,570,887,000	21,529,956,837	0	21,529,956,837	99.81	40,930,163
2B7K43PA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	500,000,000	8,518,781,000	7,785,869,791	0	7,785,869,791	91.4	732,911,209
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	500,000,000	3,865,753,000	3,862,210,548	0	3,862,210,548	99.91	3,542,452
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	1,000,000,000	12,384,534,000	11,648,080,339	0	11,648,080,339	94.05	736,453,661
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 2B7K43PA	1,000,000,000	12,384,534,000	11,648,080,339	0	11,648,080,339	94.05	736,453,661
2FPJR4SA								
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CM	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
	JUMLAH BELANJA PHLN REGISTER 2FPJR4SA	0	1,704,794,000	771,865,390	0	771,865,390	45.28	932,928,610
JUMLAH PHLN		120,531,606,000	179,982,865,000	172,102,394,840	404,609,965	171,697,784,875	95.62	8,285,080,125

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT KELOMPOK AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222,555,998	0	222,555,998	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	151,380,000	1,454,395,544	0	1,454,395,544	960.76
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	610,570,000	1,706,910,469	0	1,706,910,469	279.56
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	761,950,000	3,383,862,011	0	3,383,862,011	444.11
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	20,413,000	24,812,500	0	24,812,500	121.55
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	20,413,000	24,812,500	0	24,812,500	121.55
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	252,500,000	292,596,499	0	292,596,499	115.88
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	15,471,500,000	14,060,542,123	0	14,060,542,123	90.88
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	787,675,000	513,612,000	0	513,612,000	65.21
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	53,054,007,000	88,058,715,000	254,158,000	87,804,557,000	165.5
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	286,500,000	0	286,500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	69,565,682,000	103,211,965,622	254,158,000	102,957,807,622	148
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	38,570	0	38,570	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	32,674,998	0	32,674,998	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	32,713,568	0	32,713,568	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,660,765,539	0	1,660,765,539	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,660,765,539	0	1,660,765,539	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	142,182,781	0	142,182,781	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	19,663,304,119	0	19,663,304,119	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	547,081,805	0	547,081,805	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	380,000	0	380,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,937,130	0	1,937,130	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	20,354,885,835	0	20,354,885,835	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	70,348,045,000	128,669,005,075	254,158,000	128,414,847,075	182.54
	JUMLAH PENDAPATAN	70,348,045,000	128,669,005,075	254,158,000	128,414,847,075	182.54

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT SATUAN KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	0	269,134,217	0	269,134,217	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	269,134,217	0	269,134,217	
010010100K	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA					
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	729,950,000	4,401,700,635	0	4,401,700,635	603.01
	JUMLAH PENDAPATAN 010010100KP BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	729,950,000	4,401,700,635	0	4,401,700,635	603.01
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	670,759,698	0	670,759,698	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	670,759,698	0	670,759,698	
010010200K	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT					
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	16,547,588,000	15,741,056,354	0	15,741,056,354	95.13
	JUMLAH PENDAPATAN 010010200KP BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	16,547,588,000	15,741,056,354	0	15,741,056,354	95.13
010010800K	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT					
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	0	2,046,101	0	2,046,101	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010010800KD BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	0	2,046,101	0	2,046,101	
010011300K	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT					
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	0	258,538,438	0	258,538,438	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011300KD BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	0	258,538,438	0	258,538,438	
010011700K	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA					
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	0	197,995,685	0	197,995,685	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011700KD BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	197,995,685	0	197,995,685	
010011900K	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	0	62,199,057	0	62,199,057	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011900KD BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	62,199,057	0	62,199,057	
010012300K	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT					
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	0	90,370,007	0	90,370,007	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012300KD BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	0	90,370,007	0	90,370,007	
010012500K	BA(010) ES1(01) PAPUA					
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	0	209	0	209	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012500KD BA(010) ES1(01) PAPUA	0	209	0	209	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	17,277,538,000	21,693,800,401	0	21,693,800,401	125.56
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
010020100K	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA					
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	0	481,422,680	0	481,422,680	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010020100KP BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	0	481,422,680	0	481,422,680	
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	481,422,680	0	481,422,680	
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM					
010030100K	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA					
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	140,951,210	0	140,951,210	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010030100KP BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	0	140,951,210	0	140,951,210	
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	140,951,210	0	140,951,210	
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
010040100K	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA					
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	584,003,979	0	584,003,979	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010040100KP BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	0	584,003,979	0	584,003,979	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	0	3,970,500	0	3,970,500	0
484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	1,816,374	0	1,816,374	0
239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	2,000,000	0	2,000,000	0
339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	0	10,413,871	0	10,413,871	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	18,200,745	0	18,200,745	
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	602,204,724	0	602,204,724	
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA					
010050100K	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA					
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	0	1,522,612,623	0	1,522,612,623	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010050100KP BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	0	1,522,612,623	0	1,522,612,623	
010050400K	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA					
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	0	110,478,000	0	110,478,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010050400KD BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	0	110,478,000	0	110,478,000	
010050500K	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR					
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	16,500,000	39,520,832	0	39,520,832	239.52
	JUMLAH PENDAPATAN 010050500KD BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	16,500,000	39,520,832	0	39,520,832	239.52
010051200K	BA(010) ES1(05) LAMPUNG					
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	0	46,474,116	0	46,474,116	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010051200KD BA(010) ES1(05) LAMPUNG	0	46,474,116	0	46,474,116	
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	16,500,000	1,719,085,571	0	1,719,085,571	10,418.7
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
010060100K	Kode UAPPAW Tidak Ada					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	6,528,989,268	0	6,528,989,268	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010060100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	0	6,528,989,268	0	6,528,989,268	
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	6,528,989,268	0	6,528,989,268	
07	DITJEN OTONOMI DAERAH					
010070100K	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA					
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	0	204,678,667	0	204,678,667	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010070100KP BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	0	204,678,667	0	204,678,667	
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	204,678,667	0	204,678,667	
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
010080100K	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA					
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	7,678,048,214	0	7,678,048,214	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010080100KP BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	0	7,678,048,214	0	7,678,048,214	
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	7,678,048,214	0	7,678,048,214	
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH					
010090100K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	0	111,346,316	0	111,346,316	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010090100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	0	111,346,316	0	111,346,316	
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	111,346,316	0	111,346,316	
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
010110100K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	296,526,822	0	296,526,822	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010110100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	0	296,526,822	0	296,526,822	
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	296,526,822	0	296,526,822	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
010120100K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8,779,642,000	9,577,608,945	45,000,000	9,532,608,945	108.58
	JUMLAH PENDAPATAN 010120100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	8,779,642,000	9,577,608,945	45,000,000	9,532,608,945	109.09
010120200K	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT					
403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	5,185,549,000	22,087,435,458	0	22,087,435,458	425.94
	JUMLAH PENDAPATAN 010120200KD BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	5,185,549,000	22,087,435,458	0	22,087,435,458	425.94
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0	9,248,500	0	9,248,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	9,248,500	0	9,248,500	
010120400K	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA					
027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	19,921,836,000	33,044,298,874	209,158,000	32,835,140,874	164.82
	JUMLAH PENDAPATAN 010120400KD BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	19,921,836,000	33,044,298,874	209,158,000	32,835,140,874	165.87
010120800K	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT					
506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	11,446,573,000	15,623,492,426	0	15,623,492,426	136.49
	JUMLAH PENDAPATAN 010120800KD BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	11,446,573,000	15,623,492,426	0	15,623,492,426	136.49
010121900K	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN					
027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	7,720,407,000	8,869,866,999	0	8,869,866,999	114.89
	JUMLAH PENDAPATAN 010121900KD BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	7,720,407,000	8,869,866,999	0	8,869,866,999	114.89
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53,054,007,000	89,211,951,202	254,158,000	88,957,793,202	168.15
	JUMLAH PENDAPATAN	70,348,045,000	128,669,005,075	254,158,000	128,414,847,075	182.9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT ESELON I AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 23/04/22 1:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222,555,998	0	222,555,998	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	151,380,000	509,273,999	0	509,273,999	336.42
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	610,570,000	1,233,035,469	0	1,233,035,469	201.95
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	3,913,000	0	0	0	0
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	252,500,000	292,596,499	0	292,596,499	115.88
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	15,471,500,000	14,060,542,123	0	14,060,542,123	90.88
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	787,675,000	513,612,000	0	513,612,000	65.21
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,562,112,974	0	1,562,112,974	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	64,689,250	0	64,689,250	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,781,778,844	0	2,781,778,844	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	453,222,155	0	453,222,155	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	380,000	0	380,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,090	0	1,090	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	17,277,538,000	21,693,800,401	0	21,693,800,401	125.56
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	473,622,000	0	473,622,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,402,704	0	2,402,704	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,397,976	0	5,397,976	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	481,422,680	0	481,422,680	
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	22,011,100	0	22,011,100	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,522,091	0	3,522,091	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	55,871,737	0	55,871,737	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	59,546,282	0	59,546,282	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN	0	140,951,210	0	140,951,210	
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	22,743,000	0	22,743,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,619	0	1,619	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	543,330,363	0	543,330,363	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	34,313,368	0	34,313,368	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,816,374	0	1,816,374	0
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI	0	602,204,724	0	602,204,724	
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	139,025,000	0	139,025,000	0
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	16,500,000	24,812,500	0	24,812,500	150.38
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	38,570	0	38,570	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,775,787	0	2,775,787	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,552,433,714	0	1,552,433,714	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	16,500,000	1,719,085,571	0	1,719,085,571	10,418.7
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	203,800,000	0	203,800,000	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	12,200,000	0	12,200,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	12,165,565	0	12,165,565	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	190,943	0	190,943	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,300,632,760	0	6,300,632,760	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	6,528,989,268	0	6,528,989,268	
07	DITJEN OTONOMI DAERAH					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	665	0	665	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	204,678,002	0	204,678,002	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	204,678,667	0	204,678,667	
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	679,999	0	679,999	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	31,817,500	0	31,817,500	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	923,530	0	923,530	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,644,627,185	0	7,644,627,185	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN	0	7,678,048,214	0	7,678,048,214	
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	99,303,447	0	99,303,447	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	11,374,998	0	11,374,998	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	667,871	0	667,871	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	111,346,316	0	111,346,316	
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	251,082,000	0	251,082,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	45,444,822	0	45,444,822	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENELITIAN DAN	0	296,526,822	0	296,526,822	
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	75,679,999	0	75,679,999	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	131,050,000	0	131,050,000	0
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	53,054,007,000	88,058,715,000	254,158,000	87,804,557,000	165.5
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	286,500,000	0	286,500,000	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	9,100,000	0	9,100,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	54,669,500	0	54,669,500	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,563,499	0	21,563,499	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	574,553,538	0	574,553,538	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	119,666	0	119,666	0
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	53,054,007,000	89,211,951,202	254,158,000	88,957,793,202	168.15
	JUMLAH PENDAPATAN	70,348,045,000	128,669,005,075	254,158,000	128,414,847,075	182.9

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TA 2021 *AUDITED*

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT KL

PERIODE TA. 2021 *AUDITED*

Kode BA dan Nama BA : 010 Kementerian Dalam Negeri

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. ***Jika tidak ada data, isi dengan N/A***			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, ***agar diuraikan pada lembar lampiran***			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok *(Hardcopy)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP	V		Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE *face*	V		Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Neraca Percobaan Akrual	V		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	V		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	V		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca *Balance*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah Satker Neracanya tidak *balance* ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak *Balance* "		V	Tidak
Saldo antar Laporan	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah Nilai *"Surplus/(Defisit)-LO"* di LO = Nilai *"Surplus/ (Defisit) - LO"* di LPE	V		Sama
3. Apakah Saldo *"Ekuitas Akhir"* di LPE = *"Saldo Ekuitas"* di Neraca	V		Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (*Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)*		V	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (*Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"*		V	Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		V	Tidak
2 Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? *(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)*		V	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi **dibayar dimuka** *(prepaid)*		V	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 **Uang Muka Belanja** Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain **Yang Masih Harus Dibayar**		V	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (*Cek di Neraca Percobaan saldo awal*)		V	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (*untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)*	-	-	Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 **tidak sama** saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Tidak
Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	-	-	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		V	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		V	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		V	Ada/Tidak
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	V		Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	V		Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	V		Ya
*saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai **aset** yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon*			

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)	
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	95.725.066.250
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?	
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	(14.974.726.829)

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan *kecuali BA.015.04 ?*		V	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru *(Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 423xxx		V	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		V	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		V	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		V	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		V	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, *misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan*		V	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? *seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)*		V	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		V	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		V	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? *(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?*	-	-	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		V	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		V	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (*cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal*)		V	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		V	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		V	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			1.683.800
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			120.287.300
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			(118.603.500)
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		V	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.				
5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		V	Tidak
Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar *dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07*				
6..	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	V		Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	V		Ya

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		V	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		V	Tidak
3. Adakah beban bunga		V	Tidak
4. Adakah beban subsidi		V	Tidak
5. Adakah beban hibah		V	Tidak
6. Adakah beban transfer		V	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		V	Tidak

Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (*saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi*)		V	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	V		Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang ***dapat*** *bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).*

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang *sesuai Perdirjen 43/2015*	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* - Saldo Akhir Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* = Beban Penyisihan Piutang LO		V	Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		V	Tidak

Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.

2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	V		Ya

Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?	V		Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

3. Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		V	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?		V	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	**N/A**	**N/A**	Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	**V**		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	**V**		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	**V**		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	**V**		Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	**V**		Ada
Pengecekan persediaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	**V**		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	**V**		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	**V**		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	**V**		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	**V**		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	**V**		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	**V**		Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?	**V**		Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?	**V**		Ya
7. Adakah beban bansos?		**V**	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	-	-	Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	**V**		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	**V**		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?	**V**		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	**V**		Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	**V**		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	**V**		Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	**Ya/Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		**V**	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?	**V**		Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	**V**		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	**V**		Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (*Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN"*)	N/A	N/A	

MENU DAFTAR BMN	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak	N/A	N/A
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			-
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			-
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak	N/A	N/A
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			-
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? *(Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")*		V	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja *"tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?*		V	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		V	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		V	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	-	-	
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	-	-	
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara *Stock Opname* Persediaan ?	N/A	N/A	Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	N/A	N/A	Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan	N/A	N/A	Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	N/A	N/A	Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung?	N/A	N/A	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	-	-	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	-	-	Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	V		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	**Ya/Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	V		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	V		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	V		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A	N/A	Ada
Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	-	-	Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	V		Ya
9 Apakah belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	V		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional		V	Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang		V	Ya
3 Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021		V	Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (***rumus perhitungan beban persediaan terlampir***)		V	Ya

Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas *Refocussing* kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19	V		
2. Jika terdapat *Refocussing* kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp 43.857.372.000,00		
3 Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19	V		
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19	V		
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19	-	-	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	V		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	**Ada**	**Tidak**	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19	V		
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19	V		
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	V		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas	**Ada**	**Tidak**	
10. Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.	-	-	

11. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	V		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca	**Ada**	**Tidak**	
12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :			
a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-	
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-	
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-	
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan			
13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :			
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-	
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19	-	-	

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

1 *Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK sebesar Rp95.725.066.250,00 disebabkan sebagai berikut:*

a. selisih sebesar Rp546.199.580,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik Ditjen Bina Pemdes yang digunakan oleh Ditjen Dukcapil sebesar Rp273.099.790,00 sehingga pada saat ATR diserahterimakan, Ditjen Dukcapil mencatat transfer keluar ATR sebesar Rp273.099.790,00 dan Ditjen Bina Pemdes mencatat transfer masuk gedung dan bangunan sebesar Rp273.099.790,00;
b. selisih sebesar Rp29.949.453.658,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik IPDN Jatinangor yang digunakan oleh Direktorat Prasarana Strategis (Kementerian PUPR) sebesar Rp14.974.726.829,00 sehingga pada saat ATR diserahterimakan, Direktorat Prasarana Strategis (Kementerian PUPR) mencatat transfer keluar ATR sebesar Rp14.974.726.829,00 dan IPDN Jatinangor mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.974.726.829,00;
c. selisih sebesar Rp414.171.944,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik Setjen yang digunakan oleh Ditjen Bina Keuda sebesar Rp207.085.972,00 sehingga pada saat ATR diserahterimakan, Ditjen Bina Keuda mencatat transfer keluar ATR sebesar Rp207.085.972,00 dan Setjen mencatat transfer masuk gedung dan bangunan sebesar Rp207.085.972,00;

d. selisih sebesar Rp412.815.920,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik Setjen yang digunakan oleh Ditjen Otda sebesar Rp206.407.960,00 sehingga pada saat ATR diserahterimakan, Ditjen Otda mencatat transfer keluar ATR sebesar Rp206.407.960,00 dan Setjen mencatat transfer masuk gedung dan bangunan sebesar Rp206.407.960,00;

e. selisih sebesar Rp1.337.537.794,00 disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan milik Setjen oleh yang digunakan Ditjen Polpum sebesar Rp668.768.897,00 sehingga pada saat ATR diserahterimakan, Ditjen Polpum mencatat transfer keluar ATR sebesar Rp668.768.897,00 dan Setjen mencatat transfer masuk gedung dan bangunan sebesar Rp668.768.897,00;

f. terdapat selisih sebesar Rp1.573.775.780,00 pada satker Ditjen Otda disebabkan adanya kesalahan dalam proses olah data pada aplikasi E-Rekon&LK G2 Sekretariat Daerah Kab. Solok (080435) dan Dinas Kesehatan Kab.Takalar (191555) kepada Satker Ditjen Otda dengan penjelasan sebagai berikut:
1). Satker Sekretariat Daerah Kab. Solok mencatat transfer keluar sebesar Rp274.817.795,00, namun Ditjen Otda mencatat transfer masuk sebesar Rp786.887.890,00;
2). Dinas Kesehatan Kab.Takalar mencatat transfer keluar sebesar Rp786.887.890,00, namun Ditjen Otda mencatat transfer masuk sebesar nihil:
3) . Ditjen Otda mencatat transfer keluar sebesar nihil dan mencatat transfer masuk sebesar Rp274.817.795,00.

Pengalihan aset tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB);

g. terdapat selisih sebesar Rp20.976.004.946,00 disebabkan adanya pencatatan transfer keluar aset yang dihentikan dari penggunaan sebesar Rp10.448.002.473,00 oleh 5 satker inaktif dan pencatatan transfer masuk berupa peralatan dan mesin serta software sebesar Rp10.448.002.473,00 oleh Ditjen Otda. Pengalihan aset tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB);

h. terdapat selisih sebesar Rp40.272.232.628,00 disebabkan adanya pencatatan transfer keluar Persediaan, Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp20.257.553.314,00 oleh 56 satker inaktif Ditjen Bina Bangda dan pencatatan transfer masuk berupa Persediaan, Peralatan dan Mesin, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp20.257.553.314,00 oleh Ditjen Bangda. Pengalihan aset tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB);

i. terdapat selisih sebesar Rp242.874.000,00 disebabkan adanya pencatatan transfer keluar Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp121.437.000,00 pada 2 satker inaktif Ditjen Bina Bangda yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kab. Tapanuli Tengah (090.01.070441) serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mamuju Utara (090.01.340325) dan pencatatan transfer masuk berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp121.437.000,00 oleh Ditjen Bangda. Kode satker inaktif tersebut tercatat sebagai satker Kementerian Perdagangan pada referensi Aplikasi E-Rekon&LK sehingga menu Transfer Keluar/Transfer Masuk menyajikan kode satker tersebut bukan sebagai satker Kemendagri (BA 010). Pengalihan aset tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB);

2 *Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan sebesar Rp14.974.726.829,00 berasal dari penyerahan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan milik IPDN Jatinangor yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Renovasi (ATR) oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Direktorat Prasarana Strategis (033.05.631097) sebesar Rp14.974.726.829,00. Transaksi tersebut dicatat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai transfer keluar ATR dan IPDN Jatinangor mencatat sebagai transfer masuk Gedung dan Bangunan. Menu Transfer Keluar/Transfer Masuk pada Aplikasi E-Rekon&LK menyajikan transfer keluar yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun transfer keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.;*

3 *Saldo akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311) sebesar Rp120.287.300,00 yang terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp120.218.000,00 dan IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp69.300,00 yang merupakan Koreksi lebih catat atas kuantitas barang persediaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPR RI;*

4 *Terdapat perbedaan pada rumus perhitungan (Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang)= Beban Penyisihan Piutang LO). Hal ini disebabkan pembentukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA dalam rangka penerapan perlakuan atas beban penyisihan piutang bersaldo minus sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 Unaudited Serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun;*

5 *Terdapat Penjurnalan akun "Belum Di register" yang dipasangkan dengan beban yang disebabkan adanya kesalahan penganggaran, yaitu realisasi belanja barang yang menjadi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, ATB , dan realisasi belanja modal yang menjadi ekstrakomptabel;*

6 *Total Aset 31 Desember 2021 lebih kecil dibandingkan dengan 31 Desember 2020 Audited disebabkan adanya penurunan saldo persediaan sebesar Rp122.458.530.592,00, penurunan saldo aset tetap lainnya sebesar Rp41.211.604.363,00 dan penurunan saldo aset lain-lain sebesar Rp77.519.072.721,00 antara lain disebabkan karena penyelesaian likuidasi satker inaktif bersaldo (SIB);*

7 *Berdasarkan Aplikasi e-Rekon&LK terdapat selisih rekonsiliasi internal sebesar Rp4.004.565.909,00 yang terdapat pada satker Disdukcapil Kab. Labuan Batu pada akun peralatan dan mesin (132111) sebesar Rp85.500.000,00 dan akun akumulasi penyusutan dan peralatan dan mesin (137111) sebesar Rp53.625.000,00, serta satker Dinas Pekerjaan Umum Kab.Boalemo sebesar Rp4.036.740.909,00 pada akun Aset Tetap Renovasi (135111). Kemendagri telah berupaya menyelesaikan permasalahan selisih rekonsiliasi internal dengan melakukan upload data ke Aplikasi e-Rekon&LK masing-masing dua kali akan tetapi belum dapat terselesaikan. Permasalahan tersebut tidak mempengaruhi angka yang disajikan pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2021 Audited karena Rph Saiba telah menyajikan nilai yang seharusnya yaitu nihil;*

8 *Terdapat Jurnal tidak lazirn disebabkan adanya jurnal kesalahan penganggaran, hibah masuk yang belum disahkan, adanya pengesahan hibah langsung, dan adanya belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi ekstrakomptabel;*

9 *Terdapat selisih antara Realisasi belanja pegawai dengan beban pegawai pada Laporan Operasional sebesar Rp8.494.304.293,00 yang disebabkan adanya jurnal balik pengakuan beban pegawai TA 2020 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2021 dan jurnal penyesuaian pengakuan beban pegawai TA 2021 yang dibayarkan dengan DIPA TA 2022;*

10 *Terdapat perbedaan pada rumus perhitungan (realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang) disebabkan antara lain karena adanya realisasi belanja modal lainnya yang menjadi aset tetap, adanya reallsasi belanja modal yang menjadi ekstrakomptabel, realisasi belanja barang yang menjadi aset tetap;*

12 *Terdapat perbedaan antara Beban Penyusutan/Amortisasi dengan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Periode berjalan yang berasal dari mutasi kurang akumulasi penyusutan/amortisasi yang disebabkan adanya transfer keluar, mutasi kurang akumulasi penyusutan/amortisasi yang disebabkan adanya transfer keluar BMN yang dihentikan, mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya hibah keluar, mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya hibah keluar bmn yang dihentikan (semester II Dokumen semester II) , mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya penghapusan, mutasi kurang akumulasi penyusutan/amortisasi yang disebabkan adanya penghapusan BMN yang dihentikan , mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya koreksi pencatatan nilai/kuantitas, mutasi tambah akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya koreksi pencatatan nilai/kuantitas, mutasi tambah akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya reklasifikasi masuk, mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya reklasifikasi keluar, mutasi tambah akumulasi penyusutan/amortisasi yang disebabkan adanya transfer masuk, mutasi tambah akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya koreksi penyusutan karena 225, mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya koreksi penyusutan karena 225, mutasi kurang akumulasi penyusutan/amortisasi yang disebabkan adanya transaksi normalisasi BMN, mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya transaksi normalisasi BMN yang dihentikan, mutasi tambah akumulasi penyusutan/amortisasi yang disebabkan adanya perelehan hasil tindak lanjut normalisasi, mutasi tambah akumulasi amortisasi yang disebabkan adanya kereksi saldo awal, mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya hibah keluar (BMN yang dihentikan), mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya penghapusan BMN yang dihentikan (semester II dekumen semester I), mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya hibah keluar BMN yang dihentikan (semester II dokumen semester I), mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya koreksi pencatatan, jurnal manual SAIBA yang dibentuk sebagai koreksi atas eliminiasi penyusutan semester I Tahun 2021 pada saat dilakukan koreksi pencatatan gedung dan bangunan dimana jurnal kirim Aplikasi SIMAK menambah ekuitas (seharunsya menambah beban penyusutan), mutasi kurang akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya koreksi pencatatan;*

13	*Terdapat perbedaan pada rumus perhitungan (Beban Persediaan = Saldo Awal+ Pembelian - Saldo Akhir) yang berasal dari koreksi kurang yang menjadi menjadi beban penyesuaian nilai persediaan, menjadi pendapatan penyesuaian nilai persediaan, mutasi kurang persediaan yang disebabkan adanya penghapusan lainnya, mutasi kurang persediaan yang disebabkan adanya persediaan rusak/usang, mutasi tambah persediaan yang berasal dari hibah masuk (hibah langsung berupa barang), realisasi belanja barang selain belanja barang persediaan (akun belanja 521113) yang menjadi persediaan, realisasi belanja barang selain belanja barang persediaan (akun belanja 523121) yang menjadi persediaan, mutasi kurang persediaan yang berasal dari transfer keluar, mutasi tambah persediaan yang berasal dari transfer masuk, mutasi kurang persediaan yang berasal dari hibah keluar jenis persediaan barang konsumsi {117111) pada satker TP dukcapil yang dicatat sebagai beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (526311), kesalahan penganggaran diantara akun belanja barang persediaan (realisasi belanja barang persediaan yang seharusnya menjadi beban persediaan namun menjadi beban pemeliharaan), kesalahan penganggaran diantara akun belanja barang persediaan (realisasi belanja barang persediaan yang seharusnya menjadi beban pemeliharaan namun menjadi beban persediaan), kesalahan penganggaran diantara akun belanja barang persediaan (realisasi belanja barang persediaan yang seharusnya menjadi beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat namun menjadi beban persediaan), kesalahan penganggaran diantara akun belanja barang persediaan (realisasi belanja barang persediaan yang seharusnya menjadi beban persediaan namun menjadi beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat), jurnal manual yang dibentuk pada Aplikasi untuk mengeliminasi pengurangan beban persediaan bahan baku dan menambah ekuitas atas transaksi koreksi tambah persediaan karena kesalahan pencatatan TAYL; realisasi belanja barang selain belanja barang persediaan (akun belanja 521111) yang menjadi persediaan dan realisasi belanja barang selain belanja barang persediaan (akun belanja 521211) yang menjadi persediaan.*

Diperiksa oleh:

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II,

I Nengah Sandiyasa, M.Ak
NIP. 19741208 200604 1 001

Jakarta, 25 April 2022

Penelaah,

Asyari Putra, M.Ak
NIP. 19860908 201402 1 002

Mengetahui

Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan,

Sudaryanto, SE, MM
NIP.19640605 199903 1 001

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED